PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN



PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2027

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah Kabupaten Soppeng diselenggarakan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;

b. bahwa untuk mengakomodasi dinamika perkembangan sosiologis masyarakat, kerangka ekonomi daerah, serta menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 dengan akselerasi prioritas pembangunan nasional, diperlukan rencana kerja tahunan yang responsif dan partisipatif;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun;
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah;
    b. menjamin keselarasan pembangunan Daerah dengan kebijakan pembangunan Provinsi dan nasional; dan
    c. mewujudkan pembangunan Daerah yang efektif, efisien, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029

(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
   a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
   b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
(3) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
(5) Penambahan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dan/atau ditampung dalam RKPD perubahan.

Pasal 4

RKPD Tahun 2027 merupakan hasil Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, forum Perangkat Daerah, Musrenbang Daerah, sinkronisasi Musrenbang provinsi dan Musrenbang nasional serta evaluasi hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergisitas antar sektor dan antar wilayah.

Pasal 5

(1) Dokumen RKPD Tahun 2027 terdiri atas :
   a. bab i : pendahuluan;
   b. bab ii : gambaran umum kondisi Daerah;
   c. bab iii : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   d. bab iv : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. bab v : rencana kerja dan pendanaan;
   f. bab vi : kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
   g. bab vii : penutup.
(2) Dokumen RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 Pemerintah Daerah menggunakan dokumen RKPD Tahun 2027 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2027.
(2) RKPD tahun 2027 menjadi pedoman dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Bappelitbangda melakukan sinkronisasi antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2027 dengan Renja Perangkat Daerah tahun 2027.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI SOPPENG,

SUWARDI HASENG

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 6 Juli 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ANDI HAERUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026 NOMOR 11....

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2027 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Tahun 2027 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi instrumen utama dalam mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk jangka waktu satu tahun. Dalam upaya pencapaian target pembangunan daerah, RKPD Tahun 2027 melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, serta mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan mendorong peran aktif masyarakat termasuk kalangan dunia usaha. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

BUPATI SOPPENG,

SUWARDI HASENG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GRAFIK ..... **xxi**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-9
1.4. Maksud dan Tujuan I-11
1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam II-6
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-12
2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II-14
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas II-21
2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-29
2.1.7. Demografi II-30
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-33
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II-33
2.2.2. Kesehatan untuk Semua II-41
2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata II-45
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif II-49
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-50
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-52
2.3. Aspek Daya Saing Daerah II-55
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia II-55
2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi II-58
2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II-69
2.3.4. Transformasi Digital II-71
2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-73
2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-76
2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro II-79
2.4. Aspek Pelayanan Umum II-83
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-83
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial II-86
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-90
2.4.4 Kinerja setiap Urusan Pemerintah Daerah II-91
2.4.5 Standar Pelayanan Minimal II-212
2.4.5.1 Bidang Pendidikan II-212
2.4.5.2 Bidang Kesehatan II-215
2.4.5.3 Bidang Pekerjaan Umum II-220
2.4.5.4 Bidang Perumahan Rakyat II-220

2.4.5.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-221
2.4.5.6 Bidang Sosial II-222
2.5. Capaian Indikator Pembangunan Daerah II-225
2.5.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Soppeng II-225
2.5.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-229
2.5.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ TPB / SDGs II-245
2.2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 ..... II-254
2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah II-265
2.6.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-265
2.6.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah II-272
2.7. Isu Strategis II-279
2.7.1. Identifikasi Isu Strategis Kabupaten Soppeng dari Masalah Pembangunan Daerah II-279
2.8. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD II-317
2.9. Inovasi Daerah II-319

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2025 ..... III-3
3.1.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah III-19
3.1.3. Arah Kebijakan dan Target Ekonomi Makro Tahun 2027 ..... III-29
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-36
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-36
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-40
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-48

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-2
4.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional IV-2
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan IV-3
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 ..... IV-7
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027 ..... IV-15
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027 ..... IV-15
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 ..... IV-16
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 ..... IV-16
4.2.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2027 ..... IV-23
4.2.5. Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 ..... IV-41
4.2.6. Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2027 ..... IV-49
4.2.7. Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Kewilayahan Tahun 2027 ..... IV-68
4.2.8. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2027 ..... IV-70

4.2.9. Keselarasan Dukungan Program Kabupaten terhadap Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) IV-90
4.2.10. Keselarasan Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kabupaten terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) IV-93
4.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Soppeng IV-100

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5. 1 Kerangka Pendanaan Tahun 2027 ..... V-1
5. 2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 ..... V-2
5. 3 Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2027 ..... V-15

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan VI-1
6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-2
6.3. Indikator Utama Pembangunan VI-3
6.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) VI-23
6.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) VI-25

BAB VII PENUTUP VII-1
7.1. Kaidah Pelaksanaan VII-1
7.2. Kesimpulan VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 - Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lain I-9
Gambar 1.2 - Alur Perencanaan dan Penganggaran I-10

Gambar 2.1 - Peta Administrasi Kabupaten Soppeng..... II-1
Gambar 2.2 - Peta Topografi Kabupaten Soppeng II-2
Gambar 2.3 - Peta Jenis Tanah Kabupaten..... II-3
Gambar 2.4 - Peta Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng..... II-4
Gambar 2.5 - Potensi Pertanian di Kabupaten Soppeng II-7
Gambar 2.6 - Perkembangan Indeks Harga Konsumen Bulan Januari-Desember Tahun 2025 Merujuk ke Kabupaten Wajo (Sister City)..... II-81

Gambar 4.1 - Prioritas Pembangunan RKP tahun 2027 ..... IV-2
Gambar 4.2 - Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2027 ..... IV-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 - Potensi Wisata Alam di Kabupaten Soppeng II-8
Tabel 2. 2 - Potensi Wisata Sejarah dan Budaya di Kabupaten Soppeng II-8
Tabel 2. 3 - Potensi Wisata Buatan dan Minat Khusus di Kabupaten Soppeng II-10
Tabel 2. 4 - Distribusi Daya Dukung Penyedia Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2030 ..... II-13
Tabel 2. 5 - Distribusi Status Ketersediaan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2030..... II-13
Tabel 2. 6 - Distribusi Daya Dukung Penyedia Air Kabupaten Soppeng Tahun 2030..... II-14
Tabel 2. 7 - Distribusi Status Daya Dukung Penyedia Air Kabupaten Soppeng Tahun 2030 ..... II-14
Tabel 2. 8 - Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-15
Tabel 2. 9 - Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2021-2025 ..... II-16
Tabel 2. 10 - Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2021-2025 ..... II-18
Tabel 2. 11 - Kondisi Kapasitas Air Baku di Kabupaten Soppeng II-19
Tabel 2. 12 - Kondisi Alokasi Air Baku di Kabupaten Soppeng II-19
Tabel 2. 13 - Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2021-2025..... II-19
Tabel 2. 14 - Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Perpipaan di Kabupaten Soppeng Tahun 2024 dan 2025 ..... II-20
Tabel 2. 15 - Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-21
Tabel 2. 16 - Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2021-2025 ..... II-22
Tabel 2. 17 - Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2021-2025 . II-22
Tabel 2. 18 - Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2021-2025..... II-23
Tabel 2. 19 - Produksi Perikanan Tahun 2021-2025 ..... II-26
Tabel 2. 20 - Konsumsi Ikan Tahun 2021-2025 ..... II-26
Tabel 2. 21 - Timbulan Sampah yang Ditangani Tahun 2020-2024 ..... II-27
Tabel 2. 22 - Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2024 (%)..... II-28
Tabel 2. 23 - Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng..... II-32
Tabel 2. 24 - Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Berdasarkan Jenis Kelamin..... II-33
Tabel 2. 25 - Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Berdasarkan Kelompok Umur II-33
Tabel 2. 26 - Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2021-2025..... II-35
Tabel 2. 27 - Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2021-2025..... II-36

Tabel 2. 28 - Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (Persen) II-36
Tabel 2. 29 - Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2021-2025..... II-41
Tabel 2. 30 - Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2021-2025 ..... II-42
Tabel 2. 31 - Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025..... II-42
Tabel 2. 32 – Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi Tahun 2021-2024 ..... II-46
Tabel 2. 33 – Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca Tahun 2021-2024..... II-47
Tabel 2. 34 - Penyelenggaraan Festival, Seni, Budaya dan Adat Tahun 2019-2023..... II-52
Tabel 2. 35 - Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2021-2025..... II-55
Tabel 2. 36 - Cakupan Pembinaan Olahraga 2021-2025 ..... II-55
Tabel 2. 37 - Kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020-2024 ..... II-59
Tabel 2. 38 - Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2021-2025 ..... II-59
Tabel 2. 39 - Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2021-2025 ..... II-59
Tabel 2. 40 - Kontribusi Produksi Kelompok Tani Terhadap PDRB Tahun 2021-2025..... II-60
Tabel 2. 41 - Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2019-2023 ..... II-60
Tabel 2. 42 - Kontribusi PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun 2021-2025..... II-61
Tabel 2. 43 - Pertumbuhan Industri Tahun 2021-2025..... II-62
Tabel 2. 44 - Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2021-2025..... II-63
Tabel 2. 45 - Indeks Ekonomi Hijau dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Soppeng Tahun 2023..... II-69
Tabel 2. 46 - Indeks Ekonomi Biru dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Soppeng Tahun 2023..... II-69
Tabel 2. 47 - Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Tahun 2021-2025..... II-72
Tabel 2. 48 - Nilai Indeks Masyarakat Digital beserta Pilar Pembantuknya di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2025..... II-72
Tabel 2. 49 - Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2021-2025 ..... II-74
Tabel 2. 50 - Cakupan Bina Kelompok Pedagang Tahun 2021-2025 ..... II-75
Tabel 2. 52 - Jumlah RLH dan RTLH Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-76
Tabel 2. 51 - Capaian Rumah Layak Huni Kabupaten/Kota Menurut Komponen Kelayakan Tahun 2025 ..... II-77
Tabel 2. 53 - Rumah tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal (Backlog Kepemilikan) Tahun 2021-2025..... II-77
Tabel 2. 52 - Persentase Desa Berstatus Swasembada Tahun 2021-2025 .. II-79

Tabel 2. 53 - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021-2024 ..... II-82
Tabel 2. 54 - Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2025 ..... II-83
Tabel 2. 55 - Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2021-2025 ..... II-89
Tabel 2. 56 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Soppeng Tahun 2025 ..... II-92
Tabel 2. 57 - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Soppeng Berdasar Unsur Tahun 2025 ..... II-93
Tabel 2. 58 - Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2021-2025 ..... II-94
Tabel 2. 59 - Angka Partisipasi Kasar SD/MI paket A Tahun 2021-2025 ... II-95
Tabel 2. 60 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B Tahun 2021-2025 ..... II-95
Tabel 2. 61 - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Tahun 2021-2025 ..... II-96
Tabel 2. 62 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2021-2025 ..... II-96
Tabel 2. 63 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Tahun 2021-2025 ..... II-96
Tabel 2. 64 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Tahun 2021-2025 ..... II-97
Tabel 2. 65 - Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI Tahun 2021-2025 ..... II-97
Tabel 2. 66 - Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs Tahun 2021-2025 ..... II-98
Tabel 2. 67 - Angka Kelulusan (AL) SD/MI Tahun 2021-2025 ..... II-98
Tabel 2. 68 - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Tahun 2021-2025 ..... II-98
Tabel 2. 69 - Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2021-2025 ..... II-99
Tabel 2. 70 - Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2021-2025 ..... II-99
Tabel 2. 71 - Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Tahun 2021-2025 ..... II-100
Tabel 2. 72 - Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2021-2025 ..... II-100
Tabel 2. 73 - Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2021-2025 ..... II-101
Tabel 2. 74 - Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2021-2025 ..... II-101
Tabel 2. 75 - Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2021-2025 ..... II-101
Tabel 2. 76 - Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2021-2025 ..... II-102
Tabel 2. 77 - Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-102
Tabel 2. 78 - Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-103
Tabel 2. 79 - Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-103

Tabel 2. 80 - Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025 ..... II-104
Tabel 2. 81 - Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-104
Tabel 2. 82 - Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-105
Tabel 2. 83 - Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025 ..... II-105
Tabel 2. 84 - Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2021-2025 ..... II-106
Tabel 2. 85 - Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2021-2025 ..... II-106
Tabel 2. 86 - Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2021-2025 ..... II-107
Tabel 2. 87 - Rasio Dokter per satuan Penduduk Tahun 2021-2025 ..... II-107
Tabel 2. 88 - Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2021-2025 ..... II-108
Tabel 2. 89 - Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2021-2025 ..... II-108
Tabel 2. 90 - Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2021-2025 ..... II-109
Tabel 2. 91 - Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Tahun 2021-2025 ..... II-109
Tabel 2. 92 - Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Tahun 2021-2025 ..... II-110
Tabel 2. 93 - Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Tahun 2021-2025 ..... II-110
Tabel 2. 94 - Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Tahun 2021-2025 ..... II-111
Tabel 2. 95 - Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2021-2025 ..... II-111
Tabel 2. 96 - Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2021-2025 ..... II-112
Tabel 2. 97 - Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis per 100.000 Penduduk Tahun 2021-2025 ..... II-112
Tabel 2. 98 - Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS Tahun 2021-2025 ..... II-113
Tabel 2. 99 - Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2021-2025 ..... II-113
Tabel 2. 100 - Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-114
Tabel 2. 101 - Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-114
Tabel 2. 102 - Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Tahun 2021-2025 ..... II-115
Tabel 2. 103 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2021-2025 ..... II-116
Tabel 2. 104 - Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-117

Tabel 2. 105 - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2021-2025..... II-118
Tabel 2. 106 - Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-118
Tabel 2. 107 - Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-119
Tabel 2. 108 - Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-119
Tabel 2. 109 - Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-120
Tabel 2. 110 - Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-120
Tabel 2. 111 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2020-2024..... II-120
Tabel 2. 112 - Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Tahun 2021-2025..... II-121
Tabel 2. 113 - Proporsi Panjang Jaringan Jalan Tahun 2021-2025 ..... II-122
Tabel 2. 114 - Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2021-2025..... II-123
Tabel 2. 115 - Persentase Kawasan Permukiman yang Belum dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Tahun 2019-2023..... II-123
Tabel 2. 116 - Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40Km/Jam) Tahun 2021-2025 ..... II-123
Tabel 2. 117 - Jalan yang Memiliki Trotoar Dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Tahun 2019-2023..... II-124
Tabel 2. 118 - Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2019-2023..... II-124
Tabel 2. 119 - Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun Tahun 2019-2023..... II-124
Tabel 2. 120 - Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2021-2025... II-125
Tabel 2. 121 - Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2020-2024..... II-125
Tabel 2. 122 - Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Tahun 2019-2023..... II-126
Tabel 2. 123 - Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2019-2023..... II-126
Tabel 2. 124 - Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2021-2025..... II-126
Tabel 2. 125 - Luas RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Tahun 2021-2025 ..... II-127
Tabel 2. 126 - Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2020-2024..... II-127
Tabel 2. 127 - Rumah Layak Huni Tahun 2021-2025 ..... II-128
Tabel 2. 128 - Persentase Penurunan RTLH Rumah Tangga Miskin Tahun 2021-2025..... II-128
Tabel 2. 129 - Pemukiman Layak Huni Tahun 2021-2025 ..... II-128
Tabel 2. 130 - Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Tahun 2021-2025..... II-129
Tabel 2. 131 - Pemukiman yang Tertata Tahun 2021-2025..... II-129
Tabel 2. 132 - Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2021-2025 ..... II-129
Tabel 2. 133 - Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Tahun 2021-2025..... II-130

Tabel 2. 134 - Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Tahun 2021-2025 ..... II-130
Tabel 2. 135 - Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tahun 2021-2025 ..... II-130
Tabel 2. 136 - Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2021-2025 ..... II-131
Tabel 2. 137 - Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025 ..... II-131
Tabel 2. 138 - Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2021-2025 ..... II-132
Tabel 2. 139 - Persentase Penegakan PERDA Tahun 2021-2025 ..... II-132
Tabel 2. 140 - Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2020-2024 ..... II-134
Tabel 2. 141 - Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2020-2024 ..... II-134
Tabel 2. 142 - Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Jenis Lainnya Tahun 2020-2024 ..... II-134
Tabel 2. 143 - Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Tahun 2020-2024. II-135
Tabel 2. 144 - Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024 ..... II-135
Tabel 2. 145 - Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2020-2024... II-136
Tabel 2. 146 - Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Tahun 2020-2024 ..... II-136
Tabel 2. 147 - Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2020-2024 ..... II-136
Tabel 2. 148 - Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2021-2025 ..... II-137
Tabel 2. 149 - Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2021-2025 ..... II-138
Tabel 2. 150 - Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2021-2025 ..... II-138
Tabel 2. 151 - Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2021-2025 ..... II-139
Tabel 2. 152 - Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2021-2025 ..... II-139
Tabel 2. 153 - Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2021-2025 ..... II-140
Tabel 2. 154 - Rasio KDRT Tahun 2020-2024 ..... II-140
Tabel 2. 155 - Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2024. II-141

Tabel 2. 156 - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2020-2024 ..... II-141
Tabel 2. 157 - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Tahun 2020-2024..... II-142
Tabel 2. 158 - Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2020-2024 ..... II-142
Tabel 2. 159 - Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus- Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2020-2024 ..... II-143
Tabel 2. 160 - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2020-2024 ..... II-143
Tabel 2. 161 - Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2020-2024 ..... II-144
Tabel 2. 162 - Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2020-2024 ..... II-144
Tabel 2. 163 - Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Tahun 2020-2024 II-144
Tabel 2. 164 - Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Tahun 2020-2024 ..... II-145
Tabel 2. 165 - Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Tahun 2020-2024 ..... II-145
Tabel 2. 166 - Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi Tahun 2019-2023 ..... II-145
Tabel 2. 167 - Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun 2020-2024 ..... II-146
Tabel 2. 168 - Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian Tahun 2021-2025 ..... II-146
Tabel 2. 169 - Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2021-2025 ..... II-146
Tabel 2. 170 - Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2021-2025..... II-147
Tabel 2. 171 - Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2021-2025..... II-147
Tabel 2. 172 - Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2021-2025 ..... II-148
Tabel 2. 173 - Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2021-2025..... II-149
Tabel 2. 174 - Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2021-2025..... II-149
Tabel 2. 175 - Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2021-2025 ..... II-149
Tabel 2. 176 - Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025.. II-150
Tabel 2. 177 - Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2021-2025 ..... II-150
Tabel 2. 178 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tahun 2021-2025 ..... II-150
Tabel 2. 179 - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Tahun 2021-2025 ..... II-151
Tabel 2. 180 - Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2025 ..... II-151
Tabel 2. 181 - Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025 ..... II-151
Tabel 2. 182 - Cakupan Area Pelayanan Tahun 2021-2025 ..... II-152
Tabel 2. 183 - Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2020-2024 ..... II-153
Tabel 2. 184 - Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025 ..... II-153
Tabel 2. 185 - Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021-2025 ..... II-154
Tabel 2. 186 - Penduduk ber-KTP Per-Satuan Penduduk Tahun 2021-2025 ..... II-154
Tabel 2. 187 - Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2021-2025 ..... II-154
Tabel 2. 188 - Rasio Pasangan ber-Akte Nikah Tahun 2021-2025 ..... II-155
Tabel 2. 189 - Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Soppeng Tahun 2025 ..... II-155
Tabel 2. 190 - Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2021-2025 ..... II-156
Tabel 2. 191 - Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2021-2025 ..... II-157
Tabel 2. 192 - Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik Tahun 2021-2025 ..... II-157
Tabel 2. 193 - Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pembinaan Masyarakat (LPM) Tahun 2021-2025 ..... II-158
Tabel 2. 194 - Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2021-2025 ..... II-158
Tabel 2. 195 - Persentase LPM Aktif Tahun 2021-2025 ..... II-158
Tabel 2. 196 - Persentase LPM Berprestasi Tahun 2021-2025 ..... II-159
Tabel 2. 197 - Persentase PKK Aktif Tahun 2021-2025 ..... II-159
Tabel 2. 198 - Persentase Posyandu Aktif Tahun 2021-2025 ..... II-160
Tabel 2. 199 - Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2025 ..... II-160
Tabel 2. 200 - Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2025 ..... II-160
Tabel 2. 201 - Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 ..... II-161
Tabel 2. 202 - Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Tahun 2020-2024 ..... II-161
Tabel 2. 203 - Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2020-2024 ..... II-162
Tabel 2. 204 - Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Tahun 2020-2024 ..... II-163
Tabel 2. 205 - Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informasi yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Tahun 2020-2024 ..... II-163
Tabel 2. 206 - Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024..... II-164
Tabel 2. 207 - Rasio Akseptor KB di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024..... II-164
Tabel 2. 208 - Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun 2020-2024 ..... II-165
Tabel 2. 209 - Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Asfr 15-19) Tahun 2019-2023..... II-165
Tabel 2. 210 - Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun, Tahun 2020-2024 ..... II-165
Tabel 2. 211 - Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2020-2024..... II-166
Tabel 2. 212 - Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2020-2024..... II-167
Tabel 2. 213 - Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2020-2024 ..... II-167
Tabel 2. 214 - Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB Tahun 2020-2024..... II-168
Tabel 2. 215 - Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB Tahun 2020-2024..... II-168
Tabel 2. 216 - Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2020-2024..... II-169
Tabel 2. 217 - Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Tahun 2020-2024 ..... II-169
Tabel 2. 218 - Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2020-2024 ..... II-169
Tabel 2. 219 - Cakupan PKB dan PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2020-2024..... II-170
Tabel 2. 220 - Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri Tahun 2020-2024..... II-171
Tabel 2. 221 - Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2020-2024 ..... II-171
Tabel 2. 222 - Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2020-2024..... II-171
Tabel 2. 223 - Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Tahun 2020-2024..... II-172
Tabel 2. 224 - Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Tahun 2020-2024 ..... II-173

Tabel 2. 225 - Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Tahun 2020-2024 ..... II-173
Tabel 2. 226 - Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023..... II-173
Tabel 2. 227 - Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Tahun 2020-2024 ..... II-174
Tabel 2. 228 - Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024..... II-174
Tabel 2. 229 - Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2019-2023..... II-175
Tabel 2. 230 - Rasio Izin Trayek Tahun 2020-2024 ..... II-175
Tabel 2. 231 - Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2019-2023 ..... II-175
Tabel 2. 232 - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2019-2023..... II-176
Tabel 2. 233 - Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2019-2023.... II-176
Tabel 2. 234 - Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Tahun 2019-2023..... II-176
Tabel 2. 235 - Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2019-2023 ..... II-177
Tabel 2. 236 - Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2021-2025..... II-177
Tabel 2. 237 - Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2021-2025..... II-177
Tabel 2. 238 - Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2021-2025..... II-178
Tabel 2. 239 - Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Tahun 2021-2025..... II-178
Tabel 2. 240 - Persentase Koperasi Aktif Tahun 2021-2025 ..... II-178
Tabel 2. 241 - Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif Tahun 2021-2025 ... II-179
Tabel 2. 242 - Persentase BPR/LKM Aktif Tahun 2021-2025 ..... II-180
Tabel 2. 243 - Data Bank Perkreditan Rakyat (BPR) / Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-180
Tabel 2. 244 - Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021-2025..... II-181
Tabel 2. 245 - Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-181
Tabel 2. 246 - Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun 2021-2025..... 182
Tabel 2. 247 - Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Tahun 2021-2025..... II-182
Tabel 2. 248 - Persentase Wirausaha Muda Tahun 2021-2025 ..... II-183
Tabel 2. 249 - Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat Tahun 2021-2025 ..... II-183
Tabel 2. 250 - Cakupan Pembinaan Atlet Muda Tahun 2021-2025 ..... II-183
Tabel 2. 251 - Jumlah Atlet yang Berprestasi Tahun 2021-2025..... II-184
Tabel 2. 252 - Jumlah Prestasi Olahraga Tahun 2021-2025 ..... II-184
Tabel 2. 253 - Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi Tahun 2021-2025..... II-185
Tabel 2. 254 - Buku ”Kabupaten Dalam Angka” Tahun 2021-2025..... II-185
Tabel 2. 255 - Buku ”PDRB” Tahun 2021-2025 ..... II-185

Tabel 2. 256 - Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2025 ..... II-186
Tabel 2. 257 - Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk Tahun 2019-2023 ..... II-186
Tabel 2. 258 - Capaian Perkembangan Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023 ..... II-187
Tabel 2. 259 - Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2019-2023 ..... II-187
Tabel 2. 260 - Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-188
Tabel 2. 261 - Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-188
Tabel 2. 262 - Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-189
Tabel 2. 263 - Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-189
Tabel 2. 264 - Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-190
Tabel 2. 265 - Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2021-2025 ..... II-190
Tabel 2. 266 - Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-191
Tabel 2. 267 - Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2021-2025. II-191
Tabel 2. 268 - Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2021-2025 ..... II-191
Tabel 2. 269 - Rata-Rata Kunjungan Wisata dalam Satu Tahun, pada Tahun 2021-2025 ..... II-192
Tabel 2. 270 - PAD Sektor Pariwisata Tahun 2021-2025 ..... II-192
Tabel 2. 271 - Rincian Penerimaan Sektor Kepariwisataan Tahun 2019-2023 ..... II-193
Tabel 2. 272 - Bina Kelompok Petani Tahun 2021-2025 ..... II-193
Tabel 2. 273 - Gambaran Produksi Hasil Pertanian Tahun 2021-2025..... II-194
Tabel 2. 274 - Gambaran Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2021-2025. II-194
Tabel 2. 275 - Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2021-2025 ..... II-195
Tabel 2. 276 - Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2021-2025..... II-196
Tabel 2. 277 - Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2021-2025 II-197
Tabel 2. 278 - Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2021-2025 ..... II-198
Tabel 2. 279 - Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Tahun 2021-2025 ..... II-198
Tabel 2. 280 - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2021-2025..... II-199
Tabel 2. 281 - Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tahun 2021-2025..... II-199
Tabel 2. 282 - Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2021-2025..... II-199
Tabel 2. 283 - Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Tahun 2021-2025 ..... II-200

Tabel 2. 284 - Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2021-2025 ..... II-200
Tabel 2. 285 - Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Tahun 2020-2024 ..... II-200
Tabel 2. 286 - Persentase SiLPA Tahun 2021-2025 ..... II-201
Tabel 2. 287 - Persentase SiLPA Terhadap APBD Tahun 2021-2025 ..... II-201
Tabel 2. 288 - Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana Tahun 2021-2025 ..... II-202
Tabel 2. 289 - Persentase Belanja Pendidikan (20%) Tahun 2021-2025 ... II-203
Tabel 2. 290 - Persentase Belanja Kesehatan (10%) Tahun 2021-2025 .... II-203
Tabel 2. 291 - Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2021-2025 ..... II-204
Tabel 2. 292 - Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 2021-2025 .. II-204
Tabel 2. 293 - Penetapan APBD Tahun 2021-2025 ..... II-205
Tabel 2. 294 - Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2025 ..... II-205
Tabel 2. 295 - Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2021-2025 ..... II-206
Tabel 2. 296 - Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2021-2025 ..... II-206
Tabel 2. 297 - Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Tahun 2021-2025 ..... II-207
Tabel 2. 298 - Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Tahun 2021-2025 ..... II-207
Tabel 2. 299 - Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Tahun 2021-2025 ..... II-208
Tabel 2. 300 - Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2021-2025 ..... II-208
Tabel 2. 301 - Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2021-2025 ..... II-208
Tabel 2. 302 - Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Tahun 2021-2025 ..... II-209
Tabel 2. 303 - Persentase Tindak Lanjut Temuan Tahun 2021-2025 ..... II-209
Tabel 2. 304 - Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2021-2025..... II-210
Tabel 2. 305 - Jumlah Temuan BPK Tahun 2021-2025..... II-210
Tabel 2. 306 - Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Tahun 2021-2025 ..... II-210
Tabel 2. 307 - Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2021-2025 .... II-211
Tabel 2. 308 - Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2021-2025 ..... II-211
Tabel 2.309 - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2021-2025..... II-213
Tabel 2.310 - Pendidikan Dasar Tahun 2021-2025 ..... II-214

Tabel 2.311 - Pendidikan Kesetaraan Tahun 2021-2025 ..... II-214
Tabel 2.312 - Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2021-2025 ..... II-215
Tabel 2.313 - Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021-2025 II-220
Tabel 2.314 - Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021-2025 ..... II-220
Tabel 2.315 - Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2025 ..... II-221
Tabel 2.316 - Bidang Sosial Tahun 2021-2025..... II-222
Tabel 2.317 - Hasil Analisis Capaian Kinerja SPM Tahun 2021-2025..... II-223
Tabel 2.318 - Target dan Capaian IKU Kabupaten Soppeng Tahun 2025 . II-226
Tabel 2.319 - Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-230
Tabel 2.321 - Realisasi Capaian TPB yang Dilaksanakan II-245
Tabel 2.322 - Realisasi Capaian TPB yang Belum Dilaksanakan II-251
Tabel 2.323 - Kategori Penilaian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran..... II-255
Tabel 2.324 - Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 ..... II-255
Tabel 2.325 - Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Ada dalam APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2025.... II-256
Tabel 2.326 - Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Soppeng Tahun 2025 ..... II-257
Tabel 2.327 - Rekapitulasi Capaian Pendanaan Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025..... II-260
Tabel 2.328 - Rekapitulasi Capaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 ..... II-263
Tabel 2.329 - Sinkronisasi Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas serta Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027..... II-265

Tabel 3.1 - Capaian Makro Ekonomi Tahun 2021-2025 ..... III-3
Tabel 3.2 - Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha (Miliar Rupiah), 2021-2025.. III-5
Tabel 3.3 - Produk Domestik Regional Bruto Soppeng III-6
Tabel 3.4 - Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2021-2025 (Persen) III-7
Tabel 3.5 - Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... III-10
Tabel 3.6 - Jumlah Pekerja berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2025 ... III-16
Tabel 3.7 - Keselarasan Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2027..... III-23
Tabel 3.8 - Capaian IPM Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... III-30
Tabel 3.9 - Capaian Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 .. III-31
Tabel 3.10 - Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... III-32
Tabel 3.11 - Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... III-33

Tabel 3.12 - Capaian PDRB Perkapita Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... III-34
Tabel 3.13 - Capaian Gini Ratio Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ... III-34
Tabel 3.14 - Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2027..... III-36
Tabel 3.15 - Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023-2027 ..... III-39
Tabel 3.16 - Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Soppeng . III-44
Tabel 3.17 - Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2027 ..... III-46
Tabel 3.18 - Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2027 ..... III-47
Tabel 3.19 - Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng, Tahun 2024-2027 ..... III-49

Tabel 4.1 - Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Target Kinerja Tahun 2027..... IV-5
Tabel 4.2 - Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 pada Tahap Pertama di Tahun 2025-2029 ..... IV-7
Tabel 4.3 - Penjelasan Visi sesuai RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 ..... IV-11
Tabel 4.4 - Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 ..... IV-12
Tabel 4.5 - Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 ..... IV-13
Tabel 4.6 - Sinergitas Prioritas, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2027 ..... IV-17
Tabel 4.7 - Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 ..... IV-20
Tabel 4.8 - Hubungan Permasalahan Pembangunan daerah dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 ..... IV-23
Tabel 4.9 - Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 ..... IV-25
Tabel 4.10 - Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 ..... IV-38
Tabel 4.11 - Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Soppeng dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 dan Tema RKP Nasional Tahun 2027..... IV-42
Tabel 4.12 - Keselarasan Tujuan/Sasaran RKPD Kabupaten Soppeng dengan RKPD Sulawesi Selatan Tahun 2027 terhadap Sasaran Utama RKP Nasional Tahun 2027..... IV-44
Tabel 4.13 - Keselarasan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 ..... IV-45
Tabel 4.14 - Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng dengan Prioritas Nasional Tahun 2027..... IV-46
Tabel 4.15 - Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah Tahun 2027 ..... IV-48

Tabel 4.16 - Outcome Prioritas, Program dan Sub Kegiatan Hasil Kesepakatan Rakoretekrenbang Tahun Perencanaan 2027 (Bidang Urusan) IV-50
Tabel 4.17 - Outcome Prioritas, Program dan Sub Kegiatan Hasil Kesepakatan Rakoretekrenbang Tahun Perencanaan 2027 (Bidang Tematik) IV-60
Tabel 4.18 - Highlight Lokasi Prioritas Nasional pada Kawasan Pembangunan Watampone Tahun 2027 ..... IV-68
Tabel 4.19 - Program Prioritas Kabupaten Soppeng Tahun 2027 ..... IV-71
Tabel 4.20 - Dukungan Program Kabupaten Soppeng terhadap Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027..... IV-83
Tabel 4.21 - Keselarasan Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kabupaten Terhadap PKPN Tahun 2027 ..... IV-90
Tabel 4.22 - Keselarasan Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kabupaten Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Tahun 2027..... IV-93
Tabel 4.23 - Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2027..... IV-102

Tabel 5.1 - Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2027..... V-1
Tabel 5.2 - Rencana Alokasi Anggaran berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 ..... V-3
Tabel 5.3 - Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 ..... V-17

Tabel 6.1 - Indikator Makro Kabupaten Soppeng Tahun 2027 ..... VI-1
Tabel 6.2 - Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Soppeng Tahun 2027 ..... VI-2
Tabel 6.3 - Capaian dan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2027..... VI-3
Tabel 6.4 - Capaian dan Target Indikator Kinerja SPM Kabupaten Soppeng Tahun 2027..... VI-23
Tabel 6.5 - Target Indikator Kinerja SDGs/TPB Kabupaten Soppeng Tahun 2027 ..... VI-25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 - Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-15
Grafik 2.2 - Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-16
Grafik 2.3 - Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (%) 17
Grafik 2.4 - Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman %) Tahun 2024 . II-17
Grafik 2.5 - Rumah Tangga yang Pernah Melakukan Penyedotan Lumpur Tinja dalam Kurun Waktu 5 Tahun terakhir Tahun 2024..... II-18
Grafik 2.6 - Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman Tahun 2024..... II-20
Grafik 2.7 - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2024 ..... II-21
Grafik 2.8 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-21
Grafik 2.9 - Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-23
Grafik 2.10 - Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-24
Grafik 2.11 - Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-24
Grafik 2.12 - Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-25
Grafik 2.13 - Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-26
Grafik 2.14 - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Tahun 2021-2024 ..... II-28
Grafik 2.15 - Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Dasar Pengumpulan Sampah (%) Tahun 2021-2023..... II-28
Grafik 2.16 - Indeks Risiko Bencana Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-29
Grafik 2.17 - Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton Co2 eq) Tahun 2021-2025..... II-29
Grafik 2.18 - Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ... II-30
Grafik 2.19 - Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-31
Grafik 2.20 - Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025. II-31
Grafik 2.21 - Kepadatan Penduduk Tahun 2021-2025..... II-32
Grafik 2.22 - Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-33
Grafik 2.23 - Tingkat Kemiskinan Kabupaten Soppeng, ProvinsiSulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025..... II-34
Grafik 2.24 - PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), Tahun 2021-2025 ..... II-37
Grafik 2.25 - Rasio Gini Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-38

Grafik 2.26 - Tingkat Pengangguran Terbuka di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng II-39
Grafik 2.27 - IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2021-2025 ..... II-39
Grafik 2.28 - IPM Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-40
Grafik 2.29 - Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah) Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dan Daerah Sekitar Tahun 2021-2025 ..... II-40
Grafik 2.30 - Usia Harapan Hidup di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-41
Grafik 2.31 - Diagram Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025 ..... II-43
Grafik 2.32 - Prevalensi Stunting Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 .. II-43
Grafik 2.33 - Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Tahun 2021-2025 ..... II-44
Grafik 2.34 - Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis % (Treatment Success Rate) Tahun 2021-2025 ..... II-44
Grafik 2.35 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2021-2025 45
Grafik 2.36 - Indeks Kesehatan Tahun 2021-2025 ..... II-45
Grafik 2.37 - Indeks Pendidikan Tahun 2021-2025 ..... II-46
Grafik 2.38 - Literasi Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-47
Grafik 2.39 - Numerasi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 ..... II-48
Grafik 2.40 - Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi-Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-48
Grafik 2.41 - Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-49
Grafik 2.42 - Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024 ..... II-49
Grafik 2.43 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2025 ..... II-50
Grafik 2.44 - Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2019-2023 ..... II-51
Grafik 2.45 - Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan /Fasilitasi Tahun 2020-2024 ..... II-51
Grafik 2.46 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023 ..... II-52
Grafik 2.47 - Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024 ..... II-53
Grafik 2.48 - Indeks Ketimpangan Gender di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-53
Grafik 2.49 - Indeks Pembangunan Gender (menggunakan UHH hasil SP2020 LF) di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-54
Grafik 2.50 - Indeks Pemberdayaan Gender di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 ..... II-54

Grafik 2.51 - Jumlah Penduduk <15 Tahun - > 65 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-56
Grafik 2.52 - Jumlah Penduduk <15 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-56
Grafik 2.53 - Jumlah Penduduk > 65 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-57
Grafik 2.54 - Rasio Ketergantungan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-58
Grafik 2.55 - Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2021-2025..... II-58
Grafik 2.56 - Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2021-2025..... II-61
Grafik 2.57 - Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-64
Grafik 2.58 - Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2021-2025..... II-64
Grafik 2.59 - Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun 2021-2025 ..... II-65
Grafik 2.60 - Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025..... II-65
Grafik 2.61 - Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-66
Grafik 2.62 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-66
Grafik 2.63 - Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-67
Grafik 2.64 - Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-68
Grafik 2.65 - Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-68
Grafik 2.66 - Kualitas Air Permukaan (BOD) Tahun 2023-2024..... II-70
Grafik 2.67 - Kualitas Udara (No2) Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 II-70
Grafik 2.68 - Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-71
Grafik 2.69 - Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Tahun 2021-2025 ..... II-71
Grafik 2.70 - Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-73
Grafik 2.71 - Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Soppeng Terhadap Provinsi Tahun 2021-2025 ..... II-76
Grafik 2.75 - Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-78
Grafik 2.76 - Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024..... II-79
Grafik 2.77 - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Tahun 2021-2025..... II-80
Grafik 2.78 - Persentase PAD Terhadap APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-80
Grafik 2.79 - Perbandingan Inflasi Kabupaten Soppeng dengan Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021–2025 ..... II-82

Grafik 2.80 - Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2025 ..... II-83
Grafik 2.81 - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2025 ..... II-84
Grafik 2.82 - Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-84
Grafik 2.83 - Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-85
Grafik 2.84 - Indeks Maturitas Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-86
Grafik 2.85 - Nilai Akuntabilitas Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... II-86
Grafik 2.86 - Persentase Gangguan Tantribum yang dapat Diselesaikan Tahun 2021-2025 ..... II-87
Grafik 2.87 - Persentase PERDA dan PERKADA yang Ditegakkan Tahun 2021-2025 ..... II-87
Grafik 2.88 - Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani Tahun 2021-2025 ..... II-88
Grafik 2.89 - Persentase Masyarakat yang Paham Terkait Kewaspadaan Dini Daerah Tahun 2021-2023 ..... II-88
Grafik 2.90 - Persentase Masyarakat yang Paham Terkait Kewaspadaan Dini Daerah Tahun 2021-2025 ..... II-90
Grafik 2.91 - Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2025 ..... II-91
Grafik 2.92 - Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Soppeng Tahun 2025 ..... II-93
Grafik 2.93 - IKM Kabupaten Soppeng Tahun 2025 ..... II-94
Grafik 2.94 - Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025 ..... II-104
Grafik 2.95 - Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025 ..... II-105
Grafik 2.96 - Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2021-2025 ..... II-122
Grafik 2.97 - Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan II-133
Grafik 2.98 - Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Tahun 2021-2024 ..... II-137
Grafik 2.99 - Usaha Mikro II-181
Grafik 2.100 - Sentra Usaha Industri II-195
Grafik 2.101 - Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025 ..... II-202
Grafik 2.102 - Persentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Soppeng II-254

Grafik 3.1 - Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-sel dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... III-8
Grafik 3.2 - Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi III-8

Grafik 3.3 - Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ..... III-9
Grafik 3.4 - Perbandingan Inflasi Nasional, ... III-11
Grafik 3.5 - PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha, 2021-2025 (Juta Rupiah) III-12
Grafik 3.6 - Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng dan Wilayah Sekitar, 2021-2025 ..... III-12
Grafik 3.7 - Perbandingan Indeks Gini Nasional, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ..... III-13
Grafik 3.8 - Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng III-14
Grafik 3.9 - Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (%) III-15
Grafik 3.10 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2021-2025 ..... III-16
Grafik 3.11 - Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... III-17
Grafik 3.12 - IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, ... III-18
Grafik 3.13 - IPM Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... III-19

BAB I
PENDAHULUAN

"Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik"

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Lampiran : Peraturan Bupati Soppeng
Nomor : 11 Tahun 2026
Tanggal : 6 Juli 2026
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Sehubungan dengan amanat tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Soppeng menyusun RKPD Tahun 2027. RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahapan pertama dalam pencapaian sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045. Selain itu RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029. Oleh karena itu RKPD 2027 disusun berdasarkan kebijakan yang tetuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029.

Perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,

partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan daerah dirumuskan melalui prinsip-prinsip perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

Dokumen RKPD ini berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional. Penyusunan RKPD ini disusun untuk menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD. RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrument untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan perangkat daerah.

Dalam rangka peningkatan konsistensi capaian pembangunan daerah Kabupaten Soppeng, RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 mengacu pada RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 telah memedomani RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 dan RKP Nasional Tahun 2027. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari persiapan penyusunan, rancangan awal, rancangan, musrenbang, perumusan rancangan akhir serta penetapan. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan

DPRD. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional.

Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan Kabupaten Soppeng serta dinamika dampak sosial dan ekonomi, sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 akan fokus sesuai tema yaitu "Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa". Adapun capaian ekonomi makro yaitu: Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan angka 4,77 (2025), Tingkat Kemiskinan sebesar 6,65% (2025), Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,01% (2025), Gini Rasio menunjukkan angka 0,331 (2025), Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan dengan menunjukkan angka 73,69 (2025) dan PDRB Perkapita (ADHB) sebesar 72,36 (2025) juta rupiah. Capaian tersebut menjadi dasar dalam penentuan target indikator makro dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2027. Berdasarkan realisasi capaian indikator makro tahun 2025, tantangan pembangunan ekonomi ke depan masih memerlukan perhatian yang serius untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Aktivitas perekonomian daerah terus bergerak positif, namun laju pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan upaya penguatan program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Tingkat Pengangguran Terbuka juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam penyediaan lapangan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja baru dan meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, nilai Gini Rasio menunjukkan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan masih perlu mendapatkan perhatian agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap perlu diperkuat, terutama melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi. Sementara

itu, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, namun tantangan ke depan adalah memastikan bahwa peningkatan pendapatan tersebut dapat dinikmati secara merata dan berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat.

Dengan demikian, tantangan ekonomi ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas pertumbuhan yang mampu menurunkan kemiskinan dan pengangguran, mengurangi kesenjangan pendapatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara 2022 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Nomor 6775);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
42. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);

46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321);
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
51. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Nomor 17);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 103);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2025-

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 161);

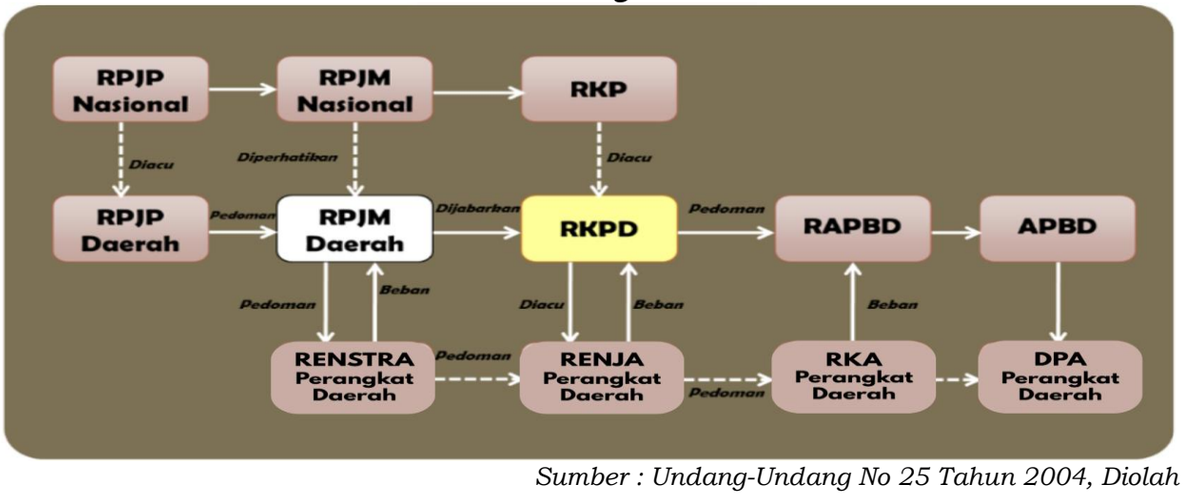
56. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 163);
57. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 mempedomani RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 serta harus memperhatikan dokumen perencanaan baik ditingkat pusat (RKP Tahun 2027) maupun ditingkat provinsi (RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027). Hal tersebut dimaksudkan agar program dan kegiatan yang direncakan pada tahun 2027 sesuai dengan tujuan di tingkat provinsi maupun nasional dalam aspek sektoral maupun aspek kewilayahan. Selain itu penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Di samping itu RKPD juga perlu mempertimbangkan usulan Musrenbang maupun Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang akan diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait, agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. RKPD tahun 2027 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029. Dengan demikian, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berhasil guna dan tepat serta terarah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Keterkaitan antara RKPD Kabupaten Soppeng dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1. Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lain



Sumber : Undang-Undang No 25 Tahun 2004, Diolah

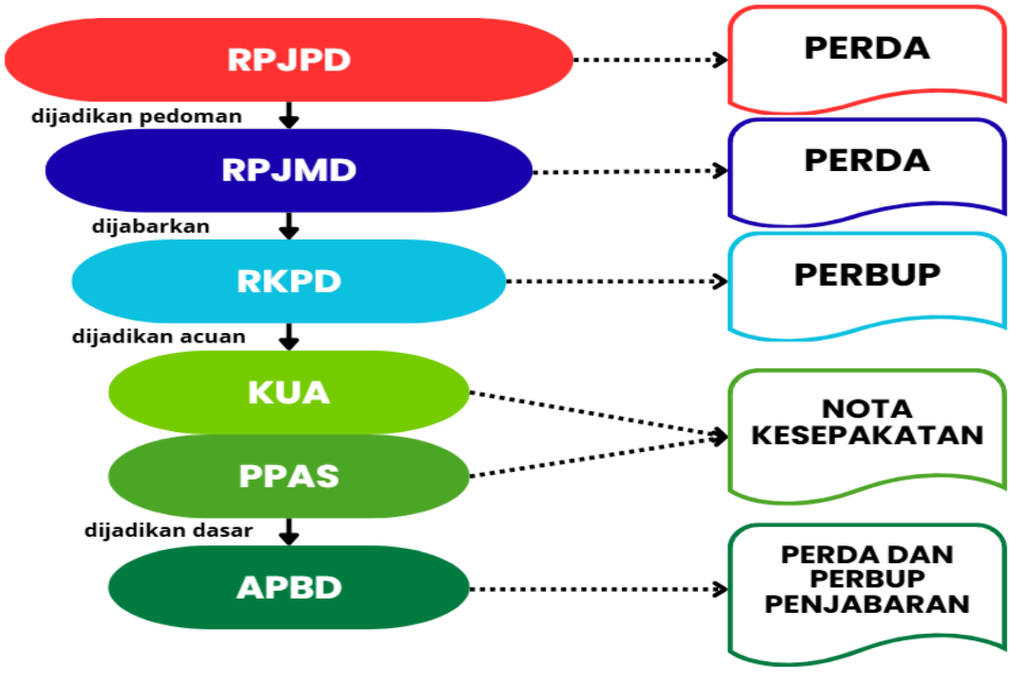
Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan sebagai berikut: RKP disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang di dalamnya telah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategis pembangunan daerah yang pada intinya memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas pembangunan daerah dengan masing-masing penanggung jawab perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program lintas perangkat daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan menyinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2027, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan R-APBD Tahun 2027.

Selain itu, RKPD juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan, serta bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Soppeng dalam penyusunan rencana kerja tahunan masing-masing. Secara subtansi dan hierarkis, keberadaan RKPD melaksanakan strategi yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 dengan memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD 2025-2045. Adapun alur perencanaan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2. Alur Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 memperhatikan

beberapa unsur pokok sebagai berikut:

a. Tujuan yang dikehendaki;
b. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya;
e. Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaannya.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 merupakan pedoman dasar dalam penyusunan Rancangan APBD dengan mengacu RKP dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan serta akan menjadi bagian dari RPJMD 2025-2029. Selain itu, konsistensi RKPD juga diperlukan dalam penyusunan kerangka pendanaan tahunan, dimana fungsinya sebagai arah serta pedoman dalam penyusunan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2027 dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan sebagai acuan/pedoman penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
3. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2027;
4. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi dan tujuan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2027;
3. Memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan dan berkeadilan serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan daerah;
4. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mewujudkan integritas, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
5. Untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Soppeng dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Soppeng maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027 dengan sistematika sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini terdiri dari ***Latar Belakang*** yang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. ***Dasar Hukum Penyusunan*** yang memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. ***Hubungan Antar Dokumen*** dimana pada bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD/RPD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng. ***Maksud dan Tujuan*** memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. ***Sistematika Dokumen RKPD*** mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH yang terdiri dari ***Kondisi Umum Daerah*** yang memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi pembangunan wilayah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. ***Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD*** yang mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Serta ***Permasalahan Pembangunan Daerah*** yang berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH yang terdiri dari ***Arah Kebijakan Ekonomi Daerah*** yang mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD/RPD provinsi/kabupaten.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, serta permasalahan daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. ***Arah Kebijakan Keuangan Daerah*** yang berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH yang terdiri dari ***Tujuan dan Sasaran Pembangunan*** yang menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng. ***Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027*** yang merupakan suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2027 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Serta berisi Tema, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD/RPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMN.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN berisi ***Rencana Program Prioritas*** beserta pagu indikatif pendanaannya yang direncanakan untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2027. Bab ini juga memuat rekapitulasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer pada setiap Perangkat Daerah, serta program prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH yang memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2027, kaidah pelaksanaan, kesimpulan dan harapan yang berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027.



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

"Pada bagian ini dijelaskan mengenai Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan "

KONDISI UMUM DAERAH

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN ISU STRETEGIS

INOVASI DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Soppeng terletak di bagian utara Kota Makassar (Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara geografis, Kabupaten Soppeng terletak antara 4° 5' 54,8" - 4° 32' 42,6" Lintang Selatan (LS) dan 120° 5' 48,6" - 119° 42’ 22,4" Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Soppeng berupa daratan adalah seluas 1.385,546 Km^2 yang secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 kecamatan. Di antara kecamatan-kecamatan tersebut, Kecamatan Marioriawa merupakan kecamatan yang terluas dari total luas wilayah Kabupaten Soppeng, Kecamatan Citta merupakan kecamatan yang terkecil sekaligus menjadi kecamatan yang letaknya paling jauh dari Ibu kota Kabupaten Soppeng yaitu berjarak 35 Km^2 dan Kecamatan Ganra merupakan kecamatan yang letaknya paling dekat dari Ibu kota Kabupaten Soppeng yaitu berjarak 8 Km^2. Adapun batas wilayah secara administratif adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sindenreng Rappang dan Kabupaten Wajo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Barru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru.

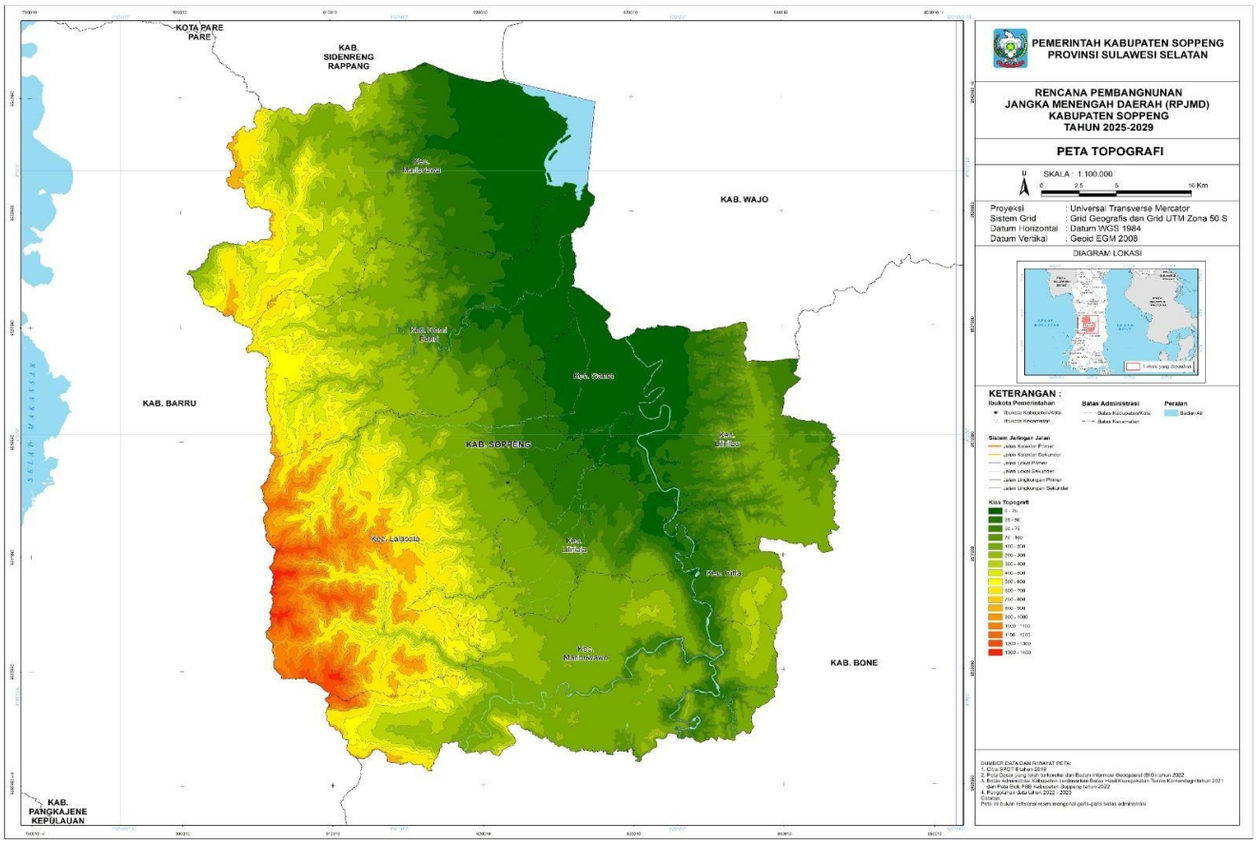
Gambar 2. 1 - Peta Administrasi Kabupaten Soppeng



Sumber : Peta Tematik Indonesia

Dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng juga terbagi atas 70 kelurahan/desa. Secara geografis, Kabupaten Soppeng terdiri dari 8 kecamatan yang seluruhnya merupakan daratan dan bukan pantai. Adapun Peta Topografi Kabupaten Soppeng sebagaimana gambar 2.2.

Gambar 2. 2 - Peta Topografi Kabupaten Soppeng



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut. Berdasarkan klasifikasi menurut ketinggian diatas permukaan laut (DPL), wilayah Kabupaten Soppeng diklasifikasikan berdasarkan ketinggiannya sebagai berikut :

- Area ketinggian 0 - 25 meter DPL;
- Area ketinggian 25 - 100 meter DPL;
- Area ketinggian 100 - 500 meter DPL;
- Area ketinggian 500 - 1.000 meter DPL;
- Area ketinggian >1.000 meter DPL;

Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung berapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut:

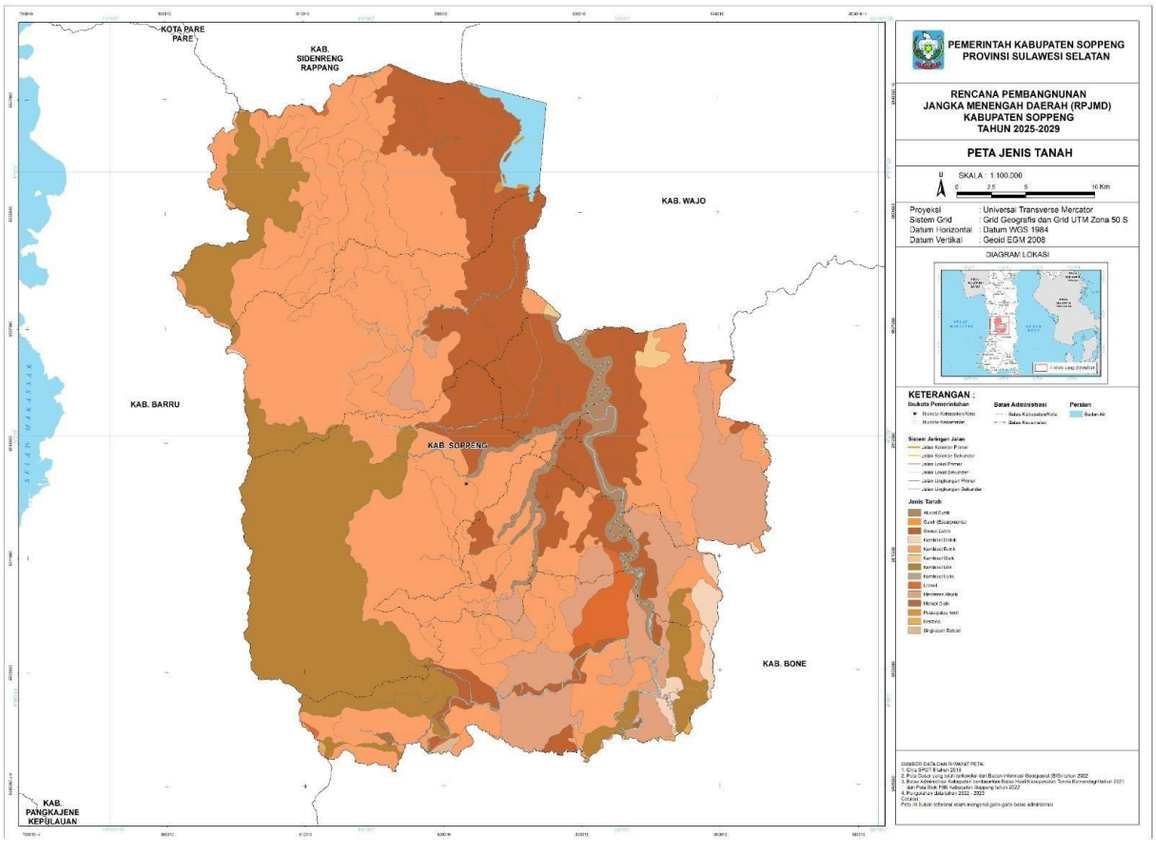
- Gunung Nene Conang + 1.463 m dpl;
- Gunung Sewo + 860 m dpl;
- Gunung Lapancu + 850 m dpl;
- Gunung Bulu Dua + 800 m dpl;
- Gunung Paowengeng + 760 m dpl;

Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain :

- Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapancu bermuara di Sungai Walannae;

- Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai Walannae;
- Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe;
- Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di Danau Tempe;
- Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di Danau tempe.

Gambar 2. 3 - Peta Jenis Tanah Kabupaten



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan, sebagai berikut :

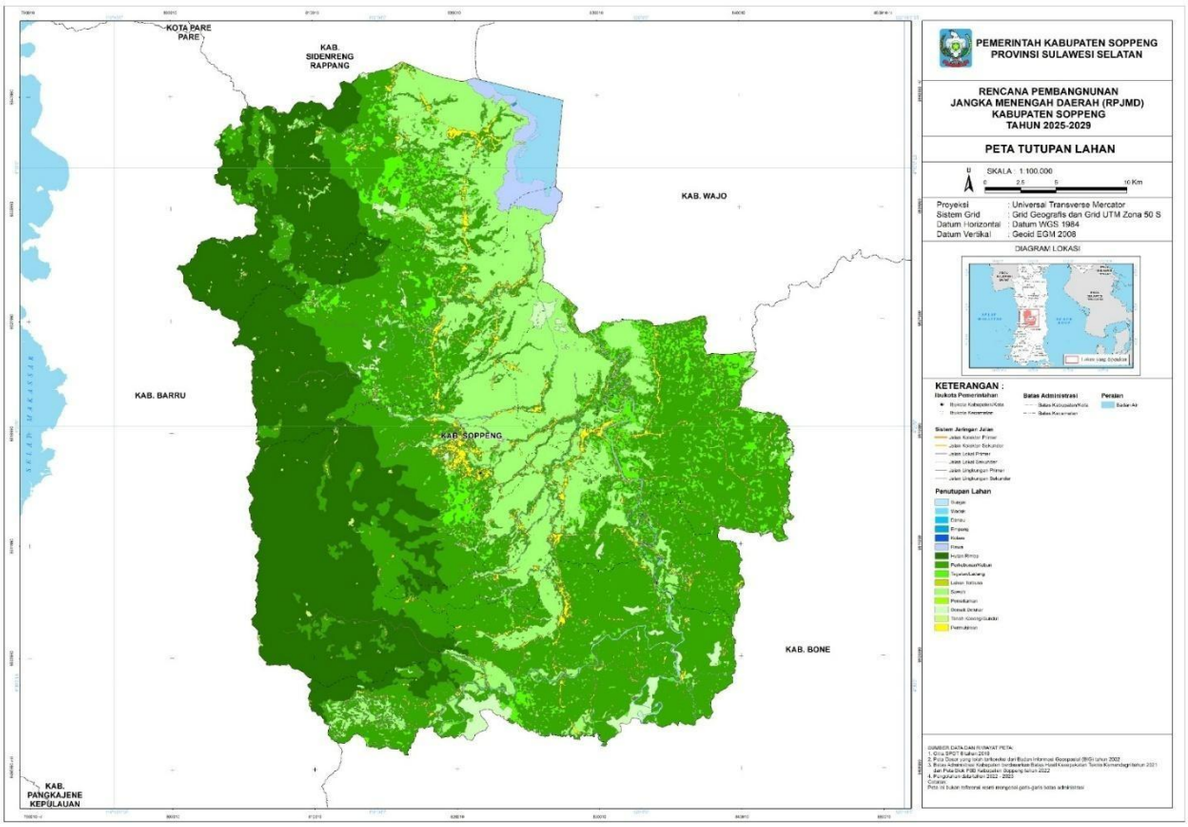
- Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediteran Coklat;
- Kecamatan Liliriaja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua, Mediteran Coklat dan Regusol;
- Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/ Kelabu Tua Kekuning- kuningan;
- Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina, Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol;
- Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Donri-Donri: Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediteran Regusol dan Litosol.

Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran ± 24° sampai dengan ± 30° dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah hujan rata-rata pada tahun 2012 sekitar 180 mm dan 15 hari hujan/bulan.

Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng 2012-2032) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032.

Gambar 2. 4 - Peta Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan pertanian sebagai berikut:
   - Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 48.437 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
   - Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Donri-donri dan Kecamatan Lilirilau;
   - Kawasan perkebunan terdiri atas:
     - Kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
     - Kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Marioriawa, dan Donri-donri;
     - Kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan Lalabata, Marioriawa dan Marioriwawo;
     - Kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta, Marioriawa, Lalabata, Donri-donri dan Liliriaja;
     - Kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriawa, Lilirilau, Donri- donri, dan Citta;
     - Kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Liliriaja, Lalabata, Donri-donri, dan Marioriawa;
     - Kawasan perkebunan kemiri terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta, dan Ganra;
     - Kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta dan Liliriaja;
     - Kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Liliriaja, Mariowawo, Marioriawa, Lilirilau dan Citta; dan
     - Tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri.

- Kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut:
  - Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kecamatan Donri-donri;
  - Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kecamatan Liliriaja;
  - Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh wilayah kecamatan;
  - Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta;
  - Kawasan Pengembangan Unit Perbenihan Rakyak (UPR) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.

2. Kawasan peruntukan industri sebagai berikut:
   - Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan padi tersebar di setiap kecamatan, industri pemintalan sutra alam di Kecamatan Donri- Donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau;
   - Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas industri pembuatan gula merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri-Donri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata.
3. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai berikut:
   - Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas :
     - Villa Yuliana atau Museum Latemmamala, Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemmamala, di Kecamatan Lalabata;
     - Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningnge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejenge di Kecamatan Donri- Donri;
     - Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;
     - Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;
     - Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau;
     - Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja;
     - Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;
     - Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo.

- Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriawa), TWA Citta (Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta), Populasi Kelelawar di Pusat Kota Watansoppeng (Kecamatan Lalabata), dan Kawasan Pesutraan Alam (Kecamatan Donri-Donri).
- Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo;
- Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.

4. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
   - Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata;
   - Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau;
   - Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Ganra.
5. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
   - Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa;
   - Kawasan wisata alam Lejja di Kecamatan Marioriawa; dan
   - Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Soppeng termuat dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Selanjutnya diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada seluruh Kawasan Perkotaan yang terdapat di Kabupaten Soppeng sebagai penjabaran terhadap rencana umum tata ruang wilayah kabupaten ke dalam rencana rinci tata ruang kabupaten Sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) PP No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa RDTR harus sudah ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Kota yang sudah memiliki Perda RTRW diamanatkan untuk segera menyusun dan menetapkan Perda RDTR dimana RDTR merupakan dasar izin pendirian bangunan dan dasar tata bangunan dan lingkungan. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). berkonsentrasi pada pengaturan urban design, penataan blok dan fungsinya serta peraturan zonasi. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) utamanya disusun sebagai acuan dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang pada daerah kabupaten dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi.

1. Kawasan Perikanan

   Kawasan peruntukan perikanan yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan dan kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).
   - Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah sungai yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa.
   - Kawasan peruntukan budidaya perikanan merupakan Kawasan budidaya perikanan air tawar yang ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.

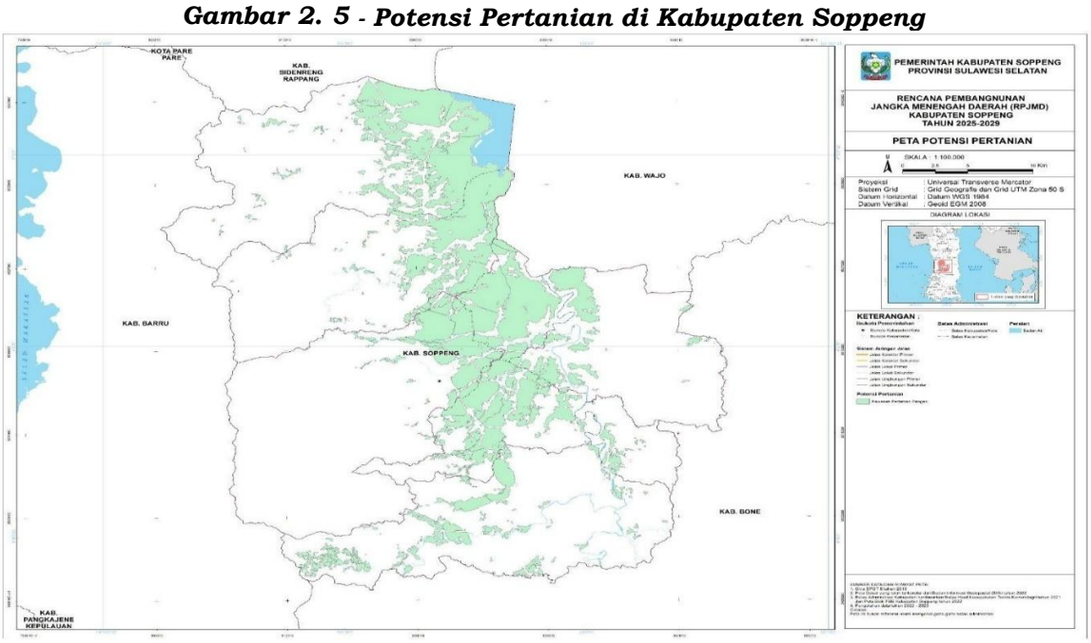
- Kawasan pengembangan balai benih ikan ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja, dan BBI Citta Kecamatan Citta.

2. Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 terdiri atas:

- Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan perkebunan terdiri atas:
  - kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
  - kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Marioriawa, Donri-Donri;
  - kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, dan Citta;
  - kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;
  - kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
  - kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
  - kawasan perkebunan kemiri terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, Citta;
  - kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Lilirilau, Citta dan Liliriaja;
  - kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Marioriawa, Marioriwawo, Lilirilau, Liliriaja dan Citta; dan
  - tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri.

Gambar 2. 5 - Potensi Pertanian di Kabupaten Soppeng



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

3. Kawasan Pariwisata

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten (RIPPARKAB) Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2033 terdapat beragam potensi wisata yang ada di Kabupaten Soppeng diantaranya permandian wisata alam, agro, situs sejarah dan budaya masyarakat tradisional termasuk kuliner tradisional, maupun events (peristiwa pariwisata).

a. Potensi Wisata Alam

Daya Tarik wisata alam merupakan salah satu daya tarik wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Soppeng. Adapun rinciannya dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 1 - Potensi Wisata Alam di Kabupaten Soppeng

No	Nama Destinasi	Lokasi
1	Kawasan TWA Lejja	Desa Bulue Kec. Marioriawa
2	Kawasan TWA Danau Tempe	Kelurahan Limpomajang Kec. Marioriawa
3	Kawasan TWA Citta	Desa Citta Kecamatan Citta
4	Kawasan TWA Goa Coddong	Desa Citta Kecamatan Citta
5	Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
6	Kawasan Alam Adventure Park	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
7	Kawasan Populasi Kelelawar di Pusat Kota Watansoppeng	Kel. Botto Kecamatan Lalabata
8	Kawasan Pesutraan Alam	Kecamatan Donri-Donri
9	AppejengÉ	Desa Lalabata Riaja Kec, Donri-Donri
10	Kawasan Mattabulu	Desa Mattabulu Kec. Lalabata
11	Puncak Biccuing	Dusun Biccuing Kel. Botto Kec.Lalabata
12	Air Terjun Minawoe	Desa Bulue Kec. Marioriawa
13	Air Terjun Datae	Desa Bulue Kec. Marioriawa

Sumber: Laporan Akhir RIPPARKAB Kabupaten Soppeng 2018-2033

b. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya

Selain potensi wisata alam, Kabupaten Soppeng juga memiliki potensi wisata sejarah dan budaya yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng. Adapun rincian potensi wisata sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Soppeng dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 2 - Potensi Wisata Sejarah dan Budaya di Kabupaten Soppeng

No	Nama Destinasi	Lokasi
1	Prosesi Perkawinan	Seluruh wilayah Kabupaten Soppeng
2	Musik Tradisional	Seluruh wilayah Kabupaten Soppeng
3	Tari Tradisional	Seluruh wilayah Kabupaten Soppeng
4	Lagu daerah	Seluruh wilayah Kabupaten Soppeng
5	Villa Yuliana (Bola MaccacaE)	Kecamatan Lalabata
6	Kawasan Makam Kuno Jera LompoE	Kecamatan Lalabata
7	Kompleks Istana Datu Soppeng	Kecamatan Lalabata
8	Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddunge)	Kelurahan Bila Kec. Lalabata
9	Makam Petta Bulu Matanre	Kec. Lalabata
10	Situs Megalitik Lawo	Kec. Lalabata
11	Situs Megalitik Tinco	Kec. Lalabata
12	Situs Megalitik Sewo	Kec. Lalabata
13	Situs Megalitik Umpungeng	Kec. Lalabata
14	Makam Petta Seppang	Kec. Lalabata

No	Nama Destinasi	Lokasi
15	Kompleks Makam Datu Soppeng	Kec. Lalabata
16	Gereja Khatolik Patung Bunda Maria	Kec. Lalabata
17	Rumah Tradisional Batu Laiya	Kec. Lalabata
18	Kompleks makam Jera CaddiE	Kec. Lalabata
19	Menhir Latemmamala (LamumpatuE)	Kec. Lalabata
20	Situs Petta BanuangÉ	Kec. Lalabata
21	Situs Petta Wanua	Kec. Lalabata
22	Makam Lato Gappong	Kec. Lalabata
23	Makam Petta Awo	Kec. Lalabata
24	Menhir La Temma Pole	Kec. Lalabata
25	Makam Petta Sering	Kec, Donri-Donri
26	Situs Tomanurung Sanyili	Kec, Donri-Donri
27	Makam Petta AbbaraningngE	Kec, Donri-Donri
28	Makam Petta BalubuE	Kec, Donri-Donri
29	Bulu BottingngE	Kec, Donri-Donri
30	Makam Petta AddagangE	Kec, Donri-Donri
31	Makam Datu Mario	Kec. Marioriawa
32	Kompleks Makam Petta Jangko	Kec. Marioriawa
33	Kompleks Sao Mario	Kec. Marioriawa
34	Situs Tampaning	Kec. Marioriawa
35	Makam Kuno Padali	Kec. Marioriawa
36	Makam Petta Kajuara	Kec. Marioriawa
37	Makam Kuno Datu Lompulle	Kec. Ganra
38	Kompleks Makam Pakka SaloE	Kec. Ganra
39	Makam Petta Sara'E	Kec. Ganra
40	Makam Sullewatang Kebo dan Petta Karame	Kec. Ganra
41	Museum Calio	Kec. Lilirilau
42	Situs Kecce	Kec. Lilirilau
43	Situs Marale	Kec. Lilirilau
44	Situs Paroto	Kec. Lilirilau
45	Kompleks Makam Datu Salaonro	Kec. Lilirilau
46	Makam Arung Baringeng	Kec. Lilirilau
47	Makam AbbanuangE	Kec. Lilirilau
48	Situs Megalitik Samoling	Kec. Lilirilau
49	Situs Paleolitik Jampu	Kec. Lilirilau
50	Situs Talepu	Kec. Liliriaja
51	Situs Lonrong	Kec. Liliriaja
52	Situs Lenrang	Kec. Liliriaja
53	Kompleks Makam AbbanuangE	Kec. Liliriaja
54	Kompleks Makam Datu Pattojo	Kec. Liliriaja
55	Benteng Pattojo	Kec. Liliriaja
56	Saoraja Seng	Kec. Liliriaja
57	Gua Lakaroci	Kec. Liliriaja
58	Gua Coddong	Desa Citta Kec. Citta
60	Situs Paleolitik Lakibong	Kec. Citta
61	Makam Datu Citta	Kec. Citta
62	Makam KalokoE Watu	Kec. Marioriwawo
63	Makam Lato Garimpang	Kec. Marioriwawo
64	Situs GoariE	Kec. Marioriwawo
65	Situs Megalitik Madenra	Kec. Marioriwawo
66	Sumur Tua TettikenraraE	Kec. Marioriwawo

No	Nama Destinasi	Lokasi
67	Makam Arung Sekkang	Kec. Marioriwawo
68	Rumah Arrajang	Kec. Marioriwawo

Sumber: Laporan Akhir RIPPARKAB Kabupaten Soppeng 2018-2033

c. Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus

Selain potensi wisata alam, sejarah dan budaya, kabupaten Soppeng juga memiliki potensi daya tarik wisata buatan manusia yang cukup menarik minat wisatawan pada saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Soppeng. Potensi wisata buatan merupakan segala bentuk daya tarik yang dibuat atau dibangun oleh manusia secara terencana sebagai sarana bagi wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata. Adapun rincian potensi wisata buatan manusia (Manmade) dan minat khusus dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2. 3 - Potensi Wisata Buatan dan Minat Khusus di Kabupaten Soppeng

No	Nama Destinasi	Lokasi
1	Kawasan Wisata Ompo	Kec. Lalabata
2	Kawasan Wisata Agro	Desa Mariorilau Kec. Marioriwawo
3	Kawasan Wisata Agro	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
4	Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
5	Kawasan Adventure Park Gattareng Toa	Desa Gattareng Kec.Marioriwawo
6	Kawasan Populasi Kelelawar (Taman Kalong)	Kel. Botto Kecamatan Lalabata

4. Kawasan Pertambangan

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012- 2032 meliputi:

- Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:
  - Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa emas dan tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
  - Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa, batu gamping, fire clay, dan dolomite ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo;
  - Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
  - Wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawa;
- Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi merupakan bagian dari kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Sengkang yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
- Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi ditetapkan di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa.

5. Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032, meliputi:

- Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas:

- Kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
- Kawasan peruntukan industri pemintalan sutera alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri;
- Kawasan peruntukan industri pengolahan ikan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
- Kawasan peruntukan industri pengolahan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.

- Kawasan peruntukan industri rumah tangga merupakan kawasan aglomerasi industri rumah tangga, terdiri atas:
  - Kawasan peruntukan industri pembuatan gula merah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
  - Kawasan peruntukan industri pertenunan sarung sutera ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lalabata.

6. Kawasan Perdagangan

   Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032, meliputi:
   - Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional ditetapkan di kawasan perdagangan Watansoppeng Kecamatan Lalabata dan kawasan perdagangan Cabenge Kecamatan Lilirilau;
   - Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan di kawasan perdagangan Takkalala Kecamatan Marioriwawo dan kawasan perdagangan Batu-Batu Kecamatan Marioriawa.

7. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)

   Penggunaan energi di dunia akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Guna memenuhi kebutuhan, tak cukup hanya dengan mengandalkan energi fosil. Diperlukan juga sistematis untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan. Berdasarkan hasil kajian sumberdaya alam dan energi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, terdapat potensi energi yang terdapat di Kabupaten Soppeng yaitu :
   - Batubara

     Potensi batubara di Kabupaten Soppeng dapat ditemukan, dimana terdapat Singkapan batubara di Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo, berdasarkan luas dan penyebarannya perhitungan yang sifatnya sumber daya tereka sekitar 2,65 juta ton.

- Geothermal
  Potensi Panas Bumi di Kabupaten Soppeng dijumpai di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa dengan temperatur manifestasi panas bumi di permukaan cukup tinggi berkisar 39o C dan Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo dengan temperatur berkisar 37o C.
- Hidrologi
  Pemanfaatan air yang berpotensi digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro dijumpai di beberapa lokasi, antara lain
  - Potensi PLTM Sungai Langkemme di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo dengan kapasitas bangkitan 3 MW.
  - Potensi PLTM Sungai Lawo di Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata dengan kapasitas bangkitan 1.5 MW.
  - Potensi PLTM Sungai Salau di Desa Sering Kecamatan Donri-donri dengan kapasitas bangkitan 1.5 MW.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.3.1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a) Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) adalah sejalan dengan jumlah sumber daya lingkungan yang tersedia, dan berkebalikan dengan jumlah konsumsi penduduk. Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pangan di Kabupaten Soppeng dalam satu tahun, yang kemudian dikonversi ke satuan kilokalori (kkal). Ketersediaan pangan tersebut selanjutnya didistribusikan ke setiap grid, dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia bahan pangan (IJEPBP) sebagai bobot pendistribusian. Beberapa kawasan memiliki nilai kebutuhan pangan bernilai nol karena tidak terdapat penduduk pada kawasan tersebut. Wilayah dengan nilai kebutuhan pangan tinggi di Kabupaten Soppeng berada di Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata dan Kecamatan Lilirilau. Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE). AKE adalah besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yaitu sebesar 2.150 kkal/orang/hari.

Setelah diperoleh sebaran kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, selanjutnya dihitung nilai selisih ketersediaan bahan pangan. Kabupaten Soppeng didominasi oleh selisih ketersediaan yang bernilai positif disetiap Kecamatan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketersediaan pangan Kabupaten Soppeng masih dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kabupaten Soppeng tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain. Jadi, jika terjadi selisih negatif tidak mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan. Penentuan nilai ambang batas dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan energi bahan pangan. Hasil analisis menunjukkan jumlah penduduk yang penyediaan pangannya dapat didukung oleh Kabupaten Soppeng. Sebagian besar Kabupaten Soppeng memiliki nilai ambang batas yang tinggi mulai dari 54.309 – 406.029 Jiwa.

Tabel 2. 4 - Distribusi Daya Dukung Penyedia Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2030

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (Kkal)	Kebutuhan Pangan Domestik (Kkal)	Selisih (Kkal)	Ambang Batas (Jiwa)
Citta	8.136,00	48.305.111.549,10	6.384.725.991,67	41.920.385.557,43	54.413,05
Donri-Donri	24.146,00	251.050.155.089,52	18.948.573.510,92	232.101.581.578,59	297.688,66
Ganra	11.534,00	77.710.837.394,89	9.051.306.500,34	68.659.530.894,56	88.647,78
Lalabata	49.513,00	317.860.121.921,76	38.855.326.719,09	279.004.795.202,67	374.360,43
Liliriaja	28.390,00	122.883.706.015,97	22.279.052.492,20	100.604.653.523,78	133.364,68
Lilirilau	37.961,00	178.327.352.971,93	29.789.894.722,09	148.537.458.249,84	195.675,33
Marioriawa	29.279,00	336.022.588.962,17	22.976.695.190,08	313.045.893.772,09	406.173,33
Marioriwawo	49.162,00	254.114.189.872,81	38.579.879.485,69	215.534.310.387,12	282.624,68
Total	238.121	1.586.274.063.778,16	186.865.454.612,09	1.399.408.609.166,07	1.832.947,93

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Status DDLH penyedia pangan di setiap grid ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk di setiap grid. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia pangan "Melampaui"; dan jika sebaliknya, jumlah penduduk lebih kecil daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia Pangan "Belum Melampaui".

Tabel 2. 5 - Distribusi Status Ketersediaan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2030

Kecamatan	Status Ketersediaan Pangan (Ha) Tahun 2030		Luas (Ha)
	Belum Melampaui Ambang Batas	Telah Melampaui Ambang Batas	
Citta	3.740,01	170,06	3.910,07
Donri-Donri	21.149,98	394,21	21.544,19
Ganra	5.206,15	165,24	5.371,40
Lalabata	28.621,71	1.246,81	29.868,52
Liliriaja	8.945,12	647,04	9.592,16
Lilirilau	15.208,71	702,74	15.911,45
Marioriawa	27.757,80	742,19	28.499,99
Marioriwawo	23.198,66	900,00	24.098,66
Total	133.828,14	4.968,29	138.796,43

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Terlihat total ketersediaan pangan Kabupaten Soppeng sangat berlimpah sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan pangan penduduk. Adapun Kecamatan dengan Ketersediaan pangan tertinggi adalah Kecamatan Marioriawa sebesar 336.022.588.962 Kkal/tahun dengan nilai kebutuhan pangan hanya sebesar 22.895.865.940 Kkal/tahun, diperoleh selisih sebesar 313.045.893.772 Kkal/tahun sehingga memiliki ambang batas 406.173 Jiwa dengan status DDLH penyedia pangan dominan belum terlampaui.

b) Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) penyedia air dianalisis secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (i) perhitungan ketersediaan air, (ii) perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, (iii) perhitungan ambang batas penduduk, dan (iv) penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Dalam perspektif pengembangan wilayah, penggunaan konsep ambang batas pada daya dukung lingkungan hidup (DDLH) bertujuan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ambang batas ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membatasi pertumbuhan. DDLH digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Artinya, peningkatan jumlah penduduk tanpa ada peningkatan jumlah sumber daya akan menyebabkan DDLH semakin mendekati ambang batasnya.

Tabel 2. 6 - Distribusi Daya Dukung Penyedia Air Kabupaten Soppeng Tahun 2030

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air (m^3)	Kebutuhan Air Domestik dan Lahan (m^3)	Selisih (m^3)	Ambang Batas (Jiwa)
Citta	8.136,00	129.478.088,19	36.399.977,51	93.078.110,68	116.374,34
Donri-Donri	24.146,00	727.563.848,42	138.852.451,94	588.711.396,48	735.981,54
Ganra	11.534,00	194.355.504,84	57.865.172,92	136.490.331,92	170.903,89
Lalabata	49.513,00	1.041.314.002,77	142.772.672,69	898.541.330,08	1.129.960,7
Liliriaja	28.390,00	312.824.862,57	101.744.992,13	211.079.870,44	264.910,36
Lilirilau	37.961,00	470.867.658,60	153.759.867,15	317.107.791,46	397.989,05
Marioriawa	29.279,00	1.023.890.265,99	152.952.342,40	870.937.923,58	1.090.737,3
Marioriwawo	49.162,00	683.723.648,69	206.924.346,69	476.799.302,00	598.193,82
Total	238.121,0	4.584.017.880,07	991.271.823,44	3.592.746.056,	4.505.051,0

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Ambang batas penduduk yang telah dihitung selanjutnya dibandingkan dengan populasi penduduk di grid tersebut. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia air "Melampaui", dan jika sebaliknya maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia air "Belum Melampaui".

Tabel 2. 7 - Distribusi Status Daya Dukung Penyedia Air Kabupaten Soppeng Tahun 2030

Kecamatan	Status Ketersediaan Air (Ha) Tahun 2030		Luas (Ha)
	Belum Melampaui Ambang Batas	Telah Malampaui Ambang Batas	
Citta	3.885,07	25,00	3.910,07
Donri-Donri	21.519,19	25,00	21.544,19
Ganra	5.346,40	25,00	5.371,40
Lalabata	29.318,52	550,00	29.868,52
Liliriaja	9.392,16	200,00	9.592,16
Lilirilau	15.668,98	242,47	15.911,45
Marioriawa	28.349,99	150,00	28.499,99
Marioriwawo	23.848,66	250,00	24.098,66
Total	137.328,96	1.467,47	138.796,43

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Terlihat total ketersediaan air Kabupaten Soppeng masih cukup berlimpah sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan air, domestik maupun lahan. Adapun Kecamatan dengan ketersediaan air terbanyak adalah Kecamatan Lalabata sebesar 1.041.314.002 m^3/tahun dengan nilai kebutuhan air total (domestik dan lahan) hanya sebesar 142.772.672 m^3/tahun, sehingga diperoleh selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 898.541.330 m^3/tahun dengan ambang batas sebanyak 1.129.960 Jiwa dengan status DDLH penyedia air dominan belum terlampaui.

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1. Konsumsi Listrik Per Kapita

Capaian konsumsi energi listrik rumah tangga per kapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2021-2025 mengalami peningkatan. Rata-rata jumlah kwh yang terjual dalam lima tahun terakhir sebesar 116.634.756,80 kwh. Capaian konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar 435,73 kwh/kapita meningkat pada tahun 2022 sebesar 456,93 kwh/kapita, tahun 2023 sebesar 479,26 kwh/kapita. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2024 sebesar 515,33 kwh/kapita dan tahun 2025 sebesar 549,36 kwh/kapita. Kenaikan konsumsi listrik per kapita menunjukkan kemajuan dalam akses energi dan elektrifikasi, akan tetapi Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa peningkatan konsumsi ini disertai efisiensi energi, agar tidak

menyebabkan pemborosan dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Capaian konsumsi listrik per kapita Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 2. 8 - Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

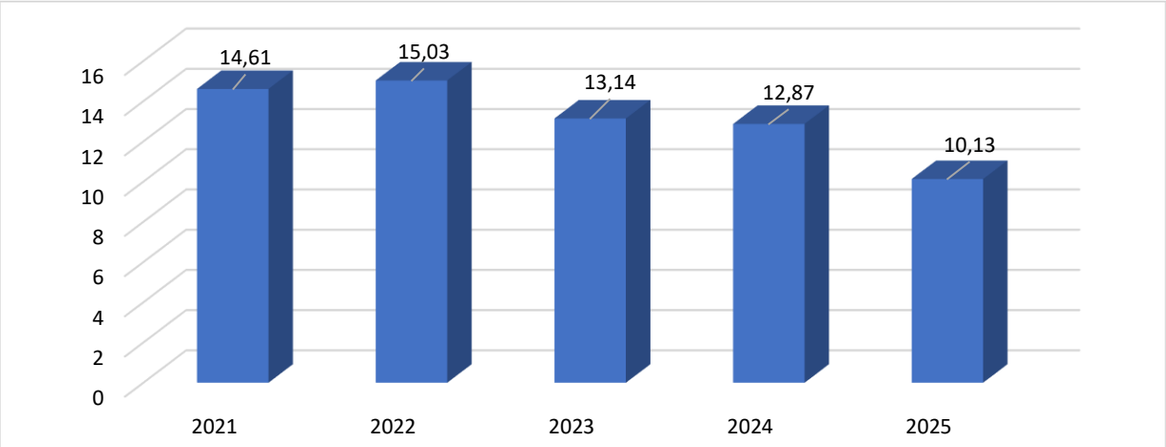
NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kwh Terjual	Kwh	102.646.553	107.858.385	115.480.262	124.366.904	132.821.680 ,014
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	235.574	236.049	240.955	241.333	241.777
	Konsumsi Listrik Per Kapita		435,73	456,93	479,26	515,33	549,36

Sumber : PLN, Data diolah Sumber : Dinas PMPTSP, 2026

2.1.4.2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)

Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang secara regular mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Soppeng dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana di tahun 2025 merupakan capaian terendah dengan angka yang tercatat sebesar 10,13% dan tertinggi di tahun 2022 sebesar 15,03%. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin, pengeluaran per kapita terhadap makanan dan produksi pangan yang memiliki pengaruh terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi.

Grafik 2. 1 - Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2026

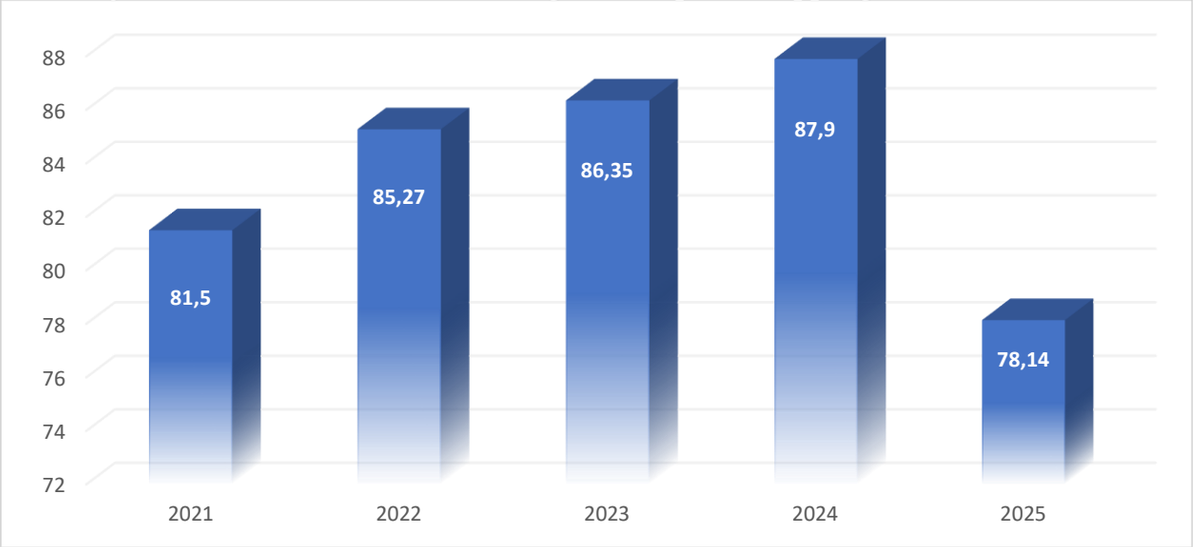
2.1.4.3. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Indeks Ketahanan Pangan Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain.

IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran. Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian pengukuran Indeks Ketahanan Pangan dengan adanya penambahan indikator pada aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan dan aspek pemanfaatan. Sehingga target pencapaian tahun 2025-2030 dilakukan penyesuaian, dimana target lebih rendah jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Capaian ketahanan pangan Kabupaten Soppeng dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 2 – Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2026

2.1.4.4. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan adalah kondisi ideal yang ingin dicapai terkait dengan kebutuhan konsumsi pangan yang ideal yaitu beragam, bergizi seimbang dan Aman. Data Skor Pola Pangan Harapan diperoleh dari hasil survey konsumsi pangan yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Adapun hasil pencapaian skor pola pangan harapan tahun 2021-2025 yaitu sebagai berikut ini.

Tabel 2. 9 - Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) Bobot Masing- masing Kelompok Pangan	Skor	75,8	76,8	80,8	81,8	89,62
	Padi-Padian	Skor	25	25	25	25	25
	Umbi-Umbian	Skor	0,3	0,4	0,5	0,3	0,62
	Pangan Hewani	Skor	18,5	18,7	20,5	20,6	21,18
	Minyak dan Lemak	Skor	4,5	5,0	5,0	4,9	5,00
	Buah/Biji Berminyak	Skor	0,3	0,4	0,4	0,5	0,39
	Kacang-Kacangan	Skor	3,8	3,7	5,2	4,5	4,93
	Gula	Skor	1,7	1,9	1,7	1,7	2,50
	Sayur dan Buah	Skor	21,7	21,8	22,5	24,4	30,00
	Lain-lain	Skor	-	-	-	-	-

Sumber: Data Susenas Badan Pusat Statistik setelah diolah, 2026

Berdasarkan tabel tersebut di atas mengalami fluktuasi dimana tahun 2021 capaian skor pola pangan harapan sebesar 75,8% dan pada tahun 2022 meningkat dengan capaian sebesar 76,8% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 80,8%. Di tahun 2024 skor pola pangan harapan Kabupaten Soppeng sebesar 81,8% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 89,62%.

Kondisi ideal Pola Pangan Harapan yaitu sebesar 100%, capaian 2021-2025 menunjukkan adanya peningkatan akan tetapi masih belum mencapai kondisi ideal, yang menggambarkan bahwa kecenderungan konsumsi pangan masyarakat belum seimbang sesuai anjuran. Faktor ketersediaan, keterjangkauan dan kebiasaan masyarakat dalam konsumsi pangan menjadi faktor utama capaian skor pola pangan harapan.

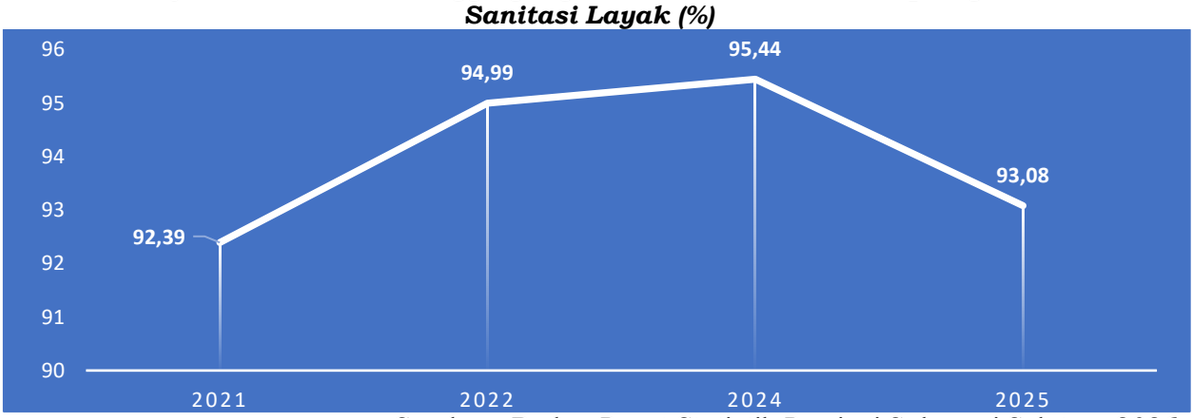
2.1.4.5. Akses Sanitasi Layak dan Aman

Pembangunan Sanitasi merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan dan menjadi salah satu agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yaitu Tujuan 6:

Air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. Guna mewujudkan akses sanitasi yang layak dan aman, konsep sanitasi layak mengacu pada konsep terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2020.

Sanitasi layak yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (septic tank) atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal. Sedangkan akses terhadap layanan sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

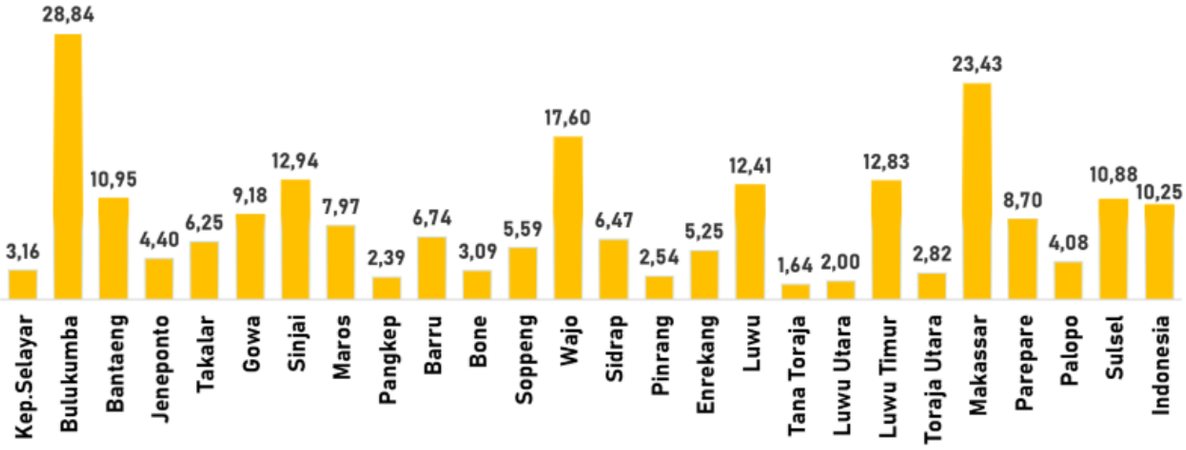
Grafik 2. 3 - Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2026

Capaian akses sanitasi dasar di Kabupaten Soppeng, sejak tahun 2019 telah mencapai 100%. Sementara akses terhadap layanan sanitasi aman belum mencapai 100%, sebagaimana tergambar pada grafik di atas.

Grafik 2. 4 - Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman %) Tahun 2024

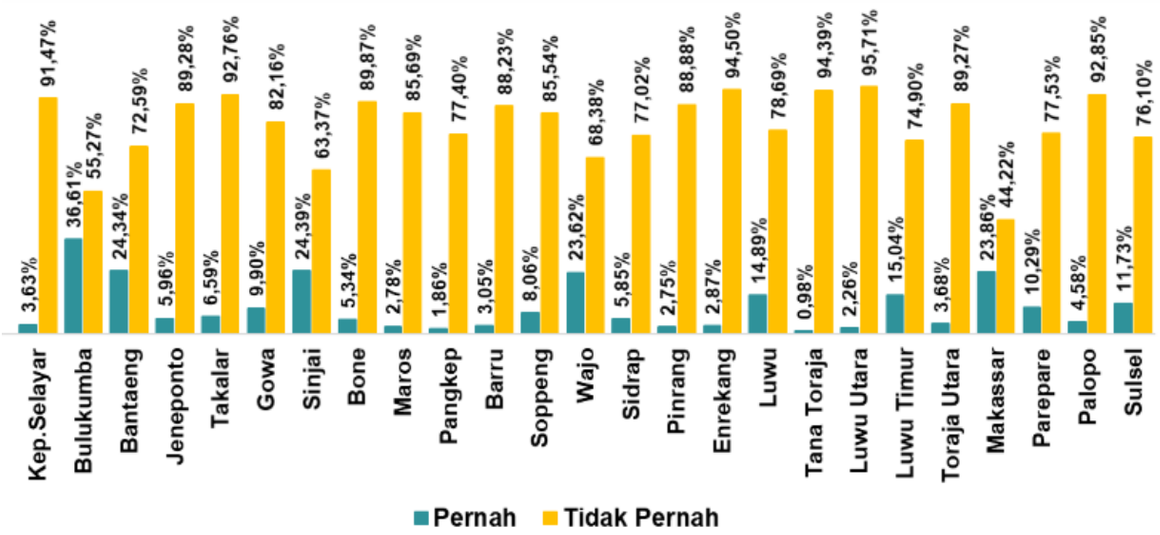


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
(Data Diolah Tim Penyusun Roadmap Sanitasi Aman Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk meningkatkan standar peningkatan kualitas sanitasi nasional sesuai dengan standar SDGs (*Sustainable Development Goals*), bahwa saat ini bukan lagi pencapaian akses layak melainkan penekanan pada pencapaian target aman. Dengan adanya peningkatan standar ini maka terdapat tugas yang harus dikejar oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkannya. Pada tahun 2024 rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi aman sebesar 2,26% meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Akses Sanitasi Aman melalui SPALD-S yang diukur dari jumlah rumah tangga yang melakukan penyedotan lumpur tinja kurun waktu 3-5 tahun terakhir. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan persentase rumah tangga dengan tempat bab sendiri/bersama/mck komunal dan pembuangan akhir tinja berupa tangki septic yang pernah dikosongkan/dilakukan penyedotan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menurut kabupaten/kota disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 5 - Rumah Tangga yang Pernah Melakukan Penyedotan Lumpur Tinja dalam Kurun Waktu 5 Tahun terakhir Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.4.6. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air minum dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 sebesar 94,71% sedangkan pada tahun 2022 terdapat penurunan dengan capaian sebesar 94,58%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan hingga mencapai 98,95% dengan jumlah penduduk berakses air minum sebanyak 238.424 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 249.955 jiwa dan meningkat di tahun 2024 sebesar 99,20% atau sebanyak 241.333 jiwa total penduduk. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan persentase sebesar 99,35%.

Dari data tersebut terlihat bahwa cakupan persentase penduduk berakses air semakin meningkat, namun dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan air minum tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pengelolaan pelayanannya. Saat ini masih sering dijumpai banyaknya keluhan masyarakat terkait pengelolaan air minum yang belum lancar distribusi maupun keluhan terhadap kualitas air yang dihasilkan. Hal ini diakibatkan karena belum optimalnya kinerja PDAM dan belum terinventarisasi dengan baik potensi air baku untuk air minum.

Tabel 2. 10 - Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Penduduk berakses air minum	Jiwa	225.286	225.682	238.424	239.412	244.188
2	Jumlah penduduk	Jiwa	237.875	238.612	240.955	241.333	245.776
	% Penduduk Berakses Air Minum	%	94,71	94,58	98,95	99,2	99,35

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2026

Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa mata air atau sungai sebagai air baku dalam menunjang kelangsungan kehidupan sehari-hari. Kondisi air baku dan kapasitas yang terpakai untuk masing-masing sumber air baku yaitu Mata Air Ompo, Sungai Asanae, Sungai Manreangin, Sungai Lawo, dan Sungai Panjilange dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 11 - Kondisi Kapasitas Air Baku di Kabupaten Soppeng

NO	NAMA	JENIS	KAPASITAS (L/Det)	KAPASITAS TERPAKAI (L/Det)
1	Mata Air Ompo	Mata Air	280	280
2	Sungai Asanae	Sungai	10	10
3	Sungai Manreangin	Sungai	25	25
4	Sungai Lawo	Sungai	10	10
5	Sungai Panjilange	Sungai	60	40

Sumber : SIMSPAM Kementerian PU, 2025

Berdasarkan data kapasitas air baku tersebut terdapat 39 unit SPAM di Kabupaten Soppeng yang dikelola oleh masyarakat maupun yang tidak dikelola masyarakat. Alokasi air baku tersebut dengan kapasitas terpasang, kapasitas produksi, kapasitas distribusi, kapasitas air terjual serta idle capacity terpasang dan produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 12 - Kondisi Alokasi Air Baku di Kabupaten Soppeng

KABUPATEN	JUMLAH UNIT SPAM	ALOKASI AIR BAKU (L/Det)	KAPASITAS TERPASANG (L/Det)	KAPASITAS PRODUKSI (L/Det)	KAPASITAS DISTRIBUSI (L/Det)	KAPASITAS AIR TERJUAL (L/Det)	IDLE CAP TERPASANG (L/Det)	IDLE CAP PRODUKSI (L/Det)
Soppeng	39	655,61	445,06	393,02	373,05	220,37	210,55	52,04

Sumber : SIMSPAM Kementerian Pekerjaan Umum, 2025

2.1.4.7. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Terkait infrastruktur permukiman pemerintah berkomitmen untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dengan target mengurangi hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2021-2025 proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan mengalami fluktuasi, rumah tangga yang ada di Kabupaten Soppeng telah masuk kategori rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen yang tinggi terkait dengan target yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan tahun 2021 mencapai 46,10% sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 33,07% sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 38,29%. Pada tahun 2024 capaian tersebut kembali mengalami peningkatan sebesar 44,36% dengan jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan sebanyak 107.056 jiwa. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan dengan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan sebesar 21,59%. Hal tersebut dikarenakan menurunnya jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan yang hanya 53.056 jiwa.

Tabel 2. 13 - Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan	Jiwa	105.768	19.197	92.261	107.056	53.056

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
	berkelanjutan						
2	Jumlah penduduk seluruhnya (Rumah Tangga)	Jiwa	229.450	58.058	240.955	241.333	245.776
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	%	46,1	33,07	38,29	44,36	21,59

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2026

Berdasarkan peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, rumah tangga yang terlayani air minum jaringan perpipaan di targetkan sebesar 39% di tahun 2025 dan 100% di tahun 2029. Selain itu, rumah tangga yang terlayani air minum aman ditargetkan sebesar 33% di tahun 2025 dan 42,56% di tahun 2029.

Data jumlah sambungan rumah terhadap air minum perpipaan sebanyak 15.182 unit di tahun 2024 dab mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 15.749 unit. Persentase air minum perpipaan dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan dengan kondisi terakhir di 2025 sebesar 25,63%. Akan tetapi untuk akses air siap minum perpipaan belum ada dalam dua tahun terakhir.

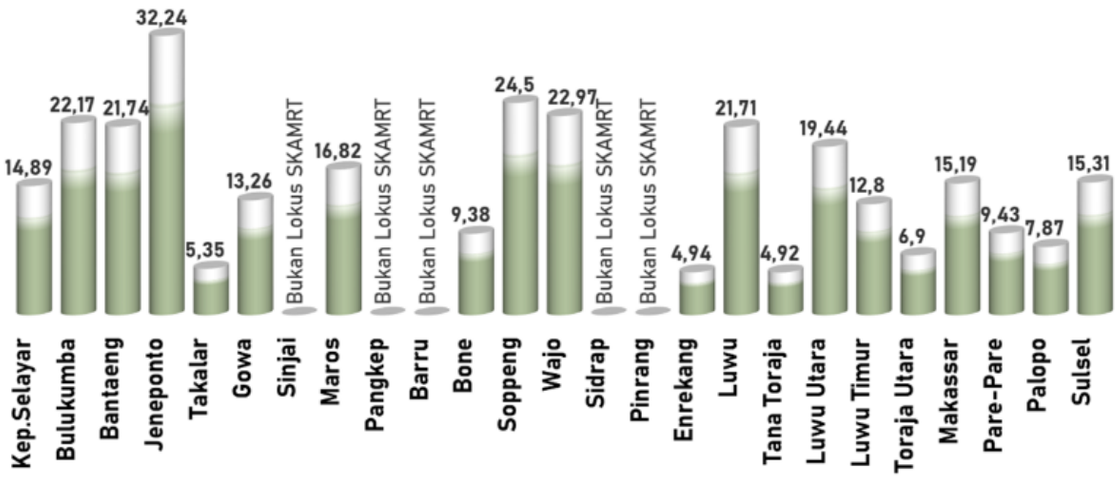
Tabel 2. 14 - Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Perpipaan di Kabupaten Soppeng Tahun 2024 dan 2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN	
			2024	2025
1	Jumlah Sambungan Rumah	Unit	15.182	15.749
2	Akses Air Minum Perpipaan	%	25,20	25,63
3	Akses Air Siap Minum Perpipaan	%	0	0

Sumber : SIMSPAM Kementerian Pekerjaan Umum, diolah Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Selain itu, untuk akses air minum rumah tangga berdasarkan hasil survei kualitas air minum rumah tangga (SKAMRT) 2024 di Kabupaten Soppeng sebesar 24,5%. SKAMRT merupakan survei khusus untuk mengetahui kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat secara langsung di titik konsumsi (*point of use*), baik dari sisi mikrobiologis (terutama *E-Coli*) maupun kimia (seperti arsen, nitrat, dan besi).

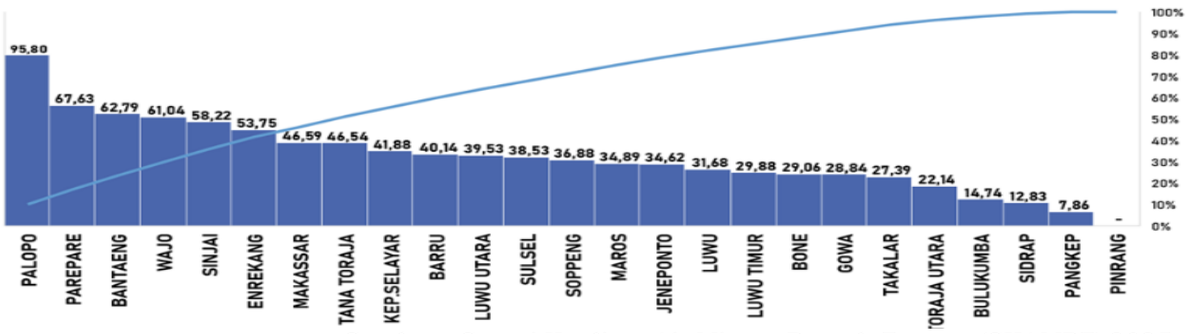
Grafik 2. 6 – Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman Tahun 2024



Sumber : Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) 2025

Berdasarkan data akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan berdasarkan hasil survei kualitas air minum rumah tangga (SKAMRT) 2024 di Kabupaten Soppeng sebesar 36,88%.

Grafik 2. 7 – Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2024



Sumber : Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) 2025

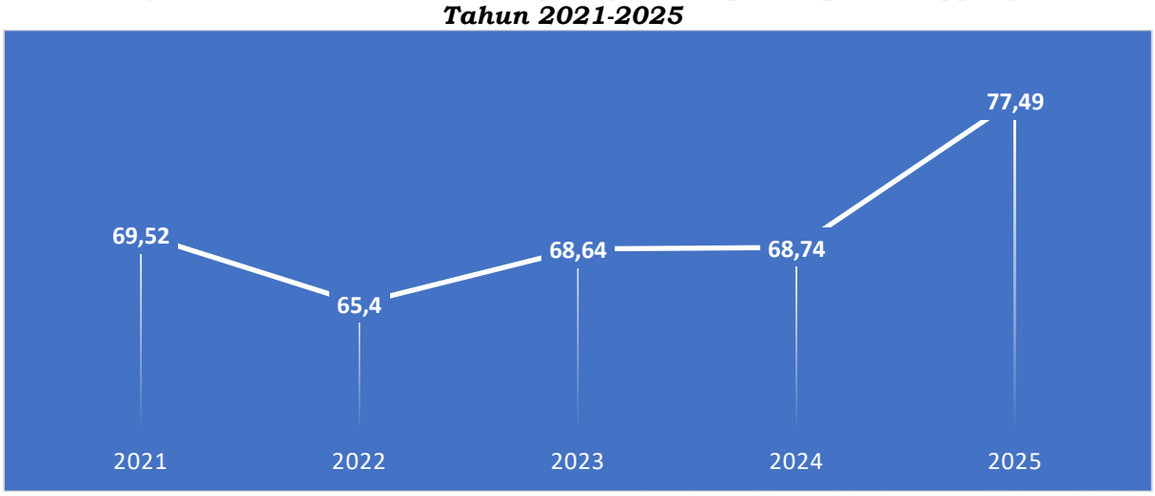
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Pada kurun waktu tahun 2021-2025 nilai IKLH Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi. Pada tahun 2025 nilai IKLH Kabupaten Soppeng sebesar 77,49 poin mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 68,74 poin. Diharapkan pada tahun mendatang Kabupaten Soppeng dapat terus meningkatkan nilai IKLH melalui upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan aksi yang responsif terhadap dinamika yang terjadi pada pengelolaan lingkungan di Kabupaten Soppeng.

Grafik 2. 8 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026

Berikut rincian nilai IKLH Kabupaten Soppeng berdasarkan komponennya:

Tabel 2. 15 - Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		69,52	65,4	68,64	68,74	77,49
1	Indeks Kualitas Air	60	50	55	54,44	75,9
2	Indeks Kualitas Udara	93,87	94,8	94,35	95,18	85,64
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	40,85	40,85	44,51	44,39	65,14

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 termasuk dalam kategori "sedang" dengan nilai 68,74. Sehingga perlu dilakukan penambahan ruang terbuka hijau melalui penghijauan, hutan kota, penanaman pada sempadan sungai. Kondisi lingkungan Kabupaten Soppeng secara umum masih dalam kondisi cukup baik, artinya untuk kualitas air, udara, dan tanah belum mengalami pencemaran yang berat. Indikatornya adalah sebagian besar hasil pemeriksaan komponen lingkungan tersebut belum melebihi baku mutu. Akan tetapi secara kuantitas masih terdapat beberapa sumber daya alam meliputi lahan, hutan dan air yang sudah mengalami kerusakan. Upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus terus dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar sehingga dapat mengakibatkan terjadinya bencana lingkungan.

2.1.5.2. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air adalah mekanisme matematis untuk menghitung data kualitas air yang mencerminkan tingkat kualitas air di sungai dan danau, selain untuk keperluan air yang digunakan seperti; air minum, air yang digunakan di pertanian, atau air yang digunakan di industri. Indeks kualitas air juga memberi data penting untuk menggambarkan status kualitas air secara umum yang dapat sangat membantu dalam memilih teknik pengolahan air yang sesuai untuk mengatasi masalah kontaminasi. Di Kabupaten Soppeng, indeks kualitas air pada tahun 2021 sebesar 60 poin mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 50 poin dan pada tahun 2023 dengan capaian 55 poin. Pada tahun 2024 capaian tersebut menurun dengan nilai 54,44 poin dan meningkat di tahun 2025 dengan capaian sebesar 75,9 poin.

Tabel 2. 16 - Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks kualitas air	Poin	60	50	55	54,44	75,9

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026

2.1.5.3. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh pemerintah daerah sebagai ukuran untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Di Kabupaten Soppeng indeks kualitas udara bersifat fluktuatif, di tahun 2021 sebesar 93,87 poin dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan capaian tercatat 94,8 poin. Nilai indeks kualitas udara Kabupaten Soppeng mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 94,35 poin. Pada tahun 2024 indeks kualitas udara meningkat menjadi 95,18 poin dan mengalami penurunan kembali di tahun 2025 sebesar 85,64 poin.

Tabel 2. 17 - Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Udara	Poin	93,87	94,8	94,35	95,18	85,64

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026

2.1.5.4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Capaian IKL pada tahun 2021 sebesar 40,85 poin dan tahun 2022 sebesar 40,85 poin dan pada tahun 2023 mencapai 44,51 poin. Kondisi di tahun 2024 menunjukkan IKL sebesar 44,39 poin meningkat di tahun 2025 sebesar 65,14 poin. Dalam pengukuran IKL terdapat perubahan parameternpada

tahun 2021, dimana perhitungan tutupan lahan dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai lereng, ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati.

Tabel 2. 18 - Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2021-2025

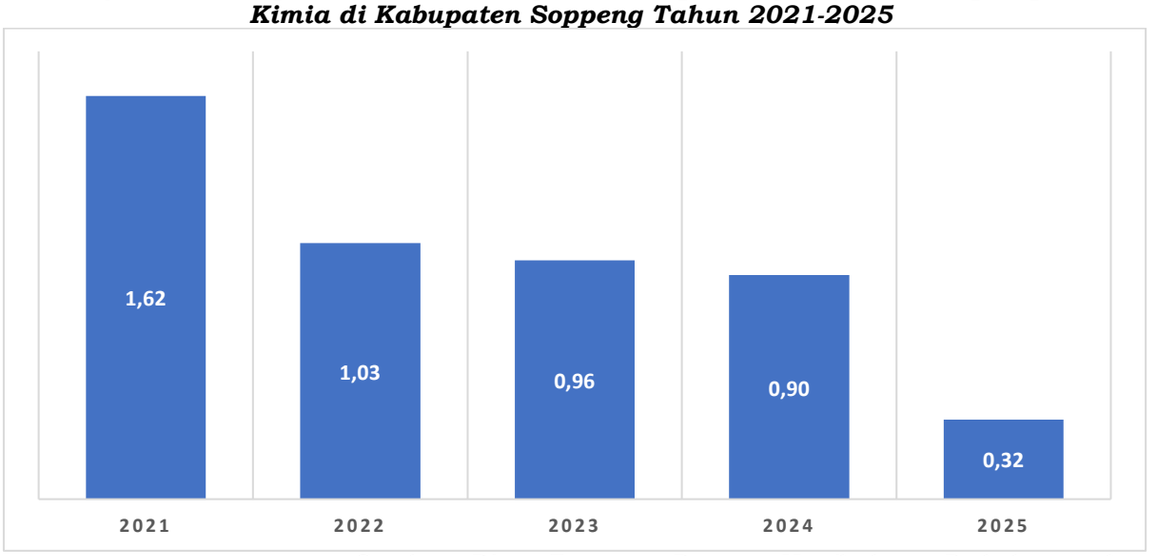
NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks kualitas tutupan lahan	Poin	40,85	40,85	44,51	44,39	65,14

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026

2.1.5.5. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia

Kabupaten Soppeng mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang dalam struktur PDRBnya. Sektor pertanian merupakan sektor andalan melalui hasil produksi pertanian yang melimpah. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil produksi pertanian tersebut yakni ketersediaan pupuk yang digunakan oleh petani. Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia menjadi indikator pembangunan dalam mengukur capaian penggunaan pupuk organik oleh masyarakat. Di Kabupaten Soppeng dalam 5 tahun terakhir capaian tersebut mengalami penurunan. Pada tahun 2021 proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia sebesar 1,62%, mengalami penurunan setiap tahun dengan kondisi terakhir di tahun 2025 dengan capaian sebesar 0,32%. Untuk proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 9 - Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



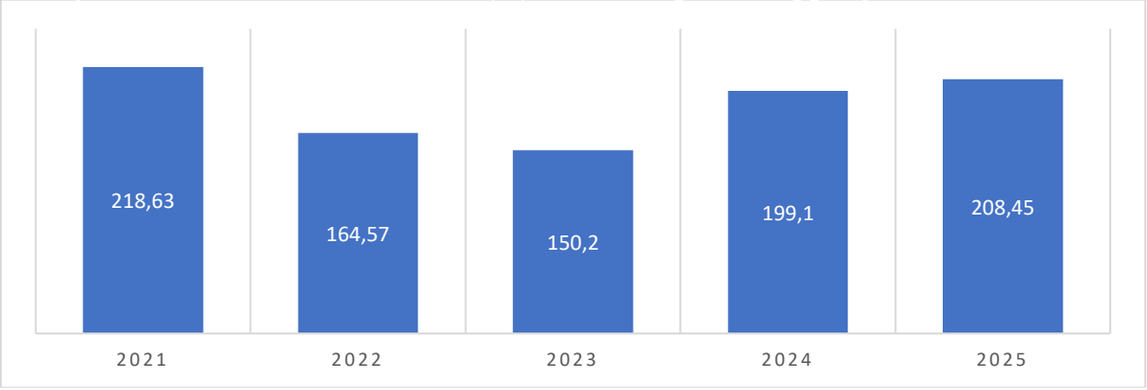
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2026

2.1.5.6. Indeks Pertanaman (IP) Padi

Indeks pertanaman merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui berapa kali dalam satu tahun masyarakat bisa menanami kembali areal lahan sawah nya. Di Kabupaten Soppeng indeks pertanaman (IP) padi dari tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 indeks pertanaman padi Soppeng sebesar 218,63 poin dan mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan angka 164,57 poin. Pada tahun 2023 capaian tersebut menurun dengan angka capaian sebesar 150,2 poin dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 199,1 poin. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan danya peningkatan indeks pertanaman padi dengan nilai sebesar 208,45 poin. Peningkatan indeks pertanaman padi mulai mengalami peningkatan di tahun 2025 dikarenakan kondisi iklim

yang membaik jika dibandingkan pada tahun 2024 yang mengalami musim kemarau panjang. Indeks pertanaman (IP) padi Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 10 - Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

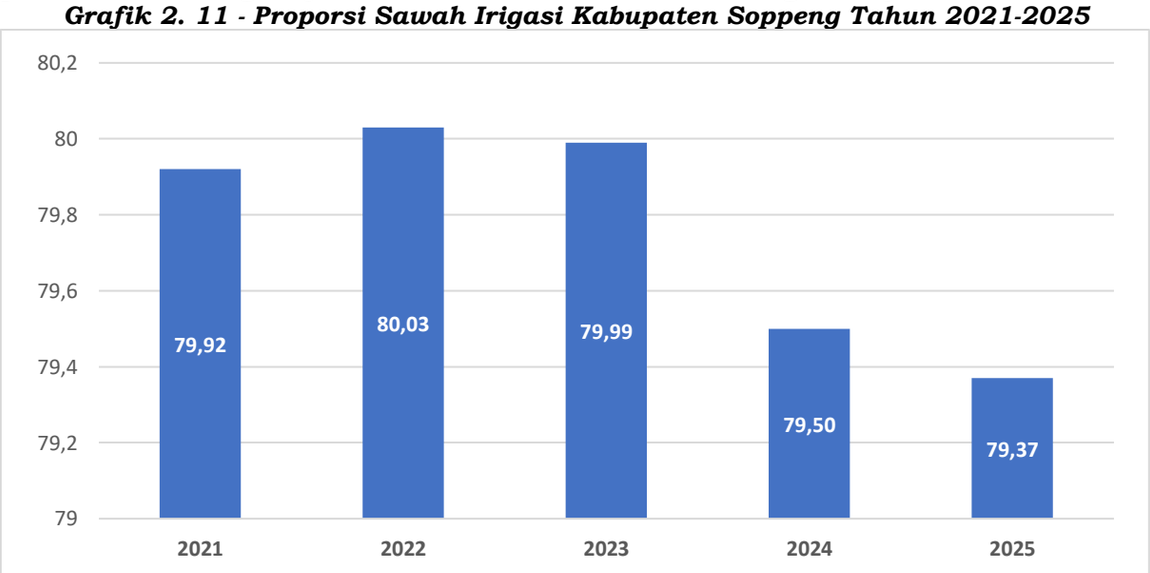


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2026

2.1.5.7. Proporsi Sawah Irigasi

Sawah yang airnya berasal dari air irigasi disebut sawah irigasi. Produksi padi nasional maupun daerah khususnya di Kabupaten Soppeng sebagian besar berasal dari lahan sawah irigasi. Untuk capaian proporsi sawah irigasi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Di tahun 2021 capaian proporsi sawah irigasi di Kabupaten Soppeng sebesar 79,92%, kemudian meningkat di tahun 2022 dengan capaian 80,03%. Pada tahun 2023 capaian tersebut menurun sebesar 79,99%, kembali mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 79,50%. Penurunan proporsi sawah irigasi Kabupaten Soppeng terus berlanjut hingga tahun 2025 dengan capaian sebesar 79,37%. Berdasarkan data tersebut perlu dilakukan pemeliharaan atau rehabilitasi infrastruktur irigasi secara berkala untuk memastikan sistem irigasi tetap dapat mendukung produksi padi. Mengingat capaian fluktuasi data tersebut, perlu adanya dilakukan diversifikasi sumber air untuk mengurangi ketergantungan hanya pada saluran irigasi jika cuaca ekstrim atau kekeringan terjadi.

Grafik 2. 11 - Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



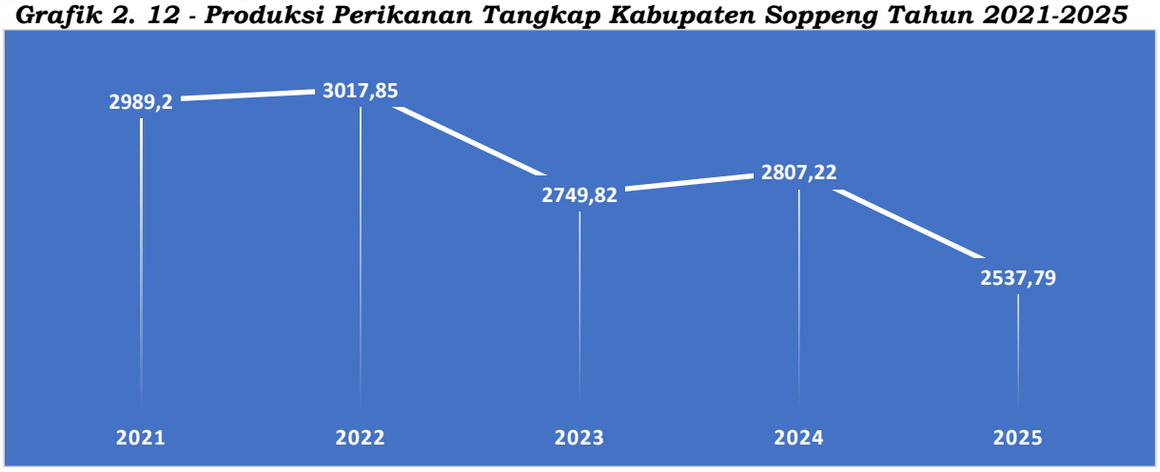
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2026

2.1.5.8. Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap merupakan indikator yang digunakan untuk melihat hasil perikanan di daerah. Indikator ini juga merupakan indikator komponen untuk mengukur indeks ekonomi biru. Di Kabupaten Soppeng sendiri produksi perikanan tangkap dalam 5 tahun terakhir

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap sebesar 2.989,2 ton dan mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar sebesar 3.017,85 ton. Di tahun 2023 produksi perikanan tangkap di Kabupaten Soppeng sebesar 2.749,82 ton meningkat di tahun 2024 sebesar 2.807,22 ton. Kondisi di tahun 2025 terjadi penurunan sebesar 2.537,79 ton. Capaian lima tahun yang mengalami fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain cuaca yang ekstrem, infrastruktur, maupun penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga merusak ekosistem yang mengakibatkan menurunnya populasi ikan. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 12 - Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

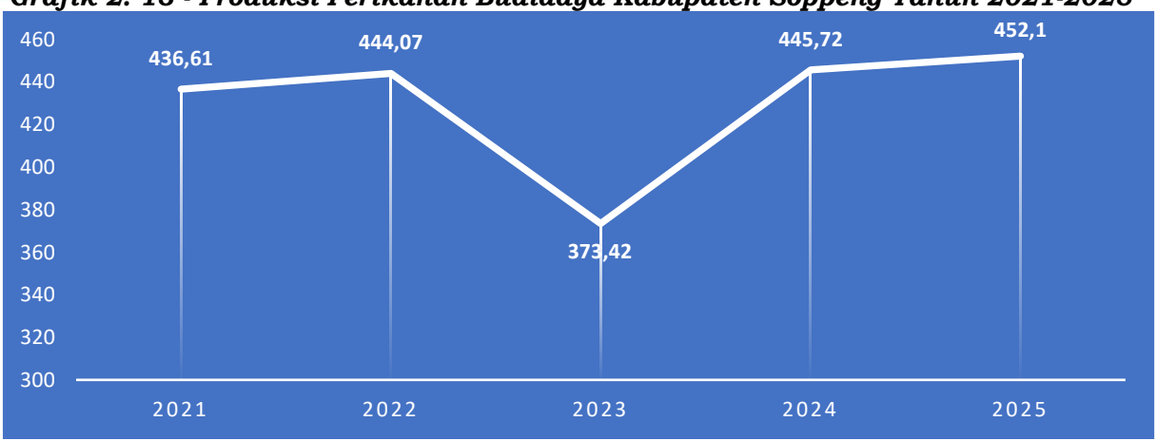


Sumber : Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, 2026

2.1.5.9. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya merupakan indikator pembangunan untuk melihat hasil dari perikanan budidaya. Budidaya perikanan atau perikanan budidaya merupakan kegiatan memproduksi biota (organisme) akuatik (air) untuk mendapatkan hasil. Di Kabupaten Soppeng sendiri produksi perikanan budidaya dalam 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 produksi perikanan budidaya memiliki capaian sebesar 436,61 ton dan meningkat di tahun 2022 sebesar 444,07 ton, akan tetapi di tahun 2023 produksi perikanan budidaya mengalami penurunan sebesar 373,42. Di tahun 2024 produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan sebesar 445,72 ton dan tahun 2025 sebesar 452,1 ton. Pemingkatan produksi perikanan budidaya didukung oleh upaya yang dilakukan oleh pemerintah di desa/kelurahan yang diperkuat oleh regulasi khususnya di Tingkat desa terkait adanya kebijakan alokasi dana desa untuk sektor perikanan melalui program ketahanan pangan, yang meskipun pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah, telah mulai menggerakkan potensi budidaya di tingkat desa. Beberapa desa telah berhasil menerapkan budidaya ikan secara mandiri, yang menjadi percontohan bagi desa lain dalam memanfaatkan lahan produktif, sehingga dengan upaya ini diharapkan agar peningkatan produksi perikanan budidaya kembali mengalami peningkatan di tahun-tahun yang akan datang. Untuk capaian produksi perikanan budidaya tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 13 - Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, 2026

2.1.5.10. Produksi Perikanan

Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Soppeng, meliputi perikanan tangkap di perairan umum dan perikanan budidaya di kolam dan budidaya ikan di sawah (mina padi). Berikut tabel kontribusi produksi perikanan terhadap total produksi tahun 2021-2025.

Tabel 2. 19 - Produksi Perikanan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produksi Ikan	Ton	3.425,70	3.461,93	3.123,24	3.252,94	2.989,89
2	Target Daerah	Ton	3.418	3.452	3.873,61	3.252,94	3.591,54
	Produksi Perikanan	%	100,24	100,3	80,63	100	83,25

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2026

Data produksi perikanan pada tahun 2021 sebesar 3.425,70 ton dan di tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 3.461,93 ton. Peningkatan ini disebabkan kembali normalnya aktifitas penangkapan di Danau Tempe dan kegiatan *restocking* (penebaran benih ikan) mulai rutin dilakukan untuk menormalkan kembali ekosistem perairan pasca revitalisasi. Pada tahun 2023 produksi perikanan mengalami penurunan dengan capaian 3.123,24 ton atau mencapai 180,63,3% dari target sebesar 3.873,61 ton dengan persentase capaian 80,63%. Di tahun 2024 produksi perikanan Kembali meningkat sebesar 3.252,94 ton atau dengan capaian 100%, akan tetapi Kembali mengalami penurunan di tahun 2025 sebesar 2.989,89 ton. Penurunan hasil produksi tersebut dikarenakan kondisi perairan yang didominasi ikan invasi seperti ikan sapu-sapu yang mengancam kelestarian ekosistem perairan danau dan sungai, serta terjadinya kekeringan akibat dari El-Nino sehingga sebagian besar wilayah penangkapan ikan mengalami penyusutan volume air. Upaya yang dilakukan atau digalakkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi perikanan tersebut dengan program pengembangan budidaya ikan sistem bioflok.

2.1.5.11. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan tolak ukur yang sangat penting dalam penentuan indikator kinerja utama di sektor kelautan dan perikanan, karena data konsumsi ikan merupakan data yang menjadi acuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara nasional Berikut tabel kontribusi konsumsi ikan tahun 2021-2025.

Tabel 2. 20 - Konsumsi Ikan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	8.678.000	8.927.850	9.150.200	13.907.163	14.320.811
2	Target Daerah	Kg	8.466.000	8.701.500	8.795.246	13.907.163	14.324.716
	Konsumsi Ikan	%	102,5	102,6	104	100	99,97

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2026

Berdasarkan data di atas, konsumsi ikan pada tahun 2021 sebesar 8.678.000 kg meningkat pada tahun 2022 sebanyak 8.927.850 kg atau mencapai 102,60 % sedangkan pada tahun 2023 meningkat kembali pada capaian 9.150.200 Kg atau mencapai 104% dari target 8.795.246 Kg. Pada tahun 2024 konsumsi ikan di Kabupaten Soppeng sebesar 13.907.163 kg dan di tahun 2025 peningkatan tersebut berlanjut dengan jumlah konsumsi ikan sebesar 14.320.811 ton. Peningkatan tersebut terjadi dikarenakan konsumsi ikan terus terjadi akibat meningkatnya kebutuhan konsumsi ikan yang diproduksi dari hasil tangkapan dan budidaya. Faktor lain mendukung peningkatan tersebut yakni adanya promosi/kampanye gemar makan ikan bagi masyarakat, khususnya bagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan pemerintah mendorong industri atau kelompok pengolahan untuk melakukan inovasi atau diversifikasi penganekaragaman hasil olahan perikanan yang dapat bersaing dengan hasil olahan makanan lainnya.

2.1.5.12. Timbulan Sampah yang Ditangani

Timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Soppeng di tahun 2020 sebesar 65,85%, jumlah tersebut terus meningkat sampai tahun 2021 menjadi 74,06% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 dengan volume timbulan sampah yang ditangani sejumlah 80.843,58 m3 dari total timbunan sampah sebanyak 104.223,64 m3 atau mencapai 77,57%. Pada tahun 2023 menurun dengan capaian 69.449,5 m3 atau 66,5% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 80,29% dengan volume 79.982,71 m3. Peningkatan persentase ini menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam menangani sampah dari tahun ke tahun. Namun, fluktuasi pada 2023 dapat menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan sampah yang harus diatasi.

Tabel 2. 21 - Timbulan Sampah yang Ditangani Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHU				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Volume timbulan sampah yang ditangani	m3	7.672,30	77.888,24	80.843,58	69.449,50	79.982,71
2	Total timbulan sampah	m3	11.650,36	105.173,09	104.223,64	104.433,70	99.617,05
	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	65,85	74,06	77,57	66,5	80,29

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.1.5.13. Pengelolaan Sampah

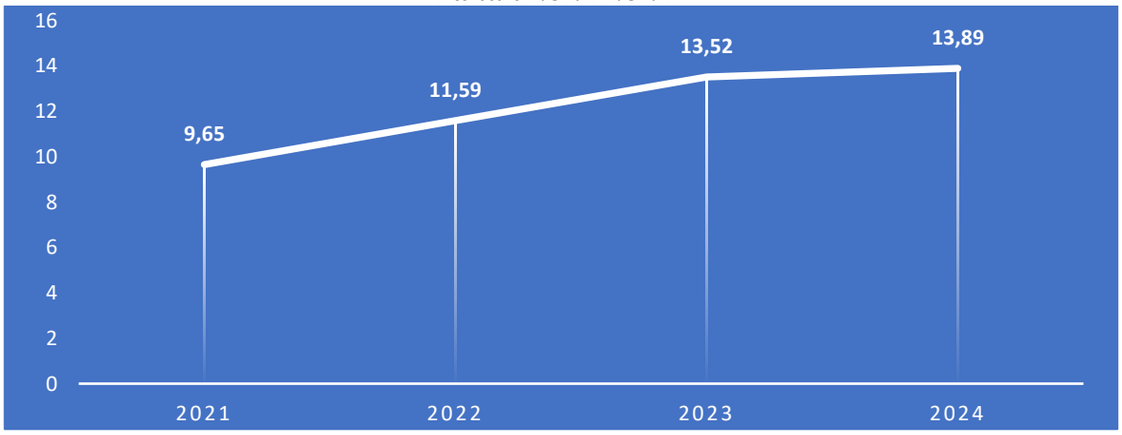
Sampah menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan saat ini. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

a. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat.

Grafik 2. 14 - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Tahun 2021-2024



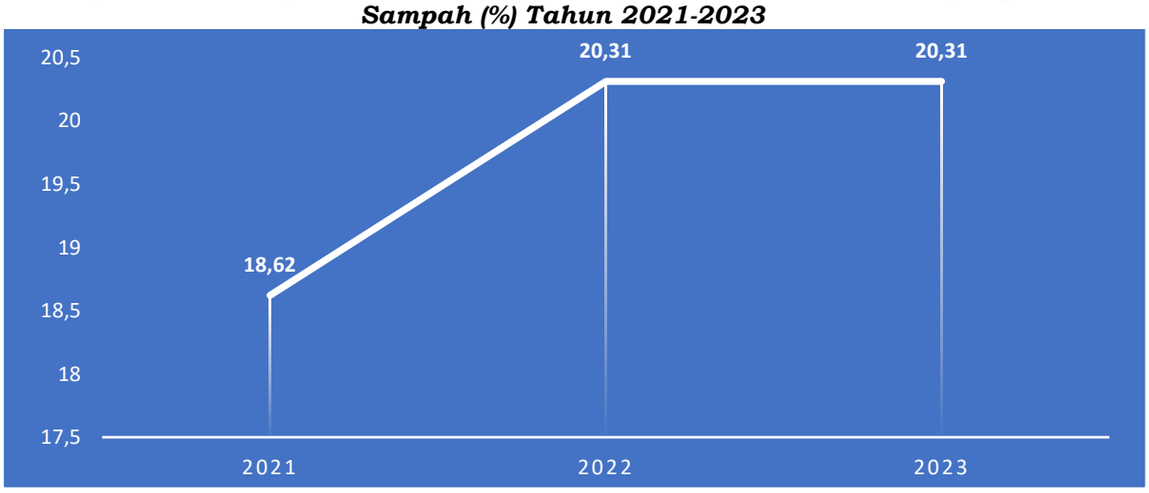
Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah menunjukkan angka yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun, capaian tersebut mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 11,92%, hal ini menunjukkan bahwa persentase timbulan sampah yang belum terkelola dengan baik masih tinggi.

b. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan seharihari dalam rumah tangga, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Grafik 2. 15 – Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Dasar Pengumpulan Sampah (%) Tahun 2021-2023



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Proporsi rumah tangga dengan layanan dasar pengumpulan sampah menunjukkan peningkatan pada tahun 2022, tetapi stagnan pada tahun 2023. Capaian tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 yaitu 33,31% dan capaian Nasional yaitu 38,9%.

Pengukuran rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah baru dilaksanakan mulai tahun 2025, untuk data capaian tahun 2024 capaian Kabupaten Soppeng sebesar 2,10%.

Tabel 2. 22 - Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2024 (%)

Kabupaten	Jumlah Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Soppeng	1.243	2,10

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

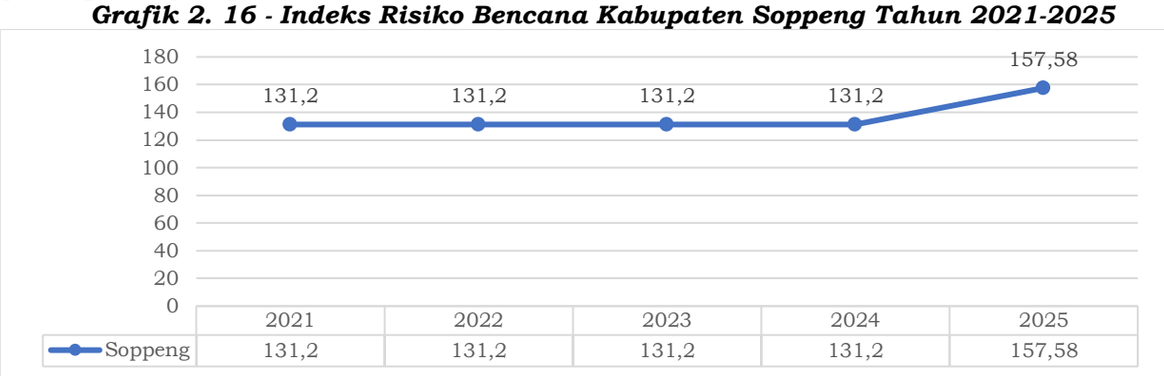
2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Untuk menggambarkan resiliensi bencana dapat dilihat berdasarkan capaian indeks resiko bencana dan persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebagai berikut ini.

2.1.6.1. Indeks Risiko bencana

Indeks Risiko Bencana merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di suatu daerah. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 131,20 dan mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 157,58. Peningkatan Indeks Risiko Bencana tersebut dikarenakan adanya penyesuaian terhadap metode pengukuran indeks tersebut dari tahun sebelumnya. Capaian indeks risiko bencana Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 16 - Indeks Risiko Bencana Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

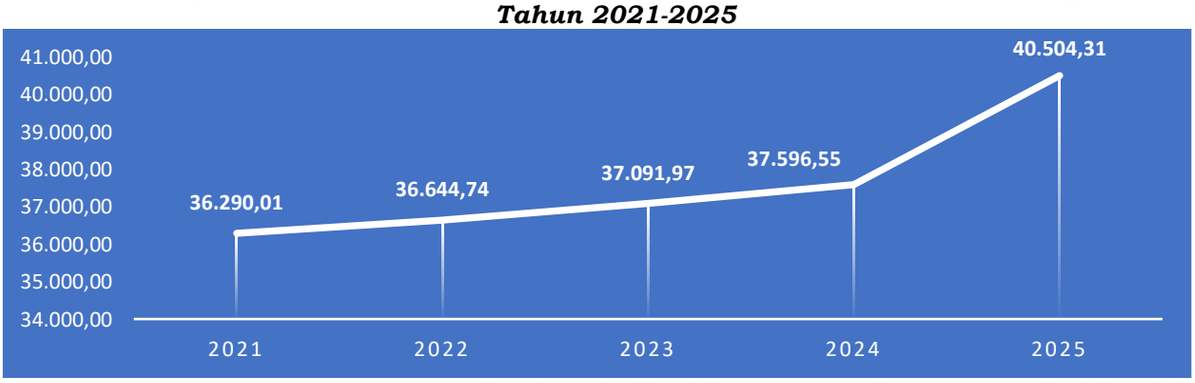


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2026

2.1.6.2. Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2 eq)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain mengatur keterlibatan pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaporkan kegiatan aksi mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK). Kegiatan dilaporkan melalui aplikasi AKSARA (Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional) sejak tahun 2018. Capaian potensi penurunan emisi GRK dengan satuan Ton Co^2 eq sebagaimana yang terdapat pada aplikasi aksara) disajikan dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan. Terkait indikator persentase penurunan emisi GRK (kumulatif dan tahunan) merupakan indikator baru, sehingga baseline data 2024 dan tahun sebelumnya belum tersedia. Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (Ton Co^2 eq) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 17 – Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton Co^2 eq) Tahun 2021-2025



Sumber : Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Berdasarkan nilai potensi kumulatif, Kabupaten Soppeng berkontribusi sebesar 4,02 Ton CO^2 EQ / Milyar Rupiah Intensitas Emisi. Total Kegiatan Aksi PRK Perubahan Iklim yang telah dilaksanakan sebanyak 125 kegiatan. Total potensi penurunan emisi kumulatif gas rumah kaca di Kabupaten Soppeng tahun 2025 sebesar 37.596,55 ton Co^2 eq, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 40.504,31 ton Co^2.

2.1.7. Demografi

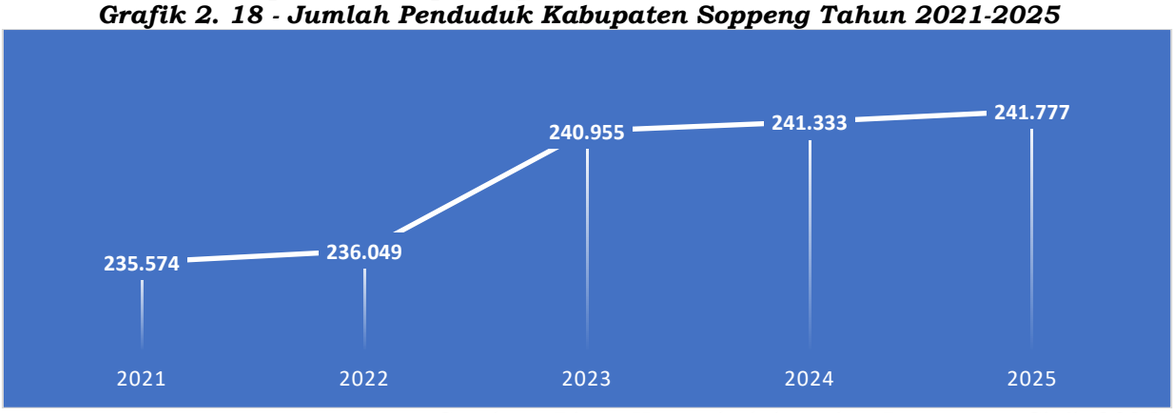
Dalam pengetahuan tentang sumber daya manusia dikenal istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Penduduk merupakan salah satu elemen dasar dan penting dalam pembentukan dan perencanaan suatu wilayah, dinamika penduduk yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya menjadikan wilayah berkembang. Oleh karenanya, aspek karakteristik maupun kondisi kependudukan harus menjadi dasar atau landasan bagi perencana dalam penyusunan rencana tata ruang.

Hingga akhir tahun 2025 jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng menunjukan kenaikan angka yang cukup signifikan. Hasil data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan Kabupaten Soppeng saat ini dihuni penduduk sebanyak 241.777 jiwa. Angka tersebut memberikan indikator pesatnya kegiatan pembangunan yang perlu disiapkan di masa yang akan datang. Secara umum kondisi kependudukan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat sebagaimana berikut ini.

2.1.7.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan peningkatan, pada tahun 2021 mencapai 235.574 jiwa dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2025 telah mencapai 241.777 jiwa. Jumlah penduduk tersebut dikategorisasi pada kelompok umur < 15 - > 65 tahun, < 15 tahun dan > 65 tahun. Capaian jumlah penduduk dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 18 - Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

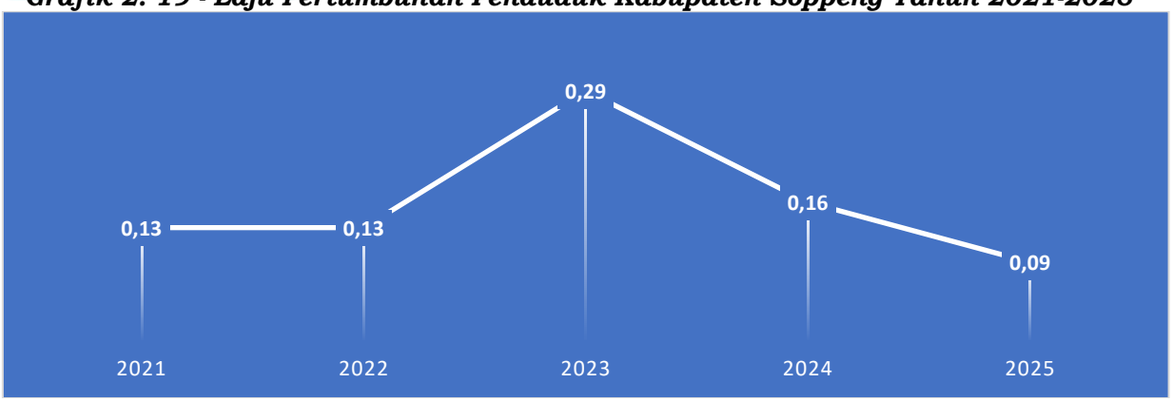


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

2.1.7.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk ditentukan oleh perubahan dinamika kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Soppeng cenderung naik, untuk periode 2021-2025. Angka laju pertumbuhan tersebut masih termasuk dalam kategori lambat, karena angka pertumbuhan penduduk masih kurang dari 1% setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 19 - Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

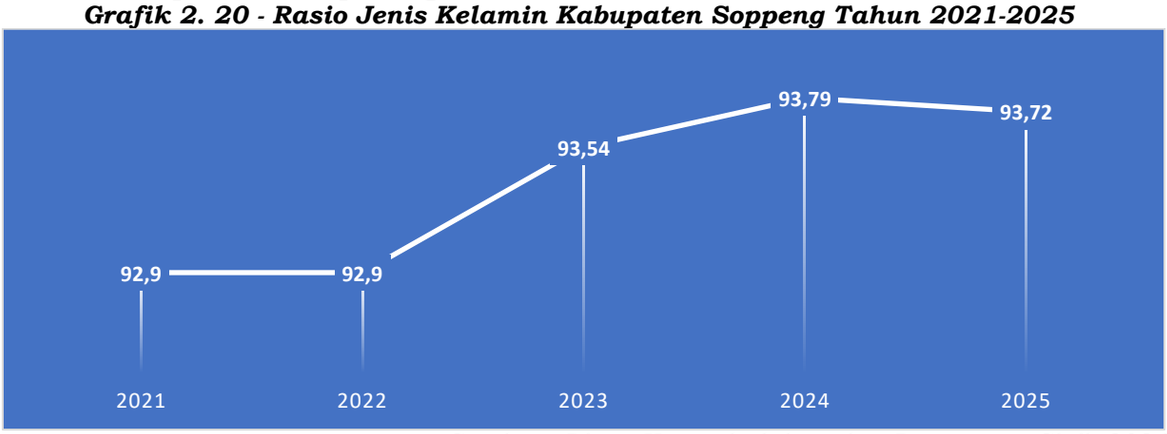


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

2.1.7.3. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Untuk Kabupaten Soppeng, rasio jenis kelamin di lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2021 sebesar 92,9 kemudian meningkat hingga mencapai 93,79 di tahun 2024. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan rasio jenis kelamin dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 93,72. Capaian rasio jenis kelamin dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 20 - Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

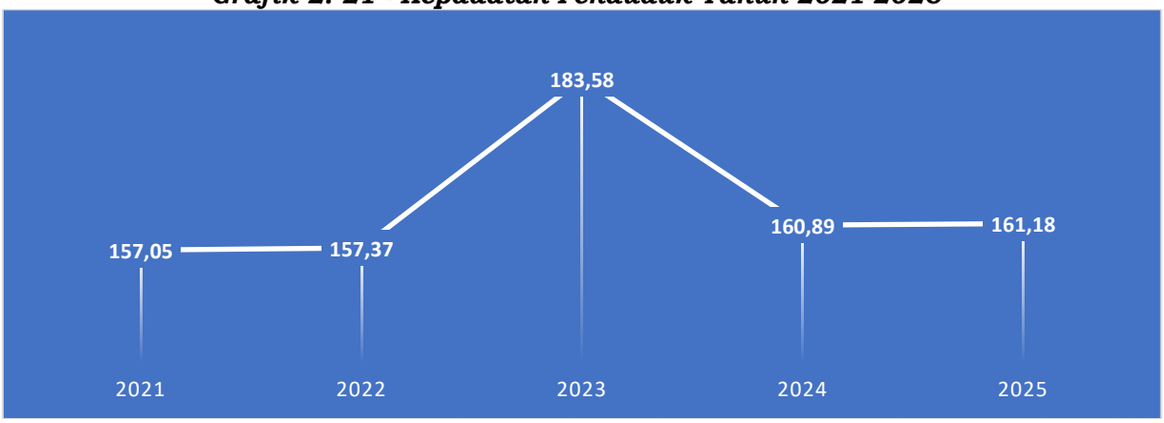


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

2.1.7.4. Kepadatan Penduduk (Orang/Km²)

Kepadatan penduduk adalah indikator yang digunakan untuk melihat rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Untuk Kabupaten Soppeng kepadatan penduduk per km² pada tahun 2021 sebesar 157,05 jiwa per km² selanjutnya meningkat sampai pada tahun 2023 dengan capaian 183,58 jiwa per km². Kepadatan penduduk tersebut menurun pada tahun 2024 sebesar 160,89 jiwa per km² dan mengalami kenaikan di tahun 2025 sebesar 161,18 jiwa per km². Capaian kepadatan penduduk dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 21 - Kepadatan Penduduk Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

2.1.7.5. Proyeksi Jumlah Total Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan suatu perkiraan jumlah penduduk berdasarkan metode tertentu dengan asumsi-asumsi kelahiran, kematian dan migrasi. Menurut para ahli demografi, "perkiraan" pada umumnya dipergunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk untuk jangka waktu antara sensus dan sesudah sensus diselenggarakan. Sedangkan "proyeksi" mengandung pengertian bahwa kecenderungan penduduk pada masa yang akan datang masih belum diketahui, dan nilai tentang masa depan merupakan petunjuk mengenai jumlah penduduk masa depan apabila diterapkan angka fertilitas, moralitas dan imigrasi tertentu yang mungkin berlaku.

Proyeksi penduduk dapat dikatakan sebagai perkiraan penduduk di masa depan berdasarkan kecenderungan saat ini dan masa lalu. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Soppeng yang berjumlah 241.777 jiwa ada tahun 2025 diproyeksikan menjadi 248.721 jiwa pada tahun 2030. Untuk proyeksi penduduk Kabupaten Soppeng hingga tahun 2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 23 - Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng

Kecamatan/Kabupaten	Penduduk Tahun 2025 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa) Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
MARIORIWAWO	49.596	50.050	50.316	50.584	50.855	51.127
LILIRIAJA	28.910	29.132	29.266	29.402	29.538	29.710
LILIRILAU	39.036	39.300	39.475	39.651	39.829	39.982
LALABATA	50.256	50.437	50.645	50.854	51.064	51.252
MARIORIAWA	29.374	29.700	29.849	29.998	30.149	30.434
DONRI-DONRI	24.732	24.867	25.001	25.136	25.271	25.394
GANRA	11.659	11.961	12.035	12.109	12.184	12.267
CITTA	8.214	8.276	8.346	8.417	8.488	8.556
KABUPATEN SOPPENG	241.777	243.723	244.933	246.151	247.378	248.721

Sumber : RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 (Diolah)

2.1.7.6. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Soppeng berdasarkan jenis kelamin menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki di tahun 2030. Untuk proyeksi penduduk Kabupaten Soppeng berdasarkan jenis kelamin sampai tahun 2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 24 - Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2025 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa) Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki	116.971	117.732	118.429	119.131	119.836	119.780
Perempuan	124.806	125.991	126.504	127.020	127.542	128.941
Rasio	93,72	93,44	93,62	93,79	93,96	92,9

Sumber : RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 (Diolah)

2.1.7.7. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Untuk jumlah penduduk Kabupaten Soppeng berdasarkan Kelompok Umur yang dibagi ke dalam 3 kategori yakni umur 0-14 tahun, umur 15-64 tahun, umur 65 tahun ke atas. Dalam kelompok umur tersebut di dominasi oleh kelompok umur produktif yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun. Di tahun 2025 kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 163.996 jiwa dengan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2030 pada kelompok tersebut sebanyak 170.671 jiwa. Untuk kelompok umur 0-14 pada tahun 2025 sebanyak 45.260 jiwa dengan proyeksi penduduk pada tahun 2030 sebanyak 49.446 jiwa. Sedangkan untuk kelompok umur 65 tahun ke atas di tahun 2025 sebanyak 32.521 jiwa dengan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2030 pada kelompok umur tersebut sebanyak 28.604 jiwa.

Tabel 2. 25 - Proyeksi Penduduk Kabupaten Soppeng Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2025 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa) Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
0-14 Tahun	45.260	47.529	48.301	49.048	49.519	49.446
15-64 Tahun	163.996	166.933	167.823	168.755	169.807	170.671
> 65 Tahun	32.521	29.261	28.809	28.348	28.052	28.604

Sumber : RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 (Diolah)

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

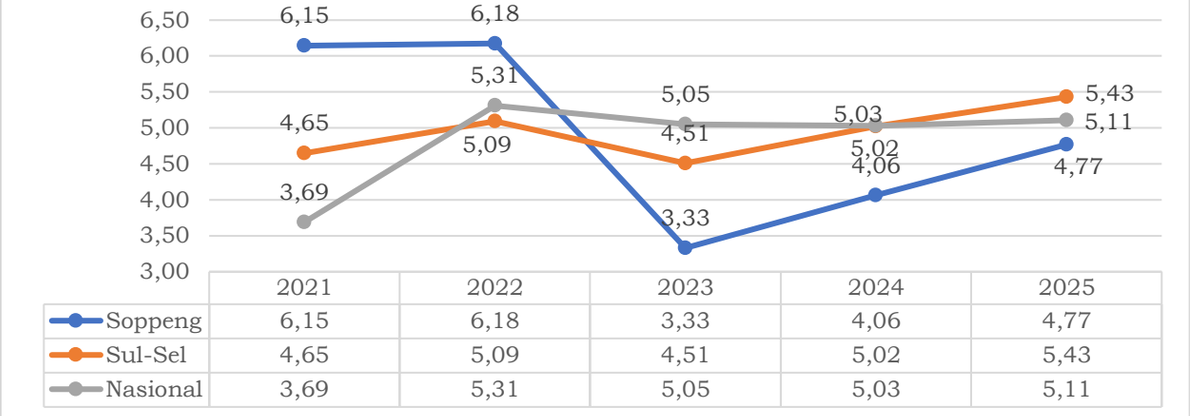
Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi Aspek kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Kondisi kedua aspek ini dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif.

Grafik 2. 22 - Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	6,15	6,18	3,33	4,06	4,77
Sul-Sel	4,65	5,09	4,51	5,02	5,43
Nasional	3,69	5,31	5,05	5,03	5,11

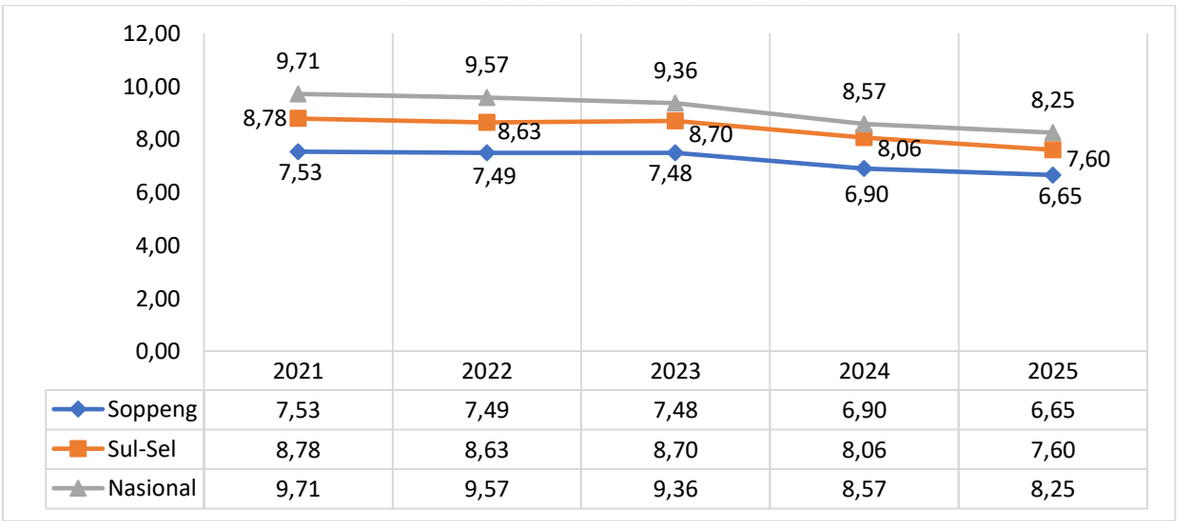
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 dengan capaian 3,33%, dan mengalami pertumbuhan pada tahun 2024 dengan capaian 4,06%, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 4,77%. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya hasil pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capaian pada angka 5,43% dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11% di tahun 2025. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun capaian Nasional.

2.2.1.2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang /rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar. Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus terintegrasi untuk menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut grafik kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025.

Grafik 2. 23 - Tingkat Kemiskinan Kabupaten Soppeng, ProvinsiSulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	7,53	7,49	7,48	6,90	6,65
Sul-Sel	8,78	8,63	8,70	8,06	7,60
Nasional	9,71	9,57	9,36	8,57	8,25

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun.

Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Analisis ekonomi daerah

dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Pada tahun 2025 Perekonomian Kabupaten Soppeng menunjukkan trend positif dari sisi pertumbuhan, meskipun dalam perjalanannya terdapat kondisi yang mempengaruhi melambatnya pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat dicerminkan dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB). PDRB ADHB Kabupaten Soppeng tahun 2023 sebesar Rp14.909,33 miliar rupiah, dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp16.099,18 miliar rupiah. Capaian tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar Rp17.397,80 miliar rupiah, dimana usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHB terbesar di tahun 2025 sebesar Rp5.540,91 miliar rupiah disusul sektor konstruksi dengan nilai tercatat sebesar Rp2.254,82 miliar rupiah dan sektor Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar Rp2.237,46 miliar rupiah. Sektor-sektor yang lain juga memiliki kontribusi yang mendorong atau mendukung dalam pembentukan PDRB dengangambaran aktivitas perekonomian di Kabupaten Soppeng yang mengalami pertumbuhan. Terkait gambaran pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 terangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 26 - Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2021-2025

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.564,66	3.928,38	4.244,13	4.898,08	5.540,91
B	Pertambangan dan Penggalian	534,2	575,18	588,75	615,91	670,79
C	Industri Pengolahan	1.255,90	1.418,48	1.612,26	1.748,01	1.921,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,89	10,57	11,77	12,46	13,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,32	5,79	5,86	5,68	5,54
F	Konstruksi	1.761,45	2.056,69	2.320,11	2.313,96	2.254,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.573,58	1.725,15	1.943,12	2.097,31	2.237,46
H	Transportasi dan Pergudangan	374,61	434,72	530,28	563,6	608,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	186,67	216,52	237,8	241,63	270,8
J	Informasi dan Komunikasi	415,22	432,63	447,53	477,17	513,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	416,54	457,74	465,84	494,88	549,11
L	Real Estate	617,44	655,51	671,34	709,32	754,32
M,N	Jasa Perusahaan	24	27,76	29,36	31,53	32,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	731,85	749,41	739,75	766,36	799,55
P	Jasa Pendidikan	624,51	694,56	707,3	755,82	827,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	242,11	259,41	260,32	268	294,38
R,S, T,U	Jasa lainnya	88,83	93,34	93,82	99,44	102,81
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		12.426,78	13.741,84	14.909,33	16.099,18	17.397,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan produktivitas ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar konstan, PDRB ADHK Kabupaten Soppeng menggambarkan pola yang sama dengan PDRB ADHB yang mengalami kinerja positif. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 sebesar Rp8.660,66 miliar rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar Rp9.073,58

miliar rupiah.

Tabel 2. 27 - Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2021-2025

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.017,70	2.098,08	2.034,78	2.125,25	2.263,44
B	Pertambangan dan Penggalian	246,97	258,01	256,80	268,96	266,44
C	Industri Pengolahan	753,02	817,72	909,24	955,72	1.017,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,76	10,25	10,90	11,23	11,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,38	4,73	4,74	4,62	4,50
F	Konstruksi	1.007,67	1.109,34	1.179,79	1.167,99	1.127,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.092,25	1.152.25	1.263,13	1.343,13	1.410,20
H	Transportasi dan Pergudangan	216,80	239,17	271,34	284,48	306,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	131,96	144,91	158,32	158,46	171,86
J	Informasi dan Komunikasi	341,95	358,15	370,33	392,75	419,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	222,31	227,06	226,01	236,75	255,16
L	Real Estate	351,63	364,92	369,41	388,90	412,73
M,N	Jasa Perusahaan	16,75	18,48	18,93	19,93	19,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	440,35	448,15	435,78	439,21	449,49
P	Jasa Pendidikan	511,91	567,40	577,45	619,50	677,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166,01	177,27	177,23	182,29	197,33
R,S, T,U	Jasa lainnya	54,57	58,50	58,36	61,50	63,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**7.585,98**	**8.054,42**	**8.322,53**	**8.660,66**	**9.073,58**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Berdasarkan dari komponen penyusunnya, kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan produktivitas tertinggi di Kabupaten Soppeng dengan kontribusi pada tahun 2025 sebesar Rp2.263,44 miliar rupiah. Selanjutnya kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp1.410,20 miliar rupiah dan Konstruksi sebesar Rp1.127,31 miliar rupiah. Hal ini sektor utama perekonomian di Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 tetap memberikan kontribusi yang cukup memadai di tengah tantangan ekonomi.

Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha konstruksi. Konstruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng.

2.2.1.4. Distribusi Sektoral

Distribusi sektoral memberikan gambaran sejauh mana peranan sektor lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Soppeng. Distribusi PDRB Kabupaten Soppeng pada tahun 2021-2025 didominasi oleh sektor primer, dimana pada tahun 2025 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku kontribusi tertinggi pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 31,85% dan sektor kedua kontribusi tertinggi adalah konstruksi sebesar 12,96%,sedangkan kontribusi terendah pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan sebesar 0,03%.

Tabel 2. 28 - Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (Persen)

Kate Gori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,69	28,59	28,47	30,42	31,85
B	Pertambangan dan Penggalian	4,30	4,19	3,95	3,83	3,86
C	Industri Pengolahan	10,11	10,32	10,81	10,86	11,04

Kate Gori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
F	Konstruksi	14,17	14,97	15,56	14,37	12,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,66	12,55	13,03	13,03	12,86
H	Transportasi dan Pergudangan	3,01	3,16	3,56	3,50	3,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,50	1,58	1,59	1,50	1,56
J	Informasi dan Komunikasi	3,34	3,15	3,00	2,96	2,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,35	3,33	3,12	3,07	3,16
L	Real Estate	4,97	4,77	4,50	4,41	4,34
M,N	Jasa Perusahaan	0,19	0,20	0,20	0,20	0,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,89	5,45	4,96	4,76	4,60
P	Jasa Pendidikan	5,03	5,05	4,74	4,69	4,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,95	1,89	1,75	1,66	1,69
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,71	0,68	0,63	0,62	0,59
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

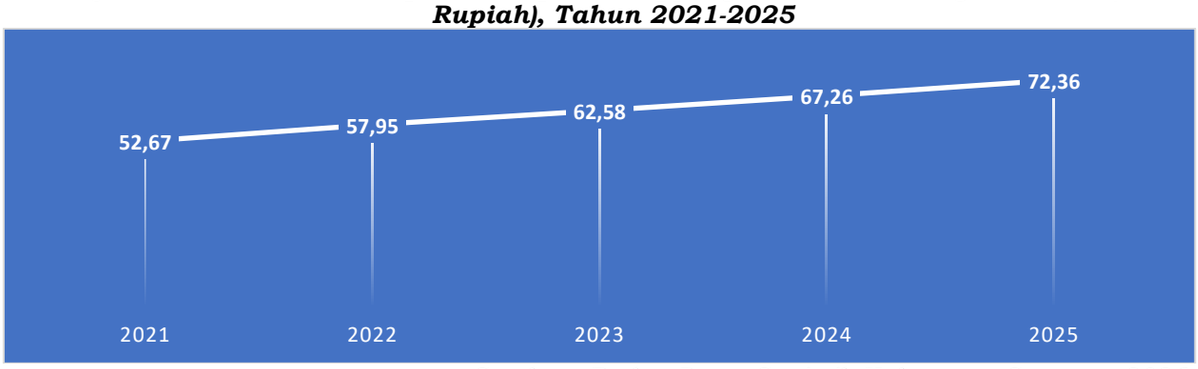
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha, perlu dicermati tentang peranan setiap sektor dan sektor apa saja yang merupakan sektor basis (*base sector*) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Soppeng terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.1.5. PDRB PerKapita

PDRB perkapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indikator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar Rp52,66 juta dan mengalami peningkatan tahun 2022 menjadi Rp57,95 Juta. Pada tahun 2023 PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng kembali mengalami peningkatan menjadi Rp62,58 juta dan di tahun 2024 sebesar Rp67,26 juta. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan kembali peningkatan sebesar Rp72,36 juta. Capaian PDRB per kapita Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 24 - PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

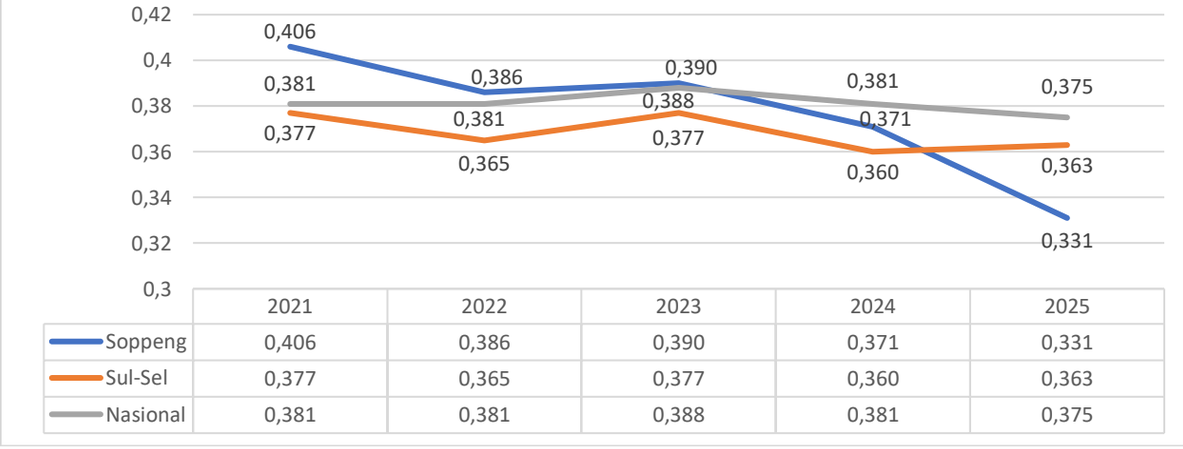
2.2.1.6. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran konsumsi atau variable-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisen Indeks Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, maka semakin tinggi pula ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Jika nilai gini rasio mendekati satu, maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sebaliknya apabila nilai gini rasio kecil atau mendekati nol, makan semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Klasifikasi nilai gini rasio:

GR < 0,3 → ketimpangan rendah
0,3 ≤ GR ≤ 0,5 → ketimpangan sedang
GR > 0,5 → ketimpangan tinggi

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh gini ratio selama tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi, dengan capaian gini ratio terendah sebesar 0,331 poin pada tahun 2025. Pada Tahun 2025, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,331 poin, mengalami penurunan sebesar 0,040 poin dari tahun 2024 yang menunjukkan capaian sebesar 0,371 poin. Angka rasio gini Kabupaten Soppeng lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio gini di Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 0,363 poin dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Nasional sebesar 0,375 poin. Walaupun demikian, masih berada pada ketimpangan sedang. Capaian rasio gini dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 25 - Rasio Gini Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025



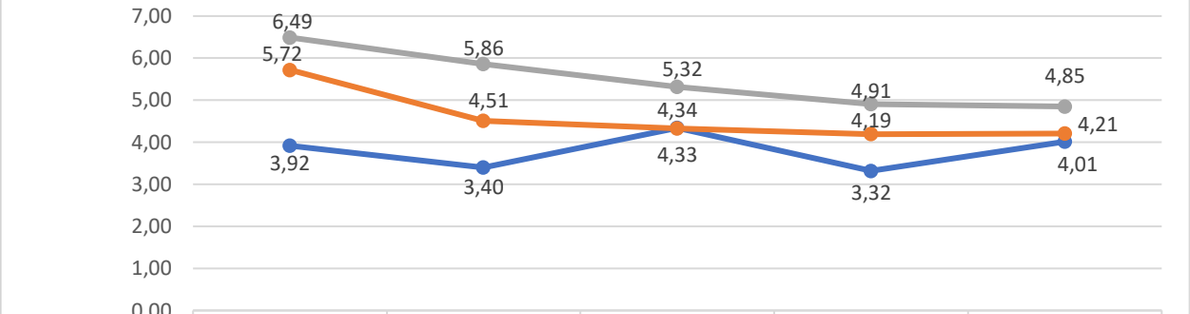
	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	0,406	0,386	0,390	0,371	0,331
Sul-Sel	0,377	0,365	0,377	0,360	0,363
Nasional	0,381	0,381	0,388	0,381	0,375

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada grafik selama 5 tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif dengan capaian yang lebih baik dari capaian nasional dan capaian provinsi. Pada tahun 2025 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 4,01%, akan tetapi capaian tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian provinsi maupun nasional. Hal tersebut disebabkan karena dikarenakan meningkatnya jumlah usia produktif bekerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Capaian tingkat pengangguran terbuka dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 26 - Tingkat Pengangguran Terbuka di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng



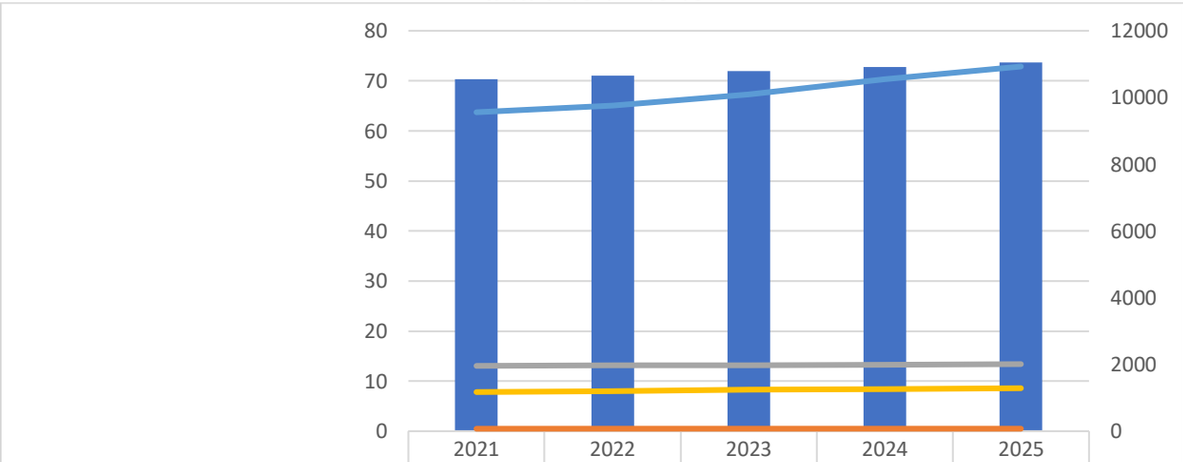
	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	3,92	3,40	4,34	3,32	4,01
Sul-Sel	5,72	4,51	4,33	4,19	4,21
Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Grafik 2. 27 - IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2021-2025

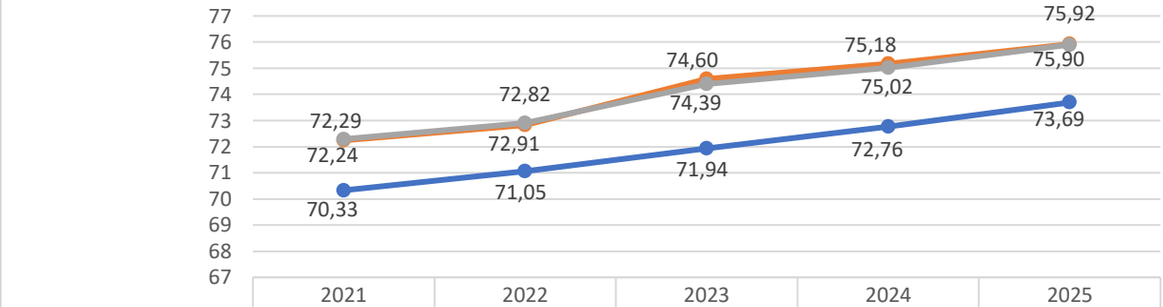


	2021	2022	2023	2024	2025
IPM	70,33	71,05	71,94	72,76	73,69
Harapan Lama sekolah (Tahun)	13,05	13,20	13,21	13,22	13,40
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,82	7,96	8,27	8,45	8,59
Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,78	73,17	73,47	73,77	74,21
Pengeluaran Perkapita (Juta/Rupiah/Orang/Tahun)	9558	9756	10098	10547	10929

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Dalam kurun waktu lima tahun IPM Kabupaten Soppeng mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun melalui penghitungan dengan metode baru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yakni survei penilaian 2020. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 70,33 poin meningkat di tahun 2022 telah mencapai 71,05 poin, di tahun 2023 kembali meningkat dengan capaian 71,94 poin atau naik sebanyak 0,89 poin. Pada tahun 2023 capaian IPM Kabupaten Soppeng naik menjadi 71,94 poin dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 72,76 poin. Kondisi di tahun 2025 menunjjukkan kembali peningkatan sebesar 73,69 poin. Peningkatan tersebut menjadi indikator bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik. Akan tetapi, IPM Kabupaten Soppeng masih berada di bawah nilai IPM Nasional dengan capaian 75,90 poin dan IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75,92 poin. Untuk capaian IPM tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 28 - IPM Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025



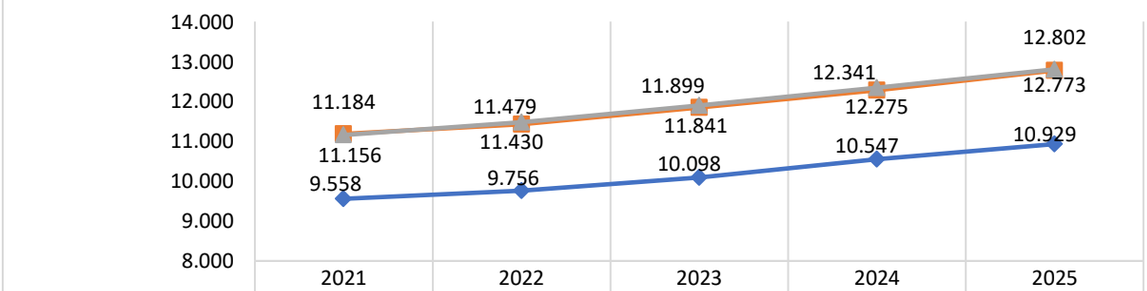
	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	70,33	71,05	71,94	72,76	73,69
Provinsi Sul-Sel	72,24	72,82	74,60	75,18	75,92
Nasional	72,29	72,91	74,39	75,02	75,90

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.2.1.9. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng selama 5 (lima tahun terakhir memperlihatkan trend kenaikan. Pada tahun 2021 tercatat capaian pengeluaran perkapita sebesar Rp9.558.000 hingga tahun 2022 mencapai sebesar Rp9.756.000 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.098.000,00 dan Rp10.547.000,00. Di tahun 2025 pengeluaran per kapita Kabupaten Soppeng kembali meningkat dengan capaian sebesar Rp10.929.000,00, walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng masih lebih rendah dibanding dengan nasional yang sebesar Rp12.802.000,00 dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp12.773.000,00.

Grafik 2. 29 - Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah) Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dan Daerah Sekitar Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	9.558	9.756	10.098	10.547	10.929
Provinsi Sul-Sel	11.184	11.430	11.841	12.275	12.773
Nasional	11.156	11.479	11.899	12.341	12.802

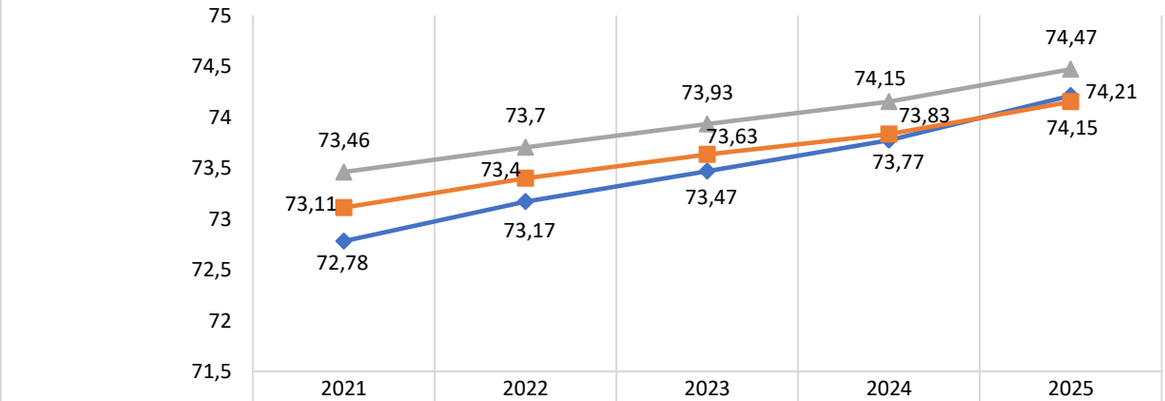
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.2.2. Kesehatan untuk Semua

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup di Kabupaten Soppeng menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan pengukuran atau survei penilaian 2020, pada tahun 2021 rata-rata angka harapan hidup mencapai 72,78 tahun, meningkat setiap tahun hingga mencapai 74,21 di tahun 2025. Meskipun terjadi peningkatan, capaian ini masih di bawah rata-rata nasional sebesar 74,47 tahun, akan tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan capaian provinsi Sulawesi Selatan sebesar 74,15 tahun. Capaian usia harapan hidup dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 30 - Usia Harapan Hidup di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	72,78	73,17	73,47	73,77	74,21
Provinsi Sul-Sel	73,11	73,4	73,63	73,83	74,15
Nasional	73,46	73,7	73,93	74,15	74,47

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.2.2.2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravida rum, perdarahan per vaginal, hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia, eklampsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah. Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia, eklampsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda. Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsia, eklampsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Tabel 2. 29 - Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif	Jiwa	417	367	357	329	824
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Jiwa	417	592	357	329	824
	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	100	61,99	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional.

Pada tahun 2021 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

mencapai 100% berarti setiap ibu dengan komplikasi kebidanan mendapatkan penanganan definitif. Pada tahun 2022 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menurun hingga 61,99% namun pada tahun 2023 sampai tahun 2025 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami peningkatan hingga 100% dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif sebanyak 357 jiwa pada tahun 2023, 329 jiwa di tahun 2024 dan 824 jiwa di tahun 2025.

2.2.2.3. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2021 mencapai 100%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 94,37%. Pada tahun 2023 sampai tahun 2025 kembali meningkat dengan capaian 100% dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 2.225 orang dan jumlah sasaran ibu bersalin sebanyak 2.225 orang pada tahun 2025.

Tabel 2. 30 - Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jiwa	2.811	2.700	2.578	2.296	2.225
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Jiwa	2.811	2.861	2.578	2.296	2.225
	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100	94,37	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.2.2.4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu merupakan jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas. Angka kematian ibu pada tahun 2021 mencapai 71,68 per 100.000 kelahiran hidup, dan tahun 2022 mengalami peningkatan dengan capaian 74,10 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 116,46 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2024 angka kematian ibu meningkat dengan capaian 249,58,46 per 100.000 kelahiran hidup, di tahun 2025 terjadi penurunan dengan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebanyak 181.

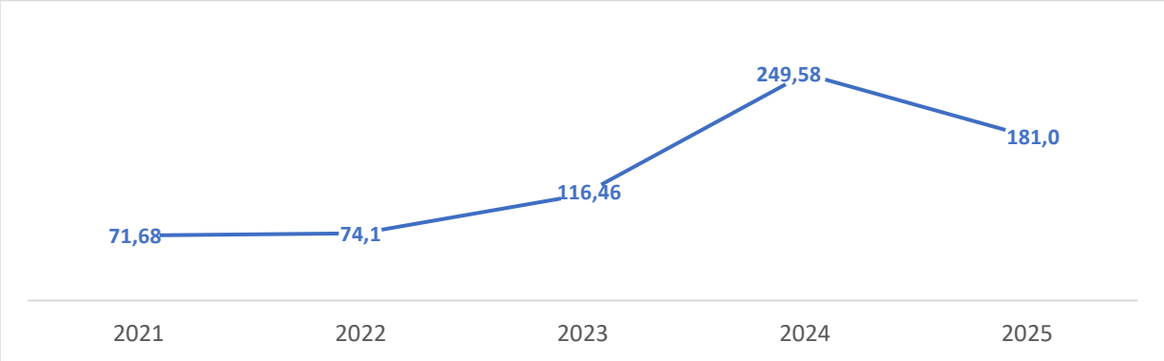
Kondisi tersebut di atas masih diperlukan berbagai upaya yang berkelanjutan untuk menurunkan angka tersebut. Risiko komplikasi yang terjadi pada ibu hamil dapat berkurang jika sebelum hamil ibu sehat dan bergizi baik, selama kehamilan melakukan pelayanan antenatal ke petugas kesehatan minimal 4 kali, saat persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten, kemudahan dalam mengakses layanan rujukan, serta ibu dan bayi mendapatkan layanan neonatal dan nifas. Berikut angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Tahun 2021-2025 dalam bentuk tabel dan grafik.

Tabel 2. 31 - Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	202	2025
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	Jiwa	2	2	3	6	4
2	Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	2.790	2.699	2.576	2.404	2.209
	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	71,68	74,10	116,46	249,58	181,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

Grafik 2. 31 - Diagram Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

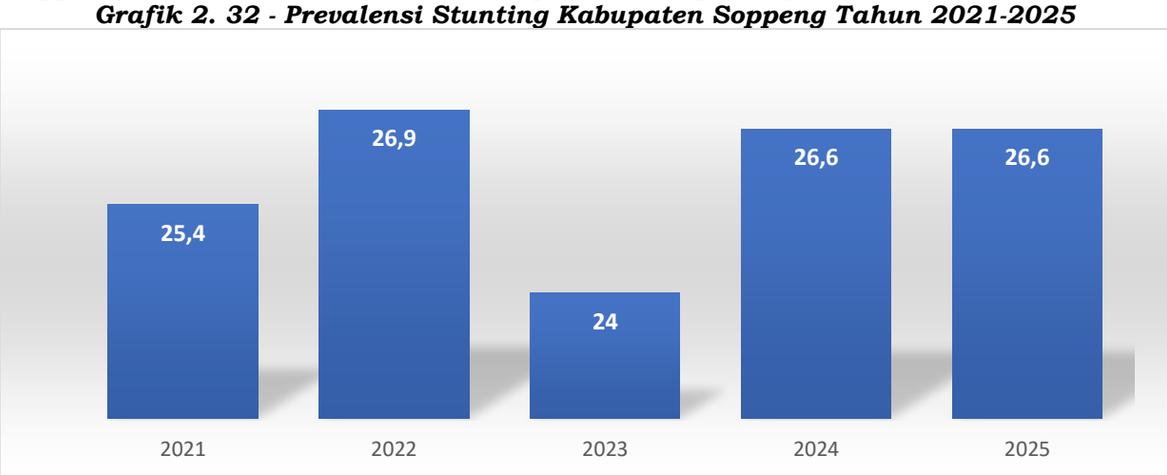
2.2.2.5. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)

Prevalensi balita stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi nilainya, semakin serius dan mendesak perluasan upaya untuk mengatasi masalah ini.

Dalam pengukuran penilaian stunting dilakukan dengan 2 metode yakni e-PPGBM dan SSGI. E-PPGBM merupakan sistem elektronik pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat yang memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang dientri setiap bulan oleh Pengelola Gizi di tiap-tiap Puskesmas. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan survei berskala nasional yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan status gizi balita (stunting, wasting, dan underweight) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Capaian prevalensi stunting berdasarkan SSGI Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebesar 25,4%, menurun dari tahun ke tahun hingga mencapai angka sebesar 24% di tahun 2023. Pada tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Soppeng kembali mengalami peningkatan sebesar 26,6%. Pada tahun 2025 tidak ada survei yang dilakukan terkait status gizi sehingga capaian stunting Kabupaten Soppeng mengacu pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut masih menunjukkan adanya tantangan besar dalam mencapai target ideal penurunan stunting, kondisi tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan melalui program-program perbaikan gizi dan kesehatan yang selanjutnya harus terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Capaian prevalensi stunting Kabupaten Soppeng dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 32 - Prevalensi Stunting Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

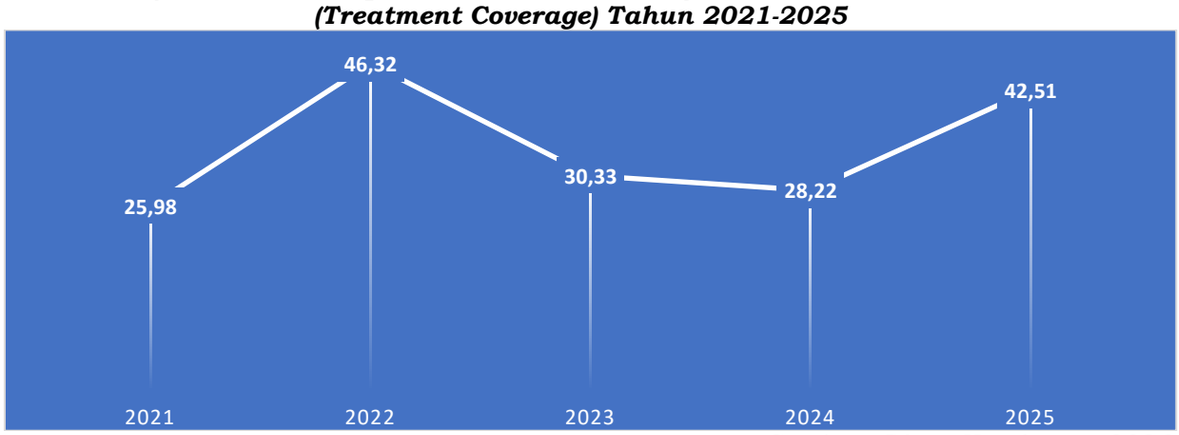


Sumber : Dinas Kesehatan, 2026

2.2.2.6. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis % (*Treatment Coverage*)

Perkiraan jumlah semua kasus TB merupakan insiden dalam per 100.000 penduduk dibagi dengan 100.000 dikali dengan jumlah penduduk. Misalnya: perkiraan insiden di suatu wilayah adalah 200 per 100.000 penduduk dan jumlah penduduk sebesar 1.000.000 orang maka perkiraan jumlah semua kasus TB adalah (200:100.000) x 1.000.000 = 2.000 kasus. Program nasional pengendalian tuberkulosis mulai menerapkan strategi pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung (*Directly Observed Treatment Short-course*, DOTS) yang dilaksanakan di Puskesmas secara bertahap. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 33 - Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Tahun 2021-2025



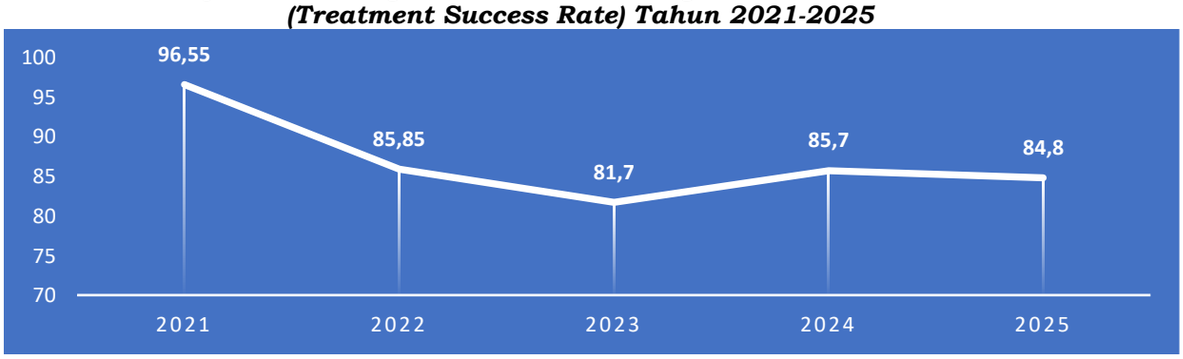
Sumber : Dinas Kesehatan, 2026

2.2.2.7. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis % (*Treatment Success Rate*)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis merupakan jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan TB.

Angka kesembuhan semua kasus pada tahun 2021 sebesar 96,55% dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 252 jiwa dari 261 jiwa pasien TB paru BTA yang diobati dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 85,85%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 81,7%. Capaian tersebut mengalami peningkatan di tahun 2024 dengan capaian sebesar 85,7% dan menurun di tahun 2025 dengan capaian sebesar 84,8%.

Grafik 2. 34 – Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis % (Treatment Success Rate) Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kesehatan, 2026

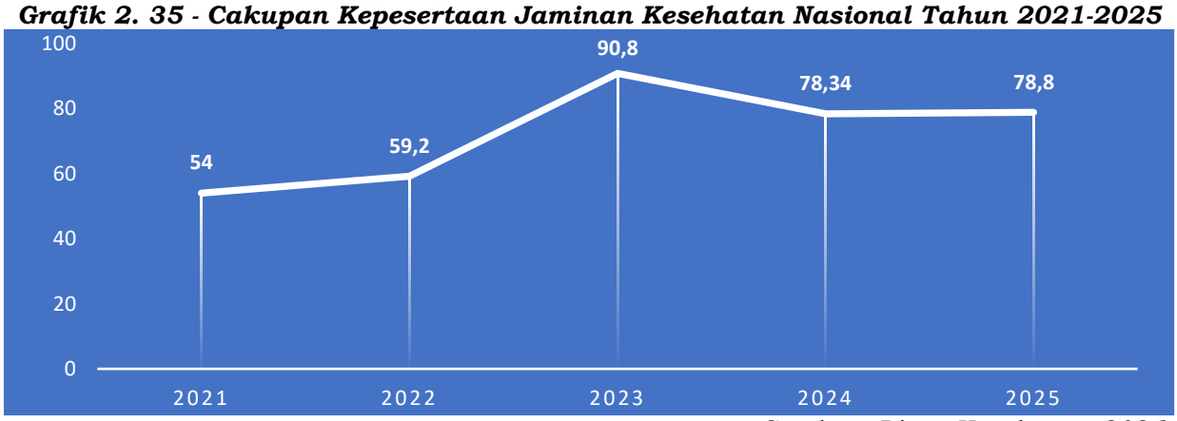
2.2.2.8. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat,

secara medis dan maupun non medis, bermanfaat secara komprehensif; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (*personal care*).

Berikut capaian kinerja cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025.

Grafik 2. 35 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2021-2025

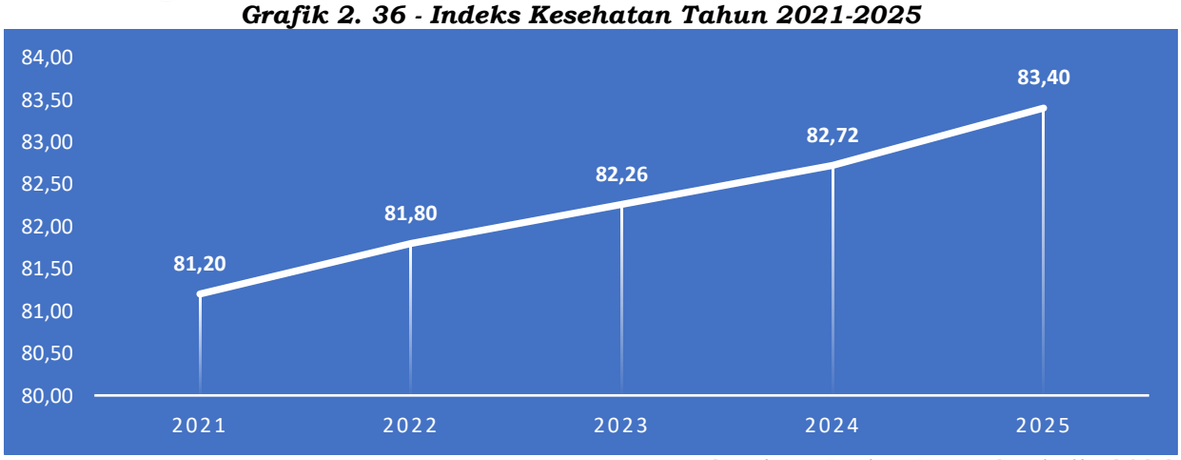


Sumber : Dinas Kesehatan, 2026

2.2.2.9. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang kesehatan. Ukuran kinerja pembangunan di bidang kesehatan akan tertuang dalam besarnya pencapaian indeks kesehatan. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 indeks kesehatan (metode baru) di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2021 sebesar 81,20 dan pada tahun 2022 sebesar 81,80 meningkat pada tahun 2023 dan 2024 dengan masing-masing capaian sebesar 82,26 dan 82,72. Kondisi di tahun 2025 indeks Kesehatan Kembali mengalami peningkatan sebesar 83,40. Berdasarkan hasil capaian lima tahun terakhir tersebut membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor kesehatan selama kurun waktu tersebut, meskipun secara keseluruhan peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup besar terhadap angka IPM di Kabupaten Soppeng. Adapun perkembangan indeks kesehatan di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 sebagai berikut ini.

Grafik 2. 36 - Indeks Kesehatan Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

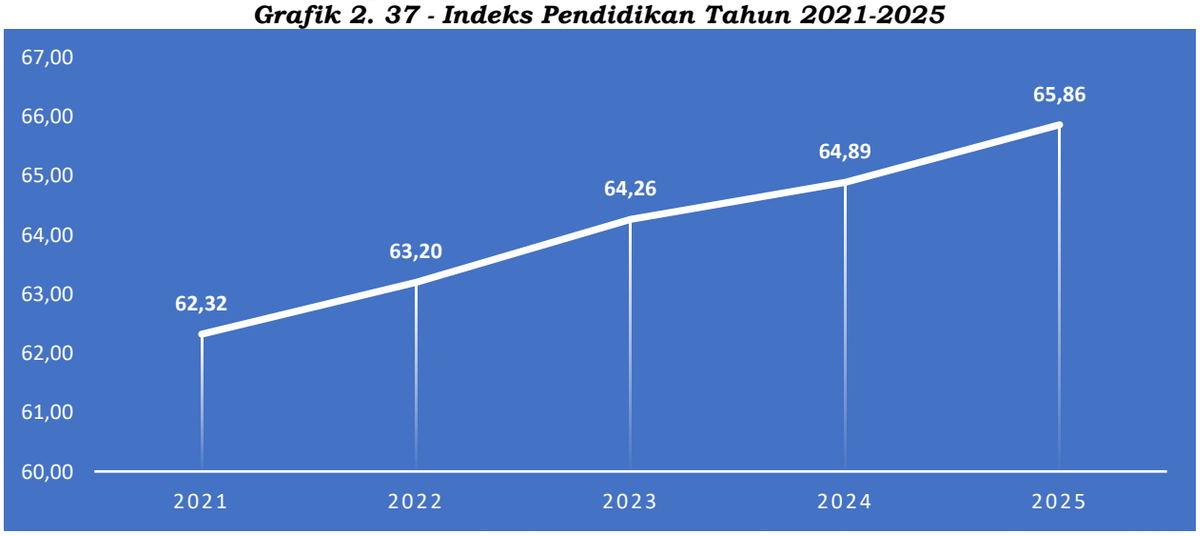
2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks pendidikan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Ukuran kinerja pembangunan di bidang pendidikan akan tertuang dalam besarnya pencapaian indeks

pendidikan. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana tahun 2021 sebesar 62,32 poin. Pada tahun 2022 sebesar 62,20 poin, meningkat pada tahun 2023 dengan capaian 64,26 poin dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 64,89 poin. Kondisi di tahun 2025 indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng meningkat sebesar 65,86%. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor pendidikan selama lima tahun terakhir, meskipun secara keseluruhan peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup besar terhadap angka IPM di Kabupaten Soppeng. Adapun perkembangan indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 sebagai berikut.

Grafik 2. 37 - Indeks Pendidikan Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan data tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan persentase untuk numerasi sebesar 8,67 %. Dari tahun 2022 ke tahun 2023 juga terjadi peningkatan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi sebesar 23,17 %. Peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 20,55 %.

Tabel 2. 32 – Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi Tahun 2021-2024

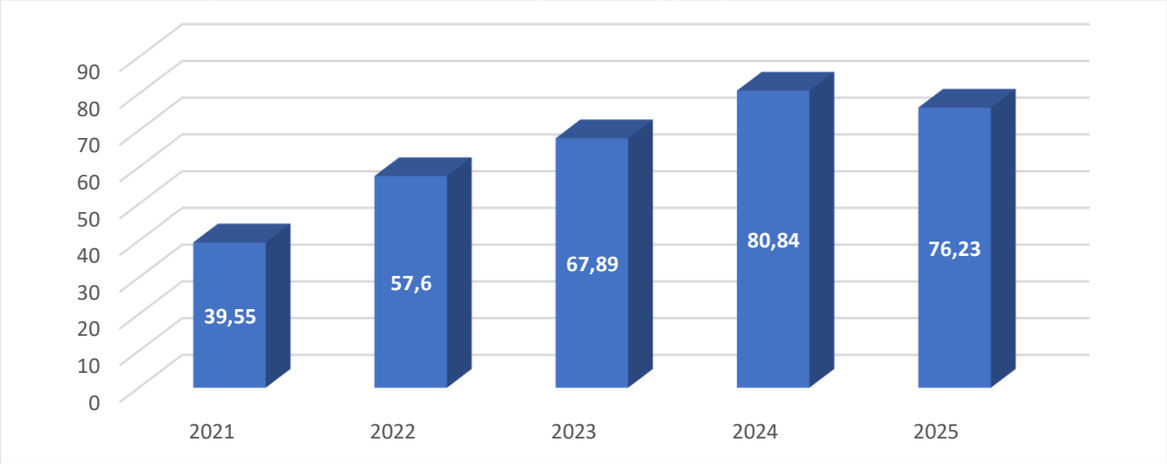
Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	6,27	14,94	38,11	58,66

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.3.2. Literasi Membaca

Literasi membaca merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informational dan teks fiksi) maupun rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi membaca teks informasi dan teks sastra. Untuk di Kabupaten Soppeng sendiri nilai literasi membaca di empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 nilai literasi membaca Kabupaten Soppeng sebesar 37,80 poin kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 39,55 poin dan kembali meningkat di tahun 2022 dan 2023 dengan nilai sebesar 57,6 poin dan 67,89 poin. Di tahun 2024 angka literasi Kabupaten Soppeng kembali meningkat dengan capaian sebesar 80,84 poin. Nilai literasi membaca Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 38 - Literasi Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 akan tetapi di tahun 2025 terjadi penurunan capaian literasi membaca di Kabupaten Soppeng. Berdasarkan data tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan persentase untuk literasi membaca sebesar 5,17 %. Dari tahun 2022 ke tahun 2023 juga terjadi peningkatan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi membaca sebesar 19,75 %. Serta peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 8,3%.

Tabel 2. 33 – Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca Tahun 2021-2024

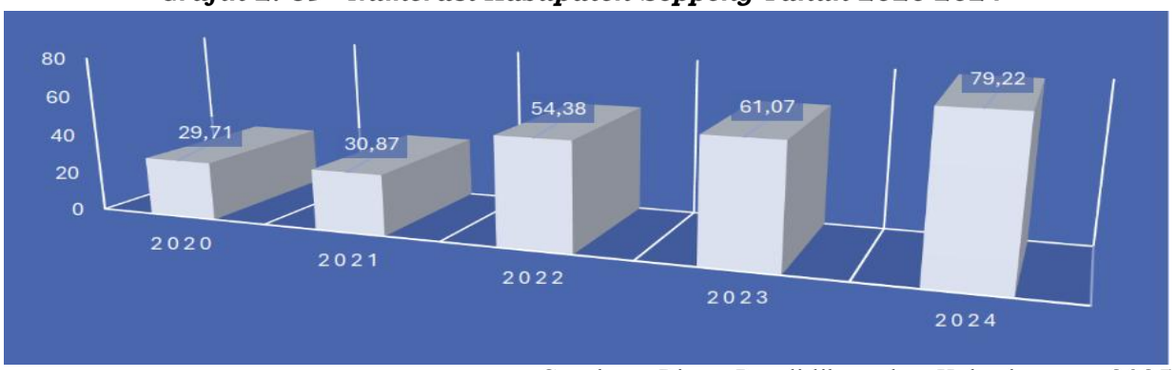
Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca	27,25	32,42	52,17	60,47

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.3.3. Numerasi

Numerasi merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan serta rata-rata nilai peserta didik berdasarkan kompetensi pada domain bilangan, aljabar, geometri, data dan ketidakpastian. Di Kabupaten Soppeng sendiri nilai numerasi empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk tahun 2020 nilai numerasi di tingkat Kabupaten Soppeng sebesar 29,71 poin kemudian meningkat sebesar 30,87 poin pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terus berlangsung pada tahun 2022 dengan nilai 54,38 poin dan tahun 2023 dengan nilai 61,07 poin. Di tahun 2024 angka numerasi Kabupaten Soppeng meningkat dengan capaian sebesar 79,22 poin. Nilai numerasi Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 39 - Numerasi Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

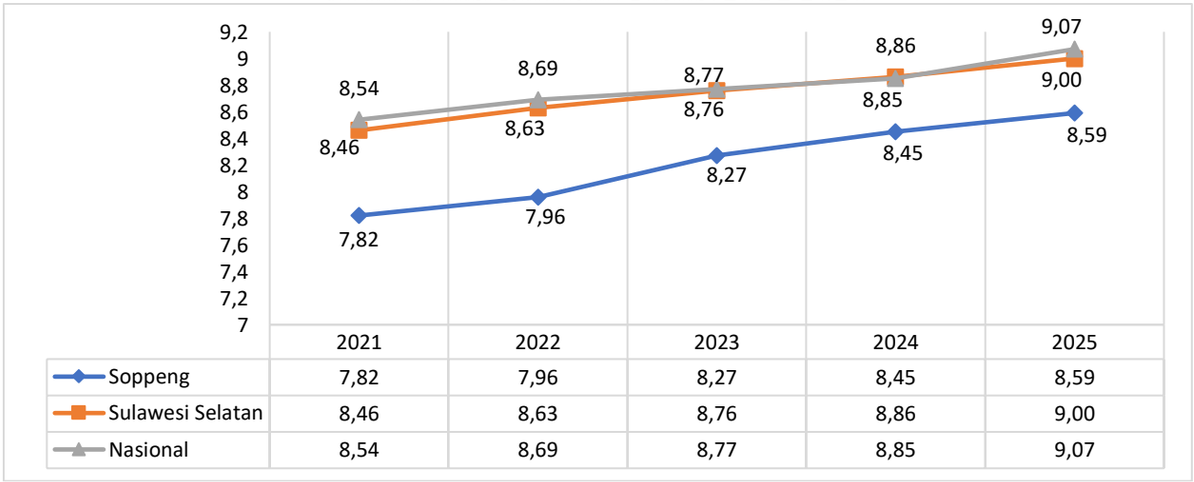


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

2.2.3.4. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun tahun 2021 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng sebesar 7,82 tahun. Capaian tersebut mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 7,96 tahun dan tahun 2023 menjadi 8,27 tahun. Trend positif tersebut berlanjut di tahun 2024 dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng sebesar 8,45 tahun dan 2025 sebesar 8,59 tahun. Akan tetapi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 9,00 tahun dan tingkat Nasional yang sebesar 9,07 tahun.

Grafik 2. 40 - Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi-Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025



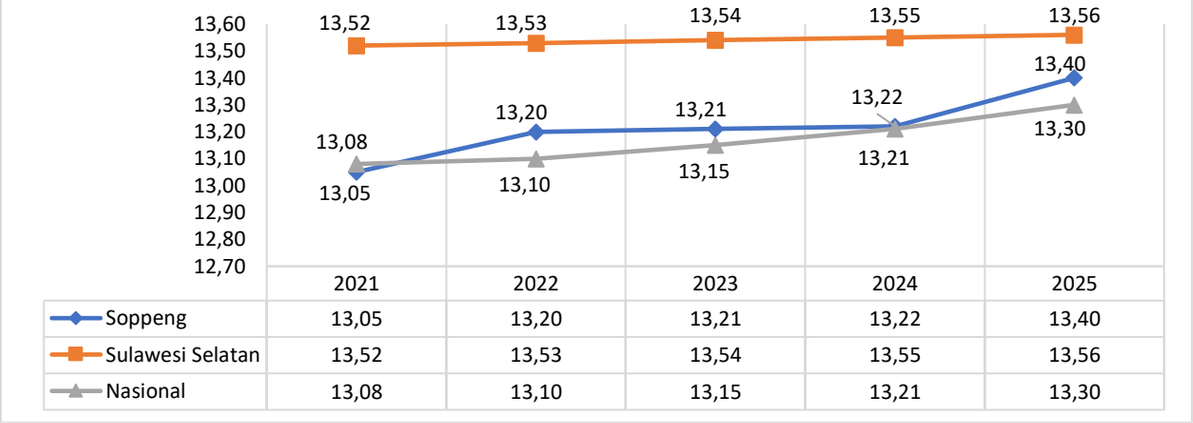
	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	7,82	7,96	8,27	8,45	8,59
Sulawesi Selatan	8,46	8,63	8,76	8,86	9,00
Nasional	8,54	8,69	8,77	8,85	9,07

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.2.3.5. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka harapan Lama Sekolah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 menjadi 13,05 sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi 13,20 tahun dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 13,21 tahun. Trend positif tersebut berlanjut di tahun 2024 dengan harapan lama sekolah sebesar 13,22 tahun dan tahun 2025 sebesar 13,40 tahun. Akan tetapi ketika dibandingkan dengan harapan lama sekolah di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan angka harapan lama sekolah Kabupaten Soppeng masih rendah. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 41 - Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025



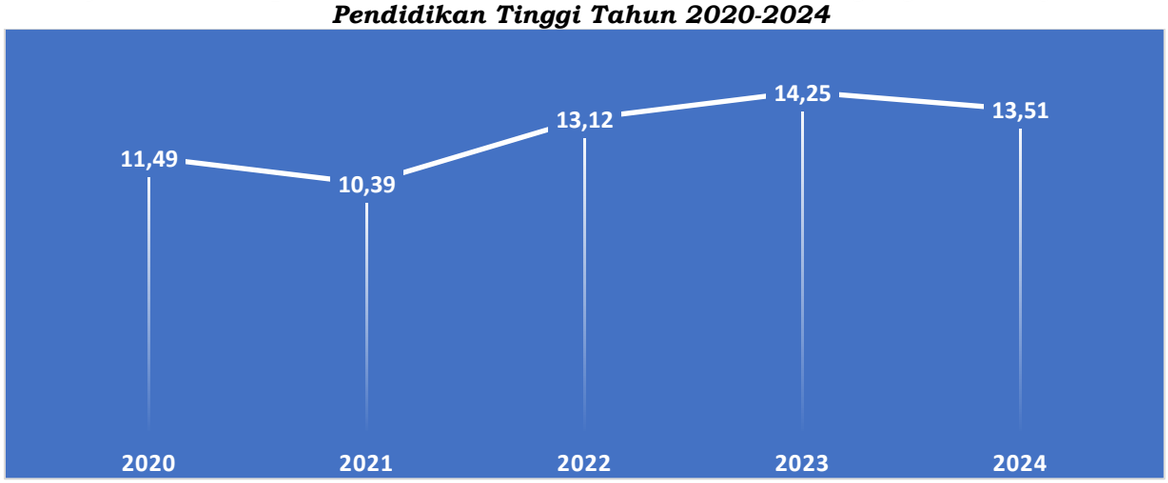
	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	13,05	13,20	13,21	13,22	13,40
Sulawesi Selatan	13,52	13,53	13,54	13,55	13,56
Nasional	13,08	13,10	13,15	13,21	13,30

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.2.3.6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi merupakan salah satu indikator untuk melihat jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng pada sektor pendidikan. Di Kabupaten Soppeng sendiri proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk tahun 2020 capaian Kabupaten Soppeng sebesar 11,49% kemudian menurun di tahun 2021 sebesar 10,39%. Capaian tersebut terus mengalami peningkatan sehingga capaian pada tahun 2022 sebesar 13,12% dan tahun 2023 sebesar 14,25%. Di tahun 2024 capaian tersebut kembali mengalami penurunan dengan angka sebesar 13,51%. Peningkatan capaian yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga peningkatan tersebut dapat sejalan dengan peningkatan pembangunan daerah. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 42 - Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

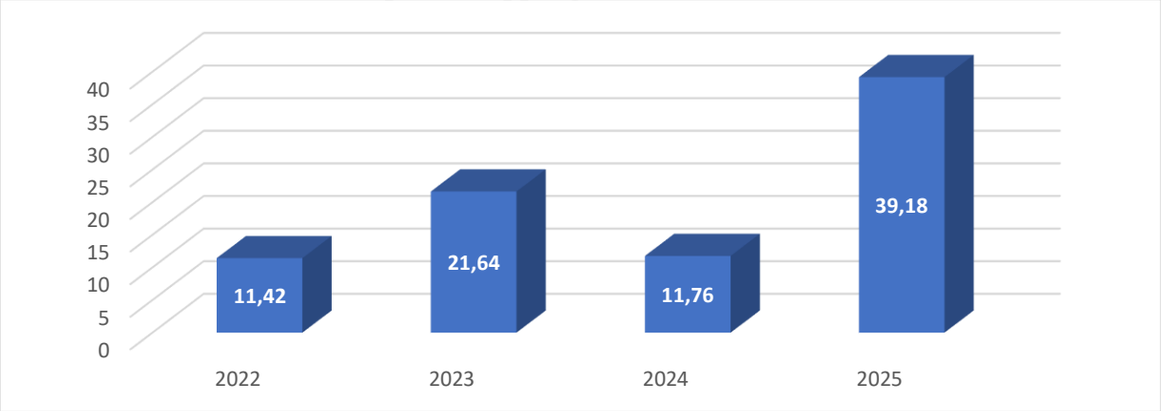
2.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan suatu bentuk perlindungan bagi tenaga kerja berupa santunan uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Penyelenggaraan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ini

dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Secara umum, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terklasifikasi kedalam kelompok peserta aktif dan non-aktif. Peserta aktif sendiri terdiri dari segmen Penerima Upah (PU), segmen Bukan Penerima Upah (BPU), dan Jasa Konstruksi.

Grafik 2. 43 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2026

Pada tahun 2022 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 11,42%, mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan capaian sebesar 21,64%. Di tahun 2024 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami penurunan sebesar 11,76% mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 39,18%. Berdasarkan capaian tersebut dalam tiga tahun terakhir masih mengalami fluktuasi sehingga masih dibutuhkan upaya oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Soppeng dengan menyosialisasikan akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

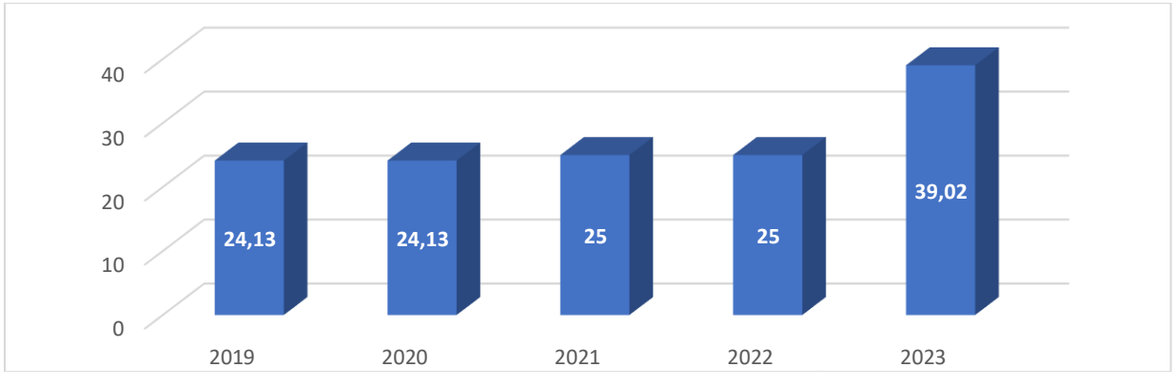
Indikator ini menunjukkan persentase jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah. Pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Semua benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh daerah secara keseluruhan dilestarikan oleh daerah. Salah satu bentuk pelestarian adalah melakukan perlindungan. Perlindungan terdiri dari penyelamatan dan pengamanan, zonasi, serta pemeliharaan dan pemugaran.

Sebagian besar tugas pelestarian dilakukan oleh BPCB, dan sebagian lainnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelamatan dan pengamanan dilakukan dengan berbagai hal sebagai upaya menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan, dan juga upaya menjaga agar tidak hilang. Upaya tersebut dilakukan dengan perawatan situs secara berkala sekaligus pelaksanaan pemantauan. Kemudian, ditempatkan pula juru pelihara, selain sebagai pemelihara juga sebagai orang yang menjaga keamanan situs.

Di Kabupaten Soppeng sendiri capaian persentase benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan di tahun 2019 sebesar 24,13%, dan meningkat di tahun 2021 dengan persentase capaian sebesar 25%. Di tahun 2023 angka capaian persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Soppeng sebesar 39,02 %. Capaian tahun 2019-

2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 44 – Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2019-2023

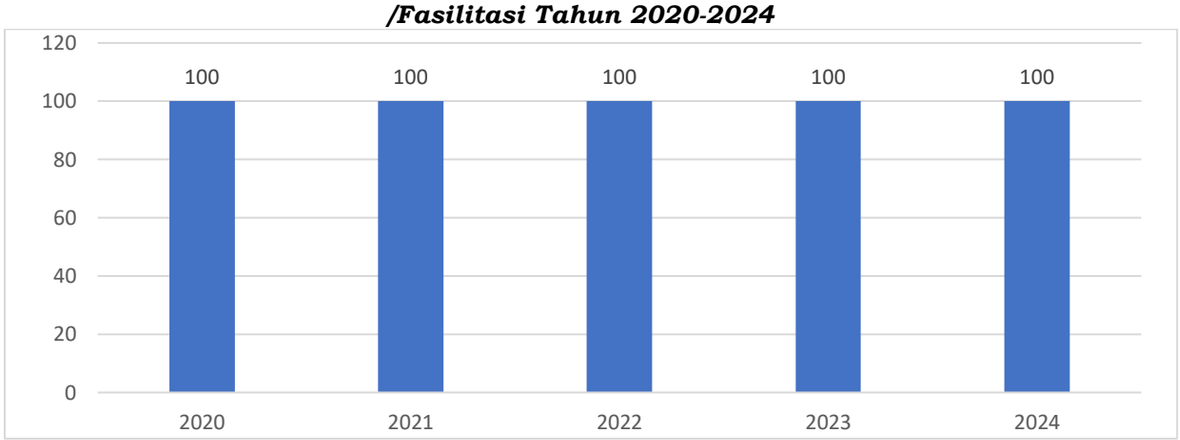


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

2.2.5.2. Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitasi

Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi merupakan salah satu bentuk perayaan pada hari keagamaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Soppeng sendiri bentuk kegiatan keagamaan yang difasilitasi seperti memperingati Tahun Baru Islam, Isra Miraj, Hari Raya Idul Fitri/Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, 10 Muharram, hari Paska, Natal, Haji dan MTQ. Semua kegiatan keagamaan tersebut mendapat dukungan/fasilitasi sehingga capaian kinerja tahun 2020-2024 sebesar 100%. Untuk persentase kegiatan keagamaan yang mendapat dukungan/fasilitasi tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 45 – Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan /Fasilitasi Tahun 2020-2024



Sumber : Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat), 2025

2.2.5.3. Penyelenggaraan Festival Seni, Budaya dan Adat

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dan adat merupakan wujud pelestarian budaya yang dimiliki. Salah satu bentuk kegiatan festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kabupaten Soppeng yaitu *Pattaungeng*. Beberapa rangkaian acara pada penyelenggaraan *Pattaungeng* yang dilaksanakan diantaranya: *Mappadendang*, *Massure'*, *Mattojang*, *Maddaga* dan tarian tradisional lainnya. Pada tahun 2019 sebanyak 10 kali. Pada tahun 2020 diselenggarakan 7 kali dan tahun 2021 sebanyak 5 kali, sedangkan pada tahun 2022 Penyelenggaraan Festival, seni, budaya dan adat dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan yaitu festival seni dan permainan tradisional, festival budaya *Abbatirenna Wennang Sabe E*, festival seni IMPS Umi, dan Malam apresiasi seni budaya. Pada tahun 2023 sebanyak 8 kali diadakan festival seni dan budaya.

Tabel 2. 34 - Penyelenggaraan Festival, Seni, Budaya dan Adat Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHU				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	10	7	5	4	8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

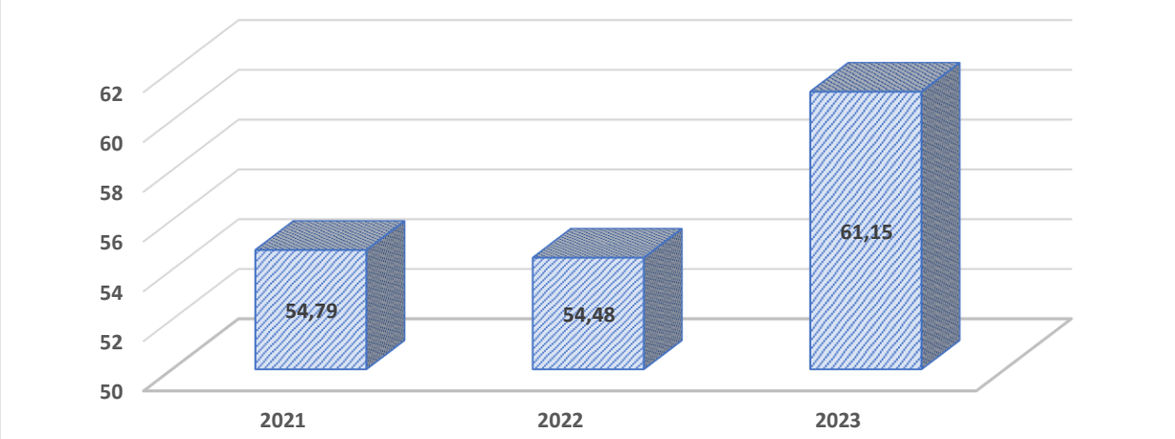
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, peningkatan kualitas keluarga menjadi salah satu syarat mutlak yang harus diwujudkan. Sebagai unit sosial terkecil di masyarakat, keluarga menjadi ruang pertama dan utama, yang turut menentukan kualitas hidup tiap-tiap anggota keluarganya. Melalui keluarga, nilai-nilai kesetaraan gender mulai dikenalkan, untuk kemudian diinternalisasikan dalam gerak tiap anggota keluarganya baik di rumah maupun di masyarakat. Melalui keluarga pula, pemenuhan hak dan perlindungan anak dioptimalisasikan guna mencetak generasi penerus yang unggul dan berkarakter.

Terwujudnya kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak akan mendorong peningkatan kualitas keluarga, yang pada akhirnya turut menciptakan ketahanan sosial di masyarakat, mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif, serta menjadi pilar penyangga pembangunan bangsa yang progresif. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) yang dengan keseluruhan dimensi dan indikatornya, dapat digunakan sebagai alat ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan manusia dengan pendekatan keluarga. Capaian indeks pembangunan kualitas keluarga di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 46 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2023



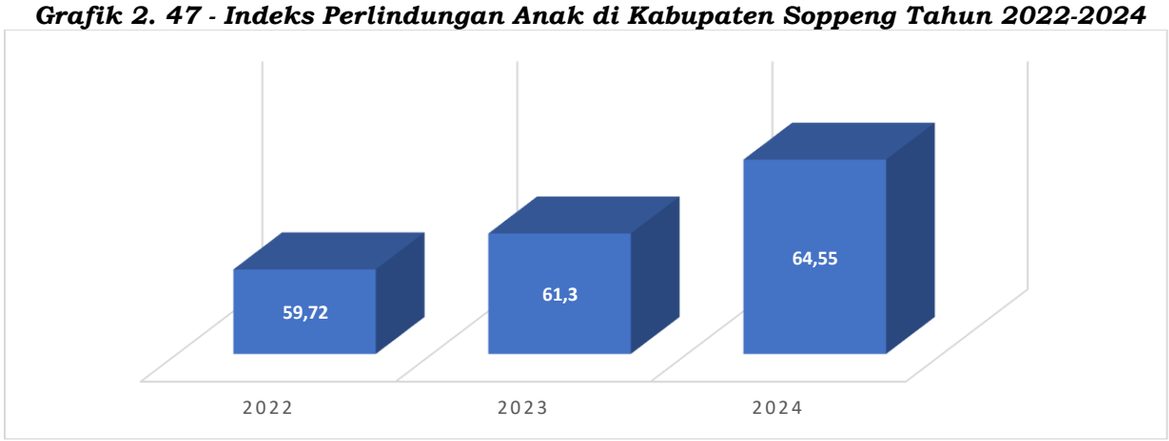
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

2.2.6.2. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indeks yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Indeks perlindungan anak merupakan suatu ukuran yang dapat menggambarkan tentang capaian pembangunan perlindungan anak. IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Kluster I: hak sipil dan kebebasan; Kluster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Kluster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Kluster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Kluster V: perlindungan khusus. Berdasarkan data indeks perlindungan anak di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024 mengalami peningkatan. Di tahun 2022 indeks perlindungan anak di Kabupaten Soppeng dengan nilai 59,72, mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan capaian nilai sebesar 61,3.

Kondisi di tahun 2024 menunjukkan kembali adanya peningkatan dengan nilai sebesar 64,55. Indeks perlindungan anak di Kabupaten Soppeng tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 47 - Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2024

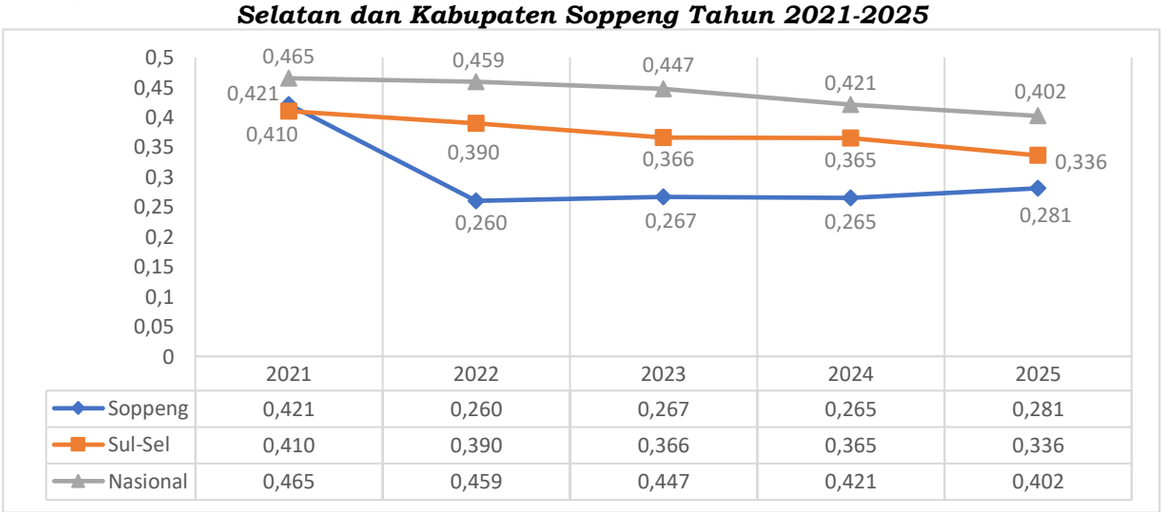


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

2.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Untuk nilai Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2021-2025) mengalami fluktuasi. Di tahun 2021 capaian IKG Kabupaten Soppeng sebesar 0,421 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan Nasional. Capaian ini menunjukkan perbaikan di tahun 2025 dengan capaian 0,281, Dimana capaian tersebut lebih baik dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Capaian tersebut didorong oleh partisipasi angkatan kerja perempuan serta pendidikan bagi perempuan. Capaian IKG Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 48 - Indeks Ketimpangan Gender di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	0,421	0,260	0,267	0,265	0,281
Sul-Sel	0,410	0,390	0,366	0,365	0,336
Nasional	0,465	0,459	0,447	0,421	0,402

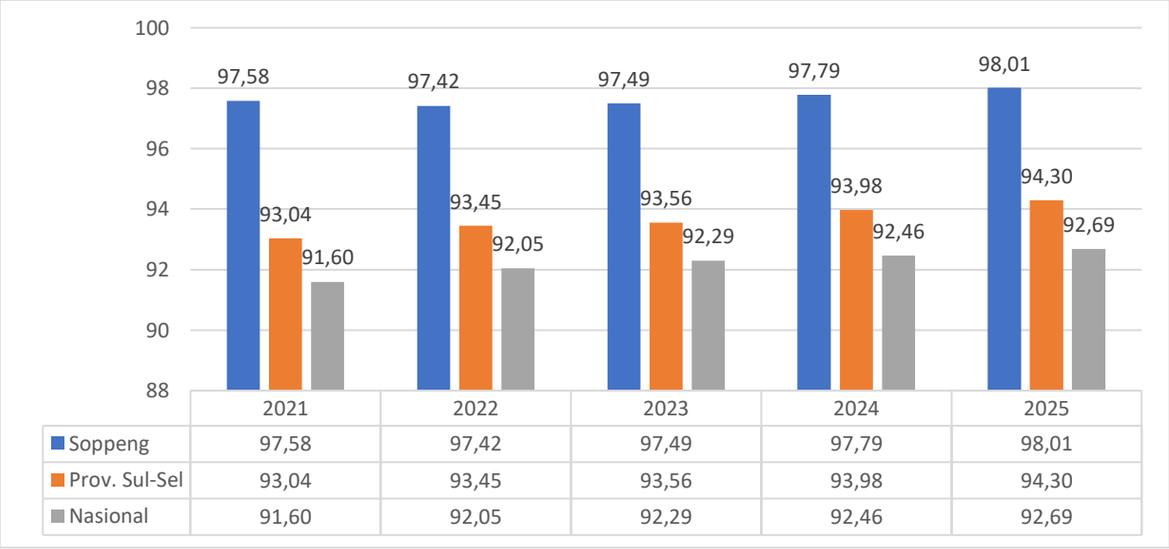
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.2.6.4. Indeks Pembangunan Gender

Di Kabupaten Soppeng, indeks Pembangunan gender dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat indeks Pembangunan gender sebesar 97,58% menurun di tahun 2022 sebesar 97,42%. Pada tahun 2023 capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 97,49% dan kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 97,79%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan capaian sebesar 98,01%. Capaian tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan capaian di

tingkat nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Fluktuasi yang terjadi dalam lima tahun terakhir pada capaian indeks Pembangunan gender tersebut dipengaruhi oleh aspek Kesehatan, Pendidikan dan satandar hidup layak.

Grafik 2. 49 - Indeks Pembangunan Gender (menggunakan UHH hasil SP2020 LF) di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	97,58	97,42	97,49	97,79	98,01
Prov. Sul-Sel	93,04	93,45	93,56	93,98	94,30
Nasional	91,60	92,05	92,29	92,46	92,69

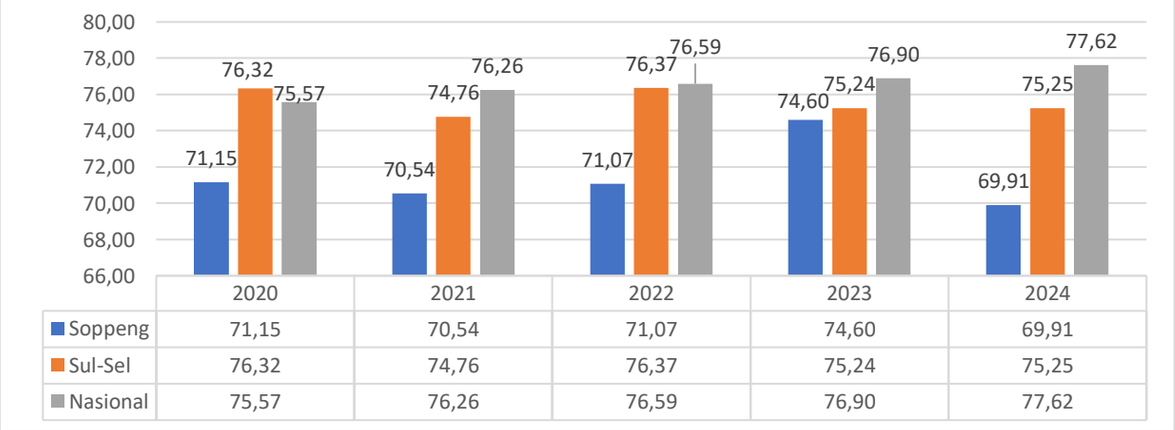
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.2.6.5. Indeks Pemberdayaan Gender

Di Kabupaten Soppeng capaian indeks pemberdayaan gender dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Nilai indeks pemberdayaan gender diukur dalam tiga dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian. Salah satu indikator makro dalam melihat keberhasilan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan adalah melihat peran aktif perempuan dalam bidang politik dan ekonomi, yang tercermin melalui nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Capaian IDG Kabupaten Soppeng dipengaruhi oleh masing-masing komponen secara keseluruhan. Keterlibatan perempuan dalam parlemen berpengaruh terhadap ketimpangan IDG. Data indeks pemberdayaan gender Kabupaten Soppeng, Provinsi Selawesi Selatan dan Nasional selengkapnya disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 50 - Indeks Pemberdayaan Gender di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Soppeng	71,15	70,54	71,07	74,60	69,91
Sul-Sel	76,32	74,76	76,37	75,24	75,25
Nasional	75,57	76,26	76,59	76,90	77,62

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.2.6.6. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan aset bangsa yang harus diberdayakan, oleh karena itu organisasi pemuda sangat penting keberadaannya sebagai wadah untuk pengembangan potensi pemuda, organisasi pemuda diharapkan menjadi wahana pemberdayaan pemuda untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Persentase organisasi pemuda aktif dalam kurun waktu lima tahun cenderung mengalami fluktuasi, pada tahun 2021 capaian persentase organisasi pemuda yang aktif sebesar 37,25% atau jumlah organisasi pemuda yang aktif hanya 38 organisasi dari 102 jumlah seluruh organisasi. Untuk tahun 2022 mengalami peningkatan dengan capaian 51,02% dengan jumlah organisasi pemuda yang aktif sebanyak 50 organisasi dari 98 jumlah seluruh organisasi pemuda. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 109 organisasi yang aktif dari jumlah organisasi sehingga capaian sebesar 21,54% meningkat di tahun 2024 dengan capaian sebesar 21,69%, hal tersebut dikarenakan bertambahnya organisasi pemuda yang ada. Di tahun 2025 organisasi kepemudaan yang aktif sebesar 27,91% dengan jumalah organisasi pemuda yang aktif sebanyak 24 organisasi dari 86 organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Soppeng

Tabel 2. 35 - Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	Organisasi	38	50	109	136	24
2	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	Organisasi	102	98	506	627	86
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	37,25	51,02	21,54	21,69	27,91

Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, 2026

2.2.6.7. Cakupan Pembinaan Olahraga

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah. Selama tahun 2021 sampai 2025 cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 jumlah cabang olahraga yang dibina sebanyak 21 cabang atau mencapai sebesar 84% dari jumlah Seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar sebanyak 25 cabang. Di tahun 2022 dan 2023 capaian mengalami penurunan jumlah cabang olahraga yang dibina masing-masing sebanyak 18 cabang dan 14 cabang atau mencapai sebesar 69,23% dan 58,33% dari jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar sebanyak 26 cabang dan 24 cabang. Pada tahun 2024 jumlah cabang olahraga yang ada/terdaftar mengalami peningkatan sebanyak 27 cabang akan tetapi cabang yang dibina hanya 14 cabang dengan persentase capaian sebesar 51,85%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan peningkatan cabang olahraga yang ada/terdaftar sebanyak 28 cabang dengan cabang olahraga yang dibina sebanyak 23 cabang atau sebesar 82,14%.

Tabel 2. 36 - Cakupan Pembinaan Olahraga 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	Cabang	21	18	14	14	23
2	Jumlah Seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabang	25	26	24	27	28
	Cakupan pembinaan olahraga (% realisasi)	%	84	69,23	58,33	51,85	82,14

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2026

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

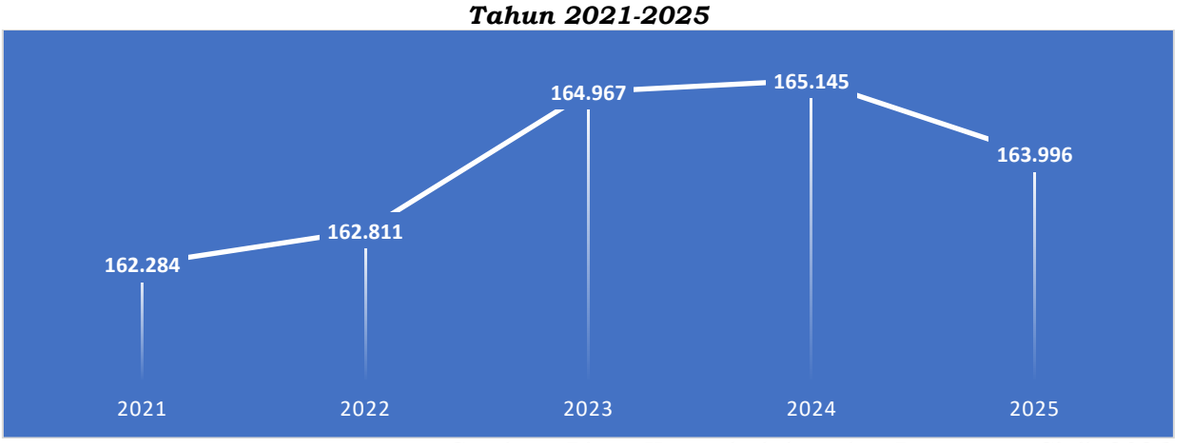
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1. Jumlah Penduduk <15 Tahun - > 65 Tahun

Jumlah penduduk < 15 tahun - > 65 tahun selama kurun waktu 5

tahun menunjukkan peningkatan, pada tahun 2021 mencapai 162.284 jiwa dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 165.145 jiwa pada tahun 2024. Kondisi di tahun 2025 menujukkan adanya penurunan dengan jumlah penduduk <15 tahun - > 65 tahun sebanyak 163.996 jiwa, capaian tersebut dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 51 - Jumlah Penduduk <15 Tahun - > 65 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

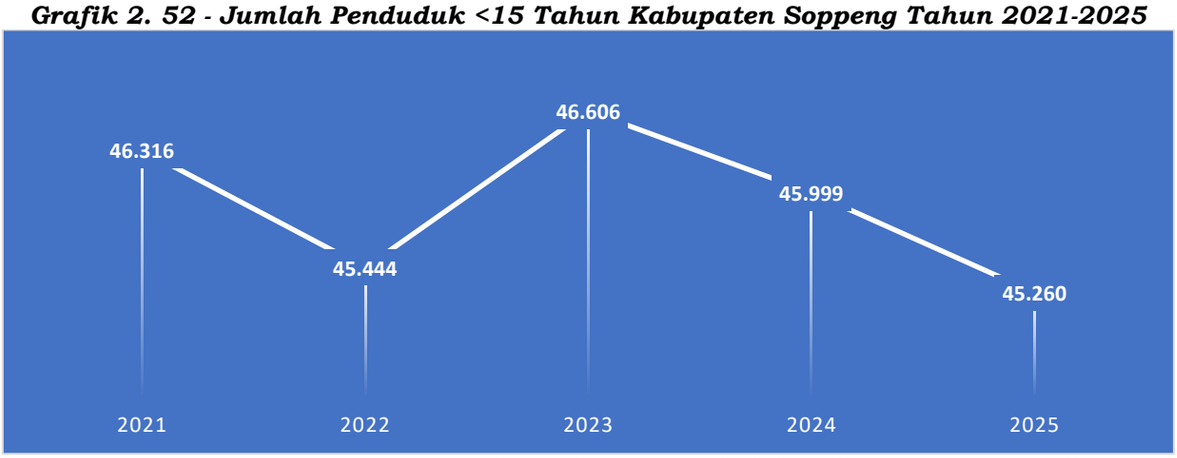


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

2.3.1.2. Jumlah Penduduk <15 Tahun

Jumlah penduduk < 15 tahun selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2022 dengan jumlah penduduk sebesar 45.444 jiwa dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 46.606 jiwa. Capaian jumlah penduduk <15 tahun pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan jumlah penduduk pada kategori umur tersebut sebanyak 45.999 jiwa dan berlanjut di tahun 2025 sebanyak 45.260 jiwa. Jumlah penduduk <15 tahun Kabupaten Soppeng dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 52 - Jumlah Penduduk <15 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

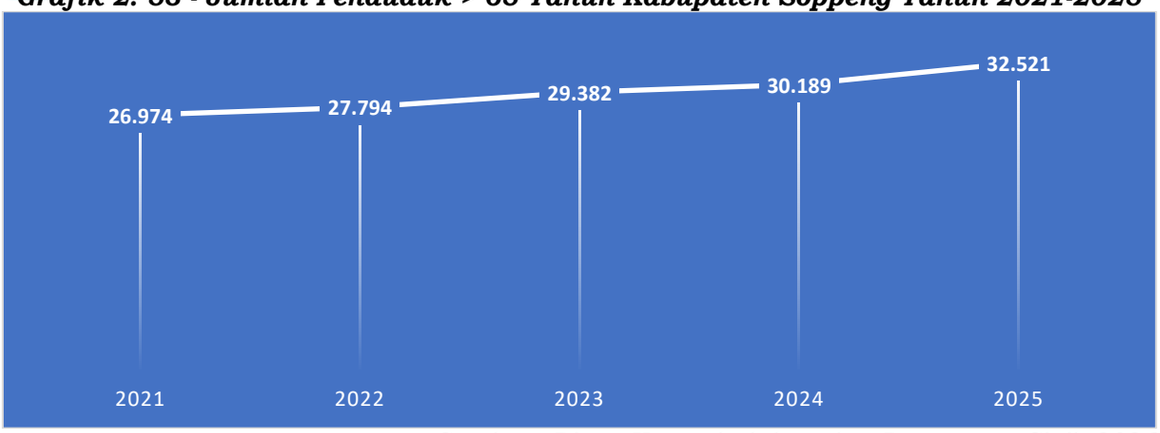


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

2.3.1.3. Jumlah Penduduk > 65 Tahun

Jumlah penduduk >65 tahun selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan peningkatan hingga tahun 2025 dengan capaian 32.521 jiwa, tetapi capaian tersebut masih dibawah jumlah provinsi dan nasional. Capaian jumlah penduduk >65 tahun dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 53 - Jumlah Penduduk > 65 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



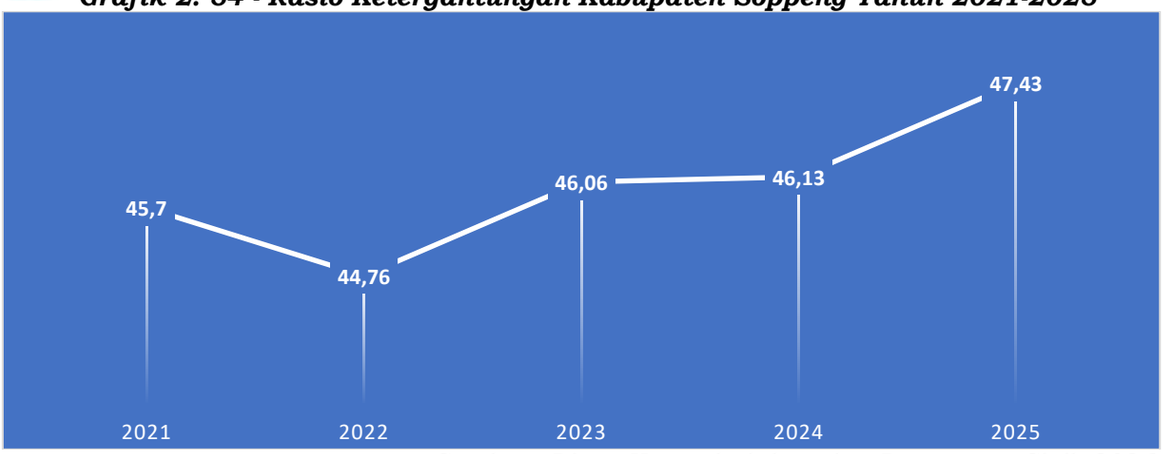
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

2.3.1.4. Rasio Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka Beban Ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan membentuk keadaan ideal yang berpotensi terjadinya bonus demografi. Kesempatan ini harus dipahami oleh pengambil kebijakan agar dapat memanfaatkan bonus demografi untuk kesejahteraan rakyat. Harus disadari juga bahwa pada masa yang akan datang, angka ketergantungan akan kembali meningkat yang disebabkan karena fertilitas rendah dan angka harapan hidup yang tinggi. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Soppeng sepanjang 2021-2022 berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil konsisten mengalami penurunan hingga 44,76% di tahun 2022. Penurunan angka ketergantungan tersebut merupakan angka ketergantungan yang mencapai titik terendah di lima tahun terakhir. Penurunan angka ketergantungan ini menjadi bahan evaluasi terkait bonus demografi di Kabupaten Soppeng. Adapun di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 46,06% dan tahun 2024 sebesar 46,13%. Kondisi di tahun 2025 kembali menunjukkan adanya peningkatan dengan rasio ketergantungan sebsar 47,43%. Penurunan rasio ketergantungan hingga 44,76% pada tahun 2022 menunjukkan adanya peluang yang besar untuk memanfaatkan bonus demografi di Kabupaten Soppeng, dengan lebih banyak penduduk usia produktif yang ada. Peningkatan rasio ketergantungan pada tahun 2023 sampai tahun 2025 perlu diperhatikan sebagai upaya yang perlu disiapkan melalui kebijakan yang mendukung sektor produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian rasio ketergantungan Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 54 - Rasio Ketergantungan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

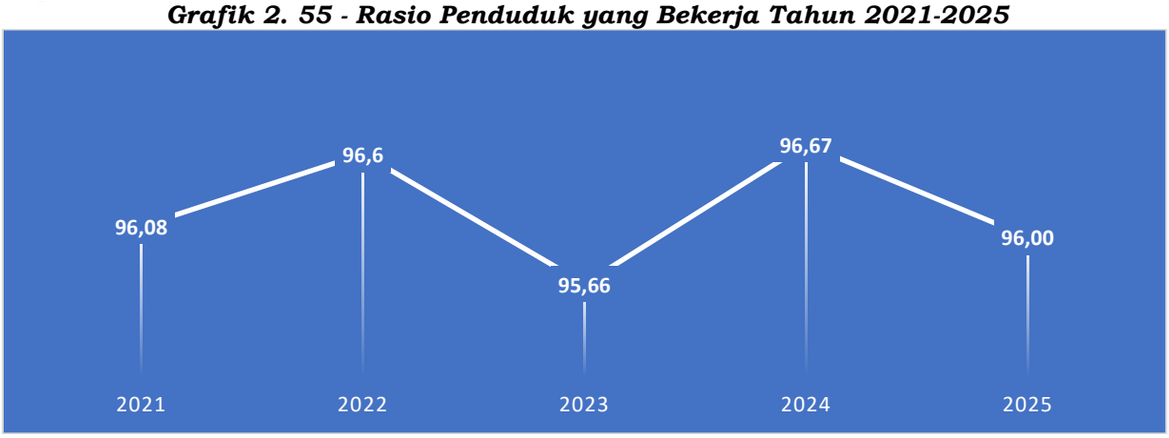


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

2.3.1.5. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Selama tahun 2021 sampai dengan 2025 rasio penduduk yang bekerja mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 rasio penduduk yang bekerja sebesar 96,08%, mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 96,60%. Pada tahun 2023 rasio penduduk yang bekerja mengalami penurunan sebesar 95,66% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 96,67. Kondisi rasio penduduk yang bekerja mengalami penurunan dengan capaian 96,00% di tahun 2025.

Grafik 2. 55 - Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Salah satu sub sektor terbesar dalam sektor pertanian di Kabupaten Soppeng yaitu sub sektor tanaman pangan dengan komoditi utama berupa padi dan palawija. Khusus untuk palawija di Kabupaten Soppeng yang utama adalah jagung dan kedelai, di samping itu juga pada beberapa wilayah dibudidayakan palawija jenis lainnya seperti kacang tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Palawija sebagai bahan pangan kedua setelah padi (beras) juga sangat penting sebagai pelengkap kebutuhan konsumsi masyarakat, selain itu, palawija juga sebagai bahan pakan ternak utama. Gambaran kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 37 - Kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (palawija)	Juta Rp	672.229,70	737.123,00	737.808,95	574.186,29	743.845,99
2	Jumlah PDRB sektor pertanian /perkebunan	Juta Rp	2.931.461,20	3.564.663,27	3,356,938,20	3.642.198,10	4.242.371,40
	Kontribusi Sektor Pertanian(Palawija) Terhadap PDRB	%	22,93	20,68	21,98%	15,76	17,53

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tergambar bahwa kontribusi Sektor Pertanian Khusus Palawija terhadap Total PDRB Sektor Pertanian pada tahun 2020 sebesar 22,93% dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2022 menjadi 21,98% sedangkan untuk tahun 2023 terjadi penurunan dengan persentase capaian sebesar 15,76% dan kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 17,53%.

2.3.2.2. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan besarnya peran sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Soppeng. Gambaran dari besaran kontribusi tersebut mencerminkan peran sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Soppeng. Berikut tabel kontribusi PDRB sektor pertanian tahun 2021-2025.

Tabel 2. 38 - Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan	Juta Rp	3.564.663,27	3.928.383,75	4.244.125,96	4.898.082,90	5.540.914,01
2	Jumlah Total PDRB	Juta Rp	12.426.781,61	13.741.836,11	14.909.333,36	16.099.177,19	17.397.797,69
	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	%	28,69	28,59	28,47	30,42	31,85

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2026

2.3.2.3. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Selain sub sektor tanaman pangan, kontribusi terbesar kedua pada PDRB Sektor Pertanian yaitu dari Sub Sektor Perkebunan terutama komoditi tanaman keras (tahunan). Jenis tanaman keras utama yang ada di Kabupaten Soppeng diantaranya Kakao, Kelapa, Kemiri dan Jambu Mete. Berikut gambaran kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB sektor pertanian tahun 2021-2025.

Tabel 2. 39 - Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)	Juta Rp	999.928,60	1.151.793,22	1.316.356,29	1.720.426,71	1.928.241,01
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	Juta Rp	3.564.663,27	3.928.383,75	4.244.125,96	4.898.082,90	5.540.914,01
	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	28,05	29,32	31,02	35,12	34,80

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,dan Ketahanan Pangan, 2026

Dari tabel tersebut di atas, tergambar bahwa tahun 2021 kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian sebesar 28,05% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 29,32%, sedangkan pada tahun 2023 kontribusi sektor perkebunan kembali mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 31,02%. Di tahun 2024

capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 35,12% akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2025 menjadi 34,80%. Tingginya nilai komoditi hasil perkebunan, khususnya tanaman keras disebabkan komoditi tersebut merupakan komoditi yang bernilai tinggi dibandingkan komoditi hasil pertanian lainnya.

2.3.2.4. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Soppeng, khususnya budidaya Komoditi Pangan utama di Kabupaten Soppeng berupa Padi, keseluruhan proses produksinya dihasilkan oleh kelompok tani. Seluruh lahan persawahan yang ada di Kabupaten Soppeng dalam memproduksi padi dikelola oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Tidak ada usaha budidaya tanaman pangan khususnya Padi yang dikelola oleh perusahaan atau sejenisnya. Berikut tabel Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap Total Produksi Tahun 2021-2025.

Tabel 2. 40 - Kontribusi Produksi Kelompok Tani Terhadap PDRB Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani	Ton	280.911,00	296.945,00	275.768,25	247.784,99	272.401,45
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah	Ton	280.911,00	296.945,00	275.768,25	247.784,99	272.401,45
	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2026

2.3.2.5. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto secara Nasional dan Regional (daerah) termasuk Kabupaten Soppeng. Kontribusi Sektor Pariwisata di Kabupaten Soppeng belum signifikan berkontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng, namun demikian mampu menggerakkan ekonomi daerah, seperti penyerapan tenaga kerja pada beberapa objek wisata daerah dan perputaran uang dari wisatawan yang berkunjung.

Tabel 2. 41 - Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata	Juta Rp	120.543,40	117.067,77	131.956,60	144.912,80	158.324,93
2	Total PDRB	Juta Rp	6.993.513,10	7.146.654,36	7.585.976,30	8.054.418,69	8.322.526,32
3	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,72	1,64	1,74	1,80	1,90

Sumber : Buku PRDB Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha 2019-2024

Pada Tahun 2019, kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 1,72 persen dan tahun 2020 menurun menjadi 1,64 persen sementara untuk tahun 2021 kontribusi sektor pariwisata sebesar 1,74% atau lebih tinggi dibanding tahun 2020, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada sektor pariwisata, sedangkan tahun 2022 kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng Kembali mengalami peningkatan dengan capaian 1,80%. Pada tahun 2023 meningkat dengan capaian 1,90%.

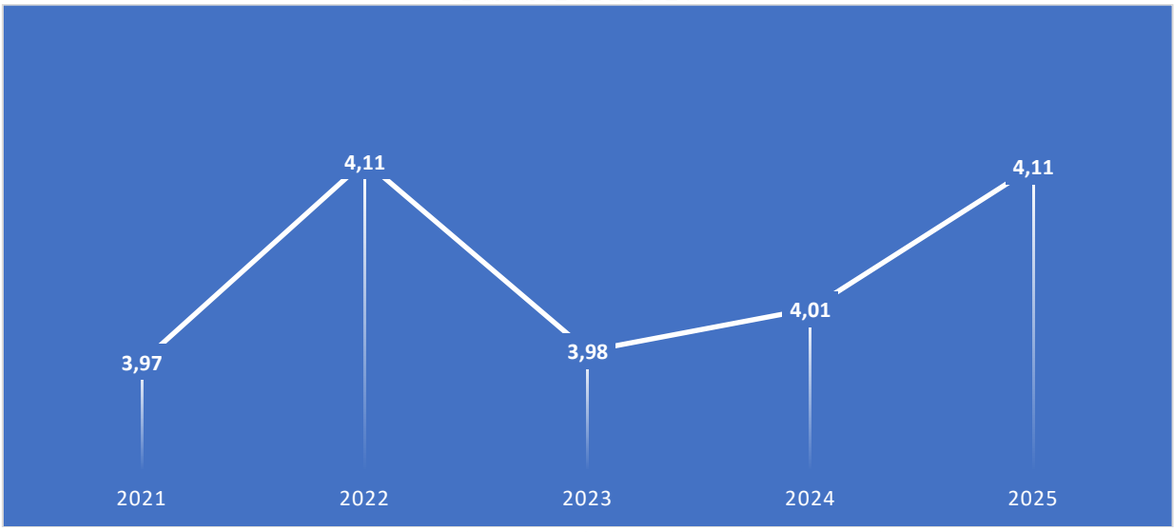
Kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB, yang cenderung stagnan, tidak berarti sektor pariwisata di Kabupaten Soppeng tidak ada pergerakan, ini dapat dilihat pada tabel di atas, adanya peningkatan jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (juta) dari tahun ke tahun.

2.3.2.6. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi

terhadap PDRB Kabupaten Soppeng, Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan peran Sektor Perikanan dalam struktur PDRB Kabupaten Soppeng. Pada Tahun 2021 kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng adalah 3,97% dan meningkat menjadi 4,11% di tahun 2022. Capaian tersebut mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 3,98% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 4,01%. Kondisi pada tahun 2025 kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB kembali meningkat dengan capaian sebesar 4,11%.

Grafik 2. 56 - Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

2.3.2.7. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor Perdagangan yang meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha baik penjualan secara grosir (Perdagangan Besar) maupun eceran dari berbagai jenis barang memberikan sumbangan kontribusi yang cukup besar pada PDRB Kabupaten Soppeng. Perdagangan besar seringkali secara fisik berarti mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan penjualan eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain.

Tabel 2. 42 - Kontribusi PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	Juta Rp	1.573.576,14	1.725.145,13	1.943.123,51	2.097.311,55	2237461,009
2	Total PDRB	Juta Rp	12.426.781,61	13.741.836,11	14.909.333,36	16.099.177,19	17.397.797,69
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,66	12,55	13,03	13,03	12,86

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Pada Tahun 2021 kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng mencapai 12,66% dan cenderung menurun pada tahun 2022 dengan capaian 12,55% penurunan tersebut merupakan dampak Pandemi Covid-19 juga menyebabkan pertumbuhan sektor perdagangan baik besar maupun eceran mengalami penurunan bahkan negatif. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun selama

pandemi Covid-19, terutama untuk sub kategori perdagangan besar. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan dengan capaian 13,03%. Kondisi Pada tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan dengan capaian sebesar 12,86%.

2.3.2.8. Pertumbuhan Industri

Kegiatan industri merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Keberadaan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, pertanian, ataupun sektor jasa. Berkembangnya sektor-sektor tersebut akan mendukung meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian sedang tumbuh dan sehat. Berikut adalah data kinerja Pertumbuhan Industri di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2021-2025.

Tabel 2. 43 - Pertumbuhan Industri Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Industri tahun-n	Unit	31	41	50	60	63
2	Jumlah Industri sampai tahun-n	Unit	3780	3.821	3.871	3.931	3.994
3	Pertumbuhan Industri (%)	%	0,83	1,08	1,31	1,55	1,60

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2026

Pertumbuhan industri adalah adanya kenaikan dari suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2021-2025) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan pada Indikator Sosial Ekonomi Makro Kabupaten Soppeng terdapat penambahan jumlah unit industri setiap tahunnya.

Pada Tahun 2021 pertumbuhan industry di Kabupaten Soppeng sebesar 0,83%, mengalami pertumbuhan di tahun 2022 menjadi 1,08% dan meningkat kembali tahun 2023 menjadi 1,31%. Capaian tersebut berlanjut hingga tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 1,55% dan di tahun 2025 sebesar 1,60%.

2.3.2.9. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Sub sektor industri yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah industri tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu dan pemotongan dan pengeringan

tembakau. Sub sektor lain adalah industri makanan dan minuman. Industri ini mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan dan minuman. Diantaranya adalah industri pengolahan kopi dan kakao, industri gula dan produk lainnya berbasis aren.

Tabel 2. 44 - Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri	Juta	1.255.899,87	1.418.475,40	1.612.258,63	1.748.010,23	1.921.392,27
2	Total PDRB	Juta	12.426.781,61	13.741.836,11	14.909.333,36	16.099.177,19	17.397.797,69
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10,11	10,32	10,81	10,86	11,04

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

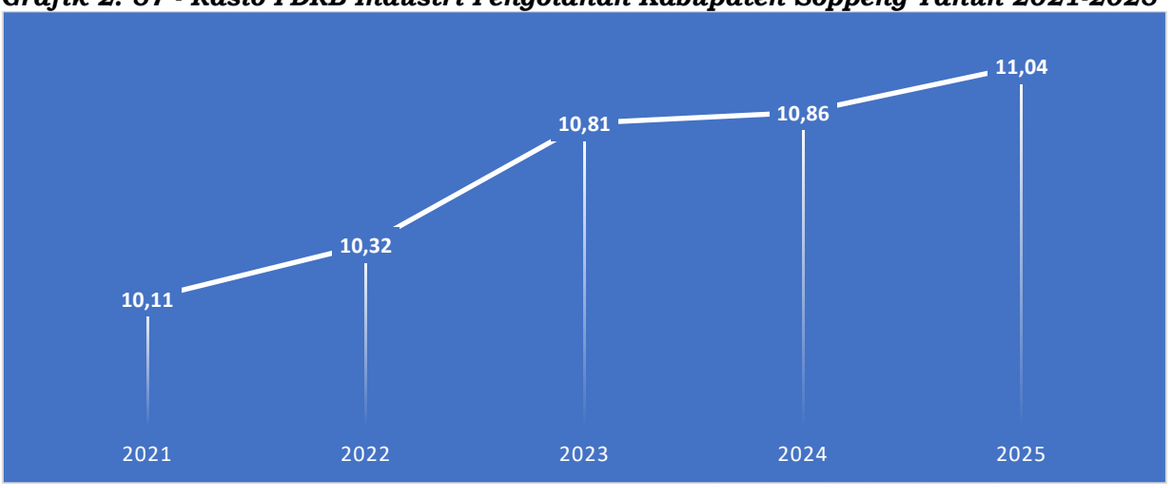
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor industri selama 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB sektor industri sebesar 10,11%. Pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dengan capaian 10,32%, peningkatan tersebut menjadi indikasi bahwa sektor industri tumbuh positif. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sehingga capaian menjadi 10,81% dan berlanjut hingga tahun 2025 dengan capaian sebesar 11,04%.

2.3.2.10. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Sub sektor industri yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah industri tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu dan pemotongan dan pengeringan tembakau. Sub sektor lain adalah industri makanan dan minuman. Industri ini mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan dan minuman. Diantaranya adalah industri pengolahan kopi dan kakao, industri gula dan produk lainnya berbasis aren.

Dari tahun 2021-2025 rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi. Angka terendah sebesar 10,11 di tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi covid 19. Capaian tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022-2025 dikarenakan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan akibat pandemi covid 19. Di tahun 2025 rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Soppeng sebesar 11,04, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Untuk rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 57 - Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

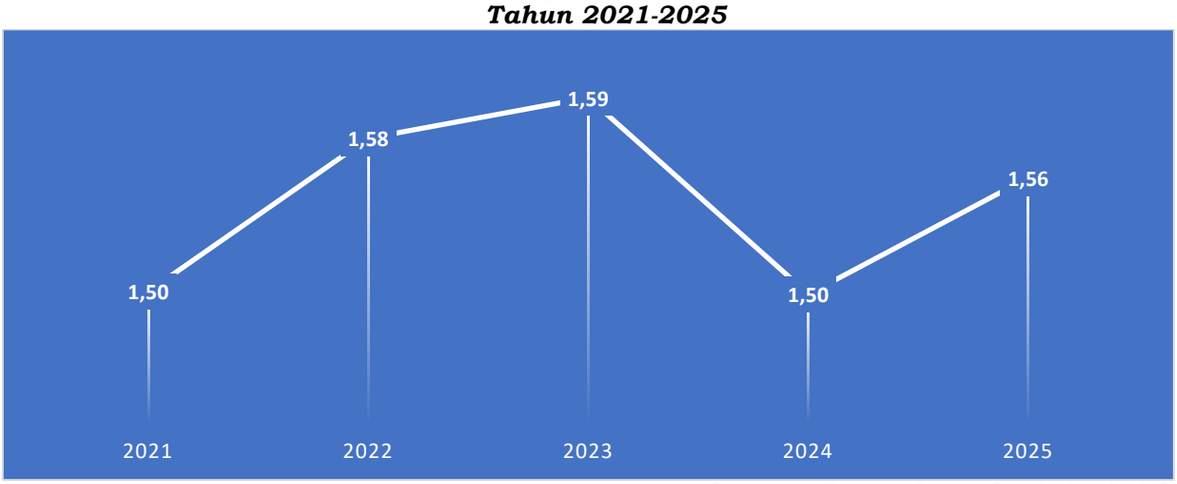


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.3.2.11. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

Jasa akomodasi dan makan minum merupakan bagian dari komponen terpenting yang tak terpisahkan dari obyek wisata dan wisatawan. Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Capaian rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum di tahun 2021 dengan nilai sebesar 1,50%, mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan capaian 1,58%. Di kondisi terakhir tahun 2025 rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum Kabupaten Soppeng sebesar 1,56% meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 1,56%, akan tetapi capaian tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang menunjukkan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan nilai sebesar 1,59%. Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 58 - Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2021-2025



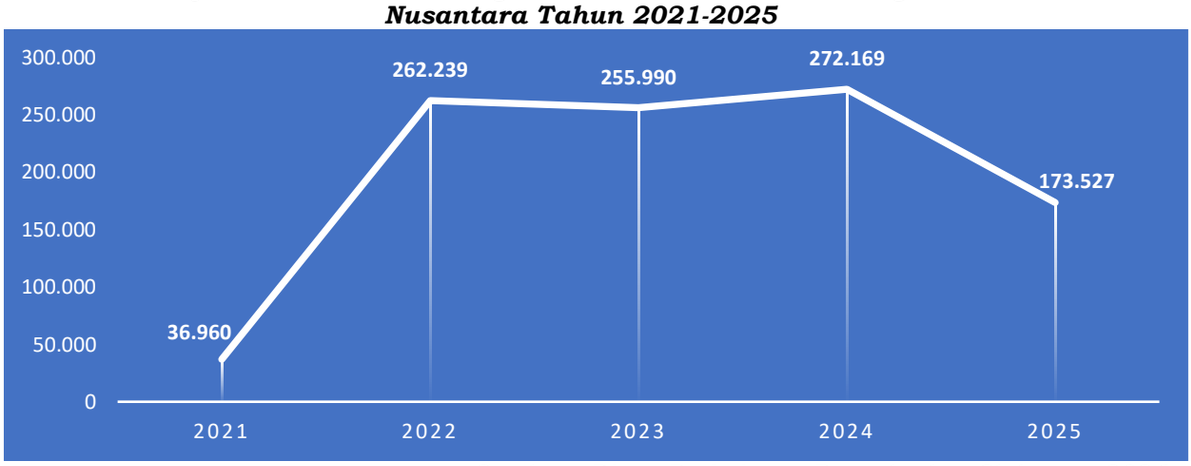
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.3.2.12. Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara

Kabupaten Soppeng juga mengandalkan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Dari sektor pariwisata yakni jumlah pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara menjadi salah satu tolak ukur dalam peningkatan pendapatan daerah. Untuk jumlah pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Di tahun 2021 sebanyak 36.960 jiwa wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Soppeng. Jumlah wisatawan tersebut masih terbilang rendah akibat adanya pandemi Covid 19, dimana aktivitas dibatasi sehingga berdampak pada sektor pariwisata. Pada tahun 2023

jumlah pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara sebanyak 255.990 jiwa, angka ini kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 272.169 jiwa. Di tahun 2025 jumlah wisatawan mancanegara dan Nusantara mengalami penurunan sebesar 173.527 jiwa. Berdasarkan data tersebut, terdapat penurunan angka di tahun 2025, hal tersebut dikarenakan belum optimalnya promosi destinasi dan pengembangan objek wisata baru yang lebih menarik. Selain itu masih terbatasnya sarana dan aksesibilitas ke beberapa destinasi wisata. Untuk jumlah pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 59 – Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun 2021-2025

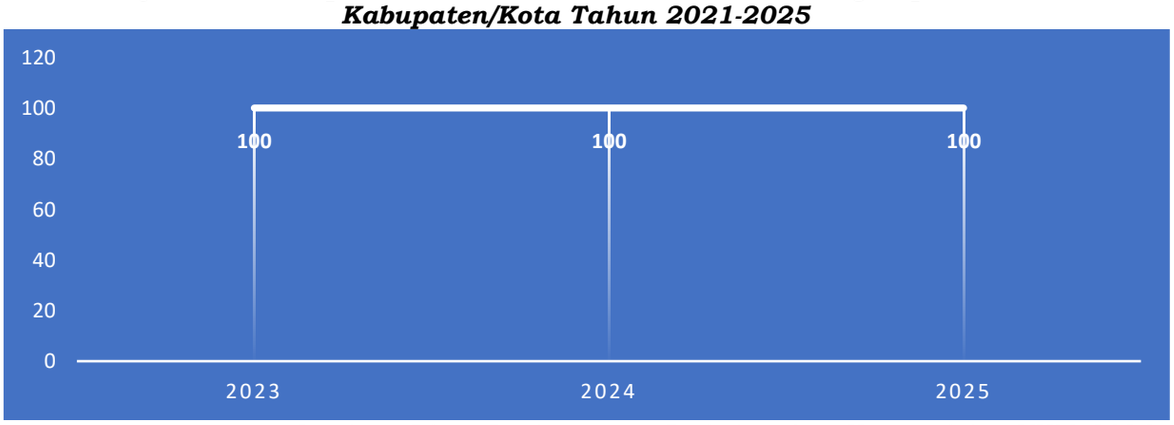


Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2026

2.3.2.13. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota (%)

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten/kota merupakan salah satu tolak ukur pembangunan yang berkaitan dengan aspek daya saing daerah khususnya pada sektor perdagangan. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten/kota tahun 2021-2025 sebesar 100 %. Berdasarkan capaian tersebut semua industri yang ada di Kabupaten Soppeng dikategorikan sebagai industri kecil dan menengah, sehingga capaian tersebut dari tahun 2021-2025 sebesar 100%. Untuk proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten/kota tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 60 - Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025



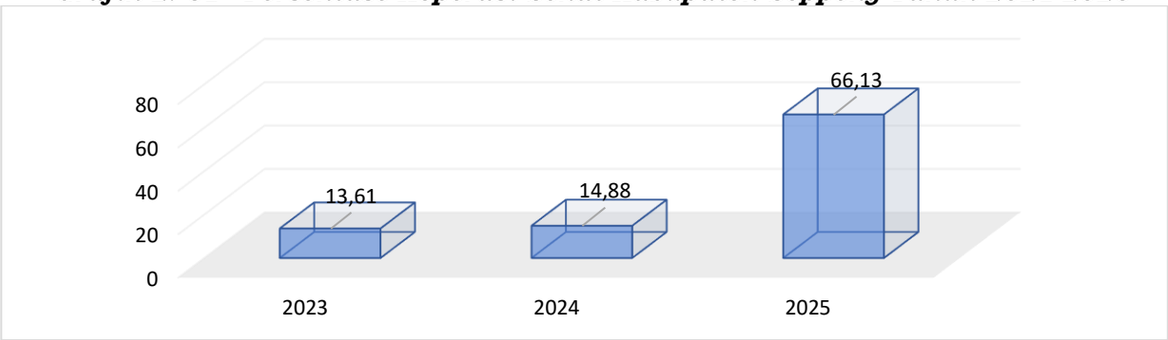
Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2026

2.3.2.14. Persentase Koperasi Sehat

Persentase koperasi sehat merupakan indikator pembangunan Mampu melayani kebutuhan anggotanya baik pemberian pinjaman maupun pembelian barang atau produk, baik bagi anggota maupun masyarakat

umum. Dengan meningkatnya persentase koperasi sehat berarti mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya bagi anggotanya. Di Kabupaten Soppeng persentase koperasi sehat di tahun 2021 sebesar 9,64% meningkat di tahun 2022 dengan capaian sebesar 11,98%. Di tahun 2023 persentase koperasi sehat mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 13,61% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2024 dengan nilai 14,88%. Pada tahun 2025 peningkatan tersebut berlanjut dengan persentase koperasi sehat sebesar 66,13%. Berdasarkan data tersebut mayoritas koperasi yang ada belum masuk kategori sehat. Artinya, masih banyak perbaikan yang perlu diupayakan untuk meningkatkan jumlah koperasi sehat dengan melalui perbaikan pada manajemen, sistem keuangan, serta legalitas koperasi sendiri. Untuk persentase koperasi sehat Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 61 - Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

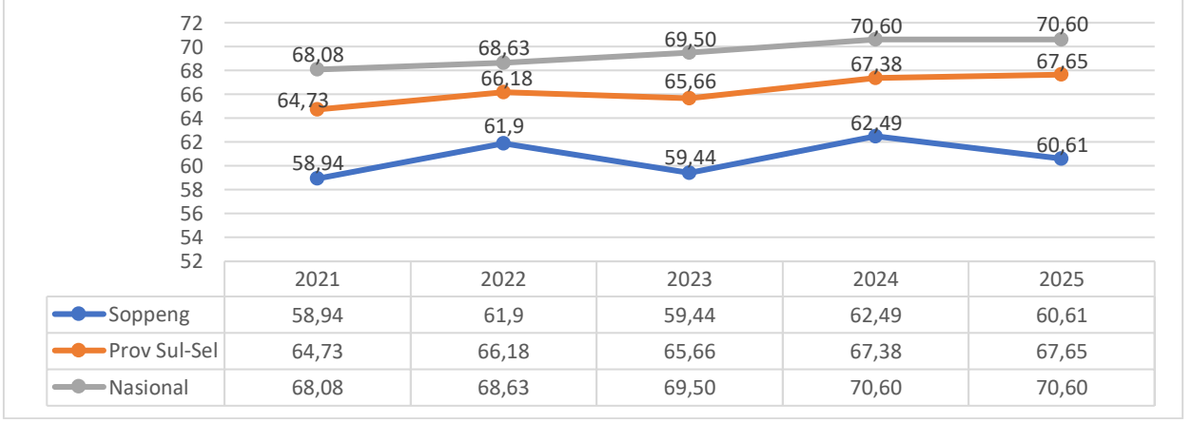


Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustian, Koperasi dan UKM, 2026

2.3.2.15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

Tingkat partisipasi angkatan kerja selama 5 tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2025 capaian tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Soppeng masih lebih rendah dengan nilai 60,61% dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 67,65% dan capaian Nasional sebesar 70,60%. Kabupaten Soppeng menunjukkan potensi pertumbuhan yang lebih besar dalam jangka panjang, namun harus didorong oleh upaya yang lebih tinggi untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhannya. Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil dan konsisten, dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang relatif lebih rendah namun lebih dapat diandalkan. Nasional menunjukkan pertumbuhan yang paling stabil tetapi paling lambat. Ini mungkin mencerminkan hasil yang lebih terkontrol dan mungkin lebih dipengaruhi oleh kebijakan makro atau tren yang lebih luas. Capaian tingkat partisipasi angkatan kerja dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 62 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



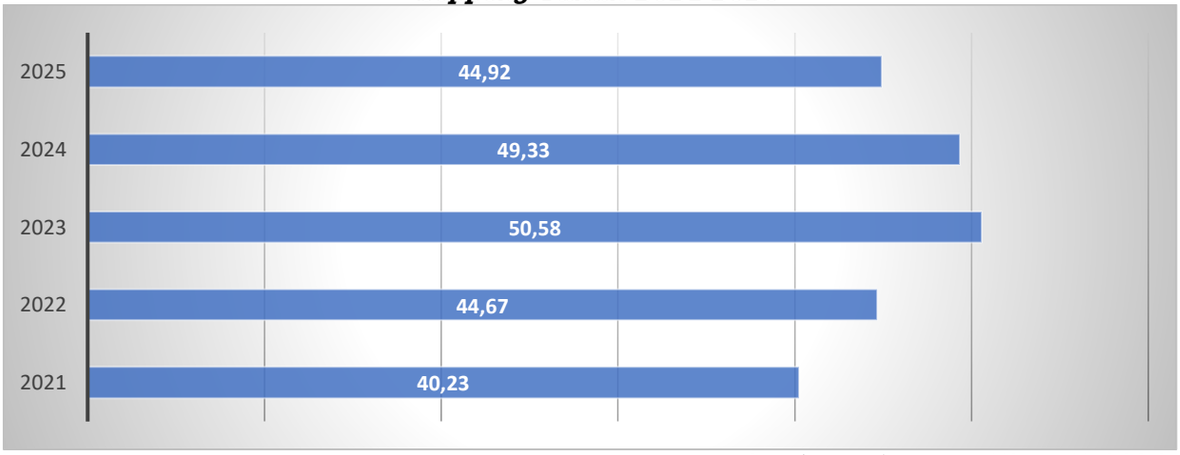
	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	58,94	61,9	59,44	62,49	60,61
Prov Sul-Sel	64,73	66,18	65,66	67,38	67,65
Nasional	68,08	68,63	69,50	70,60	70,60

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.3.2.16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Soppeng TPAK laki- laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPAK perempuan. Di Kabupaten Soppeng tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2021-2023 cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi di tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 49,33% dan kondisi di tahun 2025 juga menurun dengan Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan sebesar 44,92%. Berdasarkan data tersebut perlu adanya kebijakan yang mendukung perempuan dalam angkatan kerja untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Soppeng. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keseimbangan gender dan mendorong partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 63 - Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



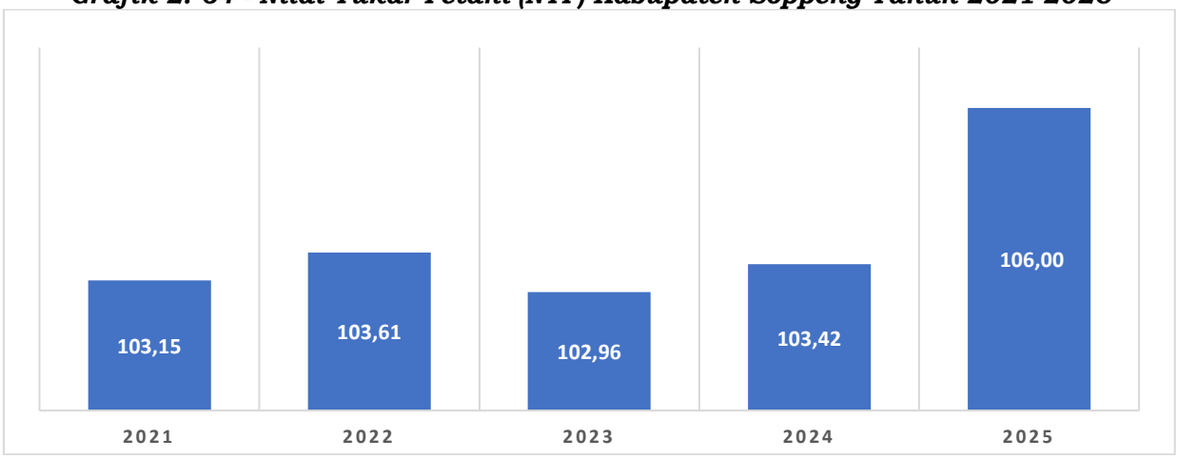
Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2026

2.3.2.17. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional, Nilai Tukar Petani (NTP) diartikan sebagai pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan petani baik berupa konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi usaha pertanian yang dilakukan.

Untuk capaian NTP Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 mencapai di atas 100, yang artinya petani mengalami surplus, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Sehingga pendapatan petani naik lebih besar daripada pengeluarannya. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Soppeng tahun 2021 mencapai 103,15 poin, berfluktuasi dari tahun ke tahun hingga mencapai 106,00 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh peningkatan nilai produksi hasil pertanian (yang diterima) petani baik karena adanya peningkatan produksi maupun harga jual dari komoditi hasil pertanian. Nilai Tukar Petani bisa terus meningkat di atas 100, jika terus dipacu melalui peningkatan produksi dan peningkatan harga jual ditingkat petani. Berikut capaian nilai tukar petani di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025.

Grafik 2. 64 - Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

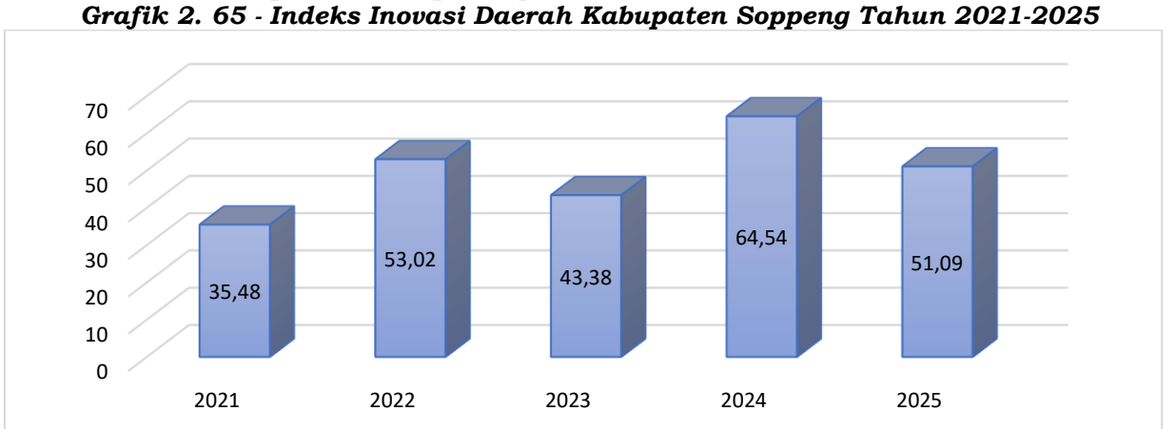


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, 2026

2.3.2.18. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator penilaian yang dilakukan sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong adanya kompetisi positif antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Indeks inovasi daerah Kabupaten Soppeng tahun untuk tahun 2021 terjadi perubahan metode pengukuran dengan capaian sebesar 35,48 (Inovatif) mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 53,02 (Inovatif). Pada tahun 2023 nilai indeks inovasi daerah Kabupaten Soppeng mengalami penurunan dengan capaian sebesar 43,38 (Inovatif) dan kembali meningkat di tahun 2024 dengan capaian sebesar 64,54 atau dengan predikat "Sangat Inovatif". Inovasi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yakni "Sistem Perlindungan Petani Soppeng Maju dan Sejahtera (SUTASOMA) yang berhasil masuk ke dalam top 45 inovasi terbaik di tingkat nasional yang mendorong nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Soppeng. Kondisi tahun 2025 menunjukkan terjadinya penurunan angka capaian indeks inovasi daerah sebesar 51,09 (Inovatif). Hal tersebut terjadi dikarenakan dari inovasi yang ada di tahun 2025 tidak ada inovasi yang masuk top 45 di tingkat nasional, sehingga perlu dilakukan upaya ke depannya untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah bukan hanya kuantitasnya. Capaian indeks inovasi daerah di Kabupaten Soppeng dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 65 - Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2026

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau mengukur perkembangan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan dan iklim, dan sekaligus menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Indeks ini merupakan indeks komposit dari pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial, berskala 0-100 dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin sangat baik. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Indeks ekonomi hijau Kabupaten Soppeng beserta pilar pembentuknya pada tahun 2023 dapat diliha padat tabel berikut ini.

Tabel 2. 45 – Indeks Ekonomi Hijau dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023			
	Nilai Indeks	Pilar Lingkungan	Pilar Ekonomi	Pilar Sosial
Indeks Ekonomi Hijau (Kabupaten Soppeng)	64,71	91,8	17,7	67,4

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

2.3.3.2. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru pada konteks paradigma keberlanjutan (*sustainability paradigm*), terminologi "Ekonomi Biru" dapat melengkapi konsep Ekonomi Hijau karena Indeks Ekonomi Biru Indonesia juga dibangun dengan 3 pilar yang menjadi komponen utama pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar lingkungan, ekonomi dan sosial. Pendekatan pembangunan dengan model ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan program *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja) dan *pro-environment* (melestarikan lingkungan). Kinerja pengembangan ekonomi biru perlu diukur dan dievaluasi secara periodik. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan indikator yang dikembangkan untuk memahami kondisi saat ini dari ekonomi biru dan perkembangannya di tingkat nasional dan regional.

Kementerian PPN/Bappenas melakukan perhitungan IBEI hanya di level provinsi, sedangkan indikator di level kabupaten/kota belum tersedia. Dengan
menggunakan pendekatan dan metode yang diterapkan di level provinsi dan nasional, disajikan perhitungan IBEI level kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan nilai IBEI Kabupaten Soppeng tahun 2023 sebesar 53,2 poin, hal tersebut dikarenakan Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah laut dan hanya sebagain kecil wilayah perairannya masuk kawasan Danau Tempe.

Tabel 2. 46 – Indeks Ekonomi Biru dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Uraian	Pilar 1 : Ekonomi	Pilar 2 : Lingkungan	Pilar 3 : Sosial	IBEI
Indeks Ekonomi Biru (Kabupaten Soppeng)	47,6	44,6	41,5	53

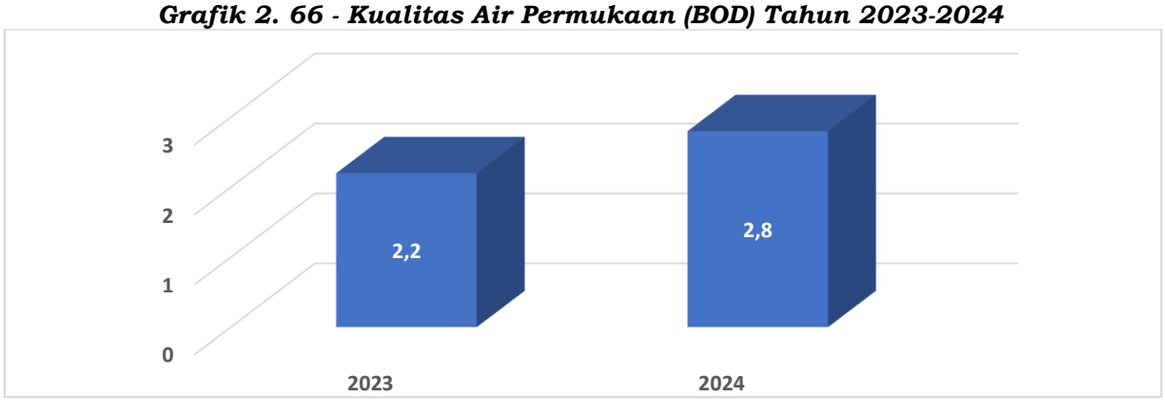
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Ket : - Skor 78,7 – 86,0 kategori tinggi
- Skor 71,5 – 78,7 kategori agak tinggi
- Skor 59,9 – 71,5 kategori sedang
- Skor 53,2 – 59,9 kategori rendah

2.3.3.3. Kualitas Air Permukaan (BOD)

BOD adalah suatu pengukuran pendekatan jumlah biokimia yang terdegradasi di perairan. Hal ini didefinisikan sebagai jumlah oksigen yang diperlukan oleh proses mikro organisme aerob untuk mengoksidasi menjadi bahan an organic. Analisis kualitas air dengan mengukur parameter BOD merupakan pengukuran jumlah oksigen terlarut dalam air yang digunakan bakteri. Di Kabupaten Soppeng untuk kualitas air permukaan (BOD) di tahun 2023 sebesar 2,2 poin dan meningkat di tahun 2024 sebesar 2,8 poin. Indikator ini merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk mengukur indeks kualitas lingkungan hidup maupun indeks ekonomi biru.

Grafik 2. 66 - Kualitas Air Permukaan (BOD) Tahun 2023-2024

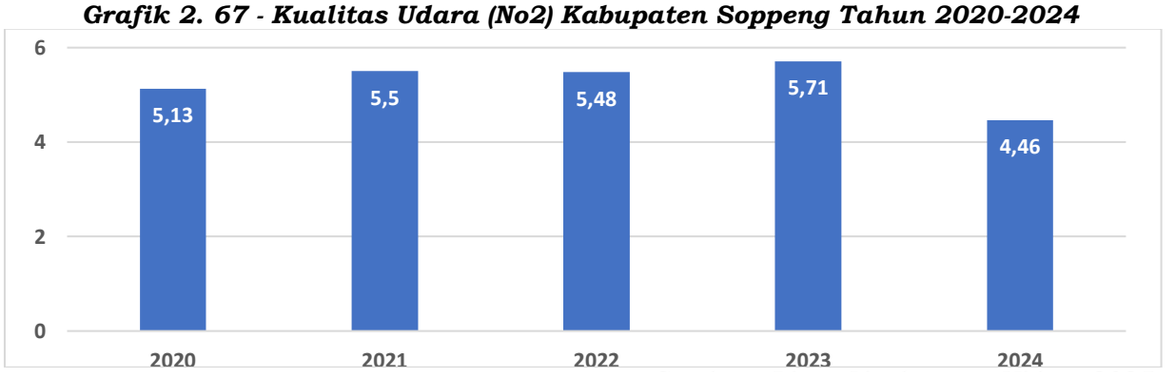


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.3.3.4. Kualitas Udara

Pencemaran udara merupakan masalah yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia. Adapun sumber utama pencemaran udara ini berasal dari transportasi yang menyumbangkan sekitar 60-80% pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor. Terdapat beberapa parameter pencemaran udara, salah satunya adalah No2. No2 adalah kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer yang membentuk gas nitrogen oksida (Nox) bersama dengan gas nitrogen monoksida (No). Untuk capaian pembangunan kualitas udara (No2) di kabupaten Soppeng dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Di tahun 2020 capaian kualitas udara sebesar 5,13 poin dan pada tahun 2021 nilai kualitas udara tersebut meningkat dengan capaian 5,5 poin dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 5,48 poin. Di tahun 2023 kualitas udara (No2)sebesar 5,71 poin dan menurun di tahun 2024 dengan poin sebesar 4,46. Kualitas udara di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 67 - Kualitas Udara (No2) Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024



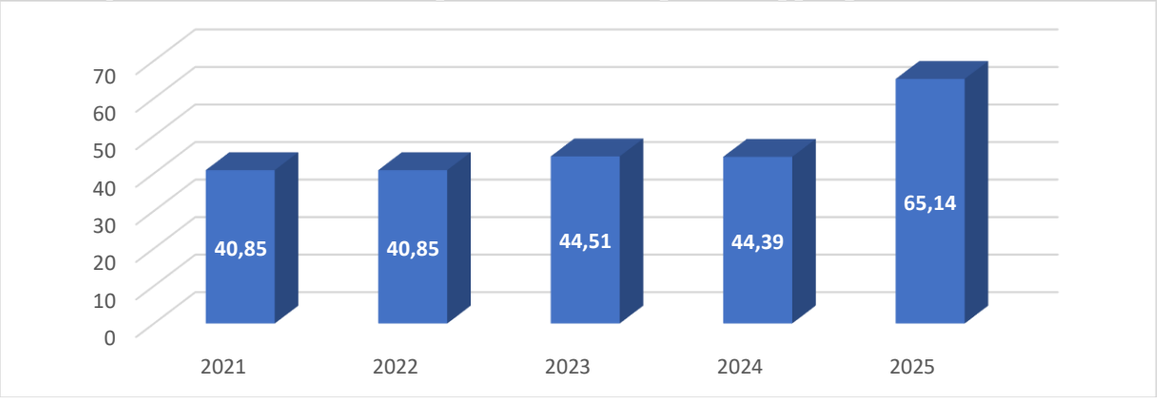
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.3.3.5. Kualitas Tutupan Lahan

Kualitas tutupan lahan merupakan salah satu indikator pembangunan yang digunakan sebagai parameter yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. IKTL dibuat dengan

mempertimbangkan beberapa faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. Di Kabupaten Soppeng sendiri indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2021-2025 mengalami perubahan metode penghitungan capaiannya. Di tahun 2021 dan 2022 kualitas tutupan lahan Kabupaten Soppeng sebesar 40,85 poin, sedangkan di tahun 2023 sebesar 44,51 poin. Untuk kondisi di tahun 2024 kualitas tutupan lahan Kabupaten Soppeng sebesar 44,39 poin mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 65,14 poin. Capaian kualitas tutupan lahan Kabupaten Soppeng dalam lima tahu terakhir dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 68 - Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



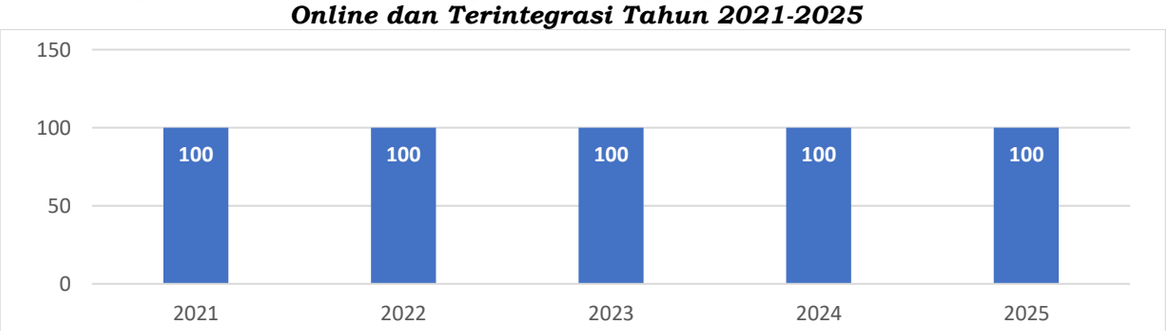
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026

2.3.4. Transformasi Digital

2.3.4.1. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Pelayanan yang optimal dan prima merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Selain itu perkembangan teknologi menjadi tantangan dalam proses pembangunan yang dilakukan sehingga dalam pelayanan publik yang diselenggarakan juga perlu dilakukan secara online dan terintegrasi. Untuk persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di wilayah Kabupaten Soppeng pada tahun 2021-2025 dengancapaian 100%. Capaian tersebut membuktikan bahwa rata-rata pelayanan publik di Kabupaten Soppeng diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

Grafik 2. 69 - Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

2.3.4.2. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Internet merupakan sebuah singkatan dari *Interconnection Networking*, atau yang berarti jaringan yang terhubung secara luas. Dengan jaringan inilah semua orang bisa berkomunikasi dengan mudah dan dalam waktu yang singkat dari seluruh dunia tanpa batas. Kehidupan modern telah menjadi lebih mudah berkat kontribusi besar teknologi internet untuk

komunikasi dan berbagi informasi. Manfaat internet tak hanya sebatas pada akses komunikasi dan informasi. Kini manfaat internet telah merambah pada sektor ekonomi, sosial, hiburan, hingga keamanan. Di Kabupaten Soppeng, proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2021 sampai tahun 2022 sebesar 81,49 meningkat di tahun 2023 sebesar 82,02% dan tahun 2024 sebesar 91,67%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan proporsi rumah tangga dengan akses internet sebesar 92,02%.

Tabel 2. 47 - Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	Unit	64.314	64.314	68.732	55.000	79.659
2	Jumlah rumah tangga	Unit	78.923	78.923	83.791	60.000	86.563
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	81,49	81,49	82,02	91,67	92,02

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

2.3.4.3. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Keberhasilan transformasi digital memerlukan pengukuran yang tepat untuk memahami kondisi masyarakat digital secara menyeluruh. Indeks Masyarakat Digital Indonesia hadir sebagai instrumen strategis untuk memetakan tingkat adopsi teknologi, literasi digital, pemberdayaan ekonomi digital serta kesenjangan yang masih ada. Indeks ini tidak hanya menggambarkan pencapaian, tetapi juga memberikan arahan bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengidentifikasi tantangan serta peluang. Dengan memahami posisi Indonesia dalam lanskap digital global, kita dapat merumuskan kebijakan yang terukur dan efektif untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan merata.

IMDI adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menilai tingkat literasi dan keterampilan digital masyarakat Indonesia. IMDI bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana masyarakat Indonesia siap dan mampu memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. IMDI disusun berdasarkan *G20 Toolkit for Measuring Digital Literacy and Digital Skills*, dan memiliki empat pilar utama: Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, Pekerjaan. Untuk membandingkan tingkat digitalisasi antar wilayah secara lebih mendalam, nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dikategorikan. Kategorisasi ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat digitalisasi tinggi, cukup dan rendah, sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas intervensi untuk meningkatkan digitalisasi masyarakat. Kriteria kategorisasi IMDI ditentukan berdasarkan rata-rata dan standar deviasi dari nilai IMDI seluruh wilayah selama periode 2022-2025. Kategori IMDI terbagi menjadi lima kelompok, yaitu : Sangat Rendah (lebih kecil dari 30,88), Rendah (30,88 – 36,27), Cukup (36,28 – 47,06), Tinggi (47,07 – 52,47) dan Sangat Tinggi (lebih besar dari 52,47). untuk nilai IMDI Kabupaten Soppeng beserta pilar pembentuknya tahun 2022-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 48 – Nilai Indeks Masyarakat Digital beserta Pilar Pembantuknya di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2025

Tahun	Indeks Masyarakat Digital	Pilar Infratrukstur dan Ekosistem	Pilar Keterampilan Digital	Pilar Pemberdayaan	Pilar Pekerjaan
2022	37,44	44,93	46,58	22,13	37,93
2023	41,18	54,98	52,4	23,85	34,78
2024	38,81	51,92	48,18	22,11	35,37
2025	38,06	49,56	53,30	19,41	30,49

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital, 2026

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.5.1. Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok

Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok menjadi salah satu indikator utama yang menggambarkan sejauh mana kesenjangan harga barang dan jasa antar wilayah dapat diminimalkan. Kesenjangan harga yang tinggi menunjukkan adanya kendala distribusi dan infrastruktur yang belum merata, sementara kesenjangan yang rendah mencerminkan konektivitas ekonomi domestik yang lebih baik. Di tahun 2023 koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok di Kabupaten Soppeng sebesar 10,69%. Diharapkan penurunan koefisien variasi harga antar wilayah mampu meningkatkan efisiensi pasar dan daya saing lokal, sehingga mendukung integrasi ekonomi domestik yang kuat di Kabupaten Soppeng.

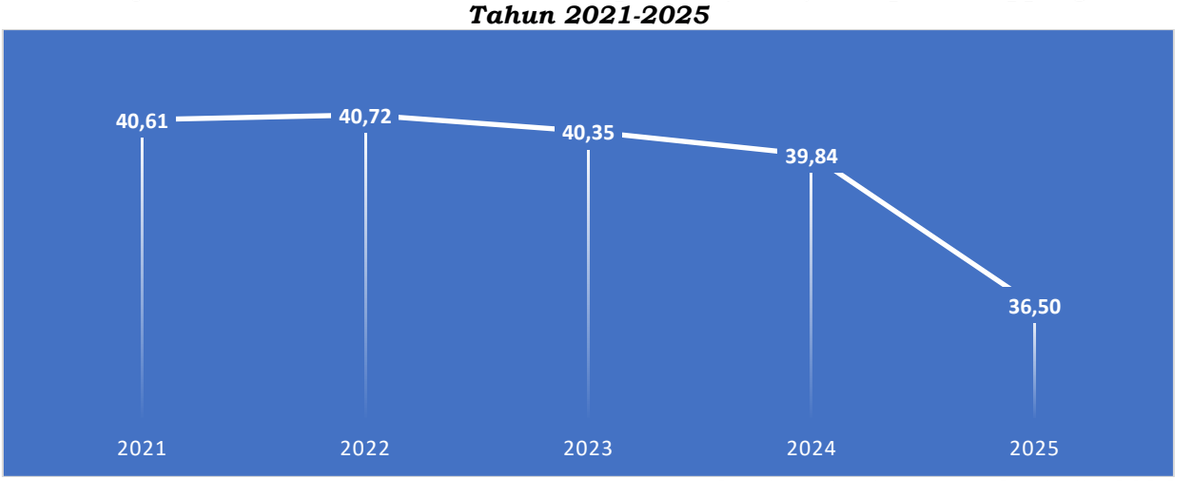
2.3.5.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Secara garis besar Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain).

Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah ”bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.

Kondisi PMTB di Kabupaten Soppeng sendiri mengalami fluktuatif dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata nilai sebesar 39,60%. Pada tahun 2021 capaian PMTB di Kabupaten Soppeng sebesar 40,61%. Capaian PMTB tersebut terus mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 40,72% dan tahun 2023 sebesar 40,35% akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2024 dengan capaian sebesar 39,84%. Penurunan tersebut berlanjut di tahun 2025 sebesar 36,50%. Faktor penyebab meurunnya capaian tersebut dikarenakan melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada konsumsi rumah tangga yang melambat. Kondisi PMTB Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 70 - Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.3.5.3. Ekspor Bersih Perdagangan

Neraca perdagangan atau *balance of trade* (BoT) ialah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. *Net exports*, ekspor neto atau ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Ekspor mewakili pembelian orang asing untuk barang dan jasa dalam negeri. Impor adalah pembelian produk dan layanan asing oleh konsumen lokal.

Pertumbuhan domestik yang tinggi biasanya meningkatkan permintaan barang impor. Akibatnya ekspor bersih menurun (*ceteris paribus*) sehingga barang domestik yang lebih mahal membuat barang asing lebih kompetitif bagi konsumen domestik. Permintaan impor meningkat karena lebih banyak konsumen lebih memilih barang asing. Di pasar regional dan internasional, barang domestik juga kurang kompetitif, sehingga mengurangi permintaan mereka.

Apresiasi mata uang mengurangi ekspor neto, impor meningkat karena barang asing lebih murah untuk konsumen dalam negeri dan ekspor menurun karena barang dalam negeri lebih mahal untuk orang asing. Di samping itu biaya produksi memiliki implikasi untuk harga jual. Biaya produksi yang lebih rendah membuat barang dan jasa dalam negeri lebih murah. Ini akan menyebabkan peningkatan ekspor neto karena barang-barang domestik relatif lebih kompetitif.

Hambatan perdagangan seperti kuota impor, standar keselamatan, lisensi impor, persyaratan konten lokal, dan lain-lain mempengaruhi neraca perdagangan suatu daerah. Ekspor mendorong produksi dalam negeri meningkat, sementara itu impor merusak produksi dalam negeri karena pasokannya berasal dari luar negeri. Demikian juga di Kabupaten Soppeng masih tingginya nilai import perdagangan disebabkan masih terbatasnya jumlah jenis komoditi dan jumlah produksi perdagangan antar daerah/ekspor, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan produk- produk industri dari luar.

Tabel 2. 49 - Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Miliar Rp	-320,83	-472,52	-492,33	-553,86	226,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Dari tabel di atas terlihat jika Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami defisit. Hal ini menunjukkan bahwa nilai import lebih tinggi dibanding nilai ekspor. Pada tahun 2021 ekspor bersih perdagangan sebesar -320,83 miliar rupiah. Di tahun 2022 penurunan defisit terjadi dengan nilai sebesar -472,52 miliar rupiah. Pada tahun 2023 ekspor bersih perdagangan kembali menurun dinagan nilai -492,33 miliar rupiah, sedangkan tahun 2024 mencapai -553,86 miliar rupiah. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan capaian ekspor bersih perdagangan sebesar 226,66 miliar rupiah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku.

Salah satu potensi sektor penyumbang nilai ekspor di Kabupaten Soppeng adalah sutera. Persuteraan alam memiliki prospek yang baik sebagai komoditas ekspor maupun substitusi impor. Namun perkembangan industri persuteraan alam di Kabupaten Soppeng cenderung lambat dan kurang merespons potensi tersebut. Ketersediaan bibit ulat sutera yang masih impor dari Cina sehingga ketersediaan kokon (sektor hulu) lebih lambat dibandingkan kebutuhan. Demikian juga perkembangan impor lebih besar dibandingkan dengan perkembangan ekspor produk-produk sutera.

2.3.5.4. Cakupan Bina Kelompok Pedagang

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, menunjukkan

jumlah cakupan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok pedagang (informal). Pedagang informal dalam hal ini adalah kelompok pedagang pasar. Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM terus berupaya untuk mengoptimalkan jumlah pembinaan terhadap kelompok pedagang utamanya kelompok Pedagang Pasar. Perhatian pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang cukup besar telah dioptimalkan melalui adanya kegiatan Revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan (pasar) di Kabupaten Soppeng. Optimalisasi sarana perdagangan berupa pasar semi tradisional dengan diaktifkannya kembali Pasar Lolloe pada tahun 2019. Bertambahnya sarana perdagangan maka akses kelompok pedagang untuk memasarkan dagangannya semakin meningkat. Program revitalisasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), tugas pembantuan dan sharing APBD merupakan program revitalisasi Kementerian Perdagangan yang diatur dalam Permendag Nomor : 48/M- DAG/PER/8/2013 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

Pembinaan pedagang pasar oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng juga meliputi pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Hal ini untuk memastikan barang beredar dapat sesuai dengan parameter pengawasan dan para pedagang mengetahui dan menyadari hak-hak konsumen dalam mengonsumsi barang yang tidak terdistorsi atau tercampur dengan barang yang rusak/kadaluwarsa, tidak terdaftar, atau hal yang menurunkan kualitas lainnya, ketika sudah beredar di pasar. Termasuk pengawasan untuk menjaga ketersediaan dan menjaga stabilitas harga barang pokok serta tertib niaga.

Kinerja cakupan bina kelompok pedagang dihitung dari Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan dibagi dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal, berikut adalah data cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2021-2025.

Tabel 2. 50 - Cakupan Bina Kelompok Pedagang Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok Pedagang	18	18	18	18	18
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok Pedagang	18	18	18	18	18
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2026

Dari tabel di atas terlihat jika jumlah cakupan bina kelompok pedagang selama tahun 2021-2025, cenderung stagnan dari tahun ke tahun dan tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 18 kelompok pedagang informal, jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tetap berjumlah 18 kelompok sehingga capaian sebesar 100%. Salah satu faktor yang mendorong penggunaan fasilitas sarana perdagangan/pasar semi tradisional adalah bahwa peran pasar di samping sebagai sumber retribusi daerah, tempat pertukaran barang, pusat pengembangan ekonomi rakyat, pusat perputaran uang daerah, pasar juga sebagai salah satu tempat lapangan pekerjaan.

2.3.5.5. Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi

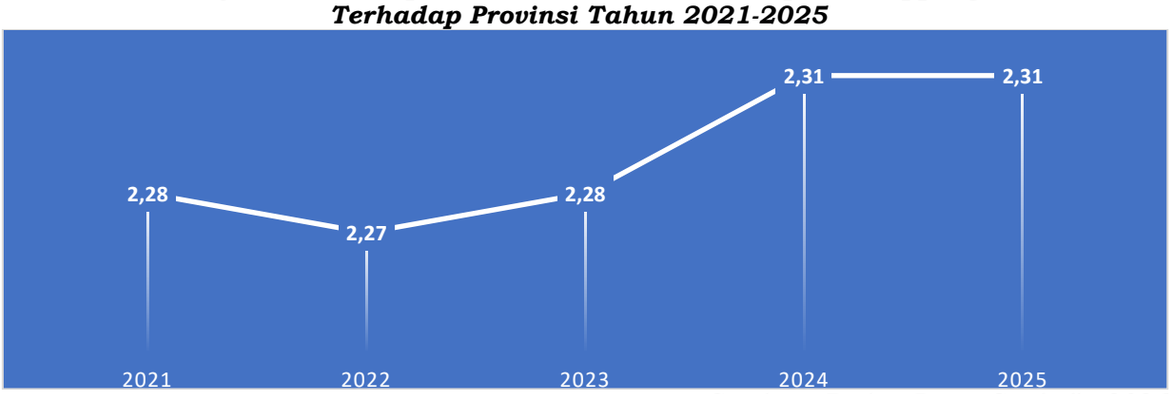
Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten yang berkontribusi terhadap capaian PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Soppeng sendiri bertumpu pada sektor pertanian sebagai sektor utama yang menopang PDRB di Kabupaten Soppeng sendiri maupun di Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut didukung oleh luas Kawasan

pertanian yang ada di Kabupaten Soppeng.

Pemerintah telah menetapkan lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas tanaman pangan di Sulawesi Selatan di mana Kabupaten Soppeng sendiri masuk ke dalam lokasi pengembangan komoditas tanaman padi serta lokasi pengembangan komoditas kedelai. Sedangkan untuk pengembangan komoditas pertanian hortikultura Kabupaten Soppeng diarahkan pada perkebunan kakao. Kontribusi pertanian terhadap pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kontributor utama terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, maka penting untuk menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Pengembangan wilayah tersebut mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Soppeng terhadap provinsi di tahun 2021 dengan capaian 2,28%, menurn di tahun 2022 sebesar 2,27%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan terjadinya peningkatan dengan proporsi kontribusi PRDB Kabupaten Soppeng terhadap Provinsi sebesar 2,31%. Capain tersebut untuk tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 71 - Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Soppeng Terhadap Provinsi Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.6.1. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Berdasarkan data capaian rumah layak huni maupun rumah tidak layak huni di Kabupaten Soppeng menunjukkan adanya perkembangan yang lebih baik. Data tersebut menunjukkan capaian 93,62% rumah layak huni dan 6,38% rumah tidak layak huni di tahun 2025.

Tabel 2. 51 – Jumlah RLH dan RTLH Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

Kabupaten	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	Jumlah Rumah (Unit)	56.899	56.899	56.899	56.899	59.575
	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	50.924	51.706	52.430	52.965	55.772
	% Rumah Layak Huni	89,5	90,87	92,15	93,09	93,62
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	5.975	5.193	4.448	3.913	3.803
	% Rumah Tidak Layak Huni	10,5	9,13	7,82	6,88	6,38

Sumber : Pokja PKP Kabupaten/Kota (BAPPEDA, Dinas Perkim), Tahun 2026

Di Kabupaten Soppeng data capaian rumah layak di Kabupaten Soppeng tahun 2025 sebesar 64,89% tersebut berdasarkan komponen kelayakan yang terdiri dari ketahanan bangunan sebesar 72,21%, kecukupan luas sebesar 97,29%, air minum layak sebesar 95,09% dan sanitasi layak sebesar 95,44%. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 52 – Capaian Rumah Layak Huni Kabupaten/Kota Menurut Komponen Kelayakan Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	RUMAH LAYAK HUNI (%)	KOMPONEN RUMAH LAYAK HUNI (%)			
			KETAHANAN BANGUNAN	KECUKUPAN LUAS	AIR MINUM LAYAK	SANITASI LAYAK
1	Kepulauan Selayar	68,76	83,28	94,45	95,23	89,39
2	Bulukumba	68,37	86,49	98,2	86,77	88,66
3	Bantaeng	65,85	87,74	98,67	97,02	77,94
4	Jeneponto	31,7	38,6	97,23	97,43	87,2
5	Takalar	72,38	74,45	97,95	98,34	96,25
6	Gowa	78,86	87,08	96,73	94,88	98,42
7	Sinjai	74,35	96,97	97,57	90,69	86,14
8	Maros	65,77	74,11	96,37	91,34	94,68
9	Pangkajene dan Kepulauan	53,07	60,18	95,4	95,07	94,51
10	Barru	71,01	78,51	94,93	98,26	96,21
11	Bone	84,25	94,59	98,3	91,8	97,54
12	Soppeng	64,89	72,21	97,29	95,09	95,44
13	Wajo	80,31	93,37	93,35	91,39	95,93
14	Sidenreng Rappang	79,71	83,66	96,99	96,78	98,32
15	Pinrang	67,31	84,9	94,16	90,47	92,74
16	Enrekang	74,6	96,18	93,73	83,34	96,63
17	Luwu	71,53	93,48	96,01	82,05	92,91
18	Tana toraja	53,43	96,11	87,44	66,5	90,74
19	Luwu Utara	81,64	96,65	97,59	88,12	97,14
20	Luwu Timur	74,86	93,75	96,65	88,27	89,65
21	Toraja Utara	55,1	97,68	83,81	70,34	92,86
22	Makassar	78,27	93,2	88,08	98,57	93,92
23	Parepare	70,51	77,86	91,77	99,53	96,7
24	Palopo	85,73	95,11	92,18	99,26	96,57
	Sulawesi Selatan	71,86	86,09	94,51	92,23	93,83

Sumber : BPS, data diolah BAPPENAS Tahun 2026

Hasil Susenas pada bulan Maret tahun 2025 menunjukkan rumah tangga dengan status rumah milik sendiri sebesar 96,56% mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Sedangkan untuk rumah tangga dengan status rumah sewa/kontrak/bebas sewa/rumah dinas/lainnya sebesar 2,94%. Capaian ini menunjukkan adanya tren positif dalam pemenuhan kebutuhan dasar perumahan yang juga berkontribusi terhadap pengurangan risiko kemiskinan multidimensi, mengingat kepemilikan rumah berperan sebagai bentuk aset fisik yang mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga. Untuk dapat menempati hunian yang layak dan terjangkau tidak terlepas dari status ekonomi rumah tangga. Seiring dengan makin tingginya status ekonomi, kebutuhan rumah tangga yang memilki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau semakin tinggi. Kepemilikan rumah berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan, karena rumah yang aman dan terjangkau meskipun angkanya terus menunjukkan peningkatan, tantangan untuk mencapai target kepemilikan rumah masih cukup besar.

Tabel 2. 53 – Rumah tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal (Backlog Kepemilikan) Tahun 2021-2025

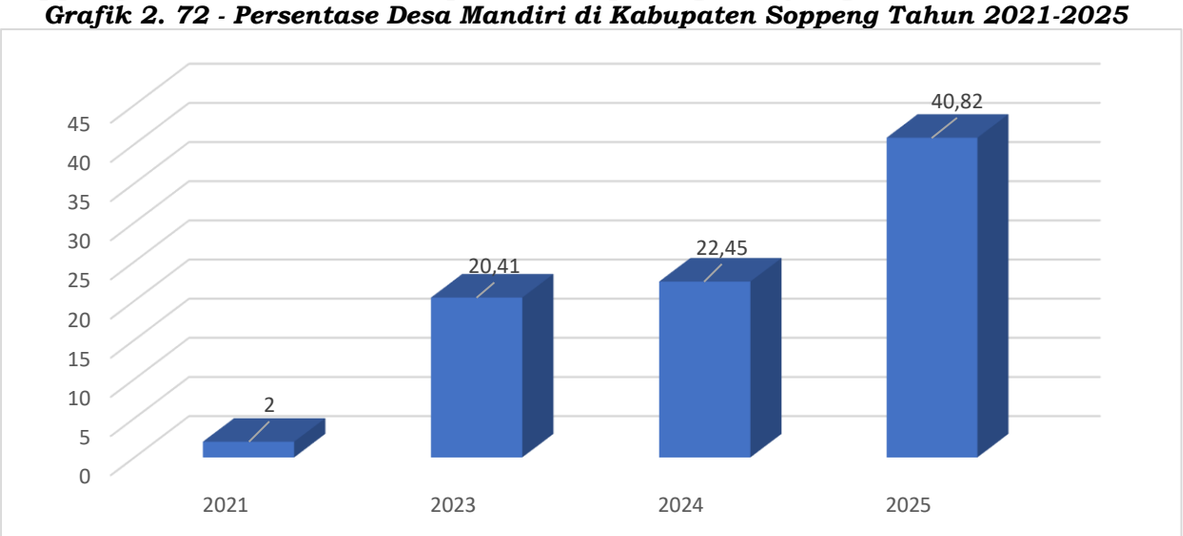
Kabupaten	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	Rumah Milik Sendiri (%)	93,31	95,73	97,01	95,49	96,56
	Rumah Sewa/Kontrak/Bebas Sewa/Rumah Dinas/Lainnya (%)	3,69	4,27	2,99	4,18	2,94

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

2.3.6.2. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri merupakan perbandingan desa dengan Kategori Desa Mandiri terhadap total Desa yang ada di suatu wilayah. Di Kabupaten Soppeng sendiri persentase desa mandiri mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2021 capaian persentase desa mandiri di Kabupaten Soppeng sebesar 4% meningkat di tahun 2022 sebesar 10%. Di tahun 2023 capaian tersebut mengalami peningkatan dengan persentase desa mandiri sebesar 20,41%. Di tahun 2024 persentase desa mandiri mengalami peningkatan sebesar 22,45%. Terdapat 11 desa mandiri dari 49 desa yang ada di tahun 2024, adapun desa mandiri tersebut yakni Desa Timusu, Desa Maccile, Desa Panincong, Desa Patampanua, Desa Donri-Donri, Desa Leworeng, Desa Labokong, Desa Belo, Desa Ganra, Desa Lompulle, dan Desa Enrekeng. Kondisi di tahun 2025 menujukkan kembali adanya peningkatan dengan capaian sebesar 40,82%. Untuk persentase desa mandiri di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik yang ada berikut ini.

Grafik 2. 72 - Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2026

2.3.6.3. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Tingkat perkembangan desa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Desa Swadaya; adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa swadaya berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.
- Desa Swakarya; adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan non fisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat desa swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.
- Desa Swasembada; adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan keuangan sehingga dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Kondisi di Tahun 2024 dan 2025 terdapat 9 desa di Kabupaten

Soppeng yang diklasifikasikan sebagai Desa Swasembada yakni Desa Gattareng, Desa Marioritengnga, Desa Barae, Desa Soga, Desa Timusu, Desa Baringeng, Desa Donri Donri, Desa Leworeng, dan Desa Laringgi. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang terdapat 6 desa swasembada atau sebesar 12,24%.

Tabel 2. 54 - Persentase Desa Berstatus Swasembada Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah desa berswasembada	Desa	6	7	6	9	9
2	Jumlah desa	Desa	49	49	49	49	49
	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	12,24	14,29	12,24	18,37	18,37

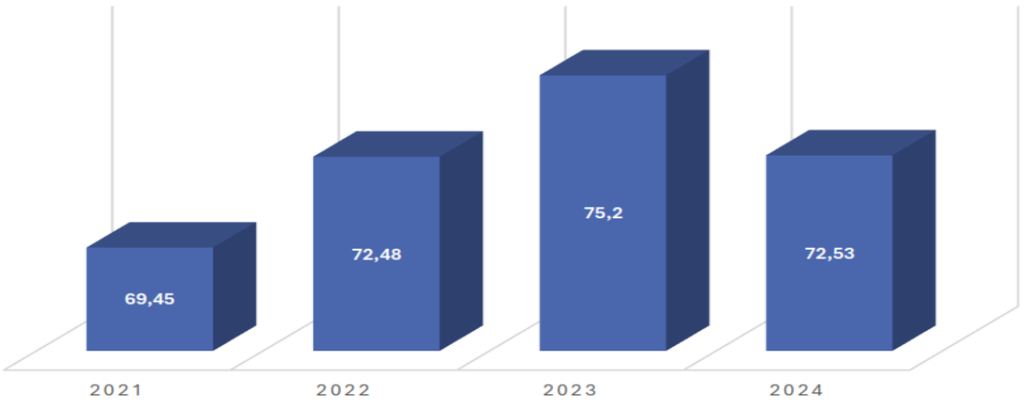
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2026

2.3.6.4. Indeks Layanan Infrastruktur Daerah

Indeks kualitas infrastruktur daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran indeks infrastruktur daerah memberikan informasi secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat seperti jalan, irigasi, drainase, bangunan, permukiman layak huni, rumah layak huni, maupun penyelenggaraan penataan ruang.

Kondisi capaian indeks infrastruktur daerah di Kabupaten Soppeng di tahun 2021 sebesar 69,45% mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan capaian sebesar 72,48%. Pada tahun 2023 capaian tersebut kembali mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 75,2%, akan tetapi menurun di tahun 2024 sebesar 72,53%. Penurunan capaian yang terjadi disebabkan oleh pengalokasian anggaran yang berkurang serta meningkatnya infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana ataupun umur infrastruktur yang ada telah melampaui dari standar yang ada. Untuk indeks layanan infrastruktur Kabupaten Soppeng tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 73 - Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

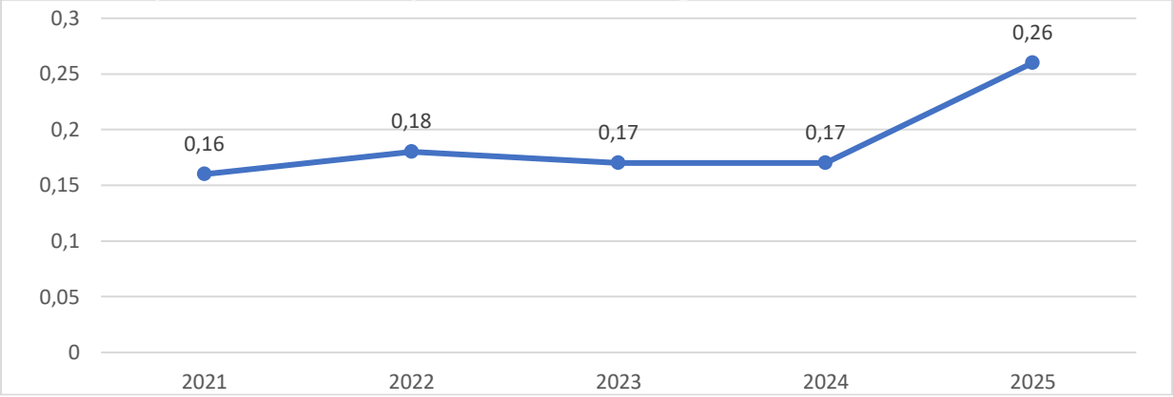
2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.7.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah berkontribusi terhadap PDRB. Indikator pembangunan ini menjadi gambaran ekonomi suatu daerah pada aspek daya saing daerah. Semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap PDRB menandakan efektivitas dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan pajak atau diversifikasi sumber pajak. Sebaliknya, rasio pajak yang rendah menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan pajak daerah. Di Kabupaten Soppeng rasio pajak daerah dalam 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2021-2025

mengalami fluktuasi. Tahun 2025 merupakan tahun dengan capaian tertinggi sebesar 0,26 dan terendah pada tahun 2021 sebesar 0,16. Untuk di tahun 2023 dan 2024 rasio pajak daerah Kabupaten Soppeng sebesar 0,17, capaian tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 74 - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Tahun 2021-2025



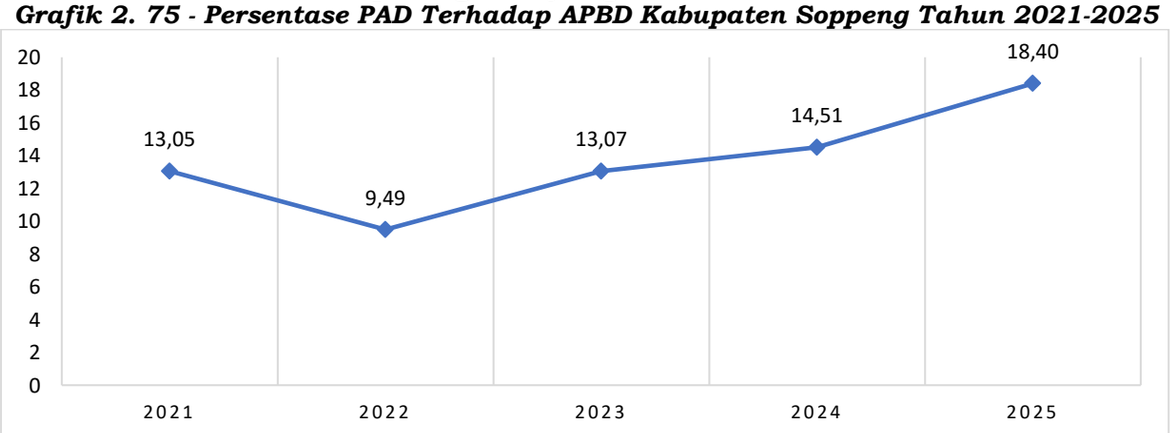
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2026

2.3.7.2. Persentase PAD Terhadap APBD

PAD merupakan salah satu unsur yang penting dalam struktur APBD. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Persentase PAD terhadap APBD dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 persentase PAD terhadap APBD mencapai 13,05% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 mencapai 9,49%. Sedangkan tahun 2025 merupakan tahun dengan persentase PAD terhadap APBD dengan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan angka sebesar 18,40%. Penyebab dari peningkatan capaian tersebut karena adanya berbagai langkah dan usaha ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan didukung regulasi yang mempermudah akses dalam penagihan kepada para wajib pajak. Selain itu upaya yang perlu dilakukan yakni penyelenggaraan sistem digitalisasi pendapatan daerah (elektronifikasi transaksi pendapatan daerah/ETPD) untuk meminimalisir kebocoran anggaran, serta memberikan kemudahan dan kecepatan layanan pembayaran bagi masyarakat. Persentase PAD terhadap APBD Kabupaten Soppeng tahun 2020-2025 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 75 - Persentase PAD Terhadap APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2026

2.3.7.3. Inflasi

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat dipakai sebagai

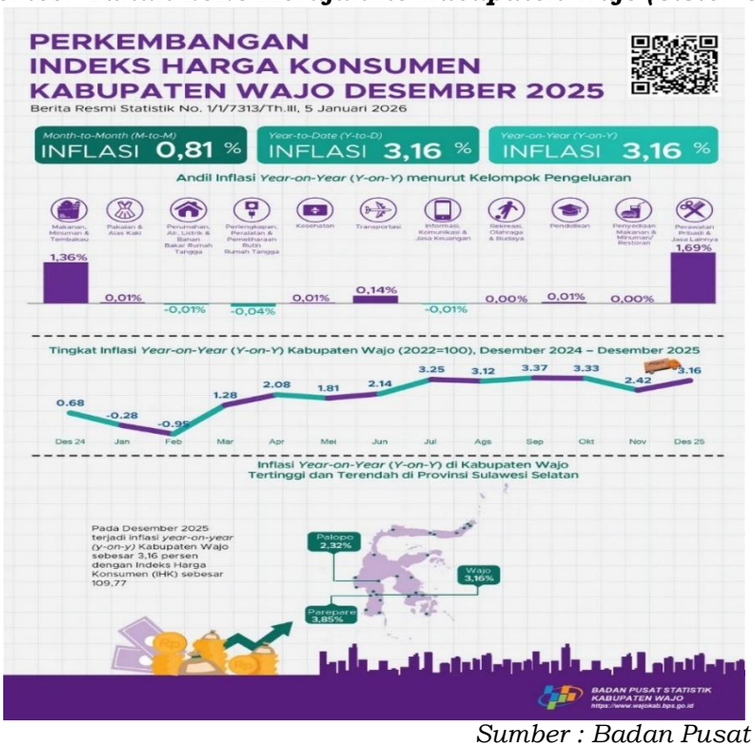
informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari- hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi maupun biaya hidup yang ada di masyarakat. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi.

Pengendalian inflasi merupakan indikator yang erat kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bukan berarti tidak adanya inflasi dapat berdampak baik bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah bahkan diangka nol justru akan berdampak pada lesunya perekonomian bahkan dapat menimbulkan stagnasi. Alhasil pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat terlaksana.

Laju inflasi tahunan Kabupaten Soppeng tahun 2025 merujuk ke Kabupaten Wajo sebagai *sister city* dengan capaian sebesar 3,16%. Capaian inflasi tersebut mengalami peningkatan dari bulan januari yang mencapai angka sebesar -0,28%. Inflasi ini memberikan informasi ekonomi bahwa keadaan harga barang dan jasa secara umum mengalami fluktuasi. Perkembangan inflasi tersebut pada bulan januari hingga desember tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

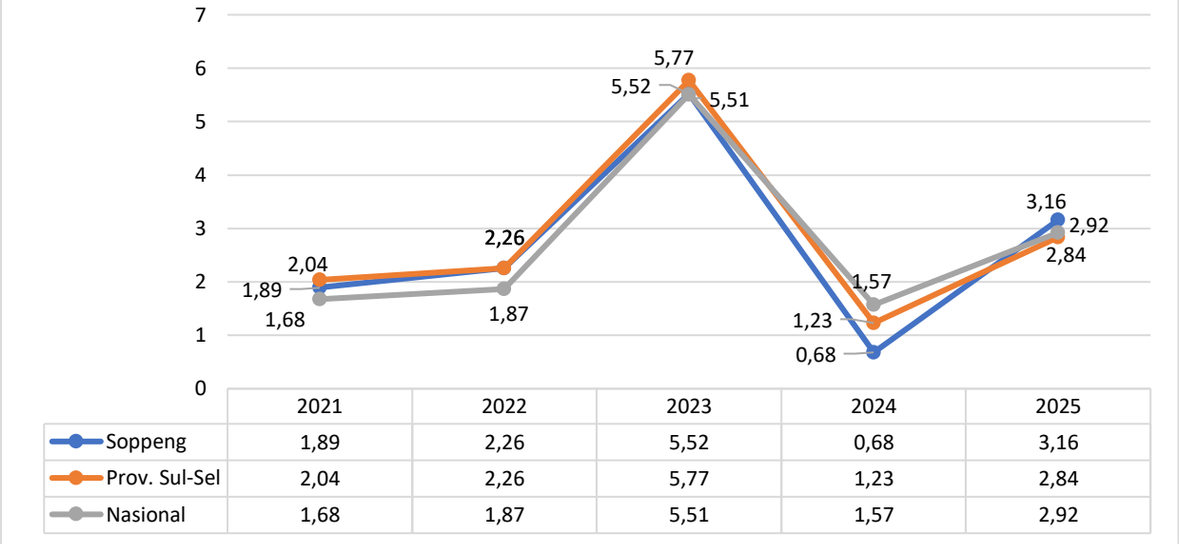
Gambar 2. 6 - Perkembangan Indeks Harga Konsumen Bulan Januari-Desember Tahun 2025 Merujuk ke Kabupaten Wajo (Sister City)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Laju inflasi atau rata-rata kenaikan harga barang dan jasa sepanjang tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,84%, dan laju inflasi nasional sebesar 2,92%.

Grafik 2. 76 - Perbandingan Inflasi Kabupaten Soppeng dengan Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021–2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	1,89	2,26	5,52	0,68	3,16
Prov. Sul-Sel	2,04	2,26	5,77	1,23	2,84
Nasional	1,68	1,87	5,51	1,57	2,92

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.3.7.4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan ukuran untuk menilai kualitas tata Kelola keuangan daerah yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Di Kabupaten Soppeng capaian IPKD mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan yang terjadi baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Selain itu terjadi perubahan dan penambahan variabel di dimensi penilaian dalam pengukuran indeks ini, sehingga target untuk lima tahun yang akan datang disesuaikan kembali atau lebih rendah jika dibandingkan capaian tahun terakhir. IPKD dilakukan pengukuran pada tahun berjalan untuk tahun anggaran sebelumnya. Di tahun anggaran 2023 yang dikeluarkan pada tahun 2024, IPKD Kabupaten Soppeng sebesar 79,624 dengan kategori B atau perlu perbaikan. Kondisi di tahun anggaran 2024 terkait nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 70,714 dengan kategori B (cukup baik). Nilai tersebut merupakan nilai total dari pengukuran dimensi 1 (Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran) sebesar 12,651 poin, dimensi 2 (pengalokasian anggaran belanja dalam APBD) sebesar 9,0625 poin, dimensi 3 (transparansi pengelolaan keuangan daerah) sebesar 15 poin, dimensi 4 (penyerapan anggaran) sebesar 20 poin, dimensi 5 (kondisi keuangan daerah) sebesar 4 poin, dan dimensi 6 (Opini BPK atas LKPD) sebesar 10 poin. Berikut capaian indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Soppeng untuk tahun anggaran 2021-2024 sebagai berikut ini.

Tabel 2. 55 – Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021-2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng	78,082 A (Baik)	84,436 A (Baik)	79,624 B (Perlu Perbaikan)	70,714 B (Perlu Perbaikan)

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025

2.3.7.5. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di berbagai daerah di Indonesia. IKAD dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi akses keuangan di seluruh kabupaten dan kota, termasuk yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan. IKAD juga diharapkan dapat membantu menjangkau mereka yang belum tersentuh layanan keuangan (inklusi keuangan) dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju inklusi keuangan yang lebih luas. Untuk Kabupaten Soppeng indeks akses keuangan daerah ini mengalami fluktuasi dalam 4 tahun terakhir. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 56 – Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2025

Uraian	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Indeks Akses Keuangan daerah (IKAD)	3,55	4,13	4,02	4,43

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2026

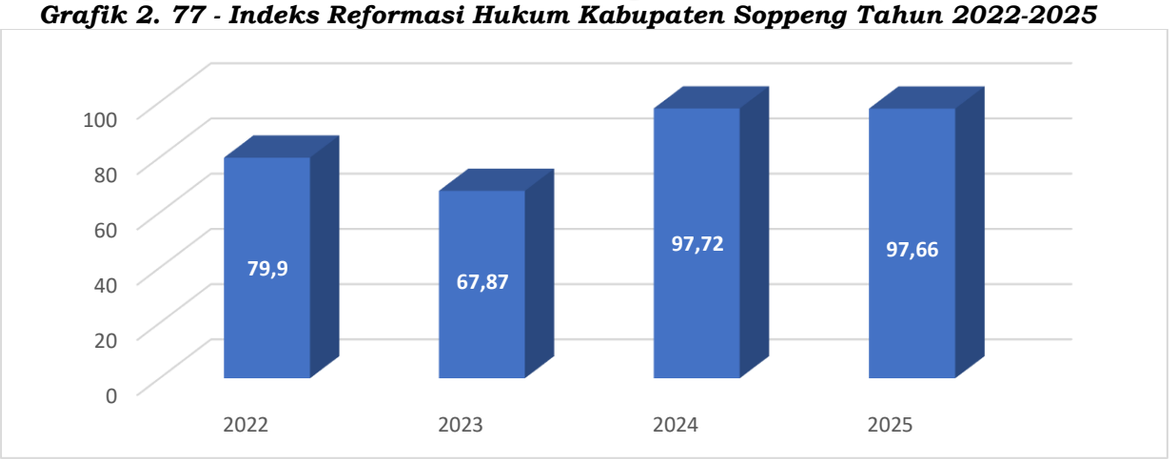
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum adalah indikator yang digunakan untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi. Indeks reformasi hukum ini diukur dengan variabel berdasarkan tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi, Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang- undangan berdasarkan hasil reviu, dan penataan database peraturan perundang- undangan. Di Kabupaten Soppeng sendiri capaian indeks reformasi hukum telah diukur dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 capaian IRH Kabupaten Soppeng sebesar 79,9% mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 67,87%. Di tahun 2024 capaian IRH Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 97,72 dengan kategori AA (istimewa) akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2925 dengan nilai sebesar 97,66 atau kategori AA (Istimewa).

Grafik 2. 77 - Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2025



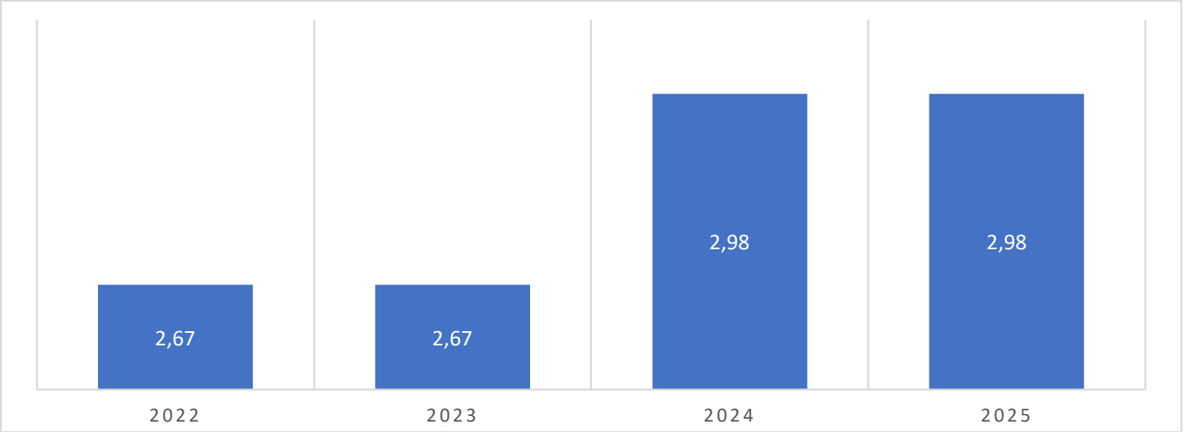
Sumber : Sekretariat Daerah (Bagian Hukum), 2025

2.4.1.2. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya pemerintah daerah perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024

dengan capaian nilai sebesar 2,98 atau dalam kategori "baik". Nilai SPBE Kabupaten Soppeng tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan nilai SPBE pada tahun 2022 dan 2023 yang tercatat pada angka 2,67 (Baik). Nilai SPBE Kabupaten Soppeng tersebut dapat di lihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 78 - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2025

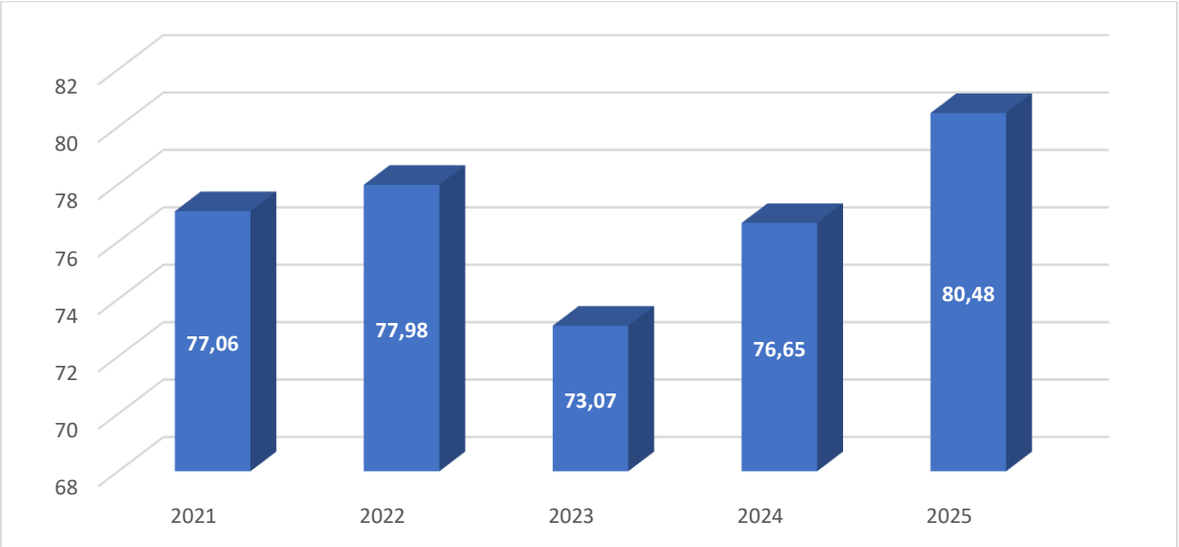


Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

2.4.1.3. Indeks Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (KLPD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Indeks survei penilaian integritas Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 nilai SPI Kabupaten Soppeng sebesar 77,08 dan nilai terakhir di tahun 2024 sebesar 76,65. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan terjadinya peningkatan nilai dengan capaian 80,48 yang mnjadikan Kabupaten Soppeng memiliki nilai tertinggi antara Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Indeks survei penilaian integritas Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 79 - Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

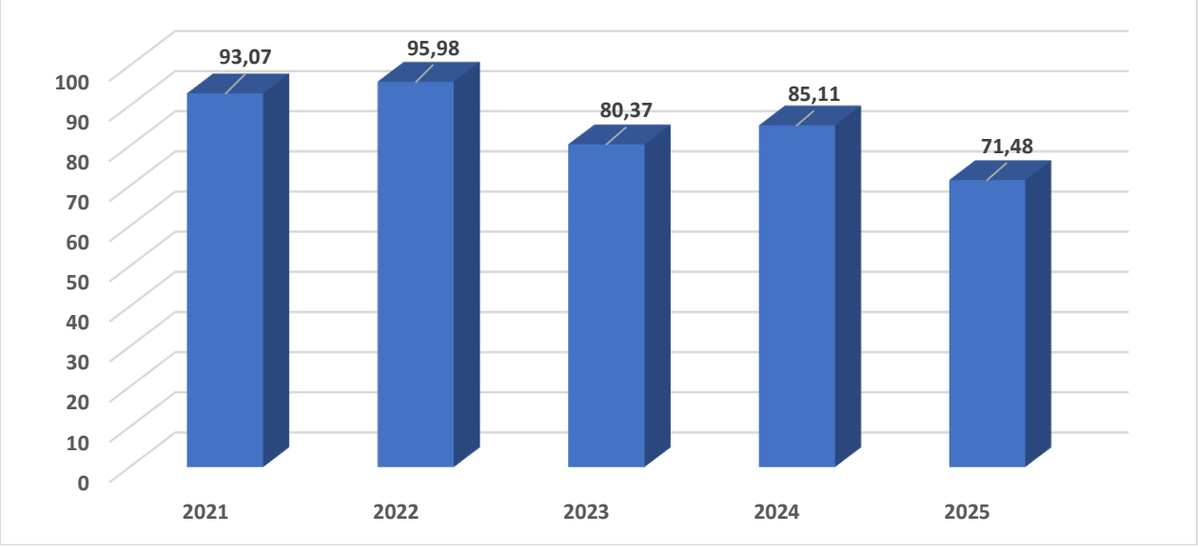


Sumber : Inspektorat Daerah, 2026

2.4.1.4. Indeks Pencegahan Korupsi

Indeks pencegahan korupsi merupakan indikator pembangunan dalam melihat upaya ataupun tindakan pencegahan dalam penanganan tindak korupsi yang ada di daerah. Nilai indeks pencegahan korupsi di Kabupaten Soppeng sendiri memiliki mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Di tahun 2021 nilai indeks pencegahan korupsi Kabupaten Soppeng sebesar 93,07 meningkat di tahun 2022 dengan capaian masing sebesar 95,98. Pada tahun 2023 capaian indeks pencegahan korupsi mengalami penurunan dengan nilai sebesar 80,37 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2024 dengan capaian sebesar 85,11. Di Tahun 2025 terdapat perubahan penilaian atau pengukuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (IPKD MCSP) yang dilakukan oleh KPK dengan adanya berbagai indikator baru yang disesuaikan pada masing-masing area pengukuran. Capaian IPKD MCSP Kabupaten Soppeng di 2025 mengalami penurunan sebesar 71,48, hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian atau perubahan terhadap pengukuran penilaian IPKD MCSP serta di tahun 2025 merupakan tahun transisi pemerintahan baik nasional maupun daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan baru yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk nilai IPKD MCSP Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 80 - Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

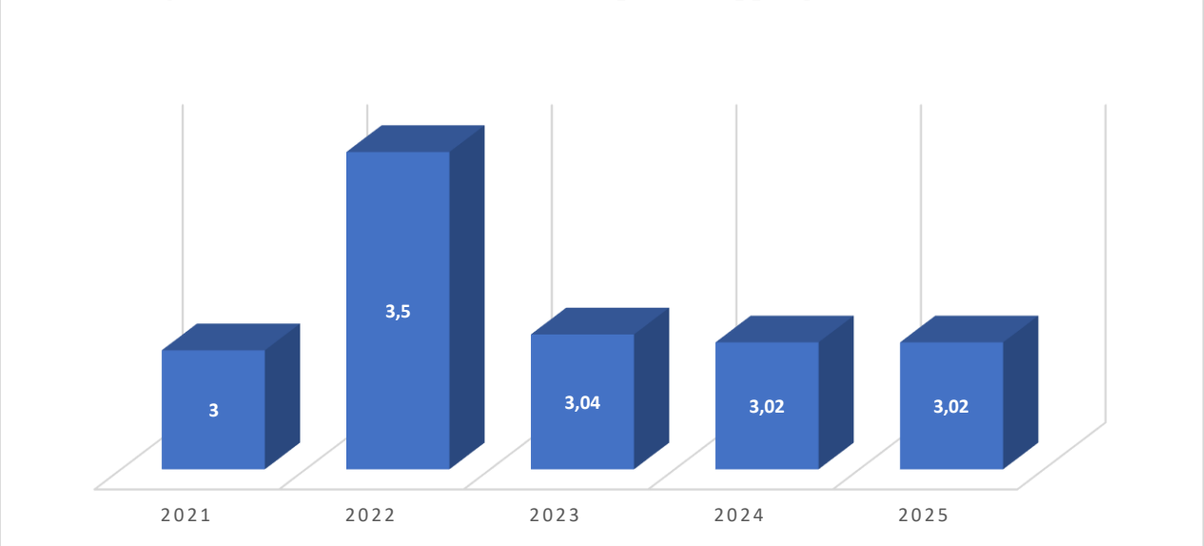


Sumber : Inspektorat Daerah, 2026

2.4.1.5. Indeks Maturitas

Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk penilaian maturitas SPIP Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar 3,00 poin. Di tahun 2022 mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 3,50 poin, akan tetapi capaian tersebut menurun di tahun 2023 dengan nilai 3,04 poin dan di tahun 2024. Di tahun 2025 nilai indeks maturitas tidak dirilis oleh BPKP/tidak dievaluasi sehingga nilai mengacu pada tahun sebelumnya sebesar 3,02 poin. Indeks maturitas Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 81 - Indeks Maturitas Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

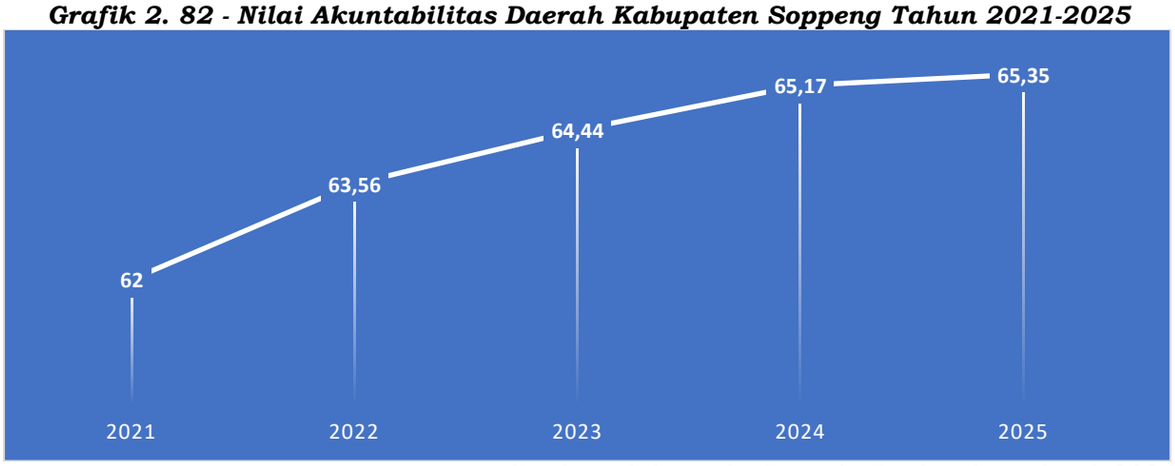


Sumber : Inspektorat Daerah, 2025

2.4.1.6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Nilai Akuntabilitas kinerja berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2021 terhadap implementasi system akuntabilitas kinerja kabupaten Soppeng tahun 2021 dengan nilai 62 atau dengan predikat penilaian B. Nilai akuntabilitas tersebut kemudian meningkat pada tahun tahun 2022 dengan nilai 63,56 dengan predikat B (baik) dan tahun 2023 dengan nilai 64,44 mendapatkan predikat B (baik). Peningkatan tersebut berlanjut di tahun 2024 dengan nilai sebesar 65,17 dengan predikat B (baik) dan tahun 2025 sebesar 65,35 dengan predikat B (baik).

Grafik 2. 82 - Nilai Akuntabilitas Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



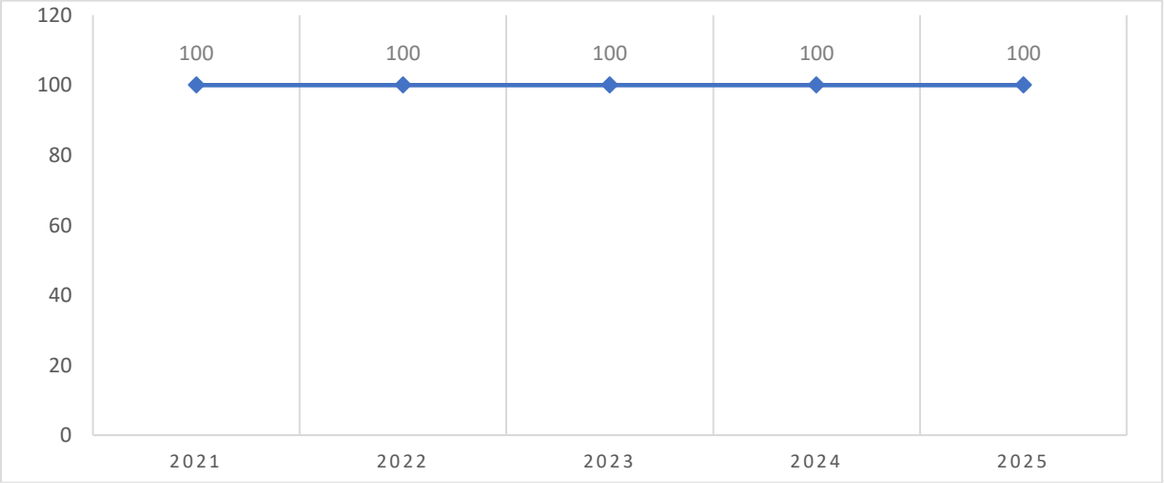
Sumber : Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi, 2026

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.4.2.1. Persentase Gangguan Tantribum yang dapat Diselesaikan

Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan merupakan gambaran kondisi keamanan yang ada di dalam suatu daerah serta penanganan atau penyelesaian yang dilakukan terkait dengan gangguan yang terjadi. Untuk Kabupaten Soppeng sendiri persentase gangguan tantribum yang dapat diselesaikan tahun 2021 sampai pada tahun 2025 sebesar 100%, semua gangguan yang terjadi dapat ditangani atau dapat diselesaikan. Persentase gangguan tantribum yang dapat diselesaikan tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 83 - Persentase Gangguan Tantribum yang dapat Diselesaikan Tahun 2021-2025



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran, 2026

2.4.2.2. Persentase PERDA dan PERKADA yang Ditegakkan

Indikator pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Capaian persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Soppeng dari tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 capaian tersebut sebesar 55,56% dan kembali menurun di tahun 2023 sebesar 30% dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 40%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan dengan nilai capaian sebesar 21,43%. Penyebab berfluktuasinya capaian tersebut dalam lima tahun terakhir diakibatkan karena bertambahnya jumlah Perda ataupun Perkada yang tidak sebanding dengan peningkatan sosialisasi terhadap Perda dan Perkada tersebut di lingkungan masyarakat. Untuk persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 84 - Persentase PERDA dan PERKADA yang Ditegakkan Tahun 2021-2025



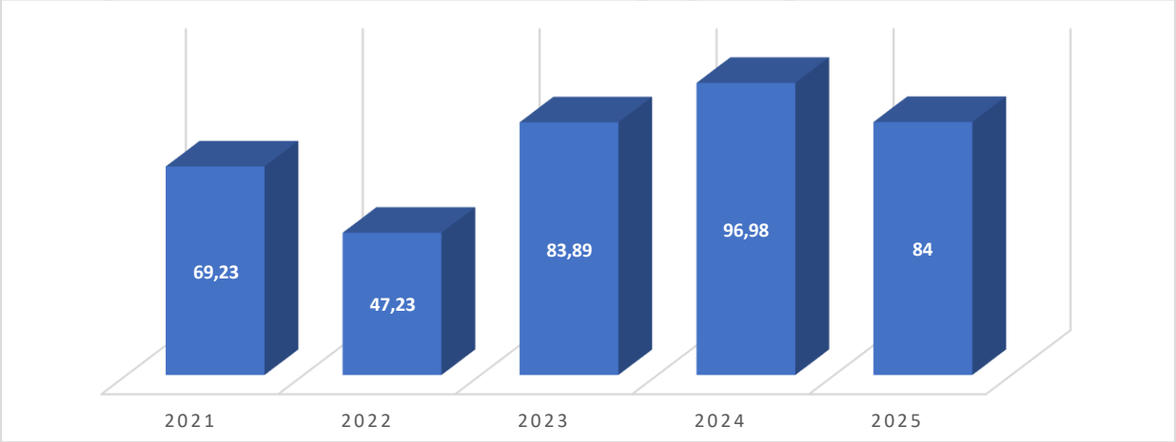
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran, 2026

2.4.2.3. Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani

Persentase tindak criminal yang ditangani merupakan kondisi yang menggambarkan mengenai situasi dan keadaan keamanan terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Soppeng. Capaian persentase tindak kriminal yang ditangani di Kabupaten Soppeng dari tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 persentase tindak kriminal yang ditangani sebesar 69,23% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 47,23% namun pada tahun 2023

mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 83,89%. Di tahun 2024 persentase tindakan kriminal yang ditangani mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 96,98% dan mengalami penurunan di tahun 2025 dengan capaian sebesar 84%. Untuk realisasi capaian tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 85 - Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani Tahun 2021-2025

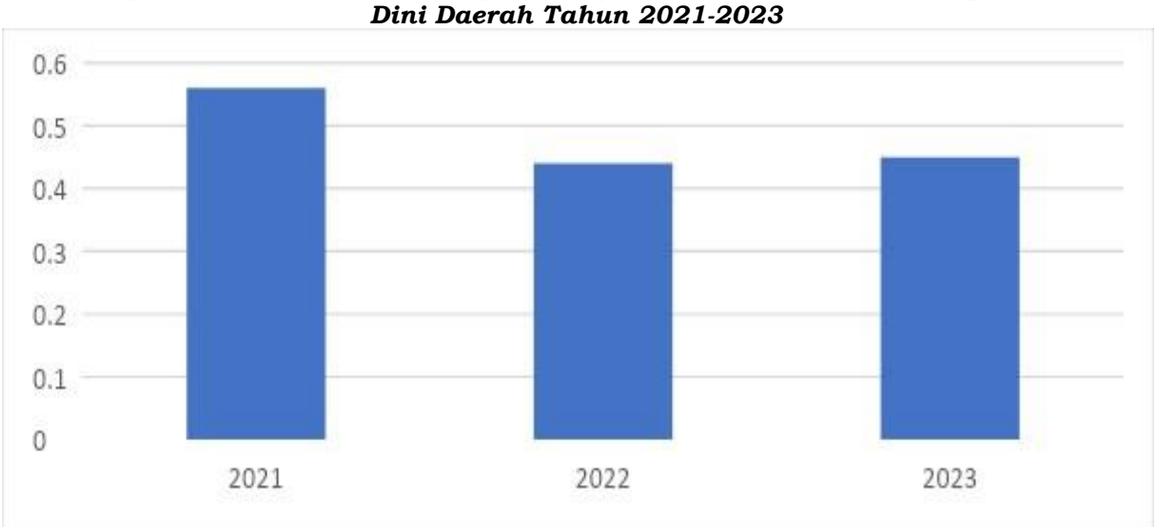


Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran, 2026

2.4.2.4. Persentase Masyarakat yang Paham Terkait Kewaspadaan Dini Daerah

Kewaspadaan dini daerah merupakan serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini yang dipahami oleh masyarakat. Persentase masyarakat yang paham terkait kewaspadaan dini daerah merupakan capaian kinerja pembangunan untuk mengukur pemahaman masyarakat terkait pentingnya kewaspadaan dini daerah. Di Kabupaten Soppeng persentase masyarakat yang paham terkait kewaspadaan dini daerah dalam 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 capaian tersebut sebesar 0,56%, menurun di tahun berikutnya 2022 dengan capaian 0,44% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan capaian sebesar 0,45%. Untuk persentase masyarakat yang paham terkait kewaspadaan dini daerah tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 86 - Persentase Masyarakat yang Paham Terkait Kewaspadaan Dini Daerah Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

2.4.2.5. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD kabupaten).

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD menunjukkan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dari jumlah total kursi di keanggotaan DPRD. Indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif di daerah. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan.

Tabel 2. 57 - Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kursi DPRD yang di duduki perempuan	Posisi	7	7	7	8	6
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Posisi	30	30	30	30	30
	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	23,33	23,33	23,33	26,67	20,00

Sumber: Dinas P3APPKB, 2026

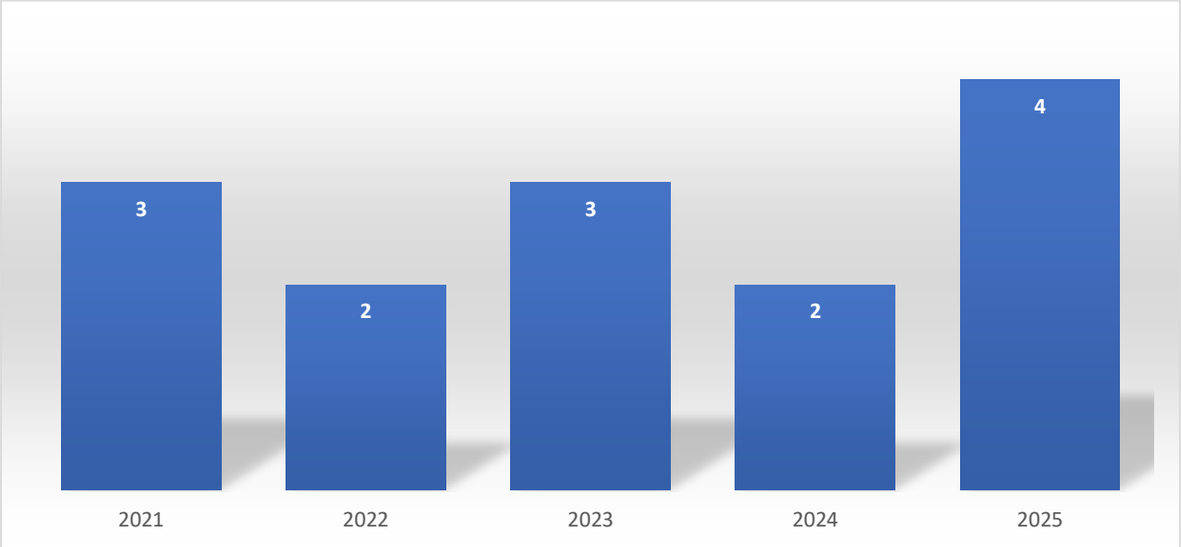
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan pada tahun 2021 sampai tahun 2023 jumlahnya sebanyak 7 kursi atau 23,33% dan mengalami penurunan di tahun 2024 dan 2025 sebesar 20,00%. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat telah mengamanatkan kuota 30%, akan tetapi jumlah perolehan kursi yang diduduki oleh perempuan di DPRD sekarang tetap masih belum mencapai 30%.

Masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD karena kurangnya pemahaman pemilih perempuan untuk memilih perempuan, dan kurangnya minat perempuan untuk terjun ke dunia politik, serta kurangnya kualitas perempuan yang menjadi calon legislatif. Selain memenuhi minimal 30% keterwakilan, peningkatan kualitas anggota legislatif perempuan juga harus didorong agar keterwakilan perempuan di parlemen memberi dampak yang signifikan.

2.4.2.6. Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD

Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD adalah peraturan yang lahir dari usulan langsung anggota DPRD sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi dan penampung aspirasi masyarakat. Usulan ini bisa berasal dari fraksi, komisi, atau panitia khusus yang kemudian diajukan melalui pimpinan DPRD untuk kemudian dibahas bersama kepala daerah hingga disetujui menjadi Perda. Di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir perda inisiatif DPRD rata-rata sebanyak 3 Perda yang ditetapkan. Di tahun 2025 terdapat 4 perda inisiatif DPRD yakni Perda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (fSPBE), Pengembangan Ekonomi Kreatif, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diharapkan melalui Perda inisiatif DPRD ini mampu mewakili aspirasi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 2. 87 - Persentase Masyarakat yang Paham Terkait Kewaspadaan Dini Daerah Tahun 2021-2025



Sumber: Sekretariat Daerah (Bagian Hukum), 2026

2.4.2.7. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

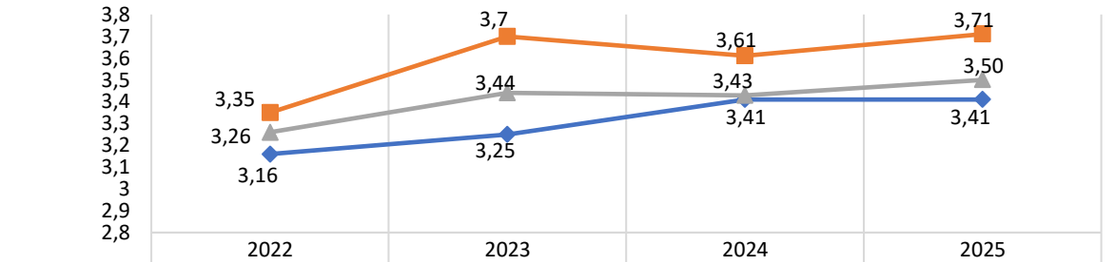
Persentase perempuan pengurus partai politik merupakan indikator tolak ukur keterwakilan perempuan dalam struktur partai politik. Peran perempuan dalam partai politik meliputi peningkatan keterwakilan dan partisipasi aktif untuk mendorong kebijakan yang lebih adil gender, meningkatkan kualitas kebijakan publik, dan membangun kepemimpinan perempuan. Di Kabupaten Soppeng persentase Perempuan pengurus partai politik tahun 2020-2025 mencapai 34,81 %. Akan tetapi masih dibutuhkan dukungan melalui pendidikan politik, kebijakan afirmasi, serta komitmen partai politik untuk memberdayakan kader-kader perempuan.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Di Kabupaten Soppeng tahun 2022 nilai indeks daya saing daerah sebesar 3,16 masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,35 dan Nasional sebesar 3,26. Untuk di tahun 2023 nilai indeks daya saing daerah Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dengan capaian 3,25 dan meningkat di tahun 2024 dengan nilai sebesar 3,41. Di tahun 2025 angka capaian indeks daya saing daerah tersebut tetap berada pada angka 3,41, nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,61 dan Nasional sebesar 3,43. Capaian indeks daya saing daerah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 88 - Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2025



	2022	2023	2024	2025
Soppeng	3,16	3,25	3,41	3,41
Sul-Sel	3,35	3,7	3,61	3,71
Nasional	3,26	3,44	3,43	3,50

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2026

2.4.4. Kinerja setiap Urusan Pemerintah Daerah

2.4.4.1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat. Metode yang dapat dipergunakan antara lain: analisis dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mengasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagaimana ketentuan yang berlaku. Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan. Proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh, serta hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan menggunakan 9 unsur pelayanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit

Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Hasil survei terrhadap Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai angka 88,53 yang termasuk kategori "Sangat Baik" sesuai dengan interval penilaian 88,31-100. Secara umum tingkat kepausan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng berdasarkan hasil sampling responden dapat digambarkan sebagai berikut ini.

Tabel 2. 58 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Soppeng Tahun 2025

No	Nama Instansi/Unit Kerja	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Sekretariat Daerah	88,65	A	Sangat Baik
2	Sekretariat DPRD	96,18	A	Sangat Baik
3	Inspektorat Daerah	90,28	A	Sangat Baik
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	87,96	B	Baik
5	Dinas Kesehatan	83,63	B	Baik
6	UPTD RSUD Latemmamala	87,96	B	Baik
7	UPTD Puskesmas Salotungo	91,87	A	Sangat Baik
8	UPTD Puskesmas Sewo	87,81	B	Baik
9	UPTD Puskesmas Malaka	88,09	B	Baik
10	UPTD Puskesmas Tanjonge	98,36	A	Sangat Baik
11	UPTD Puskesmas Takalala	86,72	B	Baik
12	UPTD Puskesmas Goarie	85,97	B	Baik
13	UPTD Puskesmas Pacongkang	87,03	B	Baik
14	UPTD Puskesmas Cangadi	99,08	A	Sangat Baik
15	UPTD Puskesmas Citta	85,06	B	Baik
16	UPTD Puskesmas Ganra	92,88	A	Sangat Baik
17	UPTD Puskesmas Cabenge	83,16	B	Baik
18	UPTD Puskesmas Baringenge	79,4	B	Baik
19	UPTD Puskesmas Cakkuridi	92,1	A	Sangat Baik
20	UPTD Puskesmas Tajuncu	92,68	A	Sangat Baik
21	UPTD Puskesmas Leworeng	83,8	B	Baik
22	UPTD Puskesmas Panincong	87,17	B	Baik
23	UPTD Puskesmas Batu-Batu	97,03	A	Sangat Baik
24	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	89,18	A	Sangat Baik
25	UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu 119	88,57	A	Sangat Baik
26	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	92,36	A	Sangat Baik
27	Dinas Lingkungan Hidup	88,14	B	Sangat Baik
28	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	88,47	B	Sangat Baik
29	Dinas Perhubungan	85,74	B	Baik
30	Dinas Komunikasi Dan Informatika	86,11	B	Baik
31	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	83,93	B	Baik
32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	87,76	B	Baik
33	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	90,11	A	Sangat Baik
34	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	88,26	B	Baik
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91,7	A	Sangat Baik
36	Dinas Sosial	88,08	B	Baik
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	88,97	A	Sangat Baik
38	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	86,46	B	Baik
39	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89,97	A	Sangat Baik
40	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	94,25	A	Sangat Baik
41	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	87,83	B	Baik

No	Nama Instansi/Unit Kerja	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
42	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	91,2	A	Sangat Baik
43	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	88,03	B	Baik
44	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,16	A	Sangat Baik
45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82,45	B	Baik
46	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	90	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Lalabata	89,85	A	Sangat Baik
48	Kecamatan Marioriwawo	86,97	B	Baik
49	Kecamatan Liliriaja	88,19	B	Baik
50	Kecamatan Citta	87,07	B	Baik
51	Kecamatan Ganra	89,43	A	Sangat Baik
52	Kecamatan Lilirilau	89,22	A	Sangat Baik
53	Kecamatan Donri-Donri	90,05	A	Sangat Baik
54	Kecamatan Marioriawa	81,39	B	Baik
55	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ompo	76,59	C	Kurang Baik
56	Perseroan Daerah Lamataesso	89,08	A	Sangat Baik
	NILAI IKM	**88,53**	**B**	**Baik**

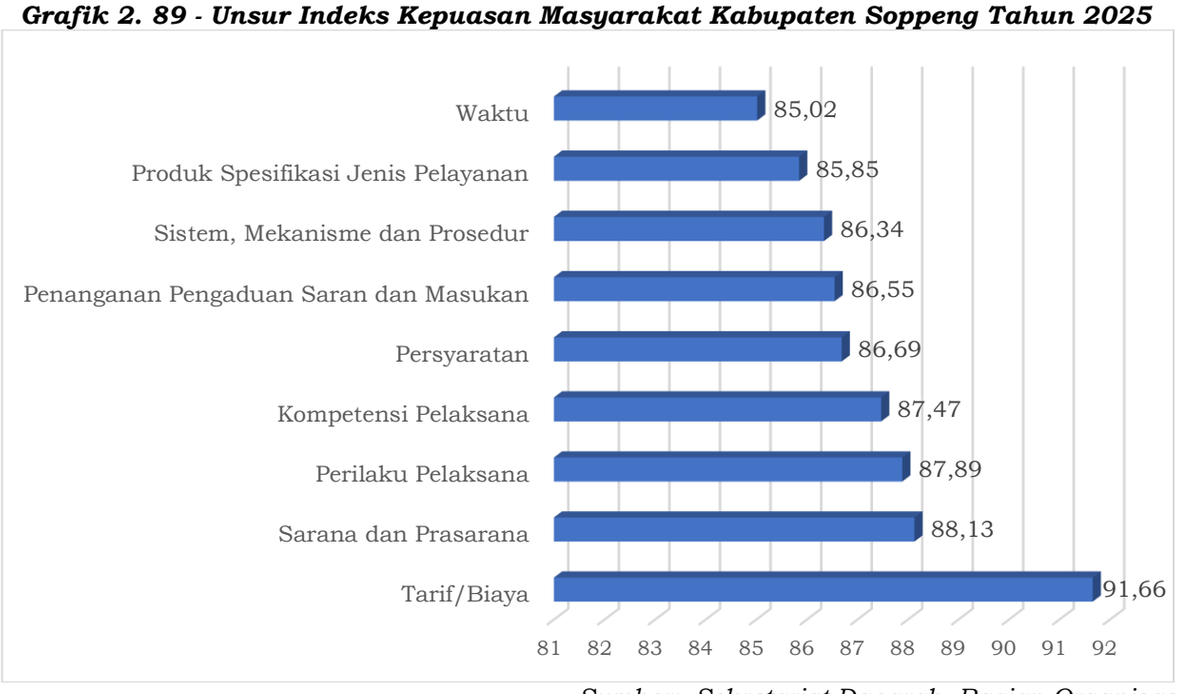
Sumber: Sekretariat Daearah, Bagian Organisasi

Tabel 2. 59 - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Soppeng Berdasar Unsur Tahun 2025

No	Unsur	Nilai Rata-Rata	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
U1	Persyaratan	3,47	86,69	B	Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,45	86,34	B	Baik
U3	Waktu	3,4	85,02	B	Baik
U4	Tarif/Biaya	3,67	91,66	A	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,43	85,85	B	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,5	87,47	B	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3,52	87,89	B	Baik
U8	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	3,46	86,55	B	Baik
U9	Sarana dan Prasarana	3,53	88,13	B	Baik
	Kabupaten Soppeng	**3,49**	**88,53**	**B**	**Baik**

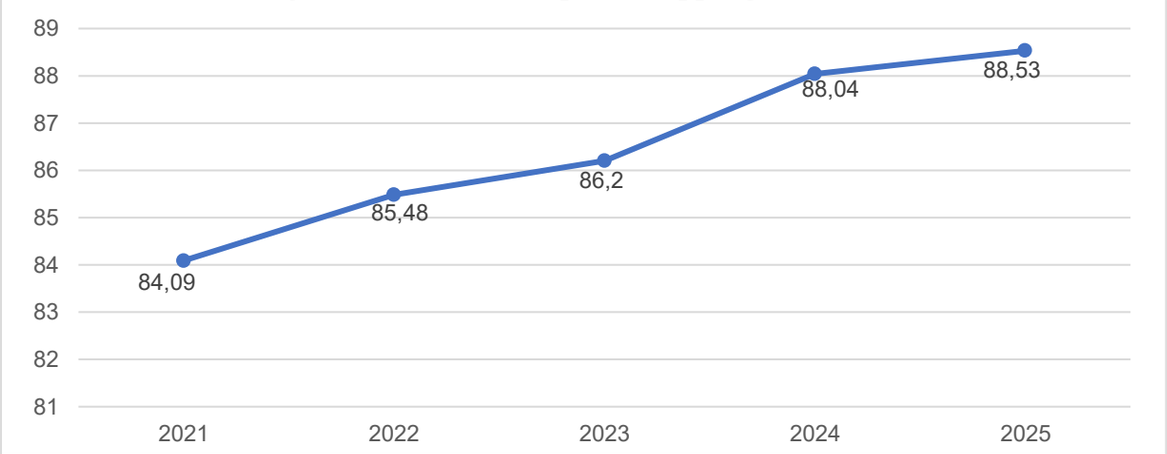
Sumber: Sekretariat Daearah, Bagian Organisasi

Grafik 2. 89 - Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Soppeng Tahun 2025



Sumber: Sekretariat Daearah, Bagian Organisasi

Grafik 2. 90 - IKM Kabupaten Soppeng Tahun 2025



Sumber: Sekretariat Daearah, Bagian Organisasi

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Soppeng menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, nilai IKM berada pada angka 84,09, kemudian meningkat pada 2022 menjadi 85,48 dan kembali naik pada 2023 (86,20). Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 88,04, dan terus berlanjut hingga tahun 2025 mencapai 88,53.

Pengolahan data hasil survei menunjukkan bahwa di antara sembilan unsur pelayanan publik yang dinilai seperti unsur persyaratan, unsur sistem, mekanisme dan prosedur, unsur waktu penyelesaian, unsur biaya/tarif, unsur produk spesifikasi jenis pelayanan, unsur kompetensi pelaksana, unsur perilaku pelaksana, unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan, unsur sarana dan prasarana.

Berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”, direkomendasikan untuk mempertahankan kinerjanya. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja unit pelayanan “baik” diharapkan untuk melakukan perbaikan terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih rendah, agar nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dapat menjadi sangat baik.

2.4.4.2. Urusan Pendidikan

2.4.4.2.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak untuk kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA). Untuk TK disebut sebagai PAUD Formal sedangkan di luar TK disebut sebagai PAUD Non Formal.

Tabel 2. 60 - Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHU				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan	Siswa	5.997	6.193	6.192	6.077	6.100
2	Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun	Anak	9.121	9.098	9.143	9.229	9.279
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	65,75	68,07	67,72	65,85	65,74

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 persentase pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar 65,75% meningkat di tahun 2022 sebesar

68,07%. Di tahun 2023 sampai tahun 2025 terjadi penurunan capaian, kondisi di tahun terkahir yakni 2025 menunjukkan capaian sebesar 65,74%.

Peningkatan realisasi pada tahun 2022 antara lain disebabkan oleh meningkatkan peran guru PAUD dan penilik PAUD dalam menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya PAUD, sehingga penduduk yang berusia 4-6 tahun dapat berpartisipasi pada PAUD. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 67,72 hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya pada jenjang PAUD sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Kondisi di tahun 2025 juga menunjukkan adanya penurunan sehingga perlu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan bagi anak usia dini.

2.4.4.2.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Tabel 2. 61 - Angka Partisipasi Kasar SD/MI paket A Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah semua siswa n dijenjang SD/MI/Paket A	Siswa	20.736	20.250	19.760	19.378	18.875
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	Jiwa	20.866	20.714	20.068	19.609	19.193
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	99,38	97,76	98,47	98,82	98,34

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Soppeng adalah 99,38% semnagalami penurunan dengan capaian 97,76% pada tahun 2022. Di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 98,47% dan meningkat di tahun 2024 dengan capaian 98,82%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan penurunan capaian dengan angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A sebesar 98,34%.

Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan SMP/Mts/Paket B pada tahun 2021 adalah 101,08% dan mengalami penurunan hingga tahun 2024 dengan capaian sebesar 98,99%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan angka partisipasi kasar SMP/MTS/Paket B dengan capaian yang tercata sebesar 99,43%.

Tabel 2. 62 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah semua siswa dijenjang SMP/MTS/Paket B	Siswa	11.370	11.141	10.985	10.630	10.625
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	Jiwa	11.248	11.206	11.092	10.739	10.686
	Angka Partisipasi Kasar (APk) SMP/MTS/Paket B	%	101,08	99,42	99,04	98,99	99,43

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

2.4.4.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di

jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7-12 tahun untuk SD/MI dan 13-15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

Berikut tabel yang menunjukkan angka partisipasi murni di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025.

Tabel 2. 63 - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A	Siswa	18.788	18.871	18.442	18.050	17.624
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	Jiwa	20.866	20.714	20.068	19.609	19.193
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90,04	91,10	91,90	92,05	91,83

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu mengalami peningkatan hingga tahun 2024 dan mengalami penurunan di tahun 2025. Pada tahun 2021 angka partisipasi murni SD/MI/Paket A sebesar 90,04% mengalami kenaikan hingga tahun 2024 dengan capaian sebesar 92,05%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adadnya penurunan dengan capaian 91,83%.

Tabel 2. 64 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	Siswa	7.319	9.116	9.052	8.637	8.887
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15	Jiwa	11.248	11.206	11.092	10.739	10.686
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	65,07	81,35	81,61	80,43	83,16

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B pada tahun 2021 angka cpartisipasi murni SMP/MTs/Paket B sebesar 65,07% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dengan capaian 81,61%. Di tahun 2024 capaian tersebut mengalami penurunan dengan angka sebesar 80,43% dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 83,16%. Belum tercapainya target APM 100%, baik pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A maupun pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B antara lain disebabkan oleh masih adanya peserta didik yang putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS), selain itu masih adanya penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar Kabupaten Soppeng.

2.4.4.2.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang Pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS merupakan indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan memperoleh layanan pendidikan. Sebaliknya, semakin rendah APS menunjukkan semakin besar penduduk yang tidak mampu merasakan layanan pendidikan.

Tabel 2. 65 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah murid usia 7-12 thn	Murid	22.372	19.934	19.440	19.108	18.547
2	Jumlah penduduk usia 7-12 thn	Jiwa	20.866	20.714	20.068	19.609	19.193
	Angka partisipasi Sekolah (APS)	%	107,22	96,23	98,87	97,45	96,63

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SD/MI/Paket A						

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 capaian angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A sebesar 107,22% dan mengalami penurunan di tahun 2022 dengan capaian 96,23%. Di tahun 2023 capaian tersebut mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 98,87% sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan capaian 97,45%. Capaian APS SD/MI/Paket A kembali menurun pada tahun 2025 dengan capaian 96,63%.

Tingginya APS menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan dasar dan partisipasi penduduk usia sekolah semakin baik.

Tabel 2. 66 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah murid usia 13-15 thn	Murid	9.266	10.542	10.681	10.251	10.720
2	Jumlah penduduk usia 13-15 thn	Jiwa	11.248	11.206	11.092	10.739	10.686
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	82,38	94,07	96,29	95,46	100,32

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B, menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 APS SMP/MTs Paket B sebesar 82,38% dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan capaian 96,29%. Pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian APS SMP/MTs/Paket B dengan capaian sebesar 95,46% dan meningkat di tahun 2025 dengan angka capaian sebesar 100,32%. Capaian di tahun 2025 tersebut terjadi dikarenakan adanya murid di luar daerah yang bersekolah di Kabupaten Soppeng, sehingga APS SMP/MTs/Paket B melebihi 100%.

2.4.4.2.5. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun. Angka putus sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan seluruh jumlah murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungan angka putus sekolah digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angka putus sekolah maka semakin banyak siswa yang tinggal kelas. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI dan Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 2. 67 - Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Capaian Kinerja APtS SD/MI	Jiwa	20.736	20.250	19.760	19.378	18.875
2	Jumlah Seluruh APtS SD/MI	Jiwa	13	7	10	6	32
	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	%	0,063	0,035	0,05	0,03	0,17

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Pada tahun 2021 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Soppeng pada jenjang Pendidikan SD/MI (usia 7-12 tahun) tercatat sebesar 0,063%. Di tahun 2022 capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,035% dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan capaian tercatat 0,05%. Pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan capaian 0,03% akan tetapi kembali mengalami peningkatan di tahun 2025 dengan APtS pada tingkat SD/MI sebesar 0,17% dari target 0 %.

Tabel 2. 68 - Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs	Jiwa	11.370	11.141	10.985	10.630	10.625
2	Jumlah Seluruh APS SMP/MTs	Jiwa	12	27	13	34	71
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,11	0,24	0,12	0,32	0,67

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Data menunjukkan bahwa APtS SMP/MTS pada jenjang usia 13-15 pada tahun 2021 mencapai 0,11% mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan capaian 0,24%. Di tahun 2023 APtS pada jenjang SMP/MTs menurun dengan capaian 0,12% dan meningkat pada tahun 2024 sebesar 0,32%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan angka putus sekolah di tingkat SMP/MI sebesar 0,67%. Capaian tersebut menunjukkan pencapaian kinerja yang belum memenuhi atau mencapai target 0% yang telah ditetapkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga dan kesulitan akses ke sekolah. Solusi ke depan diupayakan bagi peserta didik yang rawan putus sekolah akibat faktor ekonomi diberikan biaya personil sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Selain itu melalui program Sekolah Garuda ataupun Sekolah Rakyat angka putus sekolah ini dapat ditekan nantinya.

2.4.4.2.6. Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan.

Tabel 2. 69 - Angka Kelulusan (AL) SD/MI Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Siswa	3.533	3.583	3.574	3.431	3.470
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Siswa	3.539	3.586	3.579	3.435	3.480
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,83	99,92	99,86	99,88	99,71

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Berdasarkan data, angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 2021-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,83%, meningkat di tahun 2022 dengan capaian 99,92%, dan mengalami penurunan sebesar 99,86% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Soppeng meningkat 0,02% denagn persentase capaian 99,88% sedangkan pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian dengan nilai sebesar 99,71%.

Penyebab utama belum tercapainya angka kelulusan 100% dikarenakan tidak semua siswa yang terdaftar pada tingkat tertinggi jenjang SD mengikuti ujian akhir antara lain disebabkan sakit pada saat ujian dan tidak dapat lagi mengikuti ujian susulan.

Tabel 2. 70 - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Siswa	3.408	3.493	3.355	3.351	3.289
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	Siswa	3.411	3.518	33.71	3.377	3.320
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,91	99,29	99,53	99,23	99,07

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Angka kelulusan untuk jenjang SMP/MTs di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 dengan capaian 99,91% sedangkan pada tahun 2022 mengalami

penurunan dengan capaian 99,29%. Di tahun 2023 angka kelulusan SMP/MTs mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 99,53% dan mengalami penurunan di tahun 2024 dengan capaian 99,23%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan capaian kembali dengan persentase sebesar 99,07%.

Kecenderungan penurunan pada tingkatan SMP/MTs mengindikasikan kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng yang menurun. Faktor dari guru, murid, orang tua, dan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan berperan dalam menurunkan angka kelulusan. Angka kelulusan jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs tingkat kelulusannya harus diupayakan agar mencapai 100% pada tahun berikutnya.

2.4.4.2.7. Angka Melanjutkan (AM)

Angka melanjutkan (AM) sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2. 71 - Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Siswa	3.618	3.534	3.590	3.421	3.456
2	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3.533	3.583	3.574	3.431	3.470
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	102,41	98,63	100,45	99,71	99,60

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Pada tahun 2021 Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI/ ke SMP/MTs adalah 102,41% dan menurun menjadi 98,63% pada tahun 2022 dan tahun 2023 meningkat dengan capaian 100,45%. Di tahun 2023 capaian tersebut mengalami penurunan dengan capaian 99,71% dan di tahun 2025 capaian tersebut kembali menurun dengan persentase capaian sebesar 99,60%. Capaian 100% pada tahun 2021 maupun 2023 terjadi karena adanya siswa jenjang pendidikan SD yang bersekolah di luar Kabupaten Soppeng, tapi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di dalam Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 72 - Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	3.268	3.340	3.349	3.181	3.168
2	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3.424	3.493	3.355	3.351	3.289
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	95,44	95,62	99.82	94,93	96,32

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI/ ke SMP/MTs pada tahun 2021 adalah 95,44% dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 95,62%. Pada tahun 2023 capaian tersebut meningkat dengan nilai 99,82%. Di tahun 2024 angka melanjutkan dari tingkat SMP/MTs ke Tingkat SMA/SMK/MA mengalami penurunan dengan nilai 94,93% dan meningkat di tahun 2025 dengan capaian 96,32%. Capaian realisasi dalam lima tahun terakhir tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya siswa jenjang SMP yang bersekolah di Kabupaten Soppeng namun melanjutkan jenjang SMA di luar Kabupaten Soppeng.

2.4.4.2.8. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) adalah angka menunjukkan jumlah capaian kinerja penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dari total jumlah penduduk usia di atas 15 tahun, di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 73 - Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Jiwa	167.559	174.042	185.064	193.394	194.565
2	Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf	Jiwa	190.780	189.197	195.835	193.394	194.565
	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	%	87,83	91,99	94,50	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Dari tabel di atas terlihat bahwa angka melek huruf di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Di tahun 2021 persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf sebesar 87,83% dan di tahun 2025 meningkat menjadi 100%.

2.4.4.2.9. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Fasilitas pendidikan SD kondisi bangunan baik pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2021 sekolah tingkat SD/MI dengan kondisi bangunan baik sebesar 77,20% meningkat di tahun 2022 dengan capaian 78,10%. Di tahun 2023 SD/MI dengan kondisi bangunan baik mengalami penurunan dengan capaian sebesar 75,77% dan berlanjut di tahun 2024 dengan persentase 70,59%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan persentase SD/MI dengan kondisi bangunan baik dengan capaian 71,86%. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah masih ada bangunan sekolah yang sudah tua dan belum dilakukan rehabilitasi karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya, diupayakan fasilitas pendidikan jenjang SD yang mengalami kerusakan minimal sedang untuk dilakukan rehabilitasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik (kelas) pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2. 74 - Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (Kelas)	Unit	1.287	1.302	1.320	1.212	1.264
2	Jumlah seluruh sekolah SD/MI (Kelas)	Unit	1.667	1.667	1.742	1.717	1.759
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas)	%	77,20	78,10	75,77	70,59	71,86

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Untuk kondisi bangunan baik (kelas) sekolah pendidikan SMP/MTs pada tahun 2021 sejumlah 400 unit atau sebesar 80,81% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dengan jumlah 482 unit atau mencapai 81,28% sedangkan jumlah bangunan yang rusak berat maupun rusak ringan mencapai 111 unit. Di tahun 2024 persentase kondisi bangunan baik di Tingkat SMP/MTs mengalami penurunan dengan capaian sebesar 77,08% dan meningkat di tahun 2025 sebesar 79,81%. Untuk kondisi bangunan baik (kelas) sekolah pendidikan SMP/MTs pada tahun 2021-2025 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2. 75 - Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas) Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (Kelas)	Unit	400	401	482	750	743
2	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs (Kelas)	Unit	495	495	593	973	931
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas)	%	80,81	81,01	81,28	77,08	79,81

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

2.4.4.2.10. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

Tabel 2. 76 - Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs)	Unit	345	350	345	344	345
2	Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn	Jiwa	32.114	31.920	31.160	30.348	29.879
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Poin	107,43	109,65	110,72	113,35	115,47

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Berdasarkan data di atas menggambarkan pada tahun 2021 rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) adalah 107,43 poin, dan mengalami peningkatan hingga tahun 2025 sebesar 115,47 poin. Jumlah sekolah sudah cukup banyak untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun. Capaian target akan dipertahankan dengan mengupayakan sekolah-sekolah yang sudah ada tetap berjalan sesuai ketentuan yang ada.

2.4.4.2.11. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Soppeng, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio guru/murid sekolah Pendidikan dasar pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebesar 0,12 poin.

Tabel 2. 77 - Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)	Guru	3.794	3.804	3.819	3.587	3.472
2	Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)	Murid	31.401	30.690	30.143	29.483	28.903
	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Poin	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

2.4.4.2.12. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1-/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik.

Tabel 2. 78 - Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV	Guru	3.599	3.686	3.668	3.802	3.760
2	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Guru	3.811	3.804	3.819	4.104	4.004
	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	94,44	96,90	96,05	92,64	93,91

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Pada tahun 2021 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah 94,44% dan pada tahun 2023 menjadi 96,05%. Kondisi di tahun 2025 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 93,91%. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV belum mencapai target 100% hal tersebut dikarenakan ada beberapa guru yang sudah S1 namun tidak linear dengan pendidikan guru sehingga masih dianggap belum sarjana S1. Selain itu ada beberapa guru yang belum sarjana namun sudah tidak berminat mengikuti pendidikan S1/D-IV karena sudah mendekati usia pensiun.

2.4.4.3. Urusan Kesehatan

2.4.4.3.1. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi anak tidak menerima mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Pemenuhan gizi yang belum tercukupi baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir dapat menjadi pemicu gizi buruk.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, persentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2021 sebesar 0,024% dari jumlah total balita sebanyak 12.759 jiwa, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 0,034% atau sebanyak 4 kasus dari total balita sebanyak 11.887 jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 10 kasus dengan capaian 0,091% kemudian pada tahun 2024 jumlah balita gizi buruk sebanyak 9 balita atau sebesar 0,078%. Kondisi di tahun 2025 capaian tersebut meningkat menjadi 0,096% dengan jumlah balita gizi buruk sebanyak 10 balita.

Jumlah balita gizi buruk mengalami kenaikan karena adanya penyakit penyerta yang diderita. Semua balita kasus gizi buruk yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan peningkatan. Pelayanan perawatan gizi buruk yang diberikan yakni pemantauan status gizi balita, pemberian makanan tambahan (PMT), dan pemberian edukasi berupa konseling dan penyuluhan kepada orang tua balita.

Tabel 2. 79 - Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah balita gizi buruk	Balita	3	4	10	9	10
2	Jumlah balita	Balita	12.759	11.887	11.027	11.533	10.401
	% Balita Gizi Buruk	%	0,024	0,034	0,091	0,078	0,096

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.2. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan yang diakibatkan kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas berpikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan yang terjadi pada anak usia kurang dari lima tahun. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada tahun 2021 prevalensi balita gizi kurang tercatat sebesar 3,46%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dengan capaian 3,28% sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 4,67%. Pada tahun 2023 prevalensi balita gizi kurang kembali meningkat menjadi 4,75% dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 5,41%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan persentase sebesar 5,51% atau terdapat 574 balita gizi kurang dari 10.401 balita.

Jumlah balita yang gizi kurang didapatkan berdasarkan data yang

digunakan dalam aplikasi e-PPGBM dengan standar Kemenkes, sehingga jumlah balita gizi kurang mengalami peningkatan. Prevalensi balita gizi kurang perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas balita secara lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga secara lebih baik pula.

Tabel 2. 80 - Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Banyaknya balita gizi kurang	Balita	441	555	524	624	574
2	Jumlah balita	Balita	12.759	11.887	11.027	11.533	10.401
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	3,46	4,67	4,75	5,41	5,51

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.3. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Secara umum, tujuan pengembangan desa siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan di wilayahnya. Cakupan desa siaga aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.

Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sampai 2025 mencapai 100%. Keberadaan desa siaga aktif sangat berperan dalam menjaga kualitas masyarakat dikarenakan seluruh penduduk dapat mengakses pelayanan dasar setiap hari. Meskipun cakupan desa siaga aktif sudah mencakup seluruh desa, evaluasi terhadap kualitas pelayanan di masing-masing desa tetap perlu dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada desa yang memerlukan dukungan lebih lanjut dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 2. 81 - Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Desa Siaga Aktif	Desa	70	70	70	70	70
2	Jumlah Desa Siaga yang dibentuk	Desa	70	70	70	70	70
	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.4. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, AKB per 1000 kelahiran di Kabupaten Soppeng dari tahun 2021 hingga tahun 2025 menunjukkan capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2021 angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Soppeng mencapai 11,83% dan tahun 2022 sebesar 20,75%. Di tahun 2023 angka tersebut mengalami penurunan dengan cpaian 5,43% dan tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 14,8%. kondisi pada tahun 2025 menunjukkan adamnya peningkatan dengan capaian 18,1%. Kasus kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Soppeng akibat kelainan bawaan sejak lahir, gangguan pernapasan, atau mengalami penyakit berat yang sudah komplikasi, sehingga upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir menjadi sangat strategis. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel ini.

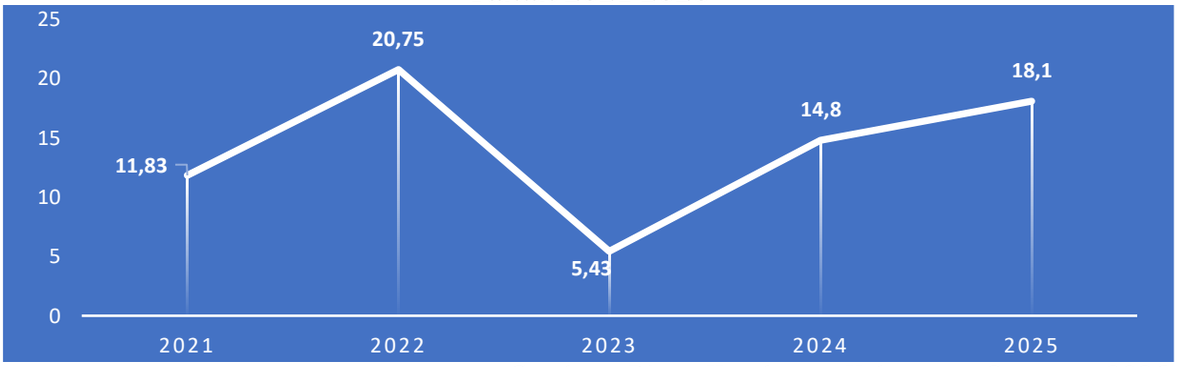
Tabel 2. 82 - Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	Bayi	33	56	14	34	40
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	2.790	2.699	2.576	2.294	2.209
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	%	11,83	20,75	5,43	14,8	18,1

sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

Berikut grafik Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir.

Grafik 2. 91 – Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

Angka ini kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai baik-buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu wilayah. Bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan dalam penurunan AKB menunjukkan derajat kesehatan di Kabupaten Soppeng dan merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

2.4.4.3.5. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025, pada tabel berikut.

Tabel 2. 83 - Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	Jiwa	33	56	14	34	40
2	Jumlah Kelahiran Hidup Bayi	Jiwa	2.757	2.643	2.576	2.294	2.209
3	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2.790	2.699	2.576	2.294	2.209
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	%	98,82	97,93	99,46	98,52	98,19

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

Dari tabel di atas tergambar, bahwa angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Soppeng cukup tinggi, pada tahun 2021 mencapai angka 98,82% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 97,93% atau dari 2.643 bayi yang lahir hidup hanya 56 bayi diantaranya yang meninggal berumur kurang dari 1 tahun sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan mencatat capaian sebesar 99,46% dengan jumlah kelahiran hidup bayi sebanyak 2.576 jiwa. Pada tahun 2024 angka kelangsungan hidup bayi mencapai 98,52% dan di tahun 2025 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 98,19%.

2.4.4.3.6. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita merupakan upaya penekanan jumlah kematian terhadap anak dibawah lima tahun. Realisasi yang diperoleh dari data kasus kematian balita yang berumur dibawah lima tahun. Pada tahun 2021 sampai tahun 2025 angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2021 angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Soppeng sebesar 0,36% sedangkan tahun 2022 sebesar 23,71%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan capaian 0,78% dengan jumlah kematian sebanyak 2 jiwa. Pada tahun 2024 angka tersebut kembali mengalami peningkatan dengan capaian 3,05%, dan di tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 0,90%. Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 84 - Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun)	Jiwa	1	64	2	7	2
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2.790	2.699	2.576	2.294	2.209
	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	%	0,36	23,71	0,78	3,05	0,90

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.7. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neonatal menunjukkan jumlah kematian neonatal yang terjadi pada bayi baru lahir yang berumur 0 sampai 28 hari per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Neonatus pada tahun 2021 hingga tahun 2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2025 jumlah kematian neonatal (berumur kurang 1 bulan) sebanyak 31 jiwa, sehingga angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup sebesar 14,03%.

Rata-rata neonatus yang meninggal mengalami kelainan kongenital dan komplikasi dengan penyakit lain. Berat bayi yang terlahir rendah dengan kongenital, sekitar 20% bayi akan meninggal pada minggu pertama dalam masa kehidupannya. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

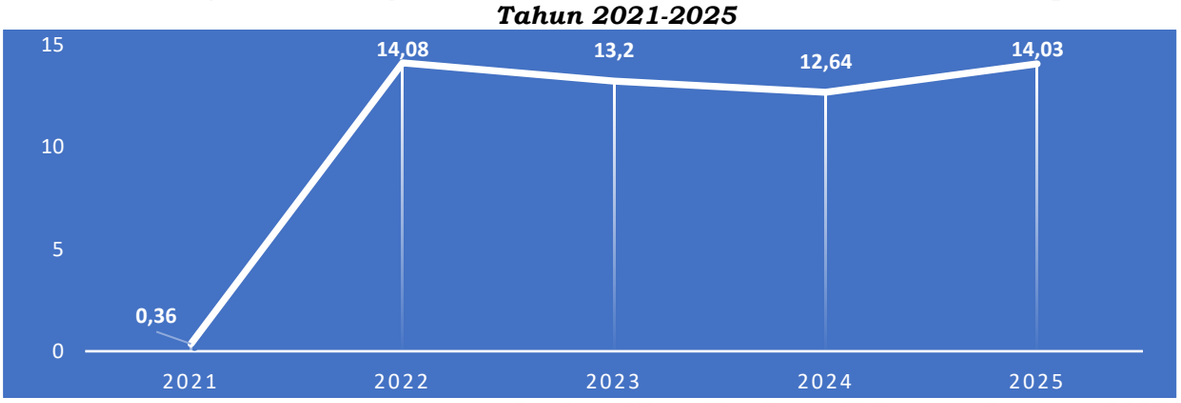
Tabel 2. 85 - Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kematian Neonatal (berumur kurang 1 bulan)	Jiwa	1	38	34	29	31
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	2790	2699	2576	2.294	2.209
	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	0,36	14,08	13,2	12,64	14,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

Sementara grafik angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025 sebagai berikut.

Grafik 2. 92 - Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.8. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Berdasarkan data pada tahun 2021 rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Soppeng 25,34 yang artinya setiap 1.000 balita dilayani 25 posyandu dan tahun 2022 mencapai 30,60 persatuan balita. Pada tahun 2023 dan 2024 rasio posyandu per satuan balita mengalami penurunan dengan capaian sebesar 28,33 dan 28,15 persatuan balita. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan capaian sebesar 32,3 per satuan balita.

Tabel 2. 86 - Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah posyandu	Unit	328	328	332	332	336
2	Jumlah balita	Jiwa	12.945	10.719	11.717	11.794	10.401
	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Per Satuan Balita	25,34	30,6	28,33	28,15	32,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.9. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu merupakan sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 1.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Sampai tahun 2022, puskesmas di Kabupaten Soppeng berjumlah 17 buah, poliklinik 3 buah dan Puskesmas Pembantu 43 buah. Rasio puskesmas, klinik, dan Pustu per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 dan tahun 2022 mencapai 0,26 poin. Pada tahun 2023 jumlah fasilitasi kesehatan berkurang dan jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan rasio per satuan penduduk menjadi 0,25 poin dan tahun 2024 dan 2025 kembali mengalami peningkatan dengan rasio sebesar 0,26. Capaian rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 87 - Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah puskesmas, poliklinik,	Unit	63	63	61	63	63
2	Jumlah penduduk	Jiwa	237.875	238.612	240.955	241.333	241.777
	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Per Satuan Penduduk	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.10. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah tertentu.

Data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mencapai 0,0042 persatuan penduduk sedangkan untuk tahun 2024 dan 2025 rasio tersebut mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di tahun 2024 sebanyak 241.333 jiwa dan tahun 2025 sebanyak 241.777 jiwa. Berdasarkan capaian rasio tersebut rumah sakit di Kabupaten Soppeng perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah penduduk. Sampai saat ini Rumah Sakit yang tersedia di Kabupaten Soppeng hanya 1 yaitu RSUD La Temmamala sehingga untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat belum maksimal. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 88 - Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah sakit	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah penduduk	Jiwa	237.875	238.612	240.955	241.333	241.777
	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,0042	0,0042	0,0042	0,0041	0,0041

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.11. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dokter umum dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Soppeng, baik berstatus PNS maupun bukan. Berdasarkan data rasio dokter per satuan penduduk tahun 2021 dimana dokter yang tercatat adalah 107 orang atau dengan rasio 0,45 poin dengan jumlah penduduk mencapai 237.875 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah dokter yang tercatat mengalami penurunan dengan capaian 103 dokter dengan jumlah penduduk 238.612 jiwa atau mencapai rasio sebesar 0,43 poin. Pada tahun 2023 rasio dokter per satuan penduduk mengalami peningkatan mencapai 0,49 poin dengan jumlah dokter sebanyak 120 orang dan jumlah penduduk sebesar 240.955 jiwa dan menurun di tahun 2024 sebesar 0,42 poin atau jumlah dokter sebanyak 102 orang dari 241.333 jumlah penduduk yang ada. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan nilai rasio dokter per satuan penduduk sebesar 0,43 poin dan jumlah dokter sebesar 104 orang. Peningkatan jumlah dokter perlu terus diupayakan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pemerintah Kabupaten Soppeng harus memastikan kestabilan rasio dokter dan meningkatkan penyebaran tenaga medis agar kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2. 89 - Rasio Dokter per satuan Penduduk Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah dokter	Orang	107	103	120	102	104
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	237.875	238.612	240.955	241.333	241.777
	Rasio Dokter per Satuan	Per Satuan Penduduk	0,45	0,43	0,49	0,42	0,43

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.12. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis yang dimaksud merupakan tenaga yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Pada tahun 2021 jumlah tenaga medis sebanyak 973 orang dengan jumlah penduduk 237.875 jiwa, atau rasio 4,09 orang tenaga medis terhadap 337.875 jiwa. Hal ini mengalami peningkatan

hingga di tahun 2022 dengan jumlah tenaga medis sebanyak 1.447 orang dengan jumlah penduduk 238.612 jiwa, atau rasio 6,06 orang tenaga medis terhadap 238.612 jiwa. Sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan dengan jumlah tenaga medis tercatat sebanyak 1.449 orang dengan jumlah penduduk 240.955 atau 6,01 poin dan tahun 2024 mencapai 5,36 poin. Di tahun 2025 jumlah tenaga medis sebanyak 1.409 Orang dengan rasio 5,83 poin dengan jumlah penduduk sebanyak 241.777 jiwa.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi selama periode 2021-2025, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2022 dan sedikit penurunan pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan rasio pada 2024 terjadi peningkatan kembali di tahun 2025 sehingga akses kesehatan masyarakat di Kabupaten Soppeng masih cukup baik jika dibandingkan dengan 2021. Pemerintah daerah harus terus memperhatikan kebutuhan tenaga medis seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk untuk memastikan kualitas layanan kesehatan tetap optimal. Selain tenaga medis berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga berusaha mengatasi kekurangan tenaga medis dengan merekrut tenaga medis berstatus tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBD Kabupaten.

Tabel 2. 90 - Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah tenaga medis	Orang	973	1.447	1.449	1.293	1.409
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	237.875	238.612	240.955	241.333	241.777
	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	4,09	6,06	6,01	5,36	5,83

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.13. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya pemberian imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Imunisasi dasar pada bayi dilakukan pada saat bayi masih berusia kurang dari 12 bulan, dengan pemberian imunisasi meliputi BCG, DPT, Polio, hepatitis dan campak. Persentase Desa/Kelurahan mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi diperoleh dari perhitungan jumlah desa/kelurahan yang mencapai 90% pada bayi dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan.

Tabel 2. 91 - Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	Desa/ Kelurahan	55	63	68	0	0
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	Desa/ Kelurahan	70	70	70	70	70
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	78,57	90	97,14	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) pada tahun 2021 mencapai 78,57% hal disebabkan oleh karena dihentikannya pelayanan imunisasi bayi selama beberapa bulan karena Pandemi Covid-19. Pelayanan imunisasi dilaksanakan kembali pada masa new normal, tapi kecenderungan orang tua belum membawa bayi untuk mendapatkan imunisasi karena masih takut tertular Covid-19. Di tahun 2022 mengalami peningkatan dengan capaian 90%. Pada tahun 2023 Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) mencapai 97,14%. Kondisi di tahun 2024 dan 2025 cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Soppeng sebesar 0%, hal tersebut terjadi karena sasaran pusdatin sangat tinggi sehingga tidak ada satupun desa/kelurahan yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 100%.

2.4.4.3.14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita Gizi Buruk merupakan faktor anak terlahir dengan BBLR dan adanya penyakit yang menyertai sejak lahir (kelainan bawaan). Hal ini dapat dicapai karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini pada petugas kesehatan atau sarana kesehatan yang tersedia sehingga anak dapat terlahir dengan sehat dan atau mencegah terjadinya kelahiran dengan BBLR yang menjadi faktor utama terjadinya gizi buruk. Pemantauan balita gizi buruk dilakukan dengan kunjungan rumah serta melakukan pemantauan status gizi dan konseling. Untuk Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan tahun 2021 sebanyak 3 balita atau mencapai 100% sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 4 balita dengan capaian 100%, hingga tahun 2023 mengalami peningkatan hingga 10 balita dengan capaian 100%. Di tahun 2024 Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan yang ditemukan mengalami peningkatan sebanyak 276 balita. Kondisi di tahun 2025 cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan sebesar 100% akan tetapi jumlah balita yang ditemukan mengalami penurunan yakni sebesar 10 balita. Adapun perawatan kasus balita gizi buruk di puskesmas dilakukan sesuai tatalaksana gizi buruk dengan pemberian Formula 100. Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 92 - Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	Balita	3	4	10	276	10
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Balita	3	4	10	276	10
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.15. Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Kapita/Hari)

Kalori adalah potensi pembangunan wilayah satuan unit kandungan panas atau energi. Akan tetapi, lebih tepatnya kalori adalah jumlah energi yang anda dapatkan dari makanan dan minuman, atau energi yang kita bakar melalui aktivitas sehari-hari. Sederhananya, kalori adalah energi yang dibutuhkan tubuh agar bisa beraktivitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Standar proporsi kalori yang ditetapkan di Indonesia sebesar 2.100 Kkal/Kapita/hari. Namun di Kabupaten Soppeng masyarakat dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum sebesar 1,32% di tahun 2021 dan di tahun 2022 dengan capaian 1,49%. Pada tahun 2023 capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,54%. Pada tahun 2024 capaian tersebut menjadi 1,58%, selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2025 sebesar 1,55% dengan banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari) jumlah balita sebanyak 174 jiwa dari jumlah balita 11.197 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Soppeng telah memperoleh asupan kalori sesuai standar yang ditetapkan, meskipun masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang menerima asupan kalori di bawah standar. Oleh karena itu, kondisi ini tetap memerlukan perhatian pemerintah melalui penguatan upaya pemantauan dan intervensi oleh tenaga kesehatan

Tabel 2. 93 - Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100	Jiwa	166	160	187	182	174

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
	Kkal/kapita/hari)						
2	Jumlah balita	Jiwa	12.567	10.719	12.085	11.533	11.197
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	1,32	1,49	1,54	1,58	1,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.16. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Penyakit Campak adalah suatu infeksi virus yang sangat menular, yang ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis (peradangan selaput ikat mata/konjungtiva) dan ruam kulit. Penyakit ini disebabkan karena infeksi virus campak golongan Paramyxovirus. Sehingga salah satu cara untuk mencegah penyakit campak adalah dengan memberikan imunisasi campak. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2021 mencapai 80,93% dan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 112,73% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan capaian 100% capaian. Di tahun 2024 terjadi penurunan persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak dengan capaian sebesar 63,06%. Kondisi di tahun 2025 juga menunjukkan adanya penurunan dengan persentase capaian sebesar 61,76%. Penurunan pada 2025 harus menjadi perhatian, sehingga diperlukan upaya lebih besar dilakukan untuk memastikan bahwa imunisasi campak terus meningkat dan tercapai dengan baik. Salah satu penyebab menurunnya capaian tersebut dikarenakan adanya anak yang lahir diimunisasi di luar Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 94 - Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	Jiwa	2.610	2.710	2.376	2.286	2.239
2	Jumlah anak usia 1 tahun	Jiwa	3.225	2.404	2.376	3.625	3.625
	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	80,93	112,73	100	63,06	61,76

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.17. Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk

Non polio AFP (*Acute Flaccid Paralysis*) adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Pada tahun 2021 sampai tahun 2023 tidak ditemukan kasus lumpuh layu dibawah umur 15 tahun di Kabupaten Soppeng. Hal ini disebabkan keberhasilan petugas kesehatan, terutama petugas imunisasi yang memberikan pelayanan imunisasi polio pada bayi dan balita. Namun pada tahun 2024 ditemukan kasus SFP non polio sebanyak 2 kasus dengan capaian sebesar 0,0043%. Kondisi di tahun 2025 tidak ditemukan kasus lumpuh layu dibawah umur 15 tahun di Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu pemantauan terhadap kasus lumpuh layu adalah upaya pencegahan yang harus terus ditingkatkan untuk mengurangi jumlah kasus yang terjadi. Capaian Non polio AFP (*Acute Flaccid Paralysis*) per 100.000 penduduk di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 95 - Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	Kasus	0	0	0	2	0
2	Jumlah penduduk < 15 tahun	Jiwa	47.095	46.739	46.606	45.999	45.260
	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	0	0	0	0,0043	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.18. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Balita pneumonia adalah balita yang mengidap penyakit paru-paru basah, cakupan balita pneumonia yang ditangani merupakan rasio jumlah penderita yang ditangani dibandingkan dengan jumlah prakiraan penderita pneumonia balita, tabel dibawah ini menyajikan cakupan balita pneumonia yang ditangani pada tahun 2021-2025.

Tabel 2. 96 - Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani	Jiwa	22	78	78	110	139
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Jiwa	859	891	891	910	671
	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	2,56	8,75	8,75	12,09	20,71

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

Jumlah kasus Balita dengan Pneumonia ditangani di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebanyak 22 kasus atau mencapai 2,56% dan mengalami peningkatan di tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah kasus sebanyak 78 kasus atau mencapai 8,75%. Akan tetapi jumlah kasus tersebut bertambah di tahun 2024 110 kasus (12,09%) dan di tahun 2025 meningkat dengan jumlah kasus sebanyak 139 atau 20,71%.

Hal ini menunjukkan masih perlu peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat serta menjauhkan anak-anak dari perokok, mengingat pneumonia masih merupakan permasalahan yang perlu penanggulangan yang serius mengingat dampak yang timbul sangat mempengaruhi derajat kesehatan terutama pada kelompok umur balita.

2.4.4.3.19. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA merupakan Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB didapat dari perhitungan jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun orang dibagi jumlah orang yang diperkirakan menderita TBC BTA dalam kurun waktu yang sama.

Tabel 2. 97 - Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Jiwa	198	304	824	318	397
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Jiwa	762	857	824	1.442	1.249
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	25,98	35,47	100	22,05	31,78

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dalam lima tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 25,98% dengan jumlah penderita yang ditangani sebanyak 198 jiwa dan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA(+) sebanyak 762 jiwa. Di tahun 2022 capaian tersebut meningkat yakni 35,47% dengan jumlah penderita baru yang ditemukan dan diobati sebanyak 304 kasus dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA(+) sebanyak 857 jiwa, dan pada kondisi tahun 2023 sebesar 100% jumlah penderita yang ditangani sebanyak 824 jiwa. Tahun 2024 capaian tersebut menurun dengan capaian 22,05% dan meningkat di tahun 2025 sebesar 31,78%.

2.4.4.3.20. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium Tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Tingkat prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar 198 kasus dan meningkat pada tahun 2022 jumlah kasus penderita TBC sebanyak 397 atau 166,38%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 190 kasus dengan jumlah penduduk 240.955 atau mencapai 78,94 per 100.000 penduduk. Tingkat prevalensi tuberkulosis tersebut kembali meningkat pada tahun 2024 sebanyak 407 kasus dari 241.333 jumlah penduduk dengan tingkat prevalensi tuberkulosis sebesar 168,65%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan jumlah kasis penderita TBC sebanyak 531 kasus dari 241.777 jiwa penduduk. Penemuan pasien merupakan langkah pertama dalam kegiatan tatalaksana pasien TB. Penemuan dan penyembuhan pasien TB menular, secara bermakna akan dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat TB, penularan TB di masyarakat dan sekaligus merupakan kegiatan pencegahan penularan TB yang paling efektif di masyarakat.

Tabel 2. 98 - Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Kasus	198	397	190	407	531
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	Jiwa	237.875	238.612	240.955	241.333	241.777
	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	83,24	166,38	78,85	168,65	219,62

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.21. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Mortalitas karena TB adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh TB pada orang dengan HIV negatif sesuai dengan revisi terakhir dari ICD-10 (*International Classification of Diseases*). Angka kematian karena Tuberkulosis di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar 0,00 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2022 capaian tersebut sebesar 4,19% dengan jumlah kematian sebanyak 10 jiwa, dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 17,45% dengan jumlah pasien TP yang meninggal tercatat sebesar 42 jiwa. Di tahun 2024 jumlah pasien TB yang meninggal menurun sebanyak 36 jiwa dengan tingkat kematian karena tuberkulosis sebanyak 14,92 per 100.000 penduduk dan meningkat di tahun 2025 sebesar 23,16% atau jumlah pasien TB meninggal sebanyak 56 jiwa dari 241.777 jiwa penduduk.

Tabel 2. 99 - Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis per 100.000 Penduduk Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pasien TB yang meninggal	Jiwa	0	10	42	36	56
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Jiwa	237.875	238.612	240.955	241.333	241.777
	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	0	4,19	17,43	14,92	23,16

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.22. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS

Perkiraan jumlah semua kasus TB merupakan insiden dalam per 100.000 penduduk dibagi dengan 100.000 dikali dengan jumlah penduduk. Misalnya: perkiraan insiden di suatu wilayah adalah 200 per 100.000 penduduk dan jumlah penduduk sebesar 1.000.000 orang maka perkiraan

jumlah semua kasus TB adalah (200:100.000) x 1.000.000 = 2.000 kasus. Program nasional pengendalian tuberkulosis mulai menerapkan strategi pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung *Directly Observed Treatment Short-course* (DOTS) yang dilaksanakan di puskesmas secara bertahap. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 100 - Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Jiwa	198	397	452	145	179
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada	Jiwa	762	857	824	544	519
	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	%	25,98	46,32	54,85	26,65	34,48

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

Di Kabupaten Soppeng proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS selama lima tahun terus mengalami fluktuasi, pada tahun 2021 capaian tersebut sebesar 25,98% dan meningkat di tahun 2022 menjadi 46,32%. Di tahun 2023 terjadi peningkatan capaian menjadi 54,85% dengan jumlah pasien yang mendapat pengobatan sebanyak 452 jiwa dan jumlah pasien baru sebanyak 824 jiwa. Pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami penurunan dengan nilai 26,65% atau sebanyak 145 jiwa jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapatkan pengobatan melalui DOTS dari 544 jiwa pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan Dimana proporsi jumlah kasus tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS sebesar 34,38% atau 179 pasien tuberculosis BTA yang mendapatkan pengobatan melalui DOTS dari 519 pasien baru TB paru BTA yang diperkirankan ada.

2.4.4.3.23. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue melalui Vektor nyamuk. Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebanyak 102 kasus. Semua kasus tersebut telah dilakukan penanganan dengan baik sehingga tidak terjadi kematian akibat penyakit DBD. Pada tahun 2022 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mengalami penurunan dengan capaian sebesar 33,33%. Jumlah kasus yang ditangani dan ditemukan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 48 jiwa dari 115 jiwa penderita DPBD yang ditemukan sedangkan tahun 2024 mengalami peningkatan dengan catatan sebanyak 311 jiwa atau sebesar 100%. Pada tahun 2025, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100% dengan jumlah kasus yang ditangani sebanyak 97 jiwa dan jumlah penderita DBD yang ditemukan sebesar 97 jiwa.

Penanganan DBD perlu tetap diwaspadai di tengah Masyarakat diimbau untuk melakukan gerakan 3M plus dan menjadi juru pemantik jentik (jumantik) dalam lingkungan keluarga sebagai langkah pencegahan. Jumantik bertanggung jawab memantau jentik nyamuk yang ada di lingkungan rumah.

Tabel 2. 101 - Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	Jiwa	102	24	48	311	97
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa	102	72	115	311	97
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita	%	100	33,33	41,74	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.24. Penderita Diare yang Ditangani

Penderita diare yang ditangani tahun 2021 sebesar 4,41% atau sebanyak 2.798 jiwa dari total perkiraan jumlah penderita sebanyak 63.495 jiwa, sedangkan tahun 2022 penderita diare yang ditangani sebesar 49,52% atau sebanyak 3.144 jiwa dari total perkiraan jumlah penderita sebanyak 6.349 jiwa dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 77,88% atau sebanyak 4.911 jiwa dari total perkiraan jumlah penderita sebanyak 6.306 jiwa. Di tahun 2024, penderita diare yang ditangani mengalami penurunan sebesar 57,96% atau 3.777 jiwa dari total perkiraan penderita diare sebanyak 6.517 jiwa. Penderita diare yang ditangani pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 2.349 jiwa penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan prakiraan penderita diare sebanyak 2.188 jiwa yang ada di Kabupaten Soppeng.

Kualitas lingkungan yang sehat, pola hidup bersih serta pemanfaatan jamban keluarga dapat membantu menurunkan angka kesakitan terutama penyakit diare. Kabupaten Soppeng dinyatakan telah mencapai status sebagai kabupaten yang sudah bebas dari perilaku "Buang Air Besar Sembarangan" (BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF). Masyarakat telah menerapkan budaya "Cuci Tangan Pakai Sabun" (CTPS).

Tabel 2. 102 - Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader	Jiwa	2.798	3.144	4.911	3.777	2.349
2	Jumlah perkiraan penderita diare	Jiwa	63.495	6.349	6.306	6.517	2.188
	Penderita Diare yang Ditangani	%	4,41	49,52	77,88	57,96	107,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.25. Angka Kejadian Malaria

Penyakit malaria merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh vektor nyamuk anopheles. Pada tahun 2021 tidak ada kasus malaria di Kabupaten Soppeng, sedangkan tahun 2022 sebanyak 18 jiwa penduduk yang menderita malaria dan 2023 jumlah penduduk yang menderita malaria sebanyak 14 jiwa dari total jumlah penduduk 240.955 atau mencapai 5,81% per 100.000 penduduk. Angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2024 dengan persentase sebesar 5,39% atau sebanyak 13 jiwa penduduk yang menderita malaria dari 241.333 jiwa total penduduk. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan jumlah penduduk yang menderita malaria sebanyak 18 jiwa atau sebesar 7,44% dari jumlah penduduk. Salah satu penyebab ditemukannya kejadian malaria yakni adanya pendatang dari daerah endemik malaria yang terjangkit. Penurunan jumlah penduduk yang menderita malaria menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya pengendalian malaria yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti peningkatan akses ke layanan kesehatan, distribusi pengobatan malaria, dan upaya pencegahan lainnya.

Tabel 2. 103 - Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penduduk yang menderita malaria	Jiwa	0	18	14	13	18
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	Jiwa	235.167	238.612	240.955	241.333	241.732
	Angka Kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	0	7,54	5,81	5,39	7,44

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.26. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Berdasar dari kejadian malaria di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 hingga 2025 tidak terjadi kematian, hal tersebut dikarenakan semua kasus

tertangani dengan baik oleh petugas kesehatan.

2.4.4.3.27. Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida

Kejadian malaria merupakan hal yang wajib diwaspadai, untuk itu perlu dilakukan penanganan pencegahan penyakit malaria, salah satu cara yang dilakukan yaitu penggunaan kelambu berinsektisida. Namun di kabupaten Soppeng kejadian malaria bukanlah endemic, melainkan kejadian yang diperoleh dari kunjungan masyarakat dari luar daerah terutama dari Papua. Sehingga penularan penyakit malaria di kabupaten Soppeng tidak dianggap sebagai endemic dan suplai kelambu berinsektisida sudah tidak ada.

2.4.4.3.28. Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Kejadian malaria di Kabupaten Soppeng dilakukan penanganan dengan pemberian obat anti malaria yang diberikan dengan tepat terutama terhadap balita dengan demam dan terduga malaria. Adapun pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tidak ada balita yang demam karena malaria, sehingga tidak ada pemberian obat anti malaria pada anak balita.

2.4.4.3.29. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi

Persentase prevalensi HIV/AIDS diperoleh dari jumlah pasien HIV dan AIDS pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 2021 terdapat 13 pasien HIV/AIDS atau 0,0055 dari total populasi, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 yang tercatat sebanyak 26 pasien atau 0,0109 dari total populasi. Pada tahun 2023 tidak ada pasien HIV dan AIDS sehingga prevalensi HIV/AIDS dari total populasi adalah 0% dan di tahun 2024 capaian tersebut sebesar 0,0095 atau sebanyak 23 jumlah pasien HIV/AIDS dari 241.333 jiwa total penduduk yang ada. Kondisi di tahun 2025 menujukkan penurunan prevalensi HIV/AIDS dari total populasi yakni 0,0078 atau sebanyak 19 jumlah pasien HIV/AIDS.

Penanganan terkait HIV/AIDS dilakukan melalui survei pada masyarakat rawan (resiko tinggi) tertular HIV/AIDS, sosialisasi kepada masyarakat baik yang berisiko terinfeksi ataupun yang sudah terinfeksi HIV/AIDS. Pelatihan bagi petugas pada sarana RS, VCT, CST dan petugas laboratorium, serta menerapkan layanan VCT dan CST di RSUD La Temmamala.

Tabel 2. 104 - Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS	Jiwa	13	26	0	23	19
2	Jumlah penduduk	Jiwa	237.875	238.612	240.955	241.333	241.777
	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi	%	0,0055	0,0109	0	0,0095	0,0078

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.30. Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir

Penggunaan kondom merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah penyakit HIV/AIDS. Namun tidak ada data yang diperoleh terkait pengguna kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir tidak dapat diketahui. Karena tidak adanya pemantauan penggunaan kondom yang dilakukan petugas saat ada hubungan seks.

2.4.4.3.31. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Pemberian pengetahuan tentang HIV/AIDS pada usia 15-24 tahun

harus dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS di masyarakat. Capaian indikator terhadap proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS belum dapat disimpulkan, karena data tidak tersedia. Petugas kesehatan telah melakukan penyuluhan HIV/AIDS yang maksimal terhadap siswa SMP dan SMA. Namun belum menyentuh bagi yang berusia 15-24 tahun tetapi tidak mengenyam pendidikan yang lebih baik atau tidak sekolah.

2.4.4.3.32. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di puskesmas dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin. Masyarakat miskin perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Hal ini merupakan tujuan pokok upaya kesehatan dengan meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat.

Data jumlah seluruh miskin yang digunakan pada indikator ini adalah data Penerima Bantuan Iuran (PBI). PBI adalah peserta jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Adapun cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 105 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	Jiwa	92.801	12.011	11.263	1.793	14.230
2	Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten	Jiwa	94.932	28.565	17.210	135.008	152.838
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	97,76	42,05	65,44	1,32	9,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

Pada tahun 2021 Capaian rujukan terhadap masyarakat miskin mencapai 97,76% dengan jumlah kunjungan sebanyak 92.801 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan capaian 42,05%. Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 pada tahun 2023 sebanyak 11.263 jiwa dari jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten sebanyak 17.210 dengan persetase capaian sebesar 65,44%. Pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami penurunan dengan persentase capaian 1,32%. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan capaian dengan jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 sebanyak 14.230 jiwa dari jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten sebanyak 152.838 atau dengan capaian 9,31%. Peningkatan layanan puskesmas bagi warga miskin. perlu memaksimalkan sistem rujukan puskesmas dan penguatan lintas sektor serta mendorong masyarakat untuk datang ke puskesmas bukan pada saat sakit, akan tetapi untuk memeriksakan Kesehatan berkala.

2.4.4.3.33. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam memantau tingkat kesehatan bayi lahir. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2021 sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan capaian 108,24%. Pada tahun 2023 memperoleh capaian 100% dengan jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 2.570 jiwa dari jumlah seluruh bayi lahir hidup sebanyak 2.570 jiwa. Peningkatan capaian tersebut berlanjut

di tahun 2024 dengan persentase sebesar 105,23% dan di tahun 2025 sebesar 100%. Cakupan kunjungan bayi tersebut mencapai 100% atau lebih disebabkan terjadinya peningkatan kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan Kesehatan serta adanya penduduk diluar daerah yang berkunjung pada layanan kesehatan di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 106 - Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Jiwa	2.769	2.602	2.570	2.414	2.209
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	Jiwa	2.769	2.404	2.570	2.294	2.209
	Cakupan Kunjungan Bayi	%	100	108,24	100	105,23	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.34. Cakupan Puskesmas

Pusat kesehatan masyarakat merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas memiliki fungsi sebagai berikut: 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4) pusat pelayanan kesehatan perorangan primer.

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Soppeng tahun 2022-2025 sebanyak 17 (tujuh belas) unit, yang terdiri dari 7 (tujuh) Puskesmas Rawat Inap, 10 (sepuluh) Puskesmas Non Rawat Inap yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Soppeng. Di tahun 2022 terjadi peningkatan puskesmas rawat inap sebanyak 8 puskesmas yang sebelumnya hanya 7 puskesmas di tahun 2021.

2.4.4.3.35. Cakupan Pembantu Puskesmas

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Soppeng sebanyak 17 (tujuh belas) unit terdiri dari 7 (tujuh) Puskesmas Rawat Inap, 10 (sepuluh) Puskesmas Non Rawat Inap, dengan Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit yang memberikan pelayanan kesehatan di 70 Desa/Kelurahan. Dan ditunjang dengan Poskesdes sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit dengan pelayan KIA/KB. Cakupan puskesmas pembantu dari tahun 2021 hingga 2023 mencapai 61,40%, dan meningkat di tahun 2024 sebesar 87,75%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan cakupan pembantu puskesmas yakni 43 unit puskesmas pembantu dan 72 poskesdes dengan persentase sebesar 164,29%.

2.4.4.3.36. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang sudah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar yakni paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dengan distribusi sekali pada tri semester pertama, sekali pada trimester ke-2 dan dua kali pada trimester ke-3 dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Melalui ANC (K4) diharapkan deteksi dini dan perawatan kehamilan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Dengan demikian komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan dapat dicegah sehingga kematian pada ibu hamil dan janinnya dapat juga dicegah.

Tabel 2. 107 - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jiwa	2.574	2.436	2.410	2.116	1.970
2	Jumlah sasaran ibu hamil	Jiwa	2.574	2.960	2.410	3.974	2.831
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	100	82,3	100	53,25	69,59

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2021 sebesar 100%, dan mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 82,3%, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 100% dengan jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 sebanyak 2.410 jiwa. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan dengan capaian 53,25% dan meningkat di 2025 sebesar 69,59%.

Jumlah ibu hamil diambil dari data riil (K1 Kunjungan pertama) dan belum semua ibu hamil yang ada pada tahun tersebut memperoleh pelayanan antenatal K4 karena umur kehamilan belum mencapai trimester ketiga (9 bulan) dan ada juga ibu hamil dari tahun sebelumnya baru mendapatkan pelayanan antenatal K4 pada tahun tersebut karena umur kehamilannya baru mencapai trimester ketiga (9 bulan). Capaian kunjungan ibu hamil dalam beberapa tahun terakhir perlu dilakukan upaya peningkatan dalam akses pelayanan kepada sasaran ibu hamil.

2.4.4.3.37. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan Pelayanan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: 1) kunjungan nifas pertama (KF1) pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari; 2) kunjungan nifas ke-2 (KF2) dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan; dan 3) kunjungan nifas ke-3 (KF3) dilakukan minggu ke-6 setelah persalinan.

Tabel 2. 108 - Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Jiwa	2.757	2.611	2.518	2.181	2.122
2	Jumlah seluruh ibu nifas	Jiwa	2.757	2.861	2.518	3.953	2.703
	Cakupan Pelayanan Nifas	%	100	91,26	100	55,17	78,51

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

Cakupan Pelayanan ibu nifas di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar 100% dan menurun menjadi 91,26% pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 100%. Pada tahun 2024 terjadi penurunan dengan jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar sebanyak 2.181 jiwa dari Jumlah seluruh ibu nifas sebanyak 3.953 jiwa dengan capaian 55,17%. Di tahun 2025 terjadi peningkatan dengan capaian sebesar 78,51%. Penyebab pencapaian tersebut belum memenuhi target 100% dikarenakan jumlah ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar pada tahun berkenaan tidak sama dengan jumlah ibu nifas, bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Hal ini dikarenakan terkadang pada tahun berkenaan belum mencapai pelayanan 3 kali sehingga pelayanannya berpindah ke tahun berikutnya.

2.4.4.3.38. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus

neonatorum, infeksisepsis, trauma lahir, BBLR berat badan lahir rendah 2500 gram, sindroma gangguan pernapasan, kelainan kongenital. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.

Pada tahun 2021 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani jumlah neonatal resiko tinggi dengan komplikasi yang ditangani mencapai 100%. Di tahun 2022 capaian tersebut mengalami penurunan dengan capaian sebesar 61,88%. Pada tahun 2023 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani jumlah neonatal resiko tinggi dengan komplikasi yang ditangani mengalami peningkatan menjadi 100% dengan jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani sebanyak 270 jiwa dari jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada sebanyak 270 jiwa. Di tahun 2024 capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 97,82% akan tetapi terjadi peningkatan jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani sebanyak 2.244 jiwa dari 2.294 total neonatus dengan komplikasi yang ada. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani sebesar 98,23%. Cakupan neonatal dengan komplikasi semua ditangani oleh tenaga kesehatan yang capaiannya pada tahun 2021-2025 sebagai berikut.

Tabel 2. 109 - Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Jiwa	203	250	270	2.244	2.170
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Jiwa	203	404	270	2.294	2.209
	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	%	100	61,88	100	97,82	98,23

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.39. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan balita. Jumlah perkiraan sasaran anak balita pada tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 12.945 jiwa dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 9.846 (76,06%). Untuk tahun 2022 mengalami peningkatan dengan cakupan pelayanan anak balita sebesar 94,66%. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan capaian 100% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mengalammi penurunan dengan capaian 53,75% dengan jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali, yakni sebanyak 9.519 jiwa dari jumlah seluruh balita sebanyak 17.711 jiwa. Di tahun 2025 cakupan pelayanan anak balita mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 99,4%.

Tabel 2. 110 - Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Jiwa	9.846	10.147	8.947	9.519	9.784
2	Jumlah seluruh anak balita	Jiwa	12.945	10.719	8.947	17.711	9.843
	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	76,06	94,66	100	53,75	99,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.40. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Pada tahun 2021 hingga tahun 2025 di Kabupaten Soppeng cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada

anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah 100%.

Tabel 2. 111 - Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	Jiwa	436	403	385	1.458	1.368
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Jiwa	436	403	385	1.458	1.368
	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 -24 Bulan Keluarga Miskin	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.41. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat dilakukan pada semua murid SD/setingkat yang duduk di kelas I. Penjaringan kesehatan siswa SD/setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD/setingkat terhadap murid kelas I SD/setingkat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan Bersama guru dan dokter kecil. Pada tahun 2021 di Kabupaten Soppeng cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat mencapai 92,54% sedangkan tahun 2022 mengalami peningkatan dengan capaian 94,74%. Pada tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan menjadi 100%. Kondisi di tahun 2025 terjadi penurunan capaian dengan jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih sebanyak 17.567 jiwa dari 18.989 jiwa jumlah murid SD san setingkat.

Tabel 2. 112 - Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	Murid	2.926	3.727	3.010	3.053	17.567
2	Jumlah murid SD dan setingkat	Murid	3.162	3.934	3.010	3.053	18.989
	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	92,54	94,74	100	100	92,51

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.3.42. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat diharapkan mampu mengatasi sebagian besar masalah kesehatan masyarakat. Berbagai pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya komitmen pemerintah terhadap pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatan dasar terhadap masyarakat miskin dilakukan dengan fasilitas JKN. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2020 mencapai 100% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 92,54%. Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1 sebanyak 3.727 jiwa pada tahun 2022 dengan persentase capaian 94,74%. Pada tahun 2023 capaian tersebut meningkat menjadi 100% dan selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 204 menjadi 13,73%.

Tabel 2. 113 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	Jiwa	3.584	2.926	3.727	3.010	18.540
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	Jiwa	3.584	3.162	3.934	3.010	135.008
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	92,54	94,74	100	13,73

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.3.43. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pada tahun 2021-2025 jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) di Kabupaten Soppeng sebanyak 1 (satu) unit dengan pelayanan gawat darurat level 1. Sehingga cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan 100% pada tahun 2021-2025. Walaupun capaian tersebut telah mencapai 100% akan tetapi pelayanan gawat darurat perlu ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan layanan kesehatan juga perlu ditingkatkan.

2.4.4.3.44. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit. Ketentuan penetapan KLB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan. Kejadian Luar Biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Tabel 2. 114 - Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam	KLB	4	1	0	2	0
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi	KLB	4	1	0	2	0
	Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	100	0	100	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2026

Pada tahun 2021 pandemi covid-19 menyebabkan warga dari 41 desa/kelurahan terinfeksi covid-19. Penyebaran covid-19 masuk ke dalam bencana non alam. Penanganan KLB dengan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dilakukan dengan baik oleh petugas kesehatan sebagai upaya penanganan penyakit. Penanggulangan lainnya antara lain meliburkan sekolah untuk sementara waktu, menutup fasilitas umum untuk sementara waktu, melakukan pengamatan secara intensif atau surveilans selama KLB serta melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan. Hal tersebut dibuktikan dengan 100% penyelidikan epidemiologi terhadap KLB. Pada tahun 2023 tidak ada KLB yang terjadi/tertangani di kabupaten Soppeng sedangkan di tahun 2024 terdapat 2 KLB yang dilakukan penyelidikan. Kondisi di tahun 2025 menujukkan tidak adanya KLB yang terjadi di Kabupaten Soppeng.

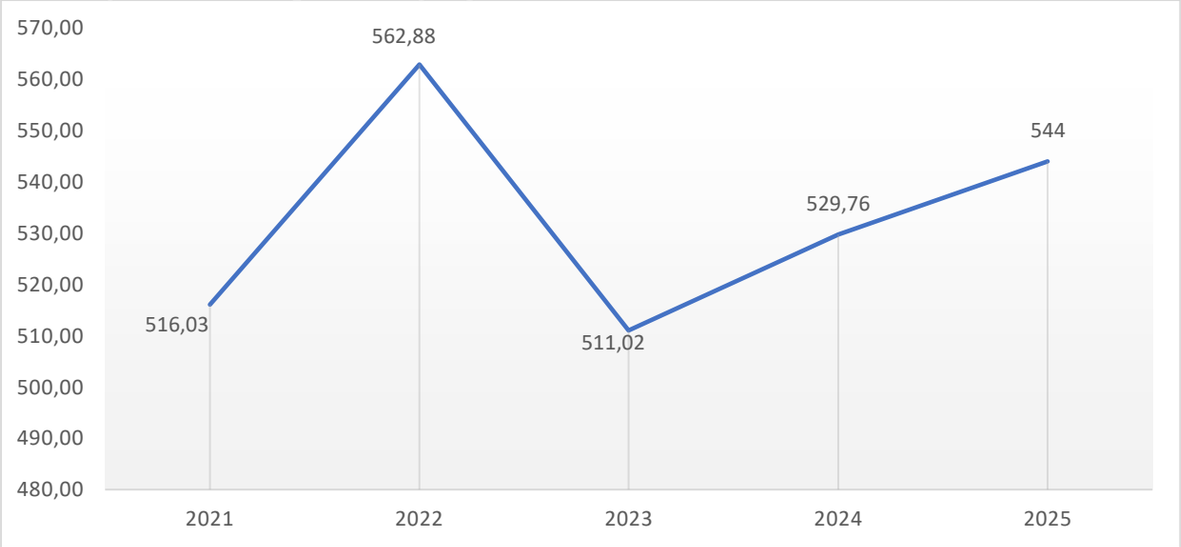
2.4.4.4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.4.4.4.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Penyediaan infrastruktur yang memadai akan memberikan percepatan pergerakan arus barang dan jasa di suatu wilayah sehingga aktivitas ekonomi juga akan semakin tinggi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang dan jasa maupun penumpang. Pengelolaan Jalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Jalan, untuk Jalan di wilayah Kabupaten menjadi kewajiban pemerintah

Kabupaten, sehingga Jalan yang berada di Pedesaan pun yang utamanya menghubungkan antar Kecamatan, antar desa akan dipelihara oleh Pemerintah.

Grafik 2. 93 - Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2026

Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Soppeng semakin meningkat pada periode 2021-2025. Pada tahun 2021 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 516,03 km dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 562,88 km. Pada tahun 2023 menurun menjadi 511,02 km dari panjang jalan seluruhnya sebanyak 967,845 km atau mencapai 0,52 dan kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 0,55 dengan panjang jalan kondisi baik sepanjang 529,76 Km dari 967,845 jalan seluruhnya. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan, Dimana panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 544 Km.

Peningkatan kondisi jalan dalam kondisi baik ini juga dapat dilihat dari data proporsi jumlah jalan dalam kondisi baik yang juga mengalami fluktuasi pada lima tahun terakhir. Peningkatan proporsi jalan kondisi baik pada tahun 202 dikarenakan Pemerintah Kabupaten Soppeng sangat memperhatikan kondisi infrastruktur jalan. Dengan masifnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan.

Tabel 2. 115 - Proporsi Panjang Jaringan Jalan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Panjang Jalan Kondisi Baik	Km	516,03	562,876	511,022	529,76	544
2	Panjang Jalan Seluruhnya	Km	900,34	960,697	967,845	967,845	967,845
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,57	0,59	0,52	0,55	0,56

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2026

2.4.4.4.2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan, Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

Di Kabupaten pada tahun 2021 jumlah rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk sebesar 0,0038 poin, sedangkan tahun 2022 sampai 2025 sebesar 0,004 poin. Panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten mengalami penambahan berbanding lurus jumlah penduduk juga mengalami kenaikan.

Tabel 2. 116 - Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah panjang jalan	Km	900,34	960,697	967,845	967,845	967,845
2	Jumlah penduduk	Jiwa	237.875	238.612	240.955	241.333	245.776
	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	Poin	0,0038	0,004	0,004	0,004	0,004

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2026

2.4.4.4.3. Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 mengindikasikan bahwa terdapat kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4. Persentase kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 10,28% dan pada tahun 2021 sebesar 8,12% sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 9,76% sedangkan pada tahun 2023 tidak terjadi peningkatan, dengan Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 sebanyak 349 Ha.

Tabel 2. 117 - Persentase Kawasan Permukiman yang Belum dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4	Ha	80	80	38	349	349
2	Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk	Ha	778	778	468	3577	3577
	% Kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	10,28	10,28	8,12	9,76	9,76

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.4.4.4.4. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/ jam) di Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/ Jam) sebesar 57,32%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 52,8% atau panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 511,022 Km. Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 529,76 Km atau sebesar 54,74%. Kondisi di tahun 2025 kembali menunjukkan adanya peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 544 Km atau sebesar 56,24% dari 967,85 Km panjang jalan di Kabuoaten Soppeng.

Tabel 2. 118 - Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40Km/Jam) Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	516,033	562,876	511,022	529,76	544
2	Panjang seluruh jalan kabupaten	Km	900,338	960,697	967,845	967,85	967,85
	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	%	57,32	58,59	52,8	54,74	56,24

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2026

2.4.4.4.5. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)

Persentase jalan yang memiliki trotoar di Kabupaten Soppeng pada tahun 2019- 2022 sebesar 47,12 %. atau mencapai 452.680 Km pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 panjang jalan menjadi 452.981 Km atau terjadi peningkatan 0,3Km atau mencapai 46,80%.

Berdasarkan data persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase

dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan. Hal ini diakibatkan karena jumlah trotoar dan drainase yang rusak tidak sebanding dengan jumlah trotoar yang dibangun dan dipelihara. Selain itu Sebagian besar jalan kabupaten berada di luar kawasan perkotaan sehingga belum dilengkapi dengan trotoar.

Tabel 2. 119 - Jalan yang Memiliki Trotoar Dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km	423.590	423.590	423.590	452.680	452,981
2	Panjang seluruh jalan kabupaten	Km	898.881	898.881	898.881	960.697	967,845
	% Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)	%	47,12%	47,12%	47,12%	47,12%	46,80

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.4.4.4.6. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Soppeng bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 54,27% kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 54,21% sedangkan pada tahun 2022 mencapai 54,21% atau tidak terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya karena pada tahun tersebut tidak ada kegiatan pembangunan drainase, demikian halnya pada tahun 2023 tidak terdapat peningkatan dengan capaian 54,21%.

Tabel 2. 120 - Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air	Km	423,59	423,59	1.740	1.740	1.740
2	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten	Km	780,52	780,52	3.210	3.210	3.210
	% Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	54,27	54,27	54,21	54,21	54,21

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.4.4.4.7. Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyebutkan indikator Bidang Cipta Karya terkait penyediaan sanitasi yaitu persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun. Genangan dapat terjadi apabila air buangan maupun air hujan tidak dapat mengalir ke badan air sehingga terperangkap di daerah cekungan ataupun daerah yang permukaannya lebih rendah. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh drainase yang tidak dapat berfungsi dengan baik dalam mengalirkan air. Pada daerah Kabupaten Soppeng persentase luas wilayah tergenang mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 sebesar 14,38% menjadi 1,79% pada tahun 2020 dan tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 1,79% dengan luasan daerah genangan mencapai 12,84 Ha, tidak terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan tidak adanya pembangunan drainase tahun 2022. Pada tahun 2023 luas wilayah tergenang mengalami peningkatan mencapai 2,28%.

Tabel 2. 121 - Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Luasan daerah yang tergenang	Ha	1545	192,51	12,84	12,84	16,41
2	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	Ha	10740,57	10741	717,55	717,55	717,55
	Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun	%	14,38%	1,79%	1,79%	1,79%	2,28%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.4.4.4.8. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. maka tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian, dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Produksi dari hampir semua jenis tanaman akan meningkat, dengan adanya pemberian air yang tepat waktu dan tepat jumlah.

Persentase irigasi dalam kondisi baik tahun 2021 mengalami peningkatan 65,31%, kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan capaian 53,28 akan tetapi di sisi lain terdapat penurunan dari tahun sebelumnya Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik yang hanya mencapai 5.150 Ha dan luas irigasi kabupaten mencapai 9.666 Ha. Di tahun 2023 luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik kembali mengalami peningkatan hingga 81% dengan luas irigasi dalam kondisi baik bertambah sebesar 7.829 Ha dari total luas irigasi kabupaten 9.666 Ha. Peningkatan tersebut berlanjut di tahun 2024 sebesar 84,61% atau seluas 8.178 Ha irigasi dalam kondisi baik. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan kembali adanya peningkatan persentase irigasi kabuoaten dalam kondisi baik sebesar 88,11%. Hal ini diakibatkan karena selain adanya penambahan luas irigasi dalam kondisi baik juga dipengaruhi berkurangnya luas irigasi kabupaten.

Tabel 2. 122 - Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Ha	6.001	5.150	7.829	8.178	8.517
2	Luas irigasi kabupaten	Ha	9.189	9.666	9.666	9.666	9.666
	% Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	65,31	53,28	81	84,61	88,11

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2026

2.4.4.4.9. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya pertanian. Rasio Jaringan Irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Pada tahun 2020 dan 2021 rasio jaringan irigasi sebesar 0,022, sedangkan pada tahun 2022 panjang saluran irigasi mencapai 248.058,3 m dan luas lahan budidaya pertanian mencapai 51.158 m sehingga rasio jaringan irigasi mencapai 4,85 poin. Panjang saluran irigasi tahun 2023 sepanjang 281.199 M dari luas lahan budidaya pertanian sepanjang 29.236 M yaitu sebesar 9,62 poin. Di tahun 2024 mengalami peningkatan sepanjang 291.253 m atau sebesar 30,13 poin.

Tabel 2. 123 - Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang saluran irigasi	M	204.923	248.058,3	281.199	391.325	391.325
2	Luas lahan budidaya pertanian	M	9.189,00	51.158,00	29.236	9.666	9.666
	Rasio Jaringan Irigasi	Poin	0,022	4,85	9,62	30,13	30,13

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

2.4.4.4.10. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dipengaruhi oleh proses guna ulang, daur ulang dan pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA. Rendahnya persentase tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengolahan sampah dan keterbatasan lahan pembangunan sarana dan prasarana. Untuk mengurangi volume sampah yang ada, di Kabupaten Soppeng terdapat 3 unit TPS 3R

sampai tahun 2022 sebagai tempat pengelolaan sampah, pada tahun 2022 Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA sebanyak 9.577,67 m^3 dan total volume sampah sebanyak 26.678,50 m^3 atau mencapai 11,84%. Pada tahun 2023 volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA dan total volume sampah mengalami pengurangan masing-masing sebesar 5.602,84 m^3 dan 7.154,15 m^3 atau mencapai 15,83%.

Tabel 2. 124 - Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	M3	4.850	4.850	7.686,69	9.577,67	5.602,84
2	Total volume sampah (Ton)	Ton	7040,12	7040,12	34.707,12	26.678,50	7.154,15
	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	68,89%	68,89%	22,15	11,84	15,38

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.4.4.4.11. Rasio Tempat Pemakaman Umum Persatuan Penduduk

Rasio tempat pemakaman umum diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dengan jumlah penduduk. Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mencapai 0,165% dengan jumlah daya tampung tempat pemakaman umum sebanyak 39.950 jiwa.

Tabel 2. 125 - Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	Jiwa	4,06	4,06	4,06	4,06	39.950
2	Jumlah penduduk	Jiwa	237.115	238.967	237.875	238.612	240.955
	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,017	0,017	0,017	0,017	0,165

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.4.4.4.12. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk. Rasio tempat ibadah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar 0,21% menurun menjadi 0,20% pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 0,21% hingga pada tahun 2024 mencapai 0,22%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan rasio tempat ibadah per satuan penduduk seebesar 0,24% atau sebanyak 582 masjid/musholla dan 7 unit gereja.

Tabel 2. 126 - Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah tempat ibadah	Unit	492	478	513	534	589
2	Jumlah penduduk	Jiwa	237.875	238.612	240.955	238.612	240.955
	Rasio tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Per Satuan Penduduk	0,00207	0,0020	0,0021	0,0022	0,0024

Sumber : Bagian Kesra, Sekretariat Daerah, 2026

2.4.4.4.13. Luas RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan adalah persentase luas RTH publik yang tersedia terhadap luas RTH publik yang seharusnya tersedia di kawasan perkotaan, pada tahun 2021 dan 2022 Luas RTH publik sebesar >20% dari luas wilayah

kota/kawasan perkotaan mencapai 3,27% atau mencapai luasan 12,02 Ha. Capaian tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian 5,02% dengan luas RTH publik sebanyak 18,45 Ha. Pada tahun 2025 luas RTH publik yang tersedia meluas hingga 19,03 Ha dari total luasan RTH publik yang tersedia yaitu 367,76 Ha atau dengan persentase sebesar 5,17%.

Tabel 2. 127 - Luas RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	Ha	12,02	12,02	18,45	18,45	19,03
2	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/Kawasan Perkotaan	Ha	367,76	367,76	367,76	367,76	367,76
	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	%	3,27	3,27	5,02	5,02	5,17

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2026

2.4.4.4.14. Ketaatan Terhadap RTRW

Realisasi terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Soppeng terus mengalami mengalami fluktiasi dalam lima tahun terakhir. Kendati demikian, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng seharusnya telah mengalami proses revisi karena telah mengalami perubahan substansi dan dinilai tidak dapat mengakomodir pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang ada di Kabupaten Soppeng. Selain itu, terdapat perubahan landasan hukum terkait penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota sehingga terdapat pembaharuan basis data yang menjadi pedoman dalam penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dari tabel dibawah dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 165 rekomendasi dan tahun 2021 sebanyak 147 surat keterangan kesesuaian taat ruang dan terealisasi sebanyak 144. Sisanya merupakan permohonan yang masuk pada akhir tahun sehingga akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Sedangkan untuk tahun 2022 sampai tahun 2024 luas realisasi RTRW 82.918,64 Ha dan rencana peruntukannya sebesar 136.997,14 Ha dengan persentase ketaatan RTRW sebesar 60,53.

Tabel 2. 128 - Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi RTRW	Rekomendasi	165	144	82.918,6	82.918,6	82.918,64
2	Rencana Peruntukan	Ha	165	147	136.997	136.997	136.997,1
	Ketaatan Terhadap RTRW	%	100	97,96	60,53	60,53	60,53

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

2.4.4.5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.4.4.5.1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah layak huni di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 sampai tahun 2024 dengan rasio sebesar 0,22 poin dan meningkat di tahun 2025 sebesar 0,23 poin. Jumlah rumah layak huni hingga tahun 2022 sebanyak 51.706 unit, meningkat pada tahun 2023 sebanyak 52.430 unit. Pada tahun 2024 jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan sebanyak 52.965 unit dan meningkat menjadi 55.772 unit pada tahun 2025.

Jumlah rumah layak huni cenderung mengalami peningkatan dalam

lima tahun terakhir. Untuk jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) pada tahun terakhir sebesar 0,23 dari 55.772 rumah layak huni yang ada di Kabupaten Soppeng pada tahun 2025.

Tabel 2. 129 - Rumah Layak Huni Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah layak huni	Unit	50.924	51.706	52.430	52.965	55.772
2	Jumlah penduduk	Jiwa	235.574	236.049	239.360	241.360	241.333
	Rasio Rumah Layak Huni	Poin	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2026

Berdasarkan data Rasio Rumah Layak Huni tersebut terjadi peningkatan jumlah penduduk, sehingga mempengaruhi jumlah rumah layak huni yang ada. Pemerintah telah melakukan Upaya untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni yang diberikan bantuan kepada Masyarakat miskin. Persentase penurunan rumah tidak layak huni rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 130 – Persentase Penurunan RTLH Rumah Tangga Miskin Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Unit RTLH Rumah Tangga Miskin yang Belum Ditangani	Unit	6.710	5.193	4.448	3.913	3.803
2	Jumlah Total Rumah	Unit	56.899	56.899	56.899	56.899	59.575
3	Persentase Penurunan RTLH Rumah Tangga Miskin	%	11,79	9,13	7,82	6,88	6,38

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2026

2.4.4.5.2. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Indikator ini mencerminkan persentase kawasan permukiman yang memenuhi kriteria kelayakan hunian, baik dari aspek fisik bangunan, akses terhadap sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan listrik, hingga aspek lingkungan dan keamanan.

Semakin tinggi rasio permukiman layak huni, semakin menunjukkan bahwa pembangunan daerah telah mampu menyediakan lingkungan tinggal yang aman, sehat, dan nyaman bagi warganya. Sebaliknya, rendahnya rasio ini menjadi sinyal perlunya intervensi pemerintah dalam bentuk peningkatan infrastruktur dasar, penataan kawasan, serta pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan permukiman yang lebih berkualitas. Dalam kurun waktu 2021-2025, rasio permukiman layak huni di Kabupaten Soppeng sebesar 0,98 poin.

Tabel 2. 131 - Pemukiman Layak Huni Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas pemukiman layak huni	M2	4.271,72	4.271,91	4.297,68	4.302,11	3.615
2	Luas wilayah permukiman	M2	4.369,57	4.369,57	4.369,57	4.369,57	3.682
	Rasio Permukiman Layak Huni	Poin	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2026

2.4.4.5.3. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 65,19% mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 menjadi 68,88 %. Akan tetapi capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 65,35% dan kembali meningkat sebesar

65,54% di tahun 2025. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2025 sebanyak 38.417unit dari total rumah sebanyak 58.620 unit.

Hal ini didukung oleh adanya program pemerintah seperti program Kotaku (terakhir pada tahun 2022), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Susun Santri, dan Program Sejuta Rumah.

Tabel 2. 132 - Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni	Unit	38,040	38,040	40.196	38.307	38.417
2	Jumlah rumah tangga MBR	Unit	58.353	58.353	58.353	58.620	58.620
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	65,19	65,19	68,88	65,35	65,54

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2026

2.4.4.5.4. Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase pemukiman yang tertata di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 mencapai 98,54% atau 5.856,74 Ha pemukiman telah tertata dari luas area permukiman keseluruhan sebesar 5.943,55 Ha. Kondisi tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan capaian dengan persentase sebesar 98,17% atau 3.614,9 Ha permukiman tertata dari 3.682.3 Ha luas area pemukiman.

Tabel 2. 133 - Pemukiman yang Tertata Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas area permukiman tertata	Ha	5856,74	5856,74	5.856,74	3.614,8	3.614,9
2	Luas area permukiman keseluruhan	Ha	5943,55	5.943,55	5.943,55	3.682,3	3.682.3
	Persentase Pemukiman yang Tertata	%	98,54	98,54	98,54	98,17	98,17

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2026

2.4.4.5.5. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Di Kabupaten Soppeng, persentase lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2021 sampai tahun 2022 sebesar 0,065%. Di tahun 2023 persentase lingkungan permukiman kumuh sebesar 0,048% dan menurun di tahun 2024 sebesar 0,045% dengan luas lingkungan pemukiman kumuh 67,46 Ha. Kondisi tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan persentase lingkungan permukiman sebesar 0,049%.

Tabel 2. 134 - Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	97,85	97,66	71,89	67,46	67,36
2	Luas wilayah	Ha	150.000	150.000	150.000	150.000	138.554,6
	% Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0,065	0,065	0,048	0,045	0,049

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2026

2.4.4.5.6. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m^2 per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Di Kabupaten Soppeng Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan pada tahun 2021 hingga pada tahun 2022 dengan capaian 2,05%, dengan jumlah rumah tangga kumuh sebanyak 1.167 unit dari total rumah tangga sebanyak 56.899 unit dan menurun di tahun 2023 sebesar 2%. Di tahun 2024 persentase rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 1,99% dan menurun di tahun 2025 dengan capaian seebsar 1,98% dengan jumlah rumah tangga kumuh perkotaan sebanyak 1.124 unit dari 56.899 seluruh rumah yang ada.

Tabel 2. 135 - Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	Unit	1.167	1.167	1.138	1.131	1.124
2	Jumlah seluruh rumah	Unit	56.899	56.899	56.899	56.899	56.899
	Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	2,05	2,05	2,00	1,99	1,98

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2026

2.4.4.5.7. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan. Pada tahun tahun 2021 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebesar 37,72% dan tahun 2022 sebesar 44,48%. Pada tahun 2023 capaian tersebut menurun dengan persentase sebesar 42,50% dan meningkat di tahun 2024 dan 2025 sebesar 46,25% dengan jumlah lingkungan yang didukung PSU sebanyak 5,3586 Ha. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya data PSU di lingkungan perumahan komersial dan perumahan umum.

Tabel 2. 136 - Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah lingkungan yang didukung PSU	Ha	2,5929	1,6166	2,6682	5,3586	5,3586
2	Jumlah lingkungan perumahan	Ha	6,8737	3,6345	6,2774	11,5867	11,5867
	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	37,72	44,48	42,50	46,25	46,25

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2026

2.4.4.6. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.4.4.6.1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Mengacu ke target SPM maka Linmas setiap RT adalah 1 orang. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Soppeng, dihitung dari jumlah petugas Linmas di Kabupaten dibagi dengan 1 Wilayah kerja Kabupaten (jumlah RT). Pada tahun 2021 cakupan petugas perlindungan masyarakat dengan capaian sebesar 129,10%. Pada tahun 2022 capaian tersebut menurun sebesar 126,09%, penurunan tersebut disebabkan jumlah wilayah kerja/jumlah TR bertambah sebanyak 1242 RT yang tidak diikuti dengan penambahan jumlah linmas. Pada tahun 2023 hingga tahun 2025 mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 128%.

Tabel 2. 137 - Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Petugas Linmas di Kab/Kota daerah pemekaran baru	Petugas	1566	1566	1588	1588	1588
2	1 Wilayah Kerja Kab/Kota	Jumlah RT	1213	1242	1242	1242	1242
	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	%	129,10	126,09	128	128	128

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2025

2.4.4.6.2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang

telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

Pada tahun 2021 jumlah K3 yang diselesaikan sebanyak 92 kasus dengan capaian sebesar 100%, persentase penyelesaian pelanggaran K3 tahun 2022 sebesar 100% dengan jumlah kasus sebanyak 40 dan pada tahun 2023 terdapat peningkatan sebanyak 44 kasus atau hanya sebanyak 44 kasus yang diselesaikan dan dilaporkan atau mencapai 100%. Pada tahun 2024 peningkatan pelanggaran K3 yang terselesaikan menjadi 5 kasus dengan persentase sebesar 100% dan di tahun 2025 dengan jumlah pelanggaran K3 sebanyak 6 Kasus dengan persentase penyelesaian sebesar 100%. Data tingkat penyelesaian K3 di Kabupaten Soppeng ini sudah berkoordinasi dengan pihak POLRES Soppeng.

Tabel 2. 138 - Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2021-2025

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	Pelanggaran K3	92	40	44	5	6
2	Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat	Pelanggaran K3	92	40	44	5	6
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2026

2.4.4.6.3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Luas wilayah rawan bencana di daerah Kabupaten Soppeng yakni 210,216 Ha. Untuk cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran (PPK) adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) oleh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai wilayah yuridis urusan pemerintahannya.

Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 adalah sebagai berikut:

- WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK.
- WMK ditentukan oleh waktu tanggap (response time) dari pos pemadam kebakaran terdekat.

Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran, pada tahun 2021 sampai tahun 2025 cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 94,20%. Subtansi dari pencapaian target tersebut adalah pembangunan sektor/pos pemadam kebakaran, dengan fasilitas yang dimiliki tersebut maka jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran sebanyak 1.413,04 Km^2 dengan luas wilayah cakupan 1.500 Km^2 atau mencapai 94,20%.

Tabel 2. 139 - Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran	Km^2	1.413,04	1.413,04	1.413,04	1.413,00	1.413,00
2	Luas Wilayah Kab/Kota	Km^2	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota (%)	%	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2026

2.4.4.6.4. Tingkat Waktu Tanggap (*Respons Time Rate*) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. Tingkat Waktu Tanggap (*Respons Time Rate*) daerah layanan WMK adalah merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada permukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Pada tahun 2021 dengan bertambahnya pos damkar *respons time rate* meningkat dengan capaian sebesar 64,44% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 77,78% sedangkan pada tahun 2023 *respons time rate* mengalami peningkatan dengan capaian 92,38%. Di tahun 2024 capaian tersebut mengalami peningkatan hingga 100%. Peningkatan tersebut diikuti oleh banyaknya jumlah kasus kebakaran hal tersebut disebabkan oleh fenomena El-nino disepanjang tahun 2023 yang menyebabkan banyaknya kasus kebakaran pada lahan maupun hutan. Kondisi di tahun 2025 terjadi penurunan capaian Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajeman kebakaran sebesar 87,05%.

Tabel 2. 140 - Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu Maksimal15 Menit	Kasus	58	35	267	87	74
2	Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK	Kasus	90	45	289	87	85
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	%	64,44	77,78	92,38	100	87,05

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2026

2.4.4.6.5. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan Perda adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Selama tahun 2021-2025 persentase penegakan Perda sebesar 100%. Penyelesaian pelanggaran Perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran dilakukan sesuai dengan SOP yaitu tindakan preventif non yustisial, dan apabila pelanggaran Perda mengandung unsur pidana dapat meneruskan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. 141 – Persentase Penegakan PERDA Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	Pelanggaran	5	6	6	5	6
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	Pelanggaran	5	6	6	5	6
	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran, 2026

2.4.4.7. Urusan Sosial

2.4.4.7.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

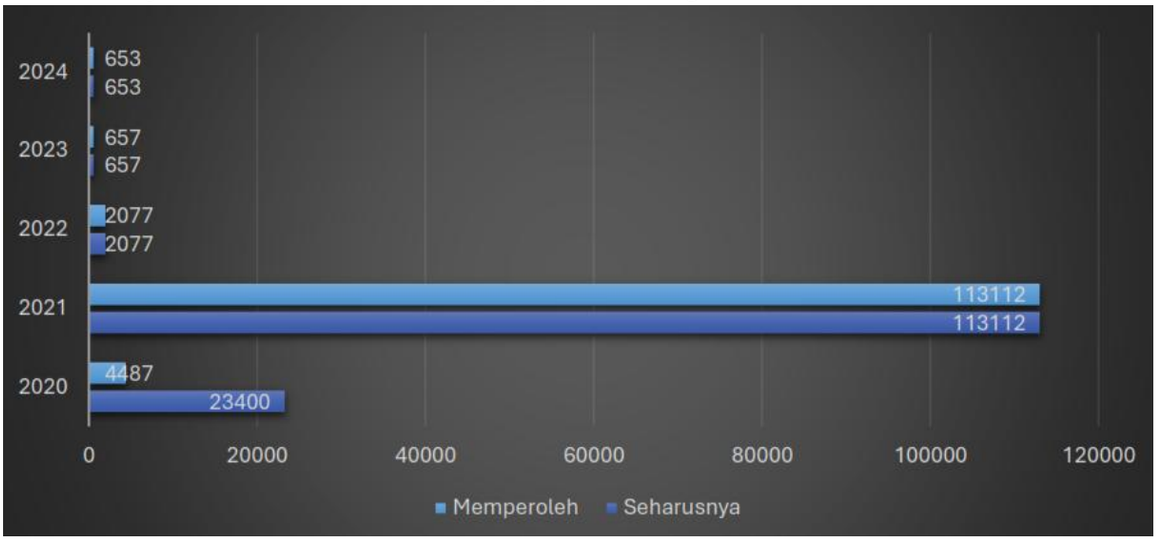
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut

PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa jumlah PMKS pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan drastis apabila dibandingkan dengan jumlah PMKS pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 hanya 19% PMKS yang seharusnya menerima bantuan dan tahun 2021 meningkat dengan capaian sebesar 100%. Sedangkan untuk tahun 2022 dengan jumlah PMKS sebanyak 2.077 jiwa dengan persentase capaian 100%. Pada tahun 2023 dengan jumlah PMKS sebanyak 657 jiwa dengan persentase capaian 100%. Di tahun 2024 PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 100% dengan jumlah PMKS sebanyak 653 jiwa.

Pendataan dan pengelolaan data PMKS sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu dibenahi. Dalam penanganan PMKS diperlukan data yang akurat dan akuntabel, sehingga kualitas hasil pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perlu lebih ditingkatkan.

Grafik 2. 94 - Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.2. Persentase PMKS yang Tertangani

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Data menunjukkan bahwa persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2020 dengan jumlah 23.400 PMKS, persentase yang PMKS yang tertangani hanya 19% dan tahun 2021 jumlah PMKS yang tertangani sebesar 113.112 jiwa dengan capaian 100%. Pada tahun 2022 jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 2.077 jiwa dengan capaian 100%, sedangkan pada tahun 2023 jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 2.077 jiwa dengan capaian 100%. Di tahun 2024 capaian persentase PMKS yang tertangani sebesar 100% dengan jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 653 jiwa. Penurunan jumlah PMKS dari tahun 2021 ke tahun 2022 sampai 2024 disebabkan adanya verifikasi data dan penerima bantuan dampak *Covid-19* pada tahun 2021 tidak lagi

diberikan pada tahun 2022 sampai 2024.

Tabel 2. 142 - Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	4.487	113.112	2.077	657	653
2	Jumlah PMKS yang ada	Orang	23.400	113.112	2.077	657	653
	Persentase PMKS yang tertangani	%	19	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.3. Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2020 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar hanya 19 % sedangkan tahun 2021 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun sebesar 113.112 jiwa dengan capaian 100%. Pada tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan sebanyak 2.077 jiwa pada tahun 2022, 657 jiwa pada tahun 2023 dan 653 jiwa di tahun 2024 dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 2. 143 - Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Dalam 1 tahun	Orang	4.487	113.112	2.077	657	653
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima Bantuan Sosial dalam 1 Tahun	Orang	23.400	113.112	2.077	657	653
	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	19	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.4. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Jenis Lainnya

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2020 adalah sebesar 40 persen dan tahun 2021 meningkat menjadi 100% dengan jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis sebanyak 36 orang sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 13 orang atau mencapai 100%. Dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 46 orang dengan capaian 100%. Di tahun 2024 tidak ada panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya dikarenakan adanya perubahan regulasi terkait pemberian bantuan sosial dalam bentuk kelompok.

Tabel 2. 144 - Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Jenis Lainnya Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	6	36	13	46	0
2	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang harusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	15	36	13	46	0
	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya	%	40	100	100	100	0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.5. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial dihitung dari jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dibagi dengan Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial. Berdasarkan data Dinas Sosial, panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial pada tahun 2020 sampai 2023 sebanyak 7 panti asuhan dengan capaian 100% setiap tahunnya. Akan tetapi di tahun 2024 panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial hanya 1, hal tersebut diakibatkan karena kemampuan fiskal daerah yang belum mampu untuk membiayai kebutuhan yang ada.

Tabel 2. 145 - Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Panti Sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	Unit	7	7	7	7	1
2	Jumlah Panti Sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	Unit	7	7	7	7	1
	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.6. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan data Dinas Sosial, jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial di Kabupaten Soppeng yaitu 2 WKBSM dengan capaian 100 % pada tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 sampai tahun 2023 tidak terdapat WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial atau capaian sebesar 0%. Di tahun 2024 jumlah WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 1 unit, sesuai dengan jumlah yang seharusnya sehingga capaian tersebut sebesar 100%.

Tabel 2. 146 - Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial	Unit	2	0	0	0	1
2	Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial	Unit	2	0	0	0	1
	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	100	0	0	0	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.7. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar 100% dan untuk tahun 2024 sebanyak 1584 jiwa, mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 365 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah korban yang menerima bantuan sama dengan jumlah korban yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Tabel 2. 147 - Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	Jiwa	147	150	202	365	1584
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	Jiwa	147	150	202	365	1584
	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.8. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2020-2023 tidak ada korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap karena tidak ada korban bencana yang membutuhkan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap. Pada saat bencana banjir terjadi, masyarakat lebih memilih untuk tetap di rumah masing-masing. Di tahun 2024 jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat sebanyak 258 jiwa dengan persentase capaian 100%.

Tabel 2. 148 - Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Jiwa	0	0	0	0	258
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala	Jiwa	0	0	0	0	258
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0	0	0	0	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.9. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Indikator persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2020 hanya 0,4% atau 80 jiwa dari total 19.229 jiwa yang seharusnya menerima. Selanjutnya pada tahun 2021 sampai pada tahun 2024 jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang harusnya telah menerima jaminan sosial sebesar 100% dimana terdapat 184 jiwa dan telah menerima jaminan sosial di tahun 2024.

Tabel 2. 149 - Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2020-2024

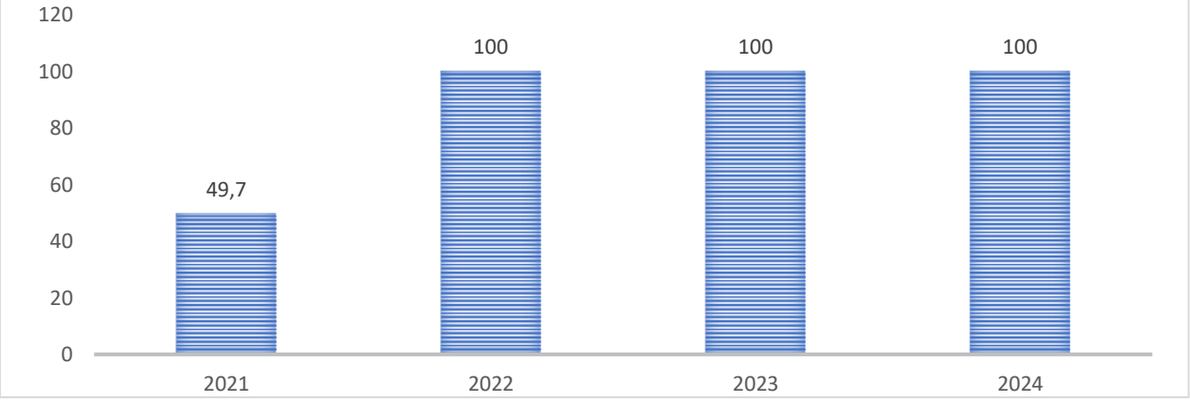
NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	80	3011	193	308	184
2	Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang harusnya telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	19.229	3011	193	308	184
	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	0,4	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, 2025

2.4.4.7.10. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti

Pada tahun 2021 persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 49,70 persen. Mengalami peningkatan di tahun 2022 sampai tahun 2024 dengan capaian sebesar 100 persen. Capaian tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik yang ada di bawah ini.

Grafik 2. 95 – Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Sosial, 2025

2.4.4.8. Urusan Tenaga Kerja

2.4.4.8.1. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun mengindikasikan hubungan antara pengusaha sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai penyedia jasa tenaga. Semakin tinggi sengketa antara pengusaha dengan pekerja menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang berakibat pada penurunan investasi. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng tidak terdapat angka sengketa antara pengusaha pekerja yang terjadi.

2.4.4.8.2. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Pada tahun 2021 jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 729 orang dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 447 orang atau mencatat capaian 61,32%. Di tahun 2022 capaian tersebut meningkat sebesar 95,53%. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 45 orang dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 647 orang atau dengan capaian 6,95%. Selanjutnya di tahun 2024 besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan kembali mengalami peningkatan sebesar 25,71% atau 154 orang pencari kerja yang ditempatkan dari 599 orang pencari kerja yang terdaftar. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan dengan persentase capaian 12,22% atau 86 orang pencari kerja yang ditempatkan dari 704 orang yang terdaftar.

Tabel 2. 150 - Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Jiwa	447	984	45	154	86

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
2	Jumlah Pencari Kerja Yang terdaftar	Jiwa	729	1030	647	599	704
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	61,32	95,53	6,95	25,71	12,22

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2026

2.4.4.8.3. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dilatih dari jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan. Data besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan tahun 2021 sampai 2025 mencapai 100%, dan jumlah tenaga kerja yang dilatih pada tahun 2022 sejumlah 152 orang. Pada tahun 2023 capaian sebesar 100 dengan jumlah tenaga yang dilatih sebanyak 80 tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan mengalami penurunan di tahun 2024 sebanyak 60 tenaga kerja dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2025 dengan tenaga kerja yang dilatih sebanyak 79 orang. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 151 - Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah tenaga yang dilatih	Tenaga Kerja	5	152	80	60	79
2	Jumlah Pendaftar pelatihan kewirausahaan	Tenaga Kerja	5	152	80	60	79
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2026

2.4.4.8.4. Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan Perlindungan adalah indikator untuk mengukur seberapa banyak perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keselamatan dan perlindungan terhadap karyawan, dihitung dari jumlah perusahaan yang menerapkan K3 dari total jumlah seluruh perusahaan di Wilayah Kabupaten Soppeng.

Keselamatan dan Perlindungan pada tahun 2021 jumlah perusahan yang menerapkan K3 sebanyak 48% dan jumlah perusahan di wilayah sebanyak 489 dengan capaian 9,82%. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 5,45% dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan capaian sebesar 2,3% atau dengan jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 95 perusahan dari jumlah perusahaan di wilayah sebanyak 4122 perusahan. Pada tahun 2024 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 mengalami penurunan sebesar 77 perusahaan dari 1.921 perusahaan atau dengan capaian sebesar 4,01%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan dengan persentase keselamatan dan perlindungan sebesar 1,72% atau 22 perusahaan yang menerapkan K3 dari 1.280 total perusahaan yang ada di kabupaten Soppeng. Data keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 152 - Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	Perusahaan	48	62	95	77	22
2	Jumlah Perusahaan di wilayah	Perusahaan	489	1137	4122	1921	1280
	Keselamatan dan perlindungan	%	9,82	5,45	2,3	4,01	1,72

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2026

2.4.4.8.5. Besaran Pekerja Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek menunjukkan seberapa besar jumlah pekerja/buruh Jamsostek dari total jumlah buruh/pekerja. Jumlah Pekerja Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek pada tahun 2021 dengan capaian 71,36% hal ini disebabkan jumlah buruh Jamsostek mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan dengan capaian 11,42% namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan capaian 21,64 dengan jumlah pekerja/buruh Jamsostek sebanyak 9.518 buruh dari jumlah pekerja atau buruh sebanyak 43.971 pekerja. Tahun 2024 menunjukkan persentase sebesar 54,92% atau sebanyak 38.944 pekerja yang menjadi peserta Jamsostek dari total sebanyak 70.913 pekerja. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek akan tetapi tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pekerja/buruh yang ada di Kabupaten Soppeng sehingga persentase capaian pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek sebesar 39,18%. Data besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 153 - Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pekerja/ Buruh JAMSOSTEK	Pekerja/Buruh	907	533	9.518	38.944	40.029
2	Jumlah Pekerja/ Buruh	Pekerja/Buruh	1.271	4.667	43. 971	70.913	102.166
	Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK	%	71,36	11,42	21,64	54,92	39,18

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2026

2.4.4.9. Urusan Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4.4.9.1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase perempuan di lembaga pemerintahan, menunjukkan persentase jumlah perempuan di lembaga pemerintah dari jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 dan 2022 capaian pekerja perempuan di lembaga pemerintah mengalami menjadi 13,79%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan pekerja perempuan sehingga menjadi 6.205 perempuan atau capaian sebesar 13,58%. Hal tersebut berlanjut di tahun 2024 dengan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 8,79%.

Tabel 2. 154 - Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Perempuan	6.315	6.315	6.205	3.650	4.419
2	Jumlah pekerja perempuan	Perempuan	45.794	45.794	45.680	41.534	43.338
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	13,79	13,79	13,58	8,79	10,20

Sumber: Dinas P3APPKB, 2026

2.4.4.9.2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta, menunjukkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta dari total jumlah pekerja perempuan. Secara persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 90,27% dengan jumlah pekerja perempuan sebanyak 41.339 perempuan. Pada tahun 2023 jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta sebanyak 43.325 perempuan dengan capaian 97,23%. Di tahun 2024 capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 91,21% dan berlanjut di tahun 2025 sebesar 89,90% yang diikuti

dengan menurunnya pekerja perempuan di lembaga swasta maupun jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kesempatan perempuan untuk berpartisipasi di lembaga swasta terbuka karena bertumbuhnya lembaga-lembaga swasta di daerah yang membutuhkan tenaga kerja baik perempuan maupun laki-laki.

Tabel 2. 155 - Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Perempuan	41.339	41.339	43.325	37.884	38.919
2	Jumlah pekerja perempuan	Perempuan	45.794	45.794	44.560	41.534	43.338
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	90,27	90,27	97,23	91,21	89,80

Sumber: Dinas P3APPKB, 2026

2.4.4.9.3. Rasio KDRT

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dari total jumlah rumah tangga. Rasio KDRT ditargetkan 0, akan tetapi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 masih ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2020 jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah 2 kasus dengan rasio 0,0035 dari jumlah seluruh rumah tangga. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 10 kasus atau dengan rasio 0,0127 dari jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 78.923 sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 8 kasus dengan rasio 0,01 dan pada tahun 2023 turun menjadi 5 kasus atau dengan rasio 0,006 dari jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 82.567 rumah tangga. Di tahun 2024 kasus KDRT mengalami peningkatan dengan jumlah 9 kasus dari 82.587 rumah tangga yang ada dengan rasio sebesar 0,011.

Kasus KDRT tersebut meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah rumah tangga. Sehingga kesadaran masyarakat tentang hukum kekerasan dalam rumah tangga terkait pembinaan dan penyadaran perlu dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan sosialisasi.

Tabel 2. 156 - Rasio KDRT Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KDRT	Kasus	2	10	8	5	9
2	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga	56.994	78.923	79.714	82.567	82.587
	Rasio KDRT	%	0,0035	0,0127	0,01	0,006	0,011

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.4. Persentase Jumlah Pekerja Dibawah Umur

Persentase jumlah pekerja dibawah umur tidak menjadi indikator kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sehingga tidak ada data terkait indikator ini.

2.4.4.9.5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan, menunjukkan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dari total jumlah angkatan kerja perempuan. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Soppeng sebanyak 45.794 orang atau 89,1% dari jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 51.394 orang. Partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 97,23% pada tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 43.325 orang dari jumlah pekerja perempuan sebanyak 44.560 orang. Di tahun 2024 capaian tersebut kembali mengalami peningkatan sebesar 97,24% akan tetapi jumlah pekerja perempuan dan partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan yakni 41.534 orang dari 42.712 orang.

Penurunan angka partisipasi kerja perempuan karena banyak dari

perempuan pekerja meninggalkan pekerjaan untuk mengurus keluarga, terutama setelah melahirkan. Selain itu, juga diperburuk dengan adanya pandemi yang membuat sejumlah tenaga kerja perempuan kehilangan pekerjaan, serta beralihnya kegiatan belajar anak dari sekolah ke rumah yang membutuhkan pendampingan orang tua khususnya ibu.

Tabel 2. 157 - Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Partisipasi Angkatan kerja perempuan	Perempuan	45.794	45.794	43.325	43.225	41.534
2	Jumlah pekerja perempuan	Perempuan	51.394	51.394	44.560	44.560	42.712
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	89,1	89,1	97,23	97,23	97,24

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, menunjukkan jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu dari jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 semua pengaduan/laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mencapai 100%, dan jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu pada tahun 2024 sebanyak 47 kasus.

Tabel 2. 158 - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Pengaduan/ Laporan	24	25	39	47	45
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Pengaduan/ Laporan	24	25	39	47	45
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit, menunjukkan jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit dari jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit tahun 2020 sampai dengan 2024 mencapai 100%, dengan jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit pada tahun 2024 sebanyak 19 orang.

Tabel 2. 159 - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Jiwa	5	25	20	11	19
2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit	Jiwa	5	25	20	11	19
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.8. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, menunjukkan jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dari jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 realisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Semua korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial memperoleh penanganan melalui koordinasi dengan pihak yang terkait dalam penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan dan pada tahun 2021, 2022 dan 2024 sebanyak 0 kasus serta di tahun 2023 terdapat 1 kasus.

Anak direhabilitasi berdasarkan hasil kesepakatan diversi dan penetapan atau berdasarkan kebutuhan anak baik sebagai korban ataupun pelaku. Pada saat direhabilitasi anak tetap bisa ikut belajar, baik secara online atau belajar tatap muka. Setelah masa rehabilitasi selesai, anak dikembalikan ke orang tua namun tetap diawasi oleh pekerja sosial selama 3 kali kunjungan rumah.

Tabel 2. 160 - Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	Jiwa	5	0	0	1	0
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos	Jiwa	5	0	0	1	0
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.9. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menunjukkan jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari keseluruhan jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan. Jika dilihat dari persentase cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan

pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2020 sebanyak 2 perkara dengan capaian 100% sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi 7 perkara dengan capaian 100%. Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 13 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 3 kasus dan tahun 2024 meningkat sebanyak 4 kasus yang diputuskan dengan capaian 100%.

Tabel 2. 161 - Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus- Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	2	7	13	3	4
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Perkara	2	7	15	3	4
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	86,67	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.10. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, menunjukkan jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dari jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 korban yang membutuhkan bantuan hukum seluruhnya mendapatkan layanan bantuan hokum atau mencapai 100%. Pada tahun 2024 jumlah kasus yang korban mendapat layanan bantuan hukum sebanyak 24 orang/jiwa dengan cakupan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 100%.

Upaya mengantisipasi dan menurunkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dilakukan dengan sosialisasi baik di sekolah, lingkungan masyarakat dan organisasi pemerintahan. Semua pihak harus terlibat dalam pencegahan, terutama keluarga sebab semakin baik ketahanan keluarga maka perempuan dan anak akan terhindar dari kekerasan.

Tabel 2. 162 - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	Jiwa	24	25	39	0	24
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Jiwa	24	25	39	0	24
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.11. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, menunjukkan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan dari keseluruhan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT. Pada tahun 2020 jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan 4 orang atau sebesar 16,67 % mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 16 orang dengan capaian 0,64% dari jumlah yang tercatat di UPT, sedangkan tahun 2023 sebesar 6,38%. Di Tahun 2024 terdapat 1 perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan dengan jumlah perempuan dan anak korban

kekerasan yang tercatat di UPT sebanyak 45 orang/jiwa atau dengan capaian 2,22%.

Tabel 2. 163 - Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Jiwa	4	16	0	3	1
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Jiwa	24	25	39	47	45
	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	16,67	0,64	0	6,38	2,22

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.12. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, menunjukkan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya dari keseluruhan jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial. Berdasarkan data, pada tahun 2020 dan 2021 mencapai 100 persen atau keseluruhan jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial telah disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya sedangkan tahun 2023 terdapat 5 kasus kekerasan dan anak yang ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya dengan capaian 100%. Di tahun 2024 jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali sebanyak 1 orang/jiwa dengan persentase sebesar 100%.

Tabel 2. 164 - Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	Jiwa	4	25	0	5	1
2	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	Jiwa	4	25	0	5	1
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	0	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.13. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SD menunjukkan perbandingan APM SD perempuan dengan APM SD laki-laki. Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki. Jumlah penduduk perempuan adalah separuh dari seluruh jumlah penduduk, kesetaraan pendidikan perempuan akan memberikan peran aktif perempuan dalam pembangunan dan merupakan determinan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Rasio APM perempuan/laki-laki cenderung meningkat.

Tabel 2. 165 - Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	APM-SD Perempuan	Perempuan	9.239	9.398	9.879	8.698	8.698
2	APM-SD Laki-laki	Laki-laki	10.046	10.071	9.960	9,169	9,169
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD	Poin	0,92	0,93	0,99	0,95	0,95

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2020 dan 2023 rasio APM perempuan

terhadap laki-laki pada jenjang yang sama menunjukkan angka di bawah 1. Hal ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan SD murid perempuan yang bersekolah lebih sedikit dibandingkan dengan murid laki-laki, demikian hal nya pada tahun 2024 angka realisasi masih 0,95 poin.

2.4.4.9.14. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMP menunjukkan perbandingan APM SMP perempuan dengan APM SMP laki-laki. Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMP berfluktuasi sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024. Namun capaian tetap pada angka di atas 1 atau jumlah perempuan yang bersekolah lebih banyak dibandingkan laki-laki setiap tahunnya. Pada tahun 2021 mencapai 1,042 poin sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi 1,24 poin dengan jumlah APM SMP perempuan berjumlah 8.669 perempuan dan 6.978 laki-laki. Pada tahun 2023 dan 2024 rasio APM SMP sebesar 1,06 poin, artinya murid perempuan lebih banyak dari murid laki-laki.

Tabel 2. 166 - Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	APM-SMP Perempuan	Perempuan	4.182	3.526	8.669	3.095	3.095
2	APM-SMP Laki-laki	Laki-laki	3.907	3.383	6.978	2.923	2.923
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP	Poin	1,07	1,042	1,24	1,06	1,06

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.15. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang pendidikan SMA menunjukkan perbandingan APM SMA perempuan dengan APM SMA laki-laki. Angka Partisipasi Murni perempuan setiap tahunnya lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada tahun 2020 Rasio APM Perempuan terhadap APM laki-laki di SMA sebesar 0,99 mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 0,80 poin dan meningkat kembali pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian 1,43 poin seiring dengan peningkatan jumlah murid SLTA perempuan sebanyak 1.984 orang dan laki-laki sebanyak 1.389 orang.

Tabel 2. 167 - Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18	Perempuan	4.217	1.416	6.439	1.984	1.984
2	Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18	Laki-laki	4.271	1.768	7.484	1.389	1.389
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA	Poin	0,99	0,8	0,86	1,43	1,43

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.16. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang Perguruan Tinggi menunjukkan perbandingan APM perempuan di Perguruan Tinggi dengan APM laki-laki. Pada tahun 2019 rasio APM perempuan/ Laki-laki di perguruan tinggi sebesar 3,00 poin dan pada Tahun 2020 menjadi 3,50 poin dan menurun pada tahun 2021 menjadi 1,45 poin dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 dengan capaian 1,66 poin dengan Jumlah anak perempuan di tingkat Perguruan tinggi usia 19-24 tahun sebanyak 1.227 orang dan laki-laki sebanyak 738 orang.

Tabel 2. 168 - Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak perempuan di tingkat Perguruan tinggi usia 19-24 tahun	Perempuan	75	501	1.559	1.583	1.227
2	Jumlah anak laki-laki di tingkat Pendidikan Tinggi usia 19-24 tahun	Laki-Laki	25	143	1.072	1.251	738
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi	Poin	3	3,5	1,45	1,27	1,66

Sumber: Dinas P3APPKB, 2024

2.4.4.9.17. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun, menunjukkan perbandingan AMH 15-24 perempuan dengan AMH 15-24 laki-laki. Rasio AMH 15-24 perempuan terhadap laki-laki pada tahun 2020 dengan capaian 0,97 poin dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,98 poin, sedangkan pada tahun 2022 data AMH belum ada. Pada tahun 2023 dan 2024 rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki adalah 0,98 poin.

Tabel 2. 169 - Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	AMH 15-24 perempuan	Perempuan	9.871	19.034	n/a	90,91	90,91
2	AMH 15-24 laki-laki	Laki-laki	10.131	19.353	n/a	93,2	93,2
	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	Poin	0,97	0,98	n/a	0,98	0,98

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.9.18. Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian, dihitung dari banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian dari total banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian. Pada tahun 2021 dan 2022 kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian adalah sebesar 19,22%. Di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 19,25% dan berlanjut hingga tahun 2024 sebesar 19,44% akan tetapi menurun di tahun 2025 sebesar 17,62%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya minat perempuan untuk berpenghasilan sendiri dan Perempuan sudah memahami pentingnya kesetaraan gender. Pada tahun 2025 terdapat pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian sebanyak 5.797 pekerja dari 32.898 pekerja upahan di sektor non pertanian.

Tabel 2. 170 - Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian	Pekerja	4.952	4.952	4.961	5.395	5.797
2	Banyaknya pekerja upahan di sektor non	Pekerja	25.764	25.764	25.774	27.748	32.898
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	%	19,22	19,22	19,25	19,44	17,62

Sumber: Dinas P3APPKB, 2026

2.4.4.10. Urusan Pangan

2.4.4.10.1. Penguatan Cadangan Pangan

Penyediaan Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional, sehingga setiap daerah berkewajiban dalam melakukan penguatan cadangan pangan di wilayah masing-masing. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, diatur mengenai Jumlah Cadangan Beras sebagai pangan utama tiap daerah. Adapun penguatan cadangan pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 yaitu sebagai berikut ini.

Tabel 2. 171 - Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten Soppeng	Ton	25,34	14,52	15,00	24,00	22,22
	Penguatan Cadangan Pangan ((Jumlah Cadangan Pangan /	%	25,34	14,52	15,00	24,00	22,22

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
	100)*100%)						

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2026

Pada tahun 2021 penguatan cadangan pangan mencapai 25,34 ton, menurun menjadi 14,52 ton pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 15,00 ton dan meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 24,00 ton, sedangkan pada tahun 2025 mencapai 22,22 ton. Penguatan cadangan pangan menjadi instrumen strategis untuk menjamin akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya, serta menjaga stabilisasi harga pangan.

2.4.4.10.2. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama menggambarkan kondisi ketersediaan bahan pangan utama yang diproduksi terhadap kebutuhan pangan penduduk. Untuk wilayah Kabupaten Soppeng, bahan pangan utama yang dihasilkan terdiri dari Beras, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Adapun kondisi capaian ketersediaan pangan utama untuk Tahun 2021-2025 yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 172 - Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun	Kg	83.556.517	89.025.171	76.209.600	82.010.405	99.563.761
2	Jumlah penduduk	Jiwa	237875	238,612	240.955	241.364	241.732
	Ketersediaan Pangan Utama	%	351,26	373,10	316,66	339,78	411,88

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2026

Ketersediaan Pangan Utama (%) dari tahun 2021-2025 selalu berada pada kondisi di atas 100% yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama melebihi kebutuhan penduduk atau mengalami surplus. Pada tahun 2021 ketersediaan pangan utama mencapai 351,26%. Tahun 2022 mengalami peningkatan dengan capaian 373,10%, akan tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan angka capaian sebesar 316,66%. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan capaian sebesar 339,78%. Kondisi di tahun 2025 ketersediaan pangan utama kembali mengalami peningkatan sebesar 411,88%. Capaian ketersediaan pangan utama ini sangat bergantung pada produksi hasil pertanian, khususnya 4 (empat) jenis komoditi pangan utama yaitu Beras, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.

2.4.4.10.3. Ketersediaan Energi dan Protein

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita menggambarkan kondisi ketersediaan jumlah energi dan protein yang terkandung dalam bahan pangan yang ada di Kabupaten Soppeng terhadap kebutuhan penduduk. Standar kebutuhan energi per kapita per hari ideal yaitu 2.400 Kkal, dan protein 63 gram per kapita per hari. Adapun kondisi ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 yaitu sebagai berikut ini.

Tabel 2. 173 - Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Ketersediaan pangan/kapita/hari	Perkapita /hari	478,62	512	437,66	440,97	453,76
2	Kandungan Kalori	Kkal	2.400	2.400	2400	2.400	2.400
3	Kandungan Protein	Gram	63	63	63	63	63
4	BDD	%	100	100	100	100,00	100,00
	Ketersediaan Energi Perkapita (KKal/kapita/hari)	Kkal	11.995	12.802	10.383	11.061	11.358
	Ketersediaan Protein Perkapita	Gram	288,20	308,61	265,61	265,00	273,21

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
	(Gram/kapita/hari)						

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2026

Ketersediaan Energi dan Protein dari tahun 2021-2025 selalu berada pada kondisi di atas standar konsumsi ideal karena melimpahnya bahan pangan yang dihasilkan, terutama komoditi pangan penghasil energi seperti padi-padian dan umbi-umbian, serta penghasil protein dari hewani maupun nabati. Pada tahun 2021 ketersediaan energi perkapita mencapai 11.995 Kkal/kapita/hari, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 12.802 Kkal/kapita/hari, dan tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 10.383 Kkal/kapita/hari. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 11.061 Kkal/kapita/hari dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 11.358 Kkal/kapita/hari.

Ketersediaan protein pada tahun 2021 mencapai 288,20 gram/kapita/hari sedangkan untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 308,61 gram/kapita/hari dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 265,61,61 gram/kapita/hari, sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi 265,00 gram/kapita/hari. Pada tahun 2025 ketersediaan protein perkapita kembali mengalami penurunan dengan capaian 273,21 gram/kapita/hari.

2.4.4.10.4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan Pembinaan terkait keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian Ketahanan Pangan, tidak hanya dari segi ketersediaan, tetapi juga mencakup aman atau tidaknya suatu jenis pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan salah satunya dengan melakukan pengujian terhadap sampel bahan pangan yang diperjual belikan di pasar-pasar yang ada. Adapun hasil pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 174 - Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku	Sampel	8	7	0	13	10
2	Jumlah total sampel pangan yang di Perdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan	Sampel	8	9	0	15	10
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	77,78	0	86,67	100

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Pada 2021 capaian sebesar 100% sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan angka tercatat 77,78% dan pada tahun 2023 tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk pengumpulan sampel pangan. Di tahun 2024 pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 86,67% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 100%. Upaya membangun kesadaran masyarakat khususnya pengusaha atau pedagang bahan pangan terus dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan sosialisasi maupun kunjungan langsung, agar bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dari berbagai jenis zat berbahaya.

2.4.4.11. Urusan Pertanahan

2.4.4.11.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Soppeng pada tahun

2021 dengan capaian 95,37%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 34,13% hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah luas wilayah dari tahun sebelumnya yang tercatat seluas 88.462,23 Ha sedangkan luas lahan yang bersertifikat hanya mencapai 30.191,03 Ha. Pada tahun 2023 persentase luas lahan bersertifikat mencapai 100% dengan luas lahan bersertifikat tercatat seluas jumlah wilayah yaitu 12.885,95 Ha. Di tahun 2024 dan 2025 terdapat peningkatan jumlah luas lahan bersertifikat sebanyak 50.980,34 Ha atau sebesar 36,78% dari luas wilayah yang ada.

Tabel 2. 175 - Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Luas Lahan bersertifikat	Ha	781,39	30.191,03	12.885,95	50.980,34	50.980,34
2	Jumlah luas wilayah	Ha	819,29	88.462,23	12.885,95	138.600,00	138.600,00
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	95,37	34,13	100	36,78	36,78

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2026

2.4.4.11.2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Kasus tanah negara di Kabupaten Soppeng di tahun 2021 masih terdapat kasus yang belum terselesaikan diakibatkan karena adanya pembatasan kegiatan tatap muka sebagai wujud dari kegiatan mediasi antara pihak pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang melakukan klaim, dengan penyelesaian kasus tanah negara mencapai 50% dengan 3 kasus dari 6 kasus yang terdaftar. Pada tahun 2023 jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan sebanyak 1 kasus dari 2 kasus yang terdaftar atau mencatat capaian 50%. Di tahun 2024 tidak adanya kasus yang terdaftar maupun yang diselesaikan terkait tanah negara. Kondisi di tahun 2025 persentase penyelesaian kasus tanah negara mencapai 100% dengan jumlah kasus yang selesai dan terdaftar sebanyak 1 kasus.

Tabel 2. 176 - Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	3	1	1	0	1
2	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	6	3	2	0	1
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	50	33,33	50	0	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2026

2.4.4.11.3. Penyelesaian Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Izin lokasi tersebut dapat diselesaikan dengan persentase sebesar 100% dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, jumlah izin lokasi yang diselesaikan pada tahun 2025 sebanyak 24 izin.

Tabel 2. 177 - Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Izin Lokasi	Izin	4	19	22	22	24
2	Permohonan Izin Lokasi	Izin	4	19	22	22	24
	Penyelesaian Izin Lokasi	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2026

2.4.4.12. Urusan Lingkungan Hidup

2.4.4.12.1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dokumen tersebut sampai saat ini belum disusun.

Tabel 2. 178 - Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Dokumen RPPLH	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026

2.4.4.12.2. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Dokumen KLHS di Kabupaten Soppeng telah disusun di tahun 2020 dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng periode 2021-2026. Untuk RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029, dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 telah disusun pada tahun 2024.

Tabel 2. 179 - Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Dokumen KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi (Ada/Tidak ada)	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026

2.4.4.12.3. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar 66% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan capaian 65%. Pada tahun 2023 capaian tersebut menurun dengan sebesar 11,47% dan di tahun 2024 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 6,78%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan kembali dengan persentase sebesar 3%. Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani pada tahun 2025 sebanyak 75 izin sedangkan total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota berjumlah 1 izin.

Tabel 2. 180 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Izin	70	110	14	8	1
2	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		106	169	122	118	75
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	%	66	65	11,47	6,78	1,34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026

2.4.4.12.4. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat

Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan kebersihan lingkungan. Pendidikan dan pelatihan tersebut setiap tahun dilaksanakan dengan frekuensi 1-3 kali pada tahun 2021-2023 akan tetapi pada tahun 2024 tidak terdapat pendidikan dan pelatihan masyarakat. Tren penurunan jumlah pelatihan yang diberikan ke lembaga kemasyarakatan dari tahun ke tahun tersebut dikarenakan alokasi anggaran yang tidak mencukupi maupun perubahan prioritas pembangunan. Kondisi di tahun 2025, jumlah pelatihan yang diberikan kepada Lembaga kemasyarakatan sebanyak 1 kali.

Tabel 2. 181 - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Kali	1	1	1	0	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026

2.4.4.12.5. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Pemberian penghargaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada individu dan masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Setiap tahunnya di Kabupaten Soppeng dilaksanakan pemberian penghargaan lingkungan hidup dengan harapan masyarakat Kabupaten Soppeng semakin peduli dan berbudaya lingkungan.

Tabel 2. 182 - Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Ada/Tidak ada)	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026

2.4.4.12.6. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha di Kabupaten Soppeng dapat ditangani dengan baik, setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat segera ditangani dan diselesaikan di tahun berkenaan.

Tabel 2. 183 - Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Pengaduan	0	1	4	4	1
2	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Pengaduan	0	1	4	4	1
	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/kota.	%	-	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026

2.4.4.12.7. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Soppeng mencakup wilayah Ibu kota Kecamatan di tiap kecamatan. Area pelayanan belum dapat menjangkau daerah-daerah terpencil disebabkan oleh masih

kurangnya armada kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga persentase cakupan area pelayanannya pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 27% dengan luas area pelayanan pengelolaan sampah 423,5 Km^2/Ha. Pada tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan dengan capaian sebesar 28,6% atau 430 Km^2/Ha dari luas area kabupaten/kota sebesar 1500 Km^2/Ha. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan capaian sebesar 31,03% dikarenakan luas area wilayah Kabupaten Soppeng mengalami penyesuaian yakni sebesar 1.385,546 Km^2 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 200.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah mengalami peningkatan secara bertahap dalam lima tahun terakhir. Meskipun ada sedikit stagnasi pada tahun 2023 dan 2024, peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya dalam memperluas cakupan pelayanan pengelolaan sampah mulai menunjukkan hasil yang positif. Meskipun terjadi peningkatan persentase cakupan area pelayanan, masih ada wilayah yang belum terjangkau oleh pengelolaan sampah. Peningkatan cakupan layanan lebih lanjut dilakukan dengan upaya untuk memperluas area pelayanan perlu ditingkatkan dengan fokus pada daerah-daerah yang masih belum terlayani.

Tabel 2. 184 - Cakupan Area Pelayanan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/ha)	Km2/Ha	423,5	423,5	430	430	430
2	luas area kabupaten/kota (km2/ha)	Km2/Ha	1.557	1.557	1.500	1.500	1.386
	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	27	27	28,6	28,6	31,03

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026

2.4.4.12.8. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Persentase jumlah sampah yang tertangani dihitung dari jumlah sampah yang tertangani dibagi dengan total jumlah timbulan sampah yang ada. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 65,85% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 74,06%. Pada tahun 2022 mencatat capaian 77,57% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini seiring dengan peningkatan jumlah sampah yang tertangani sebanyak 26.678,38 Ton. Pada tahun 2023 persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami penurunan sebesar 66,5%, hal ini seiring dengan penurunan penanganan sampah sebesar 22.918,35 Ton. Di tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah timbulan sampah yang diikuti oleh jumlah sampah yang ditangani dengan persentase sebesar 80,29%. Meskipun ada fluktuasi, tren secara keseluruhan menunjukkan upaya yang baik untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah. Agar lebih banyak sampah dapat tertangani, perlu adanya pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik dan pelibatan lebih banyak pihak, seperti masyarakat dan sektor swasta.

Tabel 2. 185 - Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampah yang tertangani	Ton	23,016.90	25.962,74	26.678,38	22.918,35	28.245,64
2	Total jumlah timbulan sampah di kabupaten	Ton	34,951.09	35.057,69	34.393,80	34.463,15	35.179,43
	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	65.85	74,06	77,57	66,5	80,29

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.4.4.12.9. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan pengembangan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) merupakan salah satu indikator dalam penilaian Program Adipura. Nilai TPA Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 tidak ada penilaian TPA dalam program Adipura yang dilakukan. Pada tahun 2022 nilai TPA Kabupaten Soppeng sebesar 63,52 sedangkan pada tahun 2023 nilai TPA Kabupaten Soppeng sebesar 73,90 dan kembali mendapatkan Piala Adipura dalam kategori kota kecil dan atau kota sedang. Capaian tersebut meningkat pada tahun 2024 dengan nilai 75 akan tetapi menurun di tahun 2025 dengan nilai 73. Berdasarkan data tersebut perlu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan TPA agar terus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Program Adipura, agar tetap dapat meraih penghargaan tersebut di masa mendatang. Melakukan identifikasi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan TPA, seperti kekurangan fasilitas, peningkatan volume sampah, atau masalah teknis lainnya. Pemantauan yang lebih ketat dan evaluasi terhadap kebijakan dan operasional.

Tabel 2. 186 - Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai TPA (Program Adipura)	Nilai	-* (tidak ada penilaian)	63,52	73,9	75	73

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026

2.4.4.12.10. Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Diterbitkan

Pengelolaan sampah oleh swasta harus mendapatkan izin oleh pemerintah setempat. Pada tahun 2021 hingga tahun 2025 bukan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan izin pengelolaan sampah oleh swasta, akan tetapi hanya akan memberikan rekomendasi pengelolaan sampah yang akan diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

2.4.4.12.11. Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 dan 2022 persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan sebesar 2,94%. Pada tahun 2023 sampai tahun 2025 sudah tidak ada lagi pengelolaan sampah oleh pihak swasta. Penurunan jumlah pengelola sampah swasta yang taat terhadap peraturan di Kabupaten Soppeng menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan jumlah pengelola swasta dan kepatuhan mereka terhadap regulasi. Selain itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengawasan, penegakan hukum, serta kebijakan terkait pengelolaan sampah agar pengelolaan sampah oleh swasta dapat kembali berfungsi dengan baik dan mematuhi peraturan yang ada.

Tabel 2. 187 - Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan	Pengelola Sampah Swasta	1	1	0	0	0
2	Jumlah Pengelolaan sampah oleh swasta	Pengelola Sampah Swasta	34	34	0	0	0
	Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	2,94	2,94	0	0	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026

2.4.4.13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.4.4.13.1. Rasio Penduduk ber-KTP Per-Satuan Penduduk

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kepemilikan KTP per satuan penduduk Kabupaten Soppeng, Angka ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP dengan Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah (Wajib KTP) Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk kurun waktu 2021-2025 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Rasio tersebut sudah tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah mengalami peningkatan hampir tiap tahun dan sudah hampir mencapai angka 1. Rasio penduduk ber KTP di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 sebesar 0,99 poin yang selanjutnya dapat dilihat secara rinci pada table berikut ini.

Tabel 2. 188 - Penduduk ber-KTP Per-Satuan Penduduk Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	Jiwa	181.248	184.541	186.825	186.757	186.920
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	Jiwa	182.588	186.218	188.256	189.392	189.311
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Poin	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

2.4.4.13.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase bayi yang memiliki akte kelahiran. Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran bermanfaat untuk kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Rasio bayi berakte kelahiran dihitung dengan membandingkan jumlah bayi yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi, rasio bayi berakte kelahiran. Tahun 2021 capaian rasio bayi berakte kelahiran sebesar 0,98 poin meningkat pada tahun 2022 sampai 2024 dengan capaian 0,99 poin. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan seluruh bayi di kabupaten Soppeng berakte kelahiran, hal tersebut didukung oleh pelayanan dan kemudahan dalam pengurusan akte kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencataatn Sipil. Berikut data Rasio bayi ber-akte kelahiran di Kabupaten Soppeng kurun waktu 2021-2025.

Tabel 2. 189 - Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	Bayi	6.490	57.526	2.856	14.473	3.984
2	Jumlah bayi	Bayi	6.645	57.938	2.877	14.575	3.984
	Rasio bayi berakte kelahiran	Poin	0,98	0,99	0,99	0,99	1,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

2.4.4.13.3. Rasio Pasangan ber-Akte Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akte. Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, diketahui bahwa jumlah pasangan nikah yang ada di Kabupaten Soppeng sudah berakte nikah, rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2021 sebesar 0,64 poin dan mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin di tahun 2022 dengan capaian 0,67 poin. Pada tahun 2023 rasio pasangan berakte nikah mengalami peningkatan menjadi 0,71 poin dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 0,76 poin. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya kembali peningkatan dengan rasio pasangan berakta nikah sebesar 0,80 poin.

Rasio pasangan berakte nikah tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 190 - Rasio Pasangan ber-Akte Nikah Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pasangan nikah berakta nikah	Pasangan	70.953	74.367	79.803	85.030	89.166
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	111.560	111.634	112.630	112.399	111.729
	Rasio pasangan berakta nikah	Poin	0,64	0,67	0,71	0,76	0,80

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

2.4.4.13.4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah Kabupaten Soppeng telah memiliki database kependudukan pada skala Provinsi. Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala Provinsi, berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng sudah tersedia. Database kependudukan dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, database kependudukan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut. Ditambah lagi, dengan adanya program yang dijalankan secara online terpadu, memudahkan koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi untuk dilakukan.

Tabel 2. 191 - Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Soppeng Tahun 2025

KECAMATAN	LUAS AREA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM)
LALABATA	278	24.588	25.668	50.256	180,78
GANRA	57	5.591	6.068	11.659	204,54
CITTA	40	3.970	4.244	8.214	205,35
MARIORIWAWO	300	24.055	25.541	49.596	165,32
MARIORIAWA	320	14.332	15.042	29.374	91,79
DONRI-DONRI	222	11.926	12.806	24.732	111,41
LILIRIAJA	96	13.840	15.070	28.910	301,15
LILIRILAU	187	18.669	20.367	39.036	208,75
TOTAL	***1.500***	***116.971***	***124.806***	***241.777***	***161,18***

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

2.4.4.13.5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah KTP yang diterbitkan sudah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Soppeng telah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK.

2.4.4.13.6. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan database kependudukan kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang.

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Soppeng, angka ini dihitung dari jumlah KTP ber- NIK yang diterbitkan dari total jumlah penduduk Wajib KTP. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng cakupan penerbitan KTP, cakupan KTP dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 cakupan penerbitan KTP sebesar 99,27% menurun di tahun 2022 dengan capaian 99,1% dan tahun 2023 mengalami peningkatan dengan capaian 99,24%. Terjadi penurunan capaian pada tahun 2024 dengan cakupan penerbitan KTP sebesar 98,61% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2025 dengan capaian sebesar 98,74%. Cakupan Penerbitan KTP Tahun 2021-2025 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 192 - Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	KTP	181.248	184.541	186.825	186.757	186.920
2	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	182.588	186.218	188.256	189.392	189.311
	Cakupan penerbitan KTP	%	99,27	99,1	99,24	98,61	98,74

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

2.4.4.13.7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Soppeng, angka ini dihitung dari jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dari total jumlah kelahiran di tahun bersangkutan. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng cakupan penerbitan akta kelahiran pada tahun 2021 sampai tahun 2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 cakupan penerbitan akta kelahiran sebesar 97,67%. Di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 99,29% dan menurun pada tahun 2023 dengan capaian 99,27% kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan 0,03% dengan capaian 99,30%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan capaian sebesar 99,61%.

Cakupan penerbitan akta kelahiran tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 193 - Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan	Jiwa	6.490	57.526	2.856	14.473	56.067
2	Jumlah kelahiran ditahun bersangkutan	Jiwa	6.645	57.938	2877	14.575	56.287
	Cakupan Penerbitan Akta kelahiran	%	97,67	99,29	99,27	99,30	99,61

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

2.4.4.14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.4.4.14.1. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik adalah jumlah kantor pemerintahan desa yang berfungsi dengan kondisi baik dan layak pakai pada masing-masing pemerintahan desa. Pada tahun 2020 terdapat 49 desa di Kabupaten Soppeng dengan keseluruhan pemerintahan desa telah memiliki kantor pemerintahan desa yang berfungsi baik dan beroperasi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan desa. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 jumlah kantor pemerintahan desa yang baik mengalami penurunan sebanyak 5 unit atau mencapai 44 unit atau mencapai 89,80%. Pada tahun 2023 bertambah 1 kantor sehingga menjadi 45 kantor pemerintahan desa yang baik dengan capaian sebesar 92%. Di tahun 2024 cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik mengalami peningkatan sebesar 96%. Kondisi di tahun 2025 menujukkan capaian sebesar 100% yakni semua kantor desa berada pada konsisi baik. Peningkatan capaian tersebut disebabkan adanya pembangunan kantor desa yang dilakukan, pembangunan tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat setempat. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 194 – Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Unit	44	44	45	47	49
2	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Unit	49	49	49	49	49
	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	89,8	89,8	92	96	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2026

2.4.4.14.2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. LPM mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan telah dibentuk LPM dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

Pada Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 jumlahnya kelompok binaan LPM di Kabupaten Soppeng sebanyak 210 kelompok sehingga meningkat menjadi rata-rata 3 kelompok binaan LPM pada masing-masing LPM. Di tahun 2024 dan 2025 terjadi penurunan kelompok binaan LPM dengan jumlah kelompok sebanyak 70 sehingga rata-rata jumlah kelompok

binaan sebanyak 1 kelompok. Salah satu penyebab menurunnya jumlah kelompok binaan LPM dikarenakan kurang aktif dan inisiatifnya kelompok binaan, sehingga binaan yang dilakukan tidak efektif dan efisien. Pengurangan jumlah kelompok tersebut dilakukan agar mampu memaksimalkan binaan yang dilakukan oleh LPM terhadap kelompok binaannya.

Tabel 2. 195 - Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pembinaan Masyarakat (LPM) Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	210	210	210	70	70
2	Jumlah LPM	Lembaga	70	70	70	70	70
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Rata-Rata	3	3	3	1	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2026

2.4.4.14.3. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Ruang lingkup pembinaan Tim Penggerak PKK baik desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah/pusat. Kelompok binaan PKK bergerak di penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dibina secara teknis oleh Tim Penggerak PKK.

Rata-rata jumlah binaan PKK adalah jumlah kelompok binaan PKK dari jumlah seluruh PKK di Kabupaten Soppeng. PKK di Kabupaten Soppeng sejumlah 70 terdiri dari PKK Kabupaten 1, PKK Kecamatan 8 dan PKK Desa/Kelurahan 70. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2021-2023 dengan jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 237 atau rata-rata tercatat 3 kelompok. Di tahun 2024 dan 2025 jumlah kelompok binaan PKK mengalami peningkatan sebanyak 770 kelompok, dengan rata-rata jumlah kelompok binaan sebanyak 10 kelompok. Peningkatan jumlah kelompok tersebut dikarenakan karena meningkatnya layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, sehingga hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah kelompok binaan PKK di tahun 2024/2025 yang didukung oleh Tim Penggerak PKK baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan.

Tabel 2. 196 - Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	237	237	237	770	770
2	Jumlah PKK	Lembaga	79	79	79	79	79
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	3	3	3	10	10

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2026

2.4.4.14.4. Persentase LPM Aktif

Lembaga pemberdayaan masyarakat merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Jumlah LPM di Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir dari tahun 2021-2025 berjumlah 70 LPM dengan tingkat capaian persentase LPM aktif mencapai 100%.

Tabel 2. 197 - Persentase LPM Aktif Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah LPM aktif	Lembaga	70	70	70	70	70
2	Jumlah LPM	Lembaga	70	70	70	70	70
	Persentase LPM Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2026

2.4.4.14.5. Persentase LPM Berprestasi

LPM berprestasi adalah LPM yang mampu berperan pada aspek tertentu dalam menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat mewujudkan pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pembangunan. Seleksi terhadap LPM untuk mendapatkan LPM berprestasi merupakan kebijakan yang sangat strategis untuk peran aktif lembaga-lembaga tersebut. Pelaksanaan lomba LPM berprestasi diharapkan dapat mendorong sinergitas antara peran pemerintah desa/kelurahan dan partisipasi aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan dalam proses pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Pada tahun 2021-2023 dari 70 LPM yang ada di Kabupaten Soppeng tidak terdapat LPM yang berprestasi. Hal tersebut dikarenakan karena ditiadakannya lomba akibat pandemi covid-19, sehingga capaiannya mencapai 0%. Di tahun 2024 dan 2025 persentase LPM berprestasi sebanyak 100%. Peningkatan tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan lomba yang dilakukan yang diiringi dengan meningkatnya inisiatif, kreatif dan kerjasama tim LPM.

Tabel 2. 198 - Persentase LPM Berprestasi Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah LPM berprestasi	Lembaga	0	0	0	70	70
2	Jumlah LPM	Lembaga	70	70	70	70	70
	Persentase LPM Berprestasi	%	0	0	0	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2026

2.4.4.14.6. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 segi pokok keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para istri kepala dinas/jawatan dan istri kepala daerah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada Tahun 2021-2023, terdapat 79 PKK yang aktif dari 79 PKK yang terdata di Kabupaten Soppeng, atau persentase PKK aktif di Kabupaten Soppeng mencapai 100 persen. Di Tahun 2024 jumlah PKK mengalami peningkatan sebanyak 4.120 lembaga yang terdiri dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan sampai pada tingkat RT dan RW. Kondisi di tahun 2025 jumah PKK yang aktif sebanyak 79 lembaga dengan persentase aktif sebesar 100%.

Tabel 2. 199 - Persentase PKK Aktif Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PKK aktif	Lembaga	79	79	79	4.120	79
2	Jumlah PKK	Lembaga	79	79	79	4.120	79
	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2026

2.4.4.14.7. Persentase Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Tujuan diselenggarakan Posyandu antara lain untuk: 1) mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran; 2) mempercepat penerimaan NKKBS; 3) meningkatkan kemampuan masyarakat untuk

mengembangkan kegiatan-kegiatan kesehatan dan lainnya yang menunjang, sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahun 2021-2023 jumlah Posyandu di Kabupaten Soppeng yang ditempatkan di balai dusun, balai kelurahan, RW, dan sebagainya sebanyak 327 posyandu dengan Persentase Posyandu yang aktif mencapai 100 persen. Di tahun 2024 jumlah posyandu dan aktif mengalami peningkatan sebanyak 328 unit atau sebanyak 100%. Kondisi tahun 2025 menunjukkan kembali adanya peningkatan sebanyak 332 unit atau 100% posyandu yang aktif.

Tabel 2. 200 - Persentase Posyandu Aktif Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Posyandu aktif	Unit	327	327	327	328	332
2	Total Posyandu	Unit	327	327	327	328	332
	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2026

2.4.4.14.8. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana masyarakat berintegrasi dengan program-program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik dan kultural dimana masyarakat yang berswadaya dapat berupa kelompok organisasi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri ataupun himpunan masyarakat tanpa organisasi.

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Soppeng khususnya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 sampai tahun 2023 sebesar 34,4% dan meningkat di tahun 2024 dan 2025 sebesar 34,60%. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh beberapa desa dengan kepanitiaan dilaksanakan oleh Badan Kerjasamanya Antar Desa (BKAD). Peningkatan capaian tersebut mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya layanan publik dalam pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2. 201 - Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	Juta Rp	8.154,05	8.154,05	8.154,05	8.115,04	8115,04
2	Total Program Pemberdayaan Masyarakat	Juta Rp	23.700,76	23.700,76	23.700,76	23.451,96	23451,96
	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	34,4	34,4	34,4	34,6	34,6

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2026

2.4.4.14.9. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam struktur APBDESA Kabupaten Soppeng terdapat keseragaman pelaksanaan program/kegiatan dengan melaksanakan 2 item Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa serta BPD, dan program/kegiatan Peningkatan SDM Masyarakat Desa. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat mencapai 80%, atau tidak terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 202 - Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	Program	40	40	40	40	40
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	Program	50	50	50	50	50
	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	80	80	80	80	80

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2026

2.4.4.15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.4.4.15.1. Total Fertility Rate

Total Fertility Rate atau Angka Kelahiran Total adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (Total Fertility Rate/TFR). Data ini sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Tabel 2. 203 - Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,16	2,16	2,32	2,11	2,07

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Total Fertility Rate pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mencapai 2,16% dan dimana angka ini berhasil melampaui target nasional. Namun demikian harus tetap dilakukan konseling dan penyuluhan secara intens kepada para akseptor (PUS) dalam hal pemakaian alat kontrasepsi secara tepat, sedangkan tahun 2022 kembali meningkat pada capaian 2,32%. Pada tahun 2023 kembali menurun mejadi 2,11%, penurunan tersebut berlanjut di tahun 2024 sebesar 2,07%.

2.4.4.15.2. Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB digunakan untuk mengukur peran aktif perangkat daerah dalam ikut serta menyukseskan program kampung KB. Berdasarkan data yang disajikan untuk tahun 2020 sampai tahun 2024, peran serta perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mencapai 100% dengan jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB sebanyak 34 OPD, capaian ini bertahan sampai tahun 2020, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 29,41% dengan jumlah perangkat daerah yang berperan aktif sebanyak 10 OPD, dan tahun 2023 meningkat kembali pada capaian 50% dengan jumlah 17 perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB. Di Tahun 2024 seluruh perangkat daerah yakni sebanyak 34 OPD berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB.

Tabel 2. 204 - Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di	OPD	34	10	13	17	34
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	34	34	34	34	34
3	Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) yang Berperan Aktif	%	100	29,41	38,24	50	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.3. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk, adalah proporsi jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk terhadap Jumlah semua perangkat daerah.

Tabel 2. 205 - Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	OPD	24	21	6	6	13
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	34	34	34	34	34
	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	70,59	61,76	17,65	17,65	38,24

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Berdasarkan data Dinas P3APPKB, persentase SKPD yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada tahun 2020 mencapai 70,59%, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan dengan capaian 61,76% dan menurun kembali pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 17,65%. Di tahun 2024 terjadi peningkatan perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk sebesar 13 OPD dari 34 OPD yang ada atau sebesar 38,24%. Penurunan capaian yang terjadi disebabkan karena menurunnya jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk dari jumlah perangkat daerah yang ada. Akan tetapi pada kondisi tahun terakhir kembali terjadi peningkatan OPD yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk.

2.4.4.15.4. Jumlah Kebijakan yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk

Penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset bermanfaat bagi pembangunan, sebaliknya penduduk yang rendah kualitasnya akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penduduk yang bermanfaat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk. Namun regulasi atau kebijakan tentang pengendalian penduduk berupa Peraturan Daerah belum tersedia, dikarenakan masih sangat terbatasnya alokasi anggaran yang dapat digunakan dan masih terdapat beberapa kegiatan lain yang diprioritaskan. Di masa yang akan datang diharapkan penyusunan regulasi tentang pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk bisa menjadi prioritas utama sehingga kegiatan DP3APPKB maupun SKPD dan stakeholder terkait akan mengacu pada *grand design* perencanaan kependudukan.

2.4.4.15.5. Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Data profil termasuk parameter dan proyeksi penduduk merupakan data yang diperlukan daerah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Data profil (parameter dan proyeksi penduduk) belum sepenuhnya diperkenalkan ke Perangkat Daerah lain sehingga mengakibatkan ketidakseragaman penggunaan data kependudukan. Sementara penggunaan data kependudukan merupakan data pokok dalam hal pembagian dan penentuan beberapa data dan capaian pembangunan lainnya. Oleh karena itu, selanjutnya akan menjadi tugas bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng supaya dapat menyusun Parameter dan Proyeksi Penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan di masa yang akan datang untuk kepentingan Perangkat Daerah lain. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dan koordinasi secara intens dengan Para penyuluh KP (PLKB), aparat Desa/kelurahan, kecamatan dan SKPD terkait, pada tahun 2020 sebanyak 7 sektor dan tahun 2021 meningkat menjadi 10 sektor sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 6 sektor dan pada tahun 2023 tidak ada sektor yang menyepakati. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan dengan adanya 9 sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Tabel 2. 206 - Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	7	10	6	0	9

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.6. Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informasi yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Indikator ini menunjukkan adanya kerjasama dengan lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal yang melakukan pendidikan kependudukan. Kegiatan ini telah dilakukan pada tahun 2020 dalam bentuk sosialisasi, kunjungan maupun Focus Group Discussion pada tiap jenjang pendidikan, mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, serta organisasi-organisasi perempuan dan anak, baik pemerintah maupun swasta. Dengan demikian informasi pendidikan kependudukan bisa diketahui lebih luas dan menyeluruh. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal ini melakukan kerja sama dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengadakan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

Tabel 2. 207 - Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informasi yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Kerja sama	1	2	1	0	3

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.7. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Jumlah penduduk yang besar tetapi tidak diikuti dengan kualitas SDM yang baik akan menjadi beban bagi pembangunan suatu negara, sehingga diperlukan upaya penurunan tingkat fertilitas dengan Program Utama Keluarga Berencana. Seiring dengan meluasnya akses media massa terhadap informasi KB cukup mempengaruhi masyarakat untuk melakukan penundaan kelahiran maupun penundaan jarak kelahiran hingga adanya persepsi tentang jumlah anak ideal sebanyak 2 orang. Pasangan yang berniat memiliki satu atau dua orang anak akan memperpanjang jarak antara pernikahan dan kelahiran anak pertama yaitu dengan menunda kelahiran anak pertama dalam rangka membangun kehidupan yang lebih baik sebagai pasangan. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi sebagai usaha untuk penundaan kehamilan.

Sebagai upaya mendukung program KB, para penyuluh melakukan penyuluhan secara aktif atau konseling terhadap Pasangan Usia Subur yang

tidak ber-KB, melakukan sosialisasi pada pasangan usia subur, kelompok BKL, kelompok BKB, Kelompok BKR tentang pentingnya menjarangkan kehamilan dan penggunaan alat kontrasepsi. Berdasarkan data Dinas P3APPKB, rata-rata jumlah anak per keluarga di tahun 2020 sebanyak 1,36 dan tahun 2021 menjadi 1,15, sedangkan tahun 2023 mencapai 0,27 dan meningkat di tahun 2024 sebanyak 0,67 rata-rata jumlah anak perkeluarga.

Tabel 2. 208 - Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Anak	Anak	105.789	91.835	11.007	17.814	57.073
2	Jumlah Keluarga	Keluarga	77.782	79.714	63.224	66.473	85.344
	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	Per Keluarga	1,36	1,15	0,17	0,27	0,67

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.8. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah masyarakat pasangan usia subur yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi atas tiga fase yaitu, fase menunda dan mencegah kehamilan, fase penjarangan kehamilan dan fase menghentikan dan mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Data ini menunjukkan proporsi jumlah akseptor KB terhadap Jumlah pasangan Usia Subur. Secara umum, jumlah akseptor KB tidak mengalami perubahan signifikan, walau demikian Jumlah Pasangan Usia Subur mengalami penurunan, sehingga rasio akseptor KB juga tidak mengalami perubahan signifikan.

Pada tahun 2020 dan 2021 memperlihatkan cukup tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi sehingga rasio akseptor KB mencapai 78,22% dan 75,05%, pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 58,50% dan di tahun 2023 mengalami peningkatan dengan capaian 64,4 dengan jumlah akseptor KB sebanyak 19.956 orang dari total pasangan usia subur sebanyak 30.986 orang. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah akseptor KB sebanyak 20.322 pasangan dari 31.630 pasangan usia subur.

Hal ini dapat diwujudkan karena tersedianya alat kontrasepsi di sarana kesehatan, kerja sama dengan tenaga penyuluh KB aktif di lapangan, melakukan konseling pada pasangan usia subur yang belum ber KB untuk menggunakan alat kontrasepsi baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu perlu diintensifkan pentingnya KB bagi untuk membangun keluarga yang berkualitas di kalangan usia subur untuk meningkatkan kesadaran pasangan akan pentingnya KB.

Tabel 2. 209 - Rasio Akseptor KB di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Akseptor KB	Pasangan	28.218	27.405	17.148	19.956	20.322
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasangan	36.072	36.517	29.313	30.986	31.630
	Rasio Akseptor KB	%	78,22	75,05	58,5	64,4	64,25

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.9. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49

Angka pemakaian kontrasepsi atau tingkat prevalensi kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial.

Tabel 2. 210 - Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta KB aktif	Peserta	27.901	27.405	18.745	20.264	20.322
2	Jumlah Pasangan usia subur	Pasangan	36.056	36.517	29.290	30.986	31.630
	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	%	77,38	75,05	64	65,4	64,25

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2021 angka pemakaian kontrasepsi berada pada angka 77,38% dan 75,05%. Capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 64% dan meningkat di tahun 2023 sebesar 65,4%. Pada tahun 2024 capaian tersebut kembali mengalami penurunan sebesar 64,25%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran Pasangan Usia subur untuk menggunakan alat kontrasepsi terbilang cukup tinggi, akan tetapi masih perlu ditunjang pula oleh pelaksanaan penyuluhan secara aktif tentang penggunaan alat kontrasepsi serta tersedianya ALKON yang dibutuhkan oleh PUS.

2.4.4.15.10. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)

Proporsi angka kelahiran remaja perempuan usia 15 - 19 Tahun adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur 15 - 19 tahun terhadap keseluruhan jumlah penduduk perempuan kelompok 15 - 19 Tahun. Selama 5 tahun angka tersebut bergerak secara fluktuatif, pada tahun 2019 sebesar 25,99% di tahun 2020 turun menjadi 16,65% dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 17,36% atau berjumlah 9.561 jiwa sedangkan tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dengan capaian 39,50%. Pada tahun 2023 jumlah merupakan hasil survey sosial ekonomi nasional (Susenas) oleh Badan Statistik Nasional sebesar 20,65%.

Dalam hal ini diselenggarakan penyuluhan dan konseling terhadap para orang tua untuk tidak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, dan juga penundaan kelahiran anak pertama bagi pasangan muda.

Tabel 2. 211 - Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Asfr 15-19) Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15 -19	Jiwa	259	166	166	376	169
2	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15 -	Jiwa	9.967	9.967	9.561	9.515	8183
	Angka kelahiran remaja (Perempuan Usia 15 -19) per 1.000 Usia 15 -19 tahun (ASFR 15 -19)	%	25,99	16,65	17,36	39,50	20,65

Sumber: Dinas P3APPKB, 2024

2.4.4.15.11. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya berusia dibawah 20 Tahun adalah proporsi jumlah pasangan usia subur dengan usia istri yang kurang dari 20 Tahun terhadap jumlah pasangan usia subur.

Tabel 2. 212 - Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun, Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun	Pasangan	901	1.027	1.027	9.952	9.952
2	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	36.056	36.517	31.366	30.982	30.659
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	2,5	2,81	3,27	32,12	32,46

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun pada tahun 2020 dengan nilai persentase sebesar 2,50%, dan 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,81%. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,27% dan berlanjut di tahun 2023 dan 2024 dengan peningkatan sebesar 32,12% dan 32,46%. Rata-rata cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat menunda usia kawin muda atau masih banyak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, penyuluhan dan konseling terhadap orang tua yang mempunyai anak usia 20 tahun ke bawah harus tetap diaktifkan.

2.4.4.15.12. Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Angka ini didapatkan dengan membandingkan antara jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dengan total jumlah pasangan usia subur. Semakin rendah angka unmet need, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya besarnya tingkat unmet need KB di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik wilayah serta kondisi sosiologis masyarakat antara perdesaan dan perkotaan. Karakteristik unmet need berbeda menurut umur, daerah tempat tinggal, dan status sosial ekonomi. Unmet need pada perempuan usia muda (15-29 tahun) lebih banyak untuk menjarangkan kelahiran, sementara di usia tua (30-49 tahun) lebih banyak untuk membatasi kelahiran mengingat resiko melahirkan yang semakin besar seiring dengan usia ibu.

Tabel 2. 213 - Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak	Pasangan	4.611	5.105	7.840	4227	3.367
2	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	36.072	36.517	29.290	30.982	31.630
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak	Poin	12,78	13,98	26,77	13,64	10,64

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, nilai cakupan tersebut bergerak secara fluktuatif selama 5 tahun, pada tahun 2020 mencapai 12,78%, meningkat di tahun 2021 sebesar 13,98% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 26,77%, dan menurun pada tahun 2023 menjadi 13,64% . Pada tahun 2024 capaian tersebut kembali menurun sebesar 10,64% yang artinya bahwa jumlah PUS yang ingin ber KB, terpenuhi, dapat dilayani dan mendapat fasilitas dengan baik. Hal ini karena Dinas DP3APKB berhasil dalam memberikan pelayanan akseptor dan konseling.

2.4.4.15.13. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah metode yang efektif untuk menunda dan menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung meningkat pada periode 2020-2024 dengan kondisi terakhir pada tahun 2024 mencapai 22,33%.

Tabel 2. 214 - Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Akseptor	5.414	814	3.398	4.106	4.538
2	Jumlah akseptor KB	Akseptor	28.218	27.405	18.745	19.956	20.322
	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	%	19,19	2,97	18,13	20,58	22,33

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan PUS tidak menjadi peserta KB adalah pelayanan KB yang masih kurang berkualitas, penyampaian konseling maupun KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) belum dilaksanakan dengan baik, hambatan budaya, kelompok wanita yang sudah tidak ingin anak lagi tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi (unmet need), dan kelompok hard core yaitu kelompok wanita yang tidak mau menggunakan alat kontrasepsi baik pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang.

Peran aktif tenaga medis (bidan) dan penyuluh KB sangat dibutuhkan dalam peningkatan jumlah pengguna metode kontrasepsi jangka panjang pada PUS, antara lain melalui pemberian penyuluhan-penyuluhan tentang kontrasepsi jangka panjang, pemberian informasi lengkap saat kunjungan pertama klien untuk menentukan pilihan berkontrasepsi dan memotivasi setiap calon akseptor KB baru untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang.

2.4.4.15.14. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah proporsi jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi terhadap jumlah akseptor KB. Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Faktor sosial, ekonomi antara lain meliputi keterlibatan dalam organisasi, norma dan hukum, pendapatan, kebiasaan, agama dan tempat pelayanan. Sedangkan faktor demografi antara lain meliputi karakteristik individu seperti umur, status perkawinan, pendidikan, lama perkawinan dan pekerjaan.

Tabel 2. 215 - Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Pasangan	7.854	9.112	88	1.268	6.750
2	Jumlah akspetor KB	Akseptor	28.218	27.405	18.369	20.264	21.322
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	27,83	33,25	0,48	6,26	31,66

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase tingkat keberlangsungan ini mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 capaian tersebut sebesar 27,83%, meningkat pada tahun 2021 menjadi 33,25% dan menurun secara signifikan pada tahun 2022 dengan capaian 0,48% dan pada tahun 2023 sebesar 6,26 atau 1.268 usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi dari 20.264 jumlah akseptor KB. Di tahun 2024 capaian tersebut mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 31,66% dengan jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi sebanyak 6.750 pasangan dari 21.322 akseptor KB.

Tingginya penggunaan kontrasepsi dapat mencegah ledakan penduduk di masa yang akan datang oleh karena itu penting untuk menjaga Peran aktif perangkat daerah dalam meningkatkan penyuluhan dan konseling terhadap akseptor atau Pasangan Usia Subur untuk ber-KB.

2.4.4.15.15. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber -KB

Bina Keluarga Balita (BKB) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua untuk mengasuh serta membina tumbuh kembang anak. Upaya tersebut melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral. BKB lebih menyasar pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengasuh anak. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita mengalami peningkatan jika dilihat dari tahun 2020 mencapai 60,67%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 64,23%, kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 94,89%. Namun pada 2023 menurun menjadi 44,29 % dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 100% dengan jumlah anggota kelompok BKB seluruhnya ber KB yakni 1.929 anggota.

Tabel 2. 216 - Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber KB	Anggota	1.749	1.602	872	974	1.929
2	Jumlah anggota kelompok BKB	Anggota	2.883	2.494	919	2.199	1.929
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	60,67	64,23	94,89	44,29	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.16. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber -KB

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10 – 24 tahun, dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja melalui peran orang tua. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja mengalami fluktuasi selama tahun 2020-2024 dengan kondisi 56,10% pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 0,33% atau terdapat 3 Jumlah anggota kelompok BKR yang ber KB. Pada tahun 2023 sebesar 13,29% dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 78,45%. Faktor pendorong capaian tersebut antara lain karena meningkatnya jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB serta dukungan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mendampingi dan membantu kader dalam melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja dan pemahaman, kesadaran keluarga tentang Bina Keluarga Remaja.

Tabel 2. 217 - Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber KB	Anggota	1.365	1.219	3	174	841
2	Jumlah anggota kelompok BKR	Anggota	2.406	2.173	899	1309	1.072
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	56,73	56,1	0,33	13,29	78,45

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.17. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah salah satu program kegiatan di DP3APPKB yang menitikberatkan pada pembinaan lansia dan keluarga lansia. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB mengalami penurunan dari tahun 2020-2023. Data tahun 2020 menunjukkan capaian 51,11% selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 36,91%. Pada tahun 2022 sebesar 6,85%, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 6,62%. Pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 72,04%. Walaupun capaian dalam kondisi tahun terakhir mengalami peningkatan akan tetapi terjadi penurunan jumlah anggota bina keluarga lansia sebesar 304 anggota dengan jumlah anggota kelompok BKL yang ber KB meningkat sebesar 219 anggota.

Tabel 2. 218 - Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber KB	Anggota	1.086	629	52	70	219
2	Jumlah anggota kelompok BKL	Anggota	2.125	1.704	759	1057	304
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)	%	51,11	36,91	6,85	6,62	72,04

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.18. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang telah dibentuk di Kabupaten Soppeng ada 2 yaitu UPPKS Kecamatan Lalabata dan UPPKS Kecamatan Marioriwawo. Jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada, dari tahun 2020 hingga tahun 2022 hanya 25%. Pada tahun 2023 dan 2024 untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, idealnya setiap kecamatan memiliki PPKS yang sudah maksimal yaitu 8 dari 8 jumlah PPKS atau dengan persentase sebesar 100%.

Tabel 2. 219 - Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPKS	Unit	2	2	2	8	8
2	Jumlah Kecamatan	Kecamatan	8	8	8	8	8
	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	25	25	25	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.19. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa adalah proporsi data jumlah PIK R/M terhadap jumlah kecamatan. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja), yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Tabel 2. 220 - Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PIK R/M	PIK R/M	56	62	53	51	53
2	Jumlah kecamatan	Kecamatan	8	8	8	8	8
	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	%	7	7,75	6,63	6,37	6,63

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Berdasarkan tabel pada tahun 2020 cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa dalam pusat sebanyak 7% dengan jumlah PIK R/M sebanyak 56. Meningkat di tahun 2021sebesar 7,75% karena PIK R/M meningkat menjadi 62. Hal ini disebabkan selama 2020 ini terjadi pembatasan kegiatan karena adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya harus mencari cara agar dapat kembali meningkatkan cakupan dengan melakukan berbagai program penyuluhan terhadap remaja/mahasiswa untuk mengikuti informasi dan konseling. Selain itu, PIK Remaja adalah nama generic, maka untuk menampung kebutuhan program PKBR dan menarik minat remaja datang ke PIK Remaja, nama generik ini dapat dikembangkan dengan nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan program dan selera remaja setempat, dan pada tahun 2022 menurun sebesar 6,63% dengan

jumlah PIK R/M sebanyak 53 PIK R/M, sedangkan tahun 2023 kembali menurun dengan capaian 6,37% atau 51 PIK R/M. di tahun 2024 terjadi peningkatan dengan persentase sebesar 6,63% atau sebanyak 53 PIKR/M.

2.4.4.15.20. Cakupan PKB dan PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Peran PKB/PLKB sebagai komponen pemerintah, beserta masyarakat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program KKBPK, dalam rangka mendukung pengembangan kualitas keluarga.

Tabel 2. 221 - Cakupan PKB dan PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan	PKB/ PLKB	32	31	32	33	38
2	Jumlah PKB/PLKB	PKB/ PLKB	32	31	32	33	38
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan darah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100,00

Sumber: Dinas P3APPKB, 2024

Jumlah PKB/PLKB yang ada jumlahnya menurun yang dikarenakan ada yang pensiun dan belum ada penerimaan baru, yang semula berjumlah 32 orang di tahun 2020, menurun di tahun 2021 yang hanya berjumlah 31 orang. Akan tetapi di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan dengan jumlah PKB/PLKB keseluruhan dan yang Didayagunakan sebesar 100% atau 38 orang pada kondisi tahun terakhir. Sebagaimana diketahui bahwa PKB/PLKB ini mengalami pengalihan status kepegawaian PKB dari pegawai daerah (pemerintah kabupaten/kota) menjadi pegawai vertikal dalam hal ini BKKBN. Namun semua berperan secara aktif melakukan tugas dan fungsinya dalam pembinaan dan pendayagunaan KB sesuai kompetensi yang telah ditetapkan, seperti yang tertuang dalam manajemen ASN (UU No.5 Tahun 2014 pasal 69 point a, b dan c tentang Aparatur Sipil Negara), terdiri atas: 1. Kompetensi Teknis, 2 Kompetensi Manajerial dan 3. Kompetensi Sosial Kultural.

2.4.4.15.21. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Angka ini didapatkan dengan membandingkan antara Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani dengan Jumlah pasangan usia subur. Semakin rendah angka unmet need, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya Besarnya tingkat unmet need KB di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik wilayah serta kondisi sosiologis masyarakat antara perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa, nilai cakupan tersebut bergerak secara fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 capaian tersebut sebesar 78,60% yang artinya bahwa jumlah PUS yang ingin ber KB terpenuhi dapat dilayani dan mendapat fasilitas

dengan baik dan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 47,87% dan menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 35,12%. Pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 27,35% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 140,52%.

Tabel 2. 222 - Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB	Anggota	507	427	131	128	163
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	Anggota	645	892	373	468	116
	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri	%	78,6	47,87	35,12	27,35	140,52

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.22. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Rasio Petugas Pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa terhadap jumlah Desa/Kelurahan. PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di Desa/Kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Melihat pentingnya peran dan tugas PPKBD maka dibentuklah 1 (satu) orang PPKBD untuk setiap desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Soppeng, yang terdiri dari 49 PPKBD Desa dan 21 PPKBD Kelurahan dengan capaian tahun 2020 sampai 2024 sebesar 100%.

Tabel 2. 223 - Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah petugas pembantu pembina KB desa	Petugas	70	70	70	70	70
2	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/	70	70	70	70	70
	Rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD)	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2024

2.4.4.15.23. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah perbandingan Jumlah alat kontrasepsi per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alat kontrasepsi kab/kota terhadap Perkiraan permintaan masyarakat. Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat bahwa tahun 2020 mencapai 24,36% menjadi 77,61% di tahun 2021, sedangkan di tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dengan capaian 33,41% dan 14,76%. Pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 75,12% dengan jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon kab/kota sebanyak 19.134 unit dari 25.471 unit perkiraan permintaan masyarakat. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif juga dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang cenderung menggunakan alat kontrasepsi mandiri. Hal tersebut mengindikasikan tingkat pemahaman masyarakat khususnya pasangan usia subur yang tinggi dalam penggunaan alat kontrasepsi dan mendukung program keluarga berencana.

Tabel 2. 224 - Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang	Unit	4.393	24.605	10.173	5.397	19.134

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	tersedia di faskes dan gudang alkon kab/kota						
2	Perkiraan permintaan masyarakat	Unit	18.036	31.704	30.453	36.570	25.471
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	24,36	77,61	33,41	14,76	75,12

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.24. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

Dalam rangka menjamin agar setiap Pasangan Usia Subur (PUS) dapat secara mudah mendapatkan pelayanan dan upaya menjamin tersedianya pelayanan yang berkualitas, adil dan merata merupakan hal penting yang harus diperhatikan dengan memanfaatkan peluang pelayanan KB bagi peserta BPJS melalui fasilitasi pelayanan KB yang telah bekerjasama dengan BPJS. Persentase fasilitas kesehatan dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS untuk memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan merupakan proporsi data yang menunjukkan perbandingan jumlah fasilitas kesehatan dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS terhadap jumlah fasilitas kesehatan dan jejaring.

Tabel 2. 225 - Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS	Unit	18	18	18	18	52
2	Jumlah faskes dan jejaring	Unit	18	18	18	18	52
	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Tabel di atas menunjukkan target persentase faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS mencapai 100% dengan jumlah fasilitas sebanyak 18 buah pada tahun 2020 sampai tahun 2023. Di tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah faskes dan jejaring secara keseluruhan dan yang berkerja sama dengan BPJS sebanyak 52 unit dengan persentase 100%. Pencapaian 100% ini disebabkan karena adanya kerjasama dan koordinasi secara aktif antara Dinas DP3APKB dengan stakeholder Fasilitas Kesehatan dan jejaring yang ada di setiap tingkatan wilayah.

2.4.4.15.25. Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Pendataan mengenai remaja terkena infeksi menular seksual belum dilaksanakan oleh dinas terkait.

2.4.4.15.26. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan adalah ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan KB dan KS serta pembinaan keluarga di masing-masing desa/kelurahan. Data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data KB dan data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional program KB di desa/kelurahan. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa didapatkan dengan membandingkan jumlah Informasi data mikro keluarga yang tersedia dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga. Penyediaan data mikro

keluarga di desa/kelurahan dilakukan dengan metode pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun dalam waktu bersamaan. Hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap tahun, dilakukan analisis demografi, KB dan tahapan KS sebagai bahan penyusunan kegiatan intervensi pelayanan KB dan KS.

Tabel 2. 226 - Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang	Desa/Kel	70	70	70	70	70
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	Desa/Kel	70	70	70	70	70
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan, setiap tahun seluruh Desa/Kelurahan mempunyai data mikro keluarga (100%) yang dilakukan dengan melakukan kerja sama dan pembinaan terhadap stakeholder yang ada di 70 desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Soppeng.

2.4.4.15.27. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di kelompok masing-masing pada tahun 2020-2024 mencapai 100% atau semua kelompok kegiatan yang ada melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi. Akan tetapi jumlah kelompok kegiatan mengalami fluktuasi selama kurun waktu lima tahun tersebut, dimana jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga pada tahun 2020 sebanyak 360 kelompok, menurun pada tahun 2021 yang hanya mencapai 53 kelompok dan di tahun 2024 mencapai 332 kelompok.

Tabel 2. 227 - Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompok	360	53	351	329	332
2	Jumlah kelompok kegiatan	Kelompok	360	53	351	329	332
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.28. 2.2.6.31. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Usia pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Hubungan antara usia kawin pertama dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda usia kawin pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Soppeng pada tahun 2019 yaitu usia 20 tahun, dan pada tahun 2020 usia 19 tahun dan tahun 2021 dan tahun 2022 Rata-rata usia kawin pertama wanita pada usia 20 tahun, sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan rata-rata usia kawin pertama wanita, yakni pada usia 21 tahun.

Tabel 2. 228 - Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)	Jiwa	199.340	193.876	397.140	696.260	712.341
2	Jumlah wanita menurut usia kawin pertama	Jiwa	9.967	10.204	19.857	34.813	33.921
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	20	19	20	20	21

Sumber: Dinas P3APPKB, 2024

2.4.4.15.29. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh pada tahun 2020 mencapai 85,85% mengalami penurunan di tahun 2021 dengan capaian 23,01% sedangkan tahun 2022 mencapai 71,28%. Pada tahun 2023 capaian tersebut meningkat sebesar 94,73% tetapi menurun di tahun 2024 sebesar 60,96%. Capaian tersebut tidak terlepas dari peran kader Bina Keluarga Balita.

Tabel 2. 229 - Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	Keluarga	8.248	2.494	8.064	934	2155
2	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	Keluarga	9.608	10.836	11.313	986	3535
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	%	85,85	23,01	71,28	94,73	60,96

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.15.30. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD adalah perbandingan antara jumlah anggaran untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap jumlah APBD. Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan melalui APBD di Kabupaten Soppeng secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 230 - Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

URAIAN		Jumlah Anggaran untuk urusan PPKB (Rp)	Jumlah APBD dan APBDes (Rp)	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Melalui APBD dan APBDes (%)
TAHUN	2020	3.899.678.900,00	1.298.262.158.702,95	0,3
	2021	3.410.510.850	1.307.375.584.577,00	0,26
	2022	336.000.000	1.355.824.385.995,57	0,02
	2023	0	0	0
	2024	6.859.007.000	1.181.534.011.415	0,58

Sumber: Dinas P3APPKB, 2025

2.4.4.16. Urusan Perhubungan

2.4.4.16.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum adalah sarana kendaraan atau moda angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan dipungut bayaran. Jumlah arus penumpang angkutan umum dalam kurun waktu lima tahun cenderung mengalami penurunan pada tahun 2019 berjumlah 1.340 orang, dan mengalami penurunan setiap tahunnya sampai tahun 2021 sejumlah 848 orang, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 dengan jumlah capaian 720 orang, penurunan tersebut disebabkan oleh jumlah angkutan umum yang beroperasi semakin berkurang di samping mobilitas masyarakat yang menggunakan alat angkutan umum berkurang cukup signifikan karena

kepemilikan kendaraan pribadi masyarakat Kabupaten Soppeng meningkat.

Tabel 2. 231 - Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun.	Orang	1.340	1.005	848	720	720
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.	Orang	1.340	1.005	848	720	720

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

2.4.4.16.2. Rasio Izin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Setiap kendaraan yang mengangkut penumpang umum harus memiliki izin trayek. Di Kabupaten Soppeng, jumlah izin trayek yang dikeluarkan pada tahun 2020 sebanyak 18 izin, angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan jumlah izin yang dikeluarkan hanya 50 izin, dan menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 34 izin trayek yang dikeluarkan atau mencapai rasio 0,0001 poin. Di tahun 2024 tidak ada izin trayek yang dikeluarkan hal tersebut dikarenakan disebabkan karena banyaknya pengusaha angkutan umum yang mengalihfungsikan kendaraannya menjadi kendaraan pribadi. Penumpang angkutan umum maupun barang sudah berkurang karena banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai kendaraan pribadi. Selain itu kurangnya pengawasan dan penerbitan untuk angkutan pedesaan dan kurangnya kesadaran masyarakat (pemilik/pengusaha) kendaraan untuk melengkapi izin trayek angkutan pedesaan.

Tabel 2. 232 - Rasio Izin Trayek Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Izin	18	50	23	34	0
2	Jumlah penduduk	Jiwa	238.967	237.875	238.612	240.955	241.333
	Rasio izin trayek	Poin	0,0001	0,00021	0,0001	0,00014	0

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

2.4.4.16.3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji KIR merupakan rangkaian tes untuk mengukur apakah sebuah kendaraan masih layak jalan atau tidak. Uji KIR adalah sesuatu yang mutlak dilakukan para pemilik kendaraan pengangkut. Baik yang menggunakan plat nomor kuning atau hitam. Baik yang mengangkut penumpang, atau mengangkut barang, atau bahkan keduanya. Di Kabupaten Soppeng, jumlah uji kir angkutan umum yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 120 dan terus mengalami penurunan sampai 2022 sebanyak 0 unit. Hal ini disebabkan belum dilakukan akreditasi unit pelaksana pengujian kendaraan, akreditasi sarana dan prasarana serta personil oleh kementerian perhubungan, di samping kalibrasi alat pengujian kendaraan dilakukan pada akhir desember tahun 2022 sehingga uji kir angkutan umum tidak dilakukan. Pada tahun 2023 jumlah kendaraan yang diuji KIR sebanyak 1988 unit.

Tabel 2. 233 - Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	120	85	0	0	1988

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

2.4.4.16.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan/Terminal merupakan tempat pemberhentian maupun pemberangkatan jasa angkutan baik barang maupun penumpang. Di kabupaten Soppeng, jumlah terminal pada tahun 2019 sampai 2023

sebanyak 2 terminal hal ini disebabkan Salah satu terminal kemudian dialihfungsikan menjadi bagian dari Pusat Pertokoan Watansoppeng karena sudah tidak memenuhi syarat untuk dijadikan terminal Tipe C.

Tabel 2. 234 - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

2.4.4.16.5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan sampai tahun 2020, pada tahun 2019 sebanyak 207 unit dan tahun 2020 sebanyak 248 unit, terdapat peningkatan jumlah angkutan darat tahun 2023 sebanyak 68.795 unit kendaraan dengan capaian 45,45%, peningkatan tersebut akibat adanya pemutakhiran data jumlah angkutan darat oleh entitas dinas perhubungan.

Tabel 2. 235 - Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkutan darat	Unit	207	248	148	67.572	68.795
2	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	475	270	848	235.167	151.349
	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	43,58	91,85	17,45	28,73	45,45

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

2.4.4.16.6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Soppeng sangat berfluktuatif, pada tahun 2019 sebanyak 87 unit, atau mencapai 42,03% dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 sebanyak 163 unit kendaraan atau mencapai 65,72%. Akan tetapi di tahun 2021 dan tahun 2022 jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR menunjukkan angka 0 dikarenakan tidak adanya uji kir yang dilakukan. Hal ini disebabkan belum dilakukan akreditasi unit pelaksana pengujian kendaraan, akreditasi sarana dan prasarana serta personil oleh kementerian perhubungan, di samping kalibrasi alat pengujian kendaraan dilakukan pada akhir desember tahun 2022 sehingga uji kir angkutan umum tidak dilakukan. Di samping itu Jumlah angkutan umum yang semakin berkurang juga sangat mempengaruhi. Berkurangnya kendaraan umum tersebut disebabkan oleh tergerus karena usia dan tidak adanya peremajaan kendaraan. Pada tahun 2023 kembali dilakukan uji KIR sebanyak 278 kendaraan dari 2267 kendaraan atau sebesar 12,26%.

Tabel 2. 236 - Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	Unit	87	163	0	0	278
2	Jumlah angkutan umum	Unit	207	248	148	124	2267
	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	42.03%	65.72%	0	0	12,26

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

2.4.4.16.7. Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu-rambu lalu lintas yang merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Keterpenuhan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Soppeng pada tahun 2019 sebanyak 82 unit atau mencapai 58% namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 34,72 %, dan mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebanyak 61 unit rambu-rambu atau mencapai sebesar 61% dan meningkat kembali pada tahun 2022 sebanyak 70 unit dari jumlah rambu yang seharusnya tersedia sebanyak 86

unit sehingga capaian nya menjadi 81,40%. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 10 dari 12 rambu dipasang dengan capaian 83,3%.

Tabel 2. 237 - Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu tahun n	Unit	82	50	61	70	10
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Unit	100	144	100	86	12
	Pemasangan Rambu-rambu	%	82%	34,72%	61%	81,40%	83,3

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

2.4.4.17. Urusan Komunikasi dan Informatika

2.4.4.17.1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok informasi masyarakat adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, yang secara mandiri dan kreatif melalui melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya, sebagai lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan informasi, KIM memiliki arti yang penting sebagai mitra pemerintah dan sebagai bagian dari jaringan sistem informasi nasional dalam diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan pada Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa disetiap kecamatan terdapat 5-7 KIM dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2. 238 - Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah KIM	Kelompok	54	54	54	44	44
2	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	Kecamatan	8	8	8	8	8
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	675	675	675	550	550

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

2.4.4.17.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa lebih dari setengah wilayah Kabupaten Soppeng telah terjangkau oleh layanan telekomunikasi terlihat pada tahun 2021 cakupan layanan telekomunikasi mencapai 66,15% dan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 71,48% sedangkan tahun 2023 cakupan layanan telekomunikasi mengalami peningkatan dengan capaian 73,41%. Pada tahun 2024 cakupan layanan telekomunikasi mengalami penurunan dengan capaian sebesar 66,67% dan meningkat di tahun 2025 sebesar 73,41%.

Tabel 2. 239 - Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas Wilayah Yang Tercoverage	Km2	1.030	1.113	1.143	1.000	1.143
2	Luas Wilayah Keseluruhan	Km2	1.557	1.557	1.557	1.500	1.557
	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	66,15	71,48	73,41	66,67	73,41

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

2.4.4.17.3. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Hp atau telepon adalah alat komunikasi ini memudahkan kita dalam berkomunikasi secara langsung tanpa harus bertatap muka. Teknologi ini telah menggeser fungsi surat dan telegram sebagai alat komunikasi bagi mereka yang bertempat tinggal saling berjauhan. Di Kabupaten Soppeng, persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon pada tahun 2021 sebesar 75,20% mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 76,52%. Pada tahun 2023 capaian tersebut mengalami peningkatan dengan capaian

82,35% dengan jumlah pengguna sebanyak 198.423 orang, kemudian mengalami penurunan sebesar 79,80% atau 192.583 jiwa pada tahun 2024 dan meningkat di tahun 2025 sebesar 81,28% atau 196.517 jiwa yang menggunakan Hp/telepon.

Tabel 2. 240 - Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penduduk menggunakan	Jiwa	178.893	182.589	198.423	192.583	196.517
2	Jumlah penduduk	Jiwa	237.875	238.612	240.955	241.333	241.777
	Persentase Penduduk yang Menggunakan	%	75,20	76,52	82,35	79,80	81,28

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

2.4.4.17.4. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Pada era digital saat ini kebutuhan komputer dan perangkat pintar lainnya sudah termasuk kedalam kebutuhan primer manusia. Setiap kegiatan manusia mulai dari kegiatan pendidikan, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial sudah menggunakan perangkat komputer untuk mempermudahnya. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 61,00%. Capaian tersebut meningkat pada tahun 2023 sebesar 63,00% dan di tahun 2024 sebesar 66,67%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan dengan capaian sebesar 63,14% dengan jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi sebanyak 54.657 unit.

Tabel 2. 241 - Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Unit	48.143	48.143	52.788	40.000	54.657
2	Jumlah rumah tangga	Unit	78.923	78.923	83.791	60.000	86.563
	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	%	61,00	61,00	63,00	66,67	63,14

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

2.4.4.18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.4.4.18.1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2021 tercacat koperasi aktif sebanyak 150 koperasi aktif. Pada tahun 2022 koperasi aktif mengalami peningkatan sebanyak 151 unit atau mencapai 90,42% dari jumlah seluruh koperasi sebanyak 167 unit. Pada tahun 2023 jumlah koperasi aktif bertambah menjadi 152 unit dari 169 unit total koperasi meningkat di tahun 2024 sebanyak 155 koperasi aktif dari 168 koperasi yang ada dengan persentase 92,26%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 62 unit dari 238 total koperasi yang ada. Berikut ini adalah data koperasi aktif yang ada di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sampai tahun 2025.

Tabel 2. 242 - Persentase Koperasi Aktif Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah koperasi aktif	Unit	150	151	152	155	62
2	Jumlah seluruh koperasi	Unit	166	167	169	168	238
3	Persentase Koperasi Aktif	%	90,36	90,42	89,94	92,26	26,05

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2026

Berdasarkan kondisi persentase koperasi aktif dalam lima tahun terakhir masih perlunya upaya dari pemerintah khususnya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) dalam mengembangkan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha yang dilakukan. Adapun pembinaan atau pengembangan yang dilakukan antara lain, Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi para pengurus, meningkatkan partisipasi anggota, bimbingan dan konsultasi tertib organisasi dalam penyelenggaraan RAT serta penerapan sistem akuntansi koperasi.

2.4.4.18.2. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah UKM non BPR/LKM aktif dibagi dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng. Jumlah UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah seluruh Usaha Mikro Kecil yang ada di Kabupaten Soppeng. Sedangkan jumlah UKM non BPR/LKM adalah jumlah seluruh usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Soppeng. UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah lembaga keuangan mikro dan usaha mikro yang tidak berbadan hukum namun bergerak di bidang usaha dan pembiayaan dan masih aktif berjalan sampai sekarang.

UKM non BPR/LKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah. UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja, selain itu UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara. Berikut adalah data persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2021-2025.

Tabel 2. 243 - Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	8.414	9.512	10.458	11.420	11.980
2	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Unit	8.485	9.583	10.529	11.491	12.051
3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	99,16	99,26	99,33	99,38	99,41

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2026

Jumlah UKM non BPR/LKM aktif pada tahun 2021 sebanyak 8.414 unit dari 8.4853 UKM non BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng. Di tahun 2023 mengalami peningkatan sehingga capaiannya menjadi 10.458 unit atau sebesar 99,33% meningkat di tahun 2024 sebesar 99,38% dengan 11.420 UKM non BPR/LPM yang aktif dari 11.491 total UKM non BPR/LKM. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan kembali adanya peningkatan dengan persentase UKM Non BPR/LKM Aktif sebesar 99,41% atau sebanyak 11.980 UKM Non BPR/LKM yang aktif dari seluruh UKM Non BPR/LKM yang ada yakni 12.051.

2.4.4.18.3. Persentase BPR/LKM Aktif

Persentase BPR/LKM aktif adalah jumlah BPR/LKM aktif dibagi dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang ada di Kabupaten Soppeng. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dana atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam

usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM berperan dalam kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

LKM formal terdiri dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bumdes dan sejenisnya. LKM di Kabupaten Soppeng antara lain BPRS Niaga Madani, PT. Mandala, PT.Adira Multifinance, Bumdes dan lain-lain. Berikut adalah data persentase BPR/LKM aktif di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2021-2025.

Tabel 2. 244 - Persentase BPR/LKM Aktif Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah BPR/LKM aktif	Unit	55	56	56	55	55
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	Unit	55	56	56	55	55
3	Persentase BPR/LKM Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2026

Persentase BPR/LKM aktif sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 menunjukkan persentase yang stagnant yakni 100%. Jumlah BPR/LKM aktif pada tahun 2021 yakni sebanyak 55 unit mengalami peningkatan sampai tahun 2023 menjadi 56 unit, mengalami peningkatan 1 unit bumdes pada kecamatan Lalabata. Sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 jumlah BPK/LKM aktif sebanyak 55 unit.

Tabel 2. 245 - Data Bank Perkreditan Rakyat (BPR) / Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	Kecamatan	TAHUN																			
		2021				2022				2023				2024				2025			
		BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH	BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH	BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH	BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH	BUMDES	BPR	LKM	JUMLAH
1	Marioriwawo	11			11	11			11	11			11	11			11	11			11
2	Liliriaja	5			5	5			5	5			5	5			5	5			5
3	Lilirilau	8			8	8			8	8			8	8			8	8			8
4	Lalabata	3	1	5	9	4	1	5	10	4	1	5	10	3	1	5	9	3	1	5	9
5	Marioriawa	5			5	5			5	5			5	5			5	5			5
6	Donri-Donri	9			9	9			9	9			9	9			9	9			9
7	Ganra	4			4	4			4	4			4	4			4	4			4
8	Citta	4			4	4			4	4			4	4			4	4			4
JUMLAH		49	1	5	55	50	1	5	56	50	1	5	56	49	1	5	55	49	1	5	55

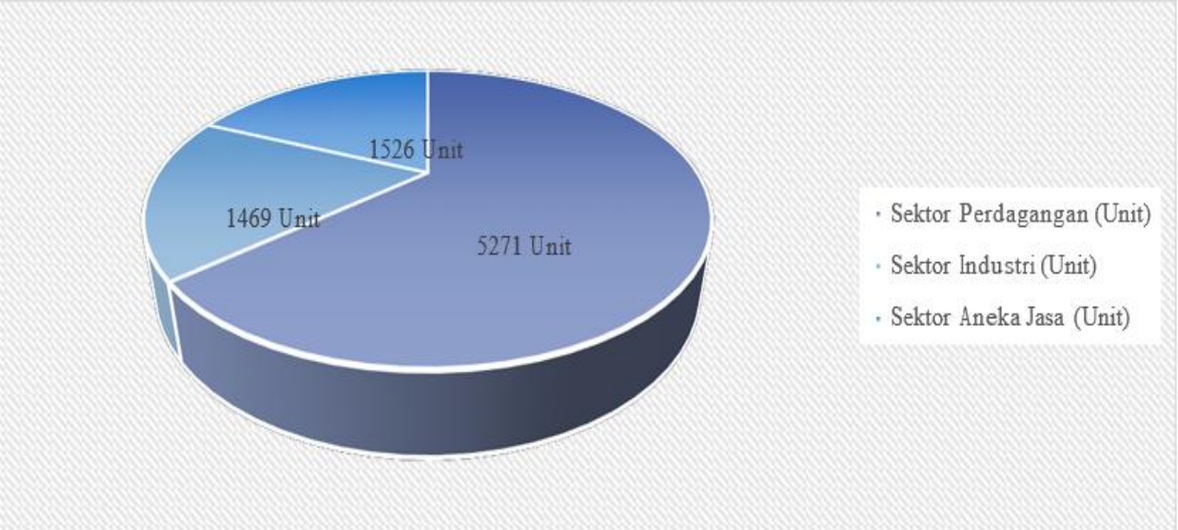
Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2026

2.4.4.18.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Dari sudut pandang pelaku usaha, UMKM bisa dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Grafik 2. 96 - Usaha Mikro



Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2024

Jumlah usaha mikro dan kecil tahun 2021 sebanyak 8.414 unit dari jumlah seluruh UKM sebanyak 8.485 unit atau mencapai 99,16%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sehingga capaiannya menjadi 10.458 unit atau sebesar 99,33%. Kondisi di tahun 2025 persentase usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan sebesar 99,41% dengan jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 11.980 unit dari 12.051 UKM yang ada. Peningkatan ini seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dengan memberikan kemudahan fasilitas kredit KUR dengan bunga yang sangat rendah dengan tanpa jaminan dan kebijakan pemerintah tentang kemudahan pemasaran produk UMKM melalui retail modern dan pasar online. Berikut ini adalah data persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2021-2025.

Tabel 2. 246 - Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	8.414	9.512	10.458	11.420	11.980
2	Jumlah seluruh UKM	Unit	8.485	9.583	10.529	11.491	12.051
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,16	99,26	99,33	99,38	99,41

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2026

2.4.4.19. Urusan Penanaman Modal

2.4.4.19.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor merupakan orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Selama tahun 2021 sampai 2023 jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Soppeng mengalami kenaikan tiap tahun dimana pada tahun 2021 sebanyak 63 investor dan pada tahun 2022 menjadi 87 investor atau terjadi peningkatan sebanyak 24 Investor, tahun 2023 kembali meningkat menjadi 115 investor atau terdapat penambahan 28 investor. Tahun 2024 terjadi penurunan investor berskala nasional sebesar 48 investor dan kembali meningkat pada tahun 2025 sebanyak 125 investor. Investor tersebut lebih banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor perdagangan besar dan eceran maupun sektor jasa.

Tabel 2. 247 - Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	63	87	115	48	125

Sumber : Dinas PMPTSP, 2026

2.4.4.19.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Sejalan dengan peningkatan jumlah investor yang menginvestasikan modalnya di Kabupaten Soppeng, maka perkembangan nilai investasi perusahaan PMDN juga cenderung meningkat signifikan. Pada tahun 2021 nilai investasi perusahaan PMDN di Kabupaten Soppeng mencapai Rp 123.688.144.297 kemudian mengalami penurunan menjadi Rp70.170.547.040 di tahun 2022 dan 2023 kembali meningkat menjadi Rp83.478.144.550 pertumbuhan nilai investasi tersebut diharapkan lebih menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Soppeng akan tetapi di tahun 2024 investasi mengalami penurunan pada posisi Rp72.439.444.796 dan meningkat kembali di tahun 2025 sebesar Rp102.472.369.085.

Tabel 2. 248 - Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun 2021-2025

URAIAN	SAT	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Rp	123.688.144.297	70.170.547.040	83.478.114.550	72.439.444.796	102.472.369.085

Sumber : Dinas PMPTSP, 2026

2.4.4.19.3. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Secara umum, nilai realisasi PMDN di Kabupaten Soppeng kurun waktu 2021-2025 mengalami fluktuasi. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kenaikan/penurunan realisasi PMDN pada tahun 2021 mencapai 114,52%. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai realisasi sebesar 37,85%, sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi 42,02% sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian -13%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan sebsaar 41% dengan Realisasi PMDN Tahun Evaluasi-Realisasi PMDN Tahun sebelum Evaluasi sebesar Rp30.032.924.289.

Tabel 2. 249 - Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Tahun 2021-2025

URAIAN	SAT	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi PMDN Tahun Evaluasi – Realisasi PMDN Tahun sebelum Evaluasi	Rp	66.029.477.044	15.915.323.289	25.516.910.843	-11.038.669.714	30.032.924.289
Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rp	57.658.667.253	42.045.880.378	57.961.203.667	83.478.114.510	72.439.444.796
Kenaikan / Penurunan nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	114,52	37,85	42,02	-13	41

Sumber : Dinas PMPTSPTKT, 2026

2.4.4.20. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

2.4.4.20.1. Persentase Wirausaha Muda

Pengembangan kewirausahaan pemuda merupakan kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Soppeng memiliki diskresi untuk memfasilitasi untuk membangun wirausaha muda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan bantuan akses permodalan. Pada tahun 2021 jumlah wirausaha muda sebanyak 547 orang dan jumlah seluruh wirausaha sebanyak 547 orang atau mencapai 100%, sedangkan pada tahun 2022 terdapat peningkatan jumlah seluruh wirausaha sebanyak 975 orang dan jumlah wirausaha muda sebanyak 911 orang atau mencapai 93,44%. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah wirausaha menjadi 13.441 dan penurunan wirausaha muda sebanyak 703 orang sehingga capaian persentase wirausaha muda menjadi 5,23%. Di tahun 2024 capaian tersebut mengalami peningkatan

sebesar 5,31% dengan jumlah wirausaha muda sebanyak 737 orang. Peningkatan tersebut didorong oleh kemajuan teknologi dan informasi, sehingga kegiatan usaha yang berhubungan dengan usaha-usaha kecil dan menengah dapat berkembang dengan cepat.

Tabel 2. 250 - Persentase Wirausaha Muda Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah wirausaha muda	Orang	547	911	703	737	40
2	Jumlah seluruh wirausaha	Orang	547	975	13.441	13.882	228
	Persentase wirausaha muda	%	100	93,44	5,23	5,31	17,54

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.20.2. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Para pelatih yang memegang cabang olahraga, wajib memiliki 'lisensi' atau sertifikat baik level Nasional maupun level Daerah Sertifikat kepelatihan ini sebagai syarat bagi para pelatih, agar menghasilkan atlet-atlet yang berkualitas dan meraih prestasi terbaik. Jumlah pelatih bersertifikat di Kabupaten Soppeng sejak tahun 2021 sampai tahun 2025 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2021 dan 2022 cakupan pelatih yang bersertifikat sebanyak 46 pelatih, sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 45 pelatih. Pada tahun 2024 pelatih yang bersertifikasi mengalami penurunan dengan jumlah pelatih yang bersertifikat sebanyak 41 orang. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan jumlah pelatif yang bersertifikat sebanyak 42 orang dari 72 orang pelatih yang ada dengan persentase sebesar 58,33%.

Tabel 2. 251 - Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	46	46	45	41	42
2	Jumlah Seluruh pelatih	Orang	66	72	72	72	72
	Cakupan pelatih yang bersertifikat	%	69,70	63,89	62,50	56,94	58,33

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.20.3. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Pembinaan atlet usia dini dapat menjadi program strategis di daerah. Sebab, tidak akan muncul atlet berprestasi tanpa partisipasi, sedangkan partisipasi hanya bisa dimulai dari pembinaan di usia dini. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng cukup konsisten dalam pelaksanaan pembinaan atlet muda. Di tahun 2021 sebanyak 380 atlet muda berprestasi atau mencapai 98,45% dari jumlah seluruh atlet 386 orang, sedangkan tahun 2022 terdapat penurunan jumlah atlet muda berprestasi hanya 44 orang atau mencapai 41,12% dari jumlah seluruh atlet sebanyak 107 orang. Penurunan tersebut diakibatkan karena masih terdapat wabah *Covid 19* dan berkurangnya perekrutan atlet pelajar karena berkonsentrasi pada kegiatan porprov. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah atlet muda meningkat mencapai 543 orang namun tidak diikuti dengan penambahan atlet muda berprestasi yang hanya sebesar 42 atlet muda sehingga cakupan pembinaan atlet muda mencapai 7,73%. Di tahun 2024 cakupan pembinaan atlet muda meningkat sebesar 16,13% dengan jumlah atlet muda yang berprestasi sebesar 96 orang dari 595 jumlah seluruh atlet muda yang ada di Kabupaten Soppeng. Kondisi tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan cakupan pembinaan atlet muda sebesar 16,81% atau 100 Orang atlet muda yang berprestasi dari 595 orang keseluruhan atlet yang muda yang ada.

Tabel 2. 252 - Cakupan Pembinaan Atlet Muda Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah atlet muda berprestasi	Orang	380	44	42	96	100
2	Jumlah Seluruh atlet muda	Orang	386	107	543	595	595
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	98,45	41,12	7,73	16,13	16,81

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.20.4. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat dalam satu tahun merupakan gambaran prestasi yang dicapai pada bidang pengembangan keolahragaan. Pada tahun 2021 jumlah atlet yang memenangi kejuaraan sebanyak 9 orang, pada tingkat nasional terdapat 2 atlet yang memenangi kejuaraan sedangkan pada tingkat provinsi sebanyak 7 orang. Pada tahun 2022 sebanyak 68 orang yang meliputi 1 orang atlet pada tingkat internasional untuk cabang olahraga karate pada even olahraga sea games, 4 orang untuk tingkat nasional untuk cabang olahraga untuk cabang olahraga panahan pada even olahraga kejurnas panahan senior dan bulutangkis pada even olahraga pekan paralimpiade Nasional (Peparnas) dan 55 orang untuk tingkat provinsi pada even olahraga kejurda, porprov, popda dan peparprov. Pada tahun 2023 terdapat 139 atlet Kabupaten Soppeng yang berprestasi meliputi tingkat internasional sebanyak nasional 3 orang dan tingkat nasional 86 orang serta tingkat provinsi sebanyak 47 orang. Capaian tersebut mengalami peningkatan di tahun 2024 dengan jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 105 orang yang terdiri dari 63 orang yang berprestasi di tingkat provinsi dan 42 orang yang berprestasi di tingkat nasional. Kondisi di tahun 2025 terjadi penurunan atlet yang berprestasi yakni sebanyak 68 orang yang terdiri dari 63 orang atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi, 1 orang atlet yang berprestasi di tingkat Nasional, dan 4 orang atlet yang berprestasi di tingkat Internasional.

Tabel 2. 253 - Jumlah Atlet yang Berprestasi Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Atlet yang memenangi kejuaraan tingkat dalam satu tahun						
	a. Internasional	Orang	0	1	3	0	4
	b. Nasional	Orang	2	4	86	42	1
	c. Provinsi	Orang	7	63	47	63	63

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2026

2.4.4.20.5. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Soppeng di tiap kejuaraan berfluktuasi tiap tahun. Pada tahun 2021 prestasi olahraga di kabupaten Soppeng sebanyak 4 cabang yaitu Prestasi Kejuaraan pada PON Paralimpic (2 orang), Kejuaraan Tennis Meja Kelompok Umur Se-Sulsel 2021 (1 Orang) dan Kejuaraan Menembak Kapolda Sulsel CUP IX 2021 (1 Orang), sedangkan tahun 2022 sebanyak 68 prestasi olahraga yang terdiri dari Porda 33 prestasi, Popda 14 prestasi, Kejurda 4 prestasi, dan Kejuaraan lain 17 prestasi. Di tahun 2023 prestasi cabang olahraga yang dimenangkan mengalami peningkatan sebanyak 12 prestasi di tingkat Kejurda dan 124 prestasi di kejuaraan lainnya sedangkan di tahun 2024 sebanyak 105 prestasi yang terdiri dari 2 prestasi ditingkat popda, 13 prestasi di tingkat kejurda dan 90 prestasi di kejuaraan lainnya. Kondisi di tahun 2025 terdapat 68 prestasi olahraga yang dimenangkan, hal tersebut menunjukkan adanya penurunan dikarenakan induk cabang olahraga lebih memfokuskan diri pada kegiatan praporprov sehingga tidak mengikuti kejuaraan yang lain.

Tabel 2. 254 - Jumlah Prestasi Olahraga Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun						
	a. PRAPORDA	Prestasi	0	0	0	0	0
	b. PORDA	Prestasi	0	33	0	0	0
	c. POPDA	Prestasi	0	14	0	2	0
	d. KEJURDA	Prestasi	0	4	12	13	0
	e. KEJUARAAN LAIN	Prestasi	4	17	124	90	68

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng,2026

2.4.4.21. Urusan Statistik

2.4.4.21.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Sistem data statistik yang terintegrasi adalah hasil pengolahan sumber data statistik yang terpusat dan terpadu dalam satu sistem yang sama sehingga dapat dengan mudah diakses dan diuji tingkat keakuratannya. Sumber data statistik Kabupaten Soppeng bersumber dari sensus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng serta data primer dan sekunder dari Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.

Dinas Komunikasi dan Informatika melalui bidang statistik dan persandian sebagai pelaksana dalam mengintegrasikan data statistik. Pada tahun 2021-2025 DISKOMINFO menerbitkan aplikasi e-data yang digunakan sampai saat ini untuk menghimpun data dan statistik dari berbagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 255 - Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi (Ada/Tidak ada)	(Ada/Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

2.4.4.21.2. Buku ”Kabupaten dalam Angka”

Buku Kabupaten Soppeng dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang menyediakan data statistik yang lengkap, menyeluruh dan terintegrasi mengenai karakteristik dan keadaan sosial ekonomi Kabupaten Soppeng. Data yang dimuat bersumber dari BPS Kabupaten Soppeng dan perangkat/daerah atau instansi terkait. Pada tahun 2021-2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng telah merilis Buku Soppeng dalam Angka, begitu juga pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2. 256 - Buku ”Kabupaten Dalam Angka” Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Buku ”Kabupaten Dalam Angka”(Ada/Tidak ada)	(Ada/Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

2.4.4.21.3. Buku “PDRB”

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan buku yang memuat salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Buku PDRB pada dasarnya memuat jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng menerbitkan Buku PDRB Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir. Selain itu pada Buku Soppeng Dalam Angka tahun 2021 telah memuat BAB tersendiri yang memuat Produk Domestik Regional Bruto dengan capaian pada tahun 2020, demikian halnya juga untuk tahun-tahun selanjutnya.

Tabel 2. 257 - Buku ”PDRB” Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Buku ”PDRB” (Ada/Tidak ada)	(Ada/Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

2.4.4.22. Urusan Persandian

2.4.4.22.1. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Praktek komunikasi persandian di Kabupaten Soppeng belum dapat dilaksanakan secara merata kualitasnya. Jenis risiko dan ancaman yang paling mendominasi pengelolaan persandian di Kabupaten Soppeng terkait dengan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi dan kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan informasi berklasifikasi walaupun disadari bahwa pengelolaan persandian di pemerintah daerah akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemda dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pada tahun 2021 persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam berkomunikasi sebesar 76,47%, sedangkan tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 100%. Pada tahun 2024 dan tahun 2025 terjadi penurunan capaian sebesar 91,18% dengan jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah sebanyak 31 Perangkat Daerah dari 34 total Perangkat Daerah yang ada. Penurunan tersebut dikarenakan adanya OPD yang menggunakan keamanannya sendiri terkait sandi dalam komunikasi.

Tabel 2. 258 - Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	OPD	26	34	34	31	31
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	34	34	34	34	34
	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	76,47	100,00	100,00	91,18	91,18

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

2.4.4.23. Urusan Kebudayaan

2.4.4.23.1. Seni, Budaya dan Olahraga

Kinerja Pembangunan daerah di bidang seni dan budaya diukur dari indikator- indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Grup kesenian yang terbentuk di Kabupaten Soppeng terdiri atas beberapa sanggar seni dan kelompok seni budaya yang dibentuk baik oleh sekolah, desa maupun kelompok pemuda. Sanggar seni yang ada umumnya berfokus pada seni musik dan tari tradisional dan kontemporer. Sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan seni dan budaya tradisional, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi memberikan bantuan berupa alat dan dana pembinaan bagi sanggar seni yang telah terdaftar. Dengan adanya sanggar seni diharapkan semakin banyak generasi muda yang dapat menyalurkan hobby mereka di bidang seni, yang secara tidak langsung melakukan pelestarian budaya daerah. Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 penduduk adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2. 259 - Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah grup kesenian	Grup	15	15	16	16	16
2	Jumlah penduduk	Jiwa	237.115	238.967	237.875	238.612	240.955
	Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	0,63	0,63	0,67	0,67	0,65

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Gedung kesenian sebagai wadah atau tempat berkumpul, berekspresi dan berkreasi para seniman penting untuk dimiliki oleh setiap daerah.

Namun hingga akhir tahun 2022, Kabupaten Soppeng belum memiliki gedung kesenian. Sementara Capaian Perkembangan Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 260 - Capaian Perkembangan Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	3.98	3.98	3.98	4,57	4,57
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	0.04	0.04	0.04	0.41	0,41

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Soppeng, 2024

Di Kabupaten Soppeng terdapat 96 klub olahraga yang tersebar di 8 Kecamatan, atau dengan perbandingan 3,98 per 10.000 penduduk. Sementara untuk gedung olahraga terdapat 1 gedung olahraga yang merupakan milik pemerintah daerah yaitu Gedung KONI dengan perbandingan 0,04 per 10.000 penduduk. Angka ini belum termasuk gedung olahraga yang dikelola pihak swasta yang tersebar di berbagai tempat di setiap kecamatan.

2.4.4.23.2. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Data terkait jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Soppeng selama tahun 2019-2021 belum ada, pada tahun 2022 terdapat inventarisasi dan pencatatan ekspresi budaya tradisional intelektual komunal berupa makanan tradisional seperti tape bolong, di samping itu karya budaya yang telah di inventarisasi berupa karya seni *matimpa bujung*, karya seni *pattaungeng* dan *maccera arajang*.

2.4.4.23.3. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, pengelolaan cagar budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Sehingga, dapat dikatakan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah. pengelolaan dan pelestarian cagar budaya merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat.

Salah satu tujuan pengelolaan cagar budaya yaitu kebermanfaatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cagar budaya yang dikelola bukan hanya berdampak pada lestarinya cagar budaya, tetapi juga memberikan manfaat berupa kesejahteraan bagi masyarakat. Pada tahun 2023 untuk jumlah cagar budaya yang terdata sebesar 40 unit, sedangkan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu hingga tahun 2023 adalah 16 (enam belas) cagar budaya yaitu kompleks makam jera lompoe, kompleks makam jera caddie, situs megalitik umpungeng, situs megaliltik tinco, kompleks makam syekh abdul majid, situs palaeolitik calio, kompleks makam petta jangko, kompleks makam pattojo, benteng pattojo, museum villa yuliana, situs palaeolitik lakibong, situs bola ridie, saoraja mario, situs arung apalakka, bola soba somba opu dan saoraja pattojo.

Tabel 2. 261 - Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	Unit	3	3	8	8	16

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

2.4.4.24. Urusan Perpustakaan

2.4.4.24.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun

Indikator ini menunjukkan berapa banyak pengunjung perpustakaan yang datang di perpustakaan yang telah disediakan Pemerintah Daerah dalam satu tahun. Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi setiap tahun.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan pada tahun 2021 mencapai 0,01% dan pada tahun 2022 jumlah kunjungan keperpustakaan selama 1 tahun sebanyak 24.750 orang atau mencapai 0,11%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan capaian 0,63% dengan jumlah pengunjung sebanyak 122.149 pengunjung. Kemudian pada tahun 2024 jumlah pengunjung perpustakaan pertahun menurun sebesar 0,48 dari 122.849 pengunjung dari jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 232.977 orang. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan kunjungan atau jumlah kunjungan sebanyak 96.017 orang, hal tersebut diakibatkan karena akses terhadap buku atau bacaaan yang bersifat digital lebih mudah diakses/didapatkan oleh Masyarakat.

Tabel 2. 262 - Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	2.707	24.750	122.149	112.849	96.017
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	192.190	235.574	194.349	232.977	141.354
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per	%	0,01	0,11	0,63	0,48	0,67

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2026

2.4.4.24.2. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Indikator ini menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memberi akses yang cukup bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bahan bacaan. Pengadaan bahan pustaka baru sangat berguna untuk menyegarkan koleksi bahan pustaka yang ada, sekaligus untuk menggantikan bahan pustaka yang sudah kadaluwarsa untuk di *stock opname*. Pada tahun 2021 jumlah koleksi buku yang tersedia buku sebanyak 101.112 koleksi atau mencapai 100% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan capaian 33,04% dengan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 200.477 koleksi dari 606.860 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Pada tahun 2023 jumlah koleksi buku mengalami penurunan dengan jumlah koleksi sebanyak 38.436 buku. Di tahun 2024 capaian koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 34,13%. Kondisi di tahun 2025 juga menunjukkan adanya penurunan Dimana persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan sebanyak 31,78% atau terdapat 12.061 judul buku dari 37.952 buku yang ada di perpustakaan daerah Kabupaten Soppeng. Capaian koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Soppeng pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 263 - Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Koleksi	101.112	200.477	12.013	12.953	12.061
2	Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Koleksi	101.112	606.860	38.436	37.953	37.952
	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	%	100	33,04	31,25	34,13	31,78

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2026

2.4.4.24.3. Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Soppeng. Pada tahun 2021 rasio perpustakaan persatuan penduduk sebesar 1,58 poin hal ini dikarenakan jumlah penduduk bertambah sedangkan jumlah perpustakaan tetap. Di tahun 2022 terdapat penambahan jumlah penduduk dan tidak berbanding lurus dengan jumlah perpustakaan sehingga capaiannya pada posisi 1,57 poin. Kemudian pada tahun 2023 kembali menurun mencapai 1,51 poin dan meningkat di tahun 2024 sebesar 1,62 poin, hal ini disebabkan pertambahan penduduk yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah perpustakaan hingga 392 unit. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan capaian rasio perpustakaan persatuan penduduk sebesar 0,04 poin dimana jumlah perpustakaan juga menurun sebesar 103 unit. Era digital menjadi tantangan dalam penyediaan layanan perpustakaan di daerah, sehingga perpustakaan digital perlu didorong dan dikembangkan di daerah.

Tabel 2. 264 - Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perpustakaan	Unit	375	375	365	392	103
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	237.875	238.612	240.955	241.333	241.777
	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Poin	1,58	1,57	1,51	1,62	0,04

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2025

2.4.4.24.4. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Indikator ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk datang berkunjung ke perpustakaan-perpustakaan yang telah disediakan. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2021 rata-rata pengunjung perpustakaan mencapai 8.924 pengunjung, dan pada tahun 2022 meningkat dengan jumlah pengunjung 24.750 orang. Pada tahun 2023 jumlah rata-rata pengunjung meningkat menjadi 122.149 orang. Di tahun 2024 terjadi penurunan pengunjung perpustakaan dengan rata-rata pengunjung sebanyak 112.849 orang. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan sebesar 8.001 orang pengunjung. Salah satu faktor menurunnya pengunjung di perpustakaan daerah dikarenakan mudahnya masyarakat untuk mengakses buku digital yang ada sehingga perlu dilakukan upaya dalam peningkatan pengunjung perpustakaan dengan menyediakan sarana maupun prasarana penunjang dengan menciptakan suasana dan nuansa berbeda, baik penyediaan e-book dan bacaan digital lainnya.

Tabel 2. 265 - Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Rata - Rata Pengunjung Perpustakaan / Tahun	Orang	8.924	24.750	122.149	112.849	8.001

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2026

2.4.4.24.5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Indikator ini menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan, karena semakin banyak koleksi judul buku, maka akan semakin banyak alternatif bagi pengunjung yang datang ke perpustakaan. Semakin bervariasi koleksi perpustakaan akan semakin menarik bagi pengunjung. Pada tahun 2021 jumlah koleksi judul buku perpustakaan sebanyak 101.112 judul buku dan meningkat menjadi 200.477 judul buku di tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 jumlah koleksi judul buku

sebanyak 12.013 meningkat di tahun 2024 sebanyak 12.953 judul buku. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan dengan jumlah judul buku yang tersedia sebanyak 12.061.

Tabel 2. 266 - Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul Buku	101.112	200.477	12.013	12.953	12.016

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2026

2.4.4.24.6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Perpustakaan di Kabupaten Soppeng sampai saat ini sudah memiliki pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Dimana pada tahun 2021 sebesar 55,56%. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 19 orang dari 45 orang jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai, dengan persentase sebesar 42,22%, sedangkan capaian tahun 2023 tercatat 18 orang dengan capaian 100% dan menurun di tahun 2024 sebesar 5%. Kondisi di tahun 2025 kembali menunjukkan penurunan sebesar 4% akan tetapi terjadi peningkatan jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai.

Penurunan tenaga pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat karena adanya ASN yang memasuki masa purna bakti serta meninggal dunia. Namun jika dibandingkan dengan jumlah perpustakaan yang ada, masih dibutuhkan tambahan tenaga pengelola perpustakaan untuk memaksimalkan pelayanan perpustakaan. Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang ada, belum sebanding dengan jumlah perpustakaan yang ada.

Tabel 2. 267 - Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Orang	25	19	18	1	1
2	Jumlah Seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Orang	45	45	18	20	25
	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan penilai yang Memiliki Sertifikat	%	55,56	42,22	100	5	4

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2026

2.4.4.25. Urusan Kearsipan

2.4.4.25.1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pada dasarnya arsip yang ada di setiap Perangkat Daerah memiliki umur tertentu, sehingga ada arsip yang dalam periode waktu tertentu dapat dimusnahkan, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan berkas dan arsip di tiap-tiap Perangkat Daerah. Dalam hal pengelolaan arsip, Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Soppeng setiap tahun melakukan pembinaan kepada perangkat daerah secara bertahap. Namun demikian, belum semua perangkat daerah telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku hingga tahun 2021 sebesar 20,59%, meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 44,12 %, sedangkan pada tahun 2023-2025 mencapai 100% atau seluruh OPD sebanyak 34 perangkat daerah telah menerapkan arsip secara baku. Peningkatan jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dari tahun sebelumnya hanya 15 OPD, kondisi tersebut menggambarkan bahwa perangkat daerah meningkatkan kepeduliannya terhadap pengelolaan arsip.

Tabel 2. 268 - Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Arsip Secara Baku	OPD	7	15	34	34	34
2	Jumlah Perangkat Daerah	OPD	34	34	34	34	34
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku	%	20,59	44,12	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2026

2.4.4.25.2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk peningkatan kemampuan SDM pengelola kearsipan setiap tahun. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 jumlah kegiatan peningkatan SDM kearsipan melalui peenyelenggaraan sosialisasi sebanyak 1 kegiatan. Pada tahun 2023 dan 2024 peningkatan SDM pengelola kearsipan meningkat menjadi 2 kegiatan. Kondisi di tahun 2023 terjadi peningkatan kegiatan dalam peningkatan SDM kearsipan sebanyak 3 kegiatan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di Kabupaten Soppeng yang selanjutnya perlu di tingkatkan di tahun-tahun selanjutnya.

Tabel 2. 269 - Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM kearsipan	Kegiatan	1	1	2	2	3

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2026

2.4.4.26. Urusan Pariwisata

2.4.4.26.1. Kunjungan Wisata

Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, terus berupaya untuk mengoptimalkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng. Kepariwisataan adalah salah satu sektor yang memiliki prospek dikembangkan di Kabupaten Soppeng, karena sektor ini memiliki potensi yang cukup besar. Selama ini kepariwisataan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, khususnya dari objek wisata yang dikembangkan, seperti objek wisata permandian alam ompo, permandian alam Lejja, permandian citta dan beberapa objek wisata lainnya yang dikelola pemerintah desa.

Kinerja kunjungan wisata dihitung dari jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kabupaten Soppeng dibagi dengan jumlah kunjungan wisata yang direncanakan, berikut adalah data kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2021-2025.

Tabel 2. 270 - Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kabupaten	Orang	226.297	262.239	255.990	272.169	173.527
2	Jumlah kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten	Orang	70.000	101.150	146.000	211.788	262.500
3	Kunjungan Wisata (%)	%	323	259,26	175	129	66,11

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 226.297 orang dari target kunjungan 70.000 orang sehingga mencatat capaian 323%. Penentuan target yang ditetapkan cukup rendah dikarenakan pandemi Covid-19, dari target tersebut tidak diperkirakan jumlah peningkatan kunjungan wisata di tahun 2021 sehingga capaiannya melonjak drastis sedangkan pada tahun 2022 Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten

mencapai 262.239 atau mencapai 259,26% dan pada tahun 2023 mencapai 255.990 atau 175% dari 146.000 orang yang ditargetkan. Di tahun 2024 jumlah capaian kinerja kunjungan wisata mengalami peningkatan sebanyak 272.169 orang dengan persentase capaian sebesar 129%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan terjadi penurunan kunjungan wisata yakni sebanyak 173.527 jiwa atau sebesar 66,11% dari yang ditargetkan.

Berdasarkan data di atas terlihat jika jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng selama tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Salah satu penghambat terkait persentase kunjungan pariwisata tersebut karena ketidaksiapan destinasi wisata yang ada. Ketidaksiapan tersebut dalam arti minimnya pengembangan objek wisata. Di sisi lain destinasi wisata di daerah lain berkembang pesat baik dari segi jumlah maupun pengembangan.

2.4.4.26.2. Lama Kunjungan Wisata

Lama Kunjungan Wisata, menunjukkan berapa hari rata-rata lama tinggal wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Soppeng, karena semakin lama waktu tinggal wisatawan diharapkan dapat lebih banyak kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Semakin lama waktu tinggal wisatawan maka semakin banyak mereka membelanjakan uang yang dimiliki, ini tentu bernilai positif dalam pergerakan ekonomi daerah yang pada gilirannya akan semakin banyak pemasukan daerah dari sektor tersebut. Rata-rata lama kunjungan wisata selama tahun 2021-2025 pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 271 - Rata-Rata Kunjungan Wisata dalam Satu Tahun, pada Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Hari	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Pada tabel di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2021-2025, rata-rata lama kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng mengalami stagnan, yaitu rata-rata 2 (dua) hari. Tahun 2021 sampai pada tahun 2025 mengalami peningkatan kembali menjadi 2 hari lama kunjungan wisata. Secara keseluruhan rata-rata lama kunjungan wisata tersebut masih rendah akibat masih kurangnya objek wisata dan masih kurangnya jumlah sarana akomodasi serta belum optimalnya pengemasan paket wisata yang terintegrasi.

2.4.4.26.3. PAD Sektor Pariwisata

Sektor kepariwisataan merupakan salah satu potensi daerah yang berkontribusi dalam penerimaan daerah. Potensi tersebut, di harapkan dapat terus meningkatkan sumbangannya dalam penerimaan pendapatan asli daerah, termasuk pendapatan sektor kepariwisataan selain retribusi tempat rekreasi, seperti pajak hotel, pajak restoran dan retribusi penginapan, villa, dan pesanggrahan. Pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, selama kurun waktu tahun 2021-2025 pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 272 - PAD Sektor Pariwisata Tahun 2021-2025

URAIAN	SAT	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
PAD sektor Pariwisata	Rp	276.697.000	293.826.000	340.840.000	2.590.437.000	2.271.743.896
Total PAD	Rp	155.470.054.145	158.232.550.953	141.955.887.019	167.718.455.777	209.908.563.877
PAD sektor Pariwisata	%	0,18	0,19	0,24	1,54	1,08

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 hanya mencapai 1,19%, mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan capaian 0,18% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,24%. Pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,54%.

Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor pariwisata belum menjadi penggerak PAD, di samping itu terdapat lokasi wisata yang dikelola oleh perumda dalam bentuk penyertaan modal. Rincian pendapatan asli daerah sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 273 - Rincian Penerimaan Sektor Kepariwisataan Tahun 2019-2023

JENIS PENDAPATAN	SAT	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Hotel	Rp	170.512.926,80	106.643.080,00	90.220.115,00	171.792.705,00	241.083.387,00
Pajak Restoran	Rp	1.382.555.911,00	718.206.196,00	257.038.217,00	206.180.1919,00	180.622.8267,00
Retribusi Tempat Penginapan /Villa	Rp	27.300.000,00	2.000.000,00	-		1.000.000,00
Retribusi tempat rekreasi	Rp	1.154.213.000,00	281.157.000,00	-	294.406.000,00	345.464.000,00
PAD Pariwisata	Rp	2.734.581.837,80	1.108.006.276,00	276.697.000,00	293.826.000,00	483.000.000

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng, 2024

Dari tabel di atas, tergambar rincian penerimaan dari sektor kepariwisataan, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, retribusi tempat penginapan/villa, dan retribusi tempat rekreasi. Jenis pendapatan yang paling besar kontribusinya yaitu retribusi tempat rekreasi dengan rata-rata kontribusi setiap tahun cenderung fluktuatif dengan nilai di atas satu milyar. Untuk sektor yang berkontribusi paling rendah adalah retribusi tempat penginapan/villa. Ini dapat berarti wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Soppeng rata-rata wisatawan lokal yang tidak menginap.

2.4.4.27. Urusan Pertanian

2.4.4.27.1. Cakupan Bina Kelompok Petani

Pelayanan urusan pertanian tidak terlepas dari pembinaan kelompok tani, wadah kelompok tani menjadi sasaran utama pembangunan pertanian. Cakupan bina kelompok tani menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan sektor pertanian. Pembinaan kelompok tani diwujudkan dalam bentuk fasilitasi bantuan, baik fisik berupa sarana dan prasarana maupun non fisik berupa pelatihan, kunjungan dan fasilitasi- fasilitasi yang dilakukan Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng melalui penyuluh pertanian. Adapun capaian cakupan bina kelompok tani pada tahun 2021-2025 Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 274 - Bina Kelompok Petani Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan	Kelompok tani	892	845	832	832	838
2	Jumlah kelompok tani	Kelompok	892	845	832	832	838
	Cakupan Bina Kelompok	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Katahanan Pangan, 2026

Pada tahun 2021 jumlah kelompok yang terbina sebanyak 892 kelompok tani dari total kelompok sebanyak 892 dengan persentase capaian sebesar 100%. Pada tahun 2022 jumlah kelompok berkurang menjadi 845 kelompok dengan persentase capaian sebesar 100% yang terbina. Jumlah kelompok tani kembali berkurang sebanyak 832 dengan 100% pembinaan di tahun 2023 dan 2024. Kondisi di tahun 2025 jumlah kelompok tani sebanyak 838 kelompok mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Fluktuasi capaian cakupan bina kelompok petani ini sangat bergantung pada ketersediaan tenaga penyuluh, updating data kelompok serta keaktifan kelompok tani itu sendiri.

2.4.4.27.2. Produksi Sektor Pertanian

Sektor pertanian sebagai penggerak utama kehidupan perekonomian di Kabupaten Soppeng ditunjukkan dari besarnya kontribusi sektor tersebut

terhadap PDRB sangat bergantung pada produksi hasil pertanian. Gambaran produksi hasil pertanian di Kabupaten Soppeng khususnya Tanaman Pangan Tahun 2021-2025 pada tabel berikut.

Tabel 2. 275 - Gambaran Produksi Hasil Pertanian Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
	Produksi Sektor Pertanian						
	a. Padi	Ton	280.911	296.945	275.768	247.785	272.401
	b. Jagung	Ton	178.341	191.742	138.096	182.031	241.202
	c. Kedelai	Ton	108	220	142,69	144,70	12,66
	d. Kacang Tanah	Ton	801	135	734,42	19,29	174,7
	e. Kacang Hijau	Ton	217	160	55,51	56,20	5,28
	f. Ubi Kayu	Ton	-	298	469,59	382,54	249,02
	g. Ubi Jalar	Ton	101	209	247,15	506,34	141,19
Jumlah		Ton	460.479	489.709	415.514	430.925	514.186

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2026

Pada tahun 2021 total produksi pertanian khusus 7 (tujuh) jenis tanaman pangan sebagaimana tabel di atas yaitu 460.479 ton dan mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 489.709 ton, dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 415.514. Peningkatan di tahun 2022 terjadi pada produksi sektor pertanian dengan peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, sementara untuk kecang tanah dan kacang hijau mengalami penurunan. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 415.514 ton dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 430.925 ton. Pada tahun 2023 terjadi fenomena el nino yang menyebabkan penurunan produksi pertanian yang sangat sangat signifikan. Kondisi di tahun 2025 kembali mengalami peningkatan sebesar 514.186 ton hal tersebut dikarenakan kondisi iklim yang membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.4.4.27.3. Produksi Sektor Perkebunan

Produksi hasil perkebunan di Kabupaten Soppeng juga menjadi salah satu andalan bagi pendapatan petani pada lahan kering, terutama jenis tanaman keras (tahunan) maupun tanaman perkebunan musiman. Berikut gambaran produksi hasil perkebunan Tahun 2021-2025.

Tabel 2. 276 - Gambaran Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Produksi Sektor						
	a. Kelapa Dalam	Ton	3.024,38	3.123,97	3.451,40	3.495,27	3.496,23
	b. Kelapa Hibrida	Ton	83,85	83,32	81,69	81,50	81,08
	c. Kopi Robusta	Ton	-	53,06	6,04	50,63	61,82
	d. Cengkeh	Ton	37,04	37,43	1,08	34,68	34,41
	e. Kakao	Ton	3.483,11	6.148,82	6.216,74	6.278,70	6.378,87
	f. Jambu Mete	Ton	825,12	825,16	26,67	562,84	479,28
	g. Lada	Ton	21,01	21,10	6,23	14,78	14,28
	h. Kemiri	Ton	2.029,42	2.031,06	2.100,50	2.102,16	2.103,02
	i. Aren	Ton	101,33	101,34	98,75	99,05	98,39
	j. Tembakau	Ton	121,60	104,16	131,49	168,30	149,00
	Jumlah	Ton	9.726,86	12.529,42	12.120,59	12.887,91	12.896,38

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2026

Pada tahun 2021 jumlah produksi hasil perkebunan mencapai 9.726,86 ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 12.529,42 ton. Peningkatan produksi hasil perkebunan tersebut pada tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya produksi kakao sebagai komoditi

terbesar pada sub sektor perkebunan melalui peningkatan luas lahan maupun peningkatan kualitas budidaya produksi kakao. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12.120,59 ton dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 12.887,91 ton. Kondisi di tahun 2025 kembali menunjukkan adanya peningkatan dengan produksi hasil Perkebunan sebesar 12.896,38 ton.

2.4.4.28. Urusan Perindustrian

2.4.4.28.1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah industri pengrajin yang difasilitasi oleh Pemerintah dengan jumlah keseluruhan industri pengrajin. Jumlah kelompok binaan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan terampil, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan akses pasar dan bahan baku, serta promosi dan pameran produk unggulan.

Grafik 2. 97 - Sentra Usaha Industri



Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2025

Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir telah berhasil membentuk dan membina sentra industri pada 5 Kecamatan. Untuk tahun 2023 sentra industri yang dikembangkan di Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri yakni sentra pertenunan *dare' padange*. Sentra-sentra industri yang dikembangkan ini sebagai pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi kluster. Berikut adalah data kinerja cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2021-2025.

Tabel 2. 277 - Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok Pengrajin	82	102	122	122	122
2	Jumlah kelompok pengrajin	Kelompok Pengrajin	144	164	184	184	184
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	56,94	62,2	66,3	66,3	66,3

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2026

Persentase cakupan bina kelompok pengrajin menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2021-2025, pada tahun 2021 cakupan bina kelompok pengrajin sebesar 56,94% meningkat di tahun 2022 sebesar 62,20% dengan jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan

binaan pemda sebanyak 102 kelompok dari 164 jumlah kelompok pengrajin. Pada tahun 2023 samapai tahun 2025 kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan sebanyak 122 kelompok pengrajin sehingga cakupan binaan mencapai 66,30% dengan jumlah kelompok pengrajin sebanyak 184 kelompok.

Perkembangan industri kerajinan di Kabupaten Soppeng tidak terlalu signifikan, namun industri kerajinan senantiasa mendapatkan perhatian dari pemerintah dan tetap dilakukan pembinaan sehingga akan terus berkembang. Lambatnya pertumbuhan industri kerajinan disebabkan karena animo masyarakat yang masih kurang terhadap industri kerajinan karena mereka beranggapan bahwa perputaran ekonomis industri pangan lebih cepat dari industri kerajinan yang butuh kreativitas dan keahlian khusus. Komitmen pemerintah untuk selalu mengembangkan industri kecil dan menengah diantaranya melalui pemberian kemudahan izin usaha dan pembinaan kepada industri kecil, penyusunan kebijakan industri terkait dengan industri penunjang, pelatihan, pembinaan dan bantuan alat dalam bentuk pinjam pakai (bantuan sarpras untuk IKM tidak dilanjutkan karena terkendala oleh kebijakan nasional tentang pemberian hibah kepada masyarakat), serta pengembangan sentra-sentra industri potensial. Peluang dan potensi pengembangan industri kerajinan di Kabupaten Soppeng adalah industri kerajinan/barang dari kayu, rotan, bambu, serat, dan industri sutera, industri olahan pertanian dan perkebunan (*ecoprint*) karena bahan baku cukup banyak namun persoalannya sangat sedikit masyarakat kita yang mau menggeluti industri kerajinan karena proses perputaran ekonominya cukup lambat dan pemasarannya masih terbatas.

2.4.4.29. Urusan Kelautan dan Perikanan

2.4.4.29.1. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Pelayanan urusan perikanan tidak terlepas dari pembinaan kelompok Nelayan. Cakupan bina kelompok nelayan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan sektor perikanan tangkap. Pembinaan kelompok nelayan diwujudkan dalam bentuk fasilitasi bantuan, baik fisik berupa sarana dan prasarana maupun non fisik berupa pelatihan, kunjungan dan fasilitasi-fasilitasi yang dilakukan Instansi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng melalui penyuluh perikanan. Adapun capaian cakupan bina kelompok nelayan Kabupaten Soppeng pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 278 - Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda	Kelompok Nelayan	3	0	11	0	3
2	Jumlah kelompok nelayan	Kelompok Nelayan	30	31	35	42	44
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	10	0	31,4	0	6,8

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2026

Pada tahun 2021 kelompok nelayan yang ada sebanyak 30 kelompok dengan kelompok yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah sebanyak 3 kelompok dan di tahun 2022 terjadi peningkatan kelompok nelayan sebanyak 31 kelompok akan tetapi tidak ada kelompok yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Di tahun 2023 jumlah kelompok nelayan Kembali mengalami peningkatan dengan jumlah 35 kelompok yang sebanyak 11 kelompok memperoleh bantuan dari pemerintah daerah. Pada tahun 2024 tidak ada kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dari 42 kelompok nelayan yang ada. Kondisi di tahun 2025 terdapat 3 kelompok nelayan yang memperoleh bantuan dari pemerintah daerah berupa mesin perahu dari 44 kelompok nelayan

yang ada di Kabupaten Soppeng. Kondisi dalam lima tahun terakhir tersebut terjadi fluktuasi dalam capaian cakupan bina kelompok nelayan, hal tersebut diakibatkan keterbatasan anggaran yang bergantung pada DAK fisik bidang kelautan dan perikanan serta kondisi keuangan daerah yang mengakibatkan bantuan terhadap kelompok nelayan tidak dianggarkan dalam APBD. Terkait pola pembinaan nelayan, Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan tetap melaksanakan pembinaan terhadap nelayan dengan baik yang meliputi kegiatan pembinaan kunjungan, pelatihan serta fasilitasi kelompok nelayan yang mencapai 100%.

2.4.4.29.2. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2021 sebesar 87,26% mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 87,17% dan kembali mengalami penurunan sebesar 81,2% pada tahun 2023. Di tahun 2024 produksi perikanan kelompok nelayana menalami peningkatan sebesar 2.807,22 ton dari 3.252,94 ton produksi ikan di daerah. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh mobilitas penangkapan di Danau Tempe dan kegiatan *restocking* (penebaran benih ikan) mulai rutin dilakukan untuk menormalkan kembali ekosistem perairan pasca revitalisasi. Pada tahun 2025 kembali terjadi penurunan produksi ikan hasil dari kontribusi kelompok nelayan dengan capaian 2.537,79 ton hal ini terjadi karena masih maraknya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang menyebabkan menurunnya populasi ikan selain itu disebabkan oleh masifnya perkembangan populasi ikan sapu-sapu. Berdasarkan hal tersebut upaya pengendalian yang dilakukan terkait penanganan ikan sapu-sapu sudah mulai digalakkan dengan mengadakan mesin penghancur dan penepung ikan sapu-sapu untuk menjadi pakan ternak. Sedangkan untuk penanganan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dilakukan dengan membentuk tim pembina dan pengawas danau Tempe untuk melakukan patroli di perairan Danau Tempe serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan ancaman pidana penggunaan alat tangkap yang dilarang.

Tabel 2. 279 - Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produksi Ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	2.989,10	3.017,85	2.749,82	2.807,22	2.537,79
2	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	3.426	3.461,93	3.386,14	3.252,94	3.139,64
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	87,26	87,17	81,2	86,3	80,83

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2026

2.4.4.29.3. Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Berdasarkan data, Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman cenderung tetap dikarenakan belum diketahui cara penghitungan potensi hasil tangkapan secara keseluruhan dan diperlukannya data awal terkait potensi sumber daya ikan yang ada di perairan umum yang meliputi danau, sungai dan rawa secara keseluruhan dan perlu dilakukan penghitungan MSY (pendugaan stok ikan di perairan) per jenis ikan di perairan.

Pada tahun 2021-2022 proporsi tangkapan ikan yang berada dalam Batasan biologis yang aman cenderung stagnan dengan capaian sebesar 125% sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 113% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 125%. Di tahun 2025 MSY (pendugaan stok ikan di perairan) tidak bisa dihitung pada skala kabupaten, selain itu

perhitungannya merupakan skala WPP yang merupakan kewenangan pusat. Pengelolaan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa proporsi tangkapan ikan tidak melebihi batas biologis yang aman di masa depan. Ini bisa mencakup kebijakan pengurangan kuota atau pembatasan musim tangkap. Pemantauan dan evaluasi yang rutin terkait stok ikan dan kapasitas penangkapan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem perikanan.

Tabel 2. 280 - Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah tangkapan ikan	Ton	2.989,10	3.017,85	2.749,82	2.807,22	N.a.
2	80% dari tangkapan maksimum lestari	Ton	2.391,28	2.414,28	2.438,02	2.245,78	
	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman	%	125	125	113	125	

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2026

2.4.4.29.4. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Berdasarkan data yang tersedia, rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial cenderung tetap dikarenakan Luas areal penangkap dan kawasan lindung perairan tidak mengalami perubahan. Kawasan lindung perairan yang tetap konstan pada tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa pengelolaan perlindungan kawasan perairan belum mengalami perubahan signifikan dalam hal ekspansi atau pemulihan kawasan. Meskipun rasio ini stabil, penting untuk mempertimbangkan terkait kawasan lindung tersebut cukup untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan. Selain itu perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kawasan lindung jika ada tekanan terhadap ekosistem perairan atau jika ada ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam laut. Kondisi di tahun 2025 kawasan lindung perairan/total luas perairan territorial yang dumana pengelolaan kawasan lindung kewenangan pusat dan provinsi.

Tabel 2. 281 - Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Kawasan lindung perairan	Ha	413	413	413	413	N.a.
2	Total luas perairan teritorial	Ha	3000	3000	3000	3000	
	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Poin	0,14	0,14	0,14	0,14	

Sumber : Dinas Peternakan, Kesehaan Hewan, dan Perikanan, 2026

2.4.4.30. Urusan Perencanaan Pembangunan

2.4.4.30.1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan pembangunan jangka panjang memuat penjabaran Visi dan Misi ke dalam tujuan jangka panjang, penjabaran sasaran pembangunan daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan dan prioritas alokasi sumber daya daerah. Karena RPJPD adalah salah dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menyusun Dokumen RPJPD Periode 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010, yang kemudian mengalami perubahan peraturan daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025. Untuk RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun

2025-2045.

Tabel 2. 282 - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2026

2.4.4.30.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dengan mengacu pada Dokumen RPJPD selanjutnya diturunkan kedalam perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD. Setiap RPJMD ditetapkan oleh Peraturan daerah. RPJMD periode tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026. Untuk RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 pada tanggal 20 agustus tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tabel 2. 283 - Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan- RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2026

2.4.4.30.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Dokumen yang memuat tentang perencanaan pembangunan daerah dalam jangka pendek (satu tahun) adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen tersebut disusun setiap tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 284 - Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2026

2.4.4.30.4. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah adalah dokumen yang berisi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Namun, karena sebagian besar data sudah tidak sesuai sehingga dokumen RTRW Kabupaten Soppeng perlu dilakukan peninjauan kembali.

Tabel 2. 285 - Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2026

2.4.4.30.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kabupaten Soppeng kedalam RKPD dapat dilaksanakan dengan persentase 100%. Hal tersebut didukung dengan adanya sistem informasi atau aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran.

Tabel 2. 286 - Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	Program	111	121	118	149	188
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Program	111	121	118	149	201
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2024

2.4.4.30.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD di Kabupaten Soppeng dari Tahun 2020-2024 dapat dilaksanakan dengan persentase 100% setiap tahunnya.

Tabel 2. 287 - Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah program APBD Tahun berkenaan	Program	1,34	111	121	118	149
2	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun	Program	1,34	111	121	118	149
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2025

2.4.4.30.7. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

RTRW kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten). rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. RTRW disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten/kota, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten/kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten/kota, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten/kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, serta acuan dalam administrasi pertanahan. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Soppeng secara garis besar dapat dikatakan telah sesuai 100%. Namun, data pada dokumen RTRW masih sangat umum, tidak spesifik dan perlu di update sehingga dokumen RTRW tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali.

2.4.4.31. Urusan Keuangan

2.4.4.31.1. Persentase SiLPA

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berdasarkan data laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng persentase SiLPA dari total APBD pada tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. SiLPA pada tahun 2025 sebesar Rp86.230.856.896,38 atau tercatat sebesar 7,55% dari total APBD.

SiLPA merupakan dana sisa yang hanya boleh digunakan dalam konteks pembiayaan yang fungsinya untuk menutupi defisit anggaran pada pembiayaan. Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penggunaan SiLPA selalu mengoptimalkan pada perubahan APBD. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 288 - Persentase SiLPA Tahun 2021-2025

URAIAN		Total SILPA	Total APBD	Persentase SILPA
TAHUN	2021	160.306.659.677,53	1.307.375.584.577,00	12,26
	2022	124.803.872.338,94	1.507.378.233.960,00	8,28
	2023	37.571.904.141,56	1.272.478.537.462,00	2,95
	2024	13.371.082.007,00	1.191.178.951.014,00	1,12
	2025	86.230.856.896,38	1.142.523.714.614,00	7,55

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2026

2.4.4.31.2. Persentase SiLPA Terhadap APBD

SiLPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan, yaitu adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng persentase SILPA dari Total APBD (Pendapatan) sepanjang tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. SiLPA yang ada dalam struktur APBD merupakan asumsi yang dipengaruhi oleh target penerimaan dan belanja yang mengakibatkan APBD berada pada kondisi surplus/defisit. Pada penyusunan APBD kebijakan Pemerintah Daerah dalam penetapan SiLPA selalu berasumsi null, sehingga terjadi keseimbangan antara pembiayaan dan belanja.

Tabel 2. 289 - Persentase SiLPA Terhadap APBD Tahun 2021-2025

URAIAN		Total SILPA	Total APBD	Persentase SILPA
TAHUN	2021	160.306.659.677,53	1.307.375.584.577,00	12,26
	2022	124.803.872.338,94	1.507.378.233.960,00	8,28
	2023	37.571.904.141,56	1.272.478.537.462,00	2,95
	2024	13.371.082.007,00	1.191.178.951.014,00	1,12
	2025	86.230.856.896,38	1.142.523.714.614,00	7,55

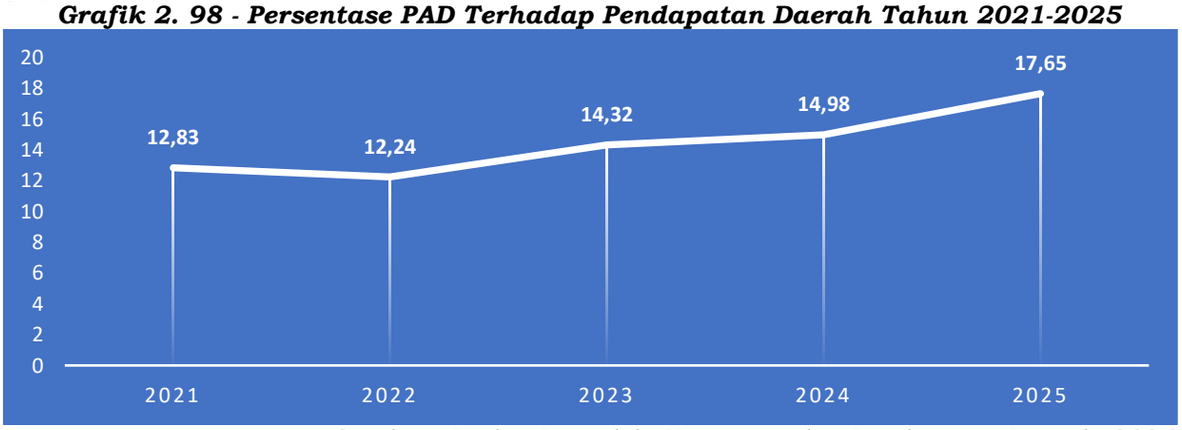
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2026

2.4.4.31.3. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya.

Persentase PAD terhadap pendapatan pada tahun 2021 mencapai 12,83% dan mengalami penurunan sebesar 12,24% pada tahun 2022 dan tahun 2023 meningkat dengan capaian 14,32%. Pada tahun 2024 capaian tersebut meningkat menjadi 14,98% dan meningkat kembali di tahun 2025 sebesar 17,65%. Berbagai langkah dan usaha ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan didukung regulasi yang mempermudah akses penagihan kepada para wajib pajak.

Grafik 2. 98 - Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2026

2.4.4.31.4. Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Program/kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2021 sebanyak 2 program dan 19 kegiatan sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 0 program dan 6 kegiatan dan pada tahun 2023 program yang tidak dilaksanakan sebanyak 1 program dan jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan. Di tahun 2024 program yang tidak dilaksanakan sebanyak 3 program sebesar 0,017% dan jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan sebanyak 10 kegiatan dengan capaian sebesar 0,021%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan persentase program yang tidak terlaksana sebesar 0,027% dan persentase kegiatan yang tidak terlaksana sebesar 0,025%.

Tabel 2. 290 - Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Program	2	0	1	3	5
2	Total Program dalam APBD	Program	175	177	178	180	184
3	Jumlah Kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Kegiatan	19	6	2	10	13
4	Total Kegiatan dalam APBD	Kegiatan	475	485	465	482	517
	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana						
	Persentase Program yang Tidak Terlaksana	%	1,14	0	0,006	0,017	0,027
	Persentase Kegiatan yang Tidak Terlaksana	%	4	1,24	0,004	0,021	0,025

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2026

2.4.4.31.5. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Salah satu mandatory spending dalam penyusunan APBD adalah belanja Pendidikan. Alokasi tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, dan sebagainya. Alokasi dana untuk belanja pendidikan di Kabupaten Soppeng telah sesuai Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), dengan pengalokasian belanja pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Pada tahun 2021 capaian tersebut tercatat sebesar 31,29% sedangkan tahun 2022 mengalami peningkatan dengan anggaran tercatat sebesar Rp413.638.792.675,00 atau mencapai 27,44%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan anggaran menjadi Rp389.858428.266,00 atau sebesar 30,64%. Di tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah belanja bidang urusan pendidikan sebesar Rp410.264.250.272,00 dengan persentase sebesar 33,42%. Kondisi di tahun 2025 persentase belanja pendidikan mengalami peningkatan sebesar 33,79% akan tetapi jumlah belanja pada bidang urusan Pendidikan mengalami penurunan dikarenakan total APBD juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 291 - Persentase Belanja Pendidikan (20%) Tahun 2021-2025

URAIAN		Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan (Rp)	Total APBD (Rp)	Persentase Belanja Pendidikan (20%)
TAHUN	2021	409.110.770.323,00	1.307.375.584.577,00	31,29
	2022	413.638.792.675,00	1.507.378.233.960,00	27,44
	2023	389.858.428.266,00	1.272.478.537.462,00	30,64
	2024	410.264.250.272,00	1.227.726.219.576,00	33,42
	2025	386.007.529.022,00	1.142.523.714.614,00	33,79

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2026

2.4.4.31.6. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Sama halnya dengan Pendidikan, Kesehatan juga merupakan salah satu mandatory spending dalam penyusunan APBD dengan persentase sebesar minimal 10 %. Di Kabupaten Soppeng telah mengalokasikan belanja kesehatan melebihi dari amanat peraturan tersebut, bahkan penganggaran belanja kesehatan tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp323.275.739.004 atau mencapai 24,73% mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar Rp312.777.809.087 dengan persentase 20,75% dan tahun 2023 mencatat alokasi anggaran sebesar Rp274.339.904.344,00 atau mencapai 21,56%. Pada tahun 2024 alokasi anggaran belanja kesehatan sebesar Rp277.843.433.821,00 atau mencapai 32,93% sedangkan di tahun 2025 alokasi belanja kesehatan meningkat sebesar Rp307.635.220.635,00 atau sebesar 26,93%.

Tabel 2. 292 - Persentase Belanja Kesehatan (10%) Tahun 2021-2025

URAIAN		Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Total APBD	Persentase Belanja Kesehatan (10%)
TAHUN	2021	323.275.739.004,00	1.307.375.584.577,00	24,73
	2022	312.777.809.087,00	1.507.378.233.960,00	20,75
	2023	274.339.904,344,00	1.272.478.537.462,00	21,56
	2024	277.843.433.821,00	843.815.412.056,00	32,93
	2025	307.635.220.635,00	1.142.523.714.614,00	26,93

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2026

2.4.4.31.7. Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Perubahan regulasi dibidang pengelolaan keuangan berkontribusi

terhadap penyajian struktur penganggaran daerah, perubahan tersebut tidak lagi mengakomodir postur penganggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung, akan tetapi APBD menyajikan belanja operasi, belanja barang jasa, dan belanja modal. Hal ini seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dengan demikian maka dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut maka untuk data 2022 tidak lagi disajikan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun pada tahun 2023 data sudah dapat disajikan kembali dengan capaian belanja langsung sebesar 88,59% dan belanja tidak langsung sebesar 11,41% di tahun 2024 capaian belanja langsung sebesar 86,92% dan jumlah belanja tidak langsung sebesar 13,08%. Kondisi di tahun 2025 belanja langsung mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 88,38% sedangkan belanja tidak langsung mengalami penurunan dengan persentase sebesar 11,62%.

Tabel 2. 293 - Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2021-2025

Uraian		Jumlah Belanja Langsung		Jumlah Belanja Tidak Langsung		Total APBD
		(Rp)	%	(Rp)	%	
TAHUN	2021	-	50,59	-	49,41	-
	2022	-	-	-	-	-
	2023	1.127.334.917.824,00	88,59	145.143.619.638,00	11,41	1.272.478.537.462,00
	2024	1.067.127.939.363,00	86,92	160.598.280.213,00	13,08	1.227.726.219.576,00
	2025	1.009.742.888.449,00	88,38	132.780.826.165,00	11,62	1.142.523.714.614,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2026

2.4.4.31.8. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Belanja bagi hasil merupakan alokasi yang diperuntukkan bagi desa dengan mengikuti proporsi penganggaran pendapatan pada APBD kabupaten, dengan demikian semakin tinggi realisasi pendapatan maka semakin tinggi belanja bagi hasil kabupaten kepada pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari Bagi hasil kabupaten/kota dan desa dari tahun 2021 sampai tahun 2025 mengalami peningkatan, pada tahun 2021 mencatat alokasi belanja bagi hasil sebesar Rp2.574.554.592,00 atau 0,20% dari Total APBD, tahun 2023 kembali meningkat dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.3091.161.390,00. Di tahun 2024 jumlah belanja bagi hasil sebanyak Rp3.324.547.344,00 dengan persentase sebesar 0,27%, di tahun 2025 terjadi peningkatan persentase belanja bagi hasil sebesar 0,43% atau dengan jumlah sebesar Rp4.958.417.937,00. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya dana transfer dari pusat dan PAD sehingga berpengaruh terhadap persentase dana bagi hasil ke desa.

Tabel 2. 294 - Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 2021-2025

URAIAN		Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa	Total APBD	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa
TAHUN	2021	2.574.554.592,00	1.307.375.584.577,00	0,2
	2022	3.061.461.365,00	1.507.378.233.960,00	0,2
	2023	3.309.161.390,00	1.272.478.537.462,00	0,26
	2024	3.324.547.344,00	1.227.726.219.576,00	0,27
	2025	4.958.417.937,00	1.142.523.714.614,00	0,43

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2026

2.4.4.31.9. Penetapan APBD

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng sangat berkomitmen dan memperhatikan tahapan penetapan APBD agar tepat waktu, dengan demikian pelaksanaan program kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu pula. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif, adanya sanksi tegas apabila APBD terlambat ditetapkan, konsistensi aturan dalam penyusunan APBD, peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah atasan dikeluarkan tepat waktu, dan transparansi dalam proses penyusunan APBD, serta adanya analisis standar belanja (ASB) untuk menilai kewajaran belanja.

Tabel 2. 295 - Penetapan APBD Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)	(Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2026

2.4.4.31.10. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng telah mendapat perbaikan sejak tahun 2012 dan bahkan sejak tahun 2014 sampai tahun 2025 telah mendapat predikat opini WTP yang diterbitkan oleh BPK RI. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah telah berjalan sangat baik.

2.4.4.32. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

2.4.4.32.1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap pegawai negeri sipil untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengikuti perkembangan, perubahan sistem dan teknologi dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu pendidikan dan Latihan mempunyai berbagai manfaat karier jangka panjang yang membantu pegawai untuk bertanggung jawab lebih besar di waktu yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Soppeng setiap tahun menyiapkan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. Berdasarkan data dari BPKSDM rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada tahun tahun 2021 sebesar 19,92 JP dan tahun 2022 meningkat secara signifikan dengan mencatat capaian sebanyak 59,31 JP. Pada tahun 2023 terjadi penurunan rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dengan capaian rata-rata 17 JP dan meningkat di tahun 2024 dan 2025 sebesar 20 JP. Pendidikan dan pelatihan tersebut termasuk Diklat yang diikuti PNS di luar dari Diklat yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 296 - Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	19,92 JP	59,31 JP	17 JP	20 JP	20 JP

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2026

2.4.4.32.2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) bagi PNS sangat penting untuk peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur, Salah satu bentuk Diklat tersebut adalah Diklat formal atau Diklat fungsional dimana Diklat tersebut

merupakan Diklat wajib oleh para calon dan pejabat fungsional tertentu. Pada 2021 jumlah ASN yang mengikuti Diklat formal adalah 329 orang atau 6,66 %, dari total ASN sebanyak 4.941 ASN. Pada tahun 2023 jumlah ASN yang mengikuti Diklat formal adalah 2.421 orang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan terdapat penurunan jumlah pegawai ASN dengan catatan sebesar 4.672 ASN sehingga capaiannya cenderung meningkat dengan capaian 51,82%. Di tahun 2024 capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 19,11% dengan jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 1.028 ASN. Kondisi tahun 2025 juga kembali mengalami penurunan dengan persentase sebesar 2,63% atau sebanyak 135 ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dari 5.140 total ASN.

Tabel 2. 297 - Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	ASN	329	329	2.421	1.028	135
2	Jumlah total ASN	ASN	4.941	4.960	4.672	5.378	5.140
	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	6,66	6,63	51,82	19,11	2,63

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2026

2.4.4.32.3. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Diklat kepemimpinan adalah Diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Diklat Kepemimpinan ini dilaksanakan guna mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dari aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Di Kabupaten Soppeng persentase pejabat ASN yang teah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural pada tahun 2021 sebesar 83,13% atau sebanyak 404 ASN yang telah mengikuti diklat struktural dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah 226 orang atau mencapai 47,18 % dari jumlah total jabatan sebanyak 479 jabatan, sedangkan pada tahun 2023 capaian meningkat hingga mencapai 83,40% dengan jumlah pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural sebanyak 402 ASN dari total 482 total jabatan. Capaian tersebut mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 6,22% atau 30 pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural dikarenakan terbatasnya anggaran dalam peningkatan kualitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan struktural. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan kembali adanya peningkatan dengan persentase capaian sebesar 45,05% atau 182 ASN yang mengikuti diklat structural dari 404 total jabatan yang ada.

Tabel 2. 298 - Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat struktural	Jabatan Pimpinan Tinggi	404	226	402	30	182
2	Jumlah Total Jabatan	Jabatan	486	479	482	482	404
	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	83,13	47,18	83,4	6,22	45,05

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2026

2.4.4.32.4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok

jabatan tinggi pada instansi pemerintah. pimpinan tinggi di Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati. Pengisian JPT harus melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan terakhir adalah penetapan dan pengangkatan. Di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Instansi Pemerintah sebanyak 33 orang hingga tahun 2023. Selanjutnya di tahun 2024 jumlah jabatan pimpinan tinggi yang ada di Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng sebanyak 25 orang dan di tahun 2025 sebanyak 26 orang cenderung stagnan yaitu sebanyak 33 orang. Penurunan angka tersebut terjadi karena adanya peralihan kepala daerah serta belum dilakukannya pengisian jabatan pimpinan tinggi yang masih kosong di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 299 - Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	33	33	33	25	26

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2026

2.4.4.32.5. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2021 jumlah jabatan administrasi di Kabupaten Soppeng sebanyak 1.880 dan mengalami perubahan seiring dengan dinamika kelembagaan sehingga tahun 2022 jumlah jabatan administrasi hanya sebanyak 1.368 dan tahun 2023 sebanyak 1.436. Penurunan angka capaian tersebut akibat adanya perubahan peta jabatan yang ada di lingkup kepegawaian. Di tahun 2024 jumlah jabatan administrasi sebanyak 1.263 dan mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 1.102 dikarenakan adanya penyesuaian kembali terhadap jabatan administrasi.

Tabel 2. 300 - Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Administrasi	1.880	1.368	1.436	1.263	1.102

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2026

2.4.4.32.6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dalam Undang-Undang ASN merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pada tahun 2021 di Kabupaten Soppeng, jumlah JFT sebanyak 3.091 orang sedangkan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 3.533 orang dan di tahun 2023 menjadi 3.037 orang, hal tersebut terjadi karena adanya peralihan ke jabatan fungsional atas penyetaraan jabatan pada level eselon empat. Kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 3.981 orang dan meningkat di tahun 2025 sebesar 4.036 orang. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan ASN dengan jabatan analis mengikuti uji kompetensi fungsional. Selain itu, setiap OPD telah menyusun formasi jabatan fungsional untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional yang ada di perangkat daerahnya masing- masing.

Tabel 2. 301 - Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Jabatan Fungsional	3.091	3.533	3.037	3.981	4.036

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2026

2.4.4.33. Urusan Penelitian dan Pengembangan

2.4.4.33.1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Soppeng dari tahun 2021 sampai tahun 2025 sebesar 100%. Namun dalam perumusan rencana kelitbangan ke depan perlu mengkoordinasikan dan merumuskan program dan kegiatan kelitbangan dengan stakeholder agar lebih terarah guna menjawab dinamika permasalahan dan mendukung pelaksanaan kelitbangan satu pintu, serta perlu penyusunan dan penyempurnaan regulasi yang berorientasi pada dukungan kelitbangan di pusat dan daerah.

Tabel 2. 302 - Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2026

2.4.4.33.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Dalam kurun waktu tahun 2021-2025 telah dilakukan beberapa penelitian dan pengembangan terhadap potensi-potensi yang ada di Kabupaten Soppeng, diharapkan hasil-hasil Litbang dapat segera dimanfaatkan oleh para stakeholder terkait sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

2.4.4.33.3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Belum adanya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah disebabkan oleh belum disusunnya dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sehingga data terkait persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah tahun 2021 sebesar 23,53%, sedangkan untuk tahun 2022 sebesar 41,18% dan menurun pada tahun 2023 menjadi 32,35%. Jumlah inovasi tahun 2024 yang terdaftar dalam inovasi daerah sebanyak 124 inovasi ditambah 1 penelitian, yang terbagi ke dalam 14 perangkat daerah dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah seebsar 41,18%. Di tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah inovasi sebanyak 150 inovasi yang berasal dari 14 perangkat daerah dengan persentase capaian sebeasr 41,18%. Peningkatan jumlah inovasi tersebut didorong oleh upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, akan tetapi perangkat daerah yang lainnya juga perlu disorong untuk berpartisipasi dalam penerapan inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Tabel 2. 303 - Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	OPD	8	14	11	14	14
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	34	34	34	34	34

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	23,53	41,18	32,35	41,18	41,18

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2026

2.4.4.33.4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah tahun 2021 masih 0%. Untuk tahun 2022 sampai 2025 persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebesar 100%. Untuk inovasi daerah yang terdaftar pada tahun 2022 sampai 2025 seluruhnya telah diterapkan di daerah.

Tabel 2. 304 - Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	0	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2026

2.4.4.34. Urusan Pengawasan

2.4.4.34.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Data Persentase tindak lanjut temuan merupakan proporsi data jumlah temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah total temuan. Berdasarkan data capaian persentase tindak lanjut temuan mengalami fluktuasi pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah persentase temuan yang ditindaklanjuti mencapai 59,54% atau sebanyak 156 temuan dari jumlah total temuan sebanyak 262 temuan. Pada tahun 2025 persentase tindak lanjut temuan sebesar 37,5% atau sebanyak 270 jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari 720 total temuan yang ada. Penyelesaian temuan merupakan upaya responsif positif individu dan SKPD terhadap temuan untuk menyegerakan menindaklanjuti temuan-temuan yang ada.

Tabel 2. 305 - Persentase Tindak Lanjut Temuan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Temuan	156	282	112	186	270
2	Jumlah total temuan	Temuan	262	339	240	364	720
	Persentase tindak lanjut temuan	%	59,54	83,19	46,67	51,10	37,5

Sumber : Inspektorat Daerah, 2026

2.4.4.34.2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Data Persentase Pelanggaran Pegawai merupakan proporsi data jumlah ASN yang dikenakan sanksi terhadap jumlah total ASN. Berdasarkan data capaian persentase pelanggaran pegawai mengalami fluktuasi, pada tahun 2021 jumlah ASN yang dikenai sanksi sebanyak 27 orang atau mencapai 0,55% namun mengalami penurunan di tahun 2022 dengan nilai 0,04% atau sebanyak 2 orang, sedangkan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,06% atau 3 orang yang dikenai sanksi, sedangkan pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan dengan capaian 0,15% atau sebanyak 8 orang yang dikenai sanksi. Pada tahun 2025 persentase pelanggaran pegawai mengalami penurunan dengan capaian sebesar 0,12% atau sebanyak 6 orang yang

dikenai sanksi dari 5140 ASN. Pelanggaran pegawai yang dimaksud dalam hal ini baik dari segi kedisiplinan ataupun ASN yang terlibat dengan masalah hukum seperti pelanggaran terhadap hal keuangan dan belanja atas kegiatan yang dilakukan.

Tabel 2. 306 - Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	ASN	27	2	3	8	6
2	Jumlah total ASN	ASN	4935	4960	4672	5378	5140
	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0,55	0,04	0,06	0,15	0,12

Sumber : Inspektorat Daerah, 2026

2.4.4.34.3. Jumlah Temuan BPK

Data indikator Jumlah Temuan BPK merupakan data yang diperoleh dari Berita Acara Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang dikeluarkan setiap semester oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi selatan, dimana jumlah temuan dalam hal keuangan yaitu terkait laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat, kinerja terkait aspek ekonomis, efektif, efektivitas penggunaan anggaran dan temuan dari hasil pemeriksaan tujuan tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat beberapa temuan yang belum dapat ditindaklanjuti secara tuntas karena berbagai faktor, antara lain kendala administratif, aspek regulasi, keterbatasan dokumen pendukung, maupun kondisi tertentu yang menyebabkan rekomendasi belum dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 2. 307 - Jumlah Temuan BPK Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah temuan BPK	Temuan	12	6	14	13	9

Sumber : Inspektorat Daerah, 2026

2.4.4.35. Urusan Sekretariat Dewan

2.4.4.35.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan fungsinya dibagi tugas dalam bentuk organisasi kerja kecil berupa alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna. Alat kelengkapan dewan tersebut memiliki rencana kerja tahunan yang dituang dalam Rencana Kerja DPRD setiap tahun anggaran. DPRD Soppeng mulai pada tahun 2021 hingga 2025 telah memiliki Rencana Kerja Tahunan DPRD.

Tabel 2. 308 - Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2026

2.4.4.35.2. Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng memiliki dan melaksanakan fungsi legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan

daerah, anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). Untuk fungsi pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Fungsi tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai tiga fungsi, yaitu : (1) fungsi Pembentukan Perda, yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; (2) fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan (3) fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD Kabupaten Soppeng kemudian menetapkan Rencana Kerja DPRD Soppeng melalui Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng yang tiap tahunnya menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Soppeng. Program kerja dalam melaksanakan Fungsi DPRD Soppeng tersebut selalu tertuang dalam dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Soppeng mulai tahun 2021 hingga tahun 2025.

Tabel 2. 309 - Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2026

2.4.4.35.3. Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng memiliki dan melaksanakan fungsi Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah; Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) dan fungsi Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Fungsi tersebut sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014, sedangkan perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD Kabupaten Soppeng kemudian menetapkan Rencana Kerja DPRD Soppeng melalui Keputusan DPRD Kabupaten Soppeng yang tiap tahunnya menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD Soppeng. Program kerja dalam melaksanakan Fungsi DPRD Soppeng tersebut selalu tertuang dalam dokumen perencanaan dan anggaran Setwan DPRD Kabupaten Soppeng mulai tahun 2021 hingga tahun 2025.

Tabel 2. 310 - Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Terintegrasi program-program DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
	untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada					

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2026

2.4.5. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberian otonomi yang seluas-luasnya Kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan mandatory yang merupakan kewenangan Kabupaten. Adapun capaian indikator SPM tersebut di Kabupaten Soppeng sebagai berikut.

2.4.5.1 Bidang Pendidikan

2.4.5.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan indikator yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, SPM Pendidikan PAUD yang sesuai jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Capaian SPM PAUD dimana pada tahun pada tahun 2021 sebesar 56,1% sedangkan pada tahun 2025 capaian SPM sebesar 84,02%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak warga negara yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD serta warga kabupaten lain juga bersekolah di Kabupaten Soppeng. Capaian tersebut didukung oleh jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah banyak. Berdasarkan data, jumlah TK di Kabupaten Soppeng sebanyak 79 unit, dan RA di Kabupaten Soppeng sebanyak 53 unit. Jika jumlah TK dan RA dibandingkan dengan Jumlah penduduk usia 5-6 tahun maka rasio ketersediaan sekolah TK dan RA sebesar 0,041 atau 1 : 24. Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK dan RA, maka jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah sangat berlebih untuk menampung keseluruhan pendudukan usia 5-6 tahun. Sehingga untuk menampung semua penduduk usia 5-6 tahun sudah dapat terlayani oleh lembaga PAUD.

Keberadaan sebagian PAUD swasta di pelosok-pelosok juga perlu menjadi perhatian dalam menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada lembaga tersebut, hal ini antara lain disebabkan Lembaga PAUD swasta pada umumnya memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Tabel 2.311 - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2021-2025

No	Indikator SPM Pendidikan	Satuan	Target Capaian	Realisasi Kinerja (%)				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;	%	100	56,1	111,17	72,8	73,35	84,02

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

2.4.5.1.2. Pendidikan Dasar

SPM Pendidikan dasar adalah Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. SPM Pendidikan dasar di Kabupaten Soppeng selama tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2021 sebesar 86,54% sedangkan pada tahun 2022 SPM pendidikan dasar meningkat dengan persentase sebesar 111,41%. Pada tahun 2025 capaian SPM Pendidikan Dasar menjadi 96,73%. Terkait kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assessment nasional untuk pendidikan dasar di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dari tahun 2021-2025. Capaian tahun 2021 menunjukkan rata-rata capaian sebesar 62,55% meningkat di tahun 2022 sebesar 67,89%, tahun 2023 dengan capaian 77,4% dan tahun 2024 sebesar 81,5%. Kondisi di tahun 2025 menujukkan adanya penurunan dengan angka capaian sebesar 67,60%.

Faktor penyebab sehingga SPM Pendidikan dasar tersebut belum memenuhi target yakni karena masih adanya anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah di Kabupaten Soppeng atau bersekolah di luar daerah pada jenjang SD/MI sederajat yang diwajibkan yaitu 7 tahun dan pada jenjang SD/MI sederajat dan 13 tahun pada jenjang SMP/MTs. Selain itu perlu adanya peningkatan peran pemerintah daerah dapat melakukan intervensi pendidikan dalam bentuk peningkatan mutu pendidik melalui pelatihan-pelatihan dan sejenisnya. Sedangkan untuk mendorong minat baca peserta didik dapat dilakukan bimbingan belajar bagi siswa melalui kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang harus menjadi prioritas.

Faktor lain yang menyebabkan SPM Pendidikan dasar yakni Angka Putus Sekolah dan kondisi peserta didik yang bermukim di daerah perbatasan agar dapat ditekan. Jika indikator angka melanjutkan tinggi, hal ini juga membuat indikator angka putus sekolah ikut berpengaruh. Ini menggambarkan bahwa ada penduduk usia sekolah cukup berpartisipasi dalam layanan pendidikan. Namun demikian perlu menjadi perhatian untuk semua penduduk usia sekolah yang belum berpartisipasi dalam layanan pendidikan, hal ini bisa disebabkan karena peserta didik melanjutkan di luar wilayah Kabupaten Soppeng, sama halnya dengan peserta didik yang bermukim di daerah perbatasan yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar wilayah Kabupaten Soppeng, sehingga objek pembagi dalam formulasi indikator menjadi lebih kecil. Rata-rata peserta didik

yang tidak melanjutkan dan putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan beasiswa khusus bagi peserta didik yang kurang mampu.

Tabel 2.312 - Pendidikan Dasar Tahun 2021-2025

No	Indikator SPM Pendidikan	Satuan	Target Capaian	Realisasi Kinerja (%)				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	86,54	111,41	91,89	82,38	96,73
2	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Assessment Nasional		-	62,55	67,89	77,4	81,5	67,60

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

2.4.5.1.3. Pendidikan Kesetaraan

SPM pendidikan kesetaraan adalah jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Selama tahun 2021-2025 pencapaian SPM pendidikan kesetaraan masih kurang maksimal dimana pada tahun 2021 sebesar 100% dan pada tahun 2022 terjadi penurunan dengan angka capaian sebesar 0,95%. Di tahun 2023 capaian sebesar 0,94% dan tahun 2024 sebesar 12,21%. Kondisi di tahun 2025 menujukkan adanya penurunan dengan angka capaian sebesar 1,36%.

Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Assessment Nasional di Kabupaten Soppeng tahun 2022-2025 mengalami peningkatan. Tahun 2022 capaian tersebut sebesar 36,84% mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 46,14%, dan 2024 sebesar 84,62%. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan dengan angka capaian sebesar 81,18%. Realisasi SPM ini masih dibawah dari capaian target yang ditetapkan berdasarkan regulasi sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya minat masyarakat yang belum tamat SD/SMP/SMA untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan dan adanya sebagian sasaran yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bertempat tinggal di luar Kabupaten Soppeng. Selain itu jumlah PKBM di Kabupaten Soppeng dan ruang literasi bagi pelajar juga masih kurang.

Tabel 2.313 - Pendidikan Kesetaraan Tahun 2021-2025

No	Indikator SPM Pendidikan	Satuan	Target Capaian	Realisasi Kinerja (%)				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	100	100	0,95	0,94	12,21	1,36
2	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Assessment Nasional		-	-	36,84	46,14	84,62	81,18

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

2.4.5.2 Bidang Kesehatan

Jenis SPM kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng terdiri dari: Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Pencapaian SPM Kesehatan untuk tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.314 - Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2021-2025

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
KESEHATAN	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	20%	90%	100%	100%
	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	20,11%	65,71%	48,30%	38,30%	100%
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	51,80%	70%	100%	100%
	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	45,40%	100%
	Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus Militus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	43,90%	100%
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	125%	100%
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	63,86%	76,10%	100%
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	0,25%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2026

2.1.5.2.1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil

Kunjungan ibu hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga dengan memenuhi kriteria 10 T. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- Adanya pelaksanaan pelatihan bagi tenaga bidan baik di puskesmas maupun poskesdes untuk meningkatkan kompetensi mereka;
- Sosialisasi tanda bahaya kehamilan;
- Monev bidan desa di poskesdes;
- Kelas ibu hamil dan balita;
- Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
- Adanya bimbingan teknis yang rutin dilaksanakan ke 17 puskesmas.
- Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu:
- Timbang berat badan dan ukur tinggibadan;
- Ukur tekanan darah;
- Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas /LILA);
- Ukur tinggi puncak rahim (fundusuteri);
- Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin.

2.1.5.2.2. Cakupan Pertolongan Persalinan

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Pertolongan persalinan yang diberikan oleh tenaga terlatih akan membantu menurunkan kejadian kesakitan, kecacatan dan kematian pada bayi baru lahir. Adapun kiat-kiat yang dilakukan dalam pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah:

- Pendataan ibu bersalin;
- Peningkatan SDM melalui pertemuan dan pembelajaran Audit Maternal Neonatal (AMP);
- Skreening Hypotiroid kongenital;
- Asuhan persalinan normal;
- Penanganan Asfiksia dan BBLR;
- Kemitraan bidan dan dukun;
- Kelas Ibu Hamil;
- Sosialisasi rumah tunggu kelahiran (RKT);
- Melaksanakan Monev bidan desa di poskesdes;
- Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

2.1.5.2.3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Cakupan kunjungan bayi setiap tahun di atas target yang direncanakan, hal tersebut tidak lepas dari kesadaran masyarakat yang tinggi akan kesehatan bayi, dimana pengaruhnya sangat besar kepada masa depan bayi yang bersangkutan. Adapun kiat-kiat yang dilakukan adalah :

- Pendataan bayi baru lahir
- Penimbangan balita dan pemberian imunisasi
- Pelayanan kesehatan pada bayi melalui perawatan tali pusat
- Melakukan pijatan bayi setelah dimandikan
- Pemberian ASI eksklusif
- Pemberian makanan pendamping ASI pada bayi umur 6 bulan ke atas
- Adanya kelas ibu dan bayi di puskesmas
- Pencatatan dan Pelaporan sudah baik.

2.1.5.2.4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan pelayanan anak balita juga dimaksudkan untuk monitoring tumbuh kembang anak balita. Untuk capaian kinerja indikator ini telah mencapai target, hal ini disebabkan karena setelah anak balita mendapatkan semua imunisasi yang diberikan ibu balita menimbang anaknya di posyandu. Adapun kiat-kiat yang dilakukan dengan :

- Pendataan balita 0 – 59 bulan;
- Mengaktifkan kembali untuk datang keposyandu walaupun pemberian imunisasinya sudah lengkap;
- Defenisi operasional cakupan pelayanan kesehatan anak balita sudah dipahami dengan baik;
- Pencatatan dan pelaporan kohort balita sudah per-posyandu;
- Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

2.1.5.2.5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD dan madrasah ibtidaiah dan SMP yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, pemeriksaan ketajaman mata, ketajaman pendengaran, kesehatan gigi, kelainan mental emosional dan kebugaran jasmani. Adapun kegiatan yang perlu dilakukan adalah :

- Perlunya tambahan tenaga kesehatan untuk mempercepat proses pemeriksaan pada siswa-siswi;
- Pelatihan pada guru SD/Madrazah ibtidaiyah;
- Pembinaan UKS;
- Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam penjaringan anak sekolah.

2.1.5.2.6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan

pemerintah daerah. Adapun faktor penyebab serta kegiatan yang perlu diupayakan untuk mencapai target 100% yakni :

- Posbindu masyarakat belum semua berkunjung dan faktor ketenagan;
- Solusinya lakukan Posbindu di kantor, sekolah, tempat kerja;
- Perlunya tambahan tenaga kesehatan untuk mempercepat proses pemeriksaan untuk di Posbindu.

2.1.5.2.7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia (60) tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar.

1. Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah:
   a. Dilakukan sesuai kewenangan oleh:
      - Dokter;
      - Bidan;
      - Perawat;
      - Nutrisionis/TenagaGizi;
      - Kader Posyandulansia/Posbindu.
   b. Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah;
   c. Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun;
   d. Lingkup skrining adalah sebagai berikut:
      - Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanandarah.
      - Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.
      - Deteksi kadar kolesterol dalam darah
      - Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan *Mini Cog* atau *Mini Mental Status Examination (MMSE)/ Test Mental Mini* atau *Abreviated Mental Test (AMT)* dan *Geriatric Depression Scale(GDS).*
2. Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini;
3. Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

2.1.5.2.8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Adapun upaya yang perlu diupayakan untuk mencapai target 100% yakni :

1. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas;
2. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP);
3. Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.
4. Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
   a. Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP;

b. Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP;
c. Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis;
d. Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis. Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

2.1.5.2.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

1. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja Puskesmas;
2. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP;
3. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya;
4. Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh:
   a. Dokter/DLP
   b. Perawat
   c. Nutrisionis/Tenaga Gizi
5. Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
   a. Edukasi
   b. Aktifitas fisik
   c. Terapi nutrisi medis
   d. Intervensi farmakologis
6. Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C;
7. Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

2.1.5.2.10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat di berikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerja. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:

- Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejalagangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegahtindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan Tindakan kebersihan diri ODGJ berat.

2.1.5.2.11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB BTA

Pelaksanaan program TB dengan DOTS di layanan selain puskesmas untuk meningkatkan cakupan penanganan pasien TB sesuai standar Penanggulangan penderita terduga TB BTA tahun 2025 dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tersebut perlu dipertahankan melalui peran PMO (pengawas menelan obat). Kunci sukses pengobatan TB adalah kepatuhan dalam minum obat TB. Adapun upaya yang dilakukan adalah penerapan strategi DOTS dan peningkatan jejaring TB dengan fasilitas kesehatan swasta (dokter dan apotik).

2.1.5.2.12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Upaya pelayanan dalam rangka pemberantasan penyakit HIV di samping ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan juga diarahkan pada upaya pencegahan yang dilakukan melalui skrining HIV terhadap donor darah dan upaya pemantauan yang tidak hanya pada orang-orang yang berisiko akan tetapi luas pada masyarakat umum dan pengobatan penderita penyakit menular seksual (PMS).

2.4.5.3 Bidang Pekerjaan Umum

Jenis SPM bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan adalah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik. Berikut realisasi pada tahun 2021-2025 untuk indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2.315 - Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021-2025

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
PEKERJAAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	94,55%	98,13%	98,95%	99,36%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	98,13%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2026

2.4.5.4 Bidang Perumahan Rakyat

Jenis SPM Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan terdiri dari Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Cakupan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dengan realisasi pada tahun 2021-2025 sebagai berikut ini.

Tabel 2.316 - Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021-2025

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
PERUMAHAN	Jumlah warga negara korban bencana yang	106%	0%	100%	100%	93%

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
DAN PEMUKIMAM	memperoleh rumah layak huni					
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	100%	100%	100%	-

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2026

2.4.5.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan realisasi pada tahun 2021-2025.

Tabel 2. 317. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2025

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
KETENTRAMAN KETERTIBAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100%	40%	100%	100%	100%
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	0,28%	0,28%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2026

2.1.5.5.1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Selama tahun 2025 jumlah warga yang terdampak gangguan trantibum berupa kerugian materiil maupun terkena cedera akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dengan capaian SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 100%.

2.1.5.5.2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Realisasi pelaksanaan pelayanan informasi rawan bencana dengan indikator pencapaian yakni jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana terlaksana dengan persentase pelaksanaan 100 Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi pencegahan bencana dan pelatihan evakuasi bencana yang dilaksanakan di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Soppeng yang

melibatkan seluruh aparat kecamatan, kelurahan/desa, kepala lingkungan, kepala dusun, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan kelompok-kelompok masyarakat di masing-masing kecamatan. Capaian SPM terkait pelayanan informasi rawan bencana pada tahun 2025 sebesar 100%.

2.1.5.5.3. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Realisasi pelayanan dasar ini dilaksanakan dengan mengacu pada indikator pencapaian yakni jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam pelaksanaan pencegahan bencana alam dan evakuasi bencana, badan penanggulangan melaksanakan kegiatan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, melakukan pembentukan kelompok pemuda siaga bencana di masing-masing kelurahan/desa, dan melakukan apel kesiapsiagaan tiap tahun untuk inspeksi kesiagaan petugas bencana dalam menghadapi bencana alam di Kabupaten Soppeng. Capaian SPM pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di tahun 2025 sebesar 100%.

2.1.5.5.4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Terkait realisasi pelayanan dasar ini mengacu pada indikator jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Untuk tahun 2025, pelayanan dasar ini hanya terealisasi sebesar 100% dengan adanya dukungan sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

2.1.5.5.5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Indikator Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pada tahun 2025 jumlah capaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kebakaran.

2.4.5.6 Bidang Sosial

Jenis SPM Bidang sosial yang dilaksanakan terdiri dari Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan telah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi pada tahun 2021-2025 sebagai berikut.

Tabel 2.318 - Bidang Sosial Tahun 2021-2025

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
SOSIAL	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitsa terlantar yang memperoleh rehabilitsai sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	180%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial, 2026

2.1.5.6.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial

Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti tahun 2025 mendapatkan pelayanan 100%.

2.1.5.6.2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial

Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti pada tahun 2025 kasus anak terlantar yang semuanya dapat ditangani dinas sosial (100%).

2.1.5.6.3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial

Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti pada tahun 2025 semuanya dapat ditangani, sehingga capaiannya sebesar 100%.

2.1.5.6.4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna wisma di luar panti. Pada tahun 2025 rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial sebesar 100%.

2.1.5.6.5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Telah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Pada tahun 2025 pelaksanaan perlindungan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana bagi korban bencana jumlah warga yang dilayani dengan persentase 100%.

Tabel 2.319 - Hasil Analisis Capaian Kinerja SPM Tahun 2021-2025

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;	100%	111%	72,80%	73,35%	84,02%
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	56,10%	111%	91,89%	82,38%	96,73%

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan Dasar)	62,55%	67,89%	77,40%	81,50%	67,60%
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	0,95%	0,94%	12,21%	1,36%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan Kesetaraan)	-	36,84%	46,14%	84,62%	81,18%
KESEHATAN	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	20%	90%	100%	100%
	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	20,11%	65,71%	48,30%	38,30%	100%
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	51,80%	70%	100%	100%
	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	45,40%	100%
	Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus Militus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	43,90%	100%
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	125%	100%
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	63,86%	76,10%	100%
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	0,25%	100%
PEKERJAAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	94,55%	98,13%	98,95%	99,36%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	98,13%	100%	100%	100%

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAM	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	106%	0%	100%	100%	93%
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	100%	100%	100%	-
KETENTRAMAN KETERTIBAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100%	40%	100%	100%	100%
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	0,28%	0,28%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
SOSIAL	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitsa terlantar yang memperoleh rehabilitsai sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	180%	100%	100%

2.5. Capaian Indikator Pembangunan Daerah

2.5.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Soppeng

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 menetapkan indikator kinerja utama kepala daerah melalui 7 Tujuan pembangunan serta 17 Sasaran yang terdiri

dari 8 indikator tujuan dan 19 indikator sasaran. Penetapan Tujuan, sasaran beserta indikator tersebut untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Target dalam pencapaian IKU tersebut merupakan target kinerja pada RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029. Berikut ini capaian IKU Kabupaten Soppeng tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.320. Target dan Capaian IKU Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Persentase Capaian
Visi: Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan						
(1) Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)		PDRB/kapita (T1.1)	70.116.700	72.363.000	103,2
			Rasio Gini (T1.2)	0,369	0,331	111,48
		1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	4,24	4,77	112,5
		2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	3,2	4,01	79,8
		3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)	6,47	6,65	97,29
	2. Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)		Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	11	11,04	100,36
		4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)	10%	11,43	114,29
(2) Meningkatkan konektifitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa	3. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)		Indeks Infrastruktur Daerah (T3.1)	76,8	72,53 (2024)	94,440
		5. Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1.1)	3,31	2,91	87,92
		6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	27,84	25,63	92,06
			Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2)	4,55	2,68	58,9
	4. Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat		Indeks Desa (T4.1)	79,62 (maju)	-	-
		7. Meningkatnya kemandirian	Persentase Desa Mandiri (S.4.1.1)	22,75	40,82	179

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Persentase Capaian
	pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)	desa (S.4.1)				
(3) Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	5. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)		Nilai daya dukung lingkungan (T5.1)	Belum terlampaui	Belum terlampaui	100
		8. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1.1)	74,23	77,23	104,04
		9. Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5.2.1)	131,2	157,58	83,26
		10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3.1)	27,51%	Belum Rilis	-
(4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius	6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)		IPM (T6.1)	72,2	73,69	102,06
		11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Indeks kesehatan (S.6.1.1)	83,2	83,4	100,24
		12. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Indeks Pendidikan (S.6.2.1)	65,7	65,86	100,24
		13. Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3.1)	11.050.000	10.929.000	98,9
		14. Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4.1)	0	0	100
(5) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif	7. Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)		Indeks reformasi birokrasi (T7.1)	75 (BB)	70,03 (BB)	93,37
		15. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1.1)	73,5	79,714	96,21

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Persentase Capaian
		rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)				
		16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2.1)	4,01 (A-)	3,58 (B)	89,28
		17. Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCP) (S.7.3.1)	86,11	71,48	83,01
		18. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4.1)	66,25 (B)	65,35 (B)	98,64

2.5.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Soppeng Tahun 2021 - 2025

Pada tahun 2025 terdapat beberapa kinerja urusan pemerintah Kabupaten Soppeng yang telah tercapai, belum tercapai dan telah melebihi target. Selain itu ada beberapa indikator yang memiliki realisasi akan tetapi tidak memiliki target dalam RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2021-2026 akan tetapi pada RPJMD Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyesuaian dan penyajian target terhadap indikator kinerja pembangunan daerah tersebut. Untuk hasil rekapitulasi capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.321. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2025	2021	2022	2023	2024	2025		
Layanan Urusan Wajib										
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Pendidikan							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	69,07	65,75	68,07	67,72	65,85	65,74	<	
1.2	Angka Partisipasi kasar									
	Angka Partisipasi kasar SD/ MI Paket A	%	98,78	99,38	97,76	98,47	98,82	98,34	<	
	Angka Partisipasi kasar (APM) SMP/ MTs Paket B	%	99,42	101,08	99,42	99,04	98,99	99,43	>	
1.4	Angka Partisipasi Murni									
01.04.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Paket A	%	92,4	90,04	91,1	91,9	92,05	91,83	<	
01.04.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Paket B	%	82,35	65,07	81,35	81,61	80,43	83,16	>	
1.5	Angka Partisipasi Sekolah:									
01.05.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI Paket A	%	99	107,22	96,23	98,87	97,45	96,63	<	
01.05.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs Paket B	%	97,29	82,38	94,07	96,29	95,46	100,32	>	
1.6	Angka Putus Sekolah:									
01.06.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI	%	0,043	0,063	0,035	0,05	0,03	0,17	<	
01.06.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	0,1	0,11	0,24	0,12	0,32	0,67	<	
1.7	Angka Kelulusan:									
01.07.1	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	100	99,83	99,92	99,86	99,88	99,71	<	
01.07.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	99,73	99,91	99,29	99,53	99,23	99,07	<	
1.8	Angka Melanjutkan (AM):									
01.08.1	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI ke SMP/ MTs	%	100	102,41	98,63	100,45	99,71	99,6	<	
01.08.2	Angka Melanjutkan (AM) SMP/ MTs ke SMA/ SMK / MA	%	100	95,44	95,62	99,82	94,93	96,32	<	
1.9	Fasilitas Pendidikan:									
01.09.1	Sekolah Pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik	%	80	77,2	78,1	75,77	70,59	71,86	<	
01.09.2	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs DAN SMA/ SMK/ MA kondisi bangunan baik	%	82,28	80,81	81,01	81,28	77,08	79,81	<	
01.10	Rasio ketersedian sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	100	107,43	109,65	110,72	113,35	115,47	>	
01.12	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	%	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	=	
01.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta Aksara)	%	97,05	87,83	91,99	94,5	100	100	<	
01.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	96,9	94,44	96,9	96,05	92,64	93,91	<	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	112,25	71,2	72,81	69,24	69,69	<	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	107,48	95,94	91,9	92,05	91,83	<	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	120,62	81,3	81,61	80,43	83,16	<	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	0,95	100	0,94	0,95	1,36	<	
2	Kesehatan			DINAS KESEHATAN						
02.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	1,25	11,83	20,75	5,43	14,8	18,1	>	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2025	2021	2022	2023	2024	2025		
02.2	Angka kelangsungan hidup bayi	%	98,62	98,82	97,93	99,46	98,52	98,19	<	
02.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	0,06	0,36	23,71	0,78	3,05	0,9	>	
02.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	0,28	0,36	14,08	13,2	12,64	14,03	<	
02.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	159,5	71,68	74,1	116,46	249,58	181	<	
02.6	Rasio posyandu per satuan balita	Per Satuan Balita	26	25,34	30,6	28,33	28,15	32,3	>	
02.7	Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,29	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	<	
02.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,009	0,0042	0,0042	0,0042	0,0041	0,0041	<	
02.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,49	0,45	0,43	0,49	0,42	0,43	<	
02.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	5,71	4,09	6,06	6,01	5,36	5,83	>	
02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	61,99	100	100	100	=	
02.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	94,37	100	100	100	=	
02.13	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child* Immunization (UCI)	%	86	78,57	90	97,14	0	0	<	
02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	=	
02.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	1,25	1,32	1,49	1,54	1,58	1,55	>	
02.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	67,2	80,93	112,73	100	63,06	61,76	<	
02.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	0	0	0	0	0,0043	0	=	
02.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	2,56	8,75	8,75	12,09	20,71	<	
02.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	25,98	35,47	100	22,05	31,78	<	
02.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	0	83,24	166,38	78,94	168,65	219,62	<	
02.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	0	0	4,19	17,43	14,92	23,16	<	
02.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	40,2	25,98	46,32	54,85	26,65	34,48	<	IUP
02.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	40,2	96,55	85,85	81,7	85,7	84,8	>	IUP
02.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	33,33	41,74	100	100	=	
02.25	Penderita diare yang ditangani	%	100	4,41	49,52	77,88	57,96	107,4	>	
02.26	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	0	0	7,54	5,81	5,39	7,44	<	
02.27	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	0	0	0	=	
02.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0	0	0	0	0	=	
02.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	0	0	0	0	=	
02.30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	%	0	0,0055	0,0109	0	0,0095	0,0078	<	
02.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	97,76	42,05	65,44	1,32	9,31	<	
02.34	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	108,24	100	105,23	100	=	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2025	2021	2022	2023	2024	2025		
02.35	Cakupan puskesmas	%	212,75	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	<	
02.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	62,96	61,4	61,4	61,4	87,75	164,29	>	
02.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100	100	82,3	100	53,25	69,59	<	
02.38	Cakupan pelayanan nifas	%	100	100	91,26	100	55,17	78,51	<	
02.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	61,88	100	97,82	98,23	<	
02.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	100	76,06	94,66	100	53,75	99,4	<	
02.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	=	
02.42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	92,54	94,74	100	100	92,51	<	
02.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	92,54	94,74	100	13,73	<	
02.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	=	
02.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	0	100	0	<	
	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Poin	0,15	0,13	0,11	0,11	0,1	0,12	<	
	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten atau kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	=	
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	=	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	=	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	=	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	=	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	19,68	24573	100	100	100	=	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	38,4	51,86	48,32	100	38,3	100	>	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	51,86	64,32	100	100	100	=	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	45,5	2,19	27,8	100	45,4	100	>	
	Persentase penderita SDM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	44	100	95,9	100	43,9	100	>	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	102,65	100	124,5	100	=	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	76,2	100	63,85	63,86	76,1	100	>	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	0,25	100	63,85	84,62	0,25	100	>	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
03.1	Pekerjaan Umum:									
03.01.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,57	0,57	0,59	0,52	0,55	0,56		
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Poin	0,005	0,0038	0,0041	0,004	0,004	0,004		
3.1.3.	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	3	8,12	9,76	9,76	3,13	3,13**		
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	54,92	57,32	58,59	52,8	54,74	56,24		
03.01.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%	47,12	47,12	47,12	46,8	46,8**	46,8**		
03.01.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	77,3	99,95	72,68	75,05	77,1	77,1**		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2025	2021	2022	2023	2024	2025		
03.01.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	54,27	54,21	54,21	54,21	54,21**	54,21**		
03.01.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	0,8	1,79	1,79	2,28	2,28**	2,28**		
03.01.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	84,81	65,31	53,28	81	84,61	88,11		
03.01.13	Rasio Jaringan Irigasi	Poin	30,41	0,022	4,85	9,62	30,13	30,13**		
03.01.14	Persentase penduduk berakses air minum	%	99,38	94,71	94,58	98,95	99,2	99,35		
03.01.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	44,63	46,1	33,07	38,29	44,36	21,59		
03.01.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	15,84	22,15	11,84	15,38	15,38**	15,38**		
03.01.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,017	0,017	0,017	0,165	0,165**	0,165**		
03.01.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,00202	0,00207	0,002	0,0021	0,0022	0,0024		
03.2	Penataan Ruang:									
03.02.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	5,04	0,0327	0,0327	5,02	5,02	5,17		
03.02.6	Ketaatan terhadap RTRW	%	60,89	97,96	60,53	60,53	60,53	60,53**		
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0,06	9,72	864,43	0,23	0,05	10,25	>	
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	Tidak Ada Pantai							
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,86	6,21	65,31	9,47	0,84	88,12	>	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	44,63	98,02	98,52	38,29	44,43	99,35	>	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	77,2	99,95	99,95	75,02	77,1	100	>	
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Poin	0,93	100	0	0,7	0,92	100	>	
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	%	55	57,32	48,89	53	52,8	56,24	>	
	Rasio tenaga perator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		0,56	0	0	0,46	0,46	0,396	<	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	1	0	100	0,8	1	100	>	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
04.1	Rasio rumah layak huni	Nilai	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23		
04.2	Rasio permukiman layak huni	Nilai	0,29	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98		
04.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	92,39	89,5	90,87	92,15	93,09	93,62		
04.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	65,43	65,19	65,19	68,88	65,35	65,54		
04.5	Persentase pemukiman yang tertata	%	0,75	98,54	98,54	98,54	98,17	98,17		
04.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,05	0,065	0,065	0,048	0,045	0,049		
04.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		4	2,05	2,05	2	1,99	1,98		
04.9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	100	37,72	44,48	42,5	46,25	46,25		
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	%	0	106,25	100	100	0	93,33	>	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2025	2021	2022	2023	2024	2025		
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	0	0	=	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0	0	0	0	0	0,0486	<	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	7,43	11,79	0	9,13	7,82	6,38	<	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0,3	0,43	0,33	0,26	0,29	0,29	<	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
	Cakupan petugas :									
05.1	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	100	129,1	126,09	128	128	128		
05.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	%	100	100	100	100	100	100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Cakupan pelayanan :									
05.3	bencana kebakaran kabupaten/kota	%	94,4	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2		
05.4	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	84	64,44	77,78	92,38	100	87,05		
05.5	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	100		
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	=	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	55,56	30	43	40	21,43	<	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	100	53426	100	40	200	100	=	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa	100	53426	0	40	0	100	=	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa	100	123456 Jiwa	0			100	=	BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	44,44	75,56	100	100	100	=	
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	9,22	5,53	9,67	15,00	9,64	9,3	<	
6	Sosial			DINAS SOSIAL						
06.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100	=	
06.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	=	
06.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	=	
06.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	100	100	100	0	0	<	
06.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100	100	=	
06.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	0	0	0	100	0	<	
06.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama	%	100	100	100	100	100	100	=	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2025	2021	2022	2023	2024	2025		
	masa tanggap darurat									
06.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100	=	
06.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	=	
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100	49,7	100	100	107	100	=	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	=	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
1	Tenaga Kerja			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI						
01.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per Tahun	0	0	0	0	0	0		
01.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	26	61,32	95,53	6,95	25,71	12,22		
01.4	Keselamatan dan perlindungan	%	5,33	9,82	5,45	2,3	4,01	1,72		
01.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	56,41	71,36	11,42	21,64	54,92	39,18		
01.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	100	100		
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	61,32	91,59	91,29	100	50	<	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifiat Kompetensi	%	0,1	0,47	1,61	1,16	0,09	0,09	<	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	0,37	579642	0,88	0,24	0,36	0,55	>	
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	25,81	3,98	91,59	6,95	25,71	12,22	<	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	123.337.400		1.625.451	1.625.451	123.337,35	132400	<	
	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	1					1	=	
	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	KK	85					85	=	
	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Kawasan	1					1	=	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
02.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	8,9	13,79	13,79	13,58	8,79	10,2		
02.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	23,33	23,33	23,33	26,66	20		
02.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	91,31	90,27	90,27	97,23	91,21	89,8		
02.4	Rasio KDRT	Nilai	0,09	0,0127	0,01	0,06	0,01	0,01**		
02.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	97,44	89,1	97,23	97,23	97,24	104,48		
02.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100**		
02.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100**		
02.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100**		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2025	2021	2022	2023	2024	2025		
02.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	86,67	100	100	100**		
02.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100**		
02.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	0,64	0	6,38	100	100**		
02.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	0	100	100	100**		
02.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Poin	0,952	0,93	0,99	0,95	0,95	0,95**		
02.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Poin	1,07	1,04	124,23	1,06	1,06	1,06**		
02.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Poin	1,44	0,8	0,86	1,43	1,43	1,43**		
02.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Poin	1,67	1,45	1,27	1,66	1,66**	1,66**		
02.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Poin	0,982	0,98	0	0,98	0,98	0,98**		
02.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	%	19,46	19,22	19,22	19,25	19,44	17,62		
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,46	1,56	1,4	3,24	8,36	8,36 (2024)	<	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	0,03	0,2	60,58	0,06	0,06 (2024)	<	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	9,44		18,69	0	9,64	9,64 (2024)	<	
3	Pangan			DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN						
03.1	Ketersediaan pangan utama	%	340,25	351,3	373,1	317	339,78	411,88		
03.2	Ketersediaan energi perkapita	Kkal	11401	11,995.00	12802	10383	11061	11358		
	Ketersediaan protein perkapita	Gram	280,42	288.20	308,61	265,61	265	273,21		
03.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	78	0	100	100		
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	64,74	25,82	14,46	32,16	64,44	149,64		
4	Pertanahan			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN						
04.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	100	95,37	34,13	100	100	100**		
04.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	50	33,33	50	100	100**		
04.3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100**		
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100**		
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	67,5	100	100	100**		
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		100	100	n/a	100	100	100**		
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		100	100	n/a	100	100	100**		
	Tersedianya tanah untuk masyarakat		100	100	100	100	100	100**		
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	50	100	50	100	100**		
5	Lingkungan Hidup			DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
05.26	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	=	
05.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	=	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2025	2021	2022	2023	2024	2025		
05.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
05.29	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Poin	54,66	60	50	55	54,44	75,9	>	
05.30	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Poin	95,24	93,87	94,8	94,35	95,18	85,64	<	
05.31	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	Poin	44,45	40,85	40,85	44,51	44,39	65,14	>	
05.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	7,5	0,66	0,65	0,1147	7	1,34	<	
05.33	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota		Ada	1	1	1	0	Ada	=	
05.34	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	=	
05.35	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	Tidak ada	100	100	100	4	Tidak ada	=	
05.36	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	Tidak ada	74,06	77,57	66,5	80	Tidak ada	=	
05.37	Penetapan hak MHA	Ada / Tidak ada	Tidak ada	9.62	9,18	13,11	14	Tidak ada	=	
05.38	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan		0	0,27	0,27	0,286	29	0	=	
05.39	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana		0	74,06	77,57	66,5	80,3	0	=	
05.40	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	0	0	0	73,9	75	1	>	
05.41	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak ada	ada	0	0	0	0	Ada	=	
05.42	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	2,94	2,94	0	0	100	=	
05.43	Timbulan sampah yang ditangani	%	81					80,29	<	
05.44	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	15					13,48	<	
05.45	Persentase cakupan area pelayanan	%	30					31,03	>	
05.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	80,5					80,29	<	
05.47	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	74,02					73	<	
05.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0					0	=	
05.49	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0					0	=	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH	73,06	69,52	65,39	68,64	68,74	77,49	>	
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	100	74,06	77,57	67		10	<	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100	11,43	30,91	76		0	<	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
06.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	=	
06.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Poin	0,99	0,98	0,99	0,99	0,99	1	>	
06.3	Rasio pasangan berakte nikah	Poin	0,78	0,64	0,67	0,71	0,76	0,79	>	
06.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
06.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	=	
06.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,71	99,27	99,1	99,24	98,61	98,74	>	
06.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	99,35	97,67	99,29	99,27	99,3	99,61	>	
	Perekaman KTP Elektronik	%	100	99,59	98,52	99,24	110,27	100	=	
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	100	64,25	64,91	67,14		100	=	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2025	2021	2022	2023	2024	2025		
	Kepemilikan akta kelahiran	%	100	99,54	99,4	99,27		100	=	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	23,53	17,65	38,24	38,24	100	=	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
07.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	96,2	89,8	89,8	92	96	100	>	
07.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	3	3	3	1	1	=	
07.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	5	3	3	3	4	10	>	
07.4	Persentase LPM aktif	%	100	100	100	100	100	100	=	
07.5	Persentase LPM Berprestasi	%	5	0	0	0	4	100	>	
07.6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	=	
07.7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	=	
07.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	34,8	34,4	34,4	34,4	34,6	34,6	>	
07.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	81	80	80	80	80	80	<	
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	20	0	0	10	100	=	
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	22,84	3,85	13,33	57	10	18,37	<	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
08.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,48	0,13	0.13	0,29	0,16	0,09		
08.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,1	2,16	2.32	2,11	2,07	2,07**		
08.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100	29,41	38,24	50	100	100**		
08.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	38,26	61,76	17,65	17,65	38,24	38,24**		
08.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	0	0	0	0	0	0**		
08.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	10	10	6	0	9	9**		
08.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal. non formal. dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerja Sama	4	2	1	0	3	3**		
08.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Per Keluarga	2	1,15	0,17	0,27	0,67	0,67**		
08.9	Rasio Akseptor KB	%	65	75,05	58,5	64,4	64,25	64,25**		
08.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	64,5	75,05	64	65,4	64,25	64,25**		
08.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	19,08	16,65	39.5	20,65	20,9	20,9**		
08.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	32,21	2,81	3,27	32,12	32,46	32,46**		
08.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,32	13,98	26,77	13,64	10,64	10,64**		
08.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20	2,97	18,13	20,58	22,33	22,33**		
08.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	31,88	33,25	0,48	6,26	31,66	31,66**		
08.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	80	64,23	94,89	44,29	100	100**		
08.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	%	78,55	56,1	0,33	13,29	78,45	78,45**		
08.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	72,06	36,91	6,85	6,62	72,04	72,04**		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2025	2021	2022	2023	2024	2025		
08.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100	25	25	100	100	100**		
08.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	62,75	7,75	6,625	6,37	62,5	62,5**		
08.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100**		
08.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	100	47,87	35,12	27,35	140,52	140,52**		
08.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100**		
08.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	75,8	77,61	33,41	14,76	75,12	75,12**		
08.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100**		
08.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100**		
08.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	jiwa	0			0	0	0**		
08.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100**		
08.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	62,5	23,01	71,28	94,73	60,96	60,96**		
08.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21	20	20	21	21,5	21,5**		
08.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,59	0,3	0,02	0	0,58	0,58**		
	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,1	2,16	2,32	2,11	2,1	2,1**		
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	63,23	74,52	57,09	64,41	62,86	62,86**		
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,32	14,24	26,2	13,64	10,64	10,64**		
9	Perhubungan			DINAS PERHUBUNGAN						
09.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	800	848	720	720	720	720**		
09.2	Rasio ijin trayek	Poin	0	0,0002	0,0001	0,00014	0	0**		
09.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1100	0	0	1988	1099	1099**		
09.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2	2	2	2	2	2**		
09.5	Persentase layanan angkutan darat	%	46,54	17,45	28,73	45,45	46,44	46,44**		
09.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	52	0	0	12,26	51,71	51,71**		
09.7	Pemasangan Rambu- rambu		100	0,61	0,814	83,3	100	100**		
	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Poin	85	63	0,046	0,22				
	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V / C	0,09	0,9	0,065	0,064				
10	Komunikasi dan Informatika			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		560	675	675	675	550	550**		
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		66,77	66,15	71,48	73,41	66,67	66,67**		
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	81	0,75	0,77	0,82	80	80**		
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	91,77	81,49	81,49	82,02	91,67	91,67**		
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	66,77	0,61	0,61	63	66,67	66,67**		
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	91,58	97,06	97,06	97,06	91,18	91,18**		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2025	2021	2022	2023	2024	2025		
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100**		
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	80,43	42,25	17,54	64,89	79,8	79,8**		
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah			DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM						
11.1	Persentase koperasi aktif	%	92,46	90,36	90,42	89,94	92,26	26,05		
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	99,39	99,16	99,26	99,33	99,38	99,41		
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	%	99,39	100	100	100	99,38	100		
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,39	99,16	99,26	99,33	99,38	99,41		
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	38,98	45,18	44,91	44,97	38,69	90,32		
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	7,56	7,5	7,59	7,79	7,36	9,1		
12	Penanaman Modal			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI						
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	70	63	87	115	48	125		
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	855.183.391,85	123.688.144,30	701.705.470,40	834.781.145,50	72.439.444.796	102.472.369.085		
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	77,22	1,1452	0,3785	42,02	-13	41		
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	77,11	114,52	282,26	44,02	-13	41		
13	Kepemudaan dan Olah Raga			DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	23	0,3725	0,5102	22	22	27,91		
13.2	Persentase Wirausaha Muda	%	53	100	93,44	5,23	52	17,54		
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	%	56	84	69,23	58	57	82,14		
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	57,44	69,7	63,89	63	16,13	58,33		
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	16,43	98,45	41,12	7,73	105	16,81		
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	110	9	68	47	105	68		
13.7	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	110	4	68	136	105	68		
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	1,15	1,03	1,62	1,25	1,3	0,4		
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	32,41	5,49	28,8	23,28	23,28**	43,53		
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Prestasi	110	2	5	89	105	8		
14	Statistik			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
14.2	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
14.3	Buku ”PDRB”	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100		
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100				
15	Persandian			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	91,25	0,76	1	100	91	91**		
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	275	49,8	56,4	56,40	100	100**		
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100							
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100							
16	Kebudayaan			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	10	5	4	8				
16.2	Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	40	25	25	39,02				IUP
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	4	n,a	4	1				

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2025	2021	2022	2023	2024	2025		
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	16	8	8	16				
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	21,88	25	100	117	40	40**		
17	Perpustakaan			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,68	1,41	10,51	63	0,48	0,48**		
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	31,5	100	33,04	31,25				
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,5	1,58	1,57	0,15	0,49	0,49**		
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	112.974	8.924	24.750	122.149	112.849	112849**		
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul buku	111.100	15.687	200.477	111.018				
17.6	Jumlah pustakawan. tenaga teknis. dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	0,56	0,42	100	100	100**		
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	52,67				52,32	52,32**		
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	58,82	28,73	18,58	18,58	58,62	58,62**		
18	Kearsipan			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100	20,59	44,12	100	100	100**		
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	3	1	1	2	2	2**		
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100	0	1,71	2,137	100	100**		
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	0	0,18	0,06	100	100**		
Layanan Urusan Pilihan										
1	Pariwisata			DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
01.1	Kunjungan wisata	%	149	323	259,26	175	129	66,11		
01.2	Lama kunjungan Wisata (hari)	Hari	2	2	2	2	2	2		
01.3	PAD sektor pariwisata	%	1,64	0,18	0,19	0,24	1,54	1,08		
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	62	0	330	19	39,66	60,49		
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten /Kota	%	46	365,94	0,16	0,16	6,32	-36,27		
	Tingkat Hunian Akomodasi	%	10	2184,13	0,56	36,79	9,61	5,97		
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,56	4,97	0	1,9				
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,2	0,18	0	0,24	1,54	1,08		
2	Pertanian			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN						
02.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	26,46	28,69	28,59	28,47	30,42	31,85		
02.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	17,64	4	0	15,76	17,54	17,53 (2024)		
02.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	38,04	28,05	29,32	31,02	35,12	34,8		
02.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	100		
02.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		5,6	5,67		5,49	5,49	5,49 (2024)		
02.6	Cakupan bina kelompok petani	%	100	100.00	0	100	100	100		
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton / Ha	5,47	547,85	2,08	4,84	5,17	5,29		
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	0	-42,86	-41,67	-41,67	0	0		
5	Perdagangan			DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2025	2021	2022	2023	2024	2025		
05.1	Ekspor Bersih Perdagangan (US$)		-423849,02	-296,270.00	-409000,2	-492.000,33				
05.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100	100	100	100	100	100		
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	39	3,77	31,12	22,07	34	34**		
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	45,65	26,81	8,19	71,67	44,74	44,74**		
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	37,85	70,55	88,84	70,74	37,23	37,23**		
6	Perindustrian			DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM						
06.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	66,6	56,94	62,2	66,3	66,3	66,3	<	
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	13,61	47,62	32,26	34,15	13,31	1,6	<	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100	20	24,39	100	100	100	=	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	18	100	=	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	=	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0	100	0	0	0	0	=	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		91	95	95	95	95	95	>	
	1. Keterkinian informasi industri :									
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	%	50	0	50	50	50	50	=	
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	%	25	0	25	25	25	25	=	
	- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	%	0	0	0	0	0	0	=	
	2. Kelengkapan informasi industri meliputi :									
	- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	%	10	10	10	10	10	10	=	
	- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	%	10	10	10	10	10	10	=	
8	Kelautan dan Perikanan			DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN						
08.1	Produksi perikanan	ton	3146,97	100,24	100,3	80,63	100	2989,89	<	IUP
08.2	Konsumsi ikan	kg/kapita	59,35	102,5	102,6	104	100	99,97	>	IUP
08.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	0	10	0	31,4	0	6,8	>	
08.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	86,9	87,26	87,17	81,21	86,3	80,83	<	
08.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	125	125	125	113	125	125	=	
08.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	=	
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	Ton	3343,3	3425,7	3461,93	3123.24	3252,94	2989,89	<	
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2891,4	2989,1	3017,85	2749,82	2807,22	2537,79	<	
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	451,9	436,61	444,08	373,42	445,72	452,1	>	
Penunjang Urusan										

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2025	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Perencanaan Pembangunan			BAPPELITBANGDA						
01.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
01.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
01.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
01.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
01.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	=	
01.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	=	
01.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	0,9796	0,6053	100	100	100	=	
2	Keuangan						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
02.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP/TMT/TW	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=	
02.2	Persentase SILPA	%	1	12,26	8,28	2,95	1,12	7,55		
02.3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1	12,26	8,28	2,95	1,12	7,55		
02.4	Persentase program yang tidak terlaksana	%	0	1,14	0	0,006	0,0167	0,0161		
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	4	1,24	0,004	0,0207	0,0197		
02.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	31,29	27,44	30,64	33,42	33,79		
02.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	24,73	20,75	21,56	32,93	26,93		
02.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	86,94	1,3	92,16	88,59	86,92	88,38		
		%		9,83	7,84	11,41	13,08	11,62		
02.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,28	0,2	0,2	0,26	0,27	0,43		
02.9	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	=	
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Poin	11,47	13,78	11,56	10,58	11,46	12,46	>	
	Rasio PAD	Poin	14,98	1,46	1,22	1,42	14,98	17,65	>	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Poin	74,75	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	78,68		
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	5,21	14,28	63,95	67,43	71,68	5,47		
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	15,1	WTP	WTP	WTP	WTP	14,81		
	Assets Management									
	Apakah ada daftar aset tetap?	Ya/ Tidak	Ya					Ya	=	
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap	Ya/ Tidak	Tidak					Ya	>	
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan	Ya/ Tidak	Tidak					Ya	>	
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ya/ Tidak	Ya					Ya	=	
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	1,33					7,61	=	
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA						
03.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	21	19,92 JP	59,31 JP	17	20	20	<	
03.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	5	6,66	6,63	51,82	0	2,63	<	
03.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	10,59	83,13	47,18	83,4	10,53	45,05	>	
03.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	33	33	33	33	25	26	<	
03.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan Administrasi	449	1880	1368	1436	1263	1102	>	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2025	2021	2022	2023	2024	2025		
03.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan Fungsional	3982	3091	3533	3037	3981	4036	>	
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	11,25	675,93	740	8,67	9,84	8,81	<	
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,26	21,39	23,53	0,18	0,26	0,7	<	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,81	39,75	45,84	0,68	0,75	0,12	<	
4	Penelitian dan pengembangan			BAPPPELITBANGDA						
04.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	=	
04.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	0	100	100	100	100	=	
	Penerapan SIDa:									
04.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	41,28	23,53	41,18	35,35	41,18	41,18	<	
04.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100	0	100	100	100	100	=	
5	Pengawasan			INSPEKTORAT DAERAH						
05.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	48,75	59,54	83,19	46,67	51,08	37,5	<	
05.2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,14	0,55	0,04	0,0006	0,15	0,12	>	
05.3	Jumlah temuan BPK	Temuan	22	12	6	14	13	9	>	
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3					Level 3	=	
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 2					Level 2	=	
6	Sekretariat Dewan			SEKRETARIAT DPRD						
06.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
06.2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
06.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
7	**PENGADAAN**			**SEKRETARIAT DAERAH**						
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	=	
	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	2,32	84	0	100	2,32	1,36	<	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	95,48	49,77	52,65	67,67	95,48	99,97	>	

2.5.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ TPB / SDGs

Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Namun, berdasarkan hasil identifikasi yang mempertimbangkan karakteristik wilayah maka pemerintah Kabupaten Soppeng hanya memiliki 196 indikator TPB. Salah satunya dikarenakan TPB (14), yaitu Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, mengingat Kabupaten Soppeng tidak memiliki laut. Berdasarkan hasil analisis data, kategori capaian TPB Kabupaten Soppeng terbagi atas empat kategori, yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target;
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target;
3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target;
4. Indikator TPB yang belum/tidak memiliki data;
5. Realisasi capaian indikator TPB yang terlaksana dan belum mencapai target.

Tabel 2. 322. Realisasi Capaian TPB yang Dilaksanakan Belum Mencapai Target

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
1	1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	7,5%	8
	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	86%	
			1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun	7.233	
	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	94,3%	
			1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	63,4%	
			1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	86,4%	
			1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	68,44%	
			1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber pen erangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	77,13%	
2	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan	Menurun	18,94%	4

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
		menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.		Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).			
	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	16%	
			2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun , berdasarkan tipe.	Menurun	0,04%	
			2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	0,01%	
3	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	86,59%	5
	3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	60%	
	3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	0,98%	
	3.a	Memperkuat pelaksanaan *The Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	8,81%	
	3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100%	
4	4.1	Pada tahun 2030, menjamin	4.1.1.(	Persentase SD/MI	Meningkat	38,34%	6

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
		bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	a)	berakreditasi minimal B.	menjadi 84,2%		
			4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	68,42%	
			4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	96,86%	
			4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	93,15%	
			4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	7,63 Tahun	
		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	70,97%	
5	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	25%	4
			5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	25%	
	5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.*	5.6.1.(a)	*Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak *terpenuhi).*	Menurun menjadi 9,9%	22,76%	
			5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	57,59%	
6	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	94,3%	6
			6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	90,05%	
	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	63,4%	
			6.2.1.(e)	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem	Meningkat	1 Kecamatan	

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
		khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.		terpusat skala kota, kawasan dan komunal.			
	6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	1 Kecamatan	
			6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	0,86	
8	8.1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1 *	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.	Meningkat	40 kantor bank	7
		Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	7,69%	
			8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Rp 48.180.000,-	
	8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	3,53%	
	8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	0 Orang	
			8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	200.597 Orang	
			8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	Rp 1.148.566.000	
10	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1 *	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,35	5
			10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	7,5%	
			10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)	43 daerah	
			10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	6 desa	
			10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	0 desa	
11	11	Pada tahun 2030,	11.3.2.	Jumlah lembaga	ada	Tidak Ada	2

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
	.3	memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	(b)	pembiayaan infrastruktur.			
	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	73,59%	
15	15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta Ha (skala nasional)	20.508 Ha	2
	15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	Tidak Ada	
16	16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun Persentase instansi	Menurun	31%	5
	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	0%	
	16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	2%	
	16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1 *	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	12.077 Anak	
			16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	75,5%	
17	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	0,91%	6
			17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	1,15%	
			17.1.2 *	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	1,15%	

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
	17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	Tidak Ada	
			17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	Tidak Ada	
	17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	12 Data	

Tabel 2. 323. Realisasi Capaian TPB yang Belum Dilaksanakan

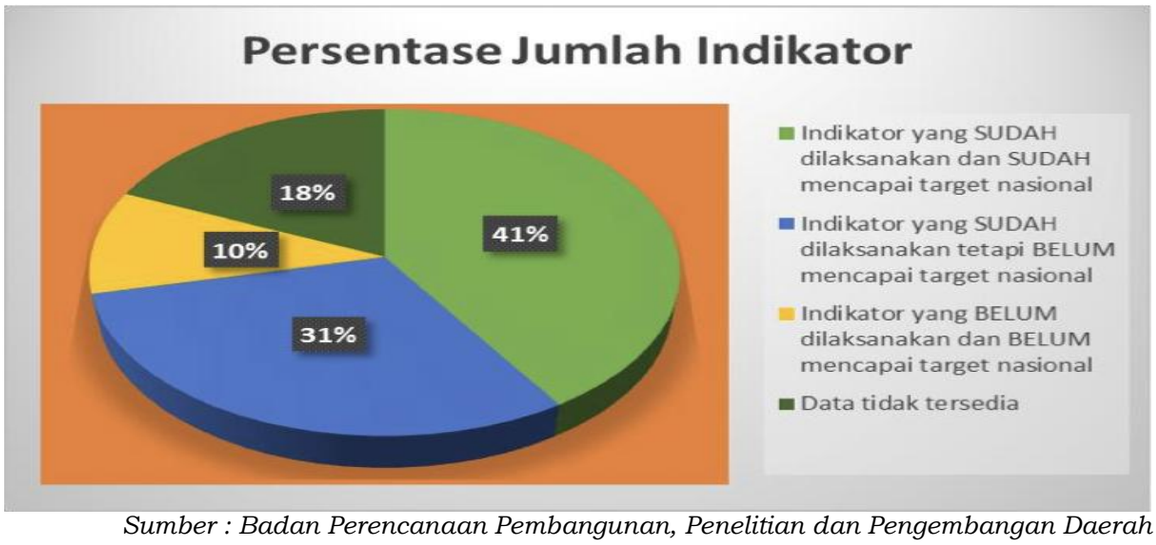
No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Total Indikator
1	1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	3
			1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	
			1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	
2	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi,dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	1
3	3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	*Unmet need* pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	1
5	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaanperempuan.	Bertambah sebanyak 16	**3**
	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadapanak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	
	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	
7	7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalambauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	10-16%	2
	7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Menurun menjadi 463,2SBM (skala nasional)	
10	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	**2**
			10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatifdalam 12 bulan lalu	ada	

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Total Indikator
		mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.		berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		
11	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia(IRBI).	Menurun menjadi 30%	**2**
	11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada	
12	12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia danlingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150juta ton (skala nasional)	1
16	16.1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan.	Meningkat	**4**
	16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi(IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	
	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	
	16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang- undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum	ada	

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Total Indikator
		berkelanjutan.		HAM Internasional.		
17	17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	**1**

Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa Indikator TPB Kabupaten Soppeng yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 41% atau sebanyak 80 indikator, dari total 196 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Soppeng. Sementara itu, sebanyak 31% (60 indikator) telah dilaksanakan, namun belum mencapai target. Sebanyak 20 indikator atau 10% dari total indikator TPB masih belum terlaksana dan belum mencapai target, serta sebanyak 18% atau 36 indikator belum/tidak memiliki data. Persentase perbandingan capaian indikator TPB Kabupaten Soppeng secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 99. Persentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Soppeng



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jika dilihat berdasarkan jumlah indikatornya, TPB yang paling banyak mencapai target nasional adalah TPB 3, yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dan TPB 1, yakni mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Untuk kategori indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, TPB 1 memiliki jumlah yang paling banyak, yakni delapan indikator. Sementara itu, pada indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, TPB 16 dengan empat indikator yang paling tinggi, yakni menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Selain itu, pada kategori indikator TPB yang belum/tidak memiliki data, TPB 8 memiliki jumlah terbanyak, yaitu sebelas indikator dengan tujuan menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

2.5.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk RKPD tahun 2025 berdasarkan urusan menunjukkan bahwa sebanyak 6 layanan urusan wajib, 18 layanan urusan wajib non dasar, 5 layanan urusan pilihan dan 6 penunjang urusan, menunjukkan capaian kinerja rata-rata sebesar 96,89% (sangat tinggi) dan realisasi anggaran rata-rata sebesar 96,38% (sangat tinggi). Dari hasil evaluasi pembangunan tersebut kemudian dilakukan analisis terkait program/kegiatan yang tercapai maupun yang belum optimal, yang selanjutnya akan dikaitkan dengan perencanaan pembangunan tahun yang akan datang. Sehingga apa yang direncanakan selanjutnya dapat lebih maksimal dalam mencapai tujuan pembangunan.

Pelaksanaan evaluasi RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2025 merupakan kriteria atau standar dalam proses analisis pencapaian pembangunan, baik melalui pencapaian target kinerja maupun target anggaran. Untuk persentase capaian diukur dalam 5 kategori, yakni **Sangat Rendah** (≤ 50%), **Rendah** (51% ≤ 65%), **Sedang** (66% ≤ 75%), **Tinggi** (76% ≤ 90%) dan **Sangat Tinggi** (91% ≤ 100%).

Tabel 2. 324. Kategori Penilaian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Kategori Penilaian	Interval Nilai Capaian	Simbol
1	Sangat Rendah	≤ 50%	SR
2	Rendah	51% ≤ 65%	R
3	Sedang	66% ≤ 75%	S
4	Tinggi	76% ≤ 90%	T
5	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	ST

Dari hasil pengukuran tingkat capaian rata-rata realisasi kinerja dan keuangan kegiatan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan IV, maka untuk tingkat capaian kinerja RKPD Kabupaten Soppeng diperoleh persentase nilai sebesar 96,89%, sedangkan untuk realisasi anggaran persentase nilainya mencapai 96,38%. Apabila menggunakan kategori interval 1 tahun sesuai Permendagri Nomor 23 tahun 2013, hasil kinerja RKPD termasuk dalam kategori sangat tinggi, dan hasil realisasi anggaran juga termasuk pada kategori sangat tinggi. Dari hasil yang diperoleh sangat tinggi tersebut dilakukan analisis terhadap program, kegiatan maupun sub kegiatan RKPD 2025 yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD tahun 2027. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pembangunan pada tahun 2027 dan meminimalisir adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan berdasarkan permasalahan atau prioritas pembangunan di tahun 2027.

Tabel 2. 325. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	NAMA SKPD	Capaian Kinerja 2025		Capaian Anggaran 2025	
		%	Predikat	%	Predikat
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	98,80%	Sangat Tinggi	98,98%	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	98,20%	Sangat Tinggi	99,91%	Sangat Tinggi
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78,00%	Tinggi	92,78%	Sangat Tinggi
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	99,77%	Sangat Tinggi	93,43%	Sangat Tinggi
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	89,50%	Tinggi	82,39%	Tinggi
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82,00%	Tinggi	93,34%	Sangat Tinggi
7	Dinas Sosial	79,29%	Tinggi	71,43%	Sedang
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99,27%	Sangat Tinggi	94,11%	Sangat Tinggi
9	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	99,99%	Sangat Tinggi	96,34%	Sangat Tinggi
10	Dinas Lingkungan Hidup	97,85%	Sangat Tinggi	84,50%	Tinggi
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,70%	Tinggi	92,73%	Sangat Tinggi
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00%	Sangat Tinggi	97,22%	Sangat Tinggi
13	Dinas Perhubungan	98,97%	Sangat Tinggi	92,61%	Sangat Tinggi
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	74,71%	Sedang	95,57%	Sangat Tinggi
15	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	100,00%	Sangat Tinggi	85,64%	Tinggi
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	99,92%	Sangat Tinggi	93,61%	Sangat Tinggi

NO	NAMA SKPD	Capaian Kinerja 2025		Capaian Anggaran 2025	
		%	Predikat	%	Predikat
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	100,00%	Sangat Tinggi	94,19%	Sangat Tinggi
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85,77%	Tinggi	82,38%	Tinggi
19	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	94,86%	Sangat Tinggi	96,19%	Sangat Tinggi
20	Sekretariat Daerah	99,44%	Sangat Tinggi	90,60%	Sangat Tinggi
21	Sekretariat DPRD	99,17%	Sangat Tinggi	97,80%	Sangat Tinggi
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	99,88%	Sangat Tinggi	95,51%	Sangat Tinggi
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	98,96%	Sangat Tinggi	94,52%	Sangat Tinggi
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	98,84%	Sangat Tinggi	89,36%	Tinggi
25	Inspektorat Daerah	81,77%	Tinggi	64,87%	Rendah
26	Kecamatan Lilirilau	75,10%	Tinggi	96,14%	Sangat Tinggi
27	Kecamatan Citta	95,49%	Sangat Tinggi	88,30%	Tinggi
28	Kecamatan Ganra	76,67%	Tinggi	75,22%	Tinggi
29	Kecamatan Donri-Donri	99,45%	Sangat Tinggi	82,84%	Tinggi
30	Kecamatan Marioriawa	96,24%	Sangat Tinggi	94,35%	Sangat Tinggi
31	Kecamatan Liliriaja	95,45%	Sangat Tinggi	90,45%	Sangat Tinggi
32	Kecamatan Lalabata	100,00%	Sangat Tinggi	94,33%	Sangat Tinggi
33	Kecamatan Marioriwawo	96,71%	Sangat Tinggi	89,62%	Tinggi
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99,96%	Sangat Tinggi	94,90%	Sangat Tinggi
TOTAL		***96,89%***	***Sangat Tinggi***	***96,38%***	***Sangat Tinggi***

Sumber: Emonev Kabupaten Soppeng Semester II, 2025

2.5.4.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2025 yang Terakomodir di APBD Tahun 2025

Informasi terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir ke dalam APBD Tahun 2025 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 326. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Ada dalam APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2025

No	SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15	44
2	DINAS KESEHATAN	5	22	77
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	25	54
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	15	26
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3	12	34
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	10	27
7	DINAS SOSIAL	6	16	42
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10	29	52
9	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	8	17	39
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	13	28
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	10	28
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	9	30
13	DINAS PERHUBUNGAN	2	15	35
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	14	35
15	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	14	22	37
16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	14	23
17	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6	15	34

No	SKPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	11	30
19	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	6	17	32
20	SEKRETARIAT DAERAH	3	19	56
21	SEKRETARIAT DPRD	2	16	61
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	13	31
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	4	13	54
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	13	41
25	INSPEKTORAT DAERAH	3	11	38
26	KECAMATAN LILIRILAU	5	10	26
27	KECAMATAN CITTA	5	10	19
28	KECAMATAN GANRA	5	11	24
29	KECAMATAN DONRI-DONRI	5	10	21
30	KECAMATAN MARIORIAWA	5	10	27
31	KECAMATAN LILIRIAJA	5	11	29
32	KECAMATAN LALABATA	5	11	28
33	KECAMATAN MARIORIWAWO	5	11	23
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	26
TOTAL		**183**	**482**	**1.211**

Sumber: SIPD, Emonev Kabupaten Soppeng 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2025 yang terakomodir dalam APBD tahun 2025 menunjukkan terdapat 34 Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Jumlah keseluruhan program sebanyak 183, untuk jumlah kegiatan sebanyak 482, sedangkan jumlah sub kegiatan sebanyak 1.211.

2.5.4.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Tahun 2025

Berdasarkan informasi realisasi pendanaan Kabupaten Soppeng tahun 2025 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Soppeng tahun 2025. Realisasi pendanaan sebagaimana yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 327. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Soppeng Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu P-APBD 2025	Realisasi 2025	Persentase
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	383.744.599.212	379.826.016.769	98,98
2	DINAS KESEHATAN	297.399.657.828	297.132.788.142	99,91
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	55.180.488.426	51.193.805.134	92,78
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.562.706.229	3.328.673.340	93,43
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12.587.958.511	10.370.682.168	82,39
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.934.758.541	3.071.997.042	93,34
7	DINAS SOSIAL	5.090.801.821	3.636.504.721	71,43
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.631.684.246	10.005.116.447	94,11
9	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	19.084.696.385	18.385.441.197	96,34
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.622.355.491	8.975.901.207	84,50

No	Perangkat Daerah	Pagu P-APBD 2025	Realisasi 2025	Persentase
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.819.046.851	3.541.392.743	92,73
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.618.799.099	4.490.216.635	97,22
13	DINAS PERHUBUNGAN	8.028.539.046	7.435.285.836	92,61
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.597.759.502	5.350.027.372	95,57
15	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	7.211.375.520	6.175.874.879	85,64
16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.747.531.645	4.444.003.892	93,61
17	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.077.406.223	5.724.126.785	94,19
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.534.023.713	3.735.094.387	82,38
19	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	5.890.294.099	5.665.869.681	96,19
20	SEKRETARIAT DAERAH	33.250.082.387	30.123.455.181	90,60
21	SEKRETARIAT DPRD	32.756.980.441	32.036.579.461	97,80
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.874.684.838	5.610.699.506	95,51
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	151.974.883.577	143.641.497.171	94,52
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.847.869.045	6.119.068.483	89,36
25	INSPEKTORAT DAERAH	17.355.649.014	11.259.442.859	64,87
26	KECAMATAN LILIRILAU	5.684.447.259	5.465.092.728	96,14
27	KECAMATAN CITTA	1.558.994.146	1.376.519.432	88,30
28	KECAMATAN GANRA	1.916.039.942	1.441.162.404	75,22
29	KECAMATAN DONRI-DONRI	1.810.848.069	1.500.058.282	82,84
30	KECAMATAN MARIORIAWA	6.548.064.540	6.178.184.390	94,35
31	KECAMATAN LILIRIAJA	4.863.757.664	4.399.029.941	90,45
32	KECAMATAN LALABATA	10.284.726.154	9.701.643.246	94,33
33	KECAMATAN MARIORIWAWO	4.435.039.442	3.974.540.579	89,62
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.640.864.405	5.353.444.819	94,90
TOTAL		**1.143.167.413.311**	**1.100.669.236.859**	**96,38%**

Sumber : Emonev Kabupaten Soppeng, 2025

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran belanja daerah dalam APBD Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 sebesar Rp1.143.167.413.311, dengan total realisasi anggaran sebesar Rp1.100.669.236.859 atau sebesar 96,38% (Sangat Tinggi). Capaian realisasi anggaran tersebut dilaksanakan oleh 34 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan realisasi anggaran dari pelaksanaan kegiatan tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Dari 34 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Soppeng terdapat 5 OPD dengan tingkat capaian realisasi tertinggi yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.

2.5.4.3. Evaluasi Capaian Pendanaan Level Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Evaluasi capaian pendanaan memberikan informasi tentang gambaran realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan. Capaian kinerja pendanaan terbagi ke dalam 5 kategori, yaitu **Sangat Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran ≤ 50%, **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran 51% ≤ 65%, **Sedang** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran 66% ≤ 75%, **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran 76% ≤ 90% dan **Sangat Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran 91% ≤ 100%.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah program yang ada pada seluruh perangkat daerah sebanyak 183 program dengan capaian yang masuk kategori sangat rendah (≤ 50%) sebanyak 13 program. Untuk kategori rendah (51% ≤ 65%) sebanyak 7 program, kategori sedang (66% ≤ 75%) sebanyak 12 program, kategori tinggi (76% ≤ 90%) sebanyak 31 program dan kategori sangat tinggi (91% ≤ 100%) sebanyak 120 program.

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Adapun hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan untuk tiap perangkat daerah jumlah kegiatan yang ada pada seluruh perangkat daerah sebanyak 482 kegiatan dengan capaian yang masuk kategori sangat rendah (≤ 50%) sebanyak 38 kegiatan. Untuk kategori rendah (51% ≤ 65%) sebanyak 16 kegiatan, kategori sedang (66% ≤ 75%) sebanyak 25 kegiatan, kategori tinggi (76% ≤ 90%) sebanyak 83 kegiatan dan kategori sangat tinggi (91% ≤ 100%) sebanyak 320 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Untuk hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level sub kegiatan untuk tiap perangkat daerah jumlah sub kegiatan yang ada pada seluruh perangkat daerah sebanyak 1.211 sub kegiatan dengan capaian yang masuk kategori sangat rendah (≤ 50%) sebanyak 97 sub kegiatan. Untuk kategori rendah (51% ≤ 65%) sebanyak 44 sub kegiatan, kategori sedang (66% ≤ 75%) sebanyak 52 sub kegiatan, kategori tinggi (76% ≤ 90%) sebanyak 166 sub kegiatan dan kategori sangat tinggi (91% ≤ 100%) sebanyak 852 sub kegiatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 328. Rekapitulasi Capaian Pendanaan Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja					Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja					Jumlah Sub kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja				
			≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%
			SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6	0	0	1	2	3	15	2	0	1	7	5	44	6	1	3	10	24
2	Dinas Kesehatan	5	1	0	2	1	1	22	3	2	2	3	12	77	10	3	5	17	42
3	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	11	1	0	2	3	5	25	3	0	4	8	10	54	5	1	5	11	32
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	0	0	1	0	5	15	1	0	0	0	14	26	1	0	1	0	24
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	0	0	1	1	1	12	2	0	3	3	4	34	8	3	4	4	15
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	0	0	0	0	2	10	1	0	0	1	8	27	1	0	1	3	22
7	Dinas Sosial	6	2	1	0	2	1	16	6	0	1	5	4	42	11	0	3	7	21
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	0	1	0	0	9	29	1	0	0	1	27	52	1	0	0	6	45
9	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	8	0	0	0	1	7	17	0	0	0	3	14	39	1	1	2	2	33
10	Dinas Lingkungan Hidup	7	1	1	0	0	5	13	1	1	0	2	9	28	2	2	1	5	18
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	0	0	0	1	3	10	1	0	0	1	8	28	2	0	0	4	22
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	0	0	0	3	9	0	0	0	0	9	30	0	0	0	4	26
13	Dinas Perhubungan	2	0	0	0	1	1	15	1	0	0	3	11	35	1	0	3	3	28
14	Dinas Komunikasi dan informatika	5	0	0	0	2	3	14	0	0	1	3	10	35	1	1	1	5	27
15	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	14	1	1	0	3	9	22	3	1	0	4	14	37	3	2	0	5	27
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10	0	1	0	0	9	14	0	2	0	0	12	23	0	2	0	0	21
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	6	0	0	0	1	5	15	0	1	0	2	12	34	2	0	0	3	29
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	2	0	0	1	1	11	2	2	1	2	4	30	2	7	0	8	13

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja					Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja					Jumlah Sub kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja				
			≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%
			SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST
19	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	6	0	0	0	0	6	17	0	0	0	0	17	32	0	0	0	2	30
20	Sekretariat Daerah	3	0	0	0	2	1	19	1	0	1	5	12	56	3	3	1	10	39
21	Sekretariat DPRD	2	0	0	0	0	2	16	0	1	0	1	14	61	5	0	1	6	49
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	0	0	0	0	4	13	0	0	1	1	11	31	0	2	0	2	27
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4	0	0	1	1	2	13	0	0	3	1	9	54	6	1	0	13	34
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	0	1	0	0	2	13	0	1	1	3	8	41	3	0	2	2	34
25	Inspektorat Daerah	3	1	1	1	0	0	11	3	2	0	3	3	38	9	6	3	4	16
26	Kecamatan Lilirilau	5	1	0	0	0	4	10	1	1	0	0	8	26	2	1	2	4	17
27	Kecamatan Citta	5	1	0	0	2	2	10	1	0	1	2	6	19	1	1	1	2	14
28	Kecamatan Ganra	5	0	0	1	3	1	11	0	1	2	4	4	24	1	5	7	5	6
29	Kecamatan Donri-Donri	5	1	0	0	3	1	10	1	1	0	5	3	21	3	0	1	5	12
30	Kecamatan Marioriawa	5	0	0	0	0	5	10	0	0	0	2	8	27	0	0	2	1	24
31	Kecamatan Liliriaja	5	0	0	0	1	4	11	1	0	0	3	7	29	2	1	0	4	22
32	Kecamatan Lalabata	5	1	0	0	0	4	11	3	0	0	0	8	28	5	0	1	2	20
33	Kecamatan Marioriwawo	5	0	0	1	0	4	11	0	0	2	3	6	23	0	1	1	5	16
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	0	0	1	0	5	12	0	0	1	2	9	26	0	0	1	2	23
TOTAL		**183**	**13**	**7**	**12**	**31**	**120**	**482**	**38**	**16**	**25**	**83**	**320**	**1211**	**97**	**44**	**52**	**166**	**852**
			183						**482**						**1211**				

Sumber : Emonev Kabupaten Soppeng, 2025

2.5.4.4. Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Evaluasi capaian kinerja memberikan informasi tentang gambaran realisasi target kinerja pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan. Capaian kinerja tersebut terbagi ke dalam 5 kategori, yaitu **Sangat Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja ≤ 50%, **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja 51% ≤ 65%, **Sedang** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja 66% ≤ 75%, **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja 76% ≤ 90% dan **Sangat Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja 91% ≤ 100%.

1. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja *outcome* pada level program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah program yang ada pada seluruh perangkat daerah sebanyak 183 program dengan capaian yang masuk kategori sangat rendah (≤ 50%) sebanyak 7 program. Untuk kategori rendah (51% ≤ 65%) sebanyak 10 program, kategori sedang (66% ≤ 75%) sebanyak 13 program, kategori tinggi (76% ≤ 90%) sebanyak 31 program dan kategori sangat tinggi (91% ≤ 100%) sebanyak 122 program pada tahun 2025.

2. Evaluasi Capaian Kinerja *Output* Pada Level Kegiatan

Adapun hasil evaluasi capaian kinerja *output* level kegiatan untuk tiap perangkat daerah dengan jumlah kegiatan yang ada pada seluruh perangkat daerah sebanyak 482 kegiatan dengan capaian kinerja yang masuk kategori sangat rendah (≤ 50%) sebanyak 53 kegiatan. Untuk kategori rendah (51% ≤ 65%) sebanyak 13 kegiatan, kategori sedang (66% ≤ 75%) sebanyak 27 kegiatan, kategori tinggi (76% ≤ 90%) sebanyak 54 kegiatan dan kategori sangat tinggi (91% ≤ 100%) sebanyak 335 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Kinerja *Output* Pada Level Sub Kegiatan

Untuk hasil evaluasi capaian kinerja *output* pada level sub kegiatan untuk tiap perangkat daerah dengan jumlah sub kegiatan yang ada pada seluruh perangkat daerah sebanyak 1.211 sub kegiatan dengan capaian kinerja yang masuk kategori sangat rendah (≤ 50%) sebanyak 91 sub kegiatan. Untuk kategori rendah (51% ≤ 65%) sebanyak 6 sub kegiatan, kategori sedang (66% ≤ 75%) sebanyak 41 sub kegiatan, kategori tinggi (76% ≤ 90%) sebanyak 24 sub kegiatan dan kategori sangat tinggi (91% ≤ 100%) sebanyak 1.049 sub kegiatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 329. Rekapitulasi Capaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah program berdasarkan tingkat capaian kinerja					Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja					Jumlah Sub kegiatan	Jumlah sub kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja				
			≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%
			SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6	0	0	0	1	5	15	2	0	1	7	5	44	3	0	1	1	39
2	Dinas Kesehatan	5	0	1	1	1	2	22	3	2	2	3	12	77	7	0	0	0	70
3	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	11	0	1	2	3	5	25	3	0	4	8	10	54	5	0	1	0	48
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	0	0	1	0	5	15	2	0	0	0	13	26	0	0	0	0	26
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	0	0	1	1	1	12	2	0	3	3	4	34	3	0	0	1	30
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	0	0	0	0	2	10	1	0	0	1	8	27	4	2	1	1	19
7	Dinas Sosial	6	2	1	0	2	1	16	6	0	1	5	4	42	11	0	0	1	30
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	0	0	2	0	8	29	4	0	0	0	25	52	0	0	1	0	51
9	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	8	0	0	0	1	7	17	0	0	0	3	14	39	1	0	0	0	38
10	Dinas Lingkungan Hidup	7	1	1	0	0	5	13	1	0	1	0	11	28	1	0	1	0	26
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	0	0	0	1	3	10	1	0	0	0	9	28	5	0	0	1	22
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	0	0	0	3	9	0	0	0	0	9	30	0	0	0	0	30
13	Dinas Perhubungan	2	0	0	0	1	1	15	1	0	0	0	14	35	3	0	2	0	30
14	Dinas Komunikasi dan informatika	5	0	0	0	2	3	14	0	0	1	3	10	35	3	1	1	0	30
15	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	14	0	2	0	3	9	22	7	0	5	0	10	37	0	0	0	0	37
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10	0	1	0	0	9	14	0	2	0	0	12	23	0	0	1	0	22
17	Dinas Pariwisata,	6	0	0	0	1	5	15	1	0	0	0	14	34	0	0	0	0	34

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah program berdasarkan tingkat capaian kinerja					Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja					Jumlah Sub kegiatan	Jumlah sub kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja				
			≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%		≤ 50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%
			SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST		SR	R	S	T	ST
	Kepemudaan dan Olahraga																		
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	0	1	1	1	1	11	0	3	2	2	4	30	4	1	1	6	18
19	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	6	0	0	0	0	6	17	2	0	0	0	15	32	1	0	3	1	27
20	Sekretariat Daerah	3	0	0	0	2	1	19	0	0	0	1	18	56	1	0	1	1	53
21	Sekretariat DPRD	2	0	0	0	0	2	16	0	1	0	1	14	61	6	0	1	0	54
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	0	0	0	0	4	13	0	0	0	0	13	31	0	0	0	1	30
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4	0	0	1	1	2	13	0	0	3	1	9	54	3	0	0	1	50
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	0	1	0	0	2	13	0	1	1	3	8	41	4	0	0	2	35
25	Inspektorat Daerah	3	0	1	1	1	0	11	3	2	0	3	3	38	4	1	2	2	29
26	Kecamatan Lilirilau	5	1	0	0	0	4	10	1	1	0	0	8	26	8	0	8	2	8
27	Kecamatan Citta	5	1	0	0	2	2	10	1	0	1	2	6	19	7	1	0	0	11
28	Kecamatan Ganra	5	0	0	1	3	1	11	2	0	0	0	9	24	0	0	13	1	10
29	Kecamatan Donri-Donri	5	1	0	0	3	1	10	1	1	0	5	3	21	1	0	1	0	19
30	Kecamatan Marioriawa	5	0	0	0	0	5	10	0	0	0	0	10	27	0	0	0	0	27
31	Kecamatan Liliriaja	5	0	0	0	1	4	11	5	0	0	0	6	29	6	0	1	0	22
32	Kecamatan Lalabata	5	1	0	0	0	4	11	3	0	0	0	8	28	0	0	0	0	28
33	Kecamatan Marioriwawo	5	0	0	1	0	4	11	0	0	2	3	6	23	0	0	1	2	20
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	0	0	1	0	5	12	1	0	0	0	11	26	0	0	0	0	26
TOTAL		**183**	**7**	**10**	**13**	**31**	**122**	**482**	**53**	**13**	**27**	**54**	**335**	**1211**	**91**	**6**	**41**	**24**	**1049**
			183						**482**						**1211**				

Sumber : Emonev Kabupaten Soppeng, 2025

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi dan misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Permasalahan pembangunan selalu berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini, didasarkan pada isu strategis daerah. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang jika tidak diantisipasi, akan berdampak pada kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka tertentu, dan juga berdampak pada permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Adapun permasalahan daerah yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 330. Sinkronisasi Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas serta Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027

Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan Daerah
Struktur Ekonomi Daerah Belum Kuat dan Berdaya Saing	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah
		Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha
Tingkat Kemiskinan dan Kerentanan Sosial		Berkurangnya penduduk miskin
Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat		Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan
Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Merata	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi;	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah
		Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman
Kualitas Sumber Daya Manusia Belum Optimal	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
		Meningkatnya daya beli masyarakat
		Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup
		Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana
		Terwujudnya pembangunan rendah karbon

Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan Daerah
	ketahanan daerah terhadap bencana	Meningkatnya kemandirian desa
Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Pembangunan Desa dan Kelembagaan Lokal yang Belum Optimal		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan

2.6.1.1. Struktur Ekonomi Daerah Belum Kuat dan Berdaya Saing

Kondisi ini tercermin dari masih terbatasnya diversifikasi sektor ekonomi, di mana perekonomian daerah cenderung bertumpu pada sektor primer, khususnya pertanian dalam arti luas, dengan nilai tambah yang relatif rendah. Ketergantungan pada sektor tersebut menyebabkan ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, serta dinamika pasar global.

Selain itu, kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor jasa modern terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa proses hilirisasi komoditas unggulan daerah belum berjalan maksimal, sehingga potensi peningkatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Keterbatasan infrastruktur pendukung, akses terhadap teknologi, serta rendahnya kapasitas inovasi pelaku usaha turut menjadi faktor penghambat dalam penguatan struktur ekonomi daerah.

Dari sisi daya saing, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi tantangan tersendiri. Di samping itu, keterbatasan akses pasar dan jaringan distribusi juga berdampak pada rendahnya kemampuan produk lokal untuk bersaing, baik di tingkat regional maupun nasional.

Permasalahan ini juga diperkuat oleh belum optimalnya sinergi antar sektor dan antar pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah. Intervensi program yang belum terintegrasi dan berbasis potensi unggulan wilayah menyebabkan upaya penguatan struktur ekonomi belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kondisi struktur ekonomi daerah yang belum kuat dan berdaya saing ini menjadi salah satu isu prioritas dalam RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027, yang memerlukan langkah-langkah strategis melalui penguatan sektor unggulan, pengembangan industri berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

2.6.1.2. Tingkat Kemiskinan dan Kerentanan Sosial

Tingkat kemiskinan dan kerentanan social menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi di daerah bahkan di Tingkat nasional. Meskipun berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, tingkat kemiskinan di daerah masih menunjukkan tantangan, terutama pada kelompok masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan (near poor) yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Kerentanan sosial tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak, rendahnya tingkat pendapatan, serta belum meratanya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak. Selain itu, sebagian masyarakat masih bergantung pada sektor informal dan sektor primer dengan tingkat produktivitas yang rendah, sehingga memiliki daya tahan ekonomi yang lemah terhadap perubahan kondisi eksternal.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,65 persen, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 6,90 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah. Namun demikian, penurunan persentase penduduk miskin tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin secara merata. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 0,79 pada tahun 2024 menjadi 0,94 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan dari 0,15 pada tahun 2024 menjadi 0,17 pada tahun 2025, yang mengindikasikan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Permasalahan ini juga diperparah oleh belum optimalnya ketepatan sasaran program perlindungan sosial akibat keterbatasan kualitas dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial. Akibatnya, masih terdapat potensi inclusion error maupun exclusion error dalam penyaluran bantuan sosial. Di sisi lain, kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta masyarakat di wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses program pemberdayaan dan perlindungan sosial secara optimal.

Selain aspek ekonomi, kerentanan sosial juga mencakup potensi munculnya permasalahan sosial seperti stunting, pengangguran, serta ketimpangan sosial antar wilayah yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat. Koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan dan kerentanan sosial juga masih perlu diperkuat agar intervensi yang dilakukan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Dengan demikian, permasalahan tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial di Kabupaten Soppeng Tahun 2027 menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan pendekatan terpadu melalui peningkatan kualitas data, penguatan program perlindungan dan

jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

2.6.1.3. Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat

Ketahanan pangan daerah khusunya di Kabupaten Soppeng belum sepenuhnya kuat, hal tersebut dapat dilihat dari indeks ketahanan pangan di tahun 2025 sebesar 78,14 menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 87,9 walaupun terjadi perubahan parameter dalam pengukurannya ketahanan pangan di daerah masih menjadi perhatian bersama. Hal tersebut ditandai dengan masih adanya ketergantungan pada komoditas tertentu, fluktuasi produksi pertanian akibat perubahan iklim, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti irigasi, akses distribusi, dan penyimpanan hasil pertanian. Kondisi ini berdampak pada belum stabilnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, sistem distribusi dan rantai pasok pangan yang belum efisien menyebabkan terjadinya disparitas harga antar wilayah dan menurunnya daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Belum optimalnya penguatan cadangan pangan daerah serta terbatasnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat juga menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Kesejahteraan masyarakat yang berkaitan erat dengan ketahanan pangan juga masih menghadapi berbagai kendala. Tingkat pendapatan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha sektor pangan, masih relatif rendah akibat produktivitas yang belum optimal dan nilai tambah hasil produksi yang terbatas. Selain itu, akses terhadap permodalan, teknologi pertanian, serta informasi pasar masih belum merata, sehingga mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Permasalahan lain yang turut mempengaruhi adalah belum optimalnya sinergi kebijakan lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil pertanian. Di samping itu, kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman juga masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Soppeng Tahun 2027 masih menghadapi tantangan yang kompleks, sehingga diperlukan upaya strategis melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan, pengembangan hilirisasi produk pangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan terintegrasi guna mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan secara merata.

2.6.1.4. Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Merata

Infrastruktur dasar dan konektivitas yang belum merata masih menjadi tantangan utama dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari belum meratanya kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar antar wilayah, terutama pada daerah perdesaan dan wilayah yang memiliki akses geografis terbatas. Permasalahan tersebut tercermin dari menurunnya capaian Indeks Layanan Infrastruktur Daerah, yang pada tahun 2025 tercatat sebesar 72,53, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 75,20. Penurunan indeks ini menunjukkan bahwa kualitas dan cakupan layanan infrastruktur daerah belum berkembang secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi secara merata.

Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa wilayah masih belum memadai, baik dari sisi kualitas maupun kemantapan, sehingga menghambat mobilitas orang dan distribusi barang/jasa. Hal ini berdampak pada tingginya biaya logistik serta terbatasnya akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, konektivitas antar wilayah, termasuk keterhubungan antar desa, kecamatan, dan pusat pertumbuhan, masih belum optimal sehingga memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Di sektor infrastruktur dasar lainnya, seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, serta jaringan listrik dan telekomunikasi, masih terdapat keterbatasan cakupan layanan. Beberapa wilayah masih menghadapi kendala dalam memperoleh akses air minum yang aman dan berkelanjutan, serta belum sepenuhnya terlayani sistem sanitasi yang memadai. Sementara itu, keterbatasan jaringan listrik dan akses internet di wilayah tertentu turut menghambat pengembangan ekonomi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Permasalahan ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah, sehingga pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur belum dapat dilakukan secara optimal dan merata. Di samping itu, perencanaan dan pengelolaan infrastruktur yang belum sepenuhnya terintegrasi serta belum berbasis pada prioritas kebutuhan wilayah juga menjadi faktor penghambat dalam percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

Dengan demikian, belum meratanya infrastruktur dasar dan konektivitas di Kabupaten Soppeng Tahun 2027 menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan melalui peningkatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur secara merata, penguatan konektivitas antar wilayah, serta optimalisasi sinergi pendanaan dan perencanaan lintas sektor guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.6.1.5. Kualitas Sumber Daya Manusia Belum Optimal

kualitas sumber daya manusia yang belum optimal masih menjadi isu strategis dalam mendukung daya saing daerah dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan, yang merupakan faktor utama dalam pembentukan SDM yang unggul dan produktif.

Dari sisi pendidikan, masih terdapat kesenjangan kualitas antar wilayah, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta belum optimalnya kompetensi tenaga pendidik. Selain itu, angka partisipasi pendidikan pada jenjang tertentu masih perlu ditingkatkan, terutama pada kelompok masyarakat kurang mampu. Kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja juga belum sepenuhnya selaras, sehingga berdampak pada tingginya tingkat pengangguran, khususnya di kalangan usia produktif.

Di bidang kesehatan, permasalahan seperti prevalensi stunting, gizi kurang, serta akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan. Keterbatasan tenaga kesehatan di beberapa wilayah, serta belum meratanya fasilitas kesehatan, turut mempengaruhi kualitas layanan yang diterima masyarakat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dan kualitas hidup masyarakat secara umum.

Selain itu, pengembangan keterampilan dan kapasitas angkatan kerja juga masih belum optimal. Pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi yang berbasis kebutuhan pasar kerja masih terbatas, sehingga daya saing tenaga kerja daerah belum mampu bersaing secara optimal, baik di tingkat regional maupun nasional. Rendahnya literasi digital dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi juga menjadi tantangan di era transformasi digital saat ini.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pembinaan karakter, etos kerja, serta budaya inovasi di masyarakat. Hal ini mempengaruhi kemampuan individu dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang ekonomi secara maksimal.

Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Soppeng Tahun 2027 masih memerlukan perhatian melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan pelatihan vokasi dan keterampilan, serta pengembangan karakter dan literasi digital masyarakat guna mewujudkan SDM yang unggul, produktif, dan berdaya saing.

2.6.1.6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana masih menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Kondisi ini ditandai dengan masih adanya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Degradasi lingkungan, seperti alih fungsi lahan, kerusakan hutan, serta pencemaran air dan tanah, masih menjadi tantangan yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan persampahan juga belum optimal, baik dari sisi pengurangan, penanganan, maupun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah

berbasis sumber. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan kesehatan dan lingkungan, terutama di kawasan permukiman.

Di sisi lain, Kabupaten Soppeng juga menghadapi potensi risiko bencana yang cukup tinggi, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis serta perubahan iklim. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek perencanaan, ketersediaan infrastruktur pengendali bencana, maupun kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

Permasalahan ini juga diperkuat oleh belum optimalnya integrasi aspek lingkungan hidup dan kebencanaan dalam perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi antar perangkat daerah serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pengurangan risiko bencana masih perlu diperkuat. Selain itu, keterbatasan data dan informasi yang akurat serta sistem peringatan dini yang belum memadai turut mempengaruhi efektivitas penanganan bencana.

Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana di Kabupaten Soppeng Tahun 2027 masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan upaya strategis melalui penguatan kebijakan berbasis lingkungan, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana.

2.6.1.7. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Pembangunan Desa dan Kelembagaan Lokal yang Belum Optimal

Dari aspek tata kelola pemerintahan, masih terdapat tantangan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja, efektivitas perencanaan dan penganggaran, serta konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program. Implementasi reformasi birokrasi belum sepenuhnya optimal, yang ditandai dengan belum meratanya kapasitas aparatur sipil negara, baik dari sisi kompetensi, integritas, maupun profesionalisme. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) masih belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga berdampak pada belum optimalnya efisiensi dan kualitas layanan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masih ditemukan kendala terkait standar pelayanan yang belum seragam, waktu pelayanan yang belum efisien, serta belum optimalnya inovasi pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Akses masyarakat terhadap layanan publik di beberapa wilayah, khususnya daerah perdesaan, juga masih terbatas akibat keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya pendukung.

Di sisi lain, pembangunan desa dan penguatan kelembagaan lokal juga menghadapi berbagai permasalahan. Kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Pemanfaatan dana desa belum sepenuhnya optimal dalam mendorong kemandirian ekonomi dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, peran kelembagaan lokal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan masih belum maksimal.

Permasalahan ini juga diperkuat oleh belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih perlu ditingkatkan agar pembangunan lebih partisipatif, transparan, dan tepat sasaran.

Dengan demikian, kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta pembangunan desa dan kelembagaan lokal di Kabupaten Soppeng Tahun 2027 masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi penerapan SPBE, pengembangan inovasi pelayanan publik, serta pemberdayaan pemerintah desa dan kelembagaan lokal guna mewujudkan pemerintahan yang responsif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

2.6.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.6.2.1. Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.6.2.1.1. Bidang Pendidikan

Berikut adalah identifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan adalah

a) Pendidikan Anak Usia Dini yang masih rendah belum mencapai 100%. Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK dan RA, maka jumlah Lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah sangat berlebihan untuk menampung keseluruhan penduduk usia 4-6 tahun. Namun kenyataannya belum semua penduduk usia 4-6 tahun sudah terlayani oleh Lembaga PAUD. Keberadaan sebagian PAUD swasta di pelosok-pelosok kurang menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada Lembaga tersebut, hal ini antara lain disebabkan Lembaga PAUD Swasta pada umumnya memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai.
b) Belum tercapainya target APM 100 persen, baik pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A maupun pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B antara lain disebabkan oleh masih adanya peserta didik yang putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS), masih adanya penduduk usia 7-12 tahun yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar Kabupaten Soppeng.
c) Masih terdapat angka putus sekolah yang disebabkan karena Faktor ekonomi keluarga, Faktor jarak tempuh ke sekolah, masih adanya orang tua/wali yang belum mendukung program wajib belajar 9 tahun, serta masih kurangnya pemahaman atau kesadaran anak/orang tua/wali tentang pendidikan.
d) Fasilitas pendidikan SD kondisi bangunan baik pada tahun 2023 terealisasi sebesar 75,77%. Penyebab dari realiasi capaian tersebut adalah bertambahnya jumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan dan

masih adanya bangunan sekolah yang sudah tua dan belum dilakukan rehabilitasi.

e) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV belum mencapai 100% yakni sebesar 96,05% di tahun 2023. Hal ini berdampak pada kemampuan memberikan materi, dimana Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik.

2.6.2.1.2. Bidang Kesehatan

Berikut adalah identifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang kesehatan adalah;

1. Masih adanya angka kematian bayi di Soppeng sebesar 18,10% per 1.000 kelahiran hidup atau terdapat 40 kasus kematian bayi yang berumur kurang 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan ibu bersalin belum optimal.
2. Prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,51%, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,41%, akan tetapi kasus balita gizi kurang menurun yakni 574 di tahun 2025 dan 624 di tahun 2024. Walaupun demikian kasus balita gizi kurang masih tergolong banyak sehingga prevalensi balita gizi kurang perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas balita secara lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga secara lebih baik pula. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 data terkait balita gizi kurang menggunakan aplikasi e-PPGBM dengan standar Kemenkes, sehingga jumlah balita gizi kurang mengalami peningkatan.
3. Angka Stunting yang mengalami peningkatan dimana data pada tahun 2024 sebesar 26,6% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 24%. Sedangkan di tahun 2025 tidak ada survei kesehatan indonesia yang dilakukan sehingga data stunting yang digunakan masih mengacu pada tahun 2024.

2.6.2.1.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berikut adalah identifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah

1. Masih perlunya peningkatan persentase infrastruktur dalam kondisi baik. Infrastrukur yang ditingkatkan meliputi Infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, dan jaringan irigasi.
2. Capaian proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan masih rendah sebesar 21,59%. Salah satu belum terpenuhinya akses air minum dikarenakan menurunnya debit air produksi andalan (Ompo) untuk wilayah perkotaan. Selain itu dikarena kondisi geografis, maka beberapa area layanan tidak terlayani secara maksimal.
3. Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi aman. Rendahnya akses ini berkontribusi terhadap meningkatnya risiko masalah kesehatan masyarakat, seperti diare, kolera, tifus, serta stunting pada anak.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Soppeng perlu ditinjau kembali karena RTRW yang ada tidak

memuat program yang lebih detail dan tidak ada spesifikasi program dan lokasi yang direncanakan selain itu substansi RTRW telah mengalami perubahan sehingga perda RTRW yang sekarang tidak dapat mengakomodir pertumbuhan yang ada di Soppeng. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak bisa dikaji atau diperhitungkan kesesuaiannya dengan Perda RTRW.

5. Belum optimalnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Soppeng yang diakibatkan karena kapasitas TPA yang terbatas dan teknologi pengolahan sampah sangat terbatas.
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai.

2.6.2.1.4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berikut adalah identifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah;

1. Belum optimalnya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah di Kabupaten Soppeng.
2. Belum optimalnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.
3. Masih kurangnya perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.
4. Belum optimalnya penyediaan dan pemerataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pada lingkungan perumahan, yang ditunjukkan oleh cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU baru mencapai 46,25 persen pada tahun 2025, sehingga masih terdapat kesenjangan pemenuhan PSU pada sebagian lingkungan perumahan di Kabupaten Soppeng.

2.6.2.1.5. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berikut adalah identifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah;

1. Belum optimanya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Dimana Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran masih sebesar 94,20%.
2. Belum optimalnya pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah;
3. Belum optimalnya pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Masih perlunya peningkatan cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
5. Belum optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang diakibatkan diantaranya masih terbatasnya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

2.6.2.1.6. Bidang Sosial

Berikut adalah identifikasi permasalahan pemerintahan daerah di bidang Sosial adalah

1. Belum optimalnya pemberdayaan sosial yang diakibatkan karena pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial belum maksimal;

2. Belum optimalnya rehabilitasi sosial;
3. Belum maksimalnya perlindungan dan jaminan sosial.

2.6.2.2. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

***2.6.2.2.1.* Bidang Tenaga Kerja**

Belum optimalnya kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang ada di Kabupaten Soppeng. Dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 sebesar 60,61% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan seebsar 44,92%.

***2.6.2.2.2.* Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana rasio KDRT di Soppeng pada tahun 2024 sebesar 0,011 atau sebanyak 9 kasus.

***2.6.2.2.3.* Bidang Pangan**

Perlunya peningkatan Skor Pola Pangan Harapan serta peningkatan ketersediaan pangan dan protein per kapita untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Selain itu, perlunya peningkatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

***2.6.2.2.4.* Bidang Pertanahan**

Belum optimalnya penatagunaan tanah dimana yang diakibatkan oleh belum adanya Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota.

***2.6.2.2.5.* Bidang Lingkungan Hidup**

a) Belum optimalnya pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan karena belum terakreditasinya Laboratorium lingkungan serta masih kurang lengkapnya peralatan laboratorium lingkungan;
b) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c) Belum maksimalnya pengelolaan persampahan dimana timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2024 sebesar 80,29%. Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R sebesar 13,48% dengan cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Soppeng sebesar 31,03% di tahun 2025.

***2.6.2.2.6.* Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

a) Belum optimalnya pendaftaran penduduk dimana Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk masih sebesar 0,99;
b) Belum optimalnya pencatatan sipil dimana Rasio Bayi Berakte Kelahiran sebesar 0,99%.

***2.6.2.2.7.* Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Masih rendahnya desa berstatus swasembada dimana pada tahun 2025 persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa sebesar 18,37%. Berdasarkan data perhitungan sistem informasi desa dan kelurahan oleh direktorat jenderal bina pemerintahan desa kementerian dalam negeri, pada tahun 2025 desa swasembada di Kabupaten Soppeng terdapat 9 desa dari 49 desa yang ada di Kabupaten Soppeng. Adapun desa dengan status swasembada dengan yakni Desa Gattareng, Desa Marioritengnga, Desa Barae,

Desa Soga, Desa Timusu, Desa Baringeng, Desa Donri-Donri, Desa Leworeng, dan Desa Laringgi.

2.6.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Belum efektifnya keterlibatan perangkat daerah dalam pengembangan kampung KB. Ini terkait dengan belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pengendalian dan kuantitas dan kualitas penduduk.

2.6.2.2.9. Bidang Perhubungan

Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dimana masih dibutuhkannya sarana dan prasarana pendukung.

2.6.2.2.10. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
2. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah;
3. Belum optimalnya penerapan Satu Data Indonesia;
4. Belum optimalnya penerapan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah
5. Masih adanya daerah khususnya layanan pendidikan (17 SD dan 1 SMP) dan layanan kesehatan (3 pustu) yang masuk titik blankspot.

2.6.2.2.11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi dimana pada tahun 2025 persentase koperasi aktif di Kabupaten Soppeng sebesar 26,05%;
2. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan UMKM dimana pada tahun 2025 persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Soppeng sebesar 99,41%. Hal ini diakibatkan karena Minimnya akses pasar dan ruang usaha yang layak dan sesuai standar bagi produk Koperasi dan UMKM, dan Keterbatasan akses permodalan yang dimiliki karena terbentur jenis usaha, skala usaha, persyaratan permodalan dan kepemilikan asset.

2.6.2.2.12. Bidang Penanaman Modal

1. Laju Investasi di Kabupaten masih fluktuatif;
2. Belum banyak investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah;
3. Persebaran investasi yang belum merata.

2.6.2.2.13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih perlunya penguatan organisasi kepemudaan yang aktif;
2. Capaian organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Soppeng masih rendah, dimana tahun 2025 sebesar 27,91%;
3. Perlunya peningkatan prestasi olahraga melalui pelatihan atau pengembangan atlet, serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang olahraga.

2.6.2.2.14. Bidang Statistik

Belum maksimalnya penyelenggaraan statistik sektoral dimana lambatnya data statistik dasar pada tahun berjalan, belum adanya sumber daya manusia yang memadai dalam bidang statistik. Selain itu masih adanya ditemukan beberapa data yang berbeda, padahal dihasilkan dari sumber data yang sama.

2.6.2.2.15. **Bidang Persandian**

Urusan persandian merupakan suatu kegiatan pengamanan sistem informasi di pemerintah daerah. Untuk persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sebesar 91,18%. Masih ada permasalahan dalam proses penyelenggaraannya seperti penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh sehingga masih ada kondisi yang mengharuskan penyelenggaraannya dilakukan secara manual. Perlunya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah. Pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah yang masih belum dianggap serius. Selain itu perlu adanya updating data statistik sektoral.

2.6.2.2.16. **Bidang Kebudayaan**

Permasalahan terkait dengan kebudayaan sering kali melibatkan berbagai aspek yang saling berhubungan. Misalnya saja dalam dukungan untuk pelestarian budaya yang masih perlu untuk ditingkatkan. Selain itu partisipasi masyarakat yang seringkali masih terbatas dalam pengambilan kebijakan terkait dengan kebudayaan.

2.6.2.2.17. **Bidang Perpustakaan**

1. Masih rendahnya pengunjung perpustakaan daerah;
2. Belum optimalnya kesadaran dan minat budaya baca (literasi);
3. Perlunya pengembangan perpustakaan daerah berbasis digital.

2.6.2.2.18. **Bidang Kearsipan**

Perlunya peningkatan kualitas cakupan penerapan arsip di tingkat desa secara baku. Belum optimalnya arsip digital dalam membantu penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.6.2.3. Urusan Pilihan

2.6.2.3.1. **Bidang Kelautan dan Perikanan**

1. Belum optimalnya jumlah produksi perikanan kelompok nelayan yang hanya sebesar 83,25% di tahun 2025;
2. Perlunya peningkatan pemenuhan kebutuhan ikan untuk memenuhi kelengkapan protein masyarakat. Konsumsi ikan semakin tinggi dimana tahun 2025 persentase konsumsi ikan sebesar 99,97%.
3. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dimana pada tahun 2025 cakupan bina kelompok nelayan sebesar 6,8%. Dimana tidak terdapat kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan oleh Pemerintah Daerah.

2.6.2.3.2. **Bidang Pariwisata**

1. Belum optimalnya pengembangan terutama dalam hal destinasi wisata, pengembangan sarana prasarana kepariwisataan, untuk meningkatkan daya tarik pengunjung baik dalam daerah maupun di luar daerah;
2. Masih rendahnya rata-rata waktu kunjungan wisatawan, sehingga berdampak pada stagnannya penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor kepariwisataan;
3. Penurunan fungsi objek wisata, khususnya objek wisata alam, terkadang berbagi fungsi dengan kepentingan lainnya, dan juga berdampak pada pendeknya waktu kunjungan wisatawan rata-rata hanya dua malam.

2.6.2.3.3. **Bidang Pertanian**

1. Perlunya peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan;
2. Belum optimalnya pemasaran produk pertanian;
3. Belum efektif dan efisiennya sarana dan prasarana pertanian khususnya infrastruktur irigasi tersier;
4. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
5. Belum siapnya sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim (*El Nino* dan *La Nina*) sehingga sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng dengan capaian sebesar 4,77% di tahun 2025.

2.6.2.3.4. **Bidang Perdagangan**

1. Perlunya peningkatan sarana prasarana perdagangan dimana masih ada sarana dan prasarana perdagangan yang harus direvitalisasi;
2. Perlunya peningkatan kemitraan antara pelaku usaha dengan swalayan/ toko modern;
3. Perlunya peningkatan manajemen pengelolaan pasar;
4. Belum optimalnya informasi harga pasar.

2.6.2.3.5. **Bidang Perindustrian**

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja;
2. Terbatasnya kemampuan pelaku IKM dalam Inovasi dan update teknologi industri;
3. Belum adanya keserasian dan sinergitas program antar perangkat daerah yang terfokus pada komoditas unggulan yang disepakati untuk dibina;
4. Rendahnya daya saing dan kualitas industri lokal;
5. Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri;
6. Belum adanya ikon produk industri yang identik dan menjadi ciri khas Kabupaten Soppeng;
7. Terbatasnya akses permodalan bagi IKM;
8. Belum maksimalnya penataan sentra industri;
9. Kurangnya tenaga penyuluh industri.

2.6.2.4. Fungsi Penunjang urusan

2.6.2.4.1. **Bidang Perencanaan**

1. Perlunya mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
2. Perlunya peningkatan kualitas pengendalian evaluasi pelaksanan program atau kegiatan pembangunan.

2.6.2.4.2. **Bidang Penelitian dan Pengembangan**

1. Belum optimalnya hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang belum ditindaklanjuti dengan kebijakan;
2. Belum optimalnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah serta masih rendahnya jumlah inovasi yang diajukan oleh perangkat daerah.

2.6.2.4.3. Bidang Kepegawaian

Rasio ASN di Kabupaten Soppeng yang mengikuti diklat masih rendah yakni hanya sebesar 2,63% ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal dan 45,05% ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan structural pada tahun 2025. Perlunya peningkatan kualitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok untuk menunjang tercapainya kinerja yang lebih baik.

2.6.2.4.4. Bidang Keuangan

1. Tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih rendah;
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dibidang pendapatan yang belum memadai;
3. Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah dalam APBD.

2.6.2.4.5. Bidang Pengawasan

Belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan dimana persentase tindak lanjut temuan sebesar 37,5% dan temuan BPK yang dikeluarkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 9 temuan pada tahun 2025.

2.7. Isu Strategis

2.7.1. Identifikasi Isu Strategis Kabupaten Soppeng dari Masalah Pembangunan Daerah

Dari masalah pembangunan daerah Kabupaten Soppeng yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat faktor yang dianggap penting dalam mempengaruhi pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2027 maka identifikasi isu strategis pembangunan yakni:

1. Peningkatan Ekonomi Daerah
2. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim
3. Pengembangan Inovasi dalam Merespon Revolusi Industri
4. Akselerasi Pencapaian SPM
5. Pengurangan kesenjangan dan pemerataan pembangunan
6. Pembangunan kebudayaan
7. Hilirisasi pengelolaan produksi sumber daya alam
8. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah untuk daya saing daerah
9. Pengembangan sektor pariwisata
10. Peningkatan kualitas hidup manusia
11. Pengembangan infrastruktur
12. Pengembangan desa dan kelembagaan local
13. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah
14. Pembangunan pertanian
15. Reformasi birokrasi untuk tata kelola yang baik
16. Pengembangan UMKM
17. Pelestarian lingkungan dan sumber daya alam
18. Ketahanan pamngan.

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis tersebut maka isu strategis yang dianggap relevan untuk pembangunan Kabupaten

Soppeng tahun 2027 adalah :

1. Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
2. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Sosial
3. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Penguatan Desa dan Penguatan Kelembagaan Lokal
6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik Berkualitas
7. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.

✓ Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal

Isu strategis daerah terkait penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal merupakan salah satu fokus utama dalam mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Isu ini muncul sebagai respons terhadap kondisi struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor primer dengan tingkat nilai tambah yang relatif rendah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Berbagai potensi lokal yang dimiliki daerah, seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sejatinya memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi motor penggerak perekonomian. Namun demikian, pengelolaan potensi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses terhadap teknologi dan inovasi, rendahnya produktivitas, lemahnya kelembagaan pelaku usaha, serta terbatasnya akses pembiayaan dan jaringan pemasaran.

Selain itu, belum optimalnya pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi produk menyebabkan komoditas unggulan daerah masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambah yang dihasilkan belum maksimal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya saing produk lokal, baik di pasar regional maupun nasional, serta terbatasnya kontribusi sektor unggulan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam konteks tersebut, penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal menjadi isu strategis yang memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya yang perlu dilakukan meliputi pengembangan klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar. Di samping itu, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan penguatan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor swasta juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing.

Dengan demikian, penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh, inklusif, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal merupakan salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Isu ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan arah pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2027 melalui tema **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"**, yang menempatkan peningkatan produktivitas, penguatan investasi, dan pengembangan industri sebagai pengungkit utama percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, arah tersebut sejalan dengan tema RKPD Tahun 2027 **"Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan"**. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik yang efektif, serta ketersediaan infrastruktur yang mampu memperlancar konektivitas, distribusi barang dan jasa, serta akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi.

Dalam konteks Kabupaten Soppeng, arah tersebut diterjemahkan melalui tema RKPD Tahun 2027 **"Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa."** Tema ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Soppeng perlu bertumpu pada kekuatan dan keunggulan daerah dengan menjadikan potensi lokal sebagai basis peningkatan produktivitas, penciptaan nilai tambah, pengembangan investasi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

Kabupaten Soppeng memiliki potensi ekonomi lokal yang kuat, terutama pada sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah, serta potensi peternakan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, UMKM, dan pariwisata. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi produktivitas, pengolahan pascapanen, hilirisasi, diversifikasi produk, penguatan rantai nilai, akses pasar, serta pengembangan investasi yang mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menggeser orientasi pembangunan ekonomi dari **pemanfaatan potensi lokal secara konvensional menuju pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah dan produktivitas**. Potensi pertanian, peternakan, perikanan, dan sumber daya lokal lainnya tidak cukup hanya menghasilkan komoditas primer, tetapi perlu didorong menjadi produk olahan yang memiliki daya saing, umur simpan lebih

panjang, pasar yang lebih luas, dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dengan demikian, penguatan ekonomi lokal harus diarahkan pada terbentuknya ekosistem ekonomi dari **produksi, pengolahan, pengemasan, pemasaran, hingga perluasan akses pasar**.

Sejalan dengan agenda RKP Tahun 2027, peningkatan produktivitas menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing ekonomi Kabupaten Soppeng. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan melalui penerapan teknologi, inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan pelaku usaha, akses terhadap pembiayaan, serta pemanfaatan digitalisasi dalam proses produksi dan pemasaran. Upaya tersebut diperlukan agar pelaku ekonomi lokal, khususnya UMKM, kelompok tani, kelompok usaha masyarakat, koperasi, dan kelembagaan ekonomi desa, mampu meningkatkan skala usaha dan menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas serta kebutuhan pasar.

Pada saat yang sama, **investasi perlu diarahkan untuk memperkuat potensi unggulan daerah dan mempercepat hilirisasi ekonomi lokal**. Investasi tidak semata-mata dipandang dari besarnya modal yang masuk, tetapi dari kemampuannya menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja lokal, membangun keterkaitan dengan pelaku usaha daerah, memperkuat rantai pasok lokal, serta mendorong transfer pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penciptaan iklim investasi yang kondusif perlu diikuti dengan penyiapan potensi dan proyek investasi yang jelas, penyederhanaan pelayanan, kepastian berusaha, serta penguatan promosi investasi berbasis potensi unggulan Kabupaten Soppeng.

Pengembangan industri juga menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Pengembangan industri diarahkan terutama pada **industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal**, sehingga mampu memperpendek rantai distribusi, meningkatkan nilai tambah komoditas, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penguatan industri pengolahan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan UMKM sehingga terbentuk keterkaitan ekonomi yang kuat dari hulu hingga hilir.

Dalam kerangka pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal juga harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mempercepat **kemandirian desa**. Desa memiliki sumber daya, komoditas, tenaga kerja, kelembagaan, dan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, desa perlu didorong menjadi pusat produksi dan pengembangan ekonomi berbasis keunggulan lokal melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa, pengembangan BUM Desa, UMKM, koperasi, kelompok usaha masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi secara produktif dan berkelanjutan.

Penguatan ekonomi desa juga perlu didukung oleh

keterhubungan antara sentra produksi dengan pasar, pusat pengolahan, kawasan perdagangan, serta jaringan distribusi. Dalam hal ini, pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur memiliki fungsi strategis sebagai **economic enabler**, yaitu infrastruktur yang tidak hanya mendukung pelayanan dasar, tetapi juga membuka akses produksi, menurunkan biaya logistik, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta memperluas akses masyarakat desa terhadap pasar dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, pembangunan manusia menjadi fondasi penting dalam penguatan ekonomi daerah. Potensi lokal hanya dapat memberikan manfaat optimal apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, jiwa kewirausahaan, kemampuan beradaptasi terhadap teknologi, serta produktivitas yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi tenaga kerja, pemberdayaan pelaku UMKM, serta penguatan kapasitas masyarakat desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengembangan ekonomi daerah.

Dengan demikian, **penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal Kabupaten Soppeng Tahun 2027 diarahkan pada transformasi potensi lokal menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan bernilai tambah**. Transformasi tersebut dilakukan melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi dan industrialisasi berbasis komoditas lokal, penguatan investasi, pengembangan UMKM dan kelembagaan ekonomi masyarakat, perluasan akses pasar, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas ekonomi.

Pada akhirnya, keberhasilan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi atau pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga dari sejauh mana **nilai tambah ekonomi dapat dipertahankan di daerah, kesempatan kerja semakin luas, pendapatan masyarakat meningkat, kesenjangan antarwilayah berkurang, dan desa semakin mampu mengelola serta mengembangkan potensi ekonominya secara mandiri**. Dengan pendekatan tersebut, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan RKP Tahun 2027.

✓ Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Sosial

Isu strategis daerah terkait pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial merupakan fokus penting dalam pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan. Isu ini muncul seiring dengan masih adanya penduduk miskin dan kelompok rentan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, layanan dasar, serta peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan.

Kemiskinan di daerah tidak hanya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta perumahan dan lingkungan yang layak. Di samping itu, sebagian masyarakat berada dalam kategori rentan (near poor) yang memiliki daya tahan ekonomi rendah dan mudah terdampak oleh berbagai guncangan, seperti fluktuasi harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, maupun bencana alam.

Ketimpangan sosial juga masih menjadi tantangan yang ditandai dengan adanya kesenjangan antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Perbedaan tingkat akses terhadap infrastruktur, layanan publik, serta peluang ekonomi menyebabkan terjadinya disparitas kesejahteraan, khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, kelompok rentan seperti perempuan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam memperoleh akses yang setara terhadap layanan dan kesempatan pembangunan.

Permasalahan ini juga diperkuat oleh belum optimalnya efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan kualitas dan pemutakhiran data kemiskinan berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran program, baik dalam bentuk inclusion error maupun exclusion error. Selain itu, pendekatan penanganan kemiskinan yang masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi lintas perangkat daerah menyebabkan intervensi yang dilakukan belum optimal dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya yang perlu dilakukan meliputi peningkatan kualitas dan pemerataan akses layanan dasar, penguatan program perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan wilayah yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, penanganan isu strategis ini diarahkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan, mengurangi kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat dan wilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial merupakan salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 yang memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Soppeng. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan upaya mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas hidup, perluasan kesempatan ekonomi,

pemerataan akses terhadap pelayanan dasar, peningkatan produktivitas masyarakat, serta penguatan kemampuan masyarakat untuk keluar dari kerentanan secara berkelanjutan.

Arah tersebut sejalan dengan tema **RKP Tahun 2027 "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang menempatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, memperkuat sektor usaha yang menyerap tenaga kerja, serta memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, tema **RKPD Tahun 2027 "Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan"** memberikan penekanan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemerataan infrastruktur. Akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, air minum, sanitasi, perumahan, konektivitas, serta infrastruktur ekonomi merupakan fondasi penting untuk mengurangi kesenjangan kesempatan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam konteks Kabupaten Soppeng, arah tersebut diterjemahkan melalui tema **RKPD Tahun 2027 "Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa."** Tema ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus ditempuh melalui pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat infrastruktur dan konektivitas wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kapasitas desa dalam menciptakan sumber-sumber penghidupan dan ekonomi masyarakat.

Kemiskinan pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, permodalan, infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan di Kabupaten Soppeng perlu diarahkan dari pendekatan yang semata-mata bersifat **kuratif melalui bantuan sosial** menuju pendekatan yang semakin **preventif, produktif, dan transformatif**, dengan memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Salah satu tantangan penting adalah memastikan bahwa percepatan pembangunan ekonomi daerah memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat miskin dan rentan. Potensi

ekonomi Kabupaten Soppeng yang bertumpu pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, UMKM, industri pengolahan, dan sektor jasa perlu dikembangkan sebagai sumber penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kelompok masyarakat miskin dan rentan perlu memperoleh akses yang lebih besar terhadap kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, pembiayaan, pengembangan usaha, teknologi, serta akses pasar sehingga dapat bertransformasi dari penerima manfaat menjadi pelaku ekonomi produktif.

Sejalan dengan agenda **produktivitas, investasi, dan industri** dalam RKP Tahun 2027, penciptaan lapangan kerja produktif menjadi salah satu kunci pengentasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan peningkatan pendapatan, termasuk melalui pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan berkembangnya kesempatan kerja yang layak, diharapkan pendapatan rumah tangga meningkat dan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial dapat dikurangi secara bertahap.

Selain penciptaan kesempatan ekonomi, pengentasan kemiskinan juga memerlukan penguatan **pembangunan manusia**. Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas merupakan investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga miskin perlu memperoleh akses pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai agar tidak mewarisi keterbatasan sosial dan ekonomi keluarganya. Demikian pula, peningkatan keterampilan dan kompetensi penduduk usia produktif diperlukan agar masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ekonomi.

Aspek **ketimpangan sosial dan kewilayahan** juga menjadi perhatian penting. Perbedaan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, kesempatan kerja, fasilitas ekonomi, dan sumber daya pembangunan dapat menyebabkan manfaat pembangunan tidak terdistribusi secara merata. Oleh karena itu, pembangunan Tahun 2027 perlu memastikan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah atau pusat pertumbuhan tertentu, tetapi mampu menjangkau masyarakat di wilayah perdesaan dan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses.

Penguatan infrastruktur menjadi salah satu instrumen utama dalam mengurangi ketimpangan tersebut. Pembangunan jalan, jembatan, jaringan transportasi, air minum, sanitasi, listrik, telekomunikasi, serta infrastruktur ekonomi harus diarahkan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan konektivitas masyarakat, menurunkan biaya mobilitas dan distribusi, serta memperluas akses masyarakat terhadap pusat pelayanan dan pasar.

Dengan demikian, infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik, tetapi sebagai **pengungkit pemerataan kesempatan ekonomi dan pelayanan dasar**.

Dalam kerangka tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027, **desa menjadi salah satu titik strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial**. Desa perlu diperkuat sebagai basis pembangunan yang mampu menciptakan kesempatan ekonomi, menyediakan pelayanan dasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi ekonomi desa perlu dikembangkan melalui penguatan UMKM, BUM Desa, koperasi, kelompok usaha masyarakat, sektor pertanian dan usaha berbasis sumber daya lokal, serta pengembangan rantai nilai yang menghubungkan produksi desa dengan pasar yang lebih luas.

Kemandirian desa dalam konteks pengentasan kemiskinan tidak hanya berarti meningkatnya kemampuan desa dalam mengelola sumber daya dan pembiayaan pembangunan, tetapi juga meningkatnya kemampuan masyarakat desa dalam memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Dengan demikian, **kemandirian desa merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan sekaligus mempersempit kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.**

Di sisi lain, perlindungan sosial tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dan belum mampu sepenuhnya berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Perlindungan sosial perlu semakin diarahkan agar tepat sasaran, adaptif, terintegrasi dengan program pemberdayaan, serta mampu mencegah masyarakat miskin dan rentan jatuh ke kondisi kemiskinan yang lebih dalam akibat guncangan ekonomi, sosial, maupun bencana.

Penguatan kualitas data dan ketepatan sasaran juga menjadi prasyarat penting. Intervensi pengentasan kemiskinan perlu didukung oleh data yang akurat, terpadu, dan mutakhir sehingga program pembangunan dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat dan wilayah yang paling membutuhkan. Pendekatan berbasis data memungkinkan pemerintah daerah melakukan intervensi yang lebih tepat, menghindari tumpang tindih program, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya pembangunan.

Dengan demikian, **pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial Kabupaten Soppeng Tahun 2027 diarahkan pada transformasi masyarakat miskin dan rentan dari penerima manfaat menjadi masyarakat yang semakin produktif, berdaya, dan mandiri.** Transformasi tersebut dilakukan melalui integrasi antara peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, perluasan akses pelayanan dasar, pemerataan infrastruktur, penguatan perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi desa.

Pada akhirnya, keberhasilan isu strategis ini tidak hanya ditandai oleh menurunnya angka kemiskinan, tetapi juga oleh **meningkatnya pendapatan dan produktivitas masyarakat miskin, berkurangnya kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesempatan ekonomi, meningkatnya kesempatan kerja yang layak, serta semakin kuatnya kemandirian masyarakat dan desa**. Dengan pendekatan tersebut, pengentasan kemiskinan menjadi bagian integral dari upaya Kabupaten Soppeng untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pembangunan manusia yang inklusif, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

✓ Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas

Isu strategis daerah terkait pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas merupakan salah satu prioritas utama dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta pemerataan akses pelayanan dasar bagi masyarakat.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur di daerah masih belum merata, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan maupun antar kawasan dengan karakteristik geografis yang berbeda. Infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana transportasi di beberapa wilayah masih memerlukan peningkatan kualitas dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk mendukung kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang/jasa. Ketimpangan konektivitas ini berdampak pada tingginya biaya logistik serta terbatasnya akses masyarakat terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik.

Di sisi lain, infrastruktur dasar seperti penyediaan air minum, sanitasi, perumahan layak, jaringan listrik, dan telekomunikasi juga masih menghadapi keterbatasan cakupan dan kualitas layanan. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta menghambat peningkatan kualitas hidup dan pengembangan potensi ekonomi daerah. Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang belum merata juga menjadi kendala dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik.

Permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, tantangan geografis, serta belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan wilayah. Selain itu, sinergi pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan.

Dalam konteks tersebut, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan secara terarah dan berkelanjutan. Upaya yang perlu

dilakukan meliputi percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur prioritas, penguatan konektivitas antar wilayah, peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar, serta optimalisasi perencanaan dan pembiayaan pembangunan melalui kolaborasi lintas sektor.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas merupakan salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 yang memiliki peran fundamental dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan manusia, serta penguatan kemandirian desa. Infrastruktur tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pembangunan fisik, tetapi sebagai **fondasi sekaligus pengungkit pembangunan daerah** yang menentukan konektivitas antarwilayah, efisiensi aktivitas ekonomi, pemerataan akses pelayanan dasar, dan peningkatan daya saing daerah.

Isu tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tema **RKP Tahun 2027 "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri."** Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas membutuhkan dukungan infrastruktur yang mampu meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya logistik dan distribusi, memperlancar mobilitas barang dan manusia, membuka akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pengembangan industri. Dengan demikian, kualitas dan keterhubungan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan daerah untuk meningkatkan produktivitas dan menarik investasi.

Pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, tema **RKPD Tahun 2027 "Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan"** menempatkan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Arah tersebut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan manusia dan peningkatan pelayanan publik, sehingga manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh kawasan perkotaan atau pusat pertumbuhan, tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan dan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses.

Dalam konteks Kabupaten Soppeng, arah tersebut diterjemahkan melalui tema **RKPD Tahun 2027 "Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa."** Tema ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus diarahkan

untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga tingkat desa. Infrastruktur yang dibangun harus mampu menghubungkan sentra produksi dengan pasar, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, membuka keterisolasian wilayah, serta memperkuat keterhubungan desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Tantangan pembangunan infrastruktur Kabupaten Soppeng ke depan tidak hanya terletak pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga pada **pemerataan akses, peningkatan kualitas, keberlanjutan pemeliharaan, serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia**. Keterbatasan kualitas dan kapasitas sebagian infrastruktur dapat menghambat mobilitas masyarakat, meningkatkan biaya distribusi, memperlambat pengembangan ekonomi lokal, serta menyebabkan perbedaan akses pelayanan dasar antarwilayah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur Tahun 2027 perlu diarahkan berdasarkan kebutuhan riil, tingkat urgensi, manfaat ekonomi dan sosial, serta prinsip pemerataan wilayah.

Salah satu fokus penting adalah penguatan **konektivitas antarwilayah dan aksesibilitas sentra-sentra ekonomi**. Infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya yang menghubungkan kawasan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, pariwisata, dan permukiman dengan pusat pelayanan dan pasar, memiliki fungsi strategis dalam memperkuat rantai ekonomi daerah. Konektivitas yang semakin baik akan mempercepat mobilitas barang dan jasa, menekan biaya transportasi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

Pembangunan infrastruktur juga perlu diarahkan untuk mendukung **produktivitas dan investasi** sebagaimana menjadi fokus RKP Tahun 2027. Infrastruktur ekonomi harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan usaha, termasuk melalui ketersediaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, air, serta sarana pendukung kawasan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan keterkaitannya dengan potensi ekonomi daerah dan diarahkan pada kawasan yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru.

Selain infrastruktur ekonomi, pemerataan **infrastruktur pelayanan dasar** menjadi bagian penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan kewilayahan. Akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi, perumahan layak, listrik, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan secara merata. Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memastikan bahwa pembangunan manusia dapat berlangsung secara inklusif.

Dalam kerangka pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun

2027, **desa menjadi salah satu prioritas utama pembangunan infrastruktur**. Desa tidak hanya membutuhkan infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, tetapi juga membutuhkan infrastruktur yang mampu mendukung kegiatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur desa perlu diarahkan untuk memperkuat akses produksi, distribusi, perdagangan, digitalisasi, serta konektivitas dengan pusat-pusat pelayanan dan pasar.

Penguatan infrastruktur desa diharapkan mampu menjadi katalis bagi **kemandirian desa**. Infrastruktur yang baik memungkinkan masyarakat desa memperoleh akses yang lebih luas terhadap pasar, pendidikan, kesehatan, teknologi, informasi, dan kesempatan kerja. Pada saat yang sama, infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat usaha ekonomi desa, meningkatkan nilai tambah potensi lokal, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Aspek **kualitas dan keberlanjutan infrastruktur** juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Pembangunan infrastruktur harus disertai dengan perencanaan teknis yang memadai, penerapan standar kualitas, pengawasan pelaksanaan, serta dukungan pembiayaan pemeliharaan dan rehabilitasi. Pendekatan tersebut diperlukan agar infrastruktur yang dibangun memiliki umur layanan yang optimal, memberikan manfaat jangka panjang, dan tidak menimbulkan beban pembiayaan yang besar akibat kerusakan atau rendahnya kualitas konstruksi.

Di samping itu, pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan aspek **ketahanan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim**. Infrastruktur yang dibangun harus memiliki ketahanan dan kemampuan adaptasi terhadap berbagai potensi risiko, sehingga pelayanan publik dan aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan ketika terjadi gangguan. Integrasi aspek mitigasi risiko dalam perencanaan infrastruktur menjadi semakin penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.

Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga perlu menjadi bagian dari penguatan infrastruktur Kabupaten Soppeng. Infrastruktur digital yang semakin merata dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi, pendidikan, layanan pemerintahan, pasar, dan berbagai peluang ekonomi. Digitalisasi juga dapat mendukung efisiensi pelayanan publik serta membuka peluang bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Dengan demikian, **pembangunan infrastruktur Kabupaten Soppeng Tahun 2027 perlu bergeser dari pendekatan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kuantitas menuju pendekatan yang menekankan kualitas, pemerataan, keterhubungan, produktivitas, dan kebermanfaatan**. Setiap pembangunan infrastruktur harus memiliki keterkaitan yang jelas

dengan kebutuhan masyarakat, pengembangan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta pencapaian kemandirian desa.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun, jumlah fasilitas yang tersedia, atau besarnya belanja infrastruktur, tetapi dari **sejauh mana infrastruktur tersebut mampu meningkatkan akses masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, menurunkan biaya distribusi, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperluas kesempatan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat kemandirian desa**.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027. Melalui penguatan konektivitas, pemerataan pelayanan dasar, dukungan terhadap kawasan dan sentra ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur desa, penguatan infrastruktur digital, serta penerapan prinsip pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, Kabupaten Soppeng diharapkan mampu menciptakan **infrastruktur yang tidak hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga menghubungkan masyarakat dengan peluang ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan**, sehingga pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia dapat berlangsung secara lebih merata dan berkelanjutan.

✓ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Isu strategis daerah terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. SDM yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan, tetapi juga oleh derajat kesehatan, keterampilan, produktivitas, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kualitas SDM di daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi pendidikan, masih terdapat kesenjangan akses dan mutu antar wilayah, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta belum optimalnya kompetensi tenaga pendidik. Selain itu, kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja masih belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga berdampak pada meningkatnya pengangguran, khususnya pada usia produktif.

Di bidang kesehatan, permasalahan seperti stunting, gizi kurang, serta belum meratanya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi kendala. Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan di beberapa wilayah turut mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, pengembangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja juga masih belum optimal. Program pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja masih terbatas, sehingga daya saing tenaga kerja daerah belum mampu bersaing secara maksimal. Rendahnya literasi digital dan kemampuan inovasi juga menjadi tantangan dalam menghadapi era transformasi digital dan ekonomi berbasis pengetahuan.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pembinaan karakter, etos kerja, serta budaya belajar sepanjang hayat di masyarakat. Hal ini mempengaruhi kemampuan individu dalam beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada.

Dalam konteks tersebut, peningkatan kualitas SDM menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Upaya yang perlu dilakukan meliputi peningkatan akses dan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan, pengembangan pelatihan vokasi dan keterampilan, serta peningkatan literasi digital dan budaya inovasi. Selain itu, sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha juga perlu diperkuat untuk menciptakan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing, sehingga mampu menjadi penggerak utama dalam pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 yang memiliki posisi fundamental dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan produktivitas, penguatan daya saing daerah, serta terwujudnya kemandirian masyarakat dan desa. Kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan karena kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi, menarik investasi, mengembangkan industri, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan merespons perubahan lingkungan strategis sangat bergantung pada kualitas, kompetensi, kesehatan, produktivitas, dan kemampuan adaptasi masyarakatnya.

Isu ini memiliki keterkaitan langsung dengan tema **RKP Tahun 2027 "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri."** Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya membutuhkan modal dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja dan perkembangan sektor ekonomi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi salah satu kunci agar pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah.

Pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, tema **RKPD Tahun**

2027 "Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan" secara eksplisit menempatkan pembangunan SDM sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan manusia harus berjalan secara simultan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur agar tercipta fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Soppeng, arah tersebut diterjemahkan melalui tema **RKPD Tahun 2027 "Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa."** Tema ini menegaskan bahwa pembangunan manusia bukan agenda yang berdiri sendiri, tetapi merupakan salah satu pengungkit utama pembangunan ekonomi dan instrumen untuk memperkuat kemandirian desa. Pembangunan SDM harus mampu menghasilkan masyarakat yang sehat, terdidik, terampil, produktif, inovatif, adaptif, dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber peningkatan kesejahteraan.

Tantangan pembangunan SDM Kabupaten Soppeng ke depan tidak hanya menyangkut peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tetapi juga peningkatan **kualitas, relevansi, pemerataan, dan produktivitas SDM**. Pembangunan SDM perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta akses terhadap pengembangan kapasitas sepanjang hayat.

Dalam bidang pendidikan, peningkatan kualitas SDM perlu diarahkan pada peningkatan kualitas hasil belajar, penguatan literasi, numerasi, karakter, keterampilan, serta kemampuan berpikir kritis dan adaptif. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga memastikan bahwa peserta didik memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, teknologi, dan dunia kerja. Penguatan kualitas pendidikan menjadi semakin penting dalam menyiapkan generasi muda Kabupaten Soppeng agar mampu menjadi tenaga kerja produktif sekaligus pelaku usaha yang inovatif.

Selain pendidikan formal, peningkatan kualitas SDM perlu diperkuat melalui **pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan keterampilan berbasis kebutuhan pasar**. Keterhubungan antara lembaga pendidikan, pelatihan, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintah perlu diperkuat agar kompetensi tenaga kerja yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi daerah. Langkah tersebut menjadi penting dalam mendukung agenda RKP Tahun 2027 yang menekankan produktivitas, investasi, dan industri.

Kabupaten Soppeng juga perlu mengembangkan SDM yang

mampu mendukung transformasi ekonomi berbasis potensi lokal. Potensi pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan sektor ekonomi lainnya membutuhkan SDM yang tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas, mengolah bahan baku, melakukan inovasi, menerapkan teknologi, mengembangkan branding dan pemasaran, serta memanfaatkan platform digital untuk memperluas akses pasar.

Dalam konteks tersebut, **peningkatan produktivitas SDM menjadi titik temu antara agenda pembangunan manusia dan agenda pembangunan ekonomi**. SDM yang sehat, berpendidikan, terampil, dan produktif akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan nilai tambah. Dengan demikian, pembangunan SDM menjadi instrumen penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus mengurangi ketimpangan sosial.

Aspek kesehatan juga menjadi fondasi utama pembangunan SDM. Masyarakat yang sehat memiliki kemampuan belajar, bekerja, dan berproduksi secara lebih optimal. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan, pencegahan penyakit, perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak, penurunan stunting, peningkatan perilaku hidup sehat, serta penguatan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk masyarakat perdesaan dan kelompok rentan.

Peningkatan kualitas SDM juga harus dilakukan secara **inklusif dan merata**. Masih adanya perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, keterampilan, teknologi, dan kesempatan ekonomi antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan. Oleh karena itu, intervensi pembangunan manusia perlu memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat miskin dan rentan, wilayah perdesaan, kelompok dengan keterbatasan akses, serta masyarakat yang membutuhkan dukungan khusus.

Dalam kerangka tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027, **desa merupakan ruang strategis dalam pembangunan SDM**. Kemandirian desa tidak akan terwujud tanpa masyarakat yang memiliki kapasitas untuk mengelola potensi dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, pembangunan SDM desa perlu diarahkan pada peningkatan keterampilan masyarakat, penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, pengembangan kewirausahaan, pengelolaan usaha ekonomi desa, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara produktif dan berkelanjutan.

Pembangunan SDM juga perlu diarahkan untuk mendukung **transformasi digital dan peningkatan daya adaptasi masyarakat**. Perubahan teknologi, digitalisasi pelayanan,

perkembangan ekonomi digital, dan perubahan kebutuhan dunia kerja menuntut masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi. Penguatan literasi digital, keterampilan teknologi informasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan kegiatan ekonomi menjadi bagian penting dari peningkatan daya saing SDM Kabupaten Soppeng.

Pada sisi pemerintahan, kualitas SDM aparatur juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aparatur yang kompeten, profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu memanfaatkan teknologi akan memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pembangunan SDM harus mencakup peningkatan kapasitas masyarakat sekaligus penguatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dan desa.

Selanjutnya, pembangunan SDM perlu dilaksanakan secara terpadu dengan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, dan digital harus tersedia secara merata agar masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kapasitasnya. Pada saat yang sama, perkembangan ekonomi daerah harus mampu menyediakan ruang bagi SDM yang telah dibangun melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, dan peningkatan investasi yang menyerap tenaga kerja lokal.

Dengan demikian, **peningkatan kualitas SDM Kabupaten Soppeng Tahun 2027 diarahkan pada transformasi masyarakat menjadi lebih sehat, terdidik, terampil, produktif, inovatif, adaptif, dan berdaya saing**. Transformasi tersebut dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan, penguatan kesehatan dan gizi, pengembangan keterampilan dan kompetensi kerja, peningkatan produktivitas, penguatan literasi digital, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan SDM tidak hanya diukur dari meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan, tetapi dari sejauh mana **kualitas manusia mampu menjadi penggerak produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik, mengembangkan usaha, beradaptasi terhadap perubahan, serta berkontribusi terhadap pembangunan dan kemandirian desa**.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027. SDM yang berkualitas akan memperkuat produktivitas, meningkatkan daya tarik investasi, mendukung pengembangan industri dan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kemampuan masyarakat desa dalam mengelola potensi dan sumber daya secara mandiri. Dengan demikian, pembangunan manusia menjadi **investasi strategis untuk memastikan bahwa percepatan pembangunan ekonomi dan**

penguatan infrastruktur benar-benar menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng secara inklusif dan berkelanjutan.

✓ Penguatan Desa dan Penguatan Kelembagaan Lokal

Isu strategis daerah terkait penguatan desa dan penguatan kelembagaan lokal merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan ketahanan sosial berbasis komunitas.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintahan desa dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Pemanfaatan dana desa belum sepenuhnya optimal dalam mendorong kemandirian ekonomi dan pengembangan potensi lokal. Selain itu, kualitas perencanaan pembangunan desa masih menghadapi tantangan dalam hal sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga program yang dilaksanakan belum sepenuhnya terarah dan berkelanjutan.

Di sisi lain, kelembagaan lokal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, serta kelompok-kelompok masyarakat belum berfungsi secara optimal dalam mendukung proses pembangunan. Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan masih perlu diperkuat agar pembangunan desa lebih partisipatif dan tepat sasaran.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, baik dari sisi kompetensi aparatur maupun masyarakat. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pengelolaan potensi desa, termasuk dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta inovasi berbasis kearifan lokal.

Selain itu, dukungan infrastruktur dasar dan akses terhadap teknologi informasi di desa juga masih terbatas, sehingga menghambat percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan desa juga masih perlu ditingkatkan.

Dalam konteks tersebut, penguatan desa dan kelembagaan lokal menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatan terpadu melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan peran kelembagaan lokal, optimalisasi pemanfaatan dana desa, serta pengembangan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.

Dengan demikian, penguatan desa dan kelembagaan lokal diarahkan untuk menciptakan pemerintahan desa yang efektif, masyarakat yang berdaya, serta pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Penguatan desa dan kelembagaan lokal merupakan salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 yang memiliki posisi penting dalam mewujudkan kemandirian desa, mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi perlu diperkuat sebagai **subjek sekaligus penggerak pembangunan** yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, mengelola potensi, mengembangkan ekonomi lokal, menyediakan pelayanan masyarakat, dan membangun kemandirian secara berkelanjutan.

Isu ini memiliki keterkaitan erat dengan tema **RKP Tahun 2027 "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri."** Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas membutuhkan keterlibatan masyarakat dan wilayah perdesaan sebagai bagian dari rantai produksi dan aktivitas ekonomi. Desa memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, serta potensi ekonomi lokal yang dapat menjadi basis peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah. Oleh karena itu, penguatan desa dan kelembagaan lokal perlu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola potensi tersebut sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, tema **RKPD Tahun 2027 "Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan"** menegaskan pentingnya pembangunan manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan infrastruktur. Dalam konteks perdesaan, ketiga aspek tersebut sangat bergantung pada kapasitas pemerintahan desa dan kelembagaan lokal dalam mengelola pembangunan. Desa yang memiliki aparatur dan kelembagaan yang kuat akan lebih mampu mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, tema **RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 "Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa"** secara langsung menempatkan kemandirian desa sebagai salah satu orientasi utama pembangunan daerah. Kemandirian desa tidak hanya diukur dari kemampuan mengelola pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga dari kemampuan desa dalam mengelola potensi lokal, memperkuat ekonomi masyarakat, menyediakan pelayanan dasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta

membangun kelembagaan yang mampu bekerja secara efektif, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Tantangan utama penguatan desa di Kabupaten Soppeng adalah memastikan bahwa kapasitas pemerintahan desa dan kelembagaan lokal berkembang sejalan dengan semakin kompleksnya kebutuhan pembangunan. Desa membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pelayanan publik, pengembangan ekonomi, serta pemanfaatan teknologi. Peningkatan kapasitas tersebut menjadi penting agar kewenangan dan sumber daya yang dimiliki desa dapat dikelola secara efektif dan menghasilkan manfaat pembangunan yang lebih besar bagi masyarakat.

Penguatan kelembagaan lokal juga perlu mencakup kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat, seperti **BUM Desa, koperasi, kelompok usaha masyarakat, kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelembagaan adat, serta organisasi masyarakat lainnya**. Kelembagaan tersebut memiliki peran strategis sebagai wadah partisipasi masyarakat sekaligus instrumen untuk mengembangkan potensi lokal. Penguatan kelembagaan perlu diarahkan tidak hanya pada keberadaan organisasi secara administratif, tetapi pada peningkatan kapasitas, efektivitas, produktivitas, jejaring kerja, serta kemampuan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Sejalan dengan agenda RKP Tahun 2027, penguatan kelembagaan ekonomi desa perlu diarahkan untuk mendukung **peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah**. BUM Desa, koperasi, UMKM, dan kelompok usaha masyarakat perlu didorong agar mampu mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, meningkatkan skala produksi, memperbaiki kualitas produk, mengakses pembiayaan, memanfaatkan teknologi, serta memperluas jaringan pemasaran. Dengan demikian, kelembagaan lokal dapat menjadi penghubung antara potensi desa dengan pasar dan investasi yang lebih luas.

Penguatan desa juga perlu diarahkan untuk membangun **rantai nilai ekonomi lokal yang terintegrasi**. Desa sebagai sentra produksi perlu memiliki kelembagaan yang mampu mengorganisasi produksi, pengolahan, pengemasan, pemasaran, hingga distribusi produk. Pendekatan ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap penjualan komoditas primer dan meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh masyarakat desa. Pengembangan kelembagaan ekonomi yang kuat juga akan meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam rantai ekonomi daerah.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah, desa juga perlu dipersiapkan menjadi bagian dari ekosistem **investasi dan pengembangan industri berbasis potensi lokal**. Pemerintah desa dan kelembagaan ekonomi masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi usaha, membangun kemitraan, memenuhi standar produk, serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Dengan demikian, investasi yang masuk ke wilayah

perdesaan diharapkan tidak hanya memanfaatkan sumber daya lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterlibatan pelaku usaha lokal, dan memperkuat rantai pasok ekonomi masyarakat.

Penguatan kelembagaan lokal juga memiliki dimensi penting dalam **peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa**. Pemerintahan desa harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pelayanan desa perlu dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan pemerintahan. Penguatan tata kelola tersebut harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas aparatur desa dan penguatan mekanisme pengawasan serta partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan desa yang mandiri. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, mengidentifikasi potensi, menentukan prioritas, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Dengan pendekatan partisipatif, pembangunan desa diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi.

Penguatan desa juga perlu diarahkan untuk memperkuat **modal sosial dan kohesi masyarakat**. Nilai gotong royong, solidaritas, kepedulian, kearifan lokal, serta jejaring sosial merupakan aset penting yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan. Kelembagaan lokal perlu menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antarwarga, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan potensi dan menyelesaikan persoalan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan manusia, kelembagaan lokal memiliki peran penting dalam memastikan program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, dan peningkatan keterampilan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Desa yang memiliki kelembagaan kuat akan lebih mampu mengidentifikasi kelompok rentan, mengorganisasi masyarakat, dan menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan berbagai program pemerintah maupun sumber daya lainnya.

Penguatan desa juga harus didukung oleh **infrastruktur yang memadai dan terkoneksi dengan pusat pertumbuhan ekonomi**. Kelembagaan desa yang kuat tidak akan optimal apabila masyarakat menghadapi keterbatasan akses terhadap transportasi, jaringan komunikasi, energi, air, pasar, dan fasilitas ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan desa harus berjalan secara simultan dengan pembangunan infrastruktur sehingga kapasitas masyarakat dapat diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi dan pelayanan yang

produktif.

Selanjutnya, penguatan desa perlu memperhatikan prinsip **kemandirian dan keberlanjutan**. Kemandirian tidak berarti desa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah, tetapi menunjukkan meningkatnya kemampuan desa dalam mengelola sumber daya, membangun kemitraan, mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan sumber pendapatan dan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah daerah tetap memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan, fasilitasi, pendampingan, penguatan kapasitas, dan memastikan keterhubungan antarprogram pembangunan.

Dengan demikian, **penguatan desa dan kelembagaan lokal Kabupaten Soppeng Tahun 2027 diarahkan pada transformasi desa dari objek pembangunan menjadi subjek dan penggerak pembangunan daerah**. Transformasi tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan potensi dan ekonomi lokal, penguatan pelayanan publik, pemanfaatan teknologi, serta perluasan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, keberhasilan isu strategis ini tidak hanya diukur dari meningkatnya kapasitas aparatur desa atau bertambahnya jumlah kelembagaan lokal, tetapi dari sejauh mana **desa mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, mengelola potensi lokal secara produktif, menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas pembangunan manusia, serta mengurangi ketergantungan terhadap intervensi dari luar**.

Oleh karena itu, penguatan desa dan kelembagaan lokal menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027. Desa yang memiliki pemerintahan dan kelembagaan yang kuat akan menjadi fondasi bagi percepatan pembangunan ekonomi, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan pemerataan pembangunan. Pada akhirnya, penguatan tersebut diarahkan untuk mewujudkan **desa yang semakin produktif, berdaya, inklusif, adaptif, dan mandiri sebagai bagian integral dari terwujudnya Kabupaten Soppeng yang sejahtera dan berkelanjutan.**

✓ Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik Berkualitas

Isu strategis daerah terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program

pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya akuntabilitas kinerja, efektivitas perencanaan dan penganggaran, serta konsistensi antara dokumen perencanaan dengan implementasi program. Penerapan reformasi birokrasi masih perlu diperkuat, khususnya dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur sipil negara, penataan kelembagaan, serta penyederhanaan proses bisnis pemerintahan.

Di sisi lain, penyelenggaraan pelayanan publik juga masih menghadapi kendala dalam hal kualitas, aksesibilitas, dan kecepatan layanan. Standar pelayanan publik belum sepenuhnya seragam dan berbasis kebutuhan masyarakat, sementara inovasi pelayanan masih terbatas. Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga belum mampu mendukung pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien.

Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Selain itu, pengelolaan pengaduan masyarakat serta tindak lanjutnya belum sepenuhnya optimal, sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam konteks tersebut, tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas menjadi isu strategis yang memerlukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah yang perlu dilakukan meliputi penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur, optimalisasi penerapan SPBE, pengembangan inovasi pelayanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas merupakan salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 yang menjadi **fondasi utama bagi keberhasilan seluruh agenda pembangunan daerah**. Percepatan pembangunan ekonomi, penguatan infrastruktur, pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, serta penguatan kemandirian desa membutuhkan pemerintahan yang efektif, responsif, transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan tidak hanya dipandang sebagai agenda reformasi birokrasi, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memastikan seluruh sumber daya

pembangunan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Isu ini memiliki keterkaitan erat dengan tema **RKP Tahun 2027 "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri."** Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas membutuhkan kepastian, efisiensi, dan kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola yang baik akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi, mempercepat proses pelayanan dan perizinan, meningkatkan kepastian berusaha, mengurangi biaya transaksi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemerintah. Dengan demikian, kualitas tata kelola pemerintahan menjadi salah satu faktor pendukung produktivitas, investasi, dan pengembangan industri di daerah.

Pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, tema **RKPD Tahun 2027 "Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan"** menempatkan pelayanan publik sebagai salah satu komponen utama dalam mempercepat pembangunan. Pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat, terjangkau, inklusif, dan berkualitas merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus didukung oleh tata kelola kelembagaan, kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang memadai.

Dalam konteks Kabupaten Soppeng, arah tersebut diterjemahkan melalui tema **RKPD Tahun 2027 "Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa."** Tema ini menuntut adanya pemerintahan daerah yang mampu mengorkestrasi berbagai sumber daya pembangunan secara efektif dan memastikan keterpaduan antara pembangunan ekonomi, infrastruktur, pembangunan manusia, dan penguatan desa. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prasyarat agar percepatan pembangunan tersebut tidak hanya menghasilkan peningkatan output pembangunan, tetapi juga menghasilkan **outcome dan manfaat yang nyata bagi masyarakat**.

Tantangan utama tata kelola pemerintahan Kabupaten Soppeng ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar semakin **berorientasi pada hasil, berbasis data, terintegrasi, adaptif terhadap perubahan, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat**. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan memiliki keterkaitan yang jelas antara permasalahan, intervensi, anggaran, keluaran, dan hasil yang ingin dicapai.

Penguatan tata kelola juga perlu diarahkan pada peningkatan **efektivitas dan efisiensi belanja daerah**. Keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penganggaran perlu semakin berorientasi pada prioritas pembangunan, pencapaian target kinerja, pengendalian belanja yang tidak produktif, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Pendekatan tersebut menjadi semakin penting dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan manusia.

Kualitas sumber daya aparatur menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan tata kelola pemerintahan. Aparatur pemerintah daerah perlu memiliki kompetensi teknis, manajerial, sosial, dan digital yang memadai, disertai integritas dan orientasi pelayanan. Peningkatan kapasitas aparatur perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kompetensi administratif, tetapi juga pada kemampuan melakukan inovasi, menyelesaikan masalah, menggunakan data dalam pengambilan keputusan, mengelola risiko, dan menghasilkan pelayanan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, **transformasi digital pemerintahan** perlu menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi proses pemerintahan, mempercepat pelayanan, memperluas akses masyarakat, meningkatkan transparansi, serta memperkuat integrasi data dan informasi pembangunan. Digitalisasi juga perlu diarahkan untuk mengurangi proses yang berbelit-belit dan meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan pemerintah.

Namun demikian, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penyediaan aplikasi, tetapi harus memastikan **integrasi sistem, kualitas data, keamanan informasi, interoperabilitas, dan kemampuan aparatur serta masyarakat dalam memanfaatkannya**. Dengan demikian, digitalisasi pemerintahan harus benar-benar menghasilkan penyederhanaan proses, peningkatan kualitas layanan, dan peningkatan kepuasan masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik perlu diarahkan pada prinsip **mudah, cepat, tepat, transparan, terjangkau, inklusif, dan responsif**. Pelayanan publik harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengaduan, evaluasi kepuasan masyarakat, standar pelayanan, keterbukaan informasi, serta inovasi pelayanan agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan dan dipertanggungjawabkan.

Kualitas pelayanan publik juga harus dipastikan merata hingga ke wilayah perdesaan. Dalam kerangka tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027, penguatan pelayanan publik di desa menjadi bagian penting dalam mewujudkan **kemandirian desa**. Pemerintah desa perlu memiliki kapasitas kelembagaan dan aparatur yang memadai untuk memberikan pelayanan administratif dan sosial secara efektif. Integrasi pelayanan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih dekat, mudah, dan berkualitas tanpa hambatan geografis maupun administratif.

Selain pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik harus ditopang oleh **penguatan transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan pengendalian risiko**. Pengelolaan pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan dengan prinsip integritas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, pemborosan anggaran, manipulasi informasi, serta berbagai bentuk fraud. Penguatan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, pengawasan internal, dan tindak lanjut hasil pengawasan menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penguatan tata kelola juga perlu mendorong **kolaborasi dan partisipasi masyarakat**. Pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan secara sendiri. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pelayanan publik. Kolaborasi tersebut akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan.

Dalam mendukung agenda RKP Tahun 2027, tata kelola pemerintahan juga perlu berperan dalam menciptakan **iklim investasi yang kondusif**. Kepastian prosedur, kejelasan informasi, kecepatan pelayanan, kepastian perizinan, ketersediaan data potensi daerah, serta kemudahan akses terhadap layanan pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya tarik investasi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses pelayanan investasi dilakukan secara transparan, terintegrasi, efisien, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Tata kelola yang baik juga diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara **tepat kebutuhan, tepat mutu, tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat manfaat**. Perencanaan berbasis kebutuhan dan data, pengadaan yang transparan, pengawasan kualitas, serta pemeliharaan infrastruktur perlu diperkuat agar investasi pembangunan infrastruktur memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan tidak menimbulkan pemborosan sumber daya.

Dalam pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan berperan dalam memastikan program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat tepat sasaran. Integrasi data dan koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan masyarakat miskin, kelompok rentan, serta wilayah dengan keterbatasan akses memperoleh intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial.

Dalam kerangka **kemandirian desa**, penguatan tata kelola juga harus mencakup peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Desa membutuhkan sistem perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, pengelolaan aset, serta pengembangan

kelembagaan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah perlu memperkuat pembinaan dan pendampingan agar desa mampu mengelola kewenangan dan sumber daya yang dimilikinya secara efektif serta mengembangkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, **tata kelola pemerintahan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 diarahkan dari sekadar kepatuhan administratif menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat**. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya keterhubungan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, dengan menggunakan data dan indikator kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pada akhirnya, keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya diukur dari terpenuhinya dokumen administrasi atau meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi dari sejauh mana pemerintah mampu **menghasilkan kebijakan yang tepat, menggunakan anggaran secara efektif dan efisien, memberikan pelayanan yang berkualitas, mempercepat proses pembangunan, menciptakan kepastian bagi dunia usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menghasilkan perubahan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat**.

Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas merupakan **enabler utama** bagi terwujudnya tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027. Pemerintahan yang efektif dan berintegritas akan mempercepat pembangunan ekonomi, memastikan pembangunan infrastruktur lebih tepat manfaat, meningkatkan efektivitas pembangunan manusia, memperkuat pelayanan di tingkat desa, serta menciptakan kondisi yang mendukung kemandirian desa. Dengan demikian, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi fondasi untuk memastikan seluruh agenda pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 berjalan secara **efektif, efisien, transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.**

✓ Penguatan Ketahanan Pangan Daerah

Isu strategis daerah terkait penguatan ketahanan pangan daerah merupakan salah satu prioritas penting dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kecukupan produksi, tetapi juga mencakup aspek distribusi, akses, serta kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain fluktuasi produksi pertanian akibat perubahan iklim, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan irigasi, alat dan mesin pertanian, serta infrastruktur pascapanen. Selain itu, masih adanya ketergantungan pada komoditas tertentu dan belum optimalnya

diversifikasi pangan menyebabkan sistem pangan daerah menjadi rentan terhadap gangguan eksternal.

Di sisi lain, sistem distribusi dan rantai pasok pangan yang belum efisien mengakibatkan terjadinya disparitas harga antar wilayah serta mempengaruhi keterjangkauan pangan, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Penguatan cadangan pangan daerah juga masih perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan akibat bencana alam maupun gejolak pasar.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengembangan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian, sehingga produk pangan lokal masih didominasi oleh bentuk bahan mentah. Hal ini berdampak pada rendahnya pendapatan petani serta terbatasnya kontribusi sektor pangan terhadap perekonomian daerah. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman juga masih perlu ditingkatkan.

Kelembagaan petani dan pelaku usaha pangan juga masih menghadapi keterbatasan kapasitas, baik dalam hal manajemen usaha, akses pembiayaan, maupun pemanfaatan teknologi dan informasi. Sinergi lintas sektor dalam pengelolaan ketahanan pangan juga belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dalam konteks tersebut, penguatan ketahanan pangan daerah menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatan komprehensif melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan, pengembangan hilirisasi dan diversifikasi pangan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pangan. Selain itu, diperlukan dukungan kebijakan yang mendorong kemandirian pangan berbasis potensi lokal serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang sehat.

Dengan demikian, penguatan ketahanan pangan daerah diarahkan untuk mewujudkan sistem pangan yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu menjamin kesejahteraan masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi daerah.

Penguatan ketahanan pangan daerah merupakan salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 yang memiliki dimensi strategis terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi desa, serta stabilitas sosial masyarakat. Ketahanan pangan tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan daerah dalam meningkatkan produksi pangan, tetapi mencakup kemampuan memastikan **ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, kualitas, distribusi, dan keberlanjutan pangan** bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan.

Isu ini memiliki keterkaitan langsung dengan tema **RKP Tahun 2027 "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri."** Penguatan ketahanan pangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pangan, memperkuat investasi di sektor agroindustri, serta mendorong hilirisasi dan industrialisasi

berbasis komoditas pangan. Dengan pendekatan tersebut, sektor pangan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi **penggerak ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan rantai nilai pangan dari hulu hingga hilir**.

Pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, tema **RKPD Tahun 2027 "Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan"** menegaskan bahwa ketahanan pangan perlu didukung oleh kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur pertanian, irigasi, jalan produksi, pasar, gudang, fasilitas pascapanen, rantai dingin, serta konektivitas antarwilayah merupakan faktor penting dalam menjaga kelancaran produksi dan distribusi pangan. Pada saat yang sama, peningkatan kapasitas petani, pelaku usaha pangan, dan masyarakat menjadi prasyarat bagi peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pangan.

Dalam konteks Kabupaten Soppeng, arah tersebut diterjemahkan melalui tema **RKPD Tahun 2027 "Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa."** Tema ini menempatkan ketahanan pangan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal sekaligus sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian desa. Kabupaten Soppeng memiliki basis ekonomi yang kuat pada sektor pertanian dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai salah satu wilayah penyangga pangan. Oleh karena itu, kekuatan tersebut perlu ditransformasikan dari sekadar keunggulan produksi menjadi **sistem pangan daerah yang produktif, tangguh, bernilai tambah, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat**.

Tantangan ketahanan pangan Kabupaten Soppeng ke depan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana memastikan produktivitas pertanian tetap terjaga di tengah perubahan iklim, perubahan pola konsumsi, fluktuasi harga, keterbatasan sumber daya, perubahan penggunaan lahan, serta berbagai risiko yang dapat mengganggu produksi dan distribusi pangan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dari **produksi, pascapanen, pengolahan, distribusi, pemasaran, konsumsi, hingga pengendalian kerawanan pangan**.

Peningkatan produktivitas menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat ketahanan pangan. Produktivitas pertanian perlu ditingkatkan melalui penerapan teknologi, inovasi, penggunaan sarana produksi yang tepat, peningkatan kualitas benih dan input pertanian, penguatan penyuluhan, mekanisasi, serta peningkatan kapasitas petani. Peningkatan produktivitas harus dilakukan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan

keberlanjutan lingkungan agar kemampuan produksi pangan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Selain meningkatkan produksi, **diversifikasi pangan** menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan pangan yang lebih kuat. Ketergantungan terhadap komoditas pangan tertentu dapat meningkatkan kerentanan terhadap gangguan produksi, perubahan harga, maupun perubahan iklim. Oleh karena itu, pengembangan sumber pangan lokal perlu diperkuat melalui diversifikasi produksi dan konsumsi berbasis potensi daerah, termasuk pengembangan pangan lokal dan komoditas alternatif yang memiliki nilai gizi dan nilai ekonomi.

Penguatan ketahanan pangan juga perlu diarahkan pada **peningkatan nilai tambah dan hilirisasi produk pangan**. Komoditas pertanian yang dihasilkan masyarakat tidak seharusnya berhenti pada produk primer, tetapi perlu dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, umur simpan lebih panjang, kualitas yang lebih baik, dan pasar yang lebih luas. Pengembangan industri pengolahan pangan berbasis bahan baku lokal menjadi salah satu bentuk implementasi agenda RKP Tahun 2027 dalam mendorong produktivitas, investasi, dan industri.

Hilirisasi pangan juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Pengembangan agroindustri dan industri pangan lokal dapat menciptakan keterkaitan antara petani sebagai produsen bahan baku dengan pelaku UMKM, koperasi, BUM Desa, dunia usaha, dan pasar. Semakin kuat keterkaitan tersebut, semakin besar pula peluang terciptanya nilai tambah dan lapangan kerja di daerah. Dengan demikian, ketahanan pangan dapat sekaligus menjadi instrumen **penguatan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat**.

Aspek investasi juga perlu diperkuat dalam pembangunan sistem pangan daerah. Investasi diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pada pengembangan sarana pascapanen, pengolahan, penyimpanan, distribusi, logistik, pengemasan, dan pemasaran. Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi pangan dengan menyediakan informasi potensi komoditas, dukungan infrastruktur, kemudahan pelayanan, serta kepastian berusaha. Investasi yang masuk diharapkan mampu menciptakan keterkaitan dengan petani dan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonominya tetap dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Soppeng.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan membutuhkan dukungan **infrastruktur produksi dan distribusi pangan yang berkualitas dan merata**. Infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, jalan produksi, jaringan transportasi, sarana penyimpanan, pasar, fasilitas pengolahan, serta jaringan telekomunikasi memiliki peran penting dalam menjaga efisiensi sistem pangan. Infrastruktur yang memadai dapat mengurangi kehilangan hasil, menekan biaya distribusi, mempercepat akses

produk ke pasar, serta meningkatkan daya saing komoditas pangan daerah.

Ketahanan pangan juga memiliki hubungan erat dengan **pembangunan manusia**. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau merupakan salah satu fondasi peningkatan kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas konsumsi pangan, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan stunting, peningkatan kesadaran pola konsumsi sehat, serta perlindungan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan.

Dalam kerangka pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, masyarakat miskin dan rentan perlu memperoleh akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Di sisi lain, masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada sektor pertanian dan pangan perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya. Oleh karena itu, kebijakan pangan perlu diarahkan tidak hanya sebagai kebijakan **perlindungan konsumsi**, tetapi juga sebagai kebijakan **pemberdayaan produsen dan peningkatan pendapatan masyarakat**.

Desa memiliki posisi strategis dalam penguatan ketahanan pangan Kabupaten Soppeng. Sebagian besar aktivitas produksi pangan berlangsung di wilayah perdesaan, sehingga **kemandirian desa dan ketahanan pangan memiliki hubungan yang sangat erat**. Desa perlu diperkuat agar mampu mengelola potensi pangan lokal melalui pengembangan kelembagaan ekonomi desa, BUM Desa, koperasi, kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok usaha masyarakat, serta kelembagaan lokal lainnya.

Penguatan pangan berbasis desa juga perlu diarahkan pada pengembangan **ekosistem pangan lokal**, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, pemasaran hingga konsumsi. Desa dapat dikembangkan sebagai sentra produksi dan pengolahan komoditas unggulan sesuai karakteristik wilayahnya. Dengan demikian, penguatan ketahanan pangan sekaligus menjadi strategi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi desa, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Selanjutnya, ketahanan pangan perlu dibangun dengan mempertimbangkan **ketahanan terhadap perubahan iklim dan risiko bencana**. Perubahan pola curah hujan, kekeringan, banjir, serangan organisme pengganggu tanaman, serta berbagai risiko lainnya dapat memengaruhi produktivitas dan stabilitas produksi pangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan adaptasi sektor pertanian melalui teknologi, pengelolaan air, diversifikasi komoditas, penggunaan varietas yang sesuai, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, serta pengembangan sistem informasi dan peringatan dini.

Penguatan ketahanan pangan juga membutuhkan **tata kelola pangan yang terintegrasi dan berbasis data**. Pemerintah daerah perlu memiliki informasi yang akurat mengenai produksi, kebutuhan, distribusi, harga, stok, konsumsi, serta wilayah dan kelompok masyarakat yang berpotensi mengalami kerawanan pangan. Data tersebut diperlukan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat, mencegah gejolak pasokan dan harga, serta memastikan intervensi pangan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Dengan demikian, **penguatan ketahanan pangan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 diarahkan dari pendekatan yang berfokus pada peningkatan produksi menuju pembangunan sistem pangan daerah yang tangguh, produktif, terintegrasi, bernilai tambah, dan berkelanjutan**. Pendekatan tersebut dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi pangan, penguatan infrastruktur pangan, hilirisasi dan agroindustri, pengembangan investasi, penguatan kelembagaan petani dan ekonomi desa, peningkatan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan berbagai risiko pangan.

Pada akhirnya, keberhasilan penguatan ketahanan pangan tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi pangan, tetapi dari sejauh mana **pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, aman dan bergizi, dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan harga yang terjangkau, memiliki sistem distribusi yang efisien, serta mampu memberikan nilai tambah dan pendapatan bagi produsen lokal**.

Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan menjadi bagian integral dari tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027. Ketahanan pangan yang kuat akan mendukung pembangunan manusia yang sehat dan produktif, memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal, menciptakan peluang investasi dan pengembangan industri pangan, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan, serta memperkuat kemandirian desa. Dengan demikian, sektor pangan tidak hanya menjadi **penyangga kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Kabupaten Soppeng secara berkelanjutan.**

✓ Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana merupakan salah satu fokus penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tangguh terhadap risiko. Isu ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan terhadap daya dukung lingkungan serta tingginya potensi risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, keberlanjutan pembangunan, dan stabilitas ekonomi daerah.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain degradasi lahan, alih fungsi kawasan, pencemaran air dan tanah, serta pengelolaan persampahan yang belum optimal. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor.

Di sisi lain, wilayah daerah juga memiliki tingkat kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan angin kencang. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana masih perlu diperkuat, baik dari aspek perencanaan tata ruang yang berbasis risiko bencana, ketersediaan infrastruktur pengendali, maupun kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

Permasalahan ini juga diperkuat oleh belum optimalnya integrasi aspek lingkungan hidup dan kebencanaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi lintas sektor serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana masih perlu ditingkatkan. Selain itu, keterbatasan data, sistem informasi, dan teknologi peringatan dini turut mempengaruhi efektivitas penanganan bencana.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatan terpadu dan berkelanjutan. Upaya yang perlu dilakukan meliputi penguatan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berbasis daya dukung dan daya tampung, pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan pengelolaan sampah dan limbah, serta rehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan.

Selain itu, penguatan ketahanan bencana diarahkan melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan, pengembangan sistem peringatan dini, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mewujudkan daerah yang tangguh bencana dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, mengurangi risiko bencana, serta memastikan pembangunan daerah yang aman, tangguh, dan berkelanjutan bagi generasi saat ini dan yang akan datang.

Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana merupakan salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 yang memiliki posisi penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi, perlindungan masyarakat, ketahanan infrastruktur, serta kualitas hidup generasi saat ini dan mendatang. Percepatan pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan

kemampuan daerah dalam menjaga daya dukung lingkungan dan meningkatkan ketahanan terhadap berbagai risiko bencana. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana perlu ditempatkan sebagai **fondasi pembangunan yang berkelanjutan, aman, dan berketahanan**.

Isu ini memiliki keterkaitan dengan tema **RKP Tahun 2027 "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri."** Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produktivitas, investasi, dan pengembangan industri, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mengendalikan risiko lingkungan yang dapat menghambat aktivitas ekonomi. Kerusakan lingkungan, degradasi sumber daya alam, pencemaran, serta kejadian bencana dapat menimbulkan kerugian ekonomi, mengganggu rantai produksi dan distribusi, merusak infrastruktur, serta meningkatkan beban fiskal pemerintah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi perlu diarahkan agar semakin **efisien dalam pemanfaatan sumber daya, rendah risiko, dan berwawasan keberlanjutan**.

Pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, tema **RKPD Tahun 2027 "Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan"** menegaskan pentingnya membangun infrastruktur dan pelayanan publik yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menghadapi berbagai risiko lingkungan dan bencana. Infrastruktur yang dibangun harus memperhatikan daya dukung lingkungan, tata ruang, risiko bencana, serta aspek ketahanan agar mampu memberikan manfaat jangka panjang dan tetap berfungsi ketika menghadapi tekanan atau gangguan.

Dalam konteks Kabupaten Soppeng, arah tersebut diterjemahkan melalui tema **RKPD Tahun 2027 "Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa."** Tema ini mengandung konsekuensi bahwa percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berketahanan. Kemandirian desa juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Desa dengan lingkungan yang terjaga, sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan, serta masyarakat yang tangguh terhadap bencana akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Kabupaten Soppeng memiliki sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi modal penting bagi pembangunan, khususnya bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, permukiman, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan **daya dukung dan daya tampung lingkungan**.

Peningkatan aktivitas ekonomi, perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan permukiman, serta pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan aspek lingkungan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan kualitas lingkungan.

Tantangan pengelolaan lingkungan hidup ke depan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan keberlanjutan sumber daya alam. Pengelolaan lingkungan perlu diarahkan pada pencegahan dan pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan limbah, perlindungan sumber daya air, pengelolaan lahan secara berkelanjutan, perlindungan ekosistem, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pengelolaan sampah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat berpotensi meningkatkan volume sampah, sehingga diperlukan penguatan sistem pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pendekatan pengelolaan sampah perlu diarahkan dari pola **kumpul–angkut–buang menuju pengurangan dan pengelolaan berbasis ekonomi sirkular**, termasuk peningkatan pemanfaatan kembali dan pengolahan sampah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

Pengelolaan lingkungan juga perlu memperhatikan perlindungan sumber daya air dan kualitas ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Ketersediaan dan kualitas air memiliki hubungan langsung dengan pertanian, kesehatan, kebutuhan rumah tangga, industri, serta keberlangsungan ekosistem. Oleh karena itu, perlindungan daerah tangkapan air, pengendalian pencemaran, pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah.

Dalam mendukung agenda pertumbuhan ekonomi dan investasi, prinsip **pembangunan rendah risiko dan berwawasan lingkungan** perlu diterapkan secara konsisten. Pengembangan kawasan ekonomi, industri, permukiman, dan infrastruktur harus mempertimbangkan aspek lingkungan serta risiko bencana sejak tahap perencanaan. Dengan pendekatan tersebut, investasi dan pembangunan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga dapat berkelanjutan dan tidak menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang lebih besar di kemudian hari.

Di sisi lain, Kabupaten Soppeng perlu memperkuat **ketahanan terhadap bencana** sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Risiko bencana dapat menghambat pencapaian target pembangunan melalui kerusakan infrastruktur, kehilangan aset masyarakat, terganggunya aktivitas ekonomi, menurunnya pendapatan, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk tanggap darurat dan pemulihan. Oleh karena itu,

pembangunan Tahun 2027 perlu memperkuat pendekatan pengurangan risiko bencana sejak tahap perencanaan, bukan hanya mengandalkan penanganan setelah bencana terjadi.

Ketahanan bencana perlu dibangun melalui empat aspek utama, yaitu **pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi**. Upaya mitigasi perlu dilakukan melalui pemetaan risiko, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan sistem peringatan dini, penataan ruang berbasis risiko, serta pembangunan infrastruktur yang memenuhi prinsip ketahanan bencana. Kesiapsiagaan perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan, dan masyarakat agar mampu merespons bencana secara cepat dan terkoordinasi.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, prinsip **build back better dan infrastructure resilience** perlu menjadi perhatian. Infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, air minum, jaringan listrik, dan fasilitas publik lainnya perlu dirancang dengan mempertimbangkan potensi risiko bencana. Hal ini penting agar infrastruktur tidak menjadi faktor yang meningkatkan risiko sekaligus memastikan pelayanan publik tetap dapat berlangsung ketika terjadi bencana.

Ketahanan bencana juga memiliki keterkaitan langsung dengan **pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan**. Masyarakat miskin dan rentan sering kali memiliki kemampuan yang lebih terbatas untuk menghadapi dan memulihkan diri dari dampak bencana. Bencana dapat menyebabkan kehilangan tempat tinggal, aset produktif, pekerjaan, serta sumber pendapatan yang pada akhirnya mendorong masyarakat kembali ke kondisi miskin. Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana perlu menjadi bagian dari strategi perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, terutama bagi kelompok rentan.

Dalam kerangka tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027, **desa memiliki posisi strategis dalam pengelolaan lingkungan dan ketahanan bencana**. Sebagian besar sumber daya alam dan aktivitas masyarakat berada di wilayah perdesaan, sementara masyarakat desa juga menjadi pihak yang paling dekat dengan kondisi lingkungan dan risiko bencana di wilayahnya. Penguatan kapasitas desa diperlukan agar pemerintah desa dan masyarakat mampu mengidentifikasi risiko, menjaga lingkungan, melakukan mitigasi, menyusun kesiapsiagaan, serta mengembangkan mekanisme respons terhadap bencana.

Pengelolaan lingkungan berbasis desa juga dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi lokal. Pelestarian lingkungan dapat dikembangkan melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, pengembangan pariwisata berbasis lingkungan, pengelolaan sampah bernilai ekonomi, pertanian berkelanjutan, serta berbagai aktivitas ekonomi hijau. Dengan demikian, perlindungan lingkungan tidak

hanya dipandang sebagai beban pembangunan, tetapi juga dapat menjadi **sumber peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa**.

Selanjutnya, ketahanan lingkungan dan bencana membutuhkan **partisipasi aktif masyarakat**. Pemerintah daerah tidak dapat membangun ketahanan hanya melalui program pemerintah. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, kesiapsiagaan keluarga, kepedulian terhadap risiko bencana, serta keterlibatan komunitas dan kelembagaan lokal menjadi faktor penting dalam membangun masyarakat yang tangguh. Penguatan edukasi, literasi lingkungan dan kebencanaan, simulasi, serta pembentukan jejaring relawan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Penguatan tata kelola juga menjadi bagian penting dalam isu ini. Pengelolaan lingkungan dan bencana membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah karena risiko lingkungan dan bencana tidak mengenal batas administratif. Integrasi data lingkungan, peta risiko, informasi cuaca dan kebencanaan, tata ruang, serta data sosial ekonomi diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko. Perencanaan pembangunan juga perlu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan mempertimbangkan potensi dampak lingkungan serta risiko bencana.

Dengan demikian, **pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Kabupaten Soppeng Tahun 2027 diarahkan untuk membangun daerah yang mampu tumbuh secara ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan serta memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, menghadapi, dan pulih dari berbagai risiko bencana**. Pendekatan tersebut dilakukan melalui penguatan kualitas lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengurangan pencemaran dan sampah, perlindungan sumber daya air, pembangunan infrastruktur yang tangguh, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penguatan sistem peringatan dini, serta penguatan kapasitas pemerintah dan desa.

Pada akhirnya, keberhasilan isu strategis ini tidak hanya diukur dari menurunnya tingkat pencemaran atau meningkatnya jumlah kegiatan mitigasi bencana, tetapi dari sejauh mana **lingkungan tetap mampu menopang kehidupan dan aktivitas ekonomi, infrastruktur semakin tahan terhadap risiko, masyarakat semakin siap menghadapi bencana, kerugian akibat bencana dapat ditekan, dan proses pemulihan dapat berlangsung secara cepat dan berkelanjutan**.

Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027. Lingkungan yang terjaga dan masyarakat yang tangguh akan menciptakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur yang aman dan berkualitas, pembangunan manusia yang sehat, serta desa yang mampu berkembang secara mandiri. Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Soppeng diarahkan

tidak hanya untuk **tumbuh lebih cepat, tetapi juga tumbuh dengan aman, tangguh, dan berkelanjutan.**

2.8. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2025 diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. DPRD menekankan pentingnya sinkronisasi antara aspirasi masyarakat hasil reses, musyawarah perencanaan pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah agar program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Fokus pembangunan diharapkan mampu memperkuat sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi kerakyatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Selain itu, DPRD memandang perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2025. Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah menjadi perhatian penting untuk mendukung tercapainya target pembangunan daerah. DPRD juga menekankan agar setiap program dan kegiatan disusun berdasarkan prinsip efisiensi anggaran, tepat sasaran, serta memiliki indikator kinerja yang terukur agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dimana pada pasal 178 (ayat 5-7) menyebutkan bahwa : a) Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan; b) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD; dan c) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya. Disamping itu, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah ditentukan oleh OPD dan terekapitulasi serta diinput melalui SIPD oleh Bappeda untuk membatasi jenis usulan agar tetap rasional dan sesuai kemampuan anggaran yang memuat komponen : volume, satuan, dan OPD pengampuh yang dituju, adapun alur/tahapan pokok-pokok pikiran dalam SIPD dapat dilihat pada bagan berikut :

Rekapitulasi Hasil Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Status				Catatan			Rekomendasi Sekwan		Total usulan
		Disetujui	Ditolak	Dikembalikan	Verifikasi PD	Disetujui Sesuai dengan Prioritas Daerah	Tidak Sesuai dengan Prioritas Daerah (Tidak Ada Catatan)	Perubahan Kegiatan	Dilanjutkan	Tidak Dilanjutkan	
1	DINAS KESEHATAN	2	0	0	2	2	0	0	2	5	7
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6
4	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	0	0	2	2	0	0	2	2	4
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	59	0	0	59	59	0	0	59	79	138
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	0	0	5	5	0	0	5	17	22
8	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	2	0	0	2	2	0	0	2	7	9
9	DINAS PERHUBUNGAN	26	0	0	26	26	0	0	26	1	27
10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25	0	0	25	25	0	0	25	0	25
11	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	2	0	0	2	2	0	0	2	2	4
12	DINAS SOSIAL	4	0	0	4	4	0	0	4	3	7
13	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	25	0	0	25	25	0	0	25	46	71
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
16	KECAMATAN LALABATA	2	0	0	2	2	0	0	2	4	6
17	KECAMATAN LILIRILAU	3	0	0	3	3	0	0	3	1	4
18	KECAMATAN MARIORIAWA	1	0	0	1	1	0	0	1	1	2
19	KECAMATAN LILIRIAJA	0	0		0		0	0	0	4	4
20	KECAMATAN MARIORIWAWO	1	0	0	1	1	0	0	1	1	2

Sumber : SIPD, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

2.9. Inovasi Daerah

Inovasi daerah menjadi salah satu tolak ukur yang dilakukan untuk melihat tata kelola pemerintahan yang baik dengan pelayanan yang inovatif. Dengan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Dalam mempercepat dan mendukung tujuan pembangunan daerah, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan oleh SKPD di Kabupaten Soppeng. Terdapat beberapa inovasi daerah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 yang diterapkan pada berbagai sektor pelayanan publik antara lain sebagai berikut ini.

1. Sektor Pendidikan

   Inovasi yang mendukung peningkatan akses, mutu, dan tata kelola Pendidikan yaitu :

   a. *Smart Class Device*, sebagai salah satu inovasi yang menjadi Solusi dari permasalahan-permasalahan pendidikan yang tenaga pendidik hadapi di zaman digitalisasi sekarang. Inovasi ini sebagai salah satu alternatif pendidik dalam menuntun muridnya sesuai dengan kodrat zamannya, dimana tenaga pendidik harus memiliki berbagai alternatif media pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran murid di kelas, sehingga profil pelajar pancasila dapat terwujud.

   b. *Kelas OGI (Kelas Berorientasi Bugis)* merupakan salah satu wadah pembelajaran bahasa daerah Bugis yang dapat meningkatkan pemahaman anak tentang bahasa daerah bugis dengan aplikasi yang lebih menarik.

   c. *Intan Liat (Inovasi Pembuatan Limbah Organik)*, pengurangan jumlah sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah organik, termasuk daun-daunan yang mendominasi volume sampah di sekolah. Dengan mengolah sampah organic menjadi kompos, jumlah sampah yang dibuang dapat dikurangi secara signifikan.

   d. *D'lima Membumi (Mengenal Tumbuhan Melalui Display QR)* merupakan salah satu inovasi yang efektiv dalam pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran.

   e. PAI Soppeng (Pena Anak Indonesia Soppeng) sebagai salah satu inovasi yang menjadi wadah penyaluran bakat dan kreatifitas anak.

   f. *Baruga Soppeng (Beranda Layanan Terpadu dan Terintegrasi Pendidikan Soppeng)*, inovasi ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian target nasional pendidikan berkualitas di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Soppeng.

   g. *Pelangi Anak Pintar*, inovasi ini memperkenalkan pendekatan membaca yang tidak hanya terpaku pada teks melainkan memadukannya dengan lagu anak, film edukatif, kegiatan mewarnai maupun games. Metode ini dirancang untuk membentuk pengalaman belajar yang membuat anak lebih tertarik dan aktif dalam proses literasi sejak dini.

2. Sektor Kesehatan

   Inovasi pelayanan kesehatan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan yaitu :

a. *Rumah Siput 14 (Pertemuan Rutin Pengelolaan Inovasi Puskesmas Terintegrasi Tiap tanggal 14 Pukul 14)* merupakan salah satu inovasi dalam bidang Kesehatan untuk menciptakan perubahan positif peda pelayanan publik khususnya kesehatan.

b. *Ngospek (Ngobrol Seputar Edukasi Kesehatan)*, salah satu inovasi yang dilakukan melalui penyampaian informasi Kesehatan yang ringan, menarik, dan mudah dipahami dalam bentuk video pendek sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan memahami pesan-pesan Kesehatan yang disampaikan.

c. *Pentas GIMURA (Peningkatan Pengetahuan dan Status Kesehatan Gigi Mulut Ibu Hamil di UPTD Puskesmas Ganra)* merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai hubungan kehamilan dan kesehatan gigi. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut semasa hamil.

3. Sektor Tenaga Kerja

Inovasi layanan tenaga kerja terkait dengan perlindungan bagi para pekerja yaitu :

a. *SIBALIPERI (Siaga Bersama Perlindungan pada Pekerja Rentan/Informal)* merupakan salah satu inovasi yang membantu melindungi para pekerja rentan dan keluarganya dari berbagai risiko pekerjaan, termasik risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian. Dengan adanya perlindungan ini, para pekerja dapat merasa lebih aman dan terlindungi saat menjalankan pekerjaannya, karena mereka memiliki jaminan sosial yang memadai untuk mengatasi berbagai resiko yang mungkin terjadi.

b. *SUTASOMA (Sistem Perlindungan Petani Soppeng Maju dan Sejahtera)*, inovasi ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melayani dan melindungi petani yang rentan dari Risiko kecelakaan kerja sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sehingga sangat memerlukan mitigasi perlindungan.

4. Sektor Pariwisata

Inovasi pada sektor pariwisata terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap wisatawan yakni :

a. *Kelas Wisata*, memberikan pengetahuan dasar pada petugas objek wisata tentang tata cara memberikan pelayanan pada wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain itu manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar objek wisata selaku pelaku usaha wisata yang bergantung pada jumlah pengunjung dan kepuasan yang didapat selama berada di objek wisata tersebut.

5. Sektor Perdagangan

Inovasi pada sektor perdagangan terkait dengan ketertiban dalam transaksi perdagangan yakni :

a. *Terus Pula (Tera Ulang Sistem Jemput Bola)*, kegiatan ini merupakan salah satu inovasi dalam menciptakan tertib ukur dalam transaksi perdangan di Kabupaten Soppeng.

6. Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman

Inovasi pada sektor perumahan dan Kawasan permukiman terkait dengan informasi hunian yakni :

a. *Ke Rumah Mama (Publikasi Perizinan Perumahan sebagai Upaya Masyarakat dalam Memilih Hunian)*, Melalui Publikasi Perizinan Perumahan ini, Masyarakat soppeng dapat memperoleh informasi

yang memudahkan dalam memilih hunian yang diinginkan dengan baik sesuai kondisi lingkungan karena dapat diakses baik secara online maupun Offline melalui perangkat seluler (android), tablet dan web (komputer) Sehingga inovasi ini memudahkan penyebarluasan informasi karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

7. Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan

   Inovasi pada sektor peternakan dan Kesehatan hewan terkait dengan pemanfaatan lahan serta pencegahan penyakit hewan yakni :

   a. *Kader Iman (Kader Inseminator Mandiri)*, merupakan salah satu inovasi yang dilakukan untuk Mencegah penularan penyakit menular seperti *Bruceloisis*. Dengan adanya Inseminator Mandiri maka semua wilayah dapat terjangkau sehingga dapat mencegah penularan penyakit hewan menular.

   b. *Pekan Healing Puskeswan (Pelayanan Kesehatan Hewan Melalui Panggilan Berbasis Puskeswan),* mengurangi tingkat kematian, meningkatkan tingkat kelahiran, kesuburan, dan pertumbuhan hewan ternak.

   c. *PENDEKAR (Pendederan Ikan Masyarakat),* pemanfaatan lahan Pertanian, dimana lahan Pertanian memiliki 2 sumber dalam penyediaan bahan pangan keluarga, yaitu untuk menghasilkan padi dan Ikan sebagai pengganti biaya pupuk dan pengolahan tanah dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani.

8. Sektor Perencanaan dan Inovasi Daerah

   Inovasi pada sektor perencanaan dan inovasi daerah yakni :

   a. *SIMDARA (Sistem Informasi Data base Riset dan Inovasi Daerah),* tercapainya pelaporan inovasi daerah yang akuntabel, sebagai instrument mengukur potensi dan peluang inovasi serta Langkah kedepan dalam mengejar pretasi di kancah nasional, serta menjadi embrio untuk mengembangkan inovasi daerah tentunya sebagai materi klinik inovasi yang profesional dan dapat diunggulkan pada momen kompetisi maupun momen dalam perencanaan Pembangunan kedepannya.



BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

penjelasan kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah memiliki urgensi dalam menyajikan informasi kemampuan ekonomi dan sumber daya daerah untuk membiayai rencana program dan kegiatan, informasi tersebut menjadi gambaran dalam penentuan alokasi anggaran secara efektif. Kerangka ekonomi daerah dan Kerangka pendanaan dalam RKPD 2027 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro kabupaten Soppeng sebagai bagian holistik dari perekonomian regional, nasional maupun global

Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2027 secara detail mendeskripsikan kondisi perekonomian Kabupaten Soppeng serta arah kebijakan pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi iplementasi kebijakan di tahun 2027.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan langkah strategis yang ditempuh untuk memacu pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang merata, menciptakan kesempatan kerja dan stabilitas harga serta nilai tukar. Dengan demikian merancang kebijakan ekonomi daerah adalah hal yang penting bagi pemerintah untuk meretas percepatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari target ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan, sebab kondisi perekonomian nasional menjadi landasan untuk memberikan gambaran ekonomi lokal, keterkaitan ini menjadi starting point untuk melihat prediksi ekonomi Kabupaten Soppeng.

Kebijakan fiskal didesain untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. Peran APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental dalam upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi daerah. Seiring dengan pandemi yang bertransisi menjadi endemi tahun ini, peran APBD dirumuskan dengan sangat hati-hati agar dapat optimal mempercepat pemulihan dan penciptaan lapangan kerja, serta menjadi penyerap risiko (*shock absorber*) dalam menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi. “Risiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi eksternal, perlu terus diwaspadai. tantangan besar yang perlu terus menjadi perhatian dan diantisipasi oleh Pemerintah yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat konflik Rusia – Ukraina dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, perang dagang antar negara-negara besar khususnya di Amerika Serikat, Selain itu, terdapat potensi risiko lainnya yang terus diwaspadai seperti biaya dana (*cost of fund*) yang tinggi, kenaikan harga komoditas, dan risiko stagflasi yaitu kondisi dimana terjadi inflasi dan perlambatan ekonomi secara bersamaan. Jika eskalasi risiko global terus berlanjut, Proteksionisme menguat, perang dagang

kembali menjadi alat tekanan geopolitik, dan arus perdagangan global semakin terfragmentasi. Kebijakan moneter di negara maju yang kerap berubah, adanya fluktuasi arus modal, serta konflik geopolitik turut memperbesar volatilitas pasar keuangan global, pada konteks ini perekonomian global dapat menghadapi tiga potensi krisis yaitu krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan. Untuk merespon kondisi tersebut, APBN didorong berfungsi sebagai *shock absorber* dengan cara melindungi daya beli masyarakat.

Oleh sebab itu, dibutuhkan konsolidasi fiskal yang berkualitas yaitu yang disertai reformasi fiskal yang holistik. Di sisi lain, perbaikan ekonomi yang terjadi secara konsisten serta implementasi reformasi perpajakan telah membentuk landasan yang sangat kuat dalam mendukung upaya penyehatan fiskal. Faktor pendukung lainnya adalah penerimaan negara yang terus meningkat, termasuk oleh dampak positif dari kenaikan harga komoditas nasional dan dunia.

Kabupaten Soppeng yang merupakan bagian dari perkembangan nasional dan provinsi Sulawesi selatan mengambil peran ekonomi lokal dalam menjaga kesinambungan prekonomian oleh karena kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Soppeng untuk tahun 2027 diprediksi tumbuh positif sembari untuk konsisten menjaga inflasi daerah, optimisme tersebut seiring dengan geliat pergerakan ekonomi UMKM, usaha rumah tangga, bertumbuhnya ekonomi jasa dan digital berbasis usaha baru, membaiknya system produksi pertanian dan tanaman pangan yang diyakini sebagai penyangga dan pemantik pertumbuhan ekonomi ditahun-tahun mendatang

Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan maka penguatan ekonomi daerah menjadi kemestian, oleh karena itu pemberdayaan UMKM, penguatan produksi pangan dan pertanian lokal, penyediaan infrastruktur yang dapat mempermudah akses produksi barang dan jasa masyarakat menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Soppeng, di samping itu menjaga inflasi dalam posisi stabil juga merupakan kunci pergerakan ekonomi daerah untuk bertumbuh, pertanian Kabupaten Soppeng menjadi support tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga penyediaan sarana prasarana pertanian, penyediaan pasar dan hilirisasi pertanian menjadi kunci pembangunan ekonomi, di samping itu sektor jasa dan pariwisata juga menjadi agenda yang dapat memacu pendapatan ekonomi masyarakat sehingga APBD 2027 diharapkan dapat menjadi faktor pendorong geliat ekonomi melalui program yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat luas, disisi lain program listrik masuk sawah dan komitmen pemerintah menjaga harga gabah petani juga menjadi penopang strategis penguatan ekonomi daerah.

Meningkatnya aktivitas ekonomi di beberapa sektor lapangan usaha khususnya sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan menjadi konstribusi terhadap peningkatan omset terutama untuk industri makan minum yang memiliki share terbesar. Sementara itu Aktifitas ekonomi akan menyebabkan dampak daya beli masyarakat yang akan ikut membaik sehingga sektor perdagangan diprediksi akan tumbuh. Demikian halnya sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan diprediksi akan tumbuh dan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, disamping itu pelibatan sektor

swasta pada penyediaan barang jasa dan investasi akan mengakselerasi mobilitas aktifitas ekonomi khususnya pada sektor lapangan kerja.

Tarif dagang antar negara, berimplikasi terhadap beratnya perdagangan dunia kebijakan negara-negara besar yang menimbulkan gejolak ekonomi dunia dan berdampak pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Meskipun menghadapi tantangan besar, ekonomi Indonesia tetap memiliki potensi untuk bangkit dan tumbuh secara berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, reformasi perpajakan, peningkatan investasi, serta penguatan daya beli masyarakat, Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, disisi lain Pemerintah perlu terus berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, meningkatkan efisiensi belanja negara, serta memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara optimal.

3.1.1. Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 mendeskripsikan capaian indikator makro, di samping itu aktifitas ekonomi ini menjadi pertimbangan strategis bagi pemerintah daerah untuk mendesain dan menetapkan arah kebijakan ekonomi di tahun mendatang dengan tetap sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah,

Kabupaten Soppeng sebagai wilayah yang bertumpuh pada basis pertanian untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, disamping itu pergeseran paradigma berusaha dari sector pertanian ke sektor jasa kreatif menjadi ladang baru untuk penopang pergerakan ekonomi kabupaten, oleh karena itu, pembangunan ekonomi kabupaten soppeng cukup optimis untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah yang dimulai pada pembangunan daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khusunya karena keduanya sama sekali tidak bersifat pasif dan sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan, keduanya harus ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya yakni sebagi unsur yang sangat penting, dinamis dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan. Dengan strategi ekonomi yang cukup efektif pemerintah kabupaten Soppeng mengalami perkembangan positif dalam capaian makro ekonomi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1. Capaian Makro Ekonomi Tahun 2021-2025

No	Indikator Makro	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,15	6,18	3,33	4,06	4,77
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,53	7,49	7,48	6,9	6,65
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,92	3,4	4	3,32	4,01
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,99	69,7	70,58	71,39	73,69
5	Rasio Gini	0,406	0,386	0,39	0,371	0,331
6	PDRB PerKapita (Juta Rp)	52, 75	58,21	62,58	67,26	72,36
7	Inflasi	2,26	5,52	2,84	0,68	3,16
8	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	2,28	2,27	2,28	2,31	2,31
9	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-	-	-	-	-
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	69,52	65,4	68,64	68,74	77,23

Kondisi pembangunan ekonomi dalam kurun waktu lima tahun terakhir menjadi penting untuk disajikan untuk mengukur capaian makro ekonomi daerah yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Kondisi tersebut di deskripsikan sebagai berikut ini :

3.1.1.1. Pertumbuhan PDRB

3.1.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi. untuk itu pemerintah daerah diharapkan dapat terus menerus meningkatkan PDRB-nya, PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Dalam penyusunan PDRB diperlukan data dari berbagai kegiatan ekonomi yang berasal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi dan akumulasi kekayaan. Dengan demikian PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasikan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Dengan demikian salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai dasar.

Pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu daerah PDRB digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah, Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun.

Pada tahun 2025 Perekonomian Kabupaten Soppeng menunjukkan trend positif dari sisi pertumbuhan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang positif melalui nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga

berlaku (PDRB ADHB).

Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) tahun 2024 yang sebesar Rp16.099,18 juta rupiah, dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan nilai tercatat sebesar Rp17.397,80 juta rupiah, lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHB terbesar dengan konstribusi mencapai Rp5.540,91 juta rupiah disusul sektor konstruksi dengan nilai tercatat sebesar Rp2.254,82 juta rupiah dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar Rp2.237,46 juta rupiah, sedangkan sector Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami pelambatan dari tahun sebelumnya dengan capaian tercatat Rp5,54 Juta demikian juga sektor-sektor yang lain memiliki kontribusi yang memadai dalam pembentukan PDRB,konstribusi lapangan usaha menggambarkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Soppeng bertumbuh. Untuk selengkapnya gambaran terkait PDRB ADHB Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 terangkum dalam berikut.

Tabel 3. 2. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha (Miliar Rupiah), 2021 – 2025

Urutan	Kategori Lapangan Usaha PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.564,66	3.928,38	4.244,13	4.898,08	5.540,91
B	Pertambangan dan Penggalian	534,2	575,18	588,75	615,91	670,79
C	Industri Pengolahan	1.255,90	1.418,48	1.612,26	1.748,01	1.921,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,89	10,57	11,77	12,46	13,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,32	5,79	5,86	5,68	5,54
F	Konstruksi	1.761,45	2.056,69	2.320,11	2.313,96	2.254,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.573,58	1.725,15	1.943,12	2.097,31	2.237,46
H	Transportasi dan Pergudangan	374,61	434,72	530,28	563,6	608,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	186,67	216,52	237,8	241,63	270,8
J	Informasi dan Komunikasi	415,22	432,63	447,53	477,17	513,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	416,54	457,74	465,84	494,88	549,11
L	Real Estate	617,44	655,51	671,34	709,32	754,32
M,N	Jasa Perusahaan	24	27,76	29,36	31,53	32,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	731,85	749,41	739,75	766,36	799,55
P	Jasa Pendidikan	624,51	694,56	707,3	755,82	827,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	242,11	259,41	260,32	268	294,38
R,S, T,U	Jasa lainnya	88,83	93,34	93,82	99,44	102,81
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		12.426,78	13.741,84	14.909,33	16.099,18	17.397,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan produktivitas ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar konstan, PDRB ADHK Kabupaten Soppeng menggambarkan pola yang sama dengan PDRB ADHB yang mengalami kinerja positif. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 sebesar Rp8.660,66 juta rupiah dan

mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar Rp9.073,58 juta rupiah

Tabel 3. 3. Produk Domestik Regional Bruto Soppeng Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah), 2021-2025

Urutan	Kategoro Lapangan Usaha PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.017,70	2.098,08	2.034,78	2.125,25	2.263,44
B	Pertambangan dan Penggalian	246,97	258,01	256,80	268,96	266,44
C	Industri Pengolahan	753,02	817,72	909,24	955,72	1.017,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,76	10,25	10,90	11,23	11,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,38	4,73	4,74	4,62	4,50
F	Konstruksi	1.007,67	1.109,34	1.179,79	1.167,99	1.127,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.092,25	1.152.25	1.263,13	1.343,13	1.410,20
H	Transportasi dan Pergudangan	216,80	239,17	271,34	284,48	306,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	131,96	144,91	158,32	158,46	171,86
J	Informasi dan Komunikasi	341,95	358,15	370,33	392,75	419,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	222,31	227,06	226,01	236,75	255,16
L	Real Estate	351,63	364,92	369,41	388,90	412,73
M,N	Jasa Perusahaan	16,75	18,48	18,93	19,93	19,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	440,35	448,15	435,78	439,21	449,49
P	Jasa Pendidikan	511,91	567,40	577,45	619,50	677,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166,01	177,27	177,23	182,29	197,33
R,S, T,U	Jasa lainnya	54,57	58,50	58,36	61,50	63,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**7.585,98**	**8.054,42**	**8.322,53**	**8.660,66**	**9.073,58**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Berdasarkan dari komponen penyusunnya, pada tahun 2025 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan produktivitas tertinggi dengan kontribusi sebesar Rp2.263,44 juta rupiah. Selanjutnya kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp1.410,20 juta rupiah dan Konstruksi sebesar Rp1.127,31 juta rupiah, namun demikian sektor-sektor yang lain juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi.

Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha kontruksi. Kontruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng.

3.1.1.1.2. Distribusi Sektoral

Distribusi sektoral memberikan gambaran sejauh mana peranan sektor lapangan usaha memberikan andil terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Soppeng. Distribusi PDRB Kabupaten Soppeng pada tahun 2021-2025 didominasi oleh sektor primer, dimana pada tahun 2025 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku kontribusi tertinggi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 31,85%, mengalami peningkatan dari tahun 2024 dengan capaian 30,42%, dan sektor kedua adalah konstruksi sebesar 12,96%, sedangkan kontribusi terendah pada sektor pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur ulang sebesar 0,03%.

Berikut data Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2021-2025

Tabel 3. 4. Distribusi PDRB Tahunan Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2021-2025 (Persen)

Urutan	Kategori Lapangan Usaha PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,69	28,59	28,47	30,42	31,85
B	Pertambangan dan Penggalian	4,30	4,19	3,95	3,83	3,86
C	Industri Pengolahan	10,11	10,32	10,81	10,86	11,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
F	Konstruksi	14,17	14,97	15,56	14,37	12,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,66	12,55	13,03	13,03	12,86
H	Transportasi dan Pergudangan	3,01	3,16	3,56	3,50	3,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,50	1,58	1,59	1,50	1,56
J	Informasi dan Komunikasi	3,34	3,15	3,00	2,96	2,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,35	3,33	3,12	3,07	3,16
L	Real Estate	4,97	4,77	4,50	4,41	4,34
M,N	Jasa Perusahaan	0,19	0,20	0,20	0,20	0,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,89	5,45	4,96	4,76	4,60
P	Jasa Pendidikan	5,03	5,05	4,74	4,69	4,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,95	1,89	1,75	1,66	1,69
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,71	0,68	0,63	0,62	0,59
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng , 2026

Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha, perlu dicermati tentang peranan setiap sektor dan sektor apa saja yang merupakan sektor basis (base sector) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Soppeng terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan.

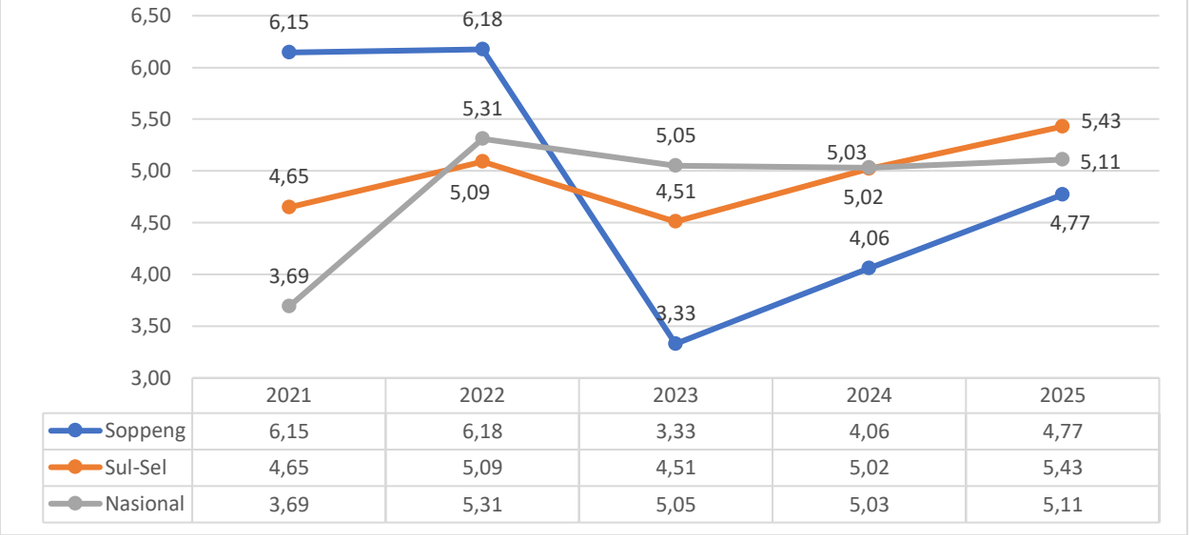
3.1.1.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan

sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif.

Grafik 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Prov. Sul-sel dan Nasional Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	6,15	6,18	3,33	4,06	4,77
Sul-Sel	4,65	5,09	4,51	5,02	5,43
Nasional	3,69	5,31	5,05	5,03	5,11

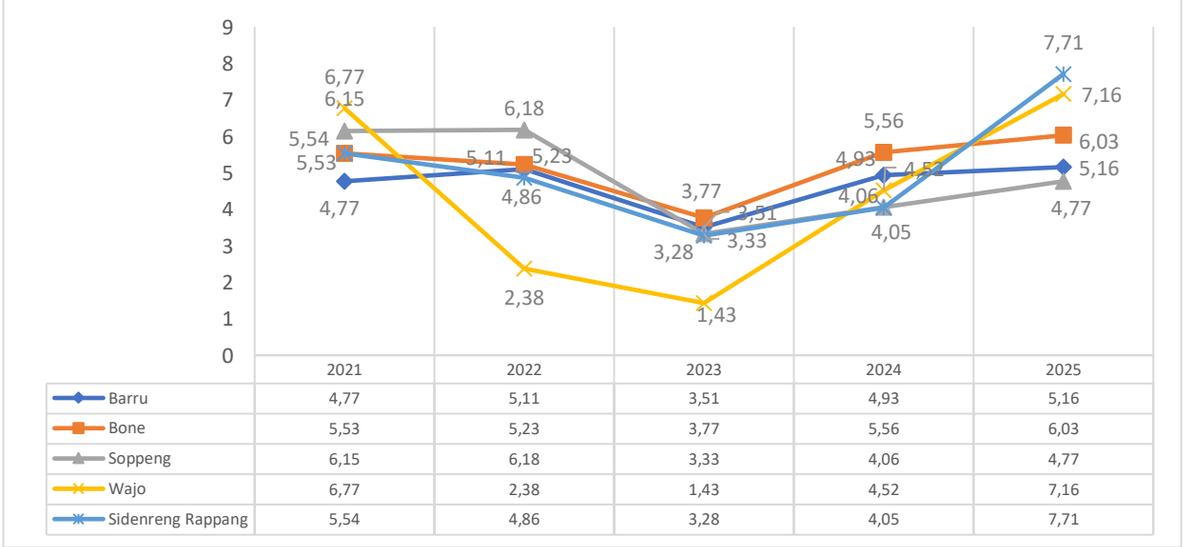
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 dengan capaian 4,06% dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan capaian 4,77%, pertumbuhan ekonomi disebabkan sektor pertanian sebagai daya ungkit utama mengalami perkembangan positif.

Di sisi lain pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capaian pada angka 5,43% dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11%, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lebih rendah dengan capaian pemerintah provinsi maupun capaian Nasional.

Apabila disandingkan dengan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten yang berbatasan lansung, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 menempati posisi terendah, dimana kabupaten Sideren Rappang menempati posisi teratas dengan capaian 7,71% Perbandingan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 3.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan Wilayah Sekitar Tahun 2021-2025

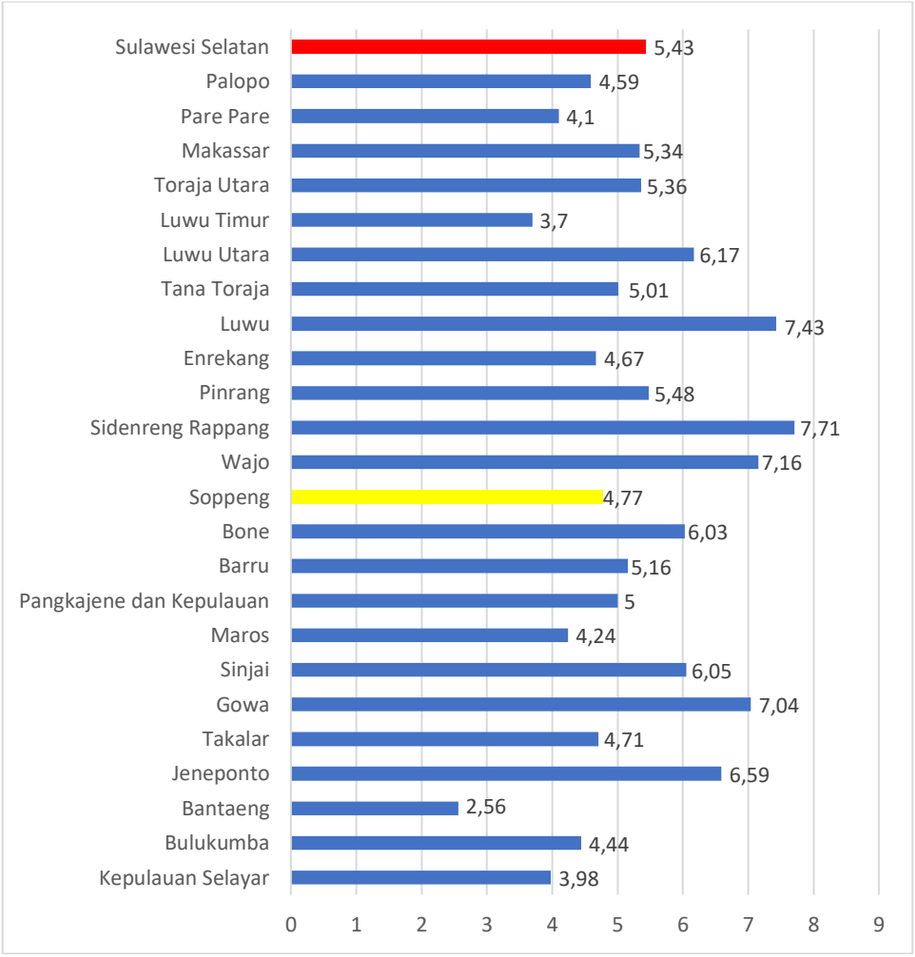


	2021	2022	2023	2024	2025
Barru	4,77	5,11	3,51	4,93	5,16
Bone	5,53	5,23	3,77	5,56	6,03
Soppeng	6,15	6,18	3,33	4,06	4,77
Wajo	6,77	2,38	1,43	4,52	7,16
Sidenreng Rappang	5,54	4,86	3,28	4,05	7,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Dalam lingkup provinsi Sulawesi Selatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng cukup moderat jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten kota lainnya dengan menempati posisi ke lima belas dengan capaian pertumbuhan 4,77% sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai Kabupaten Sidenreng Rappang dengan angka tercatat 7,71% dan kabupaten terendah tercatat dengan capaian 2,56% di Kabupaten Bantaeng, Untuk lebih jelas pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi selatan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Grafik 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng yang bergerak naik dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 0,71%, merupakan hal yang positif terhadap perkembangan ekonomi daerah, pertumbuhan tersebut didorong melalui sub sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh diangka 6,50%, industry pengolahan 6,49%, jasa pendidikan 9,29%, Sub sector jasa kesehatan dan kegiatan sosial 8,26%, Sub sector penyediaan akomodasi dan makan minum 8,46% dan sub sector jasa keuangan dan asuransi 7,78% serta sub sector lainnya juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, sedangkan sub sector Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami pelambatan -2,48% dan sub sector konstruksi juga mengalami pelambatan -2,48%

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada seluruh kategori lapangan usaha dari tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,11	3,98	-3,02	4,45	6,50
B	Pertambangan dan Penggalian	4,14	4,47	-0,47	4,74	-0,94
C	Industri Pengolahan	8,82	8,59	11,19	5,11	6,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,74	5,05	6,30	3,04	3,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,02	7,96	0,22	-2,56	-2,48
F	Konstruksi	9,99	10,09	6,35	-1,00	-3,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,61	5,49	9,62	6,33	4,99
H	Transportasi dan Pergudangan	10,15	10,32	13,45	4,84	7,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,72	9,82	9,26	0,08	8,46
J	Informasi dan Komunikasi	12,06	4,74	3,40	6,05	6,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,21	2,13	-0,46	4,75	7,78
L	Real Estate	4,17	3,78	1,23	5,28	6,13
M,N	Jasa Perusahaan	10,30	10,34	2,45	5,29	-0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,33	1,77	-2,76	0,79	2,34
P	Jasa Pendidikan	10,95	10,84	1,77	7,28	9,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,36	6,78	-0,03	2,85	8,26
R,S, T,U	Jasa lainnya	6,65	7,19	-0,24	5,39	2,95
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**6,15**	**6,18**	**3,33**	**4,06**	**4,77**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

3.1.1.1.4. Inflasi

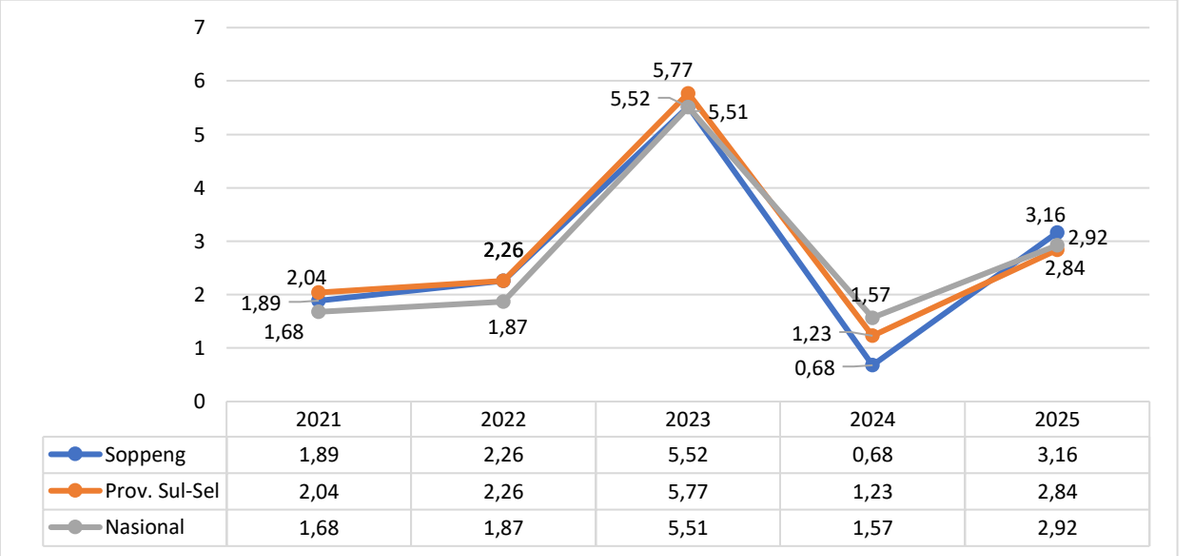
Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi maupun biaya hidup yang ada di masyarakat. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi.

Pengendalian inflasi merupakan indikator yang erat kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bukan berarti tidak adanya inflasi dapat berdampak baik bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah bahkan diangka nol justru akan berdampak pada lesunya perekonomian bahkan dapat menimbulkan stagnansi. Alhasil pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat terlaksana.

Laju inflasi tahunan Kabupaten Soppeng merujuk ke inflasi Bone sebagai daerah terdekat, Pada tahun 2024 sebesar 0,68%, sedangkan tahun 2025 data pada bulan novembel laju inflasi Kabupaten Soppeng merujuk ke Kabupaten Wajo sebagai sistercity dengan capaian sebesar 2,42%. Inflasi ini memberikan informasi ekonomi bahwa keadaan harga barang dan jasa secara umum tidak mengalami kenaikan cukup signifikan. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok rekreasi, budaya dan olahraga; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Adapun kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi.

Grafik 3.4. Perbandingan Inflasi Nasional, Sulawesi Selatan Dan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



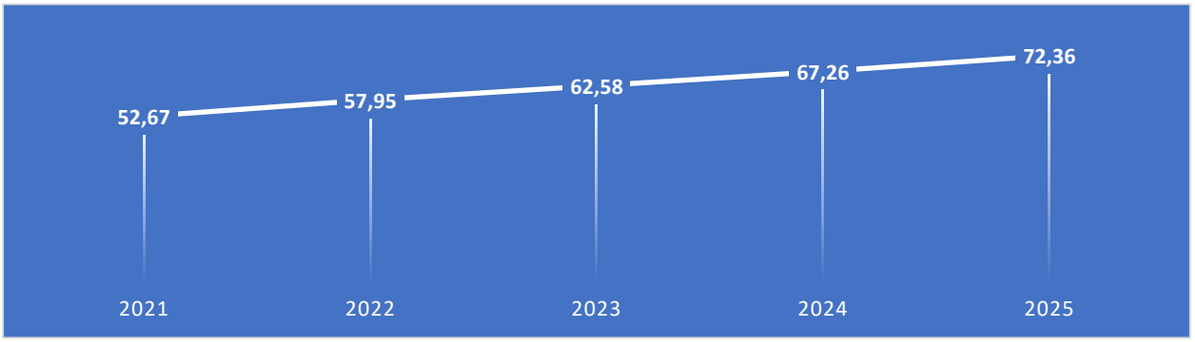
	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	1,89	2,26	5,52	0,68	3,16
Prov. Sul-Sel	2,04	2,26	5,77	1,23	2,84
Nasional	1,68	1,87	5,51	1,57	2,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

3.1.1.1.5. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indikator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2022 sebesar Rp62,58 juta dan mengalami peningkatan /pada tahun 2025 sebesar Rp72,36 juta.

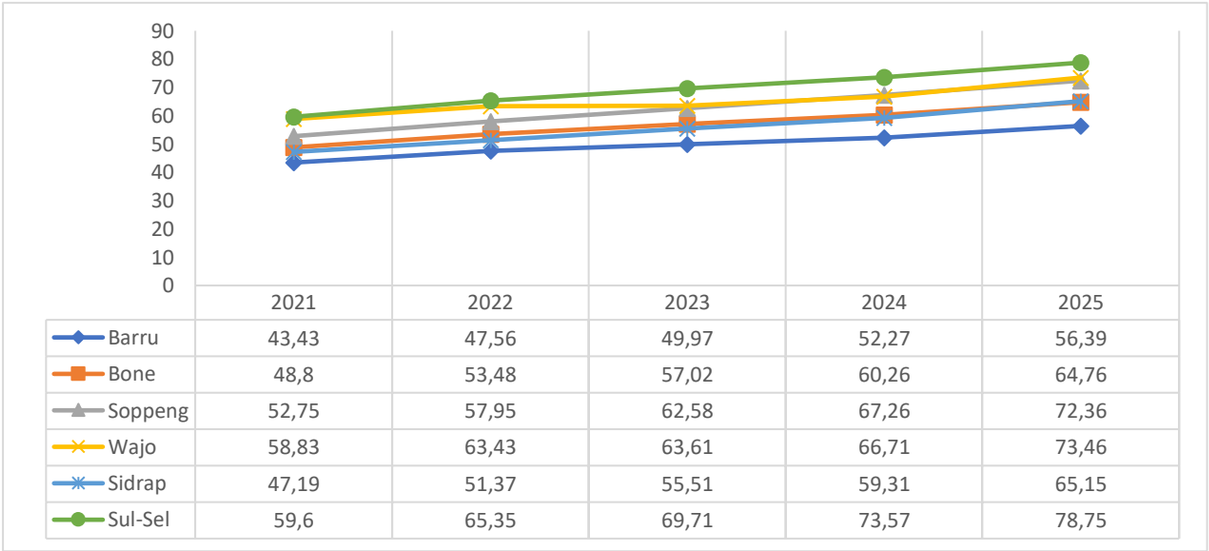
Grafik 3.5. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha, 2021-2025 (Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Jika dibandingkan dengan wilayah disekitar Kabupaten Soppeng yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo serta Provinsi Sulawesi Selatan PDRB perkapita di Kabupaten Soppeng juga cukup tinggi. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh di tahun 2025, Selain itu program strategis pemerintah daerah yang diberikan pada sektor unggulan di bidang pertanian maupun peternakan, peningkatan teknologi yang mempengaruhi tingkat produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Soppeng.

Grafik 3.6. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng dan Wilayah Sekitar, 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Barru	43,43	47,56	49,97	52,27	56,39
Bone	48,8	53,48	57,02	60,26	64,76
Soppeng	52,75	57,95	62,58	67,26	72,36
Wajo	58,83	63,43	63,61	66,71	73,46
Sidrap	47,19	51,37	55,51	59,31	65,15
Sul-Sel	59,6	65,35	69,71	73,57	78,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

3.1.1.1.6. Indeks Gini/ Gini Ratio

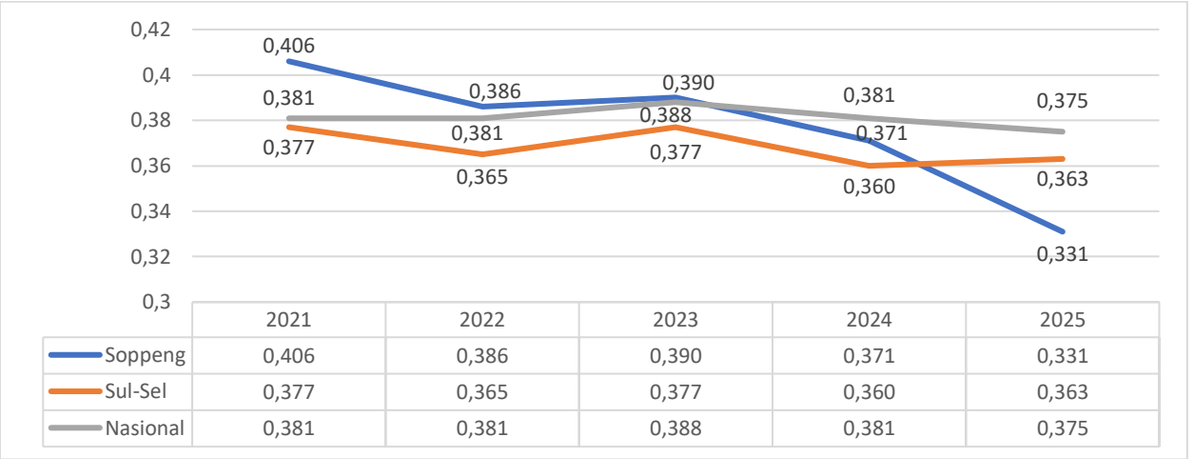
Indeks Gini merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran konsumsi atau variable-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Nilai koefisien Indeks Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, maka semakin tinggi pula ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Jika nilai gini rasio mendekati satu, maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sebaliknya apabila

nilai gini rasio kecil atau mendekati nol, maka semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Klasifikasi nilai gini rasio:

GR < 0,3 → ketimpangan rendah
0,3 ≤ GR ≤ 0,5 → ketimpangan sedang
GR > 0,5 → ketimpangan tinggi

Grafik 3.7. Perbandingan Indeks Gini Nasional, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	0,406	0,386	0,390	0,371	0,331
Sul-Sel	0,377	0,365	0,377	0,360	0,363
Nasional	0,381	0,381	0,388	0,381	0,375

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

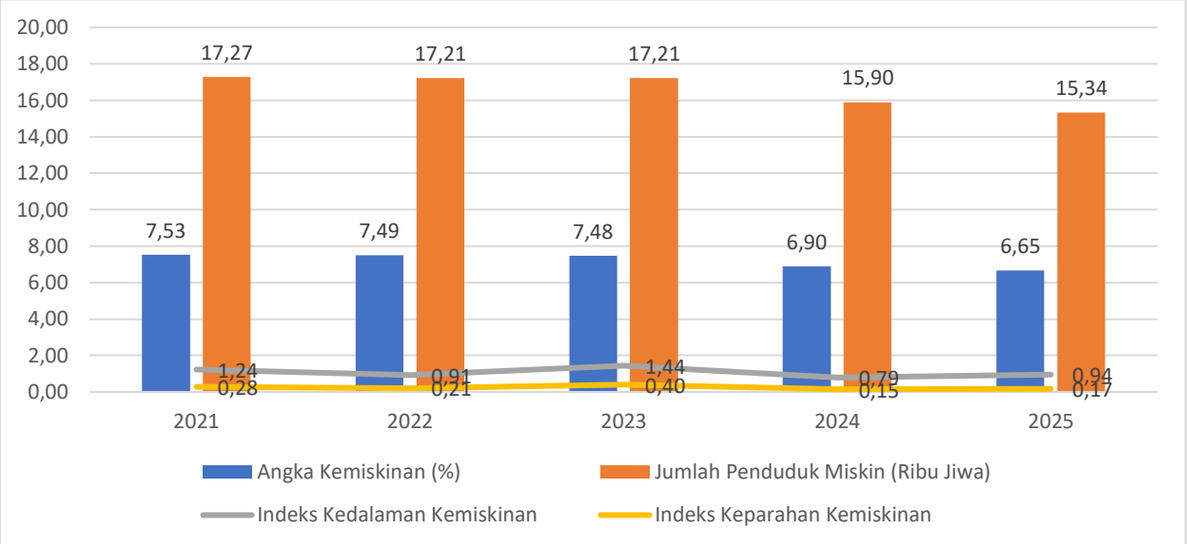
Selama kurun waktu lima tahun, periode 2021-2025 ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng diukur oleh indeks gini mengalami fluktuasi sebagaimana yang disajikan pada grafik diatas, sedangkan untuk posisi dua tahun tekahir menggambarkan penurunan dimana pada tahun 2024 capaian tersebut sebesar 0,371 poin dan menurun ditahun 2025 untuk data pada bulan maret mencapai 0,331 point atau turun . Ketimpangan pengeluaran atau gini ratio tersebut masih berada pada ketimpangan sedang. Jika dibandingkan dengan gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan indeks gini Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 lebih tinggi dimana indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,360 akan tetapi lebih redah jika dibandingkan Nasional dengan capaian sebesar 0,381 poin.

3.1.1.1.7. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang /rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut grafik kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025.

Grafik 3.8. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 17.270 atau mencapai 7,53% dan mengalami penurunan di tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 17.210 jiwa atau mencapai 7,49% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan berjumlah 17,21 jiwa atau mencapai 7,48% sedangkan pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya atau mencapai 6,90% dengan jumlah 15,90 jiwa, dan pada tahun 2025 mencapai 6,65% atau berjumlah 15.340 jiwa

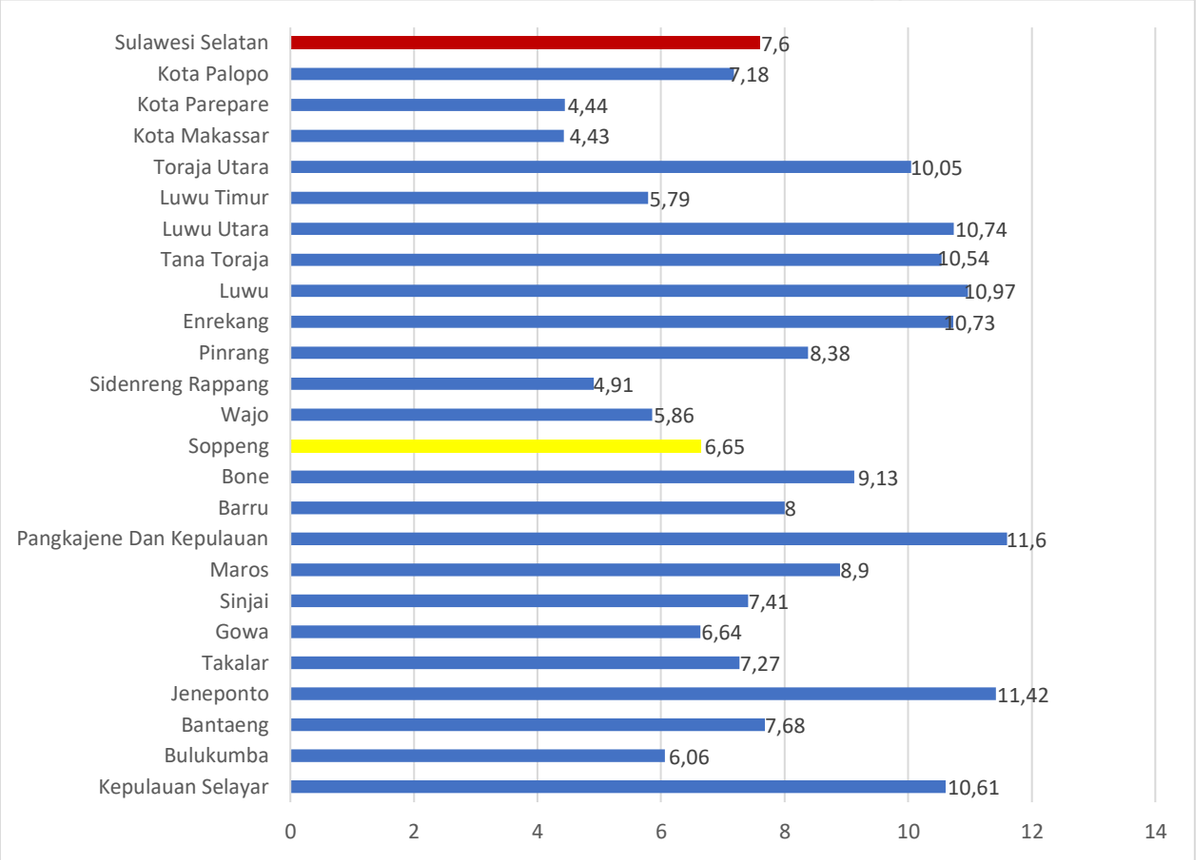
Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya.

Selama periode 2021 – 2025 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuatif dimana pada tahun 2022 sebesar 0,91%. Sedangkan tahun 2025 menurun dengan mencapai angka 0,94%,

Selain indeks kedalaman kemiskinan, Indeks keparahan Kemiskinan (P2) juga berfluktuatif, pada tahun 2022 sebesar 0,21 dan mengalami penurunan pada tahun 2025 pada capaian 0,17%, Hal ini berarti bahwa jurang kemiskinan (poverty gap) di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga meningkat.

Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin dengan daerah di Prov. Sulawesi selatan dan jumlah penduduk miskin dengan nasional maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik persentase penduduk miskin kab/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 3.9. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan (Pro Poor) dan penciptaan lapangan kerja (Pro Job).

3.1.1.1.8. Ketenagakerjaan

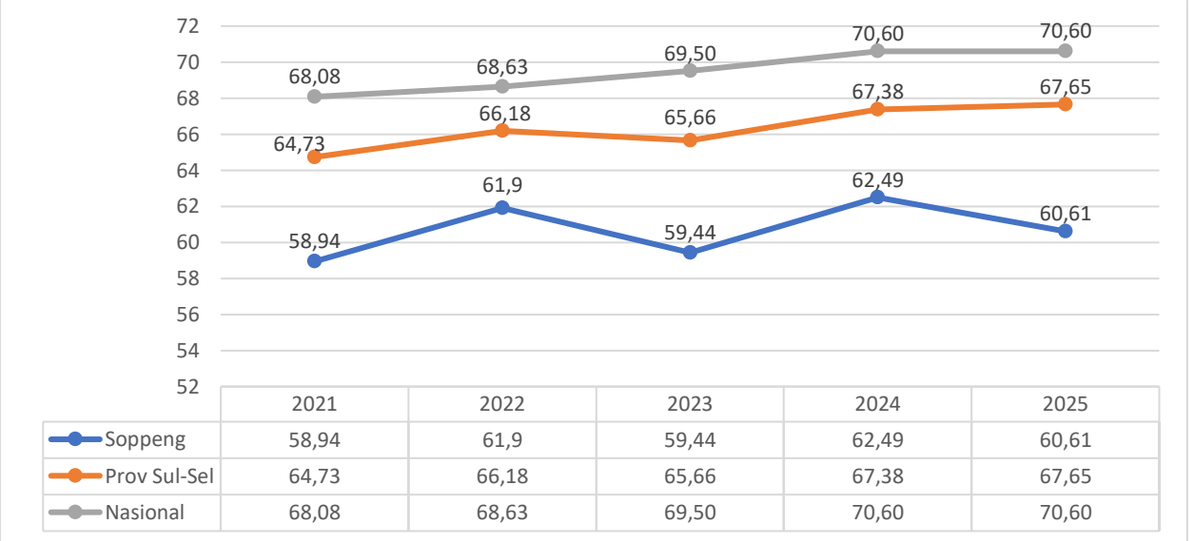
Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya tenaga kerja dipilah menjadi dua kelompok ialah kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk yang menerima pendapatan. Kelompok bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu bisa menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga menjadi masuk dalam kelompok angkatan kerja.

Terciptanya lapangan kerja baru akan membuka kesempatan kerja yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut terkait dengan semakin bertambahnya tenaga kerja yang terserap sehingga mampu mengurangi pengangguran dan memberikan pendapatan sehingga kesejahteraan yang diharapkan mampu terpenuhi.

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari setengah penduduk Kabupaten Sopppeng termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 58,94% pada tahun 2021 menjadi 61,90 % pada tahun 2022, dan menurun pada tahun 2023 dengan capaian 59,44% meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 62,49% dan mengalami penurunan pada tahun 2025 dengan capaian 60,61% penurunan tersebut ditandai dengan keterbatasan lapangan kerja dan meningkatnya pengangguran

Berdasarkan data BPS pada tahun 2024, ada sebanyak 116.162 orang penduduk yang bekerja dengan jumlah total angkatan kerja sebanyak 120.158 orang.

Grafik 3.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	58,94	61,9	59,44	62,49	60,61
Prov Sul-Sel	64,73	66,18	65,66	67,38	67,65
Nasional	68,08	68,63	69,50	70,60	70,60

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Jumlah pekerja dikabupaten Soppeng yang di kategorisasi berdasarkan status pekerjaan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

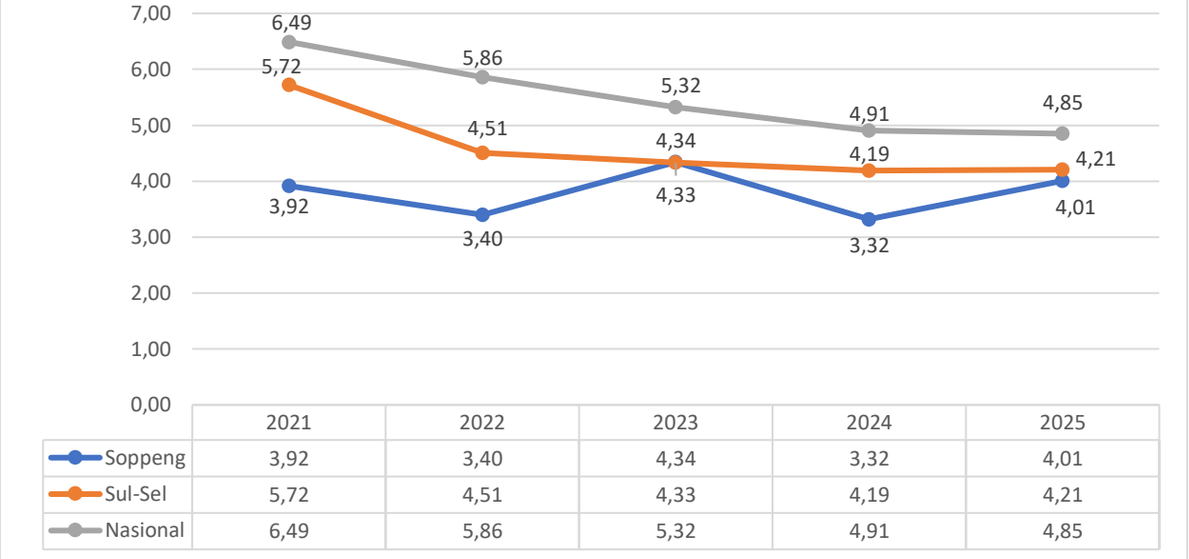
Tabel 3. 6. Jumlah Pekerja berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2025

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	25.574	11.342	36.916
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	14.132	3.958	18.090
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2.279	1.487	3.766
Buruh/Karyawan/Pegawai	16.686	15.032	31.718
Pekerja Bebas	6.658	4.474	11.132
Pekerja Keluarga/tak dibayar	3.619	7.045	10.664
Jumlah	**68.948**	**43.338**	**112.286**

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Konsep status pekerjaan dan pengangguran di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Grafik 3.11. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	3,92	3,40	4,34	3,32	4,01
Sul-Sel	5,72	4,51	4,33	4,19	4,21
Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Pengangguran terbuka tahun 2021 sebesar 3,92% dan tahun 2022 mengalami penurunan dengan capaian 3,40%, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 4,34% sedangkan tahun 2024 mengalami penurunan dengan capaian 3,32% dan mengalami peningkatan tahun 2025 dengan capaian 4,01%, peningkatan pengangguran terbuka dipicu pada Ketimpangan Pembangunan, Kebijakan daerah yang belum mampu meratakan pertumbuhan ekonomi, sehingga penyerapan tenaga kerja terpusat di wilayah tertentu

Program pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memacu sub sector strategis berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sector informal, disisi lain penurunan tingkat pengangguran terbuka sebagai akibat bergeliatnya sektor UMKM dan usaha rumah tangga.

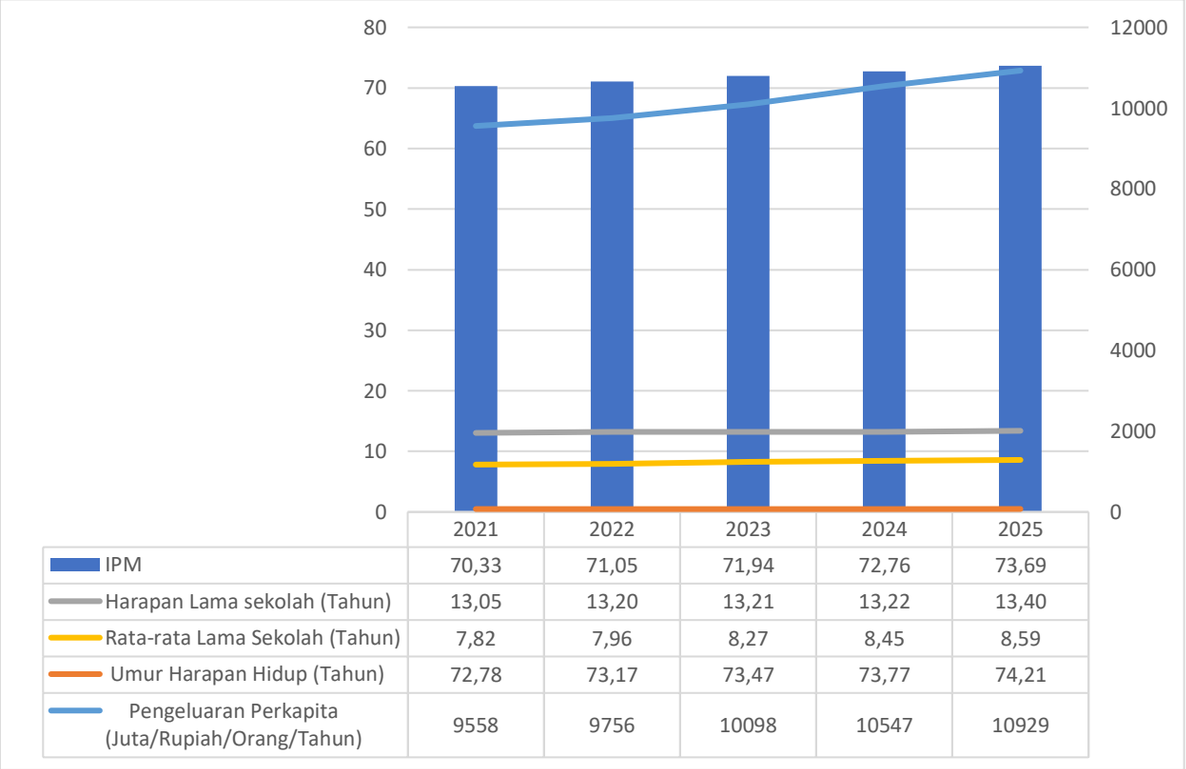
3.1.1.1.9. Indeks Pembangunan Manusia

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, dengan demikian Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia secara bersamaan semua isu dalam masyarakat – pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural, dari sudut pandang manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor, oleh karena itu Pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia dan di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Pengukuran pembangunan manusia diterjemahkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur

dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Grafik 3.12. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2021-2025

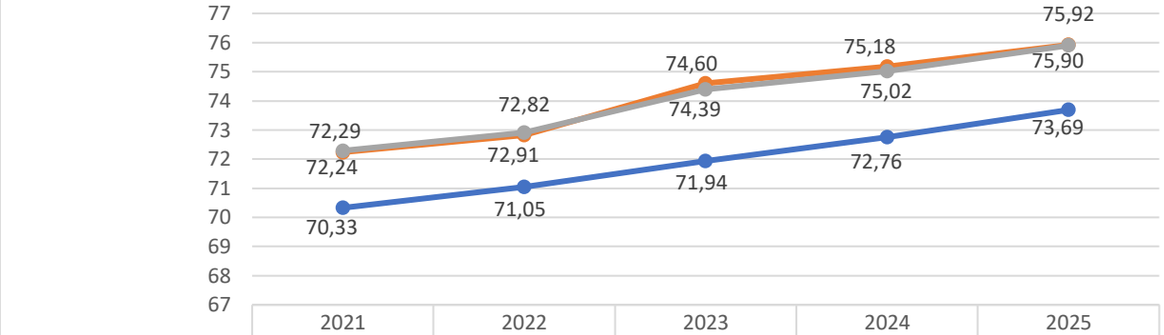


	2021	2022	2023	2024	2025
IPM	70,33	71,05	71,94	72,76	73,69
Harapan Lama sekolah (Tahun)	13,05	13,20	13,21	13,22	13,40
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,82	7,96	8,27	8,45	8,59
Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,78	73,17	73,47	73,77	74,21
Pengeluaran Perkapita (Juta/Rupiah/Orang/Tahun)	9558	9756	10098	10547	10929

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Dalam kurun waktu lima tahun IPM Kabupaten Soppeng mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, tahun 2021 sebesar 70,33 poin sampai tahun 2022 telah mencapai 71,05 point sedangkan tahun 2023 mengalami peningkatan kembali dengan capaian 71,94 poin dan pada tahun 2024 menjadi 72,76 poin, dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 73,69 poin, kenaikan tersebut menjadi indikator bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap kesehatan, Pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik, di sisi lain IPM Nasional dengan capaian 75,02 point dan IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75,18 point masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian Nilai IPM Kabupaten Soppeng dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.13. IPM Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	70,33	71,05	71,94	72,76	73,69
Provinsi Sul-Sel	72,24	72,82	74,60	75,18	75,92
Nasional	72,29	72,91	74,39	75,02	75,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

3.1.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.2.1. Arah Kebijakan ekonomi nasional

Di tengah masih tingginya ketidakpastian dan dinamika perekonomian global, ekonomi Indonesia mampu tumbuh dengan inflasi yang terkendali, Kinerja ekonomi yang solid ditandai dengan pertumbuhan positif seluruh komponen pengeluaran Konsumsi rumah tangga tumbuh seiring implementasi bauran kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang didorong investasi pemerintah dan swasta khususnya lewat pembangunan infrastruktur. Terjaganya konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor nonmigas turut mendorong perekonomian masa depan indonesia. Begitu pula dengan belanja pemerintah yang menopang permintaan domestic oleh karena itu pemerintah perlu memperkuat kebijakan reformasi struktural khususnya pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta menyerap dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan peluang, bergerak dalam Tantangan utama meliputi perlambatan pertumbuhan global, ketidakpastian geopolitik, dan inflasi yang perlu dikelola dengan baik. Peluang meliputi peningkatan konsumsi domestik, pertumbuhan investasi, dan potensi sektor pariwisata.

Rencana kerja pemerintah tahun 2027 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia, RKP 2027 mengambil tema Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri dengan tujuan pembangunan Menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen secara fundamental yang berkeadilan, menuju kemiskinan 0 persen dan meningkatkan produktifitas SDM, dengan demikian dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi *(high income).* Merespon hal tersebut secara nasional pertumbuhan ekonomi tercatat 5,61% (yoy) hal ini di dukung aktivitas ekonomi dominan didorong oleh percepatan belanja Pemerintah, serta peningkatan Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Dari sisi Supply, peningkatan aktivitas sektorManufaktur, Perdagangan, Pertanian, Konstruksi, dan Akomodasi Mamin untuk memenuhi permintaan domestik dan luar negeri, serta mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah.

Perkembangan perekonomian Indonesia menutup tahun 2025 dengan kinerja yang tetap solid di tengah berbagai tekanan global. Aktivitas industri manufaktur yang terus berkembang, neraca perdagangan yang

mencatatkan surplus, serta inflasi yang terjaga menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Dari sisi industri, kinerja manufaktur Indonesia menunjukkan tren positif. Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur pada Desember 2025 tercatat di level 51,2, yang menandakan fase ekspansi dan telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut. Kondisi ini didorong oleh kuatnya permintaan domestik, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta aktivitas pembelian bahan baku yang terus meningkat. Optimisme pelaku usaha juga menguat dan berada pada level tertinggi dalam tiga bulan terakhir.

Perkembangan positif tersebut turut didukung kondisi global. Aktivitas manufaktur di negara mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan India juga berada di zona ekspansif. Di kawasan ASEAN, kinerja manufaktur Thailand dan Malaysia yang menguat turut membuka peluang bagi peningkatan permintaan ekspor Indonesia, sedangkan dari sektor perdagangan internasional, Indonesia kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar USD2,66 miliar pada November 2025.

Dengan capaian ini, tren surplus telah berlangsung secara konsisten sejak Mei 2020. Secara kumulatif sepanjang Januari hingga November 2025, surplus neraca perdagangan mencapai USD38,54 miliar. Nilai ekspor pada periode tersebut tercatat sebesar USD256,56 miliar atau tumbuh 5,61%, terutama didorong oleh kinerja industri pengolahan yang semakin berorientasi pada peningkatan nilai tambah.

Sementara itu, impor juga mengalami peningkatan menjadi USD218,02 miliar atau tumbuh 2,03%. Kenaikan impor terutama berasal dari barang modal, sejalan dengan aktivitas produksi dalam negeri yang terus berkembang. Pada konteks ini Pemerintah akan terus mendorong hilirisasi sumber daya alam, memperkuat daya saing produk ekspor, serta memperluas diversifikasi mitra dagang untuk menghadapi dinamika global ke depan.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi sepanjang 2025 tetap terjaga pada level 2,92% secara tahunan. Inflasi Desember 2025 dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan akibat gangguan cuaca dan distribusi, khususnya pada kelompok volatile food seperti cabai, beras, dan ikan segar. Meski demikian, inflasi inti tetap stabil, sementara inflasi administered price masih relatif rendah, sehingga inflasi secara keseluruhan tetap berada dalam sasaran nasional.

Indikator ekonomi domestik lainnya juga menunjukkan tren yang positif. Hingga November 2025, Indeks Keyakinan Konsumen berada di level 124, mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Indeks Penjualan Riil tumbuh 5,94% secara tahunan, didorong oleh peningkatan konsumsi makanan dan minuman serta mobilitas masyarakat. Aktivitas ekonomi yang menguat juga tercermin dari peningkatan penjualan listrik, terutama di sektor bisnis.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan. Kebijakan fiskal akan tetap diarahkan untuk mendukung program pembangunan nasional guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan demikian

APBN akan terus berperan sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan, dan mengantisipasi potensi pelemahan ekonomi akibat dinamika global.

3.1.2.2. Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan dari sisi ekonomi memiliki keunggulan sumberdaya yang komparatif dengan potensi di sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, dari sisi sosial budaya, nilai-nilai luhur dan ragam budaya masyarakat Sulawesi Selatan berfungsi sebagai rambu-rambu atau koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan secara universal dapat dipadukan dengan cara pandang global. Keunggulan posisi strategis, potensi alam dan sosial budaya ini perlu dipadukan secara bijak dan dikelola seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip pembangunan dengan produktivitas tinggi namun tetap inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan di Sulawesi Selatan selama ini telah dilakukan dengan memperhatikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang terbangun antar wilayah, antar-ruang, antar waktu, dan antar fungsi, serta berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Capaian pembangunan Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2020 hingga 2024 telah menunjukkan hasil yang semakin membaik, namun masih menyisakan pula permasalahan yang perlu ditindaklanjuti penyelesaiannya pada pembangunan daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat Arah kebijakan pembangunan Sebagai pedoman strategis yang menetapkan fokus, prioritas, dan Haluan pembangunan daerah pada periode tertentu, yang berfungsi sebagai acuan dalam perumusan strategi, program, dan kegiatan, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan provinsi Sulawesi selatan, pada kontek ini pelaksanaan tahun ketiga RPJMD pemerintah Sulawesi Selatan tahun 2027 diarahkan pada akselerasi pembangunan SDM, pelayanan publik, dan infrastruktur untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

3.1.2.3. Prospek Perekonomian Daerah

Indonesia, dengan pilar potensi ekonomi yang mengagumkan, tetap mampu berdiri teguh di hadapan terpaan tantangan eksternal dan domestik yang merayapi laju pertumbuhan ekonominya. Tahun 2025 menyaksikan perubahan mendalam dalam peta ekonomi Indonesia, dan kini, sorotan terfokus pada proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2027. Sebagai bagian tak terpisahkan dari panggung global, Indonesia merasakan getaran dampak perlambatan permintaan global sebagai ujian utama di tahun 2025. Tantangan tersebut terbentang luas, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan, hingga gejolak ekonomi di beberapa negara yang menjadi destinasi ekspor utama Indonesia, demikian halnya Kabupaten Soppeng yang mensupport kesinambungan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap kuat didukung oleh permintaan domestik yang solid. Konsumsi rumah tangga bertumbuh seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi. Sementara itu, konsumsi

Pemerintah tumbuh positif disebabkan terutama oleh belanja pegawai yang mengalami penyerapan yang maksimal. Pertumbuhan investasi secara keseluruhan meningkat seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur Pemerintah.

Tantangan ekonomi di tingkat domestik memainkan peran krusial dalam menggambarkan prospek pertumbuhan Indonesia di tahun 2026. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin mengandalkan faktor domestik menjadi fokus utama. Momentum pertumbuhan ekonomi di Indonesia diproyeksikan akan lebih tergantung pada faktor-faktor internal karena adanya estimasi perlambatan permintaan global di tahun 2026. Meskipun pengeluaran fiskal tinggi selama periode pemilihan umum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, kekhawatiran terkait berlanjutnya pengeluaran fiskal sepanjang tahun dapat memperlambat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di tahun tersebut

Kinerja perekonomian domestik Indonesia menguat, walaupun tetap perlu langkah antisipasi dan mitigasi. Pertumbuhan ekonomi terus menguat meskipun dengan inflasi dalam tren meningkat, dan inflasi ini tetap terkendali, kondisi tersebut menjadi cerminan melihat prospek ekonomi daerah di tahun mendatang. Oleh karena itu perekonomian Kabupaten Soppeng diprediksi akan tumbuh positif dapat mengoptimalkan Belanja Daerah untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), mengoptimalkan Program Pemberdayaan di Daerah, mempermudah akses terhadap pekerjaan, meningkatkan kapasitas SDM dan UMKM serta Pembiayaan UMKM, dan menggunakan Belanja Daerah untuk Program Padat Karya kota dan desa.

Sulawesi Selatan secara geografis memiliki posisi strategis sebagai episentrum perekonomian Sulampua, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan relative stabil dibandingkan dengan perekonomian sulampua. Dalam kaitan itu Sulawesi selatan dapat mengambil langkah langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian utama di Kawasan Indonesia Timur. Prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2026 dan 2027 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, Pemerintah berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian yang diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi. Ekonomi Sulawesi Selatan akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Perkembangan ekonomi nasional dan positifisme ekonomi Sulawesi selatan dimasa yang akan datang memiliki dampak strategis bagi perekonomian Kabupaten Soppeng, pertumbuhan ekonomi yang di prediksi positif didukung dengan sector unggulan daerah, dengan demikian Kabupaten Soppeng akan bertumbuh secara signifikan yang ditopang pada sector konsumsi dan investasi, sementara dari sisi suplai, pemerintah akan mengandalkan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta sektor pertanian, hal lain pembangunan inftrastruktur yang mendukung

pembangunan pertanian, sector pariwisata dan jasa juga menjadi kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penguatan struktur ekonomi masyarakat.

Pembangunan merupakan gerakan yang terintegrasi untuk pencapaian tujuan dalam krangka kesatuan republic Indonesia, oleh karena kabupaten kota sebagai supporting pembangunan diharapkan menjadi penyangga keberhasilan pembangunan sampai level nasional, pada konteks ini keselarasan indikator menjadi bagian penting untuk dilakukan agar setiap target pembangunan mampu di ukur dan divaluasi, berikut pada tabel dibawah ini mencermingkan keselarasan target indikator makro ekonomi dari level nasional sampai kabupaten Soppeng

Tabel 3. 7. Keselarasan Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2027

Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027		
		RKPD Kab.Soppeng	RKPD Prov.Sul-Sel	RKP Nasional
Indeks Pembangunan Manusia	73,69	74,75-75,36	0,547-0,560 (Indeks Modal Manusia)	0,575 (Indeks Modal Manusia)
Pertumbuhan Ekonomi	4,77	5,07	6,3-6,8	5,8-6,5
Angka Kemiskinan	6,65	5,29-6,19	6,44-6,86	6,0–6,5
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,01	2,67-2,95	3,76 - 4,15	4,30–4,87
Pendapatan Per Kapita	72,36	76,37	86,9 - 92,7	5.800 – 5.840 US$
Gini Ratio	0,331	0,327-0,329	0,346-0,349	0,362–0,367
Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	-	32,83	37,22	39,57
Konstribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	2,31	2,28	3,2 (Kontribusi PDRB Provinsi)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,23	77,53	83,23	76,84

3.1.2.4. Tantangan Perekonomian Global

Ekonomi global diperkirakan masih penuh ketidakpastian pada 2026 mendatang. Semua negara kini mulai bersiap karena dianggap tekanan yang akan dihadapi juga tidak lebih mudah dibandingkan dengan saat ini.

Perekonomian dunia masih menghadapi tantangan dengan ketidakpastian yang meningkat. Dinamika ekonomi pada triwulan IV 2025 masih dipengaruhi oleh ketegangan perang dagang AS-Tiongkok dan penurunan suku bunga The Fed yang lebih agresif. Perlambatan aktivitas ekonomi AS dan pelemahan pasar tenaga kerja mendorong The Fed memangkas Fed Funds Rate (FFR) sebesar 50 bps pada triwulan IV 2025 ke kisaran 3,50-3,75%. Pemangkasan lanjutan diharapkan dapat menopang pemulihan ekonomi dan meningkatkan aliran modal ke emerging markets. Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi dunia masih akan dipengaruhi oleh dampak lanjutan kebijakan tarif impor AS dan kerentanan rantai pasok global, meskipun prospek perekonomian AS membaik didorong investasi di sektor teknologi termasuk artificial intelligence (AI) dan stimulus fiskal berupa pengurangan pajak. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang, Tiongkok, dan India pada tahun 2026 diprakirakan melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor. Dari pasar keuangan global, ruang penurunan FFR berkurang disertai masih tingginya yield UST sejalan dengan defisit fiskal AS yang masih besar. Ketidakpastian pasar keuangan global juga

meningkat terutama dipicu oleh ketegangan perang dagang serta meluasnya eskalasi tensi geopolitik. Sementara itu, IMF dalam World Economic Outlook (WEO) Januari 2026 merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3% pada tahun 2025 dan 2026, lebih tinggi dari proyeksi di bulan Oktober 2025. Selanjutnya, ketidakpastian terkait kebijakan moneter global menjadi perhatian serius. Perubahan dalam kebijakan moneter oleh bank sentral utama, terutama Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat, menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global. Kenaikan suku bunga atau pengurangan stimulus moneter dapat berdampak pada arus modal dan nilai tukar mata uang, termasuk mata uang Rupiah. Fluktuasi mata uang ini, pada gilirannya, dapat memengaruhi daya saing ekspor, inflasi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Perkembangan ekonomi global juga dipengaruhi ketegangan dalam perdagangan internasional yang dipengaruhi perang iran dengan Amerika serikat dan israil, berpengaruh terhadap pasokan minyak dan energi dunia, Konflik ini menegaskan bahwa ketegangan geopolitik secara langsung memengaruhi stabilitas ekonomi internasional yang implikasinya Kenaikan harga energi dan biaya logistik memicu inflasi yang lebih tinggi secara global serta ketidakpastian energi yang dapat memicu investor beralih dari aset berisiko ke *safe haven* seperti mata uang asing dan emas.

Kenaikan harga minyak yang terjadi akibat ketegangan geopolitik dapat memicu tekanan inflasi di berbagai negara, sebab, energi masih menjadi faktor produksi penting sehingga kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya produksi. Kondisi tersebut dapat memicu *cost-push inflation* yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi selain itu dampak gejolak geopolitik akan semakin terasa bagi negara dengan tingkat keterbukaan ekonomi tinggi. dan Indonesia termasuk kategori *small open economy* yang sangat bergantung pada dinamika ekonomi global, ketergantungan terhadap impor energi serta hubungan perdagangan dengan negara besar membuat perekonomian nasional rentan terhadap guncangan eksternal. Selain inflasi, tekanan juga berpotensi muncul pada nilai tukar rupiah dan stabilitas perdagangan.

Volatilitas harga komoditas merupakan faktor lain yang dapat menghadirkan tantangan bagi ekonomi Indonesia. Perubahan harga minyak, batu bara, logam, dan komoditas ekspor lainnya dapat berdampak pada pendapatan negara, neraca perdagangan, dan performa sektor komoditas.

Terakhir, potensi krisis keuangan global juga menjadi risiko yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan utang, gelembung aset, atau ketidakstabilan sistem keuangan global dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Krisis keuangan global akan memengaruhi aliran modal, suku bunga, dan stabilitas pasar keuangan global, menciptakan tantangan tambahan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain :

1. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda;
2. Perang dagang negara-negara maju berdampak pada negara berkembang
3. Dampak luka memar pandemi pada korporasi dan stabilitas sistem keuangan;

4. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset krypto;
5. Tuntutan ekonomi keuangan hijau;
6. Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan.

3.1.2.5. Tantangan Perekonomian Nasional

Ekonomi nasional menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan IV tahun 2025 dalam kondisi terjaga, kondisi itu berlanjut pada fase memasuki bulan Januari 2026, volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat, terutama disebabkan oleh ketegangan perdagangan dan geopolitik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu menjaga momentum pertumbuhan ke depan. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 diprakirakan lebih tinggi ditopang oleh kenaikan permintaan domestik sejalan dengan membaiknya keyakinan pelaku ekonomi yang didukung oleh stimulus dari kebijakan fiskal dan moneter. Pada triwulan IV 2025, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur berada di zona ekspansi berdasarkan survei S&P Global, penjualan ritel tumbuh positif, dan neraca perdagangan mencatat surplus. Pertumbuhan uang primer (M0) di Desember 2025 tercatat tinggi sebesar 11,4% yoy dipengaruhi oleh koordinasi pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter sejalan dengan stimulus fiskal Pemerintah di akhir tahun dan ekspansi likuiditas bank sentral. Penempatan kas negara di perbankan turut meningkatkan pertumbuhan M0 dan menurunkan biaya dana perbankan. Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Desember 2025 tercatat sebesar 9,6% yoy, antara lain dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 diprakirakan berada di sekitar 5,2%. Sementara pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat menjadi 5,4%, ditopang kenaikan permintaan domestik sejalan dengan berbagai sinergi kebijakan dari Pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, investasi terus diperkuat antara lain dengan peran Danantara sebagai pengungkit investasi swasta termasuk di bidang hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), serta upaya penciptaan iklim investasi yang kompetitif.

Dalam World Economic Outlook (WEO) Update edisi Januari 2026, IMF memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027 akan bertengger di level 5,1%, sedikit lebih tinggi dari estimasi 2025 yang tumbuh 5%. Disisi lain laju pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan oleh Bank Indonesia, akan meningkat lagi pada 2027 menjadi 5,1–5,9 persen dengan titik tengah yang lebih tinggi, yakni 5,5 persen, Sejalan dengan itu, inflasi diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 2,5 persen pada 2026-2027 dengan deviasi plus minus 1 persen. Perry menuturkan, BI bersama pemerintah menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga agar tetap terjaga. Faktor Pendukung Pertumbuhan 2027 diantaranya Kebijakan Moneter & Perbankan dimana BI akan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor riil yang diprediksi tumbuh 9–13% pada 2027, disisi lain, penguatan digitalisasi transaksi keuangan dan penggerak ekonomi dimana Sinergi antara kebijakan fiskal dan sektor swasta, termasuk optimalisasi investasi dan konsumsi domestik harus didorong.

Untuk merespon kondisi tersebut, diperlukan upaya untuk melindungi daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi, dan menjaga fiskal tetap sehat dengan upaya konsolidasi. Dalam kondisi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan yang masih awal, ketersediaan dan keterjangkauan harga energi dan pangan menjadi sangat krusial untuk menjamin daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, dibutuhkan konsolidasi fiskal yang berkualitas yaitu yang disertai reformasi fiskal yang holistik. Di sisi lain, perbaikan ekonomi yang terjadi secara konsisten serta implementasi reformasi perpajakan telah membentuk landasan yang sangat kuat dalam mendukung upaya penyehatan fiskal. Faktor pendukung lainnya adalah penerimaan negara yang terus meningkat, termasuk oleh dampak positif dari kenaikan harga komoditas dunia, ke depan, selain berperan menjaga pemulihan ekonomi nasional, APBN juga diarahkan untuk mendorong produktivitas nasional melalui pemanfaatan *key emerging trends* dan reformasi struktural untuk mendukung transformasi ekonomi. "Akselerasi agenda reformasi struktural mutlak diperlukan melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi dan regulasi. Penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sangat krusial dalam mengatasi isu fundamental atas rendahnya tingkat produktivitas nasional. Dorongan kepada keberlanjutan tahapan industri manufaktur akan memacu pengembangan produk-produk dalam negeri yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dan mampu berkompetisi di pasar global. Sementara, pengembangan ekonomi digital akan menambah resiliensi ekonomi di tengah perubahan pandemi menjadi endemi. Selain itu, sejalan dengan tujuan mewujudkan *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih awal, pembangunan ekosistem ekonomi yang ramah lingkungan merupakan wujud komitmen bersama dalam mengatasi isu perubahan iklim.

Pemerintah pun optimistis dalam melakukan perbaikan pembangunan, terdapat beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Pememaran (*scaring effect*) terhadap stabilitas sistem keuangan
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau

3.1.2.6. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Ekonomi Sul-Sel diprakirakan tumbuh kuat, meski pertumbuhannya mengalami pelambatan, kuatnya ekonomi Sul-Sel ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta ekspor luar negeri yang tetap tinggi. Penghapusan PPKM di dalam negeri diprakirakan menopang permintaan domestik, dan tingginya harga nikel masih akan menopang ekspor. Sementara, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diprakirakan tumbuh lebih terbatas. Prakiraan tersebut seiring upaya penurunan defisit fiskal serta kecenderungan wait and see investor di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter domestik maupun global. Secara sektoral, perekonomian Sul-Sel pada tahun 2027 diprakirakan didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Konstruksi, dan Lapangan Usaha Pertambangan. Lapangan

Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan diprakirakan juga tumbuh kuat.

Perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2027 diproyeksikan akan melanjutkan pertumbuhan positif, meskipun ada tantangan ekonomi global. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027 menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 6,3%-6,8%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta ekspor barang dan jasa diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan.

Optimisme pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan tahun 2026 didukung oleh perkembangan ekonomi daerah Sulawesi Selatan yang menunjukkan tren positif dan pencapaian signifikan di berbagai indikator, Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada Triwulan I tahun 2025 tercatat sebesar 5,78% (yoy). Capaian ini menjadi yang tertinggi sejak Triwulan I tahun 2022 dan melampaui angka pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 4,87%.

Dari sisi inflasi, Sulawesi Selatan mencatatkan penurunan inflasi sebesar 0,34% (m-to-m) pada bulan Mei 2025, sehingga inflasi tahunan (yoy) turun menjadi 2,04%. Komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi tahunan adalah Emas Perhiasan (0,63%), disusul Ikan Bandeng (0,18%), Rokok Kretek Filter (0,12%), Minyak Goreng (0,09%), dan Kopi Bubuk (0,07%).

Kinerja petani juga menunjukkan perbaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Selatan mengalami kenaikan 0,74% (m-to-m) pada Mei 2025, menjadi 122,54. Peningkatan tertinggi terjadi pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) yang naik 3,10% (m-to-m) menjadi 174,77, menunjukkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan petani di sektor ini.

Tantangan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) di tahun 2027 mencakup berbagai aspek, baik dari sisi global maupun domestik. Secara umum, tantangan global seperti perlambatan ekonomi, ketidakpastian geopolitik, dan inflasi global yang masih tinggi diperkirakan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Di sisi lain, tantangan domestik meliputi perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan pengembangan ekonomi inklusif.

3.1.2.7. Tantangan Perekonomian Daerah

Perekonomian global saat ini masih tumbuh dengan sangat rendah, sehingga mempengaruhi perekonomian nasional Bagi daerah, lesunya perekonomian nasional tentu berimbas pada perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat. Kondisi bisnis saat ini masih "*wait and see*" dan belum melakukan investasi baru yang besar karena ketakutan dan resiko akan kondisi ekonomi kedepan. Ini adalah kondisi yang paling ditakutkan dalam sebuah perekonomian, dimana kondisi bisnis lesu untuk berinovasi dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, data statistik yang perlu dipantau dalam sebuah perekonomian selain data pertumbuhan ekonomi dan inflasi adalah data "pembentukan modal tetap bruto" atau PMTB. Data ini menjelaskan berapa investasi baru yang ada didalam suatu wilayah.

Dalam konteks lain, ditengah-tengah lesunya perekonomian maka pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan fiskal daerah secara lebih arif, khususnya dalam mendukung atmosfer bisnis yang baik. Salah satunya

dengan melakukan stimulus fiskal melalui kegiatan-kegiatan yang mampu menggerakan ekonomi masyarakat secara langsung. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah akan mendorong "*multiplier*" ekonomi melalui kegiatan festival dan bazzar bagi usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) secara kontinyu dengan skala yang lebih besar. Namun, pelaksanaannya tentu harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mendorong perekonomian sekaligus membangun "city's *branding*" wilayah tersebut dengan potensi kebudayaan dan kreatifitas yang dimiliki.

Optimesme Pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi tahun 2027 dengan berbagai kebijakan dan peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi dengan memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya yang merupakan modal social dalam mengakselerasi aktifitas ekonomi kumunal disisi lain Pemerintah daerah memberikan kemudahan dalam kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, kedua kebijakan ini dapat disambut dengan positif oleh masyarakat dan pelaku usaha serta dapat bergerak maju sesuai rancangan Pemerintah guna memulihkan ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu kebijakan pemerintah daerah dalam alokasi fiskal dilakukan dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Tiga kebijakan akan dilaksanakan bersamaan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait disamping itu investasi dalam negeri harus terus digalakkan guna menyokong produksi komoditas domestik dan ekspor. Selain itu, menunda membeli barang impor dan mencintai produk domestik dan tidak membeli mata uang asing secara berlebihan karena akan berdampak meningkatkan inflasi.

Kabupaten Soppeng dalam konteks pengembangan ekonomi daerah merupakan proses di mana pemerintah dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakanlapangan pekerjaan dengan melihat potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dikembangkan menjadi produk unggulan. Untuk melihat potensi-potensi apa yang menjadi unggulan dapat dilihat berdasarkan Kabupaten sehingga dapat diketahui produk-produk apa yang menjadi sektor basis dan yang bukan sektor basis, dengan demikian maka Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, sector konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pertambangan dan Penggalian merupakan sector strategis untuk dimaksimalkan dimasa yang akan datang, disisi lain peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Oleh karena itu upaya pemerintah daerah membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam lokal. kabupaten soppeng dengan berbagai potensi-potensi yang ada menyebar di kecamatan seharusnya dapat dikembangkan menjadi produk –produk lain agar memiliki nilai jual yang tinggi. Pada konteks lain penggunaan teknologi menjadi hal strategis dalam memajukan ekonomi daerah, di mana teknologi saat ini mempunyai fungsi untuk memudahkan pekerjaan Manusia. Oleh karena itu, dalam kontek proses produksi, maka perlu adanya penguasaan

tehnologi yang baik sehingga dapat mendorong terjadinya inovasi tehnologi. Inovasi tehnologi tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan penemuan produk produk baru dan cara produksi yang lebih efisien.

3.1.3. Arah Kebijakan dan Target Ekonomi Makro Tahun 2027

Pergerakan ekonomi Indonesia menunjukkan prospek yang baik. Ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun 2026 menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,5% (year-on-year). pertumbuhan ekonomi setinggi itu didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, didorong permintaan terkait perayaan Ramadan dan Lebaran, meskipun demikian, ada kekhawatiran terkait meningkatnya tekanan global akibat konflik geopolitik, termasuk di kawasan Timur Tengah, salah satu langkah yang dilakukan adalah menjaga stabilitas subsidi energi agar gejolak harga global tidak langsung dirasakan masyarakat, disisi lain masa depan ekonomi nasional akan ditopang Kerjasama untuk memperkuat permintaan domestik sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui penguatan sektor swasta dan menjaga daya beli masyarakat, dengan kombinasi belanja pemerintah, stabilitas harga energi, serta konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga, pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun ini akan tetap resilien di tengah ketidakpastian global, pada konteks ini Pemulihan ekonomi Indonesia yang cukup kuat menjadi entry point bahwa Indonesia akan mengambil peran terdepan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, ke depan ekonomi kreatif dapat menjadi solusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas dan berkelanjutan karena mampu mendobrak batas geografis, gender, ras, dan strata ekonomi.

Kondisi perekonomian nasional senantiasa beririsan dengan pada kondisi perekonomian daerah, karena ekonomi daerah diharapkan menjadi penopang yang kuat stabilitas ekonomi nasional, sehingga dengan demikian setiap daerah harus mampu membangun ekonomi daerah yang kuat untuk menjaga stabilitas daerah di masa yang akan datang, pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah tetap berkomitmen untuk membangun kreatif untuk bisa menjadi pilar utama untuk mendobrak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, agar menjadi sektor futuristik, tumbuh lebih cepat, lebih besar, dan maju perkembangan teknologi digital, oleh karena itu pembangunan 2027 pemerintah Kabupaten Soppeng memprioritaskan agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat, inklusif, dan berkelanjutan pada penguatan sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Mendorong nilai tambah produk lokal melalui hilirisasi, pemasaran digital, dan akses pasar, memperkuat ketahanan ekonomi agar tidak rentan terhadap gejolak pasar dan krisis, memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana dasar untuk mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Melalui peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi. Pengembangan infrastruktur pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas/pustu, pasar, dan fasilitas sosial. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan lokal. Menjamin pemerataan akses infrastruktur yang belum terlayani dengan baik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar produktif, sehat, dan berdaya saing. Peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan kerja, literasi

digital, dan pemberdayaan perempuan serta pemuda. Penguatan layanan kesehatan dasar, gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan stunting.

Tahun 2027 diprediksi pembangunan ekonomi akan lebih cepat sehingga dapat akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah, di samping itu penguatan sektor pertanian sebagai penyangga utama perekonomian daerah harus terus dilakukan melalui pertanian berbasis teknologi yang berorientasi pada nilai-nilai lokal daerah. Dengan demikian untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan tahun 2026 maka prioritas pembangunan diarahkan pada :

1) Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi;
2) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah;
3) Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat;
4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana

Berdasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Daerah maka ditetapkan indikator makro pembangunan Kabupaten Soppeng pada tahun 2027 sebagai berikut :

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas hidup manusia merupakan muara dari semua upaya pembangunan. Upaya untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya IPM hingga mencapai 71,39 pada tahun 2024, dan dalam kurun lima tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tabel dibawah ini menggambarkan capaian IPM.

Tabel 3. 8. Capaian IPM Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

No	Indikator Makro	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,99	71,05	71,94	72,76	73,69

Sumber : Badan Pusat Statistik

Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, kenaikan IPM selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kenaikan komponen kesehatan dan pendidikan yang dibarengi dengan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat, dengan demikian kebangkitan ekonomi pada tahun 2027 menjadi momentum strategis untuk peningkatan IPM dengan dukungan program strategis pemerintah daerah yang berkonstribusi pada peningkatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2027 menargetkan IPM pada kisaran 74,75-75,36 poin, sedangkan pemerintah

provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dalam indikator Indeks Modal Manusia mencatat target sebesar 0,547-0,560.

Peningkatan target IPM tersebut dilakukan dengan pendekatan (1) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotif dan preventif, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah; (2) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, akses di semua jenjang pendidikan khususnya perguruan tinggi, percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun, dengan perhatian khusus penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu; dan (3) Upaya di bidang ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

2) Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang /rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial, berikut dapat dilihat kondisi kemiskinan kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir.

Tabel 3. 9. Capaian Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

No	Indikator Makro	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Kemiskinan (%)	7,53	7,49	7,48	6,90	6,65

Sumber : Badan Pusat Statistik

Penurunan tersebut sebagai dampak dari berbagai program kegiatan yang dilakukan pemerintah kabupaten untuk mengintervensi kemiskinan yang ada seperti pemberian bantuan sosial, pemberian bantuan bibit, perbaikan infrastruktur, program pelatihan, dan kegiatan lainnya yang berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Pada tahun 2027 pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan Angka kemiskinan pada kisaran 5,29-6,19%, sedangkan target capaian kemiskinan nasional sebesar 6,0–6,5% dan target pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,44-6,86%.

Untuk mencapai target tersebut maka menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, inflasi yang stabil, meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata menjadi sasaran yang harus dicapai. Selain kondisi ekonomi makro yang membaik, upaya penurunan penduduk miskin dan rentan miskin akibat kesulitan ekonomi harus terus dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan yang tepat. Oleh karena itu untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, dua strategi utama pemerintah melalui penurunan beban

pengeluaran dan peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan terus dipertajam.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang sedang berusaha untuk melakukan kegiatan produksi, pengangguran terbuka erat kaitannya dengan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja yang tersedia, pemerintah kabupaten Soppeng mencatat capaian TPT pada tahun 2024 sebesar 3,32% dan mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 4,01%, berikut capaian TPT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 10. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

No	Indikator Makro	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,92	3,90	4	3,32	4,01

Sumber : Badan Pusat Statistik

Capaian tingkat pengangguran terbuka sebagai keberhasilan dalam upaya penguatan ekonomi menjadi peta jalan untuk bangkit memperbaiki taraf hidup dan pendapatan masyarakat di masa yang akan datang, terciptanya lapangan kerja baru akan membuka kesempatan kerja yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut terkait dengan semakin bertambahnya tenaga kerja yang terserap sehingga mampu mengurangi pengangguran dan memberikan pendapatan sehingga kesejahteraan yang diharapkan mampu terpenuhi, Konsep status pekerjaan dan pengangguran di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Pada tahun 2027 pemerintah kabupaten Soppeng menargetkan TPT pada kisaran 2,67-2,95% sedangkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan TPT sebesar 3,76-4,15% dan secara nasional ditargetkan sebesar 4,30–4,87 %. Bertumbuhnya sektor perdagangan, industry, pariwisata yang berkontribusi terhadap pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat diyakini menjadi pintu masuk dalam menekan TPT, dengan demikian perluasan lapangan kerja melalui upaya perluasan investasi, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM, mendorong digitalisasi transaksi ekonomi, peningkatan keahlian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.

4) Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal didesain untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. Peran APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental dalam upaya menstimulasi perekonomian daerah, peran APBD dirumuskan dengan sangat hati-hati agar dapat optimal mempercepat pemulihan dan

penciptaan lapangan kerja, serta menjadi penyerap risiko (shock absorber) dalam menghadapi tantangan yang saat ini terjadi. Masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki peran strategis dalam pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan dalam kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, kedua kebijakan ini dapat disambut dengan positif oleh masyarakat dan pelaku usaha serta dapat bergerak maju sesuai rancangan Pemerintah guna mengakselerasi memulihkan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng 2025 mencapai 5,07%, dengan capaian tersebut, Pemerintah kabupaten soppeng meyakini memiliki peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun-tahun yang akan datang oleh karena itu dalam mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan maka penguatan ekonomi daerah menjadi kemestian, oleh karena itu pemberdayaan UMKM, penguatan produksi pangan dan pertanian lokal, penyediaan infrsatruktur yang dapat mempermudah akses produksi barang dan jasa masyarakat menjadi perhatian pemerintah kabupaten soppeng, disamping itu menjaga inflasi dalam posisi stabil juga merupakan kunci pergerakan ekonomi daerah untuk bertumbuh, pertanian kabupaten soppeng menjadi support tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga penyediaan sarana prasarana pertanian, penyediaan pasar dan hilirisasi pertanian menjadi kunci pembangunan ekonomi, disamping itu sektor jasa dan pariwisata juga menjadi agenda yang dapat memacu pendapatan ekonomi masyarakat.

Tabel 3. 11. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

No	Indikator Makro	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertumbuhan ekonomi	6,15	6,18	3,33	4,06	4,77

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berbagai usaha pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah dimasa yang akan datang, sehingga pemerintah daerah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,07%, untuk mendukung target tersebut dibutuhkan konsolidasi fiskal yang berkualitas yang disertai reformasi fiskal yang holistik. Di sisi lain, perbaikan ekonomi yang terjadi secara konsisten serta implementasi reformasi perpajakan telah membentuk landasan yang sangat kuat dalam mendukung upaya penyehatan fiskal. Faktor pendukung lainnya adalah penerimaan daerah yang terus meningkat, disisi lain pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027 ditargetkan sebesar 6,3-6,8% sedangkan target pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8-6,5%.

5) PDRB Per Kapita

PDRB per kapita memberikan informasi tentang seberapa besar nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap orang di suatu daerah. Semakin tinggi PDRB per kapita, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, meskipun perlu diingat bahwa ini adalah angka rata-rata dan tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang

sebenarnya, PDRB juga berguna sebagai alat yang dapat menjadikan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi, pada tahun 2025 PDRB perkapita kabupaten Soppeng mencapai pada tabel berikut dapat dilihat pencapaian PDRB perkapita pemerintah Kabupaten Soppeng.

Tabel 3. 12. Capaian PDRB Perkapita Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

No	Indikator Makro	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	PDRB Perkapita	52, 75 juta	58,21 juta	62,58 juta	67,26 juta	72,36 Juta

Sumber : Badan Pusat Statistik

Peningkatan PDRB per kapita memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah berfokus pada faktor-faktor yang relevan, seperti peningkatan kualitas tenaga kerja, investasi, dan infrastruktur, diharapkan PDRB per kapita dapat terus meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Dengan semakin mebaiknya kondisi perekonomian pada tahun 2025 sebagai keberlanjutan untuk pembangunan ekonomi yang diharapkan berdampak pada PDRB Perkapita, sehingga pada tahun 2027 pemerintah kabupaten Soppeng menargetkan PDRB Per Kapita pada kisaran Rp76,37 Juta, sedangkan pemerintah provinsi menargetkan sebesar Rp86,9-92,7 juta sedangkan untuk skala nasional sebesar 5.800-5.840 US $.

6) Gini Rasio

Indeks Gini merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran pengeluaran konsumsi atau variable-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, penurunan gini ratio disubuah daerah menggambarkan besar tidaknya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat di daerah tersebut, dalam konteks Kabupaten Soppeng tabel berikut ini menggambarkan perkembangan gini ratio selama lima tahun terakhir.

Tabel 3. 13. Capaian Gini Ratio Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

No	Indikator Makro	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Gini Ratio	0,406	0,386	0,39	0,371	0,331

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gini ratio dikabupaten Soppeng dipengaruhi pada peningkatan rata-rata pengeluaran kelompok terbawah dimana kelompok masyarakat dengan pendapatan terendah mengalami peningkatan pengeluaran yang lebih cepat dibandingkan kelompok lain disamping itu kebijakan fiskal yang progresif, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui perbaikan Akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, terutama di kelompok berpenghasilan rendah serta program pemberdayaan ekonomi

masyarakat melalui program pelatihan keterampilan, bantuan sosial dapat memberdayakan masyarakat.

Pada tahun 2027 pemerintah kabupaten Soppeng menargetkan rasio gini pada kisaran 0,327-0,329 poin, sedangkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,346-0,349 dan Nasional sebesar 0,362-0,367 poin. Kebijakan untuk menjaga rasio gini agar dapat memenuhi target, terus diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah-bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. Intervensi melalui peningkatan akurasi penargetan; penyaluran bantuan secara cepat, dan responsif kebencanaan. Selanjutnya, penguatan kelembagaan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah.

7) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah rasio jumlah emisi GRK yang dihasilkan dibandingkan dengan aktivitas ekonomi tertentu, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau output energi. Ini merupakan ukuran efisiensi karbon; intensitas yang lebih rendah menunjukkan efisiensi lebih tinggi dan emisi lebih sedikit per unit output. Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sangat penting untuk memitigasi perubahan iklim global, mengurangi dampak pemanasan global, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Intensitas emisi sendiri adalah rasio volume emisi GRK yang dihasilkan per unit aktivitas tertentu, seperti PDB (Produk Domestik Bruto), sehingga penurunannya berarti polusi yang dihasilkan menjadi lebih sedikit meskipun ekonomi terus tumbuh, indikator tersebut merupakan indikator makro yang baru digunakan, sehingga belum memiliki capaian tahun 2025, sedangkan tahun 2027 pemerintah kabupaten Soppeng menargetkan sebesar 32,83%.

8) Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi memiliki peran yang vital dalam pembangunan ekonomi regional. Kabupaten/kota dengan PDRB yang tinggi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi provinsi. Peningkatan PDRB di kabupatenakan secara langsung menaikkan PDRB provinsi, disisi lain dengan Data PDRB akan Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah dimana Kontribusi dari berbagai kabupaten membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah dalam satu provinsi. Capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan kontribusi PDRB Kabupaten Soppeng terhadap Provinsi sebesar 2,31% dan pada tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi sebesar 2,28%.

9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai komposit yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, mencakup Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH digunakan sebagai alat ukur

kinerja pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada kisaran 77,53%.

Indikator makro ekonomi memiliki peran vital dalam mengendalikan perekembangan ekonomi daerah, termasuk membantu memprediksi dan mengelola risiko ekonomi, memandu pengambilan keputusan kebijakan ekonomi, serta memberikan gambaran tentang kesehatan dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu Indikator-indikator ini penting untuk pengambilan keputusan yang terinformasi di berbagai sector yang berfungsi sebagai alat diagnostik dan indikator prediktif, membantu para analis menavigasi lanskap makroekonomi yang kompleks. Berikut ini target indikator Makro tahun 2027.

Tabel 3. 14. Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2027

Indikator	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027		
		RKPD Kab.Soppeng	RKPD Prov. Sul-Sel	RKP Nasional
Indeks Pembangunan Manusia	73,69	74,75-75,36	0,547-0,560 (Indeks Modal Manusia)	0,575 (Indeks Modal Manusia)
Pertumbuhan Ekonomi	4,77	5,07	6,3-6,8	5,8-6,5
Angka Kemiskinan	6,65	5,29-6,19	6,44-6,86	6,0–6,5
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,01	2,67-2,95	3,76 - 4,15	4,30–4,87
Pendapatan Per Kapita	72,36	76,37	86,9 - 92,7	5.800 – 5.840 US$
Gini Ratio	0,331	0,327-0,329	0,346-0,349	0,362–0,367
Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	-	32,83	37,22	39,57
Konstribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi	2,31	2,28	3,2 (Kontribusi PDRB Provinsi)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,23	77,53	83,23	76,84

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang diterjemahkan ke dalam arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah di deskripsikan sebagai berikut

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada tahun 2027, diproyeksikan cukup moderat dan realistis sesuai dengan potensi pendapatan daerah dengan tetap mendorong bertumbuhnya perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng. Potensi pendapatan daerah mulai membaik dan melalui pemulihan ekonomi akan terus berlanjut. Untuk itu, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diproyeksikan bertumbuh lebih pesat dibandingkan dua

komponen lainnya, yakni pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini diyakini sebagai langkah nyata guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, selain memproyeksikan adanya tingkat kepastian pendapatan daerah yang semakin baik pada tahun 2027.

Gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang tetap meningkat meskipun sedikit melambat, PDRB per kapita yang bergerak pelan, IPM yang melambat tapi konsisten mengalami peningkatan, tingkat pengangguran yang terus menurun meskipun bergerak pelan, serta semakin berkurangnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meskipun tidak sepesat periode sebelumnya, merupakan kondisi yang diinginkan pada tahun 2027.

Akan semakin meningkatnya kemampuan masyarakat Kabupaten Soppeng dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Bukan hanya meningkatnya kemampuan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, tetapi juga kewajiban-kewajiban perpajakan lainnya yang akan mendorong peningkatan bagi hasil pajak dan non pajak di Kabupaten Soppeng untuk tahun 2027.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Selain itu juga mempertimbangkan kebijakan pendapatan khususnya Dana Transfer, tidak memperlakukan secara defenitif, sebagai salah satu contoh Dana transfer DAU yang sifatnya Dinamis/tidak pasti. kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi.
- Mendorong pembentukan system pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan.
- Meningkatkan koordinasi, kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah serta meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah.
- Memaksimalkan penerimaan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
- Penyederhanaan system dan prosedur pembayaran pajak dan Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah
- Mendorong upaya peningkatan masyarakat sadar pajak;
- Penguatan koordinasi strategis dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat atas penerimaan dana transfer dan bagi hasil
- Menyempurnakan regulasi perpajakan.

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, dengan terbitnya Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, hadir untuk menjadi panduan bagi pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, dengan demikian maka diharapkan akan berdampak positif terhadap penerimaan daerah di masa yang akan datang, dengan demikian diharapkan secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Kab. Soppeng bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah per jenis pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 15. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023-2027

dalam Rupiah

Rek	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Asumsi pendapatan APBD Pokok 2026	Proyeksi 2027	Kenaikan/Penurunan
4	**Pendapatan**						
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**166.337.709.659,39**	**178.158.515.015,80**	**210.229.690.770,95**	**191.732.498.494,00**	**206.760.761.073,00**	**15.028.262.579,00**
4.1.01	Pajak Daerah	24.938.335.103,00	26.811.741.860,00	44.603.406.420,00	44.337.697.989,00	44.929.091.989,00	591.394.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.535.268.039,00	4.410.246.820,54	141.769.859.242,00	128.490.290.976,00	142.927.159.555,00	14.436.868.579,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.172.783.625,00	16.458.176.699,00	17.385.264.214,00	17.220.306.463,00	17.220.306.463,00	0,00
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	120.691.322.892,39	130.478.349.636,26	6.471.160.894,95	1.684.203.066,00	1.684.203.066,00	0,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**996.260.494.563,24**	**1.011.245.514.285,00**	**976.914.844.335,00**	**741.361.515.797,00**	**743.124.179.476,00**	**1.762.663.679,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	924.615.682.393,00	962.398.539.540,00	918.252.903.864,00	718.653.370.000,00	718.653.370.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	71.644.812.170,24	48.846.974.745,00	58.661.940.471,00	22.708.145.797,00	24.470.809.476,00	1.762.663.679,00
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**129.356.620,00**	**3.714.625,00**	3.826.230.281,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	109.496.570,00					0,00
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	19.860.050,00	3.714.625,00	3.826.230.281,00			0,00
Jumlah Pendapatan		**1.162.727.560.842,63**	**1.189.407.743.925,80**	**1.190.970.765.386,95**	**933.094.014.291,00**	**949.884.940.549,00**	**16.790.926.258,00**

Sumber: BPKPD Kabupaten Soppeng, 2026

Asumsi Pendapatan daerah pada RKPD tahun 2027 sebesar Rp949.884.940.549,00dan APBD tahun 2026 sebesar Rp933.094.014.291,00, atau mengalami peningkatan 1,77%. Akun-akun pendapatan yang disajikan pada tabel di atas di deskripsikan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah tahun 2027 disajikan sebesar Rp206.760.761.073,00meliputi pajak daerah, Retribusi daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, kelompok PAD dideskripsikan sebagai berikut:
   a. Pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pajak daerah pada tahun 2027 proyeksi alokasi sebesar Rp44.929.091.989,00
   b. Retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, Retribusi daerah pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp142.927.159.555,00
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan sumber pendapatan atas investasi yang disertakan oleh pemerintah daerah terhadap lembaga keuangan bank dan BUMD yang pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp17.220.306.463,00Perhitungan alokasi dilakukan secara hati-hati karena ketidakpastian besaran penerimaan di masa yang akan datang, di sisi lain pemerintah daerah tidak melakukan penambahan penyertaan modal baru pada lembaga perbankan Maupun BUMD sehingga kecil kemungkinan terjadi peningkatan pendapatan
   d. Lain-Lain PAD yang Sah dikategorikan kelompok pendapatan yang tidak termasuk pajak dan retribusi daerah, dimana pada tahun 2027 diproyeksi sebesar Rp1.684.203.066,00, pendapatan lain-lain PAD yang sah merupakan komponen pendapatan yang sifatnya insidentil sehingga asumsinya cenderung sangat diperhitungkan sangat hati-hati, pendapatan ini meliputi jasa giro kas daerah, pengembalian kerugian daerah dan pendapatan atas denda pajak dan retribusi daerah.
2. Pendapatan transfer Rp741.361.515.797,00yang meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer antar pemerintah daerah, yang dideskripsikan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2027 yang diproyeksikan sebesar Rp718.653.370.000,00sedangkan pada APBD 2026 dialokasikan sebesar Rp718.653.370.000,00
   b. Pendapatan transfer antar pemerintah daerah tahun 2027 di proyeksikan sebesar Rp22.708.145.797,00 sedangkan pada APBD 2026 dialokasikan sebesar Rp22.708.145.797,00

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2026, selain memperhitungkan kemampuan pendapatan daerah, juga sangat memperhatikan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan, terutama

target asumsi makro ekonomi dan sosial daerah yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kab. Soppeng dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Kab. Soppeng menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2026, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan; belanja jasa kantor listrik, air, telepon/internet; belanja premi asuransi.
2. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
3. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
4. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan standar pelayanan SPM serta pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD.
5. Belanja daerah belum memenuhi standar 30% belanja pegawai diluar alokasi belanja sertifikasi guru
6. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja yang diarahkan misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
7. Penyediaan dana untuk kejadian luar biasa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kegiatan tanggap darurat.

Postur Belanja daerah dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi

  Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

  1) Belanja Pegawai

     Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran

penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundangundangan.

2) Belanja barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi
Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Belanja Modal

  Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. Batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- Belanja Tidak Terduga

  Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun sebelumnya.

- Belanja Transfer

  Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

Struktur belanja pada RKPD tahun 2026 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan s dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 16. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Soppeng

Dalam Rupiah

Rek	URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Alokasi Belanja APBD Pokok 2026	Proyeksi Belanja 2027	Kenaikan Penurunan
5	**Belanja Daerah**						
5.1	**Belanja Operasi**	**853.272.510.149,00**	**900.392.401.124,00**	**876.675.046.784,22**	**782.848.862.477,00**	**809.000.265.414,00**	**26.151.402.937,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	458.970.651.898,00	499.287.055.531,00	524.141.184.087,00	501.523.762.493,00	507.104.838.481,00	5.581.075.988,00
5.1.02	Belanja Barang Jasa	369.453.302.253,00	364.078.157.251,00	339.764.547.497,22	269.479.078.993,00	296.182.284.799,00	26.703.205.806,00
5.1.03	Belanja Bunga	8.489.243.946,00	7.304.965.613,00	6.026.209.199,00	4.768.416.007,00	4.931.456.150,00	163.040.143,00
5.1.04	Belanja Subsidi		0		30.019.000,00		-30.019.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	16.359.312.052,00	29.722.222.729,00	6.743.106.001,00	7.047.585.984,00	781.685.984,00	-6.265.900.000,00
5.1.06	Belanja Bansos						0,00
5.2	**Belanja Modal**	**266.279.421.623,00**	**172.258.181.189,00**	**107.499.355.340,71**	**31.400.971.393,00**	**43.023.954.393,00**	**11.622.983.000,00**
5.2.01	Belanja Modal tanah		905.160,00	1.756.480,00	3.000.000,00		-3.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.190.057.448,00	52.521.730.635,00	42.628.043.384,00	9.693.955.393,00	4.835.079.093,00	-4.858.876.300,00
5.2.03	Belanja Modal gedung dan bangunan	59.844.016.771,00	49.430.277.752,00	32.917.589.121,72	8.756.465.000,00	4.763.000.000,00	-3.993.465.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	147.773.681.404,00	62.022.291.242,00	31.396.203.004,99	12.687.273.000,00	33.425.875.300,00	20.738.602.300,00
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	2.073.466.000,00	3.249.167.300,00	228.350.500,00	260.278.000,00		-260.278.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset lainnya	398.200.000,00	5.033.809.100,00	327.412.850,00			0,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**6.715.707.000,00**	**1.191.258.336,00**	**533.810.000,00**	**1.357.006.742,00**	**1.144.454.138,00**	**-212.552.604,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.715.707.000,00	1.191.258.336,00	533.810.000,00	1.357.006.742,00	1.144.454.138,00	-212.552.604,00
5.4	**Belanja Transfer**	**111.061.884.690,00**	**117.337.110.365,00**	**113.279.242.185,00**	**97.445.765.815,00**	**97.508.192.073,00**	**62.426.258,00**
5.4.01	Belanja Bagi hasil	3.309.161.390,00	3.324.547.344,00	4.958.417.937,00	5.008.302.115,00	5.070.728.373,00	62.426.258,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	107.752.723.300,00	114.012.563.021,00	108.320.824.248,00	92.437.463.700,00	92.437.463.700,00	0,00
Total Belanja		**1.237.329.523.462,00**	**1.191.178.951.014,00**	**1.097.987.454.309,93**	**913.052.606.427,00**	**950.676.866.018,00**	**37.624.259.591,00**

Sumber: BPKPD Kabupaten Soppeng, 2026

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp950.676.866.018,00 belanja tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1) Alokasi Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan estimasi pengeluaran anggaran untuk mendanai kegiatan rutin sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek (dalam satu tahun anggaran). Belanja ini mencakup gaji pegawai, pembelian barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial, yang mengurangi ekuitas dana lancar, Alokasi belanja operasi yang diasumsikan pada tahun 2027 sebesar Rp809.000.265.414,00, yang meliputi

a. Belanja pegawai

belanja pegawai tahun 2027 di proyeksikan sebesar Rp507.104.838.481,00 yang didominasi anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN, persentase belanja pegawai pada tahun 2027 masih diatas batas yang telah ditetapkan, yakni sebesar 43,92% diluar dari belanja sertifikasi guru dan belanja tambahan penghasilan guru yang asumsikan sebesar Rp89.541.397.000,00

b. Belanja barang jasa

Belanja barang jasa tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp296.182.284.799,00 yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah untuk membeli barang habis pakai dan jasa yang mendukung kegiatan operasional pelayanan pemerintahan setiap harinya

c. Belanja bunga

Belanja bunga tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp4.931.456.150,00 yang masing sebesar Rp3.510.622.817,00 dan sebesar Rp1.420.833.333,00 belanja tersebut akan digunakan untuk pembayaran bunga pinjaman PEN oleh pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur yang telah berjalan 5 tahun dan untuk pembayaran bunga atas pinjaman yang akan dilakukan pada tahun 2027 kepada PT Bank Sulselbar.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp781.685.984,00 yang diperuntukkan bagi lembaga sosial kemasyarakatan, tempat ibadah dan kelompok masyarakat lainnya

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap berwujud maupun tak berwujud, yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (di atas 1 tahun), serta menambah nilai kekayaan daerah. Belanja ini tidak ditujukan untuk dijual kembali, melainkan untuk operasional pemerintahan, pelayanan publik, atau pembangunan infrastruktur, belanja modal yang diestimasi pada RKPD 2027 sebesar Rp43.023.954.393,00 yang

diasumsikan pada pengeluaran belanja modal peralatan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja modal Jalan irigasi dan jaringan.

3) Belanja Tak terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah anggaran APBD untuk pengeluaran darurat, mendesak, dan tidak diprediksi yang bersifat insidental (tidak berulang), seperti penanggulangan bencana alam, sosial, atau keperluan mendesak lainnya. Dana ini digunakan atas kebijakan kepala daerah dalam situasi darurat, termasuk pelayanan dasar, dan pada tahun 2027 diasumsikan sebesar Rp1.144.454.138,00

4) Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pemerintah desa yang merupakan bagian dari desentralisasi fiskal dan tidak merupakan pembelian barang/jasa secara langsung. Tujuan utamanya adalah mendukung pembangunan, operasional pemerintah desa, dan pemerataan keuangan antar wilayah, tahun 2027 pemerintah kabupaten Soppeng mengasumsikan belanja tersebut pada RKPD sebesar Rp97.508.192.073,00 yang meliputi asumsi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan masing-masing sebesar Rp5.070.728.373,00 dan sebesar Rp92.437.463.700,00. Objek- objek Belanja Daerah tersebut diatas secara rinci akan membiayai urusan pemerintahan, program/kegiatan pembangunan daerah tahun 2027.

Belanja daerah untuk pembiayaan urusan wajib diantaranya Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial dilakukan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam peningkatan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan wajib berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) di tahun 2027 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 66.273.925.275 atau 7,26% dari total Belanja Daerah (Rp 913.052.606.427) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 17. Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2027

No	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	35.095.319.150	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	50.698.655.700	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	200.000.000	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.763.626.000	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	26.100.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	287.648.240	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
	Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	191.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	135.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	54.600.000	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	89.850.000	
Total Pagu Anggaran			**90.542.299.090**	

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun 2027 telah ditetapkan proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah dengan total Rp913.052.606.427, rincian pagu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 18. Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	NAMA SKPD	PAGU 2027
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	321.793.555.362
2	DINAS KESEHATAN	276.404.377.140
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	47.278.764.654
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.277.909.229
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10.741.205.946
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.241.216.722
7	DINAS SOSIAL	3.087.914.394
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.860.705.334
9	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	5.998.742.103
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.339.604.410
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.328.022.864
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.974.641.915
13	DINAS PERHUBUNGAN	13.561.567.861
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.755.627.629
15	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	6.403.593.459
16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.011.178.323
17	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.502.077.919
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.267.052.092
19	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	4.694.855.123
20	SEKRETARIAT DAERAH	22.387.122.118
21	SEKRETARIAT DPRD	21.998.780.399
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.680.705.649
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	117.181.332.066
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.185.970.887
25	INSPEKTORAT DAERAH	8.536.201.800
26	KECAMATAN LILIRILAU	5.101.903.449
27	KECAMATAN CITTA	1.572.132.488
28	KECAMATAN GANRA	1.716.076.821
29	KECAMATAN DONRI-DONRI	1.564.852.531
30	KECAMATAN MARIORIAWA	5.773.176.846

NO	NAMA SKPD	PAGU 2027
31	KECAMATAN LILIRIAJA	4.242.760.169
32	KECAMATAN LALABATA	9.499.337.516
33	KECAMATAN MARIORIWAWO	4.128.806.458
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.585.094.342
TOTAL PAGU		**950.676.866.018**

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang difisit sehingga harus ditutupi dengan surplus dari pembiayaan netto, sedangkan jika pendapatan lebih besar dari belanja daerah maka terjadi surplus sehingga harus digunakan untuk pengeluaran pembiayaan. Untuk itu pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Selengkapnya realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2023-2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 19. Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng, Tahun 2024-2027

Dalam Rupiah

Rek	URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Alokasi Pembiayaan APBD Pokok 2026	Proyeksi Pembiayaan 2027	Kenaikan Penurunan
6	**Pembiayaan**						
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	124.819.701.374,93	35.183.696.959,56	13.326.505.128,36			-
6.1.02	Pencairan dana Cadangan						-
6.1.03	Hasil penjualan kejayaan daerah yang dipisahkan						-
6.1.04	Penerimaan pinjaman daerah					30.000.000.000,00	(30.000.000.000,00)
6.1.05	Penerimaan kembali pinjaman daerah						-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**124.819.701.374,93**	**35.183.696.959,56**	**13.326.505.128,36**	**-**	**30.000.000.000,00**	**(30.000.000.000,00)**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**						-
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.360.938.576,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	29.208.074.531,00	(9.166.666.667,00)
6.2.03	Penyertaan Modal Daerah						-
6.2.04	Pembentukan Dana Cadangan						-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**13.360.938.576,00**	**20.041.407.864,00**	**20.041.407.864,00**	**20.041.407.864,00**	**29.208.074.531,00**	**(9.166.666.667,00)**
Pembiayaan Netto		**111.458.762.798,93**	**15.142.289.095,56**	**(6.714.902.735,64)**	**(20.041.407.864,00)**	**791.925.469,00**	**(20.833.333.333,00)**

Sumber : BPKPD Kabupaten Soppeng, 2026

Pembiayaan daerah tahun 2027 secara rinci diuraikan sebagai berikut

3.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar Kembali, kebijakan penerimaan pembiayaan untuk tahun 2027 diarahkan untuk penerimaan pinjaman atas rencana pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman kepada PT Bank Sulselbar sebesar Rp30.000.000.000,00 untuk jangka waktu 3 tahun.

3.2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2027 diarahkan pembayaran cicilan pokok utang jangka Panjang dan utang jangka menengah, besaran asumsi yang di proyeksikan atas rencana pembayaran tersebut sebesar Rp29.208.074.531,00 yang meliputi sebesar Rp20.041.407.864 merupakan pembayaran cicilan utang pokok jangka Panjang daerah untuk program pemulihan ekonomi nasional, berdasarkan perjanjian pinjaman nomor PERJ-228/SMI/1221, tanggal 30 desember 2021 dari PT Sarana Multi Infrastruktur dan sebesar Rp9.166.666.667,00 adalah biaya yang disiapkan atas rencana pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman kepada PT Bank Sulselbar.



BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

4.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

"Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan"

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maka disusunlah sasaran dan prioritas pembangunan yang menjadi fokus atau agenda pembangunan bersifat strategis untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Kemudian, untuk mencapai sasaran pembangunan daerah ditetapkanlah skala prioritas pembangunan daerah sebagai cerminan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahap dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Soppeng pada tahun 2027 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, dan program prioritas nasional dalam RKP serta visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas dan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2027; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, (4) melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

RKPD Tahun 2027 ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 yang dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji Bupati yang termuat dalam visi, misi Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, capaian target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di Kabupaten Soppeng. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2027, Kebijakan Pembangunan

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Adapun tema RKP Tahun 2027 yakni ***"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"***. Tema ini menjadi landasan dalam penyusunan APBN dan pelaksanaan pembangunan nasional untuk tahun 2027, dengan prioritas pada kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2027 mengangkat tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". RKP Tahun 2027 merupakan perencanaan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada trisula pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan SDM, dan penurunan kemiskinan.

Gambar 4. 1 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2027

Tema RKP 2027 : "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri		
Produktivitas	***Investasi***	***Industri***
Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, Inovasi	Efesiensi dan Efektivitas Investasi	Industri Nasional
Stimulus untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat	Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	Hilirisasi SDA Strategis
Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola	Inovasi Pembiayaan Pembangunan	Swasembada Pangan, Energi dan Air
Regulasi dan Kelembagaan	Investasi Beroientasi Industri dan Ekspor	

Sumber: Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Bappenas, 2026

Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat sasaran pembangunan yang ingin di capai padad tahun 2027. Secara

keseluruhan, sasaran pembangunan RKP Tahun 2027 dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Trisula Pembangunan. Dengan keterkaitan yang kuat antara sasaran, indikator, dan intervensi kebijakan, pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan secara efektif, terarah, dan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 4. 2 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2027



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 akan mengakomodir dan disinergikan dengan beberapa target pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045.

Untuk mencapai Visi “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter” maka upaya pelaksanaan pembangunan dilakukan berdasarkan Misi pembangunan yang terdiri dari :

1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berahlak, dan berdaya saing;
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan;
3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani;

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Tujuan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi dan misi selama 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Modal Manusia;
2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang adaptif
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
4. Meningkatkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

Selanjutnya, 6 tujuan pembangunan di atas diturunkan menjadi 14 sasaran, yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif;
3. Meningkatnya Kualitas Demokrasi;
4. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan;
5. Meningkatnya kualitas generasi dan kesetaraan gender;
6. Meningkatnya produktivitas Ekonomi dan Swasembada Pangan;
7. Meningkatnya Integrasi ekonomi regional dan global;
8. Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah;
9. Meningkatnya pembangunan perdesaan;
10. Menurunnya angka pengangguran;
11. Meningkatnya akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
12. Terwujudnya birokrasi yang akuntabel, adaptif, dan inovatif;
13. Meningkatnya pengelolaan infrastruktur;
14. Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Tabel 4. 1. Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Target Kinerja Tahun 2027

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2026	TARGET TAHUN	
					2027	2030
Visi : SULAWESI SELATAN MAJU DAN BERKARAKTER						
Misi 1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berakhlak, dan berdaya saing	**T.1. Meningkatnya Kualitas Modal Manusia**	IT.1. Indeks Modal Manusia	Angka	0,53	0,54	0,57
	S. 1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	IS.1.1.1 Usia Harapan Hidup	Tahun	74,06	74,33	75,14
	S. 1.2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	IS.1.2.1 Rata rata lama sekolah	Tahun	9,59-9,60	9,72	10,09-10,11
		IS.1.2.2 Harapan Lama sekolah	Tahun	13,87-13,88	13,94 - 13,96	14,16-14,19
	T.2. Meningkatnya ketahanan daerah dan masyarakat terhadap tantangan pembangunan global	IT.2. Indeks Ketahanan Nasional	Angka	3,09	3,14	3,29
	S. 2.1. Meningkatnya kualitas demokrasi	IS.2.1.1. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Angka	81,65 – 84.91	82.05 – 85.30	83.23 – 86,49
	S. 2,2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan	IS.2.2.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	79,52 – 79,73	79,96 – 80,11	81,27 – 81,26
		IS.2.2.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	56,99–57,11	57,55-57,71	59,24-59,52
	S. 2.3. Meningkatnya perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	IS.2.3.1. Indeks Perlindungan Anak	Angka	61,97-63,48	62,58-64,49	64,41 – 67,51
		IS.2.3.2. Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,98*	57,21*	58,21-59,86
		IS.2.3.3. Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,336-0,331	0,324-0,317	0,289-0,278
Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	**T.3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif**	IT.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,2 -6,5	6,3-6,8	6,3-8,5
		IT.3.2. Rasio Gini	Angka	0,348 -0,358	0,346 -0,356	0,328 - 0,333
	S.3.1. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	IS.3.1.1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	13,61	14,17	15,85
		IS.3.1.2. Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Persen	0,77	0,79	0,87
		IS.3.1.3. Indeks Ketahanan Pangan	Persen	86,01	87	89,97
	IS. 3.2. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global	IS.3.2.1. Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	10,9*	11,4	12,6*
	IS. 3.3. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah	IS. 3.2.2. Tingkat Inflasi (%)	Persen	1,6 – 3,7	1,6 – 3,7	1,6 – 3,7
		IS. 3.3.1. Inklusi Keuangan	Persen	85,03	90,33	95,61
	IS.3.4. Meningkatnya pembangunan perdesaan	IS. 3.4.1. Persentase Desa Mandiri	Persen	34,05	35,25	38,71
	IS.3.5. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	IS. 3.5.1. Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	6,5 – 7,0	6,44 - 6,86	3,48-4,48
		IS. 3.5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,64-4,03	3,49-3,96	3,02-3,76

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2026	TARGET TAHUN	
					2027	2030
Misi 3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani	**I.T. 4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital**	IT.4. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	Nilai	55,66	55,92	56,56
	IS. 4.1. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	IS.4.1.1. Nilai Pilar Infrastruktur ITDN	Nilai	62,12	62,54	63,58
	IS. 4.2. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat	IS.4.2.1. Nilai Pilar Ketrampilan Masyarakat ITDN	Nilai	62,12	62,54	63,58
	T. 5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan responsif	IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	81,86	82	82,80
	S. 5.1.Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	IS.5.1.1. Nilai SAKIP	Angka	70,03	70,20	70,50
	S.5.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.5.2.1. Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,44	4,48	4,59
	S.5.3. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah	IS.5.3.1. Indeks Inovasi Daerah	Angka	61,5	62	65
Misi 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	**I.T. 6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan lingkungan yang berkelanjutan**	IT.6.1. Indeks Wiliamson	Angka	0,54	0,53	0,5
		IT.6.2. Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	33,46	37,22	48,49
	S.6.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur	IS.6.1.1. Indeks Infrastruktur	Angka	88,83	89,33	90,33
	S.6,2. Meningkatya kualitas lingkungan hidup, serta ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	IS.6.2.1. Indeks Risiko Bencana	Poin	134,20-133,12	132,94-130,79	129,17-123,78
		IS.6.2.2. IKLH	Angka	77,81	78,02	78,67

Sumber: - RPJMD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029
- Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Rncangan RKP Tahun 2027 (Target LPE)

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027

RKPD Tahun 2027 merupakan bagian dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045. RKPD Tahun 2027 merupakan tahapan pertama yakni tahun 2025-2029 dalam RPJPD 2025-2045 yang merupakan tahapan penguatan transformasi dalam mencapai berbagai sasaran pokok RPJPD ini. Pada tahapan ini penguatan transformasi dilakukan untuk mencapai Soppeng Yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Agropolitan, serta mewujudkan pencapaian Indonesia Emas 2045.

Tabel 4. 2. Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 pada Tahap Pertama di Tahun 2025-2029

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target Tahap I : 2025-2029
1	Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan individu dan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera	Kesehatan Untuk Semua	1).	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,2
			2).	Kesehatan Ibu dan Anak a). Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	100
				b). Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18
			3).	Penanganan Tuberkulosis: a). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	41,4
				b). Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	86
			4).	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,24
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	5).	a). Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kabupaten untuk	73,04
				i). Literasi Membaca	
				ii). Numerasi	68,32
				b). Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,82
				c). Harapan Lama Sekolah	14,11
			6).	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	79
			7).	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	60,75
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	8).	a). Tingkat Kemiskinan (%)	5,09
				b). Indeks Gini	0,378
			9).	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	38,67

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target Tahap I : 2025-2029
			10).	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	0,65
2	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah penggerak utama dalam agropolitan produktif berwawasan ekonomi hijau	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;	11).	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,64
			12).	Pengembangan Pariwisata	1,74
				a). Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	
				b). Jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara (orang)	282.000
			13).	Jumlah industri ekonomi kreatif di kabupaten	100
			14).	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	100
				a). Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten (%)	
				b). Persentase koperasi sehat di kabupaten	14,12
				c). Return on Aset (ROA) BUMD (%)	-4
				d). NTP (Nilai Tukar Petani) Tanaman Pangan	106,13
				e). Jumlah produksi perikanan	3241,89
			15).	Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten (%)	3,79
			16).	a). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	57,09
				b). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74,69
			17).	Tingkat Penguasaan IPTEK	59,01-65,00
				a). Indeks Inovasi Daerah	
				b). Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD	0,04
		Penerapan Ekonomi Hijau;	18).	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru Kontribusi pilar lingkungan terhadap penerapan ekonomi hijau	
				a). Indeks Ekonomi Hijau	54,38
		Integrasi Ekonomi Regional dan Nasional	19).	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	10,69
			20).	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	44,5
			21).	Net Ekspor Barang dan Jasa	-420,05
3	Terwujudnya Kabupaten Soppeng dengan tata kelola pemerintahan	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;	22).	Indeks Reformasi Hukum	68,5
			23).	Indeks SPBE	3,1
			24).	Indeks Pelayanan Publik	4,25
			25).	a). Indeks Survey Penilaian Integritas	78

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target Tahap I : 2025-2029
	yang berintegritas dan pelayanan publik yang mematuhi standar			b). Indeks Pencegahan Korupsi	85
				c). Indeks Maturitas	3,15
4	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif	Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial;	26).	Persentase penegakan hukum Peraturan Daerah	100
			27).	a). Persentase tindak kriminal yang ditangani	84
			28).	a). Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	25
		Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;	29).	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,26
			30).	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	2,66
			31).	Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	80,25
			32).	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	82,22
5	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah terdepan dalam preservasi kebudayaan berketahanan sosial dan ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;	33).	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	45,00
			34).	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi	100
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;	35).	a). Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	67,51
				b). Indeks Perlindungan Anak	69,2
			36).	Indeks Ketimpangan Gender	0,33
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	37).	Ketahanan Energi, Air dan Pangan	145.197.634
				a). Ketahanan Energi	
				i). Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	
				b). Ketahanan Pangan	11,34
				i). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	
				ii). Indeks Ketahanan Pangan	88,03
				iii). Skor Pola Pangan Harapan	83,5
				c). Ketahanan air	0,38
				i). Kapasitas Air Baku (m3/detik)	
				ii). Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	31,15
6	Terwujudnya Kabupaten		38).	Pengurangan ancaman keanekaragaman hayati	2,16

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target Tahap I : 2025-2029
	Soppeng sebagai daerah tangguh bencana, berketahanan iklim, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan	Lingkungan Hidup Berkualitas		a). Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	
				Pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati	167,03
				b). Indeks Pertanaman (IP) Padi	
				c). Proporsi sawah irigasi	81,28
				d). Jumlah produksi perikanan budidaya	392,07
				e). Angka Konsumsi Ikan (kg/Kapita)	38,74
				Kualitas Lingkungan Hidup	75,07
				a). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
				b). Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	16
			39).	c). Pengelolaan Sampah	30,00
				i). Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	
				ii). Proporsi Rumah Tangga (RT)Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	55
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	40).	Indeks Risiko Bencana	131,20
			41).	Persentase Penurunan Emisi GRK	40,84
7	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah dengan perkembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berimbang	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;	42).	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan	2,65
				a). Proporsi kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi	
				b). Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	85,03
				c). Persentase desa mandiri	12,25
				d). Indeks Layanan Infrastruktur	85,22
8	Terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai daerah berdaya saing tinggi untuk kesinambungan pembangunan	Daya Saing Daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan	43).	Jumlah kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara (*Sister Province/Sister City*)	150
			44).	Indeks Daya Saing Daerah	3,42
9	Terwujudnya kualitas daya saing infrastruktur dan penguatan ekosistem digital	Transformasi Digital	45).	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi arah tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2027 yang termuat di RKPD tahun 2027. Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 dirumuskan untuk mewujudkan Visi dan misi RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029. Visi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 adalah **"Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan"**.

Rumusan visi ini merupakan satu kesatuan dalam menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Soppeng yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan lima tahun. Tiga pokok visi yang terkandung di dalamnya saling terkait sebagai gambaran tentang **kondisi pemerintahan**, **kondisi daerah**, dan **kondisi masyarakat** yang hendak diwujudkan.

Tabel 4. 3. Penjelasan Visi sesuai RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan	*Sehat*	*Sehat* adalah kondisi kabupaten yang sehat dalam arti luas dan holistik. Kondisi sehat yang dimaksud tidak hanya melingkupi sehat fisik yang ditandai dengan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, namun juga sehat lingkungan yang ditandai dengan lingkungan lestari dan terkelola dengan baik, sehat mental dan sosial dimana kehidupan sosial masyarakatnya harmonis dan saling mendukung serta bertumpu pada prinsip hidup setara, sehat ekonomi yang ditandai kemiskinan berkurang dan ekonomi lokal yang tumbuh, sehat pemerintahan ditandai dengan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta sehat infrastruktur dimana infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar mampu mendukung kualitas hidup. Sehat ini akan memberi penguatan dari aspek kualitas yang termuat pada pokok visi Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.
	Maju	*Maju* berbasis Agropolitan merupakan kondisi kabupaten yang mampu mengoptimalkan kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan sektor pertanian yang didukung oleh teknologi yang memadai dan terintegrasi dengan industri pengolahan, distribusi, penyedia sarana produksi, dan jasa penyedia pendukung lainnya secara berkelanjutan. Kondisi maju ini juga dicerminkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat secara merata, sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
	Berdaya Saing	*Berdaya saing* berbasis Agropolitan adalah kondisi yang mencerminkan menguatnya ekonomi yang berakar pada sektor pertanian dan wilayah perdesaan yang terintegrasi dengan wilayah perkotaan, dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, bertumpu pada pilar pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan dan konektivitas, ketentraman dan ketertiban umum yang terjaga, daya tarik investasi yang memadai, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif.

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan;
2. Meningkatkan konektifitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa;
3. Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius;
5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Target dari tujuan dan sasaran tahun 2027 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029, yang menjadi salah satu dasar penyusunan RKPD Tahun 2027 sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4. 4. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)
			Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)
			Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)
		Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)
2	Meningkatkan konektifitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)
			Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)
		Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)	Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)
3	Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)
			Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)
			Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)
4	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)
			Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)
			Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)
			Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)

No	Misi	Tujuan	Sasaran
5	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif	Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)
			Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Adapun target untuk setiap indikator tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2027 berdasarkan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 5. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	
					RPJMD	RKPD
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)		PDRB/kapita (T1.1)	Rp	72.363.000	77.196.093	76.370.000
		Rasio Gini (T1.2)	Nilai	0,331	0,368	0,327-0,329
	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	%	4,77	5,3	5,07
	Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	%	4,01	3	2,67-2,95
	Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)	%	6,65	6	5,29-6,19
Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)		Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	%	11,04	11,5	11,5
	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)	%	11,43	8	12,5
Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)		Indeks Infrastruktur Daerah (T.3.1)	Indeks	72,53 (2024)	80,1	80,1
	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1)	Indeks	2,91	3,42	3,42
	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	%	25,63	31,31	31,31
		Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2)	%	2,68	6,41	6,41

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	
					RPJMD	RKPD
Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)		Indeks Desa (T4)	Nilai	-	79,62 (maju)	79,62 (maju)
	Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Persentase Desa Mandiri (S.4.1)	%	40,82	25,00	44,90
Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)		Nilai daya dukung lingkungan (T5)	Nilai	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui
	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)	Nilai	77,23	79,3	77,53
	Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5.2)	Nilai	157,58	127,21	127,21
	Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	%	Belum Rilis	35,80	32,83
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)		Indeks Pembangunan Manusia (T6)	Nilai	73,69	73,8	74,75-75,36
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Indeks kesehatan (S.6.1)	Nilai	83,4	84,2	84,2
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Indeks Pendidikan (S.6.2)	Nilai	65,86	67,3	67,3
	Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)	Rp	10.929.000	11.980.000	11.980.000
	Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)	Nilai	0	0	0
Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)		Indeks reformasi birokrasi (T7)	Nilai	70,03 (BB)	81 (BB)	81 (BB)
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)	Nilai	79,714	76,50	76,50
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)	Nilai	3,58 (B)	4,15 (A-)	4,15 (A-)
	Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)	Nilai	71,48	86,79	86,79
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4)	Nilai	65,35 (B)	68,75 (B)	68,75 (B)

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027 adalah ***"Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan"***. Tema ini bertujuan untuk mengatasi isu-isu permasalahan di masyarakat dan mendorong pembangunan yang lebih merata dan berdaya saing. Tema tersebut sejalan dengan Visi Sulawesi Selatan untuk menjadi ***"Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter"***. Berdasarkan hal tersebut maka prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 yaitu :

1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi;
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal;
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing;
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan;
6. Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital;
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan;
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027

Prioritas pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029, sasaran pokok RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045, RKP Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 serta visi, misi dan program prioritas Bupati terpilih. Tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 yakni ***"Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa"***. Berdasarkan tema tersebut dirumuskan prioritas pembangunan daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan tahun 2027 maka prioritas pembangunan diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi;

2. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah;
3. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.

Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan, tujuan dan sasaran serta target tahun 2027 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 6. Sinergitas Prioritas, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2027

Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	
						RPJMD	RKPD
1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter;	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)		PDRB/kapita (T1.1)	Rp	72.363.000	77.196.093	76.370.000
			Rasio Gini (T1.2)	Nilai	0,331	0,368	0,327-0,329
		Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	%	4,77	5,3	5,07
		Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	%	4,01	3	2,67-2,95
		Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)	%	6,65	6	5,29-6,19
	Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)		Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	%	11,04	11,5	11,5
		Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)	%	11,43	8	12,5
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)		Indeks Infrastruktur Daerah (T.3.1)	Indeks	72,53 (2024)	80,1	80,1
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1)	Indeks	2,91	3,42	3,42
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	%	25,63	31,31	31,31
		Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2)	%	2,68	6,41	6,41

Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	
						RPJMD	RKPD
		Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Indeks Desa (T4)	Nilai	-	79,62 (maju)	79,62 (maju)
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan;	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)		Persentase Desa Mandiri (S.4.1)	%	40,82	25,00	44,90
		Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Nilai daya dukung lingkungan (T5)	Nilai	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui
		Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)	Nilai	77,23	79,3	77,53
			Indeks risiko bencana (S.5.2)	Nilai	157,58	127,21	127,21
	Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)		% Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	%	Belum Rilis	35,80	32,83
		Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	IPM (T6)	Nilai	73,69	73,8	74,75-75,36
	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)		Indeks kesehatan (S.6.1)	Nilai	83,4	84,2	84,2
		Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks Pendidikan (S.6.2)	Nilai	65,86	67,3	67,3
		Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)	Rp	10.929.000	11.980.000	11.980.000
		Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)	Nilai	0	0	0
3. Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif.	Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)		Indeks reformasi birokrasi (T7)	Nilai	70,03 (BB)	81 (BB)	81 (BB)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)	Nilai	79,714	76,50	76,50

Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	
						RPJMD	RKPD
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)	Nilai	3,58 (B)	4,15 (A-)	4,15 (A-)
		Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)	Nilai	71,48	86,79	86,79
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4)	Nilai	65,35 (B)	68,75 (B)	68,75 (B)

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Tabel 4. 7. Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

No	RPJMD Tahun Pelaksanaan 2027				RKPD Tahun 2027				Ket.
	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**T1** Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	PDRB/kapita (T1.1)	Rp	77.196.093	**T1** Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	PDRB/kapita (T1.1)	Rp	76.370.000	
		Rasio Gini (T1.2)	Nilai	0,368		Rasio Gini (T1.2)	Nilai	0,327-0,329	
	S1 1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	Nilai	5,3	**S1 1**. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	Nilai	5,07	
	S1 2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	%	3	**S1 2**. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	%	2,67-2,95	
	S1 3. Berkurangnya penduduk miskin	Angka kemiskinan (S1.3)	%	6	**S1 3**. Berkurangnya penduduk miskin	Angka kemiskinan (S1.3)	%	5,29-6,19	
2	**T2** Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan	Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	%	11,5	**T2** Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan	Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	%	11,5	
	S2 1. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)	%	8	**S2 1**. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)	%	12,5	
3	**T3** Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah (T.3.1)	Indeks	80,1	**T3** Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah (T.3.1)	Indeks	80,1	
	S3 1. Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S3.1.)	Nilai	3,42	**S3 1**. Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S3.1.)	Nilai	3,42	
	S3 2. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Persentase Rumah tangga yang mengakses	%	31,31	**S3 2**. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	%	31,31	

No	RPJMD Tahun Pelaksanaan 2027				RKPD Tahun 2027				Ket.
	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
		air minum aman (S.3.2.1)							
		Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2.)	%	6,41		Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2.)	%	6,41	
4	**T4** Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan(T4)	Indeks Desa (T4)	Indeks	79,62 (maju)	**T4** Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan(T4)	Indeks Desa (T4)	Indeks	79,62 (maju)	
	S4 1. Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (S.4.1)	%	25,00	**S4 1**. Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (S.4.1)	%	44,90	
5	**T5** Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana	Nilai daya dukung lingkungan (T5)	Nilai	Belum terlampaui	**T5** Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana	Nilai daya dukung lingkungan (T5)	Nilai	Belum terlampaui	
	S5 1. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)	Indeks	79,3	**S5 1**. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)	Indeks	77,53	
	S5 2. Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5.2)	Indeks	127,21	**S5 2**. Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5.2)	Indeks	127,21	
	S5 3. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	%	35,80	**S5 3**. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	%	32,83	
6	**T6** Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat	IPM (T6)	Indeks	73,8	**T6** Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat	IPM (T6)	Indeks	74,75-75,36	
	S6 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan (S.6.1)	Indeks	84,2	**S6 1**. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan (S.6.1)	Indeks	84,2	

No	RPJMD Tahun Pelaksanaan 2027				RKPD Tahun 2027				Ket.
	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
	S6 2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (S.6.2)	Indeks	67,3	**S6 2**. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (S.6.2)	Indeks	67,3	
	S6 3. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita (S.6.3)	Rp	11.980.000	**S6 3**. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita (S.6.3)	Rp	11.980.000	
	S6 4. Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama	Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)	Kasus	0	**S6 4**. Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama	Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)	Kasus	0	
7	**T7** Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif	Indeks reformasi birokrasi (T7)	Indeks	81 (BB)	**T7** Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif	Indeks reformasi birokrasi (T7)	Indeks	81 (BB)	
	S7 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)	Indeks	76,50	**S7 1**. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)	Indeks	76,50	
	S7 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks	4,15 (A-)	**S7 2**. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks	4,15 (A-)	
	S7 3. Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCP) (S.7.3)	Indeks	86,79	**S7 3**. Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCP) (S.7.3)	Indeks	86,79	
	S7 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan	Nilai SAKIP (S.7.4)	Nilai	68,75 (B)	**S7 4**. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan	Nilai SAKIP (S.7.4)	Nilai	68,75 (B)	

Prioritas pembangunan daerah tahun 2027 menjadi fokus dalam pembangunan, hal tersebut dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah. Adapun sinkronisasi permasalahan, isu strategis daerah serta prioritas pembangunan daerah tahun 2027 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 8. Hubungan Permasalahan Pembangunan daerah dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan Daerah
Struktur Ekonomi Daerah Belum Kuat dan Berdaya Saing	Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah
			Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha
Tingkat Kemiskinan dan Kerentanan Sosial	Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Sosial		Berkurangnya penduduk miskin
Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan Ketahanan Pangan Daerah		Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan
Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Merata	Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi;	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah
			Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman
Kualitas Sumber Daya Manusia Belum Optimal	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
			Meningkatnya daya beli masyarakat
			Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup
			Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana
			Terwujudnya pembangunan rendah karbon
Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Pembangunan Desa dan Kelembagaan Lokal yang Belum Optimal	Penguatan Desa dan Penguatan Kelembagaan Lokal		Meningkatnya kemandirian desa
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik Berkualitas		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
			Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan

4.2.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2027

4.2.4.1. Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027

Perumusan arah kebijakan dan strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk memastikan keterkaitan yang jelas

antara tujuan dan sasaran pembangunan dengan langkah implementasinya. Adapun arah kebijakan dan strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan mengacu kepada RPJMD Tahun 2025-2029, Rancangan RKP Tahun 2027, serta penguatan melalui percepatan pembangunan prioritas infrastruktur yang dilakukan melalui pelaksanaan program secara *multiyears* dan berkelanjutan, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 9. Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027

Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing	Peningkatan layanan Pendidikan dan Kesehatan yang berbasis akhlak dan kompentensi	Meningkatnya Kualitas Modal Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	Penguatan layanan kesehatan yang terstandarisasi, terintegrasi dan responsive melalui peningkatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting dan gizi buruk, pengendalian penyakit menular dan tidak menular berbasis layanan primer pada wilayah prioritas, serta penguatan sistem rujukan regional, serta integrasi sistem surveilans dan rekam medis elektronik yang terhubung dengan data kependudukan dan perlindungan sosial untuk meningkatkan akurasi intervensi promotif dan preventif.	Penguatan sistem rujukan regional melalui lanjutan pembangunan rumah sakit regional dengan skema tahun jamak (multiyear contact) serta peningkatan kapasitas dan mutu rumah sakit Provinsi
					Penanganan multiyears sarana dan prasarana kesehatan
					Penguatan jejaring pelayanan kesehatan antarwilayah untuk meningkatkan akses dan kesinambungan layanan, serta peningkatan layanan Kesehatan ibu dan anak;
					Intervensi kesehatan pada wilayah prioritas stunting, gizi buruk dan penyakit melalui integrasi layanan primer dan rujukan, termasuk percepatan penurunan stunting dan fasilitasi program cek kesehatan gratis
					Pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan akses
					Pemenuhan dan Redistribusi tenaga kesehatan berbasis pemetaan spasial guna meningkatkan pemerataan layanan
					Penerapan sistem surveilans dan rekam medis elektronik terintegrasi untuk mendukung efektivitas intervensi promotif dan preventif
					Penguatan pembiayaan dan jaminan Kesehatan Nasional melalui peningkatan kepesertaan aktif dan kepatuhan pembayaran iuran (cost sharing dengan kabupaten/kota);
					Pemenuhan gizi Masyarakat melalui Dukungan program pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa dan santri termasuk penguatan ekosistem pendukungnya.
					Perluasan deteksi dini, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria, kusta, zoonosis dan lain lain) dan tidak menular (Jantung, Stroke, Diabetes Melitus dan lain lain), peningkatan imunisasi, serta peningkatan layanan kesehatan jiwa
					Peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan untuk mendukung layanan yang berkualitas
					Penguatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan
					Perluasan cakupan pelayanan kesehatan yang inklusif, responsif gender, ramah disabilitas, dan bebas diskiriminasi bagi seluruh lapisan Masyarakat khusunya Perempuan, remaja, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan di wilayah terpencil dan sulit akses.
					Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi sepanjang siklus hidup, termasuk penguatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif, inklusif, repsonsif gender, ramah remaja, dan aksesibel bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya.
					Peningkatan layanan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial bagi anak, remaja, usia produktif, dan kelompok rentan
	Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi		Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	Peningkatan mutu dan pemerataan hasil belajar serta penguatan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Selain itu, didorong pemanfaatan teknologi pembelajaran, peningkatan literasi dan numerasi, serta pengembangan budaya baca untuk mendukung kualitas SDM yang berdaya saing.	Perluasan akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk wilayah terpencil dan kepulauan, melalui pemanfaatan teknologi digital, smart school, serta dukungan pendidikan jarak jauh
					Peningkatan kualitas dan kapasitas pendidik melalui program penguatan kompetensi guru (Program Guru Hebat), peningkatan kesejahteraan, serta penguatan peran tenaga kependidikan
					Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang responsif terhadap keragaman peserta didik
					Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan revitalisasi sekolah, termasuk pengembangan sekolah unggulan, sekolah rakyat, serta fasilitas pendidikan berbasis kebutuhan wilayah
					Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung layanan pendidikan inklusif

Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5	6
					Penguatan akses dan keberlanjutan pendidikan melalui pemberian beasiswa berprestasi, bantuan pendidikan bagi kelompok rentan, serta penanganan anak tidak sekolah secara kolaboratif
					Penguatan pendidikan vokasi melalui pengembangan sekolah lapang kejuruan berbasis potensi wilayah, bengkel praktik, dan pusat laboratorium vokasi (vocational creative hub), serta penerapan pembelajaran SMK berbasis industry pada sektor strategis, kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industry serta peningkatan kualitas SDM untuk mendukung sektor unggulan daerah
					Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui pengembangan digital classroom, sistem pembelajaran berbasis industri, serta inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan
					Intervensi peningkatan mutu pada sekolah berkinerja rendah berbasis asesmen literasi dan numerasi, termasuk prioritas rehabilitasi sekolah rusak dan pembangunan ruang kelas baru
					Penguatan pendidikan karakter, keagamaan, dan pengembangan talenta melalui program sekolah prestasi serta pendampingan intensif peningkatan kapasitas siswa
					Pengembangan ekosistem pendidikan yang kompetitif, inklusif, dan berbasis potensi daerah
					Pengembangan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif, termasuk integrasi layanan PAUD dengan Posyandu untuk mendukung stimulasi perkembangan anak sejak dini
	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial, kemasyarakatan, demokrasi dan substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memerhatikan pellibatan kelompok marjinal	Meningkatnya ketahanan daerah dan masyarakat terhadap tantangan pembangunan global	Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Penguatan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, peningkatan literasi politik dan ketahanan sosial untuk menjaga stabilitas daerah; menguatkan kolaborasi dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan konflik dan kekerasan serta pengawasan ketertiban umum secara partisipatif;
					Penguatan harmonisasi dan kolaborasi dengan Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
					Penguatan wawasan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dikalangan aparatur sipil negara dan generasi muda
					Peningkatan Literasi Politik Masyarakat guna memperkuat partisipasi publik, pendidikan demokrasi, dan kesadaran politik yang cerdas, inklusif, dan bertanggung jawab
					Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan melalui pengembangan mekanisme partisipatif berbasis digital yang inklusif dan transparan
					Penguatan kelembagaan politik yang akuntabel dan transparan melalui optimalisasi partisipasi publik dan pengawasan masyarakat
					Penyusunan dan penetapan peraturan daerah yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, serta penegakan hukum yang adil dan transparan
	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda		Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan	Penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan layanan keagamaan yang inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan nilai-nilai moral dan karakter bangsa, serta pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal, penguatan ekosistem budaya, serta pengembangan kehidupan budaya yang harmonis dan adaptif dengan dukungan pemanfaatan teknologi	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan melalui pemberian hibah dan pembangunan fasilitas ibadah untuk mendukung layanan keagamaan yang representatif
					Penguatan fungsi rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat melalui optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas keagamaan
					Pengembangan program pembinaan karakter dan kepemimpinan berbasis nilai keagamaan, seperti kegiatan kepemimpinan dan pembinaan generasi muda
					Peningkatan peran serta tokoh agama dalam pembangunan sosial melalui pelibatan ulama dalam pembinaan masyarakat dan penguatan nilai moral
					Penguatan kegiatan keagamaan yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong kerukunan umat beragama
					Pengembangan ekosistem sosial-keagamaan yang mendukung pembentukan karakter masyarakat yang berakhlak, toleran, dan berintegritas

Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5	6
	yang inklusif dengan memperhatikan kelompok marjinal				Pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan situs budaya sebagai media edukasi, penguatan identitas daerah, serta penguatan nilai-nilai kearifan local
					Revitalisasi dan digitalisasi situs budaya untuk meningkatkan akses, promosi, dan pemanfaatan dalam mendukung pembangunan karakter dan kebudayaan
					Pengintegrasian pendidikan agama dan karakter dalam kurikulum di semua jenjang Pendidikan, baik formal, non formal, maupun informal
					Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme
					Penguatan dan pemberdayaan lembaga keagamaan dan sosial budaya
					Pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter religius yang moderat dan toleran
					Pengintegrasian nilai-nilai budaya local dalam pendidikan karakter termasuk muatan local dalam kurikulum sekolah
					Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, rural heritage, pemanfaatan cagar budaya termasuk di kawasan karst dan revitalisasi budaya local dan budaya bahari, serta pengembangan teknologi tradisional berbasis budaya local
	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substantial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal		Meningkatnya perlindungan anak, kualitas generasi muda dan kesetaraan gender	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak secara terpadu, peningkatan kualitas keluarga dan generasi muda, serta peningkatan kesetaraan gender, disertai pemberdayaan dan perlindungan kelompok rentan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak melalui integrasi data lintas sektor yang akurat, responsif, dan berkelanjutan, disertai peningkatan kualitas layanan pencegahan, pengaduan, pendampingan, rehabilitasi, dan perlindungan korban secara terpadu dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga nonpemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, serta masyarakat.
					Peningkatan kualitas keluarga melalui penguatan peran pengasuhan, edukasi, dan ketahanan keluarga
					Pengembangan kapasitas generasi muda melalui peningkatan partisipasi, keterampilan, kewirausahaan, dan kepemimpinan pemuda serta pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi
					Pelembagaan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah
					Penguatan pendataan dan perencanaan pembangunan berbasis data penyandang disabilitas yang terintegrasi
					Peningkatan aksesibilitas sarana, prasarana, layanan publik, dan lingkungan yang ramah disabilitas
					Peningkatan akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan perlindungan sosial
					Penguatan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penyandang disabilitas melalui pengembangan UMKM dan ekonomi produktif
					Penguatan pelindungan hak, partisipasi, dan akses keadilan bagi penyandang disabilitas
					Pemberdayaan perempuan, disabilitas, lansia, dan kelompok rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan, kesempatan ekonomi, dan perlindungan sosial serta dalam pengambilan Keputusan dan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
					Penguatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi secara terpadu dan berkelanjutan
					Penguatan pelatihan dan pembinaan atlet yang terstruktur dan berkelanjutan, serta pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi
					Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas
					Fasilitasi pelaksanaan event-event olahraga prestasi dan olahraga Masyarakat berskala regional dan nasional
					Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual bagi generasi muda
					Pembudayaan olahraga masyarakat sebagai bagian dari perilaku hidup sehat

Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5	6
	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Meningkatnyaper tumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya produktivitas Ekonomi dan Swasembada Pangan	Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan berbasis potensi unggulan yang didukung penguatan infrastruktur produksi dan sumber daya air, peningkatan sarana produksi, pengamanan cadangan pangan strategis serta penguatan transformasi ekonomi hijau dan biru	Penguatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi dengan lanjutan MYC pembangunan dan rehabilitasi 58.000 ha daerah irigasi provinsi, pembangunan embung dan bendungan, serta pemanfaatan sumur bor
					Penanganan multiyears sarana dan prasarana pertanian
					Penanganan multiyears penataan kawasan publik dan RTH dan kawasan wisata
					Penyediaan sarana produksi, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan kemandirian benih (mandiri benih)
					Dukungan sarana produksi dan bantuan bagi nelayan
					Optimalisasi produksi dan pengamanan cadangan pangan strategis
					Perhutanan sosial, penghijauan lahan kritis, penguatan pengawasan kelautan, serta pengembangan energi terbarukan
					Pemanfaatan aset daerah sebagai ruang usaha, pengembangan spot UMKM, serta fasilitasi alat usaha dan kemasan
					Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan penguatan destinasi prioritas dan kerja sama pengembangan akomodasi dan fasilitas pendukung
					Optimalisasi pemanfaatan lahan dan aset daerah untuk kegiatan ekonomi produktif
					Pengembangan sistem budidaya pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), kehutanan, dan perikanan secara berkelanjutan;
					Pengembangan Kawasan sentra garam
					Pengembangan sentra tanaman pangan, holtikultura, Perkebunan, dan perikanan berdasarkan komoditas unggulan dan berorientasi ekspor
					Peningkatan nilai tambah dan akses pasar hasil perikanan dan kelautan
					Pengembangan dan penguatan kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi serta rantai pasok ekspor produk perikanan
					Peningkatan populasi dan produksi ternak dan pengembangan kawasan peternakan serta pengembangan kemitraan
					Optimalisasi pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis
					Peningkatan fasilitasi, standarisasi, sertifikat dan kualitas produk koperasi, IKM, dan UMKM
					Mendukung pembentukan Koperasi desa/ Kelurahan Merah Putih di seluruh Kabupaten/ Kota
					Mendorong dan mengembangkan alternatif pembiayaan bagi Koperasi, IKM dan UMKM;
					Peningkatan pengawasan barang beredar, barang yang dilarang beredar, dan barang yang diatur tata niaganya;
					Fasilitasi pengembangan kawasan industri prioritas nasional yaitu Kawasan Industri Takalar, Kawasan Industri Bantaeng, dan Kawasan Industri Hualy Luwu Timur serta pengembangan kawasan industry prioritas provinsi yaitu Kawasan industri Luwu dan Kawasan Industri Bone;
					Peningkatan kualitas sumber daya dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif;
					Pengembangan ketersediaan pangan akuatik, pangan hewani, pangan lokal dan pangan nabati serta penganekaragaman konsumsi pangan;
					Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industry, termasuk hilirisasi industry berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya;
					Peningkatan kapasitas dan kemandirian UMKM termasuk kelompok usaha perhutanan social (KUPS) dan koperasi berbasis penerapan ekonomi sirkuler;
					Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam potensial yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya lokal keberlanjutan

Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5	6
					Peningkatan fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan
					Peningkatan pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan
					Peningkatan nilai tambah dan hilirisasi industry berbasis sumber daya alam
					Penguatan jaringan pasar produk pertanian
					Optimalisasi aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan rata- rata lama menginap
					Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang terintegrasi antar moda termasuk pengembangan seaplane untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas serta layanan medis darurat;
					Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism)
					Mendorong program reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja., terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri
					Penguatan pembangunan ekosistem ekonomi biru pada satuan kerja pemerintah provinsi maupun kabupaten-kota, melalui penguatan sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat sektor ekonomi, konservasi dan tata kelola yang efisien
					penguatan pondasi pendidikan lingkungan, ekonomi berbasis sumberdaya perikanan, perencanaan sertifikasi budidaya, perencanaan tata ruang digital mendukung konservasi, penyiapan regulasi, dan khusus pada daerah non pesisir melalui penyiapan infrastruktur;
					Hilirisasi komoditas unggulan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, pertanian dan perkebunan) untuk meningkatkan nilai tambah produk sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar pada PDRB Daerah
					Peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta protein hewani untuk mendukung ketahanan pangan daerah
					Penguatan pengembangan kawasan peternakan berbasis potensi wilayah dan kemitraan masyarakat
					Peningkatan akses peternak terhadap lahan, bibit unggul, teknologi, pembiayaan, dan layanan kesehatan hewan
					Penguatan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas peternak dalam pengembangan usaha peternakan
					Pengembangan sistem pembibitan dan perbibitan ternak unggul untuk mendukung keberlanjutan produksi peternakan daerah
	Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Meningkatnya Integrasi ekonomi regional dan global	Penguatan ekosistem investasi dan pengembangan kawasan strategis guna meningkatkan daya saing komoditas berorientasi ekspor serta memperkuat kerja sama antar daerah, antarwilayah, dan internasional, disertai peningkatan perdagangan domestik dan antarwilayah, penguatan promosi perdagangan dan investasi, peningkatan partisipasi dalam rantai nilai dan	Peningkatan kualitas dan volume ekspor komoditas unggulan;
					Penyederhanaan perizinan dan peningkatan kemudahan berusaha
					Pengembangan kolaborasi dan penguatan jaringan dengan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas produk unggulan daerah bernilai ekspor;
					Pengembangan pemanfaatan teknologidan efisiensi rantai distribusi produk komoditas unggulan daerah;
					Perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global dengan aktivitas pemasaran melalui media digital dan fisik
					Penguatan kerja sama antar daerah, antarwilayah, dan internasional untuk memperluas akses pasar dan investasi
					Penguatan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan swasta dalam pengembangan infrastruktur logistik wilayah guna mendukung peningkatan nilai tambah produk;

Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5	6
				rantai pasok regional maupun global, serta pengembangan aglomerasi industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Peningkatan minat pelaku usaha yang berorientasi ekspor untuk berpartisipasi dalam pameran dagang regional, nasional dan internasional;
					Pengembangan inovasi energi terbarukan
					Optimalisasi kawasan strategis dan kawasan industri dengan menyediakan fasilitas lengkap untuk menarik investasi besar
					Peningkatan cadangan dan produktivitas energi termasuk dukungan terhadap North Hub Development Project Selat Makassar
					Penguatan industry transportasi laut, terutama di Kota Makassar
					Dukungan terhadap pengembangan kawasan industry Takalar, dan kawasan industry Bantaeng serta kawasan hilirisasi nikel di smelter terintegrasi tambang Sorowako;
					Peningkatan promosi investasi internasional ke negara mitra potensial
	Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah	Optimalisasi pendapatan dan kualitas belanja daerah, penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, pengendalian inflasi, serta peningkatan daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, yang didukung oleh pembiayaan inovatif dan sinergi fiskal pusat dan daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah berbasis digital serta penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak
					Peningkatan kualitas belanja daerah yang produktif, efisien, dan berorientasi pada prioritas pembangunan, serta penguatan kinerja BUMD dan BLUD provinsi
					Fasilitasi pengembangan pembiayaan inovatif daerah melalui skema green financing, blue financing, dan kerja sama pembiayaan pembangunan dengan berbagai pihak
					Penguatan peran provinsi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui pembinaan, fasilitasi, dan peningkatan literasi
					Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah
					Fasilitasi pengembangan industri halal dan UMKM melalui dukungan sertifikasi halal, promosi, serta penguatan rantai nilai halal
					Penguatan koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan sinergi dengan kabupaten/kota
					Penyederhanaan layanan perizinan berbasis digital, promosi investasi, serta fasilitasi proyek strategis daerah
					Penguatan sistem informasi dan digitalisasi potensi investasi daerah untuk meningkatkan transparansi dan daya tarik investasi
					penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis kewenangan provinsi
					Penguatan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan sektor swasta dalam pengembangan ekonomi regional
					Peningkatan sinergi fiskal antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan		Meningkatnya pembangunan Perdesaan	Penguatan tata kelola dan kelembagaan desa, peningkatan infrastruktur dan konektivitas, serta pengembangan kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. kemudian peningkatan kemandirian desa melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan kawasan prioritas	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintahan desa serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa, termasuk Posyandu, dalam pemenuhan layanan dasar
					Penanganan multiyears infrastruktur pedesaan
					Fasilitasi pembangunan dan peningkatan konektivitas desa melalui dukungan pembangunan jalan desa serta infrastruktur dasar perdesaan untuk memperkuat aksesibilitas dan keterhubungan desa-kota
					Peningkatan kualitas infrastruktur sosial ekonomi desa melalui program bantuan apresiasi desa untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar
					Fasilitasi pengembangan potensi ekonomi desa untuk penciptaan lapangan kerja, termasuk dukungan terhadap pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5	6
	ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan			dan transmigrasi, serta penguatan ketahanan sosial dan kualitas lingkungan secara berkelanjutan	Fasilitasi pengembangan kerja sama desa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan, termasuk dukungan terhadap pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
					Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan Lembaga kemasyarakatan desa
					Fasilitasi peningkatan konektifitas desa-kota, ketahanan sosial dan kualitas lingkungan perdesaan
					Mendorong optimalisasi penggunaan dana desa yang tepat sasaran, transparan, dan partisipatif untuk mendukung prioritas pembangunan desa
					Peningkatan pemerataan akses minum aman, sanitasi layak, dan pengelolaan air limbah yang inklusif , aman, terjangkau, dan aksesibel bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya wikayah terpencil, kepulauan, kawasan miskin, dan kelompok rentan.
					Pengembangan, peningkatan serta pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan perdesaan termasuk dukungan peningkatan kawasan perdesaan prioritas, kawasan transmigrasi dan kawasan pulau pulau kecil serta pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya
					Pengembangan transportasi local berbasis kebutuhan karakteristik kota kecil;
					Pelibatan Posyandu dalam mengidentifikasi penyediaan rumah layak huni serta mengedukasi masyarakat mengenai lingkungan sehat dan pemanfaatan pekarangan untuk pangan sehat.
	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Perluasan perlindungan sosial yang adaptif dan terintegrasi berbasis data, peningkatan pemberdayaan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat melalui penguatan usaha produktif dan sektor unggulan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja secara inklusif dan berkelanjutan	Penguatan basis data kemiskinan dan ketenagakerjaan melalui pemutakhiran data terpadu untuk meningkatkan ketepatan sasaran intervensi
					Penanganan multiyears kemiskinan melalui bantuan rumah dan bantuan usaha
					Penguatan intervensi penanganan kemiskinan terintegrasi berbasis rumah tangga melalui penyediaan rumah layak huni, pengembangan perumahan, dan dukungan utilitas dasar
					Pengembangan usaha ekonomi berbasis rumah tangga (home-based economy) untuk meningkatkan pendapatan keluarga
					Peningkatan perlindungan sosial melalui bantuan sosial, beasiswa, layanan kesehatan gratis, serta dukungan program nasional (Sekolah Rakyat, MBG)
					Penguatan perlindungan dan pendampingan kelompok rentan serta penanganan darurat bencana secara responsif
					Perluasan akses bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan
					Pengembangan ketahanan ekonomi keluarga melalui program pekarangan lestari dan dukungan sektor perikanan (nelayan)
					Peningkatan akses layanan dasar termasuk energi melalui fasilitasi sambungan listrik bagi masyarakat miskin
					Penguatan intervensi pengentasan kemiskinan secara terpadu berbasis rumah tangga dengan dukungan perumahan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial bagi kelompok rentan
					Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif berbasis rumah tangga, ruang usaha dari rumah, serta dukungan sektor perikanan, UMKM, dan ekonomi lokal
					Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui fasilitasi pendidikan, beasiswa, serta program reskilling dan upskilling yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja
					Penguatan layanan ketenagakerjaan melalui sistem informasi yang terintegrasi, peningkatan pengawasan perlindungan tenaga kerja, serta fasilitasi penyerapan tenaga kerja
					Pengembangan kewirausahaan melalui program inkubasi, akses permodalan, dan penguatan pemasaran berbasis digital
					Peningkatan penciptaan lapangan kerja produktif melalui pengembangan sektor unggulan daerah dan investasi

Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5	6
					Penguatan kesempatan kerja yang inklusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan kelompok rentan lainnya
					Pengembangan ekosistem ketenagakerjaan yang ramah terhadap keberagaman, kesetaraan kesempatan, dan non-diskriminasi
					Fasilitasi kemitraan antara dunia usaha, industri, dan masyarakat lokal untuk menciptakan lapangan kerja baru
					Pengembangan program padat karya produktif untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
					Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui penguatan kewirausahaan dan akses terhadap pekerjaan formal
					Penguatan koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah secara terpadu dan berkelanjutan
					Peningkatan Program pengentasan kemiskinan dan pengembangan sektor pertanian dan kehutanan secara Multiyears dan berkelanjutan seperti Penanganan RTLH, Pemberian Bantuan Beasiswa, serta peningkatan sarana prasarana pertanian dan rehabilitasi hutan dan lahan
	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital	Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Penguatan fasilitasi perluasan dan pemerataan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah, penguatan regulasi dan tatakelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan mendorong kemitraan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur TIK	Fasilitasi penyediaan jaringan seluler khususnya daerah yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara wilayah daratan dan kepulauan, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan
					Fasilitasi penerapan use case smart farming dan teknologi baru di sektor bisnis, khususnya di kawasan aglomerasi Mamminasata
					Fasilitasi pemberdayaan startup lokal
					Fasilitasi peningkatan adopsi teknologi digital di sektor pertanian dan perdagangan, dapat meliputi kegiatan mendorong pelaku usaha lokal ke platform e-commerce hingga peningkatan adopsi pembayaran digital bagi pelaku usaha lokal
					Fasilitasi pengembangan jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok
					Mendorong penerapan kebijakan untuk mempermudah izin penggelaran jaringan infrastruktur telekomunikasi, seperti kebijakan right of way oleh pemerintah daerah
					Mendorong pengembangan jaringan 5G di kawasan prioritas, seperti Mamminasata melalui kerja sama dengan operator seluler
					Mendorong ketersediaan akses internet di sekolah-sekolah untuk mendukung proses belajar mengajar dan akses konten pembelajaran online dan platform interaktif.
					Perluasan penyediaan akses internet gratis (Wi-Fi) di fasilitas publik/umum seperti di kantor pemerintahan, taman, perpustakaan, rumah sakit, hingga balai desa untuk memastikan akses internet yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat.
	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital		Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat	Peningkatan literasi dan ketrampilan digital masyarakat, pengintegrasian Pendidikan digital dalam kurikulum formal dan non formal, peningkatan kompetensi digital tenaga kerja dan ASN, serta menguatkan ekosistem ekonomi digital	Peningkatan Literasi Digital Terpadu meliputi kemampuan teknis (mengoperasikan perangkat dan aplikasi), literasi informasi dan media (memverifikasi informasi, menghindari hoaks), keamanan digital (melindungi data, privasi, identitas digital), etika digital (sopan santun, jejak digital), dan kewargaan digital (partisipasi aktif dan bertanggung jawab di ruang digital)
					Pengintegrasian pendidikan digital dalam kurikulum formal dan non formal untuk mendukung kebutuhan talenta digital di industri dan dunia usaha
					Mendorong penguasaan keterampilan digital dasar hingga tingkat lanjutan, kesempatan kerja bagi generasi muda dan masyarakat umum serta kelompok rentan lainnya seperti perempuan,

Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5	6
					masyarakat adat/ lokal termasuk di sektor ekonomi hijau
					Peningkatan kompetensi digital tenaga kerja dan ASN,
					Pengembangan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan platform ekonomi digital secara produktif dan berkelanjutan di berbagai sektor dan segmen masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perdagangan
					Fasilitasi penyediaan infrastruktur TIK di sekolah yang dapat dilakukan melalui pemberian layanan akses internet dan penggunaan platform/aplikasi digital di sekolah
					Penyelenggaraan pelatihan keterampilan digital tingkat menengah dan lanjut bagi seluruh masyarakat
	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital		Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis digital guna peningkatan kinerja yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas serta penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara	Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah melalui penerapan SAKIP yang berkualitas
					Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
					Optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko
					Pemanfataan teknologi informasi dalam pelaporan dan evaluasi kinerja
					Penguatan system perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang terintegrasi;
					Peningkatan transparansi dan akses informasi publik;
					Penguatan dan pengembangan zona integritas dan pencegahan korupsi;
					Peningkatan kualitas dan transparansi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
					Penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah;
					Peningkatan optimalisasi dan pengamanan asset-asset pemerintah daerah melalui kerjasama pentahelix;
					Peningkatan kualitas fasilitas kerja, serta fasilitasi pemenuhan tempat tinggal khususnya bagi ASN yang belum memiliki rumah
					Peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas dan terpadu serta pembentukan forum pengelola Kawasan Perkotaan Mamminasata
					Pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan
					Optimalisasi barang milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
					Penguatan reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa berbasis digital yang transparan dan akuntabel melalui optimalisasi e-purchasing, peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan profesionalisme SDM PBJ, serta penguatan pengawasan yang efektif guna mewujudkan belanja daerah yang berkualitas dan berintegritas
	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan responsif	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pelayanan publik dan pembangunan yang prima, adaptif, dan inklusif, perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi, penyederhanaan proses bisnis, penguatan kompetensi SDM, serta perluasan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat	Penguatan integritas dan peningkatan kompetensi serta kapasitas ASN untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik prima
					Peningkatan kemudahan akses dan pelayanan publik di seluruh lembaga penyedia layanan pemerintah provinsi
					Penguatan manejemen ASN melalaui penerapan merit system
					Pengimplementasian nilai-nilai keagamaan bagi ASN dalam pelaksanaan pekerjaan
					Optimalisasi digitalisasi layanan publik dan penguatan aspek pemerintahan digital
					Peningkatan kemudahan layanan melalui penggunaan teknologi digital dan penyederhanaan proses bisnis pelayanan,
					Peningkatan fasilitasi pelayanan perkara hukum strategis sesuai kewenangan
					Peningkatan kompetensi sumberdaya yang berorientasi pelayanan prima,
					Peningkatan pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM;

Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5	6
					Peningkatan penyediaan akses internet di seluruh kantor pemerintahan dan OPD.
					Peningkatan efektivitas penerapan manajemen SPBE di seluruh OPD Provinsi di Sulawesi Selatan, seperti pengelolaan data dan aset, arsitektur SPBE pemerintah, dan lain sebagainya dengan cloud-based government dan digitalisasi layanan publik
					Reformasi fiscal daerah dengan digitalisasi pajak, optimalisasi retribusi, dan pengurangan ketergantungan transfer daerah
					Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ASN bidang digital melalui pelatihan digital dalam mengantisipasi penerapan berbagai future emerging technologies pada layanan pemerintahan
					Meningkatkan pendapatan daerah dengan penguatan industry hijau dan optimalisasi jasa ekosistem
					Peningkatan inklusivitas layanan publik, termasuk layanan administrasi kependudukan dan pelayanan sipil, dengan memastikan akses dan kualitas layanan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan
	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital		Meningkatnya inovasi pembangunan daerah	Penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah, serta pengembangan fasilitasi, inkubasi, dan difusi inovasi berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi daerah	Pengembangan inovasi daerah melalui inkubasi program berbasis masalah lokal
					Penguatan peran perangkat daerah sebagai penggerak inovasi pembangunan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil
					Pengembangan pusat inovasi atau laboratorium inovasi daerah guna mendorong percepatan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
					Penguatan kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas teknologi dalam pengembangan solusi inovatif untuk mendukung pembangunan daerah
	Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan lingkungan Yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Penguatan konektivitas wilayah secara terpadu, termasuk peningkatan aksesibilitas antarwilayah (termasuk wilayah terpencil dan kepulauan), serta peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan serta jembatan melalui lanjutan Multi Years Contract (MYC) preservasi jalan ±1.000 km, pembangunan dan peningkatan jembatan pada jalan provinsi dan kabupaten, termasuk pembangunan Jembatan Barombong
					Penanganan multiyears jalan dan jembatan
					Penanganan multiyears infrastruktur air minum
					Penanganan multiyears pengelolaan sumber daya air
					Penanganan multiyears infrastruktur transportasi
					Penguatan konektivitas antarwilayah melalui fasilitasi program nasional jembatan gantung penghubung desa serta peningkatan akses wilayah terpencil dan kepulauan
					Pengembangan konektivitas transportasi darat, udara dan laut melalui subsidi dan operasional seaplane, subsidi penerbangan, sharing anggaran trans Sulsel, pembangunan bandara/aerodrome (termasuk CPI), serta operasional kapal multipurpose
					Peningkatan aksesibilitas dan kelancaran logistik pada jalur utama ekonomi yang menghubungkan kawasan strategis, industri, dan pariwisata
					Penguatan integrasi sistem transportasi darat, laut, dan udara serta pengembangan simpul transportasi yang terpadu, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung kelancaran mobilitas orang, barang, dan jasa serta konektivitas wilayah.
					Peningkatan kualitas infrastruktur, keselamatan, keamanan, dan aksesibilitas transportasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak
					Peningkatan keselamatan transportasi melalui penyediaan fasilitas keselamatan jalan, penguatan manajemen keselamatan transportasi, dan peningkatan kualitas layanan angkutan
					Peningkatan penanganan kemacetan kawasan perkotaan melalui penguatan manajemen lalu lintas, pengembangan transportasi terpadu, dan optimalisasi sistem transportasi berbasis teknologi

Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5	6
					Penguatan sinergi penyelenggaraan transportasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan sistem transportasi perkotaan dan regional
					Peningkatan akses air minum aman, sanitasi layak, dan pengelolaan air limbah yang inklusif, aman, terjangkau, dan aksesibilitas bagi seluruh Masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya wilayah terpencil, pesisir, kepulauan, Kawasan miskin, dan kelompok rentan.
					Peningkatan akses listrik termasuk pemanfaatan energi baru terbarukan di wilayah kepulauan dan sulit akses
					Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui penanganan kawasan kumuh dan dukungan rumah layak huni
					Pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan strategis secara terpadu untuk mendukung pertumbuhan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan
					Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman termasuk penanganan permukiman kumuh dan dukungan Program 3 Juta Rumah
					Peningkatan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis;
					Peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum tata ruang guna mewujudkan tertib tata ruang;
					Pembangunan dan peningkatan kualitas serta kapasitas ruang terbuka hijau dan ruang publik;
					Pembangunan SPAM regional terintegrasi dengan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi yang memperhatikan keterjangkauan layanan, aksesibilitas, dan kebutuhan kelompok rentan
					Mendorong pengembangan bandara melalui sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan kab/kota
					Pengembangan lingkungan yang ramah, aman, dan aksesibel bagi seluruh kelompok masyarakat
	Peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana serta perubahan iklim melalui pengendalian risiko bencana dan rehabilitasi lingkungan, penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat, pengembangan energi baru terbarukan, serta pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan infrastruktur dan tata ruang daerah.	Penyusunan dokumen Perencanaan Pengelolaan Ekosistem berbasis DAS yang berketahanan iklim;
					Penanganan multiyears pengelolaan lingkungan
					Penanganan multiyears infrastruktur energi
					Pengelolaan dan restorasi Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) baik vegetatif dan sipil teknis serta peningkatan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat secara intensif
					Pengendalian Erosi dan Sedimentasi dengan Bangunan Konservasi Tanah dan Air
					Pengembangan mekanisme imbal jasa lingkungan bagi masyarakat yang menjaga lingkungan;
					Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan nilai ekonomi karbon (perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja;
					Peningkatan upaya pencegahan, penanganan dan pengendaian risiko bencana di daerah rawan bencana termasuk pencegahan dan penanganan bencana hidrometrologi di wilayah perkotaan;
					Peningkatan kualitas mitigasi bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
					Penguatan Early Warning Systems untuk mencegah perluasan dampak bencana;
					Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kawasan rawanbencana serta peningkatan kapasitas, ketahanan dan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan simulasi;
					Pengembangan dan penditribusian benih tanaman yang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem dan berketahanan iklim;
					Pengembangan penggunaan teknologi irigasi yang hemat air pada wilayah yang rentan terhadap bencana kekeringan
					Pengembangan dan penerapan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim;

Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5	6
					Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
					Peningkatan pelaksanaan program serta menguatkan koordinasi dan kolaborasi pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP);
					Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan tata ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan;
					Peningkatan penanganan sampah yang optimal dari hulu ke hilir termasuk pemanfaatan sampah sebagai sumber bahan bakar alternatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat
					Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah yang adaptif terhadap bencana dan mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon, utamanya penerapan sistem angkutan umum massal;
					Identifikasi dan pengembangan peluang pendanaan alternatif dan kerjasama pihak swsata dan parapihak lainnya dalam implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
					Peningkatan pengawasan dan pengamanan Kawasan Lindung termasuk Kawasan Hutan
					Pengembangan fasilitasi dalam pengelolaan kawasan hutan lestari dan berkelanjutan melalui perhutanan sosial
					Penguatan tata kelola dan pelaksanaan aksi/kegiatan yang mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
					Fasilitasi peningkatan kolaborasi dalam mempertahankan kelestarian, optimalisasi pemanfaatan berkelanjutan dan memperkuat tata kelola keanekaragaman hayati;
					Peningkatan implementasi Revolusi Hijau melalui pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan, adaptif terhadap bencana, berketahanan iklim secara berkelanjutan
					Revitalisasi dan rehabilitasi hutan, lahan dan terumbu karang untuk menjaga keseimbangan ekologi;
					Penyebarluasan data dan informasi terkait issu pengelolaan DAS dan Perubahan Iklim melalui media cetak dan elektronik
					Peningkatan dukungan dan pengembanga penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana energi baru terbarukan (EBT)
					Peningkatan pengelolaan persampahan yang inklusif, aman, berkelanjutan, dan terjangkau melalui penguatan layanan dari hulu ke hilir, pemberdataan masyarakat, serta perluasan akses layanan bagi wiliayah terpencil dan kelompok rentan.
					Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam inovatif lingkungan, Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAPE , TAKE dan ALAKE) sebagai insentif untuk mendorong pengelolaan jasa lingkungan dan adaptasi perubahan iklim yang responsif gender
					Pengembangan skema pembagian manfaat dalam implementasi nilai ekonomi karbom
					Implementasi skema agroforesti berbasis lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS);
					Pembangunan sabuk hijau pesisir (coastal greenbelt) di sepanjang wilayah terdampak abrasi dengan pendekatan rehabilitasi mangrove berbasis komunitas;
					Pengembangan infrastruktur adaptasi perubahan iklim berbasis rumah tangga di daerah rentan kekeringan;
					Penetapan zona perlindungan berbasis daya dukung ekosistem dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW)
					Reformasi tata guna lahan berbasis daya dukung lingkungan;
					Penerapan Decentralized Wastewater Treatment Systems (DWTS) untuk menangani peningkatan beban pencemaran di sungai;

Misi	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5	6
					Revitalisasi DAS kritis dengan riparian buffer zones, reforestrasi hulu sungai serta kolam retensi untuk mengurangi banjir dan longsor;
					Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan terkait adaptasi perubahan iklim, simulasi evakuasi berkala dan Pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah.
					Peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir di perkotaan;
					Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil termasuk termasuk penguatan koservasi laut, sistem pengelolaan sampah pesisir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) utamanya di kabupaten Kepulauan Selayar dan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
					Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, pengelolaan sumber daya air adaptif iklim, pengembangan dan implementasi pertanian raah iklim dan pencegahan pengendalian penyakit sensitive iklim serta penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim;
					Mengidentifikasi dan memetakan kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) untuk memastikan bahwa kawasan yang tidak dapat dikonversi tergambar dengan jelas dan terlindungi
					Revitalitasi dan aplikasi konsep Good Agricultural Practices (GAP) pada komoditas perkebunan, khususnya kakao dan kopi

4.2.4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2027 dirumuskan strategi yang merupakan rangkaian tahapan berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Selain strategi juga dirumuskan arah kebijakan yang merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4. 10. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan modern, mengembangkan program Koperasi Merah Putih untuk meningkatkan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku UMKM lokal, memperkenalkan Program Tani Milenial untuk memodernisasi pertanian dan meningkatkan daya saing produk daerah, serta mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pemasaran produk pertanian melalui jaringan distribusi yang lebih luas dan pelatihan untuk mengakses pasar lebih besar, Meningkatkan pelatihan pemandu wisata dan peningkatan kualitas destinasi wisata, terutama yang berbasis pada kekayaan budaya lokal, Meningkatkan akses pasar untuk produk-produk kreatif dengan memanfaatkan platform digital dan pameran demngan lokus Kawasan dengan potensi pariwisata budaya, desa dengan sektor pertanian unggulan, dan pusat industri kreatif.
	Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan yang berbasis pada kebutuhan pasar, memfasilitasi Job Fair secara rutin untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang ada, pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat, memperkuat kapasitas UMKM dengan memberikan dukungan Koperasi Merah Putih untuk mempermudah akses permodalan dan pengembangan usaha, serta memperkenalkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha kecil	Pelatihan lanjutan di sektor-sektor unggulan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, Meningkatkan akses informasi tentang peluang kerja di sektor-sektor unggulan daerah, dengan dukungan platform digital. dan Pemberdayaan UMKM melalui pendampingan bisnis dan akses pasar untuk produk-produk unggulan daerah dengan lokus pada Kawasan dengan potensi produk unggulan dan industri berbasis lokal.
	Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi berbasis sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, dengan membuka akses yang lebih luas ke sektor produksi untuk masyarakat miskin ekstrem, Program Koperasi Merah Putih akan memfasilitasi akses pembiayaan, pelatihan, dukungan untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis) akan terus diperluas untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin terkait kebutuhan pangan, sementara program Rehab dan Plesterisasi Rumah Tangga Miskin untuk meningkatkan kualitas hidup khususnya keluarga miskin.	Mempercepat program bantuan sosial berbasis kebutuhan keluarga miskin ekstrim dan penyediaan jaminan kesehatan untuk mereka, Mengembangkan program ketahanan pangan dengan memberikan akses pada sumber pangan lokal yang murah dan bergizi, pemberdayaan ekonomi untuk keluarga miskin, dengan fokus pada sektor ekonomi unggulan daerah. dengan lokus pada Wilayah dengan kelompok miskin ekstrim, daerah yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap fasilitas dasar dan produksi.
Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Mengembangkan industri pengolahan komoditas unggulan daerah seperti hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pengolahan dengan memperkenalkan teknologi baru, serta memberikan dukungan	Meningkatkan kapasitas pengolahan hasil pertanian dengan memanfaatkan mesin dan alat modern untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, Mengembangkan program pemasaran berbasis teknologi digital

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		akses pasar dan pembiayaan melalui Koperasi Merah Putih untuk memperkuat jaringan distribusi dan memastikan produk lokal dapat dipasarkan lebih luas	untuk produk olahan, Menyediakan akses pelatihan pemasaran digital untuk pelaku UMKM agar mereka dapat memasarkan produk mereka melalui platform e-commerce dengan lokus pada awasan dengan produksi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang melimpah, serta potensi industri pengolahan yang belum maksimal.
Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah (T3)	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan membuka akses ke khususnya distribusi barang dan jasa, termasuk hasil pertanian dan peternakan. Pembangunan jalan yang menghubungkan desa penghasil komoditas lokal dengan pusat ekonomi akan memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan akses pasar.	Pembangunan jalan aksesibilitas untuk membuka akses dan potensi wisata yang ada di daerah, Mengembangkan sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. serta Meningkatkan kualitas drainase di kawasan perkotaan dan pemukiman padat untuk menghindari banjir serta mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan lokus pada Kawasan pertanian, perumahan padat penduduk, dan daerah wisata yang membutuhkan infrastruktur penunjang.
	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Meningkatkan penyediaan air bersih yang terjamin di seluruh wilayah melalui pengembangan dan penguatan PDAM, memperluas jaringan distribusi air bersih ke daerah-daerah terpencil, serta memastikan sanitasi aman dengan memperkenalkan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan efisien. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan air dan sanitasi, serta memastikan ketersediaan air bersih yang merata di semua lapisan masyarakat	Pemanfaatan teknologi pengolahan air yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat , Meningkatkan infrastruktur sanitasi serta Memperluas program pelatihan masyarakat mengenai cara-cara pengelolaan air bersih dan sanitasi yang benar dengan lokus pada wilayah dengan masalah pengelolaan air dan sanitasi.
Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)	Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis pada sektor unggulan, Peningkatan kapasitas kelembagaan desa melalui penguatan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan penyediaan air bersih, untuk memastikan desa memiliki akses yang memadai terhadap layanan dasar. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta mendorong desa untuk mengembangkan potensi pariwisata lokal sebagai sumber pendapatan tambahan yang mendukung kemandirian desa	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola sumber daya sosial, pendampingan untuk pengusaha desa agar mereka dapat meningkatkan skala usaha dan akses pasar yang lebih luas melalui teknologi digital dan Memperkenalkan pertanian organik dan pengelolaan limbah organik untuk menciptakan sistem yang lebih ramah lingkungan dan menghasilkan produk berkualitas dengan lokus pada Desa dengan potensi besar dalam sektor pertanian organik, pariwisata, dan kerajinan tangan berbasis produk lokal.
Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengimplementasikanekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah secara efisien dan ramah lingkungan, Pengembangan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan selain itu mempraqktekkan teknik pertanian berkelanjutan yang mengutamakan pertanian ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, Penguatan hutan iklim juga akan menjadi prioritas dengan meningkatkan kapasitas konservasi dan rehabilitasi hutan, praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan perlindungan hutan.	Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah industri dengan menerapkan sistem daur ulang limbah dan teknologi filtrasi untuk mengurangi dampak pencemaran, Mengembangkan sistem pengawasan lingkungan berbasis teknologi digital untuk memantau pencemaran secara real-time di kawasan industri dan perairan serta Menyediakan kampanye besar-besaran mengenai pentingnya pengurangan sampah plastik dan pemanfaatan energi terbarukan dengan lokus pada Kawasan dengan industri pengolahan, kawasan pertanian yang intensif, dan permukiman padat penduduk yang menghasilkan sampah tinggi.

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Meningkatkan kapasitas mitigasi bencana dengan penguatan sistem peringatan dini, pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Layanan Kesehatan Darurat Langsung ke Rumah akan diperkenalkan untuk meningkatkan respons cepat terhadap bencana yang terjadi	Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana, Penyediaan Alat Mitigasi Bencana, Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan dengan lokus pada Daerah yang rawan terhadap bencana alam
	Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S..5.3)	Mendorong pembangunan rendah karbon dengan memperkenalkan teknologi ramah lingkungan dalam sektor pertanian, perikanan, dan perumahan, serta memperkuat kebijakan pengurangan emisi karbon dalam sektor industri dan transportas	Menjamin keberlanjutan pengelolaan sampah dengan penerapan sistem pengolahan sampah berkelanjutan, Memastikan pengelolaan limbah B3 yang ramah lingkungan melalui penerapan teknologi pengolahan lanjutan dan sertifikasi industri ramah lingkungan serta Memperkuat pengawasan berkelanjutan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperkenalkan sistem pelaporan berbasis teknologi. lokus pada Daerah yang telah mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3.
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan memperluas akses ke fasilitas kesehatan. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan juga dilakukan dengan memperkenalkan pembangunan fasilitas kesehatan berbasis desa yang terjangkau, serta menyediakan pelatihan untuk tenaga medis lokal guna meningkatkan kualitas layanan di tingkat desa. Program pencegahan penyakit melalui edukasi kesehatan akan diperkuat, dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular. memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan perlindungan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, serta mengembangkan pendekatan kesehatan berbasis masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan penyediaan layanan kesehatan dasar secara lebih merata.	Peningkatan layanan kesehatan berbasis teknologi (telemedicine) untuk mempermudah akses masyarakat terhadap dokter dan spesialis , kampanye imunisasi yang lebih intensif dan penguatan kesehatan lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan sanitasi untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan, Menjamin tersedianya obat-obatan dan peralatan medis yang berkualitas di fasilitas kesehatan, Mendorong kebiasaan olahraga di komunitas, serta memperkenalkan program pencegahan penyakit dengan deteksi dini dan pemeriksaan rutin dengan lokus pada Kawasan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan kekurangan gizi.
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas, dengan prioritas pada peningkatan kualitas guru, infrastruktur pendidikan, dan pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memperkuat proses pembelajaran di tingkat dasar, mendorong peningkatan akses pendidikan dasar yang setara di seluruh wilayah, memperluas program Sekolah Rakyat untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin serta menyediakan Bantuan Pendidikan untuk Anak Berprestasi dan Tak Mampu hingga jenjang SD dan SMP. Program Seragam dan Sepatu Gratis bagi Siswa Baru Tak Mampu di SD dan SMP jserta dukungan untuk program MBG.	Diperkuat dengan peningkatan daya jangkau program afirmatif di wilayah dengan angka rata-rata lama sekolah masih rendah, Sekolah Rakyat di Lalabata dioptimalkan menjadi pusat konsolidasi siswa dari kecamatan lain. Intervensi diarahkan untuk menekan kesenjangan partisipasi sekolah antarkawasan dengan pendekatan spasial.
	Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta memperkenalkan Koperasi Merah Putih yang memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran produk untuk pelaku	Mengakselerasi pertumbuhan UMKM melalui pelatihan vokasional, dukungan akses pembiayaan mikro, dan penguatan koperasi sebagai agregator ekonomi rakyat. Akses terhadap pasar diperluas melalui digitalisasi usaha dan promosi

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		usaha kecil dan menengah (UMKM). Program Tani Milenial akan diberdayakan untuk memodernisasi pertanian dan meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, memperkuat program kewirausahaan di tingkat desa untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal. Kebijakan ini juga mencakup pengembangan infrastruktur pasar dan akses ke pasar global melalui Bantuan Pemasaran untuk UMKM, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memperbaiki pendapatan masyarakat. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional bagi masyarakat miskin juga akan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang pekerjaan yang lebih baik, sehingga mendorong peningkatan daya beli masyarakat.	produk lokal. Pengurangan beban lanjut dengan integrasi program layanan dasar seperti rumah singgah rujukan dan optimalisasi bantuan pendidikan.
	Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Meningkatkan kehidupan beragama yang harmonis melalui pemberian insentif untuk Imam Masjid, Guru Ngaji, serta memperkuat lembaga keagamaan dalam pembinaan masyarakat, menciptakan kehidupan yang lebih berbasis pada nilai moral dan etika agama	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan dan penyuluh agama melalui pelatihan moderasi beragama, serta mendukung perayaan hari besar keagamaan secara lintas komunitas untuk memperkuat jalinan sosial.
Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Peningkatan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui sistem yang berbasis pada akuntabilitas, serta memperkuat pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan penggunaan anggaran daerah yang tepat sasaran.	Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah melalui optimalisasi PAD berbasis potensi ekonomi lokal, serta mempercepat realisasi belanja strategis dan belanja langsung ke masyarakat.
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkenalkan KTP/KK Home Service untuk mempermudah administrasi bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat dan memperbaiki layanan publik	Meningkatkan intensitas layanan home service ke wilayah lain serta menyempurnakan sistem antrian online dan pelaporan terintegrasi untuk pelayanan publik.
	Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Menguatkan sistem pengawasan internal dan eksternal, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek, serta memperkuat pendidikan anti-korupsi di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat	Meningkatkan efektivitas pengawasan APIP melalui audit berbasis risiko dan follow-up hasil pemeriksaan, mendorong sistem merit ASN dan penyusunan kebutuhan SDM berbasis analisis jabatan dan beban kerja, serta menata pengelolaan BMD secara akurat melalui sistem e-BMD.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan mengimplementasikan sistem manajemen yang terukur dan berbasis hasil, serta meningkatkan evaluasi berkala terhadap setiap kebijakan dan program yang dijalankan	Penguatan budaya kinerja melalui pelibatan seluruh ASN dalam penyusunan dan pelaporan kinerja.

4.2.5. Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2027

Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 berkomitmen untuk mewujudkan keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan antara Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Keselarasan tersebut merupakan hal penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional serta memastikan kontribusi nyata daerah sebagai bagian dari fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 diselaraskan dengan arah pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2027 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027.

Keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027 diwujudkan melalui (1) Keselarasan target indikator makro pembangunan daerah dengan target pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng; (2) Keselarasan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional; (3) Keselarasan penetapan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional Tahun 2027; dan (4) Keselarasan terhadap hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2027 sebagai acuan dalam mendukung pencapaian *outcome* prioritas pembangunan Tahun 2027.

4.2.5.1. Keselarasan Tema RKPD 2027 dengan Tema RKP 2027

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, tema pembangunan RKPD Kabupaten Soppeng disusun dengam memperhatikan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 dan tema pembangunan RKP Nasional Tahun 2027. Keselarasan tema tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung agenda pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional melalui ***Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa.*** Adapun keselarasan tema pembangunan RKPD Kabupaten Soppeng dengan Tema Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 dan Tema RKP Nasional Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 11. Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Soppeng dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 dan Tema RKP Nasional Tahun 2027

Tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027	Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027	Tema RKP Nasional Tahun 2027
Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa	*Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan*	*Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri*

Sumber :
- *Rancangan RKP 2027*
- *RPJMD Provinsi Sulsel Tahun 2025 – 2029*
- *RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029*

Tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027, yaitu "Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa", merupakan penjabaran dari arah

kebijakan pembangunan daerah yang disusun secara sinergis dan selaras dengan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan maupun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2027.

Keselarasan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui penguatan peran daerah sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan pembangunan wilayah. Fokus pada percepatan pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan investasi, penguatan daya saing usaha, serta penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas. Arah kebijakan ini sejalan dengan tema RKP Nasional Tahun 2027, yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri", yang menitikberatkan pada transformasi ekonomi sebagai penggerak utama pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, penguatan infrastruktur yang menjadi salah satu fokus pembangunan Kabupaten Soppeng merupakan bagian integral dalam mendukung tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027, yaitu "Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan." Pengembangan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

Selanjutnya, pembangunan manusia menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kompetensi tenaga kerja, serta penguatan perlindungan sosial diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Upaya tersebut sekaligus mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam percepatan pembangunan sumber daya manusia sebagai modal utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penekanan pada kemandirian desa merupakan strategi pembangunan yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar. Melalui penguatan kapasitas pemerintahan desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan, diharapkan tercipta desa yang mandiri, produktif, dan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif. Pendekatan ini juga mendukung agenda pembangunan nasional yang mendorong transformasi ekonomi dari tingkat lokal serta memperkuat ketahanan wilayah sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan demikian, tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 tidak hanya mengakomodasi kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, tetapi juga menunjukkan keterpaduan dan konsistensi dengan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan yang berkualitas, inklusif, berdaya saing, dan

berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya visi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia Emas 2045.

4.2.5.2. Keselarasan Sasaran Utama Pembangunan RKP dengan Tujuan/ Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan

Keselarasan sasaran utama pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Soppeng dilakukan untuk memastikan keterpaduan antara prioritas pembangunan nasional dan daerah. Penyusunan sasaran pembangunan daerah memperhatikan arah kebijakan dan target pembangunan nasional serta Provinsi Sulawesi Selatan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, potensi, serta permasalahan strategis daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sopppeng dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Adapun keselarasan sasaran utama Pembangunan dengan tujuan atau sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 12. Keselarasan Tujuan/Sasaran RKPD Kabupaten Soppeng dengan RKPD Sulawesi Selatan Tahun 2027 terhadap Sasaran Utama RKP Nasional Tahun 2027

No	Sasaran Utama Pembangunan RKP	Indikator Sasaran Utama Pembangunan RKP	Tujuan/Sasaran Prioritas RKPD Prov Sulsel	Indikator Tujuan/Sasaran Pembangunan RKPD Prov Sulsel	Tujuan/Sasaran Prioritas RKPD Kabupaten Soppeng	Indikator Tujuan/Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Soppeng
1.	Sumber Daya Manusia Berkualitas	Indeks Modal Manusia	**Meningkatnya kualitas modal manusia**	**Indeks Modal Manusia**	**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat**	**Indeks Pembangunan Manusia**
			Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan
			Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	- Rata rata lama sekolah - Harapan lama sekolah	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan
2.	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif**	- **Laju pertumbuhan ekonomi**	**Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat**	**PDRB/kapita**
				- **Rasio Gini**		**Rasio Gini**
		GNI per-Capita			Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi
		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	**Meningkatnya Pembangunan infrastruktur yang merata dan lingkungan yang berkelanjutan**	- **Indeks Williamson**	**Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana**	**Nilai daya dukung lingkungan**
				- **Penurunan Intensitas Emisi GRK**	Terwujudnya pembangunan rendah karbon	Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta ketanguhan adaptasi dan mitigasi bencana	- Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana	Indeks risiko bencana

No	Sasaran Utama Pembangunan RKP	Indikator Sasaran Utama Pembangunan RKP	Tujuan/Sasaran Prioritas RKPD Prov Sulsel	Indikator Tujuan/Sasaran Pembangunan RKPD Prov Sulsel	Tujuan/Sasaran Prioritas RKPD Kabupaten Soppeng	Indikator Tujuan/Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Soppeng
			dan perubahan iklim	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)
3.	Penurunan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	Berkurangnya penduduk miskin	Angka kemiskinan
		Kemiskinan Ekstrem		Tingkat Pengangguran Terbuka		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha	Tingkat pengangguran terbuka
		Rasio Gini	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif**	- **Laju pertumbuhan ekonomi**	**Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat**	**PDRB/kapita**
				- **Rasio Gini**		**Rasio Gini**
					Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi

Sumber : - Rancangan RKP 2027
- RPJMD Provinsi Sulsel Tahun 2025 – 2029
- RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029

4.2.5.3. Keselarasan Sasaran Indikator Makro Pembangunan

Dalam upaya menjaga konsistensi dokumen perencanaan terwujud dalam ketajaman indikator makro yang diselaraskan antara target nasional, target provinsi Sulawesi Selatan dan target Kabupaten Soppeng yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2025 – 2026 dan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan ketercapaian indikator tersebut pada tahun sebelumnya. Adapun keselarasan indikator makro nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng untuk Tahun 2027 selengkapnya pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 13. Keselarasan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2027

NO	INDIKATOR	TARGET RKP TAHUN 2027	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2027	TARGET KABUPATEN SOPPENG SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2027	TARGET RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,5	6,3 – 6,8	5,07	5,07
2	PDRB Per Kapita (juta)	5.800 – 5.840 US$	86,9 – 92,7	76,37	76,37
3	Kontribusi PDRB Provinsi/Kabupaten/Kota	-	3,2 (Kontribusi PDRB Provinsi)	2,28 (Kontirbusi PDRB Kabupaten)	2,28 (Kontirbusi PDRB Kabupaten)
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 6,5	6,44 - 6,86	5,29 - 6,19	5,29 - 6,19
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30 – 4,87	3,76 - 4,15	2,67 - 2,95	2,67 - 2,95
6	Rasio Gini	0,362 – 0,367	0,346 - 0,349	0,327 - 0,329	0,327 - 0,329
7	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	0,575 (Indeks Modal Manusia)	0,547-0,560 (Indeks Modal manusia)	74,75 - 75,36 (IPM)	74,75 - 75,36 (IPM)
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-	37,22	32,83	32,83

NO	INDIKATOR	TARGET RKP TAHUN 2027	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2027	TARGET KABUPATEN SOPPENG SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2027	TARGET RKPD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,84	83,23	77,53	77,53

Sumber : - Rancangan RKP 2027
- RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027

4.2.5.4. Keselarasan Tujuan dan Sasaran dengan Prioritas Nasional

Keselarasan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) keharusan dalam memastikan bahwa setiap pembangunan yang akan dijabatkan lebih lanjut dalam program prioritas Pembangunan daerah, kegaitan hingga sub kegiatan bergerak searah untuk mendorong pencapaian target makro di tingkat pusat (nasional).

Proses penyelarasan dilakukan dengan memetakan tujuan san sasaran Pembangunan daerah berkontribusi langsung pada indikator kinerja utama nasional. Tujuan dan Sasaran daerah yang sinkron dengan Prioritas Nasional, keselarasan kebijakan (*Policy Alignment*). Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Soppeng mengadopsi dan mengontekstualisasikan Prioritas Nasional tersebut ke dalam karakteristik dan keunggulan komparatif yang terdapat di Kabupaten Soppeng. Adapun keselarasan antara tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng dengan 8 Prioritas Nasional (PN) selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 4. 14. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng dengan Prioritas Nasional Tahun 2027

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Asta Cita/ Prioritas Nasional (PN)
(1) Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)	1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
		2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
	2. Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)	4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
(2) Meningkatkan konektifitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung	3. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)	5. Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
		6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Asta Cita/ Prioritas Nasional (PN)
pertumbuhan ekonomi desa	4. Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)	7. Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
(3) Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	5. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)	8. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
		9. Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	
		10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	
(4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius	6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)	11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
		12. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	
		13. Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
		14. Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
(5) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif	7. Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)	15. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
		16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	
		17. Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Asta Cita/ Prioritas Nasional (PN)
		18. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	

Sumber : Rancangan RKP 2027 dan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 – 2029

4.2.5.5. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Kabupaten Soppeng tahun 2027 telah mendukung prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam konteks tersebut, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Soppeng diarahkan secara terpadu dan sinergis untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan baik di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional melalui pendekatan Trisula Pembangunan yang diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Adapun keselarasan antara prioritas pembangunan Nasional, prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas Kabupaten Soppeng tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 15. Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
Prioritas Nasional 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Meningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi;
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinaL	
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		
Prioritas Nasional 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Meningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	

4.2.6. Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2027

Rakortekbang merupakan salah satu kegiatan yang dilakuukan dalam menjamin sinergitas pembangunan pusat maupun daerah. Penyusunan RKPD Tahun 2027 didasari pada bagaimana outcome, program dan sub kegiatan daerah mendukung prioritas nasional (Asta Cita) sesuai bidang urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil kesepakatan Rakortekbang. Hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 nantinya akan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyusun RKPD tahun 2027. Pelaksanaan Rakortekrenbang ini dilaksanakan ditingkat Kabupaten/Kota pada bulan April Tahun 2026.

Tabel 4. 16. Outcome Prioritas, Program dan Sub Kegiatan Hasil Kesepakatan Rakoretekrenbang Tahun Perencanaan 2027 (Bidang Urusan)

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilandan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	350 orang	350 orang	
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur				8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilandan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik diDaerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25 Orang	21 Orang	
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 orang	100 Orang	
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 orang	100 Orang	
2	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraangender, serta penguatan peranperempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antarLembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan		
							2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	4 Laporan	2 Laporan	
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	4 Laporan		
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil FasilitasiPencatatan Sipil	4 Laporan	3 Laporan	
3.	-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Laporan	25 Laporan	
							2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 Pengguna	34 Pengguna	
5	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	180 Orang	180 Orang	
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	
					2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Bendayang Diusulkan	3 Objek	1 Objek	
							2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek	75 Objek	
6	-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DANPERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya TataKelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit	
							3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataandan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	0 Dokumen		
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha		
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha		
8	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda,budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	
							2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	24 Organisasi	24 Organisasi	
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih danTenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0 Orang		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan PengembanganOlahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasikabupaten/kota yang Dibina danDiberikan Pengembangan, termasukolahraga disabilitas	100 Orang	100 Orang	
9.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraangender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang DitingkatkanSarana, Prasarana, Alat Kesehatandan SDM agar Sesuai Standar	11 Unit	4 Unit	
							1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatandan SDM agar sesuai standar jenispelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit		
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	150 Orang	150 Orang	
10	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila,demokrasi, dan hak asasi manusia(HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaa nPenanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	34 Laporan	(KEBENCANAAN)
					1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi da nEdukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kotayang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yangada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang	1000 Orang	
							1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akarmasalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas)Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan		
							1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikutigladi kesiapsiagaan untuk mengujiefektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	400 Orang	400 Orang	
							1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (perjenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan		
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daera hKabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piketdan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	1 Dokumen	
11	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DANINFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia(HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	102732 Orang		
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publikyang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	4 Dokumen		
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTDyang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Titik	34 Titik	
							2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	3 Layanan		
12	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHAKECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan BagiKeluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	140 Kelompok Masyarakat		
							2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	55 Unit Usaha	70 Unit Usaha	
					2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil(UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	50 Orang	200 Orang	
							2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
13	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Bekualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah,Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air,Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	48 Lokasi	6 Lokasi	
							2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen		
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau IzinPPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	11 Dokumen	5 Dokumen	
							2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	
14	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	600 Keluarga	600 Keluarga	
							2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen diKabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan,dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
							2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	
15	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
							3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	1 Promosi	
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAANINTELEKTUAL	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	2 Unit	2 Unit	
							3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	0 Kegiatan		
16	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untukmeningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,3 Km	0,4 Km	
			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan			1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun	0,1 Km	0,5 Km	
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	
							1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	800 SR	800 SR	
					1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Orang		
							1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	
					1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	
							1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik(SPALD) yang disusun	0 Dokumen		
					1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	7 KM	7 KM	
							1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	15 KM	15 KM	
					1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	75 Paket Pekerjaan		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksiyang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	40 Lembaga	40 Lembaga	
					1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen		
							1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	1 Kasus	
17	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10 Dokumen	10 Dokumen	
							2.13.03.3.01.0004	Pelaksanaan pembinaan umum dankoordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antar Kampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasidan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangkakerja sama antar Kampung maupu nkerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	0 Dokumen		
					2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasita sAparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	98 Orang	98 Orang	
							2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas iManajemen Pemerintahan Desa	49 Dokumen	49 Dokumen	
18	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peranperempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagiPerempuan Korban Kekerasan dan TPPOTingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasandan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	15 Orang	10 Orang	
							2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedialayanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia LayananPerlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	14 Lembaga		
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	35 Orang	35 Orang	
							2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedialayanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KewenanganKab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkatKab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	20 Lembaga	6 Lembaga	
19.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk D87meningkatkan nilai tambah di dalamnegeri.	Tercapainya Targetrealisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	40 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	
							2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12 Kegiatan	7 Kegiatan Usaha	
20	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	40 Orang	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	40 Orang	
							1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik danTenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	
							1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	
21	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan TimPendamping Keluarga dalammelakukan Pendampingan Ibu Hamildan Ibu Pasca Persalinan	8 Kegiatan		
							2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan KeluargaBerencana dan Kesehatan Reproduksi diFasilitas Pelayanan KesehatanTermasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil PembinaanPelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21 Laporan	20 Laporan	
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera(Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaanKetahanan Keluarga Melalui PusatPelayanan Keluarga Sejahtera(Satyagatra)	8 Laporan/Dokumen		
							2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi ProgramPembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi danSosialisasi Program Pembangunan Keluarga	3 Laporan	20 Laporan	
22	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan		
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0 Pelaku Usaha		
23	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	60 Unit	60 Unit	
							2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (FasilitasUtama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	2 Unit	
					2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	0 Unit		
							2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	0 Unit		
24	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di	3 Dokumen	1 DOkumen	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			
							3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggidan Tinggi, melalui SIINas yangterintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha IndustriKecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	5 Dokumen		
25	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraangender, serta penguatan peranperempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	18 Perpustakaan	18 Perpustakaan	
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dankhusus yang dibina sesuai kewenang an Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	7 Perpustakaan	7 Perpustakaan	
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan,pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	53 Orang	10 Orang	
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	2 Eksemplar	5 Eksemplar	
26	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata KelolaKeamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma,Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	3 Dokumen	1 Dokumen	
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	3 Laporan	
27	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam	0 Dokumen		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		BIDANG PERTANAHAN	mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah		PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAHABSENTEE			Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
							2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	0 Berita Acara		
28	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanankeamanan negara dan mendorongkemandirian bangsa melaluiswasembada pangan, energi, air,ekonomi kreatif, ekonomi hijau, danekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan		
							3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	3 Ton	3 Ton	
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	
							3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen		
29	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan daribawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	12 Unit Rumah	12 Unit Rumah	
							1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huniuntuk Peningkatan Kualitas PermukimanKumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3 Unit	3 Unit	
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang dilaksanakan Perbaikan	10 Lokasi	10 Lokasi	
							1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	11 Lokasi	11 Lokasi	
30	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoralyang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	30%		
							2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	0%		
31	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasibagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi padaTahun n	50 Orang	50 Orang	
			Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	2 Perusahaan	2 Perusahaan	
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan FasilitasKesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	550 Orang	550 Orang	
32	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	0 Kepala Keluarga		
							3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	0 Orang		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKREN BANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor								
33	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga	7 Lembaga	
			Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	10 Orang	10 Orang	
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1462 Orang	1462 Orang	
							1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindak layakan, Usulan yang Terverifikasi danTervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	700 Usulan	700 Usulan	

Tabel 4. 17. Outcome Prioritas, Program dan Sub Kegiatan Hasil Kesepakatan Rakoretekrenbang Tahun Perencanaan 2027 (Bidang Tematik)

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG TEMATIK	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGSOSIAL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terintegrasinyaimplementasi EkonomiSyariah dalamkebijakan, program, dan kegiatan lembaga negara,kementerian/lembaga dan pemerintah \daerah	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	Ekonomi Syariah
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan ifasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	200 Unit Usaha	140 Unit Usaha	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			3.26.06	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi -Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	12 Dokumen		
					4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	1 Laporan	
2	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dangenerasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tatakelola dan pelembagaan PUG dalam pembangunan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	40 Orang	PUG
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	17 Dokumen	17 Dokumen	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	165 Orang	165 Orang	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang	34 Lembaga		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG TEMATIK	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		kewenangan Kab/Kota	mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota			
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	500 Orang		
3	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	40 Orang	Digitalisasi Pembelajaran (Perluasan Akses Pendidikan)
							1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untuk PeningkatanKapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Orang	5 Orang	
							1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Orang	500 orang	
4	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalu iswasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya jaringan irigasi swasembada pangan yang berkelanjutan	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknisdan Dokumen Lingkungan Hidupuntuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	6 Dokumen		Irigasi (Ketahanan Pangan)
							1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,35 KM	0,35 KM	
							1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Km		
							1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Km		
5	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi	Terwujudnya kemandirian dan daya saing kampung nelayan serta kampung budi daya sebagai pusat	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	80 Orang	70 Orang	Kampung Nelayan Merah Putih (Ketahanan Pangan)

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG TEMATIK	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			dan pemberantasan kemiskinan.	pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir.								
			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomibiru				3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	0 Kelompok		
							3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	0 Unit		
6	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian loka lmelalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Pertumbuhan Ekonomi)
7	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dangenerasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya asupangizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	40 Orang	MBG (Perluasan Akses Pendidikan)
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antaralain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	1 Dokumen	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanandan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan	37 Unit Usaha	2 Unit Usaha	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG TEMATIK	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			
8	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dandari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menurunnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30 Orang	Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan
							1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	1462 Orang	
							1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
9	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Ketersediaan Sumber Pangan Akuatik Secara Berkelanjutan Sebagai Bentuk Swasembada dan Ketahanan Pangan.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3 Unit	3 Unit	Pangan Akuatik (Ketahanan Pangan)
							3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	0 Unit		
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatanekstraksi garam yang memiliki izinkabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	0 Pelaku Usaha		
					3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3 Unit	3 Unit	
							3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan SkalaKecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan SkalaKecil	0 Unit		
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota,	0 Pelaku Usaha		

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG TEMATIK	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									yang diperiksa kepatuhannya			
10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGLINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup								Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah (Pertumbuhan Ekonomi)
11	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	75 Dokumen	200 Dokumen	Pembangunan Tiga Juta Rumah (Pengentasan Kemiskinan)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	
							1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yangTerdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Unit Rumah		
					1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	33 Unit Rumah	33 Unit Rumah	
							1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	2 Unit	2 Unit	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG TEMATIK	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								dan Permukiman Kumuh Baru				
12	-	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaganegara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-	Pembinaan Ideologi Pancasila
13	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan guna melindungi masyarakat serta meminimalkan dampak bencana.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		Penanggulangan Bencana
							1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	
							1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	2 Orang		
							1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
							1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)Kab/Kota sampai dengan dinyatakansah	1 Dokumen	1 Dokumen	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG TEMATIK	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									dan legal paling lama dalam 1(satu) tahun			
							1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		
							1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	
							1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	2 Orang		
							1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
							1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencanadan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P)Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1(satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	
14	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	Pengendalian inflasi dengan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen diKabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsendan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Pengendalian Inflasi

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG TEMATIK	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG TAHUN 2027	TARGET RKPD 2027	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			nilai tambah di dalam negeri.				2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan		
15	1.01	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah
							1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	
							1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	
16	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGSOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat tahun	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	900 Usulan	700 usulan	Sekolah Rakyat (Pengentasan Kemiskinan)
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	5 Dokumen	

4.2.7. Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Kewilayahan Tahun 2027

Pembangunan Kawasan Watampone terdiri dari 3 kabupaten yakni Bone, Soppeng dan Wajo. Kawasan Watampone Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung perwujudan kawasan Watampone sebagai "Lumbung Pangan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau" diarahkan pada kebijakan peningkatan produktivitas dan pengembangan industri untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui penguatan swasembada pangan. Kawasan Watampone difokuskan pada sektor unggulan Pertanian, Perkebunan, Agroindustri, Pariwisata, Perikanan, Perdagangan dan Industri.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah di kawasan Watampone Tahun 2027, dijabarkan berdasarkan fokus pembangunan kewilayahan dengan mengacu pada arah kebijakan wilayah nasional Tahun 2027 dengan highlight intervensi kewilayahan yaitu fokus pembangunan kewilayahan prioritas lainnya yang meliputi kualitas SDM, tenaga kerja produktif dan inovasi, infrastruktur konektivitas ekonomi, swasembada pangan, energi dan air, serta hilirisasi SDA strategis. Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Kabupaten Soppeng tidak disebutkan secara spesifik terkait dengan pembangunan kewilayahan sehingga merujuk pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027.

Tabel 4. 18. Highlight Lokasi Prioritas Nasional pada Kawasan Pembangunan Watampone Tahun 2027

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi Berdasarkan Arah Pembangunan Kewilayahan Nasional
Fokus Pembangunan Kewilayahan Prioritas Lainnya		
Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif dan Inovasi	Kawasan Pembangunan Watampone	Penuntasan Tuberkulosis 3 Juta Rumah: 1 Juta Rumah Baru & 2 Juta Renovasi Rumah
Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	Kawasan Pembangunan Watampone	Elektrifikasi Desa
Swasembada Pangan, Energi dan Air	Kabupaten Bone, kabupaten Soppeng, kabupaten Wajo	Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi (Padi, Jagung, dan Kedelai)
	Kabupaten Bone, kabupaten Soppeng, kabupaten Wajo	Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Kakao, Lada, Pala, Tebu)
	Kabupaten Bone, kabupaten Soppeng, kabupaten Wajo	Peningkatan Produksi Daging, Susu, dan Telur

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026, diolah Bappelitbangda Tahun 2026

Sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2027, maka pembangunan di Kawasan Watampone diarahkan untuk mendukung dan bersinergi dengan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana arah pembangunan kewilayahan dan prioritas pembangunan daerah untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi dan swasembada pangan berupa hilirisasi

komoditas unggulan yang berbasis teknologi berkelanjutan serta penyiapan pengembangan ekosistem dan penguatan sentra perikanan, kelautan, pertanian dan perkebunan melalui Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; penguatan swasembada pangan yang diiringi dengan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan; peningkatan produktivitas tenaga kerja; pengembangan kawasan industry dan sentra produksi yang berbasis sumber daya local serta peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan serta pengembangan pendanaan inovatif. Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif melalui penguatan dan pengembangan akses serta mutu pelayanan menengah, vokasi dan Pendidikan tinggi, dukungan pembangunan Sekolah Unggul, peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus. Peningkatan kualitas kesehatan secara merata melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, penguatan kapasitas sistem layanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis serta pemberian Makan Bergizi Gratis Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita.

Peningkatan kualitas infrastruktur diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur penghubung antarwilayah untuk meningkatkan konektivitas ekonomi dan rantai pasok wilayah melalui penyelenggaraan jalan baik melalui skema *multi years contract* (MYC) maupun *single year contract* (SYC), penyediaan layanan transportasi umum dan pengembangan jaringan pelabuhan terpadu, peningkatan kualitas dan cakupan layanan irigasi melalui skema *multi years contract* (MYC), peningkatan akses sanitasi layak dan aman serta akses rumah tangga terhadap air minum aman dan air siap minum perpipaan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan serta peningkatan jumlah rumah layak huni.

Pembangunan Kawasan Watampone juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup serta ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana serta perubahan iklim melalui pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir; penataan kawasan kumuh; pengendalian pemanfaatan ruang dan penyusunan dan percepatan penetapan RDTR terintegrasi Online Single Submission (OSS) serta mendukung upaya mitigasi risiko bencana pengelolaan ekosistem diarahkan pada penguatan upaya mitigasi risiko bencana dan pengelolaan ekosistem yang diarahkan pada kebijakan penguatan pengendalian banjir melalui normalisasi sungai dan pengendalian banjir berbasis Daerah Aliran Sungai, penguatan sistem peringatan dini cuaca ekstrim, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi dampak hidrometeorologi, penanganan kedaruratan bencana dan penataan ruang berbasis risiko untuk meningkatkan ketahanan wilayah.

4.2.8. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2027

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Soppeng tahun 2027, dirumuskan program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah merupakan program yang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Program prioritas pembangunan daerah tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 19. Program Prioritas Kabupaten Soppeng Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat	1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)		Pertumbuhan ekonomi (S1.1)		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Peningkatan Produksi Hortikultura (%)		
			Peningkatan Produksi Perkebunan (%)		
		Meningkatnya Populasi Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Peternakan)	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi		
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)		Tingkat pengangguran terbuka (S.1.2)		
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
			Pertumbuhan wirausaha		
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)		Angka kemiskinan (S1.3)		
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
			Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		
			Persentase pelaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin		
			Peningkatan indeks kebutuhan dasar		
			Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi		
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Tingkat Kepauasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)		
			Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)		
			Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)		
			Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)		
			Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)		
			Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)		
			Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)		
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)		
			Penemuan Kasus TBC (%)		
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
			Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Menurunnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase Rumah Layak Huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)		Persentase Peningkatan Usaha Mikro (S.2.1)		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Persentase distribusi dan kualitas prasarana pertanian (Peternakan)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Peternakan)	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka konsumsi ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi;	5. Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)		Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1)		
		Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase luas layanan irigasi multikomoditas		
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
	6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)		Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)		
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
			minum melalui SPAM jaringan perpipaan		
			Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2.)		
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase capaian pelayanan SPALD-S akses aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase capaian pelayanan SPALD-T akses aman		
		Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan sampah terbangun	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah	11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)		Indeks kesehatan (S.6.1)		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Tingkat Kepauasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)		
			Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)		
			Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)		
			Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)		
			Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)		
			Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)		
			Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)		
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)		
			Penemuan Kasus TBC (%)		
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
			ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah		
			Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		
			Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		
			Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		
			Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Angka Kelahiran Remaja Umur 1519 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	12. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)		Indeks Pendidikan (S.6.2.1)		
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
			Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
		Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	13. Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)		Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)		
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
			Pertumbuhan wirausaha		

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		
			Persentase pelaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin		
			Peningkatan indeks kebutuhan dasar		
			Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi		
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Tingkat Kepauasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)		
			Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)		
			Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)		
			Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)		
			Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)		
			Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)		
			Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)		
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)		
			Penemuan Kasus TBC (%)		

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
			Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	14. Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)		Jumlah Konflik Sosial yang Bernuansa Keagamaan (S.6.4)		
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana	7. Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)		Persentase Desa Mandiri (S.4.1)		
		Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitasi penataan desa	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kualitasnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase fasilitasi tata kelola desa		
		Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Donri-Donri		
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja		
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo		
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau		

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa		
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Ganra		
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Citta		
	8. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)		Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)		
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks kualitas udara		
			Indeks kualitas tutupan lahan		
	9. Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)		Indeks risiko bencana (S.5..2)		
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana		
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana		
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
		Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
			Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya		
			Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial		
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
			Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)		Persentase Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)		
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
	15. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik		
			Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar		
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase penurunan SILPA		
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu		
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	16. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.7.2)		Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)		
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas		
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat		

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya		
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase kepemilikan kartu identitas anak		
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
			Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
			Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan DonriDonri(%)		
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja(%)		
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)		
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)		
			Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)		
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%)		
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta(%)		
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lalabata		
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Donri-Donri		

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Liliriaja		
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriwawo		
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lilirilau		
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriawa		
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra		
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Citta		
	17. Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)		
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD.		
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karier ASN sesuai dengan kompetensinya		
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik		

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	SKPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	18. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)		Nilai SAKIP (S7.4)		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
		Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan	Sekretariat Daerah
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah

Berdasarkan sinkronisasi tersebut dapat dilihat bahwa sasaran pembangunan daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2027 memiliki keterkaitan secara keseluruhan dengan sasaran pembangunan nasional 2027 dan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu dukungan program Kabupaten Soppeng terhadap Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027, maka ditetapkan program pembangunan daerah yang mendukung Program Prioritas Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 20. Dukungan Program Kabupaten Soppeng terhadap Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Program Kabupaten Soppeng	Target Tahun 2027
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	5
			Tingkat Kepauasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)	70
			Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	61
			Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)	14
			Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)	10,4
			Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)	1,7
			Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)	79
			Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)	75
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	68
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	70
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)	80
			Penemuan Kasus TBC (%)	90
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	0
			Persentase Puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	80
			Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	90
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	71,78
			Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100
			Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	44,03
5	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan guru	80
			Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	92
6	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	76,5
8	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0,86
9	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100
10	Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Program Kabupaten Soppeng	Target Tahun 2027
	Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
11	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	60
			Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas;	100
			Persentase cakupan perlindungan masyarakat;	100
			Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya.	60
12	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100
13	Program Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Kerja Sama Daerah	100
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100
			Indeks Pengelolaan Zakat daerah	0,53
			Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100
14	Program Pengembangan Kebudayaan	Tidak Ada		
15	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	70
			Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	80
16	Program Pemenuhan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	65
17	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	92
			Indeks Perlindungan Khusus Anak IPKA	63
18	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	5,36
19	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	1
20	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	8,66
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	51
21	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	1,31
22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	4,79
			Pertumbuhan wirausaha	0,13
23	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	9.65
24	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	88.24
25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	5
26	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	7.5
27	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan (poin)	84,3
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	2,86
29	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	3,5
			Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	14
			Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3,5
30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	27.346,54
			Persentase distribusi dan kualitas prasarana pertanian (Peternakan)	58
31	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	91
			Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	15

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Program Kabupaten Soppeng	Target Tahun 2027
32	Program Penyuluh Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	5
			Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	7
33	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	3,5
			Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	14
			Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3,5
34	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	27.346,54
			Persentase distribusi dan kualitas prasarana pertanian (Peternakan)	58
35	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	5
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	6,7
36	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100
37	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	470.1
38	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tidak Ada		
39	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	62.96
40	Progam pengembangan ekspor	Tidak Ada		
41	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100
42	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100
43	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100
44	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Tidak Ada		
45	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	7
46	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	50
47	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	100
			Tingkat Kematangan UKPBJ;	3
			Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan.	100
48	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	16,86
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital.	100
49	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	5,25
			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	4,2
50	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kualitasnya	78
			Persentase fasilitasi tata kelola desa	100
51	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100
			Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	100
			Persentase pelaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	100
			Peningkatan indeks kebutuhan dasar	71,99
			Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi	72
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	100
52	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	100

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Program Kabupaten Soppeng	Target Tahun 2027
			Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA	100
			Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Daerah pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	100
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosia] yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100
53	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100
			Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Iainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100
			Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas	42
			Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	46
			Indeks Peranan Sosial	72
54	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100
			Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100
			Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100
55	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	12
56	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	5,75
57	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	3,15
58	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	89
59	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100
60	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100
61	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun N-1	85
62	Program Penataan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi)	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan SKPD	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Program Kabupaten Soppeng	Target Tahun 2027
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Sosial	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perhubungan	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat DPRD	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Inspektorat Daerah	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Citta	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Ganra	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Donri-Donri	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Program Kabupaten Soppeng	Target Tahun 2027
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo	100
			Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100
63	Program Pengelolaan barang Milik Daerah	Program Pengelolaan barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	5
64	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	100
			Persentase Penurunan SILPA	10,34
			Persentase laporan keuangan tepat waktu	100
65	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Kerja Sama Daerah	100
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100
			Indeks Pengelolaan Zakat daerah	0,53
			Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100
66	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	60
			Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas;	100
			Persentase cakupan perlindungan masyarakat;	100
			Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya.	60
67	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	100
			Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	3
			Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100
68	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Kerja Sama Daerah	100
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100
			Indeks Pengelolaan Zakat daerah	0,53
			Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100
69	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	3,15
70	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	89
71	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	80
			Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	4,5
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	6
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100
72	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	70
			Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan;	17
			Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	50
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	5,5
73	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	20
			Persentase kepemilikan kartu identitas anak	75,5
74	Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100
			Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	99,5
			Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	78
			Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	56,45

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Indikator Program Kabupaten Soppeng	Target Tahun 2027
75	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100
76	Program Penelitian Dan Pengembangan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase kebijakan Riset dan Inovasi Daerah yang Dimanfaatkan	100
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan daerah dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	100
			Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi Daerah	70
77	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	40
78	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	65
79	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Kewenangan Provinsi		
80	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Konektivitas darat	100
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	100
81	Program Pengelolaan Pelayaran	Tidak Ada		
82	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi akibat program pemerintah kabupaten/ kota	100
83	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	45,7
84	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Tidak Ada		
85	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	78
86	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	31.31
87	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	0,45
			Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	0,85
88	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	31.31
89	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak Ada Laut dan Pulau		
90	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Tidak Ada		
91	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	1,97
92	Program Pengelolaan Hutan	Tidak Ada		
93	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	100
94	Program Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan sampah terbangun	52
95	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	73,32
			Indeks kualitas udara	81,02
			Indeks kualitas tutupan lahan	74,73
96	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	100
			Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100
			Persentase penanganan pasca bencana	100

4.2.9. Keselarasan Dukungan Program Kabupaten terhadap Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)

Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dirancang sebagai kompas utama untuk mencapai trisula pembangunan dalam RKP Tahun 2027 yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat secara merata. Namun, keberhasilan PKPN sangat bergantung pada dukungan program tingkat kabupaten, yang bertindak sebagai jembatan operasional di lapangan. Melalui sinkronisasi program, anggaran, pembagian kewenangan yang jelas, serta penyediaan infrastruktur pendukung di daerah, dengan matriks penyelarasan sebagai berikut:

Tabel 4. 21. Keselarasan Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kabupaten Terhadap PKPN Tahun 2027

Fokus Pembangunan	PKPN	Dukungan Daerah dalam RKPD 2027		Perangkat Daerah
		Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Target	
Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, dan Investasi	Makan Bergizi Gratis (MBG) Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	17 Dokumen	
	Sekolah Rakyat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Dinas Sosial
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	700 Usulan	
Stimulus untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat	PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi			
	PRO-KESRA 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Dinas Sosial
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	700 Usulan	
	Program 3 juta Rumah: 1 Juta Rumah Baru	Program Pengembangan Perumahan		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Fokus Pembangunan		Dukungan Daerah dalam RKPD 2027		Perangkat Daerah
	PKPN	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Target	
	dan 2 Juta Renovasi Rumah	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiataan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3 unit rumah	
Swasembada Pangan, Energi dan Air	Pengembangan kawasan pangan terintegrasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		
		Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Laporan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Fokus Pembangunan		Dukungan Daerah dalam RKPD 2027		Perangkat Daerah
	PKPN	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Target	
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
		Sub Kegiatan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	Budidaya Ikan Darat Tematik	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	9 Kelompok	
	Peningkatan Produksi Daging, Susu, dan Telur	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
		Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	12 Laporan	
	Swasembada Air	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan

Fokus Pembangunan	PKPN	Dukungan Daerah dalam RKPD 2027		Perangkat Daerah
		Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Target	
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12 Laporan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian		
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1 Unit	

4.2.10. Keselarasan Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kabupaten terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

Dalam struktur perencanaan pembangunan nasional, Kegiatan Prioritas Utama (KPU) merupakan instrumen strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengawal pencapaian Prioritas Nasional (PN). KPU berfungsi sebagai komitmen operasional yang mengikat kementerian/lembaga teknis di pusat dengan pemerintah daerah. Agar KPU dapat terlaksanasecara efektif di lapangan. Keselarasan dalam dokumen terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) ini diwujudkan melalui dukungan konkret nomenklatur Program hingga Sub Kegiatan yang direlevansikan langsung dengan target-target KPU. Adapun matriks keselarasan dukungan program sub kegiatan dan target pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap Kegiatan Prioritas Utama tahun 2027 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 22. Keselarasan Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kabupaten Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Tahun 2027

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)		Dukungan Daerah dalam RKPD 2027			Keterangan
			Program	Sub Kegiatan	Target	
Prioritas Nasional 1	1.	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industry (BEJO'S)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Relasi Media	103 Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika
Prioritas Nasional 1	2	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)		Dukungan Daerah dalam RKPD 2027			Keterangan
			Program	Sub Kegiatan	Target	
						Ketahanan Pangan
	3	Pembangunan pangan akuatik (blue food)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2 Unit	Dinas Peternakan, Kesehatan hewan dan Perikanan
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan	
	4	Pembangunan Pangan hewani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	12 Laporan	Dinas Peternakan, Kesehatan hewan dan Perikanan
				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12 Laporan	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1 Unit	
	5	Pembangunan Pangan lokal dan nabati	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1 Unit	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1 Unit	
	6	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Laporan	
	11	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	12	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	1 Unit	
	13	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	14	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1dokumen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)		Dukungan Daerah dalam RKPD 2027			Keterangan
			Program	Sub Kegiatan	Target	
	15	Pengelolaan susut dan sisa pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	16	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 Ha	Dinas Lingkungan Hidup
	17	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Program Pengendalian Pencemaran dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6 Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
	19	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	25.000 Ton	Dinas Lingkungan Hidup
	20	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	25.000 Ton	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas Nasional 3	22	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyediaan Akses Internet	34 Titik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Titik	
	23	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyediaan Akses Internet	34 Titik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Titik	
	24	Pengembangan koperasi sektor produksi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Prioritas Nasional 4	28	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karir profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Program Pengelolaan Pendidikan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	29	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	Badan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan,	1 Laporan	

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)		Dukungan Daerah dalam RKPD 2027			Keterangan
			Program	Sub Kegiatan	Target	
				pengkajian, dan penerapan		
				Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	
	30	Penurunan Kematian Ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	
	31	Pencegahan dan penurunan stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230 Orang	
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	150 orang	Dinas Kesehatan
	32	Penyelenggaraan pemeriksaan Kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	
	33	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2890 Orang	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)		Dukungan Daerah dalam RKPD 2027			Keterangan
			Program	Sub Kegiatan	Target	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	
	34	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Dinas Kesehatan
	35	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1 Laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Laporan	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	37 Unit Usaha	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
	36	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	
	37	Investasi pelayanan Kesehatan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230 Orang	Dinas Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen	
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen	

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)		Dukungan Daerah dalam RKPD 2027			Keterangan
			Program	Sub Kegiatan	Target	
	38	Pembangunan RS lengkap berkualitas di Kabupaten/ Kota dan Pengembangan pelayanan Kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Dinas Kesehatan
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230 Orang	
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	150 orang	
	39	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230 Orang	Dinas Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	150 orang	
	40	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	5 Lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	41	Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	Badan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	
				Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	3 Laporan	
	42	Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olah Raga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	7 Unit	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga	350 Orang	
				Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	
				Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah	650 Orang	
Prioritas 5	45	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	8 Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)		Dukungan Daerah dalam RKPD 2027			Keterangan
			Program	Sub Kegiatan	Target	
				Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	70 Unit	dan Ketahanan Pangan
	46	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	37 Unit Usaha	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
Prioritas Nasional 6	47	Penyaluran bantuan social adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui Kartu kesejahteraan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	700 Usulan	Dinas Sosial
	48	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	200 Unit Usaha	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
				Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	200 Unit Usaha	
	50	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	2 Laporan	
				Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	! Lokasi	
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1 lokasi	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5 Unit Rumah	
				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	0,045 Ha	
Prioritas Nasional 7	51	Pencegahan tindak pidana korupsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	44 Laporan	Inspektorat
				Reviu Laporan Kinerja	35 Laporan	
				Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	
				Pengawasan Desa	44 Laporan	
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Laporan	
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	
	52	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1000 dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	3 Lembaga	
				Pengelolaan Data Kepegawaian	16 Dokumen	
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	500 Orang	
	53	Transformasi digital layanan public prioritas	Program Pengelolaan Informasi dan	Relasi Media	103 Laporan	Dinas Komunikasi

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)		Dukungan Daerah dalam RKPD 2027			Keterangan
			Program	Sub Kegiatan	Target	
			Komunikasi Publik			dan Informatika
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyediaan Akses Internet	34 Titik	
				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Titik	Dinas Komunikasi dan Informatika
	54	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	5 Laporan	
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	
				Penagihan Pajak Daerah	20 Dokumen	
Prioritas Nasional 8	55	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	350 orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 orang	
	56	Pemanfaatan Khazanah budaya dan pengembangan Kawasan pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	5 Lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	1 objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengembangan Cagar Budaya	20 objek	

4.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2027

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 153 bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi antara lain penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Olehnya itu dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 harus memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses.

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2027, meliputi pemerataan pelayanan dasar sehat dan pendidikan berbasis spm menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter, pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan dan

pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif

Berdasarkan hasil kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada tahun 2025, yaitu reses II masa persidangan kedua masa persidangan II tahun sidang 2024/2025 dan reses I masa persidangan kedua masa persidangan I tahun sidang 2025/2026, masih dijumpai beberapa kebutuhan masyarakat dalam hal peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, pertanian, sosial dan kesejahteraan rakyat. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 dijabarkan sebagai berikut ini.

- **Prioritas Bidang Infratruktur**
  - ✓ Rehabilitasi jalan/bendungan;
  - ✓ Pembangunan jembatan;
  - ✓ Pembangunan sistem drainase;
  - ✓ Pembangunan perkuatan tebing;
  - ✓ Peningkatan tanggul sungai;
  - ✓ Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota.
- **Prioritas Bidang Pertanian**
  - ✓ Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - ✓ Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
  - ✓ Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya;
  - ✓ Pemanfaatan SDG hewan/tanaman;
  - ✓ Pendampingan penggunaan, penggunaan sarana pendukung pertanian.
- **Prioritas Bidang Pendidikan**
  - ✓ Pembangunan sarana dan prsarana dan utulitas sekolah SD;
  - ✓ Pembangunan gedung/ruang guru PAUD;
  - ✓ Pembangunan unit sekolah baru(USB);
  - ✓ Rehabilitasi rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah;
  - ✓ Rehabilitasi ruang kelas.
- **Prioritas Bidang Pendidikan**
  - ✓ Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan;
  - ✓ Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya;
  - ✓ Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan;
  - ✓ Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas;
  - ✓ Penyediaan dokter ahli di setiap puskesmas.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan dan hasil penyerapan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD, untuk menjadi saran dan pendapat di dalam penyusunan RKPD serta dalam penyusunan anggaran (SIPD-Kemendagri). Pada RKPD Tahun 2027 terdapat sejumlah pokok-pokok pikiran yang diusulkan oleh DPRD sebanyak 579 usulan yamg ditujukan ke 20 SKPD dengan rincian jumlah usulan yang ditujukan ke SKPD sebagai berikut ini.

Tabel 4. 23. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2027

No	Perangkat Daerah	Jumlah Usulan
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	42
2	DINAS KESEHATAN	7
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	241
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2
6	DINAS SOSIAL	8
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2
8	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	107
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1
12	DINAS PERHUBUNGAN	65
13	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	8
14	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3
15	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10
16	SEKRETARIAT DPRD	2
17	KECAMATAN LILIRIAJA	3
18	KECAMATAN LALABATA	7
19	KECAMATAN MARIORIWAWO	8
20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17
	USULAN YANG BELUM DIAJUKAN/DIBATALKAN	7
TOTAL USULAN		**579**

Sumber : SIPD-RI Kemendagri, 2026

Berdasarkan hasil telaahan terhadap usulan Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2027, sebagian besar aspirasi masyarakat memiliki keterkaitan dengan berbagai Prioritas Pembangunan Daerah, terutama pada sektor pertanian, infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tingkat keterkaitan tersebut menunjukkan sejauh mana usulan yang disampaikan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun keterkaitan Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 dengan Prioritas Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat

   Prioritas ini merupakan salah satu prioritas pembangunan yang memiliki usulan yang banyak pada Pokir DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2027. Tingginya usulan pada sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan ketahanan pangan menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap peningkatan produksi pangan. Selain itu terdapat beberapa usulan lainnya yang ditujukan ke Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM terkait dengan sarana distribusi perdagangan dan pengawasan terkait pengawasan perizinan industri. Namun demikian, sebagian besar usulan masih berfokus pada

peningkatan kapasitas produksi melalui bantuan sarana dan prasarana. Usulan yang secara langsung mendukung hilirisasi, pengolahan hasil, peningkatan nilai tambah, ekonomi hijau, dan ekonomi biru masih perlu diperkuat.

2. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi;

   Prioritas ini merupakan usulan Pokir DPRD Tahun 2027 yang memiliki usulan yang paling banyak diantara prioritas pembangunan lainnya. Hal tersebut tercermin dari banyaknya usulan yang diajukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang terkait dengan jalan, irigasi, jaringan SPAM, jembatan, bendungan, restorasi sungai dan lain-lain. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan perbaikan rumah tidak layak huni serta sarana, prasarana dan utilitas umum dan untuk Dinas Perhubungan terkait dengan pembangunan/penyediaan perlengkapan jalan. Secara keseluruhan, dominasi usulan Pokir pada prioritas ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Kabupaten Soppeng dengan adanya peningkatan infastruktur sebut diharapkan mampu memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan konektivitas wilayah, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah

   Prioritas ini terdiri dari usulan Pokir DPRD Tahun 2027 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial. Usulan yang diajukan rata-rata adalah pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana pendidikan/kesehatan. Selain itu usulan lainnya seperti Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga berupa bantuan tekait BPJS serta bantuan terhadap kelompok disabilitas berupa layanan sosial atau alat bantu. Secara keseluruhan, usulan Pokir pada prioritas ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan perlu diarahkan secara terpadu melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, penguatan layanan sosial, serta pengembangan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan produktivitas, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana;

   Beberapa usulan Pokir DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 yang diusulkan terkait dengan prioritas pembangunan ini ditujukan ke tingkat Kecamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Lingkungan Hidup. Rata-rata usulan POKIR yakni terkait dengan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, serta fasilitasi bantuan hibah kepada masyarakat. Secara keseluruhan, usulan Pokir pada prioritas ini

menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan tidak hanya difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan lingkungan, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tangguh terhadap berbagai tantangan.



BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

"Bagian ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat"

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2027

Kerangka pendanaan pada sub bab ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran Kabupaten Soppeng untuk tahun 2027. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan kemampuan keuangan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program.

Struktur Belanja Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Pada tahun 2027 pendapatan di Kabupaten Soppeng diproyeksikan sebesar Rp 949.884.940.549,00 yang terbagi ke dalam Pendapatan Asli Daerah senilai Rp 206.760.761.073,00 dan pendapatan transfer senilai Rp 743.124.179.476,00. Belanja daerah untuk tahun 2027 diproyeksikan senilai Rp 950.676.866.018,00 yang terbagi ke dalam belanja operasi senilai Rp 809.000.265.414,00, belanja modal senilai Rp 43.023.954.393,00, belanja tidak terduga senilai Rp 1.144.454.138,00, serta belanja transfer senilai Rp 97.508.192.073,00. Terkait dengan pembiayaan untuk tahun 2027 diproyeksikan penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman senilai Rp 30.000.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo senilai Rp 29.208.074.531,00. Untuk rincian kerangka pendanaan Kabupaten Soppeng tersebut dapat dilihat pada rincian belanja sebagai berikut ini.

Tabel 5. 1. Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2027

Rek	Uraian	APBD 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (Kolom 4-3)
4	**Pendapatan**				
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**191.732.498.494,00**	**206.760.761.073,00**	**183.711.060.372,19**	**0**
4.1.01	Pajak Daerah	44.337.697.989,00	44.929.091.989,00	44.456.758.253,15	0
4.1.02	Retribusi Daerah	128.490.290.976,00	142.927.159.555,00	119.485.278.228,86	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.220.306.463,00	17.220.306.463,00	16.240.616.560,18	0
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	1.684.203.066,00	1.684.203.066,00	3.528.407.330,00	0
4.2	**Pendapatan Transfer**	**741.361.515.797,00**	**743.124.179.476,00**	**1.313.521.105.994,23**	**0**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	718.653.370.000,00	718.653.370.000,00	1.280.647.566.123,23	0
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	22.708.145.797,00	24.470.809.476,00	32.873.539.871,00	0
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3.01	Pendapatan Hibah			0	0
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			0	0
Jumlah Pendapatan		**933.094.014.291,00**	**949.884.940.549,00**	**1.497.232.166.366,42**	**0**
5	**Belanja Daerah**				
5.1	**Belanja Operasi**	**782.848.862.477,00**	**809.000.265.414,00**	**994.693.487.249,47**	**-5.659.694.398,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	501.523.762.493,00	507.104.838.481,00	539.492.913.734,47	2.495.401.439,00
5.1.02	Belanja Barang Jasa	269.479.078.993,00	296.182.284.799,00	436.350.904.986,00	-15.232.700.821,00
5.1.03	Belanja Bunga	4.768.416.007,00	4.931.456.150,00	2.153.182.545,00	0
5.1.04	Belanja Subsidi	30.019.000,00		326.000.000,00	30.019.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	7.047.585.984,00	781.685.984,00	16.179.725.984	7.047.585.984,00
5.1.06	Belanja Bansos			190.760.000,00	0
5.2	**Belanja Modal**	**31.400.971.393,00**	**43.023.954.393,00**	**320.990.305.963,63**	**5.659.694.398,00**
5.2.01	Belanja Modal tanah	3.000.000,00		575.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.693.955.393,00	4.835.079.093,00	65.654.279.742,00	
5.2.03	Belanja Modal gedung dan bangunan	8.756.465.000,00	4.763.000.000,00	94.764.929.660,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.687.273.000,00	33.425.875.300,00	158.066.557.070,63	

Rek	Uraian	APBD 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (Kolom 4-3)
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	260.278.000,00		849.756.789,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset lainnya			1.079.782.702,00	
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**1.357.006.742,00**	**1.144.454.138,00**	**27.167.083.341,12**	**0**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.357.006.742,00	1.144.454.138,00	27.167.083.341,12	0
5.4	**Belanja Transfer**	**97.445.765.815,00**	**97.508.192.073,00**	**129.014.881.948,20**	**0**
5.4.01	Belanja Bagi hasil	5.008.302.115,00	5.070.728.373,00	16.394.203.648,20	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	92.437.463.700,00	92.437.463.700,00	112.620.678.300,00	0
Total Belanja		**913.052.606.427,00**	**950.676.866.018,00**	**1.471.865.758.502,42**	**0**
Surpulus/(defisit)		**20.041.407.864,00**	**-791.925.469,00**	**25.366.407.864,00**	**0**
6	**Pembiayaan**				
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				-
6.1.02	Pencairan dana Cadangan				-
6.1.03	hasil penjualan kejayaan daerah yang dipisahkan				-
6.1.04	penerimaan pinjaman daerah		30.000.000.000,00		-
6.1.05	penerimaan kembali pinjaman daerah				-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	**30.000.000.000,00**	-	-
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**				-
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.041.407.864,00	29.208.074.531,00	20.041.407.864,00	-
6.2.03	Penyertaan Modal Daerah			5.325.000.000,00	-
6.2.04	Pembentukan Dana Cadangan				-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**20.041.407.864,00**	**29.208.074.531,00**	**25.366.407.864,00**	-
Pembiayaan Netto		**-20.041.407.864,00**	**791.925.469,00**	**-25.366.407.864,00**	-
SiLPA		-	-	-	-

Sumber : - RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029
- BPKPD Kabupaten Soppeng, 2026

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027

Program prioritas pembangunan daerah ditetapkan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2027. Perumusan program prioritas pembangunan daerah memperhatikan prioritas pembangunan nasional maupun daerah, asta cita, serta memperhatikan hasil kesepakatan Rakortekrenbang. Program prioritas pembangunan tersebut menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menentukan kegiatan prioritasnya. Secara keseluruhan sebanyak 8 prioritas pembangunan Nasional, 8 prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan 4 prioritas pembangunan Kabupaten Soppeng yang disinkronkan dengan program prioritas pembangunan. Untuk alokasi anggaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 2. Rencana Alokasi Anggaran berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028	SKPD Penanggung Jawab
Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%) Peningkatan Produksi Hortikultura (%) Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	845.640.069	3.204.376.979	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Populasi Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Peternakan)	9.356.000	3.300.407.204	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	40.950.000	1.389.911.150	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Program Penyuluhan Pertanian	272.500.000	2.997.153.862	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1.100.000	857.954.246	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	946.403.138	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	0	1.008.317.362	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	0	1.501.104.042	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	1.612.296.934	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	1.052.541.807	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Program Penempatan Tenaga Kerja	0	831.419.579	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028	SKPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	900.000	2.096.238.726	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
			Pertumbuhan wirausaha				
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM	300.000	1.892.806.276	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	50.000	4.958.192.139	Dinas Sosial
			Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi				
			Persentase pelaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin				
			Peningkatan indeks kebutuhan dasar				
			Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi				
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan				
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	50.698.655.700	77.852.714.193	Dinas Kesehatan
			Tingkat Kepauasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)				
			Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)				
			Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)				
			Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)				
			Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)				
			Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)				
			Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)				
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)				
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)				
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)				
			Penemuan Kasus TBC (%)				
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	35.095.319.150	56.564.329.593	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028	SKPD Penanggung Jawab
			Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	6.850.000	1.945.875.610	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	96.200.000	1.068.968.030	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Menurunnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase Rumah Layak Huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	62.500.000	705.064.020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	54.762.700	15.829.824.446	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Persentase distribusi dan kualitas prasarana pertanian (Peternakan)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Peternakan)	300.000	3.320.624.094	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka konsumsi ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.000.000	1.273.664.036	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	93.793.341,00	854.163.580	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi;	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	27.533.875.300	95.471.908.499	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.808.000.000	48.289.144.725	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase luas layanan irigasi multikomoditas				
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	100.000.000	750.552.021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	11.400.000	9.068.979.123	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	26.100.000	909.760.026	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028	SKPD Penanggung Jawab
		korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota				
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	9.176.100.000	2.918.813.416	Dinas Perhubungan
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal				
	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	200.000.000	16.399.141.171	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase capaian pelayanan SPALD-S akses aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.763.626.000	22.658.137.242	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase capaian pelayanan SPALD-T akses aman				
		Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan sampah terbangun	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.360.000	272.928.008	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	673.499.600	5.528.055.711	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	600.660.500	632.424.080	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Kesehatan
Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Kesehatan
			Tingkat Kepauasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)				
			Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)				
			Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)				
			Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)				
			Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)				
			Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)				
			Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)				
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)				
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)				

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028	SKPD Penanggung Jawab
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)				
			Penemuan Kasus TBC (%)				
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	65.500.000	477.624.013	Dinas Kesehatan
			Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu				
			Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan				
			Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan				
			Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar				
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Kesehatan
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Program Pengendalian Penduduk	523.865.000	1.768.977.827	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Angka Kelahiran Remaja Umur 1519 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)				
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.203.300.000	902.178.692	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	0	910.049.456	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028	SKPD Penanggung Jawab
			Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
		Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	563.101.348	990.627.583	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
			Pertumbuhan wirausaha				
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Program Pengembangan UMKM	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	600.000	641.886.240	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Sosial
			Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi				
			Persentase pelaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin				
			Peningkatan indeks kebutuhan dasar				
			Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi				
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan				
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Kesehatan
			Tingkat Kepauasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)				
			Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)				
			Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)				
			Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)				

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028	SKPD Penanggung Jawab
			Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)				
			Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)				
			Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)				
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)				
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)				
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)				
			Penemuan Kasus TBC (%)				
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
			Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.174.000.000	796.040.022	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	7.000.000,00	676.002.241	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan	Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitasi penataan desa	Program Penataan Desa	240.000	849.109.357	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	240.000	840.264.468	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kualitasnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.970.979.796	1.724.753.382	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase fasilitasi tata kelola desa				
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.023.935.000	10.354.838.071	Kecamatan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028	SKPD Penanggung Jawab
lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Donri- Donri				
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja				
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo				
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau				
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa				
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Ganra				
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Citta				
	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0	999.472.473	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	30.545.000	1.415.182.262	Dinas Lingkungan Hidup
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	454.800	1.937.030.721	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks kualitas udara				
			Indeks kualitas tutupan lahan				
	Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	191.500.000	2.160.680.061	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana				
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana				
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	135.000.000	4.662.520.132	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
		Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Program Penanganan Bencana	89.850.000	1.364.640.038	Dinas Sosial

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028	SKPD Penanggung Jawab
			Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya				
			Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial				
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.000.000	1.374.748.483	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian				
	Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	0	1.132.145.810	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	0	1.149.835.588	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	13.000.000	1.465.724.486	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD				
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	104.628.401.367	163.178.790.195	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik				
			Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar				
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase penurunan SILPA				
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu				
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	954.640.000	2.836.682.302	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	712.000.000	2.609.242.296	Dinas Komunikasi dan Informatika

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028	SKPD Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.7.2)	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	287.648.240	6.118.136.173	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas				
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat				
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya				
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Program Pendaftaran Penduduk	0	3.573.335.212	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase kepemilikan kartu identitas anak				
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Program Pencatatan Sipil	0	3.215.809.265	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan				
			Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan				
			Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan				
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	90.600.000	831.419.579	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.760.000	707.591.136	Kecamatan
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan DonriDonri(%)				
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja(%)				
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)				
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)				
			Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)				
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%)				
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta(%)				

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028	SKPD Penanggung Jawab
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lalabata				
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Donri-Donri				
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Liliriaja				
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriwawo				
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lilirilau				
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriawa				
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra				
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Citta				
	Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	168.000.000	1.598.397.823	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	249.200.000	2.192.268.951	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan				
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital				
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	167.555.000	947.666.694	Inspektorat Daerah
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)				
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD.				
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program Kepegawaian Daerah	9.500.000	2.849.317.859	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya				

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Pagu Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028	SKPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karier ASN sesuai dengan kompetensinya				
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik				
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	74.868.090	707.591.131	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD				
		Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan	29.000.000	24.224.157.860 (Total Seluruh Bagian di Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Inspektorat Daerah

5.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2027

Guna mencapai sasaran prioritas pembangunan pada tahun 2027, ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pendanaannya. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD). Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD untuk tahun berikutnya (prakiraan maju 1 tahun) dan tahun yang direncanakan, pendanaan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027 juga ditempuh melalui sumber-sumber yang lain yaitu dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027 berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh warga Kabupaten Soppeng. Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Soppeng. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2027 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2027 telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta pemutakhirannya yang dijabarkan dalam urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Serta telah melakukan penyesuaian berdasarkan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur atas perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melakukan inventarisasi atas penambahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dengan mengacu pada perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud, tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melakukan pemutakhiran database dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah

(SIPD).

Rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Soppeng tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 3. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**321.793.555.362,00**							**369.660.058.590,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**321.686.256.262,00**							**364.406.194.443,00**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**321.686.256.262,00**							**364.406.194.443,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**286.479.414.112,00**							**306.067.096.772,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***286.479.414.112,00***							***305.959.596.772,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %		100 %	100 %	286.479.414.112,00						100 %	305.959.596.772,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						285.315.832.512,00					-		302.887.096.772,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan						285.315.832.512,00					-		302.887.096.772,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2500 Orang/bulan		2500 Orang/bulan	2500 Orang/bulan	285.315.832.512,00						2500 Orang/bulan	302.828.096.772,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						285.315.832.512,00							302.828.096.772,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2500 Orang/bulan		2500 Orang/bulan	2500 Orang/bulan	285.315.832.512,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2500 Orang/bulan	302.828.096.772,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						107.000.000,00					-		649.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						107.000.000,00					-		649.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00						2 Laporan	470.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00						1 Paket	4.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.000.000,00						4 Paket	75.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	4.000.000,00						3 Paket	65.000.000,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.000.000,00							4.000.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Paket	4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00							65.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						8.000.000,00						75.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	8.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Paket	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.000.000,00							470.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.019.581.600,00					-		1.070.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerinahan Daerah						1.019.581.600,00					-		1.070.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	223.300.000,00						36 Laporan	370.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	796.281.600,00						12 Laporan	700.000.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						223.300.000,00							370.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	223.300.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		36 Laporan	370.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						796.281.600,00							700.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	796.281.600,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						37.000.000,00					-		577.000.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi						37.000.000,00					-		577.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	30 Unit		30 Unit	30 Unit	37.000.000,00						30 Unit	35.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						37.000.000,00							35.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	37.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		30 Unit	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**35.095.319.150,00**							**55.564.329.593,00**	
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***35.061.769.150,00***							***25.521.329.593,00***	
		Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	80,9		68,74	71,78	35.061.769.150,00						74,82	25.521.329.593,00	
		Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100		99,49	100	35.061.769.150,00						100	25.521.329.593,00	
		Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	58,96		39,06	44,03	35.061.769.150,00						49,01	25.521.329.593,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						20.434.874.500,00					-		22.885.160.650,00	
	Meningkatnya mutu layanan pengelolaan pendidikan sekolah dasar yang tercermin pada ketersediaan sarana prasarana, kompetensi pendidik, tata kelola sekolah, serta capaian belajar peserta didik						20.434.874.500,00					-		22.885.160.650,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.430.000,00						1 Dokumen	238.660.650,00	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.430.000,00						1 Dokumen	7.500.000,00	
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	60 Konten Digital		10 Konten Digital	20 Konten Digital	25.000.000,00						40 Konten Digital	40.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	80 Orang		40 Orang	50 Orang	25.000.000,00						60 Orang	60.000.000,00	
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket		5 Paket	10 Paket	225.000.000,00						10 Paket	40.000.000,00	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3100 Peserta Didik		3100 Peserta Didik	3100 Peserta Didik	1.700.000.000,00						3100 Peserta Didik	1.300.000.000,00	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit		5 Unit	8 Unit	750.000.000,00						8 Unit	3.200.000.000,00	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	5 Satuan Pendidikan		5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	30.625.000,00						5 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	254 Satuan Pendidikan		254 Satuan Pendidikan	254 Satuan Pendidikan	17.143.640.000,00						254 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3100 Peserta Didik		3100 Peserta Didik	3100 Peserta Didik	480.749.500,00						3100 Peserta Didik	3.000.000.000,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						750.000.000,00							3.200.000.000,00	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit		5 Unit	5 Unit	750.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan,		8 Unit	3.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
											kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						480.749.500,00							3.000.000.000,00	
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3100 Peserta Didik		3100 Peserta Didik	3100 Peserta Didik	480.749.500,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		3100 Peserta Didik	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						30.625.000,00							300.000.000,00	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	5 Satuan Pendidikan		5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	30.625.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						17.143.640.000,00							200.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	254 Satuan Pendidikan		254 Satuan Pendidikan	254 Satuan Pendidikan	17.143.640.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		254 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						25.000.000,00							60.000.000,00	
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	80 Orang		40 Orang	254 Orang	25.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		60 Orang	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						25.000.000,00							40.000.000,00	
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	60 Konten Digital		10 Konten Digital	5 Konten Digital	25.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		40 Konten Digital	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						43.430.000,00							238.660.650,00	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.430.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	238.660.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						11.430.000,00							7.500.000,00	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.430.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											produktivitas dan daya saing daerah				
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						225.000.000,00							40.000.000,00	
	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket		5 Paket	3082 Paket	225.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		10 Paket	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						1.700.000.000,00							1.300.000.000,00	
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3100 Peserta Didik		3100 Peserta Didik	3100 Peserta Didik	1.700.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		3100 Peserta Didik	1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						9.873.510.000,00					-		9.493.640.279,00	
	Meningkatnya mutu layanan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang tercermin pada ketersediaan sarana prasarana, kompetensi pendidik, tata kelola sekolah, serta capaian belajar peserta didik						9.873.510.000,00					-		9.493.640.279,00	
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		2 Konten Digital	5 Konten Digital	8.550.000,00						5 Konten Digital	25.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	39 Orang		39 Orang	39 Orang	8.550.000,00						39 Orang	78.000.000,00	
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	40 Paket		0 Paket	20 Paket	180.000.000,00						40 Paket	80.000.000,00	
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2300 Peserta Didik		2300 Peserta Didik	2300 Peserta Didik	1.300.000.000,00						2300 Peserta Didik	1.500.000.000,00	
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	39 Satuan Pendidikan		39 Satuan Pendidikan	39 Satuan Pendidikan	17.000.000,00						39 Satuan Pendidikan	195.000.000,00	
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	39 Satuan Pendidikan		39 Satuan Pendidikan	39 Satuan Pendidikan	7.964.520.000,00						39 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2300 Peserta Didik		2300 Peserta Didik	2300 Peserta Didik	394.890.000,00						2300 Peserta Didik	230.000.000,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						1.300.000.000,00							1.500.000.000,00	
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2300 Peserta Didik		2300 Peserta Didik	2300 Peserta Didik	1.300.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2300 Peserta Didik	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						394.890.000,00							230.000.000,00	
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2300 Peserta Didik		2300 Peserta Didik	200 Peserta Didik	394.890.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2300 Peserta Didik	230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						17.000.000,00							195.000.000,00	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	39 Satuan Pendidikan		39 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	17.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan		39 Satuan Pendidikan	195.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
											masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						7.964.520.000,00							200.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	39 Satuan Pendidikan		39 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	7.964.520.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		39 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						8.550.000,00							78.000.000,00	
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	39 Orang		39 Orang	190 Orang	8.550.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		39 Orang	78.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						8.550.000,00							25.000.000,00	
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		2 Konten Digital	5 Konten Digital	8.550.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5 Konten Digital	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						180.000.000,00							80.000.000,00	
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	40 Paket		0 Paket	2465 Paket	180.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		40 Paket	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						2.844.434.650,00					-		7.505.520.211,00	
	Meningkatnya keterjangkauan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 3 6 tahun						2.844.434.650,00					-		7.505.520.211,00	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.534.650,00						1 Dokumen	7.500.000,00	
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	165 Satuan Pendidikan		165 Satuan Pendidikan	165 Satuan Pendidikan	2.703.900.000,00						165 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						2.703.900.000,00							200.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	165 Satuan Pendidikan		165 Satuan Pendidikan	165 Satuan Pendidikan	2.703.900.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		165 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						140.534.650,00							7.500.000,00	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.534.650,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1.942.500.000,00					-		15.680.008.453,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
	Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan nonformal/ kesetaraan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas						1.942.500.000,00					-		15.680.008.453,00	
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	9 Satuan Pendidikan		9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	1.942.500.000,00						9 Satuan Pendidikan	1.800.000.000,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						1.942.500.000,00							1.800.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	9 Satuan Pendidikan		9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	1.942.500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		9 Satuan Pendidikan	1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**111.523.000,00**							**1.751.288.049,00**	
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan						***111.523.000,00***							***1.751.288.049,00***	
		1.Indeks pemerataan guru	100 %		75.00 %	80.00 %	111.523.000,00						85.00 %	1.751.288.049,00	
		2.Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	100 %		90.00 %	92.00 %	111.523.000,00						95.00 %	1.751.288.049,00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						111.523.000,00					-		1.751.288.049,00	
	Meningkatnya pemerataan jumlah dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan						111.523.000,00					-		1.751.288.049,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	111.523.000,00						1 Laporan	887.016.025,00	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						111.523.000,00							887.016.025,00	
	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	111.523.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Laporan	887.016.025,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**107.299.100,00**							**5.253.864.147,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**107.299.100,00**							**5.253.864.147,00**	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**17.000.000,00**							**928.713.359,00**	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional						***17.000.000,00***							***928.713.359,00***	
		1.Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	100 Persentase		80 Persentase	85 Persentase	17.000.000,00						90 Persentase	928.713.359,00	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						17.000.000,00					-		928.713.359,00	
	Terbinanya kelompok dan pelaku kesenian daerah melalui pembinaan dan fasilitasi pemerintah daerah sehingga kesenian tradisional tetap lestari dan berkembang						17.000.000,00					-		928.713.359,00	
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	17.000.000,00						10 Lembaga	250.000.000,00	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						17.000.000,00							250.000.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga		10 Lembaga	5 Lembaga	17.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna		10 Lembaga	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
											mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**90.299.100,00**							**1.698.218.714,00**	
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan						***90.299.100,00***							***1.578.218.714,00***	
		1.Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	85 %		65 %	70 %	90.299.100,00						75 %	1.578.218.714,00	
		2.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	95 %		75 %	80 %	90.299.100,00						85 %	1.578.218.714,00	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						73.299.100,00					-		320.000.000,00	
	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan peringkat kabupaten/kota						73.299.100,00					-		320.000.000,00	
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek		2 Objek	2 Objek	73.299.100,00						2 Objek	120.000.000,00	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						73.299.100,00							120.000.000,00	
	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek		2 Objek	1 Objek	73.299.100,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Objek	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						17.000.000,00					-		1.378.218.714,00	
	Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten/kota yang dikelola						17.000.000,00					-		1.378.218.714,00	
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	50 Objek		50 Objek	50 Objek	17.000.000,00						50 Objek	200.000.000,00	
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya						17.000.000,00							200.000.000,00	
	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	50 Objek		50 Objek	20 Objek	17.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		50 Objek	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	DINAS KESEHATAN						**128.700.245.518,00**							**134.350.661.310,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**128.700.245.518,00**							**134.350.661.310,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**128.700.245.518,00**							**134.350.661.310,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***86.959.225.128,00***							***91.735.296.201,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	86.959.225.128,00						100 %	91.735.296.201,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						84.348.876.328,00					-		89.619.871.276,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						84.348.876.328,00					-		89.619.871.276,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	917 Orang/bulan		917 Orang/bulan	917 Orang/bulan	84.348.876.328,00						917 Orang/bulan	89.603.371.276,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						84.348.876.328,00							89.603.371.276,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	917 Orang/bulan		917 Orang/bulan	917 Orang/bulan	84.348.876.328,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		917 Orang/bulan	89.603.371.276,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						82.000.000,00					-		174.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						82.000.000,00					-		174.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00						12 Laporan	55.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	30.000.000,00						6 Paket	31.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	12.000.000,00						6 Paket	22.000.000,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00							31.000.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	2555 Paket	30.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		6 Paket	31.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.000.000,00							22.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	12.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		6 Paket	22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.000.000,00							55.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.303.948.800,00					-		1.666.669.125,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.303.948.800,00					-		1.666.669.125,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	295.300.000,00						12 Laporan	335.940.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.008.648.800,00						12 Laporan	1.330.729.125,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						239.900.000,00							275.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	239.900.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.008.648.800,00							1.330.729.125,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	2.008.648.800,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	1.330.729.125,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						454.800.000,00					-		804.846.725,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik						454.800.000,00					-		804.846.725,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit		62 Unit	62 Unit	454.800.000,00						62 Unit	782.846.725,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						279.800.000,00							280.695.800,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit		62 Unit	62 Unit	279.800.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		62 Unit	280.695.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***40.639.161.890,00***							***41.274.176.259,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	40.639.161.890,00						80 %	41.274.176.259,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	40.639.161.890,00						80 %	41.274.176.259,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	40.639.161.890,00						80 %	41.274.176.259,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	40.639.161.890,00						1.7 %	41.274.176.259,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	40.639.161.890,00						5 %	41.274.176.259,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	40.639.161.890,00						14.1 %	41.274.176.259,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	40.639.161.890,00						65 %	41.274.176.259,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	40.639.161.890,00						89 %	41.274.176.259,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	40.639.161.890,00						81 %	41.274.176.259,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	40.639.161.890,00						9.4 Persentase	41.274.176.259,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	40.639.161.890,00						90 %	41.274.176.259,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	40.639.161.890,00						80 Nilai	41.274.176.259,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						7.544.647.200,00					-		9.872.900.000,00	
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia						7.544.647.200,00					-		9.872.900.000,00	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	19 Unit		19 Unit	19 Unit	975.717.200,00						19 Unit	990.000.000,00	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11 Unit		7 Unit	7 Unit	200.000.000,00						9 Unit	1.340.000.000,00	
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	88.890.000,00						17 Paket	97.900.000,00	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit		1 Unit	2 Unit	1.260.000.000,00						2 Unit	1.150.000.000,00	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.370.040.000,00						1 Paket	5.525.000.000,00	
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	17 Unit		10 Unit	11 Unit	650.000.000,00						12 Unit	770.000.000,00	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						1.260.000.000,00							1.150.000.000,00	
	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit		1 Unit	3 Unit	1.260.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan,		2 Unit	1.150.000.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						650.000.000,00							770.000.000,00	
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	17 Unit		10 Unit	4 Unit	650.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Unit	770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						975.717.200,00							990.000.000,00	
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	19 Unit		19 Unit	17 Unit	975.717.200,00	Kab. Soppeng	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		19 Unit	990.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						4.370.040.000,00							5.525.000.000,00	
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.370.040.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Paket	5.525.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						88.890.000,00							97.900.000,00	
	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	17 Paket		17 Paket	1 Paket	88.890.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Paket	97.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9846 Orang		9846 Orang	9846 Orang	10.000.000,00						9846 Orang	1.100.000,00	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3032 Orang		2913 Orang	3002 Orang	350.058.500,00						3012 Orang	385.064.350,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000.000,00						1 Dokumen	27.500.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	22.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	113.270.000,00						17 Dokumen	124.597.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	109.600.000,00						17 Dokumen	120.560.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00						1 Dokumen	18.700.000,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	90.700.000,00						17 Dokumen	110.770.000,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	25.550.000,00						250 Orang	28.050.000,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2555 Orang		2555 Orang	2555 Orang	12.000.000,00						2555 Orang	13.200.000,00	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4940 Orang		4940 Orang	4940 Orang	20.000.000,00						4940 Orang	22.000.000,00	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang		150 Orang	150 Orang	19.950.000,00						150 Orang	21.945.000,00	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76096 Orang		76096 Orang	76096 Orang	15.000.000,00						76096 Orang	16.500.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						15.000.000,00							16.500.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	2574 Orang	15.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						25.550.000,00							28.050.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	2811 Orang	25.550.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	28.050.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						350.058.500,00							385.064.350,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3032 Orang		2913 Orang	2790 Orang	350.058.500,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		3012 Orang	385.064.350,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						10.000.000,00							1.100.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9846 Orang		9846 Orang	9846 Orang	10.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		9846 Orang	1.100.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						15.000.000,00							16.500.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	15.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5673 Orang	16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						15.000.000,00							16.500.000,00	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76096 Orang		76096 Orang	76096 Orang	15.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		76096 Orang	16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						12.000.000,00							13.200.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang		150 Orang	76096 Orang	12.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		150 Orang	13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						20.000.000,00							22.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4940 Orang		4940 Orang	4940 Orang	20.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		4940 Orang	22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						12.000.000,00							13.200.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2555 Orang		2555 Orang	2555 Orang	12.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2555 Orang	13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						20.000.000,00							22.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						393.066.000,00							710.497.700,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	17 Dokumen	393.066.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	710.497.700,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						109.600.000,00							120.560.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	109.600.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	120.560.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						113.270.000,00							124.597.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	17 Dokumen		17 Dokumen	7 Dokumen	113.270.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	124.597.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						10.000.000,00							11.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						30.000.000.000,00							27.500.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	27.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						17.000.000,00							18.700.000,00	
	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	18.700.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.547.200.000,00							1.712.920.000,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	1.547.200.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	1.712.920.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						20.000.000,00							22.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1200000 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						55.827.190,00					-		147.989.909,00	
	Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						55.827.190,00					-		147.989.909,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	55.827.190,00						17 Dokumen	147.989.909,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						55.827.190,00						147.989.909,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	55.827.190,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	147.989.909,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						235.673.000,00					-		270.240.300,00	
	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Tingkat Daerah yang terlakasana						235.673.000,00					-		270.240.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	10.000.000,00						17 Dokumen	11.000.000,00	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	17 Unit		17 Unit	17 Unit	225.673.000,00						17 Unit	248.240.300,00	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						225.673.000,00							248.240.300,00	
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	17 Unit		17 Unit	17 Unit	225.673.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Unit	248.240.300,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						10.000.000,00							11.000.000,00	
	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-		-	-	193.630.000,00						-	212.993.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	797.457.500,00						-	768.083.250,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	15.000.000,00						-	16.500.000,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar													
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	33.750.000,00						-	37.125.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						12.000.000,00							13.200.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	413 Orang	12.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						25.000.000,00							27.500.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	194 Orang	25.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						15.000.000,00							16.500.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	2596 Orang	15.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						193.630.000,00							212.993.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-		-	17 Dokumen	193.630.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	212.993.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						5.000.000,00							5.500.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-		-	17 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						176.640.000,00							194.304.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	17 Dokumen	176.640.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	194.304.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						10.000.000,00							11.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	17 Laporan	10.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						109.600.000,00							55.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	17 Laporan	109.600.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**703.668.000,00**							**774.034.800,00**	
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan						***688.668.000,00***							***757.534.800,00***	
		1.Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	0.003 Rasio		0.003 Rasio	0.003 Rasio	688.668.000,00						0.003 Rasio	757.534.800,00	
		2.Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	90 Persentase		78 Persentase	80 Persentase	688.668.000,00						82 Persentase	757.534.800,00	
		3.Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	95 Persentase		90 Persentase	90 Persentase	688.668.000,00						95 Persentase	757.534.800,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						688.668.000,00					-		757.534.800,00	
	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						688.668.000,00					-		757.534.800,00	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	230 Orang		230 Orang	230 Orang	688.668.000,00						230 Orang	757.534.800,00	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						688.668.000,00							757.534.800,00	
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	230 Orang		230 Orang	230 Orang	688.668.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		230 Orang	757.534.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						15.000.000,00					-		16.500.000,00	
	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						15.000.000,00					-		16.500.000,00	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	15.000.000,00						-	16.500.000,00	
1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						15.000.000,00							16.500.000,00	
	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	150 Orang	15.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**65.500.000,00**							**123.750.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman						***65.500.000,00***							***112.750.000,00***	
		1.Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar	80 %		60 %	60 %	65.500.000,00						80 %	112.750.000,00	
		2.Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu	80 %		60 %	60 %	65.500.000,00						80 %	112.750.000,00	
		3.Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	80 %		60 %	60 %	65.500.000,00						80 %	112.750.000,00	
		4.Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	80 %		60 %	60 %	65.500.000,00						80 %	112.750.000,00	
		5.Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	80 %		60 %	60 %	65.500.000,00						80 %	112.750.000,00	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						65.500.000,00					-		13.200.000,00	
	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						65.500.000,00					-		13.200.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.500.000,00						1 Dokumen	13.200.000,00	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						65.500.000,00							13.200.000,00	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.500.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***84.090.500,00***							***92.504.050,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	84.090.500,00						100 %	92.504.050,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaangga						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	271.600.000,00						17 Dokumen	298.480.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						27.000.000,00							29.700.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	29.700.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						57.090.500,00							62.804.050,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	57.090.500,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	62.804.050,00	DINAS KESEHATAN
	Puskesmas Salotungo						**2.555.318.000,00**							**2.810.849.800,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.555.318.000,00**							**2.810.849.800,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.555.318.000,00**							**2.810.849.800,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***1.900.000.000,00***							***2.090.000.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	1.900.000.000,00						100 %	2.090.000.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.900.000.000,00							2.090.000.000,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.900.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Unit Kerja	2.090.000.000,00	Puskesmas Salotungo
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***616.363.000,00***							***677.999.300,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	616.363.000,00						80 %	677.999.300,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	616.363.000,00						80 %	677.999.300,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	616.363.000,00						80 %	677.999.300,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	616.363.000,00						1.7 %	677.999.300,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	616.363.000,00						5 %	677.999.300,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	616.363.000,00						14.1 %	677.999.300,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	616.363.000,00						65 %	677.999.300,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	616.363.000,00						89 %	677.999.300,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	616.363.000,00						81 %	677.999.300,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	616.363.000,00						9.4 Persentase	677.999.300,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	616.363.000,00						90 %	677.999.300,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	616.363.000,00						80 Nilai	677.999.300,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						16.000.000,00							17.600.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	151 Orang	16.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	17.600.000,00	Puskesmas Salotungo
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						75.450.000,00							82.995.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	1332 Orang	75.450.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5673 Orang	82.995.000,00	Puskesmas Salotungo
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						171.313.000,00							188.444.300,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	171.313.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	188.444.300,00	Puskesmas Salotungo
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12.150.000,00							13.365.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.150.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	13.365.000,00	Puskesmas Salotungo
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						39.700.000,00							43.670.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.700.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	43.670.000,00	Puskesmas Salotungo
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						109.900.000,00							120.890.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	109.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	120.890.000,00	Puskesmas Salotungo
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						52.200.000,00							57.420.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	52.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	57.420.000,00	Puskesmas Salotungo
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	797.457.500,00						-	768.083.250,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	101.175.000,00						-	111.472.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.000.000,00							9.900.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	16 Orang	9.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	9.900.000,00	Puskesmas Salotungo
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						16.800.000,00							18.480.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	5 Orang	16.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	18.480.000,00	Puskesmas Salotungo
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						900.000,00							990.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		-	990.000,00	Puskesmas Salotungo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
								Lalabata Rilau || 0			produktivitas dan daya saing daerah			
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						12.300.000,00						13.530.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	78 Orang	12.300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	13.530.000,00	Puskesmas Salotungo
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.000.000,00						55.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	55.000.000,00	Puskesmas Salotungo
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						50.650.000,00						55.715.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	50.650.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	55.715.000,00	Puskesmas Salotungo
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**						**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***38.955.000,00***						***42.850.500,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	38.955.000,00					100 %	42.850.500,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						271.600.000,00					-	298.480.000,00	
	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaangga						271.600.000,00					-	298.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	271.600.000,00					17 Dokumen	298.480.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						25.800.000,00						28.380.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	25.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	28.380.000,00	Puskesmas Salotungo
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-	361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-	361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00					17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						13.155.000,00						14.470.500,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	13.155.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng ||	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan		17 Dokumen	14.470.500,00	Puskesmas Salotungo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0			keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
	Puskesmas Sewo						**1.479.554.588,00**							**1.627.510.047,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.479.554.588,00**							**1.627.510.047,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.479.554.588,00**							**1.627.510.047,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***919.082.588,00***							***1.010.990.847,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	919.082.588,00						100 %	1.010.990.847,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						919.082.588,00							1.010.990.847,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	919.082.588,00	Kab. Soppeng	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Unit Kerja	1.010.990.847,00	Puskesmas Sewo
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***466.044.500,00***							***512.648.950,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	466.044.500,00						80 %	512.648.950,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	466.044.500,00						80 %	512.648.950,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	466.044.500,00						80 %	512.648.950,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	466.044.500,00						1.7 %	512.648.950,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	466.044.500,00						5 %	512.648.950,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	466.044.500,00						14.1 %	512.648.950,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	466.044.500,00						65 %	512.648.950,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	466.044.500,00						89 %	512.648.950,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	466.044.500,00						81 %	512.648.950,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	466.044.500,00						9.4 Persentase	512.648.950,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	466.044.500,00						90 %	512.648.950,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	466.044.500,00						80 Nilai	512.648.950,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						12.000.000,00							13.200.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	152 Orang	12.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	13.200.000,00	Puskesmas Sewo
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						47.400.000,00							52.140.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	332 Orang	47.400.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5673 Orang	52.140.000,00	Puskesmas Sewo
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						111.052.000,00							122.157.200,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	111.052.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	122.157.200,00	Puskesmas Sewo
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						23.025.000,00							25.327.500,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.025.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	25.327.500,00	Puskesmas Sewo
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						34.425.000,00							37.867.500,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.425.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	37.867.500,00	Puskesmas Sewo
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						83.530.000,00							91.883.000,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	83.530.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	91.883.000,00	Puskesmas Sewo
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						48.675.000,00							53.542.500,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.675.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	53.542.500,00	Puskesmas Sewo
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	797.457.500,00						-	768.083.250,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	101.175.000,00						-	111.472.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.000.000,00							9.900.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	31 Orang	9.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	9.900.000,00	Puskesmas Sewo
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						33.525.000,00							36.877.500,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	20 Orang	33.525.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	36.877.500,00	Puskesmas Sewo
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						2.100.000,00							2.310.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	2.310.000,00	Puskesmas Sewo
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						9.450.000,00							10.395.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	76 Orang	9.450.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna		-	10.395.000,00	Puskesmas Sewo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						51.862.500,00							57.048.750,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	51.862.500,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	57.048.750,00	Puskesmas Sewo
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						51.862.500,00							57.048.750,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	51.862.500,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	57.048.750,00	Puskesmas Sewo
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***42.565.000,00***							***46.821.500,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	42.565.000,00						100 %	46.821.500,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						42.565.000,00							46.821.500,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	42.565.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	46.821.500,00	Puskesmas Sewo
	Puskesmas Malaka						**1.478.918.782,00**							**1.626.810.660,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.478.918.782,00**							**1.626.810.660,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.478.918.782,00**							**1.626.810.660,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***960.875.782,00***							***1.056.963.360,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	960.875.782,00						100 %	1.056.963.360,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						960.875.782,00							1.056.963.360,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	100% Unit Kerja	960.875.782,00	Kab. Soppeng	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		17 Unit Kerja	1.056.963.360,00	Puskesmas Malaka

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
											produktivitas dan daya saing daerah			
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***494.648.000,00***							***544.112.800,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	494.648.000,00						80 %	544.112.800,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	494.648.000,00						80 %	544.112.800,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	494.648.000,00						80 %	544.112.800,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	494.648.000,00						1.7 %	544.112.800,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	494.648.000,00						5 %	544.112.800,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	494.648.000,00						14.1 %	544.112.800,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	494.648.000,00						65 %	544.112.800,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	494.648.000,00						89 %	544.112.800,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	494.648.000,00						81 %	544.112.800,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	494.648.000,00						9.4 Persentase	544.112.800,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	494.648.000,00						90 %	544.112.800,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	494.648.000,00						80 Nilai	544.112.800,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						11.400.000,00							12.540.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	100% Orang	11.400.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	12.540.000,00	Puskesmas Malaka
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						57.300.000,00							63.030.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	100% Orang	57.300.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan		5673 Orang	63.030.000,00	Puskesmas Malaka

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						133.903.000,00							147.293.300,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	133.903.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	147.293.300,00	Puskesmas Malaka
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12.750.000,00							14.025.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.750.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	14.025.000,00	Puskesmas Malaka
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						27.000.000,00							29.700.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	29.700.000,00	Puskesmas Malaka
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						138.295.000,00							152.124.500,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	138.295.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	152.124.500,00	Puskesmas Malaka
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						33.450.000,00							36.795.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.450.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	36.795.000,00	Puskesmas Malaka
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						7.200.000,00							7.920.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	100% Orang	7.200.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	7.920.000,00	Puskesmas Malaka
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						10.650.000,00							11.715.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	100% Orang	10.650.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	11.715.000,00	Puskesmas Malaka
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						900.000,00							990.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	990.000,00	Puskesmas Malaka
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						61.800.000,00							67.980.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	61.800.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	67.980.000,00	Puskesmas Malaka
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***23.395.000,00***							***25.734.500,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	23.395.000,00						100 %	25.734.500,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaangga						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	271.600.000,00						17 Dokumen	298.480.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						9.450.000,00							10.395.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	10.395.000,00	Puskesmas Malaka
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						13.945.000,00							15.339.500,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	13.945.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	15.339.500,00	Puskesmas Malaka
	Puskesmas Cabbenge						**2.173.326.000,00**							**2.390.658.600,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.173.326.000,00**							**2.390.658.600,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.173.326.000,00**							**2.390.658.600,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***1.564.482.000,00***							***1.720.930.200,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	1.564.482.000,00						100 %	1.720.930.200,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.564.482.000,00							1.720.930.200,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.564.482.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Unit Kerja	1.720.930.200,00	Puskesmas Cabbenge
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***598.214.000,00***							***658.035.400,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	598.214.000,00						80 %	658.035.400,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	598.214.000,00						80 %	658.035.400,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	598.214.000,00						80 %	658.035.400,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	598.214.000,00						1.7 %	658.035.400,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	598.214.000,00						5 %	658.035.400,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	598.214.000,00						14.1 %	658.035.400,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	598.214.000,00						65 %	658.035.400,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	598.214.000,00						89 %	658.035.400,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	598.214.000,00						81 %	658.035.400,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	598.214.000,00						9.4 Persentase	658.035.400,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	598.214.000,00						90 %	658.035.400,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	598.214.000,00						80 Nilai	658.035.400,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						12.000.000,00							13.200.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	151 Orang	12.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	13.200.000,00	Puskesmas Cabbenge
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						54.000.000,00							59.400.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	332 Orang	54.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5673 Orang	59.400.000,00	Puskesmas Cabbenge
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						159.805.000,00							175.785.500,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	159.805.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	175.785.500,00	Puskesmas Cabbenge
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15.150.000,00							16.665.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.150.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	16.665.000,00	Puskesmas Cabbenge
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						50.550.000,00							55.605.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.550.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	55.605.000,00	Puskesmas Cabbenge
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						111.359.000,00							122.494.900,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	111.359.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan		17 Dokumen	122.494.900,00	Puskesmas Cabbenge

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						46.500.000,00							51.150.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	46.500.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	51.150.000,00	Puskesmas Cabbenge
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	17.600.000,00						-	19.360.000,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	101.175.000,00						-	111.472.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.300.000,00							6.930.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	40 Orang	6.300.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	6.930.000,00	Puskesmas Cabbenge
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						16.650.000,00							18.315.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	381 Orang	16.650.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	18.315.000,00	Puskesmas Cabbenge
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						900.000,00							990.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	990.000,00	Puskesmas Cabbenge
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						17.600.000,00							19.360.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	1 Dokumen	17.600.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan,		-	19.360.000,00	Puskesmas Cabbenge

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
											kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah			
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						12.900.000,00						14.190.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	250 Orang	12.900.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	14.190.000,00	Puskesmas Cabbenge
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						94.500.000,00						103.950.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	94.500.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	103.950.000,00	Puskesmas Cabbenge
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***10.630.000,00***							***11.693.000,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	10.630.000,00						100 %	11.693.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						10.630.000,00							11.693.000,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	10.630.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	11.693.000,00	Puskesmas Cabbenge
	Puskesmas Baringeng						**1.948.765.711,00**							**1.910.295.900,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**596.469.000,00**							**656.295.900,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**596.469.000,00**							**656.295.900,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***553.839.000,00***							***609.402.900,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	553.839.000,00						80 %	609.402.900,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	553.839.000,00						80 %	609.402.900,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	553.839.000,00						80 %	609.402.900,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	553.839.000,00						1.7 %	609.402.900,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	553.839.000,00						5 %	609.402.900,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	553.839.000,00						14.1 %	609.402.900,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	553.839.000,00						65 %	609.402.900,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	553.839.000,00						89 %	609.402.900,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	553.839.000,00						81 %	609.402.900,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	553.839.000,00						9.4 Persentase	609.402.900,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	553.839.000,00						90 %	609.402.900,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	553.839.000,00						80 Nilai	609.402.900,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						16.000.000,00							17.600.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	151 Orang	16.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Masing || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Kebo || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Baringeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	17.600.000,00	Puskesmas Baringeng
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						40.500.000,00							44.550.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	332 Orang	40.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng ||	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan		5673 Orang	44.550.000,00	Puskesmas Baringeng

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Kecamatan Lilirilau || Desa Masing || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Kebo || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Baringeng || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0			keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						149.194.000,00							164.113.400,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	149.194.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Kebo || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Baringeng || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Masing || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	164.113.400,00	Puskesmas Baringeng
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						16.500.000,00							18.150.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Baringeng || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Masing || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0 ||	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	18.150.000,00	Puskesmas Baringeng

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Kebo || 1							
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						30.600.000,00							33.660.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Kebo || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Baringeng || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Masing || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	33.660.000,00	Puskesmas Baringeng
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						112.345.000,00							123.579.500,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	112.345.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Kebo || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Baringeng || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Masing || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	123.579.500,00	Puskesmas Baringeng
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						45.600.000,00							50.160.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0 || Provinsi Sulawesi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	50.160.000,00	Puskesmas Baringeng

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Masing || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Baringeng || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Kebo || 1						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	101.175.000,00						-	111.472.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.300.000,00							6.930.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	24 Orang	6.300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Masing || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Kebo || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Baringeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	6.930.000,00	Puskesmas Baringeng
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						14.400.000,00							15.840.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	11 Orang	14.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Kebo || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Masing || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Baringeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	15.840.000,00	Puskesmas Baringeng
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak						900.000,00							990.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Baringeng || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Kebo || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Masing || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	990.000,00	Puskesmas Baringeng
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						8.700.000,00							9.750.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	24 Orang	8.700.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Baringeng || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Kebo || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	9.750.000,00	Puskesmas Baringeng

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Masing || 1							
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						112.800.000,00							124.080.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	112.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Kebo || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Masing || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Baringeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	124.080.000,00	Puskesmas Baringeng
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***42.630.000,00***							***46.893.000,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	42.630.000,00						100 %	46.893.000,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaangga						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	271.600.000,00						17 Dokumen	298.480.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						25.250.000,00							27.775.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	25.250.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Masing || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Baringeng || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng ||	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	27.775.000,00	Puskesmas Baringeng

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Kecamatan Lilirilau || Desa Kebo || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0							
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						17.380.000,00							19.118.000,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	17.380.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Kebo || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Baringeng || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Masing || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	19.118.000,00	Puskesmas Baringeng
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.352.296.711,00**							**1.254.000.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.352.296.711,00**							**1.254.000.000,00**	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	-		-	100 %	1.352.296.711,00						-	1.254.000.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.352.296.711,00					-		1.254.000.000,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						1.352.296.711,00					-		1.254.000.000,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	1.352.296.711,00						17 Unit Kerja	1.254.000.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.352.296.711,00							1.254.000.000,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.352.296.711,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Unit Kerja	1.254.000.000,00	Puskesmas Baringeng
	Puskesmas Cakkuridi						**1.286.365.359,00**							**1.415.001.895,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.286.365.359,00**							**1.415.001.895,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.286.365.359,00**							**1.415.001.895,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***769.015.359,00***							***845.916.895,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	769.015.359,00						100 %	845.916.895,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						769.015.359,00							845.916.895,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	769.015.359,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Abbanuange || 1	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		17 Unit Kerja	845.916.895,00	Puskesmas Cakkuridi
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***481.265.000,00***							***529.391.500,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	481.265.000,00						80 %	529.391.500,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	481.265.000,00						80 %	529.391.500,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	481.265.000,00						80 %	529.391.500,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	481.265.000,00						1.7 %	529.391.500,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	481.265.000,00						5 %	529.391.500,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	481.265.000,00						14.1 %	529.391.500,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	481.265.000,00						65 %	529.391.500,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	481.265.000,00						89 %	529.391.500,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	481.265.000,00						81 %	529.391.500,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	481.265.000,00						9.4 Persentase	529.391.500,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	481.265.000,00						90 %	529.391.500,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	481.265.000,00						80 Nilai	529.391.500,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						12.000.000,00							13.200.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	152 Orang	12.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Abbanuange || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	13.200.000,00	Puskesmas Cakkuridi
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						46.200.000,00							50.820.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	1999 Orang	46.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Abbanuange || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5673 Orang	50.820.000,00	Puskesmas Cakkuridi
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						116.790.000,00							128.469.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	116.790.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Abbanuange || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	128.469.000,00	Puskesmas Cakkuridi
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15.450.000,00							16.995.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.450.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Abbanuange || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Dokumen	16.995.000,00	Puskesmas Cakkuridi
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						45.300.000,00							49.830.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Abbanuange || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Dokumen	49.830.000,00	Puskesmas Cakkuridi
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						93.425.000,00							102.767.500,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	93.425.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Abbanuange || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		17 Dokumen	102.767.500,00	Puskesmas Cakkuridi
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						40.800.000,00							44.880.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Abbanuange || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Dokumen	44.880.000,00	Puskesmas Cakkuridi
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	101.175.000,00						-	111.472.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						8.100.000,00							8.910.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	25 Orang	8.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Abbanuange || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		-	8.910.000,00	Puskesmas Cakkuridi
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						16.800.000,00							18.480.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	60 Orang	16.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Abbanuange || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		-	18.480.000,00	Puskesmas Cakkuridi
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						600.000,00							660.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Abbanuange || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	660.000,00	Puskesmas Cakkuridi
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						5.700.000,00							6.270.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	25 Orang	5.700.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Abbanuange || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		-	6.270.000,00	Puskesmas Cakkuridi
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						80.100.000,00							88.110.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	80.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Abbanuange || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		-	88.110.000,00	Puskesmas Cakkuridi
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***36.085.000,00***							***39.693.500,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	36.085.000,00						100 %	39.693.500,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						271.600.000,00					-		298.480.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaangga						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	271.600.000,00						17 Dokumen	298.480.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						20.020.000,00							22.022.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	20.020.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Abbanuange || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		17 Dokumen	22.022.000,00	Puskesmas Cakkuridi
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						16.065.000,00							17.671.500,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	16.065.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Desa Abbanuange || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		17 Dokumen	17.671.500,00	Puskesmas Cakkuridi
	Puskesmas Cangadi						**2.361.035.000,00**							**2.623.428.500,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.361.035.000,00**							**2.623.428.500,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.361.035.000,00**							**2.623.428.500,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***1.797.300.000,00***							***1.980.000.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	1.797.300.000,00						100 %	1.980.000.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.797.300.000,00							1.980.000.000,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.797.300.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Unit Kerja	1.980.000.000,00	Puskesmas Cangadi
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***524.160.000,00***							***599.896.000,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	524.160.000,00						80 %	599.896.000,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	524.160.000,00						80 %	599.896.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	524.160.000,00						80 %	599.896.000,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	524.160.000,00						1.7 %	599.896.000,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	524.160.000,00						5 %	599.896.000,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	524.160.000,00						14.1 %	599.896.000,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	524.160.000,00						65 %	599.896.000,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	524.160.000,00						89 %	599.896.000,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	524.160.000,00						81 %	599.896.000,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	524.160.000,00						9.4 Persentase	599.896.000,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	524.160.000,00						90 %	599.896.000,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	524.160.000,00						80 Nilai	599.896.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						20.000.000,00							22.000.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	151 Orang	20.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	22.000.000,00	Puskesmas Cangadi
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						67.800.000,00							74.580.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	332 Orang	67.800.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5673 Orang	74.580.000,00	Puskesmas Cangadi
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						125.035.000,00							137.538.500,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	125.035.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		17 Dokumen	137.538.500,00	Puskesmas Cangadi

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						19.950.000,00							21.945.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.950.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	21.945.000,00	Puskesmas Cangadi
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						39.000.000,00							42.900.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	42.900.000,00	Puskesmas Cangadi
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						105.675.000,00							139.562.500,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	105.675.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	139.562.500,00	Puskesmas Cangadi
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						52.500.000,00							57.750.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	57.750.000,00	Puskesmas Cangadi
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	797.457.500,00						-	768.083.250,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.800.000,00							1.980.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	40 Orang	1.800.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	1.980.000,00	Puskesmas Cangadi

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						19.500.000,00							21.450.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	527 Orang	19.500.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	21.450.000,00	Puskesmas Cangadi
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						300.000,00							330.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	300.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	330.000,00	Puskesmas Cangadi
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						65.100.000,00							71.610.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	65.100.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	71.610.000,00	Puskesmas Cangadi
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						7.500.000,00							8.250.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		-	8.250.000,00	Puskesmas Cangadi
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***39.575.000,00***							***43.532.500,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	39.575.000,00						100 %	43.532.500,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaangga						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	271.600.000,00						17 Dokumen	298.480.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						21.200.000,00							23.320.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	21.200.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	23.320.000,00	Puskesmas Cangadi
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						18.375.000,00							20.212.500,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	18.375.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	20.212.500,00	Puskesmas Cangadi
	Puskesmas Pacongkang						**1.733.293.370,00**							**1.906.622.707,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.733.293.370,00**							**1.906.622.707,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.733.293.370,00**							**1.906.622.707,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***1.145.467.370,00***							***1.260.014.107,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	1.145.467.370,00						100 %	1.260.014.107,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.145.467.370,00							1.260.014.107,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.145.467.370,00	Kab. Soppeng	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Unit Kerja	1.260.014.107,00	Puskesmas Pacongkang
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***556.721.000,00***							***612.393.100,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	556.721.000,00						80 %	612.393.100,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	556.721.000,00						80 %	612.393.100,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	556.721.000,00						80 %	612.393.100,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	556.721.000,00						1.7 %	612.393.100,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	556.721.000,00						5 %	612.393.100,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	556.721.000,00						14.1 %	612.393.100,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	556.721.000,00						65 %	612.393.100,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	556.721.000,00						89 %	612.393.100,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	556.721.000,00						81 %	612.393.100,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	556.721.000,00						9.4 Persentase	612.393.100,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	556.721.000,00						90 %	612.393.100,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	556.721.000,00						80 Nilai	612.393.100,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						20.000.000,00							22.000.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	151 Orang	20.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	22.000.000,00	Puskesmas Pacongkang
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						46.050.000,00							50.655.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	332 Orang	46.050.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5673 Orang	50.655.000,00	Puskesmas Pacongkang
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						159.703.000,00							175.673.300,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	159.703.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	175.673.300,00	Puskesmas Pacongkang
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						7.800.000,00							8.580.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	8.580.000,00	Puskesmas Pacongkang
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						30.000.000,00							33.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	33.000.000,00	Puskesmas Pacongkang
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						114.818.000,00							126.299.800,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	114.818.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan		17 Dokumen	126.299.800,00	Puskesmas Pacongkang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						36.000.000,00							39.600.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	39.600.000,00	Puskesmas Pacongkang
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	797.457.500,00						-	768.083.250,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	101.175.000,00						-	111.472.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						5.400.000,00							5.940.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	24 Orang	5.400.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	5.940.000,00	Puskesmas Pacongkang
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						16.350.000,00							17.985.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	11 Orang	16.350.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	17.985.000,00	Puskesmas Pacongkang
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak						2.100.000,00							2.310.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	2.310.000,00	Puskesmas Pacongkang
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						19.200.000,00							21.120.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	19.200.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	21.120.000,00	Puskesmas Pacongkang
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						49.300.000,00							54.230.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	49.300.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	54.230.000,00	Puskesmas Pacongkang
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						50.000.000,00							55.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	55.000.000,00	Puskesmas Pacongkang
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***31.105.000,00***							***34.215.500,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	31.105.000,00						100 %	34.215.500,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaangga						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	271.600.000,00						17 Dokumen	298.480.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						13.600.000,00							14.960.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	13.600.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	14.960.000,00	Puskesmas Pacongkang
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						17.505.000,00							19.255.500,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	17.505.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		17 Dokumen	19.255.500,00	Puskesmas Pacongkang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
											produktivitas dan daya saing daerah			
	Puskesmas Citta						**1.207.683.169,00**						**1.328.451.485,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.207.683.169,00**						**1.328.451.485,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.207.683.169,00**						**1.328.451.485,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**						**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***690.270.169,00***						***759.297.185,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	690.270.169,00					100 %	759.297.185,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-	149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-	149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00					17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						690.270.169,00						759.297.185,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	690.270.169,00	Kab. Soppeng	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah	17 Unit Kerja	759.297.185,00	Puskesmas Citta
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**						**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***486.713.000,00***						***535.384.300,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	486.713.000,00					80 %	535.384.300,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	486.713.000,00					80 %	535.384.300,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	486.713.000,00					80 %	535.384.300,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	486.713.000,00					1.7 %	535.384.300,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	486.713.000,00					5 %	535.384.300,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	486.713.000,00					14.1 %	535.384.300,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	486.713.000,00					65 %	535.384.300,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	486.713.000,00					89 %	535.384.300,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	486.713.000,00					81 %	535.384.300,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	486.713.000,00					9.4 Persentase	535.384.300,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	486.713.000,00					90 %	535.384.300,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	486.713.000,00					80 Nilai	535.384.300,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-	43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-	43.740.889.843,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00					5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00					1 Dokumen	812.927.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00					17 Dokumen	2.638.086.300,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						16.000.000,00							17.600.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	97 Orang	16.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	17.600.000,00	Puskesmas Citta
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						29.850.000,00							32.835.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	182 Orang	29.850.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5673 Orang	32.835.000,00	Puskesmas Citta
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						110.830.000,00							121.913.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	110.830.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	121.913.000,00	Puskesmas Citta
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.750.000,00							10.725.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.750.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	10.725.000,00	Puskesmas Citta
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						53.800.000,00							59.180.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.800.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	59.180.000,00	Puskesmas Citta
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						93.233.000,00							102.556.300,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	93.233.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	102.556.300,00	Puskesmas Citta
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						28.950.000,00							31.845.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	28.950.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan		1 Dokumen	31.845.000,00	Puskesmas Citta

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	797.457.500,00						-	768.083.250,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	101.175.000,00						-	111.472.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						7.200.000,00							7.920.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	11 Orang	7.200.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	7.920.000,00	Puskesmas Citta
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						21.600.000,00							23.760.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	248 Orang	21.600.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	23.760.000,00	Puskesmas Citta
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						900.000,00							990.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	990.000,00	Puskesmas Citta
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						7.350.000,00							8.085.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	18 Orang	7.350.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	8.085.000,00	Puskesmas Citta
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						107.250.000,00							117.975.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	107.250.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan		-	117.975.000,00	Puskesmas Citta

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***30.700.000,00***							***33.770.000,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	30.700.000,00						100 %	33.770.000,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaangga						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	271.600.000,00						17 Dokumen	298.480.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						21.900.000,00							24.090.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	21.900.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	24.090.000,00	Puskesmas Citta
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						8.800.000,00							9.680.000,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	8.800.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	9.680.000,00	Puskesmas Citta
	Puskesmas Takalala						**2.520.855.000,00**							**2.772.940.500,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.520.855.000,00**							**2.772.940.500,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.520.855.000,00**							**2.772.940.500,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***1.900.000.000,00***							***2.090.000.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	1.900.000.000,00						100 %	2.090.000.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.900.000.000,00							2.090.000.000,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.900.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		17 Unit Kerja	2.090.000.000,00	Puskesmas Takalala

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Tettikenrarae || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Mariorilau || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1			produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***586.955.000,00***							***645.650.500,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	586.955.000,00						80 %	645.650.500,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	586.955.000,00						80 %	645.650.500,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	586.955.000,00						80 %	645.650.500,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	586.955.000,00						1.7 %	645.650.500,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	586.955.000,00						5 %	645.650.500,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	586.955.000,00						14.1 %	645.650.500,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	586.955.000,00						65 %	645.650.500,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	586.955.000,00						89 %	645.650.500,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	586.955.000,00						81 %	645.650.500,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	586.955.000,00						9.4 Persentase	645.650.500,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	586.955.000,00						90 %	645.650.500,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	586.955.000,00						80 Nilai	645.650.500,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	14.700.000,00						250 Orang	16.170.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						16.000.000,00							17.600.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	151 Orang	16.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Tettikenrarae || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Mariorilau || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	17.600.000,00	Puskesmas Takalala
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						57.450.000,00							63.195.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	332 Orang	57.450.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Mariorilau || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5673 Orang	63.195.000,00	Puskesmas Takalala

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Tettikenrarae || 0							
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						168.280.000,00							185.108.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	168.280.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Mariorilau || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Tettikenrarae || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	185.108.000,00	Puskesmas Takalala
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12.750.000,00							14.025.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.750.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Tettikenrarae || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Mariorilau || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	14.025.000,00	Puskesmas Takalala
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						46.800.000,00							51.480.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	46.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1 || Provinsi Sulawesi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	51.480.000,00	Puskesmas Takalala

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Mariorilau || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Tettikenrarae || 0							
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						115.725.000,00							127.297.500,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	115.725.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Tettikenrarae || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Mariorilau || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	127.297.500,00	Puskesmas Takalala
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						14.700.000,00							16.170.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	250 Orang		250 Orang	11 Orang	14.700.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Tettikenrarae || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	16.170.000,00	Puskesmas Takalala

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								|| Desa Mariorilau || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0							
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						53.550.000,00							58.905.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.550.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Mariorilau || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Tettikenrarae || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	58.905.000,00	Puskesmas Takalala
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	797.457.500,00						-	768.083.250,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	101.175.000,00						-	111.472.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						7.200.000,00							7.920.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	39 Orang	7.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1 || Provinsi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		-	7.920.000,00	Puskesmas Takalala

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Mariorilau || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Tettikenrarae || 0			produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.200.000,00							1.320.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Mariorilau || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Tettikenrarae || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	1.320.000,00	Puskesmas Takalala
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						7.500.000,00							8.250.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	3452 Orang	7.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Mariorilau || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng ||	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	8.250.000,00	Puskesmas Takalala

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Tettikenrarae || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0							
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						37.950.000,00							41.745.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	37.950.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Tettikenrarae || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Mariorilau || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	41.745.000,00	Puskesmas Takalala
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						47.850.000,00							52.635.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	47.850.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Tettikenrarae || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Mariorilau || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	52.635.000,00	Puskesmas Takalala

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***33.900.000,00***							***37.290.000,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	33.900.000,00						100 %	37.290.000,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaangga						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	271.600.000,00						17 Dokumen	298.480.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						16.500.000,00							18.150.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Tettikenrarae || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Mariorilau || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	18.150.000,00	Puskesmas Takalala
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						17.400.000,00							19.140.000,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	17.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	19.140.000,00	Puskesmas Takalala

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Tettikenrarae || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Mariorilau || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1						
	Puskesmas Tanjonge						**1.984.303.000,00**							**2.182.733.300,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.984.303.000,00**							**2.182.733.300,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.984.303.000,00**							**2.182.733.300,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***1.400.000.000,00***							***1.540.000.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	1.400.000.000,00						100 %	1.540.000.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.400.000.000,00							1.540.000.000,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Unit Kerja	1.540.000.000,00	Puskesmas Tanjonge
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***533.893.000,00***							***587.282.300,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	533.893.000,00						80 %	587.282.300,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	533.893.000,00						80 %	587.282.300,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	533.893.000,00						80 %	587.282.300,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	533.893.000,00						1.7 %	587.282.300,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	533.893.000,00						5 %	587.282.300,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	533.893.000,00						14.1 %	587.282.300,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	533.893.000,00						65 %	587.282.300,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	533.893.000,00						89 %	587.282.300,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	533.893.000,00						81 %	587.282.300,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	533.893.000,00						9.4 Persentase	587.282.300,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	533.893.000,00						90 %	587.282.300,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	533.893.000,00						80 Nilai	587.282.300,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						34.400.000,00							37.840.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	152 Orang	34.400.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	37.840.000,00	Puskesmas Tanjonge
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						54.600.000,00							60.060.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	1999 Orang	54.600.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5673 Orang	60.060.000,00	Puskesmas Tanjonge
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						153.085.000,00							168.393.500,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	153.085.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	168.393.500,00	Puskesmas Tanjonge
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						13.575.000,00							14.932.500,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.575.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	14.932.500,00	Puskesmas Tanjonge
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						23.550.000,00							25.905.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.550.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	25.905.000,00	Puskesmas Tanjonge
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						105.358.000,00							115.893.800,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	105.358.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	115.893.800,00	Puskesmas Tanjonge
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						48.900.000,00							53.790.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.900.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	53.790.000,00	Puskesmas Tanjonge
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	797.457.500,00						-	768.083.250,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						8.550.000,00							9.405.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	130 Orang	8.550.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	9.405.000,00	Puskesmas Tanjonge
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						8.550.000,00							9.405.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	71 Orang	8.550.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	9.405.000,00	Puskesmas Tanjonge
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.800.000,00							1.980.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	1.980.000,00	Puskesmas Tanjonge
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						87.150.000,00							95.865.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	87.150.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	95.865.000,00	Puskesmas Tanjonge
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						2.925.000,00							3.217.500,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	2.925.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	3.217.500,00	Puskesmas Tanjonge
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***41.860.000,00***							***46.046.000,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	41.860.000,00						100 %	46.046.000,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaangga						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	271.600.000,00						17 Dokumen	298.480.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						26.850.000,00							29.535.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	26.850.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	29.535.000,00	Puskesmas Tanjonge
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						15.010.000,00							16.511.000,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	15.010.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	16.511.000,00	Puskesmas Tanjonge
	Puskesmas GoariE						**1.323.515.967,00**							**1.455.867.563,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.323.515.967,00**							**1.455.867.563,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.323.515.967,00**							**1.455.867.563,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***807.650.967,00***							***888.416.063,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	807.650.967,00						100 %	888.416.063,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						807.650.967,00							888.416.063,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	807.650.967,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Soga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Barae || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Goarie || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Marioritengnga || 1	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Unit Kerja	888.416.063,00	Puskesmas GoariE
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***477.815.000,00***							***525.596.500,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	477.815.000,00						80 %	525.596.500,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	477.815.000,00						80 %	525.596.500,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	477.815.000,00						80 %	525.596.500,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	477.815.000,00						1.7 %	525.596.500,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	477.815.000,00						5 %	525.596.500,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	477.815.000,00						14.1 %	525.596.500,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	477.815.000,00						65 %	525.596.500,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	477.815.000,00						89 %	525.596.500,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	477.815.000,00						81 %	525.596.500,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	477.815.000,00						9.4 Persentase	525.596.500,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	477.815.000,00						90 %	525.596.500,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	477.815.000,00						80 Nilai	525.596.500,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						15.200.000,00							16.720.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	151 Orang	15.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Goarie || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Marioritengnga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Soga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Barae || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	16.720.000,00	Puskesmas GoariE
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						37.950.000,00							41.745.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	1999 Orang	37.950.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Goarie || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Marioritengnga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Soga || 1 || Provinsi Sulawesi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5673 Orang	41.745.000,00	Puskesmas GoariE

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Barae || 1							
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						106.156.000,00							116.771.600,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	106.156.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Marioritengnga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Soga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Goarie || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Barae || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	116.771.600,00	Puskesmas GoariE
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12.900.000,00							14.190.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Soga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Marioritengnga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Barae || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Goarie || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	14.190.000,00	Puskesmas GoariE
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						33.700.000,00							37.070.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.700.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Barae || 1 || Provinsi Sulawesi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	37.070.000,00	Puskesmas GoariE

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Goarie || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Marioritengnga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Soga || 1							
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						105.031.000,00							115.534.100,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	105.031.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Goarie || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Soga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Marioritengnga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Barae || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	115.534.100,00	Puskesmas GoariE
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						36.900.000,00							40.590.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Barae || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Soga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Goarie || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng ||	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	40.590.000,00	Puskesmas GoariE

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Kecamatan Marioriwawo || Desa Marioritengnga || 1							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	797.457.500,00						-	768.083.250,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						22.200.000,00							24.420.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	33 Orang	22.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Marioritengnga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Goarie || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Soga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Barae || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	24.420.000,00	Puskesmas GoariE
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						12.900.000,00							14.190.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	396 Orang	12.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Marioritengnga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	14.190.000,00	Puskesmas GoariE

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								|| Desa Goarie || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Barae || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Soga || 1						
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						900.000,00							990.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Marioritengnga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Barae || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Soga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Goarie || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	990.000,00	Puskesmas GoariE
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						30.900.000,00							33.990.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	30.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Barae || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Goarie || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Soga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Marioritengnga || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	33.990.000,00	Puskesmas GoariE

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						75.978.000,00							83.575.800,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	75.978.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Soga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Marioritengnga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Barae || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Goarie || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	83.575.800,00	Puskesmas GoariE
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***25.150.000,00***							***27.665.000,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	25.150.000,00						100 %	27.665.000,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaangga						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	271.600.000,00						17 Dokumen	298.480.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						13.650.000,00							15.015.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	13.650.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Goarie || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Barae || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Marioritengnga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	15.015.000,00	Puskesmas GoariE

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								|| Desa Soga || 1							
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						11.500.000,00							12.650.000,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	11.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Barae || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Soga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Marioritengnga || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Goarie || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	12.650.000,00	Puskesmas GoariE
	Puskesmas Tajuncu						**2.387.662.160,00**							**2.621.666.976,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.387.662.160,00**							**2.621.666.976,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.387.662.160,00**							**2.621.666.976,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***1.780.348.160,00***							***1.958.382.976,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	1.780.348.160,00						100 %	1.958.382.976,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.780.348.160,00							1.958.382.976,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.780.348.160,00	Kab. Soppeng	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Unit Kerja	1.958.382.976,00	Puskesmas Tajuncu
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***565.059.000,00***							***617.083.500,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	565.059.000,00						80 %	617.083.500,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	565.059.000,00						80 %	617.083.500,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	565.059.000,00						80 %	617.083.500,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	565.059.000,00						1.7 %	617.083.500,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	565.059.000,00						5 %	617.083.500,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	565.059.000,00						14.1 %	617.083.500,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	565.059.000,00						65 %	617.083.500,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	565.059.000,00						89 %	617.083.500,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	565.059.000,00						81 %	617.083.500,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	565.059.000,00						9.4 Persentase	617.083.500,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	565.059.000,00						90 %	617.083.500,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	565.059.000,00						80 Nilai	617.083.500,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						20.000.000,00							22.000.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	110 Orang	20.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	22.000.000,00	Puskesmas Tajuncu
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						52.650.000,00							57.915.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	1020 Orang	52.650.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5673 Orang	57.915.000,00	Puskesmas Tajuncu
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						149.377.000,00							163.754.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	429 Dokumen	149.377.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	163.754.000,00	Puskesmas Tajuncu
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12.750.000,00							14.025.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.750.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	14.025.000,00	Puskesmas Tajuncu
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						40.250.000,00							44.025.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	40.250.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	44.025.000,00	Puskesmas Tajuncu
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						117.007.000,00							128.007.000,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	12 Dokumen	117.007.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	128.007.000,00	Puskesmas Tajuncu
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						49.650.000,00							51.645.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	49.650.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	51.645.000,00	Puskesmas Tajuncu
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	797.457.500,00						-	768.083.250,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						16.350.000,00							17.985.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	53 Orang	16.350.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna		-	17.985.000,00	Puskesmas Tajuncu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						17.100.000,00							18.810.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	338 Orang	17.100.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	18.810.000,00	Puskesmas Tajuncu
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.500.000,00							1.650.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	1.650.000,00	Puskesmas Tajuncu
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						88.425.000,00							97.267.500,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	88.425.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	97.267.500,00	Puskesmas Tajuncu
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***42.255.000,00***							***46.200.500,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	42.255.000,00						100 %	46.200.500,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaangga						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	271.600.000,00						17 Dokumen	298.480.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						26.280.000,00							28.628.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	12 Dokumen	26.280.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	28.628.000,00	Puskesmas Tajuncu
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						15.975.000,00							17.572.500,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	12 Dokumen	15.975.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan		17 Dokumen	17.572.500,00	Puskesmas Tajuncu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
											keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
	Puskesmas Leworeng						**1.235.749.000,00**							**1.359.323.900,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.235.749.000,00**							**1.359.323.900,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.235.749.000,00**							**1.359.323.900,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***700.000.000,00***							***770.000.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	700.000.000,00						100 %	770.000.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						700.000.000,00							770.000.000,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	700.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Unit Kerja	770.000.000,00	Puskesmas Leworeng
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***521.064.000,00***							***573.170.400,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	521.064.000,00						80 %	573.170.400,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	521.064.000,00						80 %	573.170.400,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	521.064.000,00						80 %	573.170.400,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	521.064.000,00						1.7 %	573.170.400,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	521.064.000,00						5 %	573.170.400,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	521.064.000,00						14.1 %	573.170.400,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	521.064.000,00						65 %	573.170.400,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	521.064.000,00						89 %	573.170.400,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	521.064.000,00						81 %	573.170.400,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	521.064.000,00						9.4 Persentase	573.170.400,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	521.064.000,00						90 %	573.170.400,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	521.064.000,00						80 Nilai	573.170.400,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang		150 Orang	150 Orang	19.950.000,00						150 Orang	21.945.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						16.000.000,00							17.600.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	151 Orang	16.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	17.600.000,00	Puskesmas Leworeng
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						53.550.000,00							58.905.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	332 Orang	53.550.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5673 Orang	58.905.000,00	Puskesmas Leworeng
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						7.950.000,00							8.745.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang		150 Orang	2129 Orang	7.950.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		150 Orang	8.745.000,00	Puskesmas Leworeng
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						126.169.000,00							138.785.900,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	126.169.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	138.785.900,00	Puskesmas Leworeng
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12.600.000,00							13.860.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	13.860.000,00	Puskesmas Leworeng
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						27.550.000,00							30.305.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.550.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		1 Dokumen	30.305.000,00	Puskesmas Leworeng

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						147.825.000,00							162.607.500,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	147.825.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	162.607.500,00	Puskesmas Leworeng
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						43.500.000,00							47.850.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.500.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	47.850.000,00	Puskesmas Leworeng
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	797.457.500,00						-	768.083.250,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						3.600.000,00							3.960.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	24 Orang	3.600.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	3.960.000,00	Puskesmas Leworeng
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						11.850.000,00							13.035.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	318 Orang	11.850.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	13.035.000,00	Puskesmas Leworeng
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						900.000,00							990.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		-	990.000,00	Puskesmas Leworeng

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
											produktivitas dan daya saing daerah			
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						48.720.000,00						53.592.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	48.720.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah	-	53.592.000,00	Puskesmas Leworeng
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						20.850.000,00						22.935.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	20.850.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah	-	22.935.000,00	Puskesmas Leworeng
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**						**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***14.685.000,00***						***16.153.500,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	14.685.000,00					100 %	16.153.500,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-	361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-	361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00					17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						14.685.000,00						16.153.500,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	14.685.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah	17 Dokumen	16.153.500,00	Puskesmas Leworeng
	Puskesmas Panincong						**1.473.317.000,00**						**1.620.648.700,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.473.317.000,00**						**1.620.648.700,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.473.317.000,00**						**1.620.648.700,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**						**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***900.000.000,00***						***990.000.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	900.000.000,00					100 %	990.000.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-	149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-	149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00					17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						900.000.000,00						990.000.000,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	0 Unit Kerja	900.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah	17 Unit Kerja	990.000.000,00	Puskesmas Panincong

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***565.407.000,00***							***621.947.700,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	565.407.000,00						80 %	621.947.700,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	565.407.000,00						80 %	621.947.700,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	565.407.000,00						80 %	621.947.700,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	565.407.000,00						1.7 %	621.947.700,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	565.407.000,00						5 %	621.947.700,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	565.407.000,00						14.1 %	621.947.700,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	565.407.000,00						65 %	621.947.700,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	565.407.000,00						89 %	621.947.700,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	565.407.000,00						81 %	621.947.700,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	565.407.000,00						9.4 Persentase	621.947.700,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	565.407.000,00						90 %	621.947.700,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	565.407.000,00						80 Nilai	621.947.700,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						19.000.000,00							20.900.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	151 Orang	19.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	20.900.000,00	Puskesmas Panincong
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						42.000.000,00							46.200.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	332 Orang	42.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna		5673 Orang	46.200.000,00	Puskesmas Panincong

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						148.132.000,00							162.945.200,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	148.132.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	162.945.200,00	Puskesmas Panincong
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						14.850.000,00							16.335.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.850.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	16.335.000,00	Puskesmas Panincong
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						45.250.000,00							49.775.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.250.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	49.775.000,00	Puskesmas Panincong
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						112.525.000,00							123.777.500,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	112.525.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	123.777.500,00	Puskesmas Panincong
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						40.500.000,00							44.550.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.500.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	44.550.000,00	Puskesmas Panincong
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	33.750.000,00						-	37.125.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						11.700.000,00							12.870.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	14052 Orang	11.700.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	12.870.000,00	Puskesmas Panincong
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						17.850.000,00							19.635.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	30 Orang	17.850.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	19.635.000,00	Puskesmas Panincong
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.200.000,00							1.320.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	1.320.000,00	Puskesmas Panincong
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						23.750.000,00							26.125.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	23.750.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	26.125.000,00	Puskesmas Panincong
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						88.650.000,00							97.515.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	88.650.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	97.515.000,00	Puskesmas Panincong
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***7.910.000,00***							***8.701.000,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	7.910.000,00						100 %	8.701.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						7.910.000,00							8.701.000,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	7.910.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		17 Dokumen	8.701.000,00	Puskesmas Panincong

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
											produktivitas dan daya saing daerah				
	Puskesmas Batu-Batu						**2.792.731.863,00**							**3.072.005.049,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.792.731.863,00**							**3.072.005.049,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.792.731.863,00**							**3.072.005.049,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***2.178.222.863,00***							***2.396.045.149,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	2.178.222.863,00						100 %	2.396.045.149,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.178.222.863,00							2.396.045.149,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.178.222.863,00	Kab. Soppeng	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Unit Kerja	2.396.045.149,00	Puskesmas Batu-Batu
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***580.149.000,00***							***638.163.900,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	580.149.000,00						80 %	638.163.900,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	580.149.000,00						80 %	638.163.900,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	580.149.000,00						80 %	638.163.900,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	580.149.000,00						1.7 %	638.163.900,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	580.149.000,00						5 %	638.163.900,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	580.149.000,00						14.1 %	638.163.900,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	580.149.000,00						65 %	638.163.900,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	580.149.000,00						89 %	638.163.900,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	580.149.000,00						81 %	638.163.900,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	580.149.000,00						9.4 Persentase	638.163.900,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	580.149.000,00						90 %	638.163.900,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	580.149.000,00						80 Nilai	638.163.900,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						20.000.000,00							22.000.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	151 Orang	20.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	22.000.000,00	Puskesmas Batu-Batu
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						55.350.000,00							60.885.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	332 Orang	55.350.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5673 Orang	60.885.000,00	Puskesmas Batu-Batu
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						147.601.000,00							162.361.100,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	147.601.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	162.361.100,00	Puskesmas Batu-Batu
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						14.850.000,00							16.335.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.850.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	16.335.000,00	Puskesmas Batu-Batu
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						44.000.000,00							48.400.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	48.400.000,00	Puskesmas Batu-Batu
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						117.898.000,00							129.687.800,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	117.898.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	129.687.800,00	Puskesmas Batu-Batu
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						44.450.000,00							48.895.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	44.450.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan		1 Dokumen	48.895.000,00	Puskesmas Batu-Batu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	797.457.500,00						-	768.083.250,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	101.175.000,00						-	111.472.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						5.400.000,00							5.940.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	51 Orang	5.400.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	5.940.000,00	Puskesmas Batu-Batu
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						20.700.000,00							22.770.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	59 Orang	20.700.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	22.770.000,00	Puskesmas Batu-Batu
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						900.000,00							990.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	990.000,00	Puskesmas Batu-Batu
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						9.075.000,00							9.982.500,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	96 Orang	9.075.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	9.982.500,00	Puskesmas Batu-Batu
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						1.000.000,00							1.100.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	1.100.000,00	Puskesmas Batu-Batu
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						98.925.000,00							108.817.500,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	98.925.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	108.817.500,00	Puskesmas Batu-Batu
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***34.360.000,00***							***37.796.000,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	34.360.000,00						100 %	37.796.000,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaangga						271.600.000,00					-		298.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	271.600.000,00						17 Dokumen	298.480.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						24.100.000,00							26.510.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	24.100.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	26.510.000,00	Puskesmas Batu-Batu
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						10.260.000,00							11.286.000,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	10.260.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	11.286.000,00	Puskesmas Batu-Batu
	Puskesmas Ganra						**1.248.480.843,00**							**1.373.328.928,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.248.480.843,00**							**1.373.328.928,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.248.480.843,00**							**1.373.328.928,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***674.255.843,00***							***741.681.428,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	674.255.843,00						100 %	741.681.428,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						674.255.843,00							741.681.428,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	674.255.843,00	Kab. Soppeng	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Unit Kerja	741.681.428,00	Puskesmas Ganra
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***553.415.000,00***							***565.196.500,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	553.415.000,00						80 %	565.196.500,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	553.415.000,00						80 %	565.196.500,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	553.415.000,00						80 %	565.196.500,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	553.415.000,00						1.7 %	565.196.500,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	553.415.000,00						5 %	565.196.500,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	553.415.000,00						14.1 %	565.196.500,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	553.415.000,00						65 %	565.196.500,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	553.415.000,00						89 %	565.196.500,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	553.415.000,00						81 %	565.196.500,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	553.415.000,00						9.4 Persentase	565.196.500,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	553.415.000,00						90 %	565.196.500,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	553.415.000,00						80 Nilai	565.196.500,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	5673 Orang	886.800.000,00						5673 Orang	975.480.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	741.725.000,00						1 Dokumen	812.927.500,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	2.398.770.000,00						17 Dokumen	2.638.086.300,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632.616.000,00						1 Dokumen	974.002.700,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	651.675.000,00						1 Dokumen	716.592.500,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.471.569.000,00						17 Dokumen	3.852.345.200,00	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	250 Orang	319.800.000,00						250 Orang	351.780.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						28.800.000,00							31.680.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang		250 Orang	1088 Orang	28.800.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		250 Orang	31.680.000,00	Puskesmas Ganra
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						53.700.000,00							59.070.000,00	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang		5673 Orang	358 Orang	53.700.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5673 Orang	59.070.000,00	Puskesmas Ganra
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						142.345.000,00							156.579.500,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	142.345.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	156.579.500,00	Puskesmas Ganra
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12.750.000,00							14.025.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.750.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	14.025.000,00	Puskesmas Ganra
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						30.200.000,00							33.220.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	30.200.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	33.220.000,00	Puskesmas Ganra
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						140.420.000,00							154.462.000,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	4 Dokumen	140.420.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	154.462.000,00	Puskesmas Ganra
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						39.600.000,00							43.560.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.600.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	43.560.000,00	Puskesmas Ganra
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	196.440.000,00						-	216.084.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	797.457.500,00						-	768.083.250,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	844.390.500,00						-	1.037.949.550,00	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	296.725.000,00						-	326.397.500,00	
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	101.175.000,00						-	111.472.500,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	155.400.000,00						-	170.940.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						8.100.000,00							8.910.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	54 Orang	8.100.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	8.910.000,00	Puskesmas Ganra
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						16.500.000,00							18.150.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	110 Orang	16.500.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	18.150.000,00	Puskesmas Ganra
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.800.000,00							1.980.000,00	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	1.980.000,00	Puskesmas Ganra
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						9.000.000,00							9.900.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	60 Orang	9.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	9.900.000,00	Puskesmas Ganra
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						70.200.000,00							33.660.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	200 Laporan	70.200.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	33.660.000,00	Puskesmas Ganra

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**600.660.500,00**							**660.451.050,00**	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***20.810.000,00***							***22.891.000,00***	
		1.Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100 %		100 %	100 %	20.810.000,00						100 %	22.891.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						329.060.500,00					-		361.971.050,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	329.060.500,00						17 Dokumen	361.971.050,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						20.810.000,00							22.891.000,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17 Dokumen		17 Dokumen	2 Dokumen	20.810.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	22.891.000,00	Puskesmas Ganra
	Laboratorium Kesehatan Daerah						**797.700.000,00**							**869.770.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**797.700.000,00**							**869.770.000,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**797.700.000,00**							**869.770.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***707.000.000,00***							***770.000.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	707.000.000,00						100 %	770.000.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						707.000.000,00							770.000.000,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	707.000.000,00	Kab. Soppeng	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Unit Kerja	770.000.000,00	Laboratorium Kesehatan Daerah
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***90.700.000,00***							***99.770.000,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	90.700.000,00						80 %	99.770.000,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	90.700.000,00						80 %	99.770.000,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	90.700.000,00						80 %	99.770.000,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	90.700.000,00						1.7 %	99.770.000,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	90.700.000,00						5 %	99.770.000,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	90.700.000,00						14.1 %	99.770.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	90.700.000,00						65 %	99.770.000,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	90.700.000,00						89 %	99.770.000,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	90.700.000,00						81 %	99.770.000,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	90.700.000,00						9.4 Persentase	99.770.000,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	90.700.000,00						90 %	99.770.000,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	90.700.000,00						80 Nilai	99.770.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	90.700.000,00						17 Dokumen	110.770.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						90.700.000,00							99.770.000,00	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	90.700.000,00	Kab. Soppeng	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		17 Dokumen	99.770.000,00	Laboratorium Kesehatan Daerah
	Public Savety Center (PSC) 119						**515.556.810,00**							**2.659.705.418,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**515.556.810,00**							**2.659.705.418,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**515.556.810,00**							**2.659.705.418,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***230.400.000,00***							***563.090.925,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	230.400.000,00						100 %	563.090.925,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.303.948.800,00					-		1.666.669.125,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.303.948.800,00					-		1.666.669.125,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	295.300.000,00						12 Laporan	335.940.000,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						55.400.000,00							60.940.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	55.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	60.940.000,00	Public Savety Center (PSC) 119
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						454.800.000,00					-		804.846.725,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik						454.800.000,00					-		804.846.725,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit		62 Unit	62 Unit	454.800.000,00						62 Unit	782.846.725,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						175.000.000,00							502.150.925,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit		62 Unit	13 Unit	175.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	Pendapatan Bagi Hasil Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		62 Unit	502.150.925,00	Public Savety Center (PSC) 119

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***285.156.810,00***							***2.096.614.493,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	285.156.810,00						80 %	2.096.614.493,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	285.156.810,00						80 %	2.096.614.493,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	285.156.810,00						80 %	2.096.614.493,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	285.156.810,00						1.7 %	2.096.614.493,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	285.156.810,00						5 %	2.096.614.493,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	285.156.810,00						14.1 %	2.096.614.493,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	285.156.810,00						65 %	2.096.614.493,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	285.156.810,00						89 %	2.096.614.493,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	285.156.810,00						81 %	2.096.614.493,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	285.156.810,00						9.4 Persentase	2.096.614.493,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	285.156.810,00						90 %	2.096.614.493,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	285.156.810,00						80 Nilai	2.096.614.493,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.862.508.310,00					-		43.740.889.843,00	
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		1 Unit	1 Unit	285.156.810,00						1 Unit	2.096.614.493,00	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						285.156.810,00							2.096.614.493,00	
	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		1 Unit	1 Unit	285.156.810,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Unit	2.096.614.493,00	Public Savety Center (PSC) 119
	RSUD LATEMMALAMA						**115.200.000.000,00**							**126.720.000.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**115.200.000.000,00**							**126.720.000.000,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**115.200.000.000,00**							**126.720.000.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.983.596.229,00**							**241.854.025.336,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***115.000.000.000,00***							***126.500.000.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	115.000.000.000,00						100 %	126.500.000.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
	Terlaksananya kegiatan BLUD						135.793.971.101,00					-		149.368.638.210,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	17 Unit Kerja	135.793.971.101,00						17 Unit Kerja	149.368.638.210,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						115.000.000.000,00							126.500.000.000,00	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	17 Unit Kerja		17 Unit Kerja	1 Unit Kerja	115.000.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan		17 Unit Kerja	126.500.000.000,00	RSUD LATEMMALAMA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Lalabata || Kelurahan Lemba || 0			masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**50.698.655.700,00**							**54.032.020.052,00**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***200.000.000,00***							***220.000.000,00***	
		10.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	85 %		70 %	75 %	200.000.000,00						80 %	220.000.000,00	
		11.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	90 %		80 %	80 %	200.000.000,00						80 %	220.000.000,00	
		12.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		60 %	70 %	200.000.000,00						80 %	220.000.000,00	
		1.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.7 %		1.7 %	1.7 %	200.000.000,00						1.7 %	220.000.000,00	
		2.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	5 %		5 %	5 %	200.000.000,00						5 %	220.000.000,00	
		3.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	14.3 %		13.9 %	14 %	200.000.000,00						14.1 %	220.000.000,00	
		4.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	75 %		55 %	61 %	200.000.000,00						65 %	220.000.000,00	
		5.Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	89 %		68 %	68 %	200.000.000,00						89 %	220.000.000,00	
		6.Presentase lanjut usia yang mandiri	83 %		77 %	79 %	200.000.000,00						81 %	220.000.000,00	
		7.Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	8.4 Persentase		11.4 Persentase	10.4 Persentase	200.000.000,00						9.4 Persentase	220.000.000,00	
		8.Penemuan Kasus TBC	90 %		90 %	90 %	200.000.000,00						90 %	220.000.000,00	
		9.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	200.000.000,00						80 Nilai	220.000.000,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						7.544.647.200,00					-		9.872.900.000,00	
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia						7.544.647.200,00					-		9.872.900.000,00	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11 Unit		7 Unit	7 Unit	200.000.000,00						9 Unit	1.340.000.000,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						200.000.000,00							220.000.000,00	
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11 Unit		7 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lemba || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		9 Unit	220.000.000,00	RSUD LATEMMALAMA
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**47.278.764.654,00**							**196.409.844.134,34**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**47.278.764.654,00**							**196.396.594.134,34**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**47.278.764.654,00**							**196.396.594.134,34**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.598.563.354,00**							**13.384.292.858,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***10.594.563.354,00***							***13.380.042.858,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100 %		100 %	100 %	10.594.563.354,00						100 %	13.380.042.858,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.525.176.754,00					-		11.338.437.858,00	
	Presentase keterpenuhan administrasi keuangan						9.525.176.754,00					-		11.338.437.858,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/bulan		129 Orang/bulan	129 Orang/bulan	9.525.176.754,00						129 Orang/bulan	11.263.175.458,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.525.176.754,00							11.263.175.458,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/bulan		129 Orang/bulan	99 Orang/bulan	9.525.176.754,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		129 Orang/bulan	11.263.175.458,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						91.170.000,00					-		465.874.500,00	
	Presentase keterpenuhan administrasi umum						91.170.000,00					-		465.874.500,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	7.508.420,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 Laporan		2400 Laporan	2400 Laporan	50.170.000,00						2400 Laporan	335.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	30.000.000,00						2 Paket	15.500.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	4.000.000,00						50 Paket	52.546.330,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.000.000,00						2 Paket	26.500.000,00	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00							15.500.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	-		2 Paket	15.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							26.500.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-		2 Paket	26.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						4.000.000,00							52.546.330,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	20 Paket	4.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-		50 Paket	52.546.330,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.000.000,00							7.508.420,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	-		1 Laporan	7.508.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.170.000,00							335.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 Laporan		2400 Laporan	2400 Laporan	50.170.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		2400 Laporan	335.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4.000.000,00					-		150.000.000,00	
	Presentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah						4.000.000,00					-		150.000.000,00	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	4.000.000,00						7 Unit	150.000.000,00	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000,00							150.000.000,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	3 Unit	4.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		7 Unit	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						839.486.600,00					-		604.500.000,00	
	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						839.486.600,00					-		604.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	122.515.400,00						12 Laporan	140.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	716.971.200,00						12 Laporan	464.500.000,00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						122.515.400,00							140.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	122.515.400,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						716.971.200,00							464.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	716.971.200,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	464.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						138.730.000,00					-		714.918.000,00	
	Presentase keterpenuhan pemeliharaan barang milik daerah						138.730.000,00					-		714.918.000,00	
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	15.000.000,00						8 Unit	115.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	60 Unit		60 Unit	60 Unit	103.000.000,00						60 Unit	182.500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	388.858.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	730.000,00						25 Unit	28.560.000,00	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00							388.858.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil	-	-		1 Unit	388.858.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						103.000.000,00							182.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	103.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		60 Unit	182.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						15.000.000,00							115.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		8 Unit	115.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						730.000,00							28.560.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	10 Unit	730.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		25 Unit	28.560.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**1.808.000.000,00**							**48.289.144.726,00**	
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi						***1.806.000.000,00***							***48.289.144.726,00***	
		1.Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	0.6 Persentase		0.41 Persentase	0.45 Persentase	1.806.000.000,00						0.5 Persentase	48.289.144.726,00	
		2.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	1.5 Persentase		0.82 Persentase	0.85 Persentase	1.806.000.000,00						0.88 Persentase	48.289.144.726,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						306.000.000,00					-		6.629.600.176,00	
	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)						306.000.000,00					-		6.629.600.176,00	
		Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	104.600.176,00	
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.64 KM		0.64 KM	0.64 KM	205.000.000,00						0.64 KM	3.200.000.000,00	
		Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.7 KM		0.5 KM	0.5 KM	100.000.000,00						0.75 KM	1.125.000.000,00	
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing						205.000.000,00							3.200.000.000,00	
	Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.64 KM		0.64 KM	0,64 KM	205.000.000,00	Kab. Soppeng	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-		0.64 KM	3.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai						100.000.000,00							1.125.000.000,00	
	Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.7 KM		0.5 KM	0,5 KM	100.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		0.75 KM	1.125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota						1.000.000,00							104.600.176,00	
	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-		1 Dokumen	104.600.176,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.502.000.000,00					-		41.659.544.550,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi						1.502.000.000,00					-		41.659.544.550,00	
		Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	25 Lembaga		5 Lembaga	10 Lembaga	1.000.000,00						15 Lembaga	170.000.000,00	
		Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	1.000.000,00						50 Dokumen	300.000.000,00	
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.45 KM		0.25 KM	0.35 KM	200.000.000,00						0.4 KM	800.000.000,00	
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	20.4 KM		4.6 KM	16.4 KM	1.300.000.000,00						20.2 KM	40.389.544.550,00	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						1.300.000.000,00							40.389.544.550,00	
	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	20.4 KM		4.6 KM	1 KM	1.300.000.000,00	Kab. Soppeng	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		20.2 KM	40.389.544.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						200.000.000,00							800.000.000,00	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.45 KM		0.25 KM	0,35 KM	200.000.000,00	Kab. Soppeng	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-		0.4 KM	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi						1.000.000,00							170.000.000,00	
	Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	25 Lembaga		5 Lembaga	10 Lembaga	1.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		15 Lembaga	170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0045	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air						1.000.000,00							300.000.000,00	
	Rencana Alokasi Air yang Ditetapkan	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		50 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**200.000.000,00**							**7.277.702.532,00**	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum						***200.000.000,00***							***7.277.702.532,00***	
		1.Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	36.59 %		29.57 %	31.31 %	200.000.000,00						33.06 %	7.277.702.532,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00					-		7.277.702.532,00	
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan						200.000.000,00					-		7.277.702.532,00	
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	100 Liter/Detik		40 Liter/Detik	100 Liter/Detik	200.000.000,00						100 Liter/Detik	7.277.702.532,00	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						200.000.000,00							7.277.702.532,00	
	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	100 Liter/Detik		40 Liter/Detik	100 Liter/Detik	200.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		100 Liter/Detik	7.277.702.532,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**2.360.000,00**							**272.928.008,00**	
	Meningkatnya layanan persampahan regional						***2.360.000,00***							***272.928.008,00***	
		1.Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah Terbangun	58 %		50 %	52 %	2.360.000,00						54 %	272.928.008,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						2.360.000,00					-		272.928.008,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Daerah yang dikelola dan dikembangkan						2.360.000,00					-		272.928.008,00	
		Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.360.000,00						1 Unit	252.928.008,00	
		Jumlah unit Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa yang terbina	40 Unit		40 Unit	40 Unit	1.000.000,00						40 Unit	20.000.000,00	
1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						1.360.000,00							252.928.008,00	
	Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.360.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Unit	252.928.008,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04.2.01.0021	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa						1.000.000,00							20.000.000,00	
	Terbinanya pengelola Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa	Jumlah unit Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa yang terbina	40 Unit		40 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		40 Unit	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**3.763.626.000,00**							**22.658.137.241,69**	
	Meningkatnya akses masyarakat terhahap sistem pengelolaan air limbah						***3.763.626.000,00***							***22.658.137.241,69***	
		Persentase capaian pelayanan SPALD-S akses aman	7.26 %		4.77 %	5.72 %	3.763.626.000,00						6.21 %	22.658.137.241,69	
		Persentase capaian pelayanan SPALD-T akses aman	2.12 %		0.65 %	0.69 %	3.763.626.000,00						1.18 %	22.658.137.241,69	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						3.763.626.000,00					-		22.658.137.241,69	
	Jumlah Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten yang dikelola dan dikembangkan						3.763.626.000,00					-		22.658.137.241,69	
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	-	3.702.426.000,00						-	22.357.326.641,69	
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	61.200.000,00						-	300.810.600,00	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						61.200.000,00							300.810.600,00	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	1 Unit	61.200.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		-	300.810.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						3.702.426.000,00							22.357.326.641,69	
	Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	205 Rumah Tangga	3.702.426.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		-	22.357.326.641,69	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**100.000.000,00**							**750.552.021,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan						***100.000.000,00***							***750.552.021,00***	
		1.Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	59,5%		57,5%	58%	100.000.000,00						58,50%	750.552.021,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					-		750.552.021,00	
	Jumlah Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten yang dikelola dan dikembangkan						100.000.000,00					-		750.552.021,00	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4 Sistem Drainase Perkotaan		2 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000,00						4 Sistem Drainase Perkotaan	600.552.021,00	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						100.000.000,00							600.552.021,00	
	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4 Sistem Drainase Perkotaan		2 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000,00	Kab. Soppeng	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		4 Sistem Drainase Perkotaan	600.552.021,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**3.054.600.000,00**							**2.410.864.068,00**	
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung						***3.054.600.000,00***							***2.410.864.068,00***	
		1.Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	100%		70%	78%	3.054.600.000,00						85%	2.410.864.068,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						3.054.600.000,00					-		2.410.864.068,00	
	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi						3.054.600.000,00					-		2.410.864.068,00	
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200 Dokumen		200 Dokumen	200 Dokumen	54.600.000,00						200 Dokumen	332.072.000,00	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						54.600.000,00							332.072.000,00	
	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200 Dokumen		200 Dokumen	200 Dokumen	54.600.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		200 Dokumen	332.072.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi						3.054.600.000,00					-		2.410.864.068,00	
		Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.000.000.000,00						-	2.078.792.068,00	
1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						3.000.000.000,00							2.078.792.068,00	
	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Bangunan Gedung	3.000.000.000,00	Kab. Soppeng	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		-	2.078.792.068,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**200.000.000,00**							**5.390.328.152,00**	
	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata						***200.000.000,00***							***5.390.328.152,00***	
		1.Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	70%		30%	40%	200.000.000,00						50%	5.390.328.152,00	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00					-		5.390.328.152,00	
	Jumlah Kawasan strategis yang bangunaan dan lingkungannya ditata						200.000.000,00					-		5.390.328.152,00	
		Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	5 Kawasan		3 Kawasan	5 Kawasan	200.000.000,00						5 Kawasan	5.390.328.152,00	
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							5.390.328.152,00	
	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	5 Kawasan		3 Kawasan	5 Kawasan	200.000.000,00	Kab. Soppeng	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		5 Kawasan	5.390.328.152,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**27.533.875.300,00**							**94.971.908.499,00**	
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman						***27.333.875.300,00***							***94.971.908.499,00***	
		1.Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	80 %		60 %	65 %	27.333.875.300,00						70 %	94.971.908.499,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						27.533.875.300,00					-		94.971.908.499,00	
	Panjang jalan yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara kabupaten						27.533.875.300,00					-		94.971.908.499,00	
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan		5 Jembatan	5 Jembatan	100.000.000,00						6 Jembatan	613.913.431,00	
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	967 KM		967 KM	967 KM	100.000.000,00						967 KM	250.000.000,00	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 KM		15 KM	35 KM	100.000.000,00						35 KM	1.500.000.000,00	
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM		2 KM	7 KM	400.000.000,00						5 KM	25.304.245.068,00	
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	15 KM		5 KM	15 KM	12.833.875.300,00						15 KM	62.842.500.000,00	
		Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	1 Meter		1 Meter	1 Meter	14.000.000.000,00						1 Meter	4.461.250.000,00	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						100.000.000,00							250.000.000,00	
	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	967 KM		967 KM	967,845 KM	100.000.000,00	Kab. Soppeng	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-		967 KM	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						100.000.000,00							1.500.000.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 KM		15 KM	5 KM	100.000.000,00	Kab. Soppeng	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		35 KM	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan						400.000.000,00							25.304.245.068,00	
	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM		2 KM	0,5 KM	400.000.000,00	Kab. Soppeng	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		5 KM	25.304.245.068,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan						14.000.000.000,00							4.461.250.000,00	
	Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	1 Meter		1 Meter	40 Meter	14.000.000.000,00	Kab. Soppeng	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Meter	4.461.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						12.833.875.300,00							62.842.500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	15 KM		5 KM	8 KM	12.833.875.300,00	Kab. Soppeng	DBH Sawit Opsen PKB Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-		15 KM	62.842.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan						100.000.000,00							613.913.431,00	
	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan		5 Jembatan	2 Jembatan	100.000.000,00	Kab. Soppeng	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		6 Jembatan	613.913.431,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**3.360.000,00**							**409.392.012,00**	
	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi						***2.360.000,00***							***409.392.012,00***	
		1.Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	2.360.000,00						120 Orang	409.392.012,00	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						1.000.000,00					-		165.932.000,00	
	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang dilatih						1.000.000,00					-		165.932.000,00	
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	130 Orang		100 Orang	125 Orang	1.000.000,00						130 Orang	165.932.000,00	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						1.000.000,00							165.932.000,00	
	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	130 Orang		100 Orang	125 Orang	1.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		130 Orang	165.932.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						1.360.000,00					-		46.231.437,00	
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan						1.360.000,00					-		46.231.437,00	
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.360.000,00						5 Dokumen	46.231.437,00	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						1.360.000,00							46.231.437,00	
	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.360.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		5 Dokumen	46.231.437,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						1.000.000,00					-		197.228.575,00	
	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						1.000.000,00					-		197.228.575,00	
		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	60 Lembaga		30 Lembaga	40 Lembaga	1.000.000,00						50 Lembaga	197.228.575,00	
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						1.000.000,00							197.228.575,00	
	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	60 Lembaga		30 Lembaga	40 Lembaga	1.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		50 Lembaga	197.228.575,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**14.380.000,00**							**581.344.016,65**	
	Meningkatnya layanan Tata Ruang						***4.700.000,00***							***581.344.016,65***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		1.Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	100 %		100 %	100 %	4.700.000,00						100 %	581.344.016,65	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						5.980.000,00					-		270.000.000,00	
	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan atau dalam proses penetapan						5.980.000,00					-		270.000.000,00	
		dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.660.000,00						1 Dokumen	85.000.000,00	
		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.660.000,00						1 Dokumen	170.000.000,00	
		Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
		Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.660.000,00						0 Dokumen	0,00	
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota						1.660.000,00							0,00	
	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.660.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		0 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota						1.660.000,00							170.000.000,00	
	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.660.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Dokumen	170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota						1.660.000,00							85.000.000,00	
	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.660.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Dokumen	85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota						1.000.000,00							0,00	
	Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		0 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						3.320.000,00					-		205.344.016,65	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota						3.320.000,00					-		205.344.016,65	
		Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta		1 Peta	1 Peta	1.660.000,00						0 Peta	0,00	
		Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.660.000,00						1 Dokumen	201.344.016,65	
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar						1.660.000,00							0,00	
	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta		1 Peta	1 Peta	1.660.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		0 Peta	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						1.660.000,00							201.344.016,65	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.660.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Dokumen	201.344.016,65	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						3.040.000,00					-		69.000.000,00	
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten						3.040.000,00					-		69.000.000,00	
		Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	19.000.000,00	
		Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	2.040.000,00						1 Layanan	50.000.000,00	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						1.000.000,00							19.000.000,00	
	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Dokumen	19.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						2.040.000,00							50.000.000,00	
	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	2.040.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Layanan	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						2.040.000,00					-		37.000.000,00	
	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten						2.040.000,00					-		37.000.000,00	
		Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.040.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						2.040.000,00							30.000.000,00	
	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.040.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**2.277.909.229,00**							**15.496.106.379,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.274.109.229,00**							**13.859.012.445,00**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**2.274.109.229,00**							**13.859.012.445,00**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.077.909.229,00**							**2.736.890.111,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***2.073.309.229,00***							***2.725.890.111,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %		100 %	100 %	2.073.309.229,00						100 %	2.725.890.111,00	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.200.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		7.500.000,00	
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu						3.200.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		7.500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.600.000,00						2 Dokumen	4.500.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.600.000,00						4 Laporan	3.000.000,00	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.600.000,00							4.500.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	4.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.600.000,00							3.000.000,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Laporan	3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.662.668.229,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		2.260.364.938,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.662.668.229,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		2.260.364.938,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000,00						3 Dokumen	1.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00						10 Dokumen	1.500.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	600.000,00						2 Laporan	4.025.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.660.068.229,00						21 Orang/bulan	2.253.839.938,00	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.660.068.229,00							2.253.839.938,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		21 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.660.068.229,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		21 Orang/bulan	2.253.839.938,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.000.000,00							1.500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		10 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						600.000,00							4.025.000,00	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	4.025.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		1.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		1.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00						1 Laporan	1.000.000,00	
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.000.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		2.500.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.000.000,00					Dinas Perumahan dan		2.500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
												Kawasan Permukiman			
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	2.500.000,00	
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.000.000,00							2.500.000,00	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						42.197.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		175.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						42.197.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		175.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	30.000.000,00						250 Laporan	120.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.850.000,00						4 Paket	20.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.447.000,00						4 Paket	25.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	900.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.850.000,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	3.850.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Paket	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						900.000,00							10.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Paket	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						7.447.000,00							25.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.447.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas,		4 Paket	25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Lalabata Rilau || 0		judi, dan penyeludupan.	serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							120.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		250 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		250 Laporan	120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.663.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		10.000.000,00	
	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik						3.663.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		10.000.000,00	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	3.663.000,00						10 Unit	10.000.000,00	
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						3.663.000,00							10.000.000,00	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	6 Unit	3.663.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		10 Unit	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						341.241.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		235.525.173,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						341.241.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		235.525.173,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	36.345.000,00						1 Laporan	49.816.033,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	304.896.000,00						2 Laporan	185.709.140,00	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.345.000,00							49.816.033,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	36.345.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	49.816.033,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						304.896.000,00						185.709.140,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	304.896.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	185.709.140,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.940.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	45.000.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik						22.940.000,00					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	45.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	11.600.000,00					2 Unit	13.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00					1 Unit	24.000.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	1.340.000,00					15 Unit	8.000.000,00	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10.000.000,00						24.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Unit	24.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						11.600.000,00						13.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	1 Unit	11.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Unit	13.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.340.000,00						8.000.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	2 Unit	1.340.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga		15 Unit	8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
										judi, dan penyeludupan.	keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**26.100.000,00**							**699.211.161,00**	
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah						***26.100.000,00***							***684.211.161,00***	
		1.Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %		100 %	100 %	26.100.000,00						100 %	684.211.161,00	
		2.Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	100 %		100 %	100 %	26.100.000,00						100 %	684.211.161,00	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						2.120.000,00					Masyarakat Korban Bencana		30.000.000,00	
	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						2.120.000,00					Masyarakat Korban Bencana		30.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
		Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani						120.000,00							15.000.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana						2.000.000,00							15.000.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						15.950.000,00					Masyarakat Korban Bencana		649.211.161,00	
	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi						15.950.000,00					Masyarakat Korban Bencana		649.211.161,00	
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	60 Unit Rumah		30 Unit Rumah	40 Unit Rumah	15.950.000,00						50 Unit Rumah	649.211.161,00	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						15.950.000,00							649.211.161,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	60 Unit Rumah		30 Unit Rumah	3 Unit Rumah	15.950.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		50 Unit Rumah	649.211.161,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						8.030.000,00					Pengembang Perumahan dan Masyarakat		20.000.000,00	
	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						8.030.000,00					Pengembang Perumahan dan Masyarakat		20.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	8.030.000,00						4 Dokumen	20.000.000,00	
1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan						8.030.000,00							20.000.000,00	
	Terwujudnya Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	4 Dokumen		4 Dokumen	7 Dokumen	8.030.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		4 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**96.200.000,00**							**679.368.030,00**	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						***96.200.000,00***							***679.368.030,00***	
		1.Persentase Luas Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	3.65 %		1.4 %	1.97 %	96.200.000,00						2.53 %	679.368.030,00	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						96.200.000,00					Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)		679.368.030,00	
	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditingkatkan kwalitasnya						96.200.000,00					Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)		679.368.030,00	
		Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2.700.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	12 Unit Rumah		10 Unit Rumah	12 Unit Rumah	92.900.000,00						12 Unit Rumah	216.500.000,00	
		Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0.039 Ha		0.018 Ha	0.045 Ha	600.000,00						0.039 Ha	452.868.030,00	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						92.900.000,00							216.500.000,00	
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	12 Unit Rumah		10 Unit Rumah	5 Unit Rumah	92.900.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		12 Unit Rumah	216.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh						2.700.000,00							10.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh						600.000,00							452.868.030,00	
	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0.039 Ha		0.018 Ha	0.045 Ha	600.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		0.039 Ha	452.868.030,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**62.500.000,00**							**705.064.020,00**	
	Menurunnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)						***62.500.000,00***							***705.064.020,00***	
		1.Persentase Rumah layak huni	94.22 %		93.44 %	93.71 %	62.500.000,00						93.88 %	705.064.020,00	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						62.500.000,00					Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		705.064.020,00	
	Persentase Rumah Layak Huni						62.500.000,00					Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		705.064.020,00	
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	2 Unit		2 Unit	2 Unit	45.000.000,00						2 Unit	81.440.661,00	
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	165 Unit Rumah		17 Unit Rumah	33 Unit Rumah	17.500.000,00						35 Unit Rumah	623.623.359,00	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						17.500.000,00							623.623.359,00	
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	165 Unit Rumah		17 Unit Rumah	2 Unit Rumah	17.500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		35 Unit Rumah	623.623.359,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						45.000.000,00							81.440.661,00	
	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	2 Unit		2 Unit	1 Unit	45.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		2 Unit	81.440.661,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**11.400.000,00**							**9.038.479.123,00**	
	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman						***10.800.000,00***							***9.038.479.123,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		1.Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	55.73 %		42.37 %	45.7 %	10.800.000,00						49.04 %	9.038.479.123,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						11.400.000,00					Masyarakat diLokasi Perumahan		9.038.479.123,00	
	Persentase Cakupan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)						11.400.000,00					Masyarakat diLokasi Perumahan		9.038.479.123,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	22 Dokumen		10 Dokumen	21 Dokumen	300.000,00						21 Dokumen	367.500.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.500.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	12 Lokasi		6 Lokasi	11 Lokasi	300.000,00						10 Lokasi	4.050.826.374,00	
		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	10 Lokasi		4 Lokasi	10 Lokasi	300.000,00						11 Lokasi	4.570.152.749,00	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						300.000,00							367.500.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	22 Dokumen		10 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		21 Dokumen	367.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang						10.500.000,00							50.000.000,00	
	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		2 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						300.000,00							4.570.152.749,00	
	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	10 Lokasi		4 Lokasi	1 Lokasi	300.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		11 Lokasi	4.570.152.749,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						300.000,00							4.050.826.374,00	
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	12 Lokasi		6 Lokasi	1 Lokasi	300.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		10 Lokasi	4.050.826.374,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.800.000,00**							**1.637.093.934,00**	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**3.800.000,00**							**1.637.093.934,00**	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**820.000,00**							**831.419.579,00**	
	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan						***820.000,00***							***831.419.579,00***	
		1.Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	100 %		100 %	100 %	820.000,00						100 %	831.419.579,00	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						820.000,00					Masyarakat, perorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, dan instansi yang bersengketa atau berkepentingan terhadap tanah garapan di wilayah kabupaten/kota		831.419.579,00	
	Jumlah Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten yang diselesaikan						820.000,00					Masyarakat, perorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, dan instansi yang bersengketa atau berkepentingan terhadap tanah garapan di wilayah kabupaten/kota		831.419.579,00	
		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	820.000,00						1 Berita Acara	831.419.579,00	
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						820.000,00							831.419.579,00	
	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	820.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Berita Acara	831.419.579,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**2.980.000,00**							**805.674.355,00**	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)						***2.980.000,00***							***805.674.355,00***	
		1.Persentase Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100 %		100 %	100 %	2.980.000,00						100 %	805.674.355,00	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.980.000,00					Masyarakat calon penerima redistribusi tanah dan pemilik tanah kelebihan maksimum dan/atau tanah absentee		805.674.355,00	
	Persentase Jumlah Sertifikat Hak Milik yang dikeluarakan						2.980.000,00					Masyarakat calon penerima redistribusi tanah dan pemilik tanah kelebihan maksimum dan/atau tanah absentee		805.674.355,00	
		Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	2.980.000,00						2 Berita Acara	805.674.355,00	
2.10.06.2.01.0005	Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						2.980.000,00							805.674.355,00	
	Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		2 Berita Acara	1 Berita Acara	2.980.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		2 Berita Acara	805.674.355,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						**10.741.205.946,00**							**19.911.814.035,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.741.205.946,00**							**19.911.814.035,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**10.741.205.946,00**							**19.911.814.035,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.318.557.706,00**							**11.306.100.000,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***10.262.557.706,00***							***10.987.100.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %		100 %	100 %	10.262.557.706,00						100 %	10.987.100.000,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00					SatpolPP dan Damkar		101.100.000,00	
	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi tepat waktu						15.000.000,00					SatpolPP dan Damkar		101.100.000,00	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00						2 Dokumen	5.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00						2 Dokumen	5.500.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00						2 Dokumen	5.500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.500.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00							5.500.000,00	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.318.782.106,00					SatpolPP dan Damkar		4.020.000.000,00	
	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah						4.318.782.106,00					SatpolPP dan Damkar		4.020.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	5.000.000,00						36 Dokumen	5.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	5.000.000,00						36 Dokumen	5.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	4.308.782.106,00						60 Orang/bulan	4.000.000.000,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.308.782.106,00							4.000.000.000,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	57 Orang/bulan	4.308.782.106,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		60 Orang/bulan	4.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		36 Dokumen	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen		36 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		36 Dokumen	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.000.000,00					SatpolPP dan Damkar		17.000.000,00	
	Terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah						5.000.000,00					SatpolPP dan Damkar		17.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00					SatpolPP dan Damkar		150.000.000,00	
	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah						5.000.000,00					SatpolPP dan Damkar		150.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						89.000.000,00					SatpolPP dan Damkar		413.000.000,00	
	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah						89.000.000,00					SatpolPP dan Damkar		413.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00						12 Laporan	5.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	300.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	2.000.000,00						3 Paket	2.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.000.000,00						3 Paket	10.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	6.000.000,00						3 Paket	60.000.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.000.000,00						2 Paket	10.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.000.000,00						2 Paket	6.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.000.000,00						2 Paket	5.000.000,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							10.000.000,00	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.000.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	6.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.000.000,00							2.000.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga		3 Paket	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
										judi, dan penyeludupan.	keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.000.000,00							60.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	6.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							10.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00							300.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.405.975.600,00					SatpolPP dan Damkar		5.670.000.000,00	
	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						5.405.975.600,00					SatpolPP dan Damkar		5.670.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	106.250.000,00						36 Laporan	150.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.299.725.600,00						1 Laporan	5.500.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						106.250.000,00							150.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	24 Laporan	106.250.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		36 Laporan	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.299.725.600,00							5.500.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	5.299.725.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	5.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						479.800.000,00					SatpolPP dan Damkar		560.000.000,00	
	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						479.800.000,00					SatpolPP dan Damkar		560.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	300 Unit		300 Unit	300 Unit	365.000.000,00						300 Unit	400.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	109.800.000,00						1 Unit	120.000.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	5.000.000,00						5 Unit	5.000.000,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						109.800.000,00							120.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	109.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Unit	120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						365.000.000,00							400.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	300 Unit		300 Unit	20 Unit	365.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan		300 Unit	400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											ketahanan daerah terhadap bencana				
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	10 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		5 Unit	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**287.648.240,00**							**5.557.471.620,00**	
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS						***0,00***							***1.009.252.474,00***	
		Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	90%		50%	60%							70%		
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada						***287.648.240,00***							***3.268.219.146,00***	
		1.Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100%		40 %	60%	194.648.240,00						80%	2.175.219.146,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						93.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Soppeng		2.648.000.000,00	
	Terlaksananya kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota						93.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Soppeng		2.648.000.000,00	
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						8.000.000,00							8.000.000,00	
	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						20.000.000,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	10 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Unit	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota						55.000.000,00							55.000.000,00	
	Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	55.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan,		1 Dokumen	55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0		pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja						10.000.000,00							10.000.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	1 Orang		1 Orang	10 Orang	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Orang	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat						***93.000.000,00***							***2.308.000.000,00***	
		1.Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100%		100%	100%	8.000.000,00						100%	2.058.000.000,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						93.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Soppeng		2.648.000.000,00	
	Terlaksananya kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota						93.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Soppeng		2.648.000.000,00	
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						194.648.240,00					Masyarakat Kabupaten Soppeng		1.350.219.146,00	
	Terlaksananya kegiatan penegakan perda dan perkada						194.648.240,00					Masyarakat Kabupaten Soppeng		1.350.219.146,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	154.648.240,00						12 Laporan	150.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00						12 Laporan	40.000.000,00	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						40.000.000,00							40.000.000,00	
	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						154.648.240,00							150.000.000,00	
	TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	154.648.240,00	Kab. Soppeng	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif,		12 Laporan	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum						***93.000.000,00***							***2.308.000.000,00***	
		1.Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	100 %		100 %	100 %	85.000.000,00						100 %	1.265.000.000,00	
	Terlaksananya kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota						93.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Soppeng		2.648.000.000,00	
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	1 Orang		1 Orang	1 Orang	10.000.000,00						1 Orang	10.000.000,00	
		Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	20.000.000,00	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**135.000.000,00**							**3.048.242.415,00**	
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						***85.000.000,00***							***724.742.415,00***	
		1.Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	96 %		96 %	96 %	65.000.000,00						96 %	660.442.951,00	
	Terlaksananya kegiatan pencegahan,pengendalian,pemadaman,penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota						135.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Soppeng		945.242.415,00	
	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						135.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Soppeng		945.242.415,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						15.000.000,00							15.000.000,00	
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan		12 Dokumen	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											ketahanan daerah terhadap bencana				
1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)						50.000.000,00							50.000.000,00	
	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran						***85.000.000,00***							***2.134.742.415,00***	
		1.Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	100 %		100 %	100 %	70.000.000,00						100 %	1.727.799.464,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						135.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Soppeng		945.242.415,00	
	Terlaksananya kegiatan pencegahan,pengendalian,pemadaman,penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota						135.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Soppeng		945.242.415,00	
	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						135.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Soppeng		945.242.415,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit		0 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	20.000.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit		0 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	20.000.000,00	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						20.000.000,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit		0 Unit	10 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Unit	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Terlaksananya kegiatan pencegahan,pengendalian,pemadaman,penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota						135.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Soppeng		945.242.415,00	
	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						135.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Soppeng		945.242.415,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		-	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**2.241.216.722,00**							**3.085.064.621,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.241.216.722,00**							**3.085.064.621,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**2.241.216.722,00**							**3.085.064.621,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.049.716.722,00**							**2.329.639.256,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***2.048.816.722,00***							***2.329.639.256,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %		100 %	100 %	2.048.816.722,00						100 %	2.329.639.256,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.200.000,00					-		22.727.000,00	
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Disusun dan disampaikan tepat waktu						7.200.000,00					-		22.727.000,00	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000,00						2 Dokumen	4.680.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						2 Dokumen	5.460.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	4.500.000,00						2 Laporan	12.587.000,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000,00							5.460.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	5.460.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.200.000,00							4.680.000,00	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga		2 Dokumen	4.680.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.500.000,00							12.587.000,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	4.500.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	12.587.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.580.793.122,00					-		1.477.291.874,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan						1.580.793.122,00					-		1.477.291.874,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	900.000,00						12 Dokumen	8.456.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00						1 Laporan	3.247.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.578.643.122,00						20 Orang/bulan	1.465.588.874,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.578.643.122,00							1.465.588.874,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.578.643.122,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		20 Orang/bulan	1.465.588.874,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						900.000,00							8.456.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	900.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Dokumen	8.456.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.250.000,00							3.247.000,00	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	3.247.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						900.000,00					-		2.547.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						900.000,00					-		2.547.000,00	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00						1 Dokumen	2.547.000,00	
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						900.000,00							2.547.000,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	2.547.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.750.000,00					-		228.948.382,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						44.750.000,00					-		228.948.382,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	30.000.000,00						250 Laporan	168.856.948,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	13.750.000,00						4 Paket	42.091.434,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.000.000,00						12 Paket	18.000.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.000.000,00							18.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Paket	18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						13.750.000,00							42.091.434,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	13.750.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Paket	42.091.434,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							168.856.948,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		250 Laporan	50 Laporan	30.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		250 Laporan	168.856.948,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						384.073.600,00					-		502.105.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						384.073.600,00					-		502.105.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	37.000.000,00						12 Laporan	37.580.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	347.073.600,00						12 Laporan	464.525.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						37.000.000,00							37.580.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	37.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	37.580.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						347.073.600,00							464.525.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	347.073.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	464.525.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						32.000.000,00					-		96.020.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik						32.000.000,00					-		96.020.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	3.500.000,00						9 Unit	45.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	30.000.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit		27 Unit	27 Unit	8.500.000,00						27 Unit	15.350.000,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00							30.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Unit	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.500.000,00							45.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	9 Unit		9 Unit	9 Unit	3.500.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan		9 Unit	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.500.000,00							15.350.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit		27 Unit	5 Unit	8.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		27 Unit	15.350.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**191.500.000,00**							**755.425.365,00**	
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						***111.700.000,00***							***65.000.000,00***	
		1.Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100%		100%	100%	111.700.000,00						100%	65.000.000,00	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						109.200.000,00					-		50.000.000,00	
	Persentase Jumlah Jenis Layanan Informasi Rawan Bencana						109.200.000,00					-		50.000.000,00	
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	800 Orang		800 Orang	1000 Orang	109.200.000,00						1000 Orang	50.000.000,00	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						109.200.000,00							50.000.000,00	
	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	800 Orang		800 Orang	100 Orang	109.200.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1000 Orang	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Jumlah Jenis Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						2.500.000,00					-		65.000.000,00	
		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang		40 Orang	25 Orang	2.500.000,00						Orang	0,00	
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						2.500.000,00							0,00	
	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang	Orang		40 Orang	2 Orang	2.500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif,		Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana									transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana						***2.500.000,00***							***319.873.344,00***	
		1.Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%		100%	100%	2.500.000,00						100%	319.873.344,00	
	Persentase Kesesuaian dengan hasil kajian cepat, koordinasi antar instansi terkait, kecepatan, ketepatan, dan akurasi, serta transparansi dan akuntabilitas						2.500.000,00					-		319.873.344,00	
		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00						1 Dokumen	164.936.672,00	
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						2.500.000,00							164.936.672,00	
	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	164.936.672,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat						***77.300.000,00***							***320.552.021,00***	
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %		100 %	100 %	77.300.000,00						100 %	320.552.021,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						77.300.000,00					-		320.552.021,00	
	Persentase Jumlah Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						77.300.000,00					-		320.552.021,00	
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00						2 Dokumen	30.000.000,00	
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3000 Orang		2000 Orang	3000 Orang	42.300.000,00						3000 Orang	290.552.021,00	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						35.000.000,00							30.000.000,00	
	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						42.300.000,00							290.552.021,00	
	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3000 Orang		2000 Orang	150 Orang	42.300.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3000 Orang	290.552.021,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						2.500.000,00					-		65.000.000,00	
	Persentase Jumlah Jenis Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						2.500.000,00					-		65.000.000,00	
		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang		40 Orang	25 Orang	2.500.000,00						Orang	0,00	
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						2.500.000,00							0,00	
	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang		40 Orang	2 Orang	2.500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						2.500.000,00					-		319.873.344,00	
	Persentase Kesesuaian dengan hasil kajian cepat, koordinasi antar instansi terkait, kecepatan, ketepatan, dan akurasi, serta transparansi dan akuntabilitas						2.500.000,00					-		319.873.344,00	
		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00						1 Dokumen	164.936.672,00	
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						2.500.000,00							164.936.672,00	
	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	164.936.672,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	DINAS SOSIAL						**3.087.914.394,00**							**18.486.603.115,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.087.914.394,00**							**18.486.603.115,00**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**3.087.914.394,00**							**18.486.603.115,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.887.914.394,00**							**3.912.592.052,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***2.884.614.394,00***							***3.175.142.159,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Sosial	100 %		100 %	100 %	2.884.614.394,00						100 %	3.175.142.159,00	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.700.000,00					-		195.610.050,00	
	Persentase dokumen perencanaan yang disusun dan disahkan						2.700.000,00					-		195.610.050,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	900.000,00						3 Dokumen	58.683.015,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	900.000,00						3 Dokumen	58.683.015,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	900.000,00						4 Laporan	39.122.010,00	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						900.000,00							58.683.015,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	900.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		3 Dokumen	58.683.015,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						900.000,00							58.683.015,00	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	900.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		3 Dokumen	58.683.015,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						900.000,00							39.122.010,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	900.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		4 Laporan	39.122.010,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.395.135.194,00					-		2.347.711.644,00	
	Persentase dokumen anggaran dan laporan keuangan yang disusun dan disahkan sesuai jadwal						2.395.135.194,00					-		2.347.711.644,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						2 Dokumen	117.366.031,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	300.000,00						3 Laporan	117.757.063,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.393.335.194,00						32 Orang/bulan	1.877.856.488,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.393.335.194,00							1.877.856.488,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.393.335.194,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi		32 Orang/bulan	1.877.856.488,00	DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat				
1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.500.000,00							117.366.031,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		2 Dokumen	117.366.031,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						300.000,00							117.757.063,00	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		3 Laporan	117.757.063,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						75.500.000,00					-		586.830.154,00	
	Persentase dokumen administrasi umum yang disusun dan diproses						75.500.000,00					-		586.830.154,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan		500 Laporan	500 Laporan	70.000.000,00						500 Laporan	234.732.061,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	4.000.000,00						15 Paket	88.024.523,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	1.500.000,00						100 Paket	146.707.538,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.500.000,00							146.707.538,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		100 Paket	146.707.538,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						4.000.000,00							88.024.523,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	4.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		15 Paket	88.024.523,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70.000.000,00							234.732.061,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan		500 Laporan	500 Laporan	70.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan		500 Laporan	234.732.061,00	DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
											ekonomi masyarakat			
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						378.079.200,00					-		195.610.051,00	
	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusahan pemerintahan daerah						378.079.200,00					-		195.610.051,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	36.000.000,00						36 Laporan	39.122.010,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	342.079.200,00						3 Laporan	156.488.041,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.000.000,00							39.122.010,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	36.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		36 Laporan	39.122.010,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						342.079.200,00							156.488.041,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	342.079.200,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		3 Laporan	156.488.041,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.500.000,00					-		195.610.050,00	
	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dan dirawat secara rutin sesuai dengan jadwal perawatan.						36.500.000,00					-		195.610.050,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	36.500.000,00						21 Unit	78.244.020,00	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36.500.000,00							78.244.020,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	36.500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		21 Unit	78.244.020,00	DINAS SOSIAL
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**54.600.000,00**							**6.636.354.840,00**	
	Meningkatnya rehabilitasi sosial						***44.600.000,00***							***6.636.354.840,00***	
		1.Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	44.600.000,00						100 %	6.636.354.840,00	
		2.Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	44.600.000,00						100 %	6.636.354.840,00	
		3.Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	44.600.000,00						100 %	6.636.354.840,00	
		4.Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	44.600.000,00						100 %	6.636.354.840,00	
		5.Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas	45 Nilai		41 Nilai	42 Nilai	44.600.000,00						43 Nilai	6.636.354.840,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		6.Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	50 Nilai		45 Nilai	46 Nilai	44.600.000,00						47 Nilai	6.636.354.840,00	
		6.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	44.600.000,00						100 %	6.636.354.840,00	
		8.Indeks Peranan Sosial	80 Nilai		70 Nilai	72 Nilai	44.600.000,00						74 Nilai	6.636.354.840,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						54.600.000,00					-		6.512.400.037,00	
	Persentase penerima manfaat yang mengalami perbaikan kondisi sosial dasar diluar panti						54.600.000,00					-		6.512.400.037,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	5.000.000,00						100 Orang	282.616.952,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	15.000.000,00						20 Orang	412.149.722,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	5.000.000,00						100 Orang	129.532.700,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang		150 Orang	150 Orang	22.800.000,00						150 Orang	718.318.086,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang		70 Orang	70 Orang	1.800.000,00						70 Orang	4.710.128.253,00	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	5.000.000,00						10 Orang	117.757.063,00	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						22.800.000,00							718.318.086,00	
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang		150 Orang	150 Orang	22.800.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		150 Orang	718.318.086,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						1.800.000,00							4.710.128.253,00	
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang		70 Orang	70 Orang	1.800.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		70 Orang	4.710.128.253,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						15.000.000,00							412.149.722,00	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	15.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		20 Orang	412.149.722,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						5.000.000,00							117.757.063,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		10 Orang	117.757.063,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						5.000.000,00							282.616.952,00	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	5.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		100 Orang	282.616.952,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						5.000.000,00							129.532.700,00	
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	5.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		100 Orang	129.532.700,00	DINAS SOSIAL
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**50.000,00**							**4.958.192.140,00**	
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial						***50.000,00***							***4.472.289.310,00***	
		1.Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar.	100 %		100 %	100 %	50.000,00						100 %	4.472.289.310,00	
		2.Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	100 %		100 %	100 %	50.000,00						100 %	4.472.289.310,00	
		3.Persentase pelaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	100 %		100 %	100 %	50.000,00						100 %	4.472.289.310,00	
		4.Peningkatan indeks kebutuhan dasar	72.14 %		71.99 %	71.99 %	50.000,00						72.04 %	4.472.289.310,00	
		5.Peningkatan indeks keberdayaan ekonom	78%		70 %	72%	50.000,00						74%	4.472.289.310,00	
		6.Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	100 %		100 %	100 %	50.000,00						100 %	4.472.289.310,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						50.000,00					-		4.859.028.297,00	
	Persentase program bantuan sosial dan perlindungan sosial yang tepat sasaran berdasarkan data fakir miskin.						50.000,00					-		4.859.028.297,00	
		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	700 Usulan		700 Usulan	700 Usulan	50.000,00						700 Usulan	485.902.830,00	
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						50.000,00							485.902.830,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	700 Usulan		700 Usulan	700 Usulan	50.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		700 Usulan	485.902.830,00	DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**89.850.000,00**							**1.364.640.039,00**	
	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana						***89.850.000,00***							***1.310.054.437,00***	
		1.Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %		100 %	100 %	89.850.000,00						100 %	1.310.054.437,00	
		2.Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100 %		100 %	100 %	89.850.000,00						100 %	1.310.054.437,00	
		3.Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100 %		100 %	100 %	89.850.000,00						100 %	1.310.054.437,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						79.500.000,00					-		1.091.712.031,00	
	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial						79.500.000,00					-		1.091.712.031,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang		700 Orang	700 Orang	79.500.000,00						700 Orang	545.856.015,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						79.500.000,00							545.856.015,00	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang		700 Orang	700 Orang	79.500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		700 Orang	545.856.015,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						10.350.000,00					-		272.928.008,00	
	persentase kader/relawan masyarakat (Tagana, KSB, atau relawan sosial lainnya) yang dilatih dan aktif dalam kesiapsiagaan bencana						10.350.000,00					-		272.928.008,00	
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang	30 Orang	10.350.000,00						30 Orang	163.756.805,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						10.350.000,00							163.756.805,00	
	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang	30 Orang	10.350.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		30 Orang	163.756.805,00	DINAS SOSIAL
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**55.500.000,00**							**159.208.004,00**	
	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan						***55.500.000,00***							***79.604.002,00***	
		1.Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100 %		100 %	100 %	55.500.000,00						100 %	79.604.002,00	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						55.500.000,00					-		159.208.004,00	
	Persentase fasilitas TMPN yang dalam kondisi baik dan berfungsi						55.500.000,00					-		159.208.004,00	
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam		1 Makam	1 Makam	55.500.000,00						1 Makam	79.604.002,00	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						55.500.000,00							79.604.002,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman	1 Makam		1 Makam	1 Makam	55.500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan pertumbuhan		1 Makam	79.604.002,00	DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Makam Pahlawan Kabupaten/Kota									ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat				
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**5.860.705.334,00**							**18.659.653.041,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.860.705.334,00**							**18.627.653.041,00**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**3.611.220.334,00**							**12.171.751.773,00**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.203.220.334,00**							**4.781.111.655,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***3.202.220.334,00***							***4.492.111.655,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 %		100 %	100 %	3.202.220.334,00						100 %	4.492.111.655,00	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00					-		67.000.000,00	
	Persentase Dokumen Penganggaran Yang disusun						1.000.000,00					-		67.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00						2 Dokumen	20.000.000,00	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.000.000,00							20.000.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.760.819.134,00					-		3.498.495.278,00	
	Persentase Keterpenuhan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.760.819.134,00					-		3.498.495.278,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	280 Dokumen		220 Dokumen	220 Dokumen	1.000.000,00						230 Dokumen	12.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.759.819.134,00						30 Orang/bulan	3.462.495.278,00	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.759.819.134,00							3.462.495.278,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		30 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.759.819.134,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		30 Orang/bulan	3.462.495.278,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.000.000,00							12.000.000,00	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	280 Dokumen		220 Dokumen	150 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan,		230 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
										pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		346.825.000,00	
	Persentase keterpenuhan administrasi umum						40.000.000,00					-		346.825.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		75 Laporan	80 Laporan	30.000.000,00						82 Laporan	180.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.543.400,00						4 Paket	67.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	456.600,00						2 Paket	17.000.000,00	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						456.600,00							17.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	456.600,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						9.543.400,00							67.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.543.400,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Paket	67.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							180.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		75 Laporan	20 Laporan	30.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		82 Laporan	180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						347.701.200,00					-		258.000.000,00	
	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						347.701.200,00					-		258.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.100.000,00						12 Laporan	80.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	297.601.200,00						12 Laporan	178.000.000,00	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.100.000,00							80.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.100.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						297.601.200,00							178.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	297.601.200,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	178.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						53.700.000,00					-		150.300.000,00	
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN						53.700.000,00					-		150.300.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit		68 Unit	68 Unit	43.700.000,00						68 Unit	60.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	36.000.000,00	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10.000.000,00							36.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Unit	36.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						43.700.000,00							60.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit		68 Unit	56 Unit	43.700.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		68 Unit	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**109.795.000,00**							**1.044.000.000,00**	
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						***109.795.000,00***							***1.044.000.000,00***	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%		100%	100%	109.795.000,00						100%	1.044.000.000,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						18.115.000,00					-		240.000.000,00	
	Persentase layanan pencegahan terhadap perempuan yang terlaksana						18.115.000,00					-		240.000.000,00	
		Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	-	18.115.000,00						-	105.000.000,00	
2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						18.115.000,00							105.000.000,00	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	34 Kegiatan	18.115.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						91.680.000,00					-		804.000.000,00	
	Persentase layanan rujukan lanjutan pada korban yang terlaksana						91.680.000,00					-		804.000.000,00	
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	125.000.000,00	
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-		-	-	20.000.000,00						-	155.000.000,00	
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	37.480.000,00						-	195.000.000,00	
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	-	15.700.000,00						-	127.000.000,00	
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	-	13.500.000,00						-	137.000.000,00	
2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						37.480.000,00							195.000.000,00	
	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	37.480.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna		-	195.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
										kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
2.08.03.2.02.0011	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						5.000.000,00							125.000.000,00	
	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-		-	2 Orang	5.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						15.700.000,00							127.000.000,00	
	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	3 Orang	15.700.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	127.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						13.500.000,00							137.000.000,00	
	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	10 Orang	13.500.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	137.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.02.0016	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						20.000.000,00							155.000.000,00	
	Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-		-	5 Orang	20.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	155.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**69.360.000,00**							**851.000.000,00**	
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif						***69.360.000,00***							***851.000.000,00***	
		1.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	73 Indeks		63 Indeks	65 Indeks	69.360.000,00						67 Indeks	851.000.000,00	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						41.116.000,00					-		205.000.000,00	
	Jumlah kecamatan/kel/desa yang terfasiltasi dalam pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha						41.116.000,00					-		205.000.000,00	
		Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	41.116.000,00						-	65.000.000,00	
2.08.06.2.01.0009	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota						41.116.000,00							65.000.000,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	40 Orang	41.116.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						28.244.000,00					-		646.000.000,00	
	Persentase desa/kelurahan penyedia layanan peningkatan kualitas anak yang mendapatkan penguatan kelembagaaan						28.244.000,00					-		646.000.000,00	
		Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	28.244.000,00						-	251.000.000,00	
2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						28.244.000,00							251.000.000,00	
	Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	6 Orang	28.244.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	251.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**228.845.000,00**							**1.832.000.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak						***228.845.000,00***							***1.197.000.000,00***	
		1.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	98 Persentase		90 Persentase	92 Persentase	228.845.000,00						94 Persentase	1.197.000.000,00	
		2.Indeks Perlindungan Khusus Anak IPKA	66 Indeks		62 Indeks	63 Indeks	228.845.000,00						64 Indeks	1.197.000.000,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						73.710.000,00					-		611.000.000,00	
	Rasio kekerasan terhadap anak						73.710.000,00					-		611.000.000,00	
		Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	-	55.985.000,00						-	151.000.000,00	
		Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	17.725.000,00						-	151.000.000,00	
2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						55.985.000,00							151.000.000,00	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	1 Kegiatan	55.985.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	151.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.01.0015	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						17.725.000,00							151.000.000,00	
	Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	2 Laporan	17.725.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	151.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						144.960.000,00					-		618.000.000,00	
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang memperoleh layanan komprehensif						144.960.000,00					-		618.000.000,00	
		Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	82.000.000,00	
		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	65.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	48.860.000,00						-	85.000.000,00	
		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	13.500.000,00						-	83.000.000,00	
		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	2.200.000,00						-	82.000.000,00	
		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	650.000,00						-	81.000.000,00	
		Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	19.750.000,00						-	140.000.000,00	
2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						48.860.000,00							85.000.000,00	
	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	35 Orang	48.860.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02.0017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						13.500.000,00							83.000.000,00	
	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	35 Orang	13.500.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	83.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02.0018	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						10.000.000,00							82.000.000,00	
	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	7 Orang	10.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	82.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
2.08.07.2.02.0019	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						50.000.000,00							65.000.000,00	
	Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	15 Orang	50.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02.0021	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						19.750.000,00							140.000.000,00	
	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	10 Orang	19.750.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						2.200.000,00							82.000.000,00	
	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	5 Orang	2.200.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	82.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02.0023	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						650.000,00							81.000.000,00	
	Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	5 Orang	650.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	81.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.175.000,00					-		603.000.000,00	
	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus						10.175.000,00					-		603.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	10.175.000,00						-	201.000.000,00	
2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						10.175.000,00							201.000.000,00	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	6 Lembaga	10.175.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	201.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**2.249.485.000,00**							**6.455.901.268,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**523.865.000,00**							**1.943.156.537,00**	
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk						***523.865.000,00***							***793.156.537,00***	
		1.Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2.10 Angka		2.10 Angka	2.10 Angka	523.865.000,00						2.10 Angka	793.156.537,00	
		2.Angka Kelahiran Remaja Umur 15- 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	18 Angka		19 Angka	19,7 Angka	523.865.000,00						19,5 Angka	793.156.537,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						42.000.000,00					-		696.156.537,00	
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang tersusun						42.000.000,00					-		696.156.537,00	
		Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	481.865.000,00						-	120.000.000,00	
	Persentase Desa/Kelurahan yang didampingi dalam pengembangan kampung KB						42.000.000,00								
		Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	-	42.000.000,00						-	176.156.537,00	
2.14.02.2.01.0042	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						481.865.000,00							120.000.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	10 Kelompok	481.865.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						42.000.000,00							176.156.537,00	
	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	8 Laporan	42.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	176.156.537,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**522.320.000,00**							**3.167.704.897,00**	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)						***522.320.000,00***							***2.297.704.897,00***	
		1.Angka prevalensi kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	68 Angka		64 Angka	65 Angka	522.320.000,00						66 Angka	2.297.704.897,00	
		2.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	8.15 %		10 %	9.5 %	522.320.000,00						9 %	2.297.704.897,00	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						60.000.000,00					-		605.932.279,00	
	Persentase tenaga fungsional penyuluh KB PKB/PLKB dan IMP yang terlatih						60.000.000,00					-		605.932.279,00	
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2 Organisasi		2 Organisasi	2 Organisasi	60.000.000,00						2 Organisasi	6.329.285,00	
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						60.000.000,00							6.329.285,00	
	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2 Organisasi		2 Organisasi	2 Organisasi	60.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Organisasi	6.329.285,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						462.320.000,00					-		597.000.000,00	
	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di faskes						462.320.000,00					-		597.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1720 Orang	441.620.000,00						1632 Orang	170.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	20.700.000,00						-	50.000.000,00	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						441.620.000,00							170.000.000,00	
	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1632 Orang		1632 Orang	1550 Orang	441.620.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1632 Orang	170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
										generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						20.700.000,00							50.000.000,00	
	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	20 Laporan	20.700.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**1.203.300.000,00**							**1.345.039.834,00**	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)						***1.203.300.000,00***							***1.175.039.834,00***	
		1.Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	80 %		60 %	65 %	1.203.300.000,00						70 %	1.175.039.834,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						63.000.000,00					-		675.039.834,00	
	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina						63.000.000,00					-		675.039.834,00	
		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	525 Orang		495 Orang	500 Orang	63.000.000,00						510 Orang	255.039.834,00	
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						63.000.000,00							255.039.834,00	
	Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	525 Orang		495 Orang	500 Orang	63.000.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		510 Orang	255.039.834,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						1.140.300.000,00					-		670.000.000,00	
	Persentase organisasi kemasyarakatan/mitrakerja yang dibina melalui pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga						1.140.300.000,00					-		670.000.000,00	
		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	1.140.300.000,00						-	320.000.000,00	
2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						1.140.300.000,00							320.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	6516 Keluarga	1.140.300.000,00	Kab. Soppeng	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN						**5.998.742.103,00**							**28.382.672.561,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.824.839.334,00**							**15.792.295.582,00**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**4.824.839.334,00**							**15.792.295.582,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.815.489.334,00**							**13.901.419.972,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***4.815.489.334,00***							***13.701.419.972,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	4.815.489.334,00						100.00 %	13.701.419.972,00	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.800.000,00					-		11.200.000,00	
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu						1.800.000,00					-		11.200.000,00	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	240.000,00						1 Dokumen	3.200.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	360.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.200.000,00						4 Laporan	5.000.000,00	
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						240.000,00							3.200.000,00	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	240.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	3.200.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						360.000,00							3.000.000,00	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	360.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.200.000,00							5.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Laporan	5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.778.937.734,00					-		12.704.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.778.937.734,00					-		12.704.000.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000,00						1 Laporan	4.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang/bulan		140 Orang/bulan	140 Orang/bulan	3.778.637.734,00						138 Orang/bulan	12.700.000.000,00	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.778.637.734,00							12.700.000.000,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang/bulan		140 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.778.637.734,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		138 Orang/bulan	12.700.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						300.000,00							4.000.000,00	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	4.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						82.050.000,00					-		586.219.972,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						82.050.000,00					-		586.219.972,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.550.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320 Laporan		200 Laporan	220 Laporan	70.000.000,00						250 Laporan	406.219.972,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.000.000,00						3 Paket	125.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	500.000,00						2 Paket	15.000.000,00	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						500.000,00							15.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	0 Paket	500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga		2 Paket	15.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							125.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	125.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.550.000,00							20.000.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.550.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70.000.000,00							406.219.972,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320 Laporan		200 Laporan	40 Laporan	70.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		250 Laporan	406.219.972,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						905.301.600,00					-		365.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						905.301.600,00					-		365.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	133.740.000,00						12 Laporan	185.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	771.561.600,00						3 Laporan	180.000.000,00	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						133.740.000,00							185.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	133.740.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	185.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						771.561.600,00						180.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	771.561.600,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Laporan	180.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						47.400.000,00					-		235.000.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik						47.400.000,00					-		235.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	126 Unit		126 Unit	126 Unit	27.400.000,00						126 Unit	180.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	30.000.000,00	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00							30.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Unit	30.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						27.400.000,00							180.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	126 Unit		126 Unit	126 Unit	27.400.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		126 Unit	180.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**6.850.000,00**							**1.245.000.000,00**	
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat						***3.550.000,00***							***1.220.000.000,00***	
		1.Skor Pola Pangan Harapan	86.8 Nilai		83.5 Nilai	84.3 Nilai	3.550.000,00						85.1 Nilai	1.220.000.000,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						5.050.000,00					-		905.000.000,00	
	Jumlah Fasilitasi Penyediaan dan Penyaluran Pangan untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						5.050.000,00					-		905.000.000,00	
		Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
		Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1.750.000,00						1 laporan	50.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	600 Keluarga		300 Keluarga	600 Keluarga	300.000,00						690 Keluarga	820.000.000,00	
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00						2 Laporan	25.000.000,00	
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						300.000,00							820.000.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	600 Keluarga		300 Keluarga	0 Keluarga	300.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		690 Keluarga	820.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						1.750.000,00							50.000.000,00	
	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1.750.000,00	Kab. Soppeng	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		1 laporan	50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						1.500.000,00							25.000.000,00	
	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		2 Laporan	25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota						1.500.000,00							10.000.000,00	
	Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						300.000,00					-		315.000.000,00	
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang Dikelola						300.000,00					-		315.000.000,00	
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	21 Ton		20 Ton	21 Ton	300.000,00						21 Ton	315.000.000,00	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						300.000,00							315.000.000,00	
	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	21 Ton		20 Ton	1 Ton	300.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		21 Ton	315.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						1.500.000,00					-		25.000.000,00	
	Jumlah Konsumsi Energi Masyarakat Per Kapita						1.500.000,00					-		25.000.000,00	
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun						1.500.000,00							25.000.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		1 Laporan	25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**2.500.000,00**							**645.875.610,00**	
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan						***2.500.000,00***							***645.875.610,00***	
		1.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	1.43 %		2.86 %	2.86 %	2.500.000,00						1.43 %	645.875.610,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						1.000.000,00					-		295.875.610,00	
	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang Disusun						1.000.000,00					-		295.875.610,00	
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	295.875.610,00	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						1.000.000,00							295.875.610,00	
	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		1 Dokumen	295.875.610,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						1.500.000,00					-		350.000.000,00	
	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Poin)						1.500.000,00					-		350.000.000,00	
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00						1 Laporan	350.000.000,00	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						1.500.000,00							350.000.000,00	
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		1 Laporan	350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.173.902.769,00**							**12.590.376.979,00**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.173.902.769,00**							**12.590.376.979,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**845.640.069,00**							**1.560.376.979,00**	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan)						***845.640.069,00***							***1.560.376.979,00***	
		1.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	4.00 Persentase		3.00 Persentase	3.50 Persentase	845.640.069,00						3.50 Persentase	1.560.376.979,00	
		2.Peningkatan Produksi Hortikultura	15.00 Persentase		12.50 Persentase	14.00 Persentase	845.640.069,00						15.00 Persentase	1.560.376.979,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		3.Peningkatan Produksi Perkebunan	5.00 %		2.50 %	3.50 %	845.640.069,00						4.00 %	1.560.376.979,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						844.140.069,00					-		1.460.376.979,00	
	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Diawasi dan Didampingi Penggunaannya						844.140.069,00					-		1.460.376.979,00	
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	8 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	844.140.069,00						8 Laporan	1.460.376.979,00	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						844.140.069,00							1.460.376.979,00	
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	8 Laporan		6 Laporan	2 Laporan	844.140.069,00	Kab. Soppeng	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		8 Laporan	1.460.376.979,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						1.500.000,00					-		100.000.000,00	
	Jumlah Jenis Sumber Daya Genetik Tumbuhan yang Dikelola dan Dikembangkan						1.500.000,00					-		100.000.000,00	
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman						1.500.000,00							100.000.000,00	
	Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**54.762.700,00**							**9.070.000.000,00**	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (DTPHPKP)						***54.762.700,00***							***9.070.000.000,00***	
		1.Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	27346.54 Ha		27346.54 Ha	27346.54 Ha	54.762.700,00						27346.54 Ha	9.070.000.000,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						52.262.700,00					-		70.000.000,00	
	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan						52.262.700,00					-		70.000.000,00	
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	52.262.700,00						2 Laporan	70.000.000,00	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						52.262.700,00							70.000.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	52.262.700,00	Kab. Soppeng	DBH Sawit	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		2 Laporan	70.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						2.500.000,00					-		9.000.000.000,00	
	Cakupan Prasarana Pertanian yang Dibangun dan Berfungsi dengan Baik						2.500.000,00					-		9.000.000.000,00	
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit		10 Unit	15 Unit	1.000.000,00						20 Unit	4.000.000.000,00	
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	50 Unit		25 Unit	40 Unit	1.500.000,00						40 Unit	5.000.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						1.000.000,00							4.000.000.000,00	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit		10 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		20 Unit	4.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						1.500.000,00							5.000.000.000,00	
	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	50 Unit		25 Unit	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		40 Unit	5.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**1.000.000,00**							**800.000.000,00**	
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian						***1.000.000,00***							***800.000.000,00***	
		1.Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100.00 Persentase		89.00 Persentase	91.00 Persentase	1.000.000,00						94.00 Persentase	800.000.000,00	
		2.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	30.00 Persentase		10.00 Persentase	15.00 Persentase	1.000.000,00						20.00 Persentase	800.000.000,00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						1.000.000,00					-		800.000.000,00	
	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)						1.000.000,00					-		800.000.000,00	
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	850 Ha		450 Ha	750 Ha	1.000.000,00						800 Ha	800.000.000,00	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						1.000.000,00							800.000.000,00	
	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	850 Ha		450 Ha	1 Ha	1.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		800 Ha	800.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**272.500.000,00**							**1.160.000.000,00**	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian						***272.500.000,00***							***1.160.000.000,00***	
		1.Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	10.00 %		5.00 %	5.00 %	272.500.000,00						10.00 %	1.160.000.000,00	
		2.Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	10.00 %		6.00 %	7.00 %	272.500.000,00						8.00 %	1.160.000.000,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						272.500.000,00					-		1.160.000.000,00	
	Jumlah Kelompok Tani yang Meningkat Skor Kemampuannya						272.500.000,00					-		1.160.000.000,00	
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	264.000.000,00						-	900.000.000,00	
		Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa	-		-	-	8.500.000,00						-	260.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya													
3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						264.000.000,00							900.000.000,00	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	8 Unit	264.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		-	900.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						8.500.000,00							260.000.000,00	
	Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	70 Unit	8.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		-	260.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**7.339.604.410,00**							**10.938.061.649,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**706.499.200,00**							**6.816.568.254,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**706.499.200,00**							**6.816.568.254,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**454.800,00**							**270.000.000,00**	
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						***454.800,00***							***270.000.000,00***	
		1.Indeks kualitas air	73.92 %		73.12 %	73.32 %	454.800,00						73.52 %	270.000.000,00	
		2.Indeks kualitas udara	81.62 %		80.62 %	81.02 %	454.800,00						81.22 %	270.000.000,00	
		999.Indeks kualitas tutupan lahan	75.25 Indeks		44,78 Indeks	74.73 Indeks	454.800,00						74.9 Indeks	270.000.000,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						454.800,00					-		270.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						454.800,00					-		270.000.000,00	
		Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	6 Lokasi		6 Lokasi	6 Lokasi	454.800,00						6 Lokasi	270.000.000,00	
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						454.800,00							270.000.000,00	
	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	6 Lokasi		6 Lokasi	6 Lokasi	454.800,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		6 Lokasi	270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**30.545.000,00**							**707.591.131,00**	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati						***30.545.000,00***							***707.591.131,00***	
		1.Persentase RTH	30%		30%	30%	30.545.000,00						30%	707.591.131,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						30.545.000,00					-		707.591.131,00	
	Luas Keanekaragaman Hayati Kabupaten yang dikelola						30.545.000,00					-		707.591.131,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha		1 Ha	1 Ha	30.545.000,00						1 Ha	707.591.131,00	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						30.545.000,00							707.591.131,00	
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha		1 Ha	1 Ha	30.545.000,00	Kab. Soppeng	Pajak Air Tanah Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Ha	707.591.131,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**1.999.800,00**							**428.977.123,00**	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup						***1.999.800,00***							***428.977.123,00***	
		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	85 Persentase		75 Persentase	77 Persentase	1.999.800,00						79 Persentase	428.977.123,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.999.800,00					-		428.977.123,00	
	Jumlah peserta pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup						1.999.800,00					-		428.977.123,00	
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.999.800,00						3 Dokumen	428.977.123,00	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						1.999.800,00							428.977.123,00	
	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.999.800,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Dokumen	428.977.123,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**673.499.600,00**							**5.410.000.000,00**	
	Meningkatnya tata kelola persampahan						***673.499.600,00***							***5.410.000.000,00***	
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	51.64 poin		47.84 poin	48.79 poin	673.499.600,00						49.74 poin	5.410.000.000,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						673.499.600,00					-		5.410.000.000,00	
	volume timbulan sampah yang ditangani (M3)						673.499.600,00					-		5.410.000.000,00	
		Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	25 Ton		15 Ton	15 Ton	0,00						20 Ton	450.000.000,00	
		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	10000 Ton		25000 Ton	25000 Ton	673.499.600,00						20000 Ton	2.700.000.000,00	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						673.499.600,00							2.700.000.000,00	
	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	10000 Ton		25000 Ton	25000 Ton	673.499.600,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan		20000 Ton	2.700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
											ketahanan daerah terhadap bencana			
2							**6.633.105.210,00**						**4.121.493.395,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**6.633.105.210,00**						**4.121.493.395,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.633.105.210,00**						**4.121.493.395,00**	
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup	-		-	100 %	6.627.105.210,00					-	3.801.493.395,00	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.000.000,00					-	245.000.000,00	
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu						6.000.000,00					-	245.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00					2 Dokumen	60.000.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00					4 Laporan	120.000.000,00	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00						60.000.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.000.000,00						120.000.000,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Laporan	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.822.448.010,00					-	3.010.855.318,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.822.448.010,00					-	3.010.855.318,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00					2 Dokumen	60.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan		54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	3.819.448.010,00					54 Orang/bulan	2.950.855.318,00	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.819.448.010,00						2.950.855.318,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan		54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	3.819.448.010,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		54 Orang/bulan	2.950.855.318,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH			
2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						3.000.000,00						60.000.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						77.545.400,00					-		385.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						77.545.400,00					-		385.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	40.000.000,00						100 Laporan	185.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	19.990.000,00						2 Paket	60.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	5.031.000,00						3 Paket	70.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	12.524.400,00						3 Paket	70.000.000,00	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						19.990.000,00							60.000.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	19.990.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.524.400,00							70.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	12.524.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.031.000,00							70.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	5.031.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.000.000,00							185.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		100 Laporan	185.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.552.006.400,00					-		220.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.552.006.400,00					-		220.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00						12 Laporan	70.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	2.480.006.400,00						3 Laporan	150.000.000,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						72.000.000,00							70.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.480.006.400,00							150.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	2.480.006.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Laporan	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						175.105.400,00					-		135.638.077,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik						175.105.400,00					-		135.638.077,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit		54 Unit	54 Unit	45.305.400,00						54 Unit	75.638.077,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	129.800.000,00						1 Unit	60.000.000,00	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						129.800.000,00							60.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	129.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas,		1 Unit	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Lalabata Rilau || 0			serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						45.305.400,00							75.638.077,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit		54 Unit	54 Unit	45.305.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		54 Unit	75.638.077,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**3.328.022.864,00**							**0,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.328.022.864,00**							**0,00**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**3.328.022.864,00**							**0,00**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.328.022.864,00**							**0,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***3.328.022.864,00***							***0,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %		100 %	100 %	3.328.022.864,00						100 %	0,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.487.858.202,00					-		0,00	
	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan						2.487.858.202,00					-		0,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.487.858.202,00						25 Orang/bulan	0,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.487.858.202,00							0,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.487.858.202,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		25 Orang/bulan	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						254.892.100,00					-		0,00	
	Persentase keterpenuhan administrasi umum						254.892.100,00					-		0,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	30.000.000,00						100 Laporan	0,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	15.000.000,00						3 Paket	0,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	10.000.000,00						6 Paket	0,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	199.892.100,00						1 Paket	0,00	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						199.892.100,00							0,00	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	199.892.100,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Paket	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							0,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng ||	Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan		3 Paket	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0			keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							0,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		6 Paket	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							0,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	250 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		100 Laporan	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						560.572.562,00					-		0,00	
	Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah						560.572.562,00					-		0,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	104.752.562,00						12 Laporan	0,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	455.820.000,00						4 Laporan	0,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						104.752.562,00							0,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	104.752.562,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						455.820.000,00							0,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	455.820.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		4 Laporan	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.700.000,00					-		0,00	
	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik						24.700.000,00					-		0,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	4.700.000,00						6 Unit	0,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	0,00	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00							0,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata ||	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna		1 Unit	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
								Kelurahan Lalabata Rilau || 0			mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.700.000,00							0,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	4.700.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		6 Unit	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**5.974.641.915,00**							**5.969.231.187,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.974.641.915,00**							**5.969.231.187,00**	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**5.974.641.915,00**							**5.969.231.187,00**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.702.462.119,00**							**2.543.824.955,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***2.700.222.119,00***							***2.496.824.955,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 %		100 %	100 %	2.700.222.119,00						100 %	2.496.824.955,00	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00					-		7.900.000,00	
	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu,Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu,Persensatase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu						3.000.000,00					-		7.900.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00						2 Dokumen	5.200.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	1.000.000,00						27 Laporan	2.700.000,00	
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000,00							5.200.000,00	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	5.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.000.000,00							2.700.000,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		27 Laporan	2.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.380.631.719,00					-		2.005.974.955,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan						2.380.631.719,00					-		2.005.974.955,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	2.000.000,00						10 Dokumen	9.700.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.378.631.719,00						23 Orang/bulan	1.996.274.955,00	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.378.631.719,00							1.996.274.955,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.378.631.719,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		23 Orang/bulan	1.996.274.955,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						2.000.000,00							9.700.000,00	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		10 Dokumen	9.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						240.000,00					-		5.250.000,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						240.000,00					-		5.250.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	240.000,00						2 Dokumen	5.250.000,00	
2.13.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						240.000,00							5.250.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	5 Dokumen	240.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	5.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						55.350.000,00					-		211.000.000,00	
	Persentase keterpenuhan administrasi umum						55.350.000,00					-		211.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan		75 Laporan	80 Laporan	40.000.000,00						85 Laporan	136.200.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.750.000,00						2 Paket	15.500.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	7.360.000,00						5 Paket	47.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	240.000,00						5 Paket	12.300.000,00	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.750.000,00							15.500.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.750.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan,		2 Paket	15.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
								Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0			akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						240.000,00							12.300.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	240.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		5 Paket	12.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						7.360.000,00							47.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	7.360.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		5 Paket	47.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.000.000,00							136.200.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan		75 Laporan	27 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		85 Laporan	136.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						225.340.400,00					-		270.000.000,00	
	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						225.340.400,00					-		270.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	41.000.000,00						12 Laporan	47.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	184.340.400,00						12 Laporan	223.000.000,00	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						41.000.000,00							47.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	41.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan		12 Laporan	47.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
											lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						184.340.400,00							223.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	184.340.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	223.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						37.900.000,00					-		43.700.000,00	
	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik						37.900.000,00					-		43.700.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	37.900.000,00						8 Unit	43.700.000,00	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.900.000,00							43.700.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	37.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		8 Unit	43.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**240.000,00**							**186.155.000,00**	
	Meningkatnya kualitas penataan desa						***240.000,00***							***186.155.000,00***	
		1.Persentase fasilitasi penataan desa	90 %		50 %	60 %	240.000,00						70 %	186.155.000,00	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						240.000,00					-		186.155.000,00	
	Jumlah Penyelenggaran Penataan Desa						240.000,00					-		186.155.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	240.000,00						2 Unit	186.155.000,00	
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa						240.000,00							186.155.000,00	
	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	240.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		2 Unit	186.155.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**240.000,00**							**290.264.468,00**	
	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa						***240.000,00***							***290.264.468,00***	
		1.Persentase fasilitasi kerja sama desa	100 %		100 %	100 %	240.000,00						100 %	290.264.468,00	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						240.000,00					-		290.264.468,00	
	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kerja sama antar desa						240.000,00					-		290.264.468,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	9 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	240.000,00						10 Dokumen	290.264.468,00	
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						240.000,00							290.264.468,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	9 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	240.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng ||	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk		10 Dokumen	290.264.468,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
								Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0			mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi				
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**2.970.979.796,00**							**1.387.233.382,00**	
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***2.970.259.796,00***							***1.387.233.382,00***	
		1.Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kualitasnya	87 %		75 %	78 %	2.970.259.796,00						81 %	1.387.233.382,00	
		2.Persentase fasilitasi tata kelola desa	100 %		100 %	100 %	2.970.259.796,00						100 %	1.387.233.382,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						2.970.979.796,00					-		1.387.233.382,00	
	Jumlah Penyelenggaran Administrasi PemerintahanDesa yang dibina dan diawasi						2.970.979.796,00					-		1.387.233.382,00	
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	98 Orang		98 Orang	98 Orang	240.000,00						98 Orang	30.250.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	49 Dokumen		Dokumen	49 Dokumen	240.000,00						49 Dokumen	27.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	240.000,00						1 Dokumen	40.700.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	49 Dokumen		49 Dokumen	49 Dokumen	240.000,00						49 Dokumen	40.100.000,00	
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	49 Dokumen		49 Dokumen	49 Dokumen	970.019.796,00						49 Dokumen	970.000.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	29 Laporan		29 Laporan	29 Laporan	2.000.000.000,00						29 Laporan	278.683.382,00	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						970.019.796,00							970.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	49 Dokumen		49 Dokumen	49 Dokumen	970.019.796,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		49 Dokumen	970.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						240.000,00							40.100.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	49 Dokumen		49 Dokumen	49 Dokumen	240.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		49 Dokumen	40.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						240.000,00							40.700.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	240.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Dokumen	40.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						240.000,00							30.250.000,00	
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	98 Orang		98 Orang	98 Orang	240.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		98 Orang	30.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						2.000.000.000,00							278.683.382,00	
	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	29 Laporan		29 Laporan	0 Laporan	2.000.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		29 Laporan	278.683.382,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa						240.000,00							27.500.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	49 Dokumen		Dokumen	49 Dokumen	240.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		49 Dokumen	27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**300.720.000,00**							**1.561.753.382,00**	
	Meningkatnya kapasitas lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan						***300.240.000,00***							***1.561.753.382,00***	
		1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	6%		5%	5,25%	300.240.000,00						5,5%	1.561.753.382,00	
		2.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	4.88 %		4 %	4.20 %							4.44 %		
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						300.720.000,00					-		1.561.753.382,00	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten yang diberdayakan						300.720.000,00					-		1.561.753.382,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	240.000,00						1 Dokumen	67.650.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						1 Dokumen	1.333.453.382,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	240.000,00						1 Dokumen	75.650.000,00	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	70 Lembaga		70 Lembaga	70 Lembaga	240.000,00						70 Lembaga	85.000.000,00	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,						240.000,00							75.650.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	240.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Dokumen	75.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						240.000,00							85.000.000,00	
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	70 Lembaga		70 Lembaga	70 Lembaga	240.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		70 Lembaga	85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						240.000,00							67.650.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	240.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Dokumen	67.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						300.000.000,00							1.333.453.382,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Dokumen	1.333.453.382,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	DINAS PERHUBUNGAN						**13.561.567.861,00**							**6.927.060.472,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.561.567.861,00**							**6.927.060.472,00**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**13.561.567.861,00**							**6.927.060.472,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.385.467.861,00**							**4.408.247.056,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***4.380.967.861,00***							***4.350.763.056,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perhubungan	75.50 %		71.50 %	72.50 %	4.380.967.861,00						73.50 %	4.350.763.056,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.000.000,00					Dinas Perhubungan		41.036.685,00	
	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu						6.000.000,00					Dinas Perhubungan		41.036.685,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000,00						3 Dokumen	11.622.685,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						2 Dokumen	7.897.500,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000,00						3 Dokumen	10.445.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00						1 Laporan	11.071.500,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000,00							11.622.685,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	11.622.685,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.500.000,00							10.445.000,00	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		3 Dokumen	10.445.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.500.000,00							7.897.500,00	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Dokumen	7.897.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.500.000,00							11.071.500,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Laporan	11.071.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.387.388.662,00					Dinas Perhubungan		3.870.772.919,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan						3.387.388.662,00					Dinas Perhubungan		3.870.772.919,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	3.000.000,00						8 Dokumen	39.600.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	1.000.000,00						8 Dokumen	2.909.500,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	3.383.388.662,00						50 Orang/bulan	3.828.263.419,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.383.388.662,00							3.828.263.419,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	3.383.388.662,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		50 Orang/bulan	3.828.263.419,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.000.000,00							2.909.500,00	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan	Peningkatan kualitas pendidikan,		8 Dokumen	2.909.500,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						3.000.000,00							39.600.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		8 Dokumen	39.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6.000.000,00					Dinas Perhubungan		103.327.500,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						6.000.000,00					Dinas Perhubungan		103.327.500,00	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000,00						5 Dokumen	88.147.500,00	
2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						6.000.000,00							88.147.500,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5 Dokumen	88.147.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						60.900.000,00					Dinas Perhubungan		164.477.452,00	
	Persentase keterpenuhan administrasi umum (%)						60.900.000,00					Dinas Perhubungan		164.477.452,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.900.000,00						2 Laporan	2.662.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	50.000.000,00						8 Laporan	91.368.423,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	7.000.000,00						6 Paket	52.863.529,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.000.000,00						1 Paket	4.554.000,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							4.554.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Paket	4.554.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						7.000.000,00							52.863.529,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		6 Paket	52.863.529,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.900.000,00							2.662.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.900.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan		2 Laporan	2.662.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
										memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00							91.368.423,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	50.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		8 Laporan	91.368.423,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						858.679.199,00					Dinas Perhubungan		101.797.500,00	
	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)						858.679.199,00					Dinas Perhubungan		101.797.500,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.599.999,00						12 Laporan	51.397.500,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	822.079.200,00						12 Laporan	50.400.000,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.599.999,00							51.397.500,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.599.999,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	51.397.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						822.079.200,00							50.400.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	822.079.200,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	50.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66.500.000,00					Dinas Perhubungan		109.305.000,00	
	Persentase Barang Milih Daerah yang berfungsi baik (%)						66.500.000,00					Dinas Perhubungan		109.305.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	51.510.000,00						1 Unit	42.735.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	4.990.000,00						14 Unit	16.170.000,00	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						51.510.000,00							42.735.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	15 Unit	51.510.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Unit	42.735.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.990.000,00							16.170.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	4.990.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik,	Peningkatan kualitas		14 Unit	16.170.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
										hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
	Persentase Barang Milih Daerah yang berfungsi baik (%)						66.500.000,00					Dinas Perhubungan		109.305.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	10.000.000,00						-	50.400.000,00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10.000.000,00							50.400.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	50.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**9.176.100.000,00**							**2.518.813.416,00**	
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat						***9.164.100.000,00***							***2.458.813.416,00***	
		1.Konektivitas darat	100 %		100 %	100 %	9.164.100.000,00						100 %	2.458.813.416,00	
		1.Persentase Kelengkapan Jalan yang Terpasang terhadap Kondisi Ideal	100 %		100 %	100 %	9.164.100.000,00						100 %	2.458.813.416,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						9.108.000.000,00					Pegguna Jalan, Pemerintah Daerah		1.539.010.710,00	
	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan						9.108.000.000,00					Pegguna Jalan, Pemerintah Daerah		1.539.010.710,00	
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	60 Unit		60 Unit	60 Unit	8.849.000.000,00						60 Unit	635.550.000,00	
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	259.000.000,00						7 Unit	893.460.710,00	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						8.849.000.000,00							635.550.000,00	
	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	60 Unit		60 Unit	60 Unit	8.849.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		60 Unit	635.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						259.000.000,00							893.460.710,00	
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	259.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		7 Unit	893.460.710,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
										agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						3.000.000,00					Dunia Usaha dan Masyarakat Umum		29.000.000,00	
	Jumlah Retribusi Terminal dan Parkir						3.000.000,00					Dunia Usaha dan Masyarakat Umum		29.000.000,00	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00						4 Laporan	29.000.000,00	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						3.000.000,00							29.000.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		4 Laporan	29.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						3.000.000,00					Pengusaha Angkutan dan Pemilik Kendaraan Uji		560.190.000,00	
	Persentase Kendaraan Yang Memenuhi Persyaratan Tekhnis dan Laik Jalan						3.000.000,00					Pengusaha Angkutan dan Pemilik Kendaraan Uji		560.190.000,00	
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1403 Dokumen		1155 Dokumen	1212 Dokumen	3.000.000,00						1273 Dokumen	38.190.000,00	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						3.000.000,00							38.190.000,00	
	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1403 Dokumen		1155 Dokumen	1212 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1273 Dokumen	38.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						56.100.000,00					Masyarakat dan Pengguna Jalan		227.671.248,00	
	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan						56.100.000,00					Masyarakat dan Pengguna Jalan		227.671.248,00	
		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00						4 Laporan	63.000.000,00	
		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	124.671.248,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
		Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi													
		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.100.000,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						3.100.000,00							40.000.000,00	
	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.100.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						3.000.000,00							63.000.000,00	
	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		4 Laporan	63.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						50.000.000,00							124.671.248,00	
	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Laporan	124.671.248,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						3.000.000,00					Pelaku Usaha dan Masyarakat		20.000.000,00	
	Persentase Kesesuaian Rencana Induk Jaringan LLAJ						3.000.000,00					Pelaku Usaha dan Masyarakat		20.000.000,00	
		Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin						3.000.000,00							20.000.000,00	
	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung		1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
										berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi				
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.000.000,00					Masyarakat umum dan pelaku usaha		20.000.000,00	
	Jumlah Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang disediakan						3.000.000,00					Masyarakat umum dan pelaku usaha		20.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00						2 Laporan	20.000.000,00	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						3.000.000,00							20.000.000,00	
	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		2 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**4.755.627.629,00**							**5.282.683.692,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.755.627.629,00**							**5.282.683.692,00**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**4.101.209.200,00**							**4.957.623.692,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.789.209.200,00**							**2.837.623.692,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***2.789.209.200,00***							***2.829.623.692,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %	100 %	2.789.209.200,00						100 %	2.829.623.692,00	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran, dan pelaporan yang disusun tepat waktu											-			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	4.100.000,00						3 Dokumen	6.000.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	2.200.000,00						11 Laporan	8.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.100.000,00							6.000.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	4.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Dokumen	6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.200.000,00							8.000.000,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan		11 Laporan	6 Laporan	2.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		11 Laporan	8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.200.000.000,00					-		2.159.052.492,00	
	Persentase keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah						2.200.000.000,00					-		2.159.052.492,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	2.200.000.000,00						37 Orang/bulan	2.159.052.492,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.200.000.000,00							2.159.052.492,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		37 Orang/bulan	2.159.052.492,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						74.723.900,00					-		73.737.500,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						74.723.900,00					-		73.737.500,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan		450 Laporan	450 Laporan	40.000.000,00						450 Laporan	50.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	19.250.000,00						3 Paket	15.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	15.473.900,00						6 Paket	8.737.500,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						19.250.000,00							15.000.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	19.250.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan		3 Paket	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						15.473.900,00							8.737.500,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	3 Paket	15.473.900,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		6 Paket	8.737.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.000.000,00							50.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan		450 Laporan	24 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		450 Laporan	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						23.107.500,00					-		159.097.500,00	
	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik						23.107.500,00					-		159.097.500,00	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		9 Unit	15 Unit	23.107.500,00						20 Unit	159.097.500,00	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						23.107.500,00							159.097.500,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		9 Unit	3 Unit	23.107.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		20 Unit	159.097.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						465.292.800,00					-		396.729.200,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						465.292.800,00					-		396.729.200,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	360.000,00						12 Laporan	500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	464.932.800,00						4 Laporan	396.229.200,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						360.000,00							500.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	360.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas,		12 Laporan	500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Lalabata Rilau || 0			serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						464.932.800,00							396.229.200,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	464.932.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Laporan	396.229.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16.585.000,00					-		27.007.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik						16.585.000,00					-		27.007.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.600.000,00						2 Unit	7.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	14.985.000,00						1 Unit	20.007.000,00	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						14.985.000,00							20.007.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	14.985.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Unit	20.007.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.600.000,00							7.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	1 Unit	1.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Unit	7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.500.000,00					-		22.000.000,00	
	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran, dan pelaporan yang disusun tepat waktu						9.500.000,00					-		22.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	-		-	-	3.200.000,00						-	8.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.200.000,00							8.000.000,00	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		-	8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**600.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah						***600.000.000,00***							***1.200.000.000,00***	
		1.Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	5.00 %		3.00 %	4.00 %	600.000.000,00						5.00 %	1.200.000.000,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						600.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi						600.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	169 Laporan		90 Laporan	150 Laporan	600.000.000,00						160 Laporan	1.200.000.000,00	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						600.000.000,00							1.200.000.000,00	
	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	169 Laporan		90 Laporan	103 Laporan	600.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		160 Laporan	1.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**712.000.000,00**							**920.000.000,00**	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika						***712.000.000,00***							***920.000.000,00***	
		1.Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %		100 %	100 %	712.000.000,00						100 %	920.000.000,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						712.000.000,00					-		920.000.000,00	
	Nilai Indeks SPBE						712.000.000,00					-		920.000.000,00	
		Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	650.000.000,00						-	750.000.000,00	
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	62.000.000,00						-	170.000.000,00	
2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet						650.000.000,00							750.000.000,00	
	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	34 Titik	650.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan,		-	750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0			akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						62.000.000,00							170.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	34 Titik	62.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		-	170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**1.500.000,00**							**60.000.000,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**1.500.000,00**							**60.000.000,00**	
	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan sandarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)						***1.500.000,00***							***60.000.000,00***	
		1.Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3.10 Poin		2.70 Poin	2.80 Poin	1.500.000,00						2.90 Poin	60.000.000,00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						1.500.000,00					-		60.000.000,00	
	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Kabupaten Soppeng						1.500.000,00					-		60.000.000,00	
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		100 %	100 %	1.500.000,00						100 %	60.000.000,00	
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral						1.500.000,00							60.000.000,00	
	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		100 %	100 %	1.500.000,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		100 %	60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**652.918.429,00**							**265.060.000,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**652.918.429,00**							**265.060.000,00**	
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah						***652.918.429,00***							***265.060.000,00***	
		1.Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 %		100 %	100 %	652.918.429,00						100 %	265.060.000,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						652.918.429,00					-		265.060.000,00	
	Persentase keamanan informasi Pemeritnah daerah						652.918.429,00					-		265.060.000,00	
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota,	-		-	-	628.858.429,00						-	240.060.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian													
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	24.060.000,00						-	25.000.000,00	
2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						628.858.429,00							240.060.000,00	
	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	1 Dokumen	628.858.429,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		-	240.060.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						24.060.000,00							25.000.000,00	
	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	1 Laporan	24.060.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		-	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM						**6.403.593.459,00**							**12.933.244.701,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.486.821.447,00**							**8.771.626.728,00**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**5.486.821.447,00**							**8.771.626.728,00**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.483.921.447,00**							**5.419.826.324,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***5.481.521.447,00***							***5.344.826.324,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	100 %		100 %	100 %	5.481.521.447,00						100 %	5.344.826.324,00	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.200.000,00					Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM		39.000.000,00	
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu						1.200.000,00					Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM		39.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000,00						2 Dokumen	12.000.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00						2 Dokumen	12.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000,00						4 Laporan	15.000.000,00	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						600.000,00							12.000.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	600.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						300.000,00							12.000.000,00	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						300.000,00							15.000.000,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		4 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.091.800.918,00					Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM		3.434.911.586,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.091.800.918,00					Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM		3.434.911.586,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	300.000,00						3 Dokumen	10.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	300.000,00						10 Dokumen	13.000.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000,00						4 Laporan	10.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan		42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	4.090.900.918,00						42 Orang/bulan	3.401.911.586,00	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.090.900.918,00							3.401.911.586,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan		42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	4.090.900.918,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		42 Orang/bulan	3.401.911.586,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						300.000,00							13.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		10 Dokumen	13.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						300.000,00							10.000.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						300.000,00							10.000.000,00	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		4 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						300.000,00					Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM		500.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah						300.000,00					Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM		500.000,00	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00						2 Dokumen	500.000,00	
2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						300.000,00							500.000,00	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Dokumen	500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						900.000,00					Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM		24.000.000,00	
	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah						900.000,00					Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM		24.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						600.000,00							3.000.000,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan		1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						300.000,00							1.000.000,00	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						138.821.329,00					Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM		540.614.738,00	
	Persentase keterpenuhan administrasi umum						138.821.329,00					Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM		540.614.738,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	750.000,00						1 Laporan	3.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	121.421.329,00						2 Laporan	417.614.738,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.560.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	12.000.000,00						3 Paket	90.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.090.000,00						2 Paket	20.000.000,00	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.560.000,00							10.000.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.560.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Paket	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.090.000,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.090.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Paket	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						12.000.000,00							90.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	12.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		3 Paket	90.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						750.000,00							3.000.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata ||	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		1 Laporan	3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kelurahan Lalabata Rilau || 0		korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	produktivitas dan daya saing daerah				
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						121.421.329,00							417.614.738,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	121.421.329,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Pendapatan Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Laporan	417.614.738,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.201.899.200,00					Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM		1.274.800.000,00	
	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah						1.201.899.200,00					Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM		1.274.800.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	815.000.000,00						1 Laporan	874.800.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	386.899.200,00						1 Laporan	400.000.000,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						815.000.000,00							874.800.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	815.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Laporan	874.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						386.899.200,00							400.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	386.899.200,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Laporan	400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49.000.000,00					Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM		56.000.000,00	
	Persentase barang milik daerah yang terpelihara berfungsi dengan baik						49.000.000,00					Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM		56.000.000,00	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5.000.000,00						2 Unit	10.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	9.100.000,00						16 Unit	10.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	34.900.000,00						1 Unit	36.000.000,00	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan						34.900.000,00							36.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	34.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Unit	36.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.100.000,00							10.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	9.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		16 Unit	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.000.000,00							10.000.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Unit	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**300.000,00**							**734.125.798,00**	
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi						***300.000,00***							***734.125.798,00***	
		1.Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	99%		95%	96%	300.000,00						97%	734.125.798,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						300.000,00					Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab. Soppeng		734.125.798,00	
	Persentase koperasi telah melakukan RAT yang diperiksa dan diawasi						300.000,00					Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab. Soppeng		734.125.798,00	
		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	35 Unit Usaha		31 Unit Usaha	32 Unit Usaha	300.000,00						33 Unit Usaha	734.125.798,00	
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						300.000,00							734.125.798,00	
	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	35 Unit Usaha		31 Unit Usaha	32 Unit Usaha	300.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		33 Unit Usaha	734.125.798,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**300.000,00**							**804.884.912,00**	
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi						***300.000,00***							***804.884.912,00***	
		1.Persentase Koperasi Aktif	97 %		93 %	94 %	300.000,00						95 %	804.884.912,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						300.000,00					Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab. Soppeng		804.884.912,00	
	Jumlah koperasi yang sehat						300.000,00					Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab. Soppeng		804.884.912,00	
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 Unit Usaha		50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	300.000,00						50 Unit Usaha	804.884.912,00	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						300.000,00							804.884.912,00	
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 Unit Usaha		50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	300.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		50 Unit Usaha	804.884.912,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**1.100.000,00**							**428.977.000,00**	
	Meningkatnya Produktivitas Koperasi						***1.100.000,00***							***428.977.000,00***	
		1.Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	96.92 %		90.77 %	92.31 %	1.100.000,00						93.85 %	428.977.000,00	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.100.000,00					koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten Soppeng		428.977.000,00	
	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pembiayaan, kemitraan, kelembagaan , dan usaha						1.100.000,00					koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten Soppeng		428.977.000,00	
		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	70 Unit Usaha		70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	1.100.000,00						70 Unit Usaha	428.977.000,00	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						1.100.000,00							428.977.000,00	
	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	70 Unit Usaha		70 Unit Usaha	20 Unit Usaha	1.100.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		70 Unit Usaha	428.977.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**900.000,00**							**382.030.000,00**	
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri						***900.000,00***							***382.030.000,00***	
		1.Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	3.5 %		2.5 %	2.8 %	900.000,00						3.1 %	382.030.000,00	
		2.Pertumbuhan wirausaha	22 %		10 %	13 %	900.000,00						16 %	382.030.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						900.000,00					Pelaku Usaha Mikro		382.030.000,00	
	Jumlah Usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						900.000,00					Pelaku Usaha Mikro		382.030.000,00	
		Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	-	600.000,00						-	262.030.000,00	
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	300.000,00						-	20.000.000,00	
2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM						300.000,00							20.000.000,00	
	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	200 Unit Usaha	300.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		-	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk						600.000,00							262.030.000,00	
	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	200 Unit Usaha	600.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		-	262.030.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**300.000,00**							**20.000.000,00**	
	Meningkatnya daya saing UMKM						***300.000,00***							***20.000.000,00***	
		1.Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	36 %		24 %	26 %	300.000,00						28 %	20.000.000,00	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						300.000,00					Pelaku Usaha Mikro		20.000.000,00	
	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha dengan orientasi peningkatan usaha menjadi usaha kecil						300.000,00					Pelaku Usaha Mikro		20.000.000,00	
		Jumlah Wirausaha Tematik yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	-	300.000,00						-	20.000.000,00	
2.17.08.2.01.0014	Pembinaan dan Fasilitasi Wirausaha Tematik						300.000,00							20.000.000,00	
	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Wirausaha Tematik	Jumlah Wirausaha Tematik yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	20 Orang	300.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**916.772.012,00**							**4.161.617.973,00**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**822.378.671,00**							**2.259.035.373,00**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**752.000.000,00**							**720.025.000,00**	
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi						***752.000.000,00***							***720.025.000,00***	
		1.Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	100 %		60 %	70 %	752.000.000,00						80 %	720.025.000,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						752.000.000,00					18 Unit Pasar Tradisional di Kabupaten Soppeng		720.025.000,00	
	Jumlah sarana distribusi perdagangan termanfaatkan sesuai peruntukannya						752.000.000,00					18 Unit Pasar Tradisional di Kabupaten Soppeng		720.025.000,00	
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18 Unit		18 Unit	18 Unit	752.000.000,00						18 Unit	720.025.000,00	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						752.000.000,00							720.025.000,00	
	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18 Unit		18 Unit	18 Unit	752.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		18 Unit	720.025.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**600.000,00**							**320.943.000,00**	
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting						***300.000,00***							***320.943.000,00***	
		1.Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.60 %		4.80 %	4.50 %	300.000,00						4.20 %	320.943.000,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						300.000,00					Pelaku Usaha dagang, distributor, agen dan pengecer		106.981.000,00	
	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu						300.000,00					Pelaku Usaha dagang, distributor, agen dan pengecer		106.981.000,00	
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000,00						1 Laporan	106.981.000,00	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						300.000,00							106.981.000,00	
	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	300.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna		1 Laporan	106.981.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						300.000,00					Distributor Pupuk		213.962.000,00	
	Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang terawasi						300.000,00					Distributor Pupuk		213.962.000,00	
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000,00						1 Laporan	213.962.000,00	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						300.000,00							213.962.000,00	
	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Laporan	213.962.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**1.200.000,00**							**687.374.242,00**	
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk						***1.200.000,00***							***687.374.242,00***	
		1.Persentase penanganan pengaduan konsumen	100 %		100 %	100 %	1.200.000,00						100 %	687.374.242,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						1.200.000,00					Pelaku Usaha Wajib Tera		687.374.242,00	
	Jumlah alat yang bertanda tera sah berlaku						1.200.000,00					Pelaku Usaha Wajib Tera		687.374.242,00	
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	810 Unit		770 Unit	780 Unit	900.000,00						790 Unit	343.687.242,00	
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30 Orang		30 Orang	30 Orang	300.000,00						30 Orang	343.687.000,00	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						900.000,00							343.687.242,00	
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	810 Unit		770 Unit	780 Unit	900.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		790 Unit	343.687.242,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						300.000,00							343.687.000,00	
	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30 Orang		30 Orang	30 Orang	300.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		30 Orang	343.687.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**68.578.671,00**							**530.693.131,00**	
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri						***68.578.671,00***							***530.693.131,00***	
		1.Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	80 %		60 %	65 %	68.578.671,00						70 %	530.693.131,00	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						68.578.671,00					Pelaku Usaha		530.693.131,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang terlaksana						68.578.671,00					Pelaku Usaha		530.693.131,00	
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM		10 UMKM	10 UMKM	68.578.671,00						10 UMKM	530.693.131,00	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						68.578.671,00							530.693.131,00	
	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM		10 UMKM	10 UMKM	68.578.671,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		10 UMKM	530.693.131,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**94.393.341,00**							**1.902.582.600,00**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**93.793.341,00**							**320.611.000,00**	
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri						***93.793.341,00***							***320.611.000,00***	
		1.Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	100 %		90 %	95 %	93.793.341,00						100 %	320.611.000,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						93.793.341,00					Pelaku Usaha Industri Kecil		320.611.000,00	
	Jumlah paket pelaksanaan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota						93.793.341,00					Pelaku Usaha Industri Kecil		320.611.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	93.793.341,00						1 Dokumen	320.311.000,00	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						93.793.341,00							320.311.000,00	
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	93.793.341,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		1 Dokumen	320.311.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**300.000,00**							**763.187.577,00**	
	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian						***300.000,00***							***763.187.577,00***	
		1.Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100 %		100 %	100 %	300.000,00						100 %	763.187.577,00	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						300.000,00					Pelaku Usaha Industri Kecil		763.187.577,00	
	Jumlah permohonan izin industri yang dipantau						300.000,00					Pelaku Usaha Industri Kecil		763.187.577,00	
		-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00						1 Dokumen	763.187.577,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						300.000,00							763.187.577,00	
	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		1 Dokumen	763.187.577,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**300.000,00**							**818.784.023,00**	
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri						***300.000,00***							***818.784.023,00***	
		1.Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100 %		97 %	98 %	300.000,00						99 %	818.784.023,00	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						300.000,00					Pelaku Industri Kecil		818.784.023,00	
	Jumlah informasi industri yang tersedia						300.000,00					Pelaku Industri Kecil		818.784.023,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00						4 Dokumen	818.784.023,00	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						300.000,00							818.784.023,00	
	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		4 Dokumen	818.784.023,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**4.011.178.323,00**							**13.159.828.068,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.011.178.323,00**							**12.517.941.828,00**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**60.480.000,00**							**3.711.019.037,00**	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**60.480.000,00**							**739.242.858,00**	
	Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi						***60.480.000,00***							***739.242.858,00***	
		1.Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	45 %		25 %	30 %	60.480.000,00						35 %	739.242.858,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						60.480.000,00					-		439.242.858,00	
	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						60.480.000,00					-		439.242.858,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	700 Orang		500 Orang	550 Orang	60.480.000,00						600 Orang	289.242.858,00	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						60.480.000,00							289.242.858,00	
	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	700 Orang		500 Orang	550 Orang	60.480.000,00	Kab. Soppeng	DBH Sawit	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		600 Orang	289.242.858,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**3.950.698.323,00**							**8.806.922.791,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.860.098.323,00**							**4.395.295.584,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***3.860.098.323,00***							***4.186.695.584,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %		100 %	100 %	3.860.098.323,00						100 %	4.186.695.584,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						600.000,00					-		83.900.000,00	
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu						600.000,00					-		83.900.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						600.000,00							25.000.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	600.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.056.904.723,00					-		3.170.345.584,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.056.904.723,00					-		3.170.345.584,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.056.904.723,00						37 Orang/bulan	3.158.245.584,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.056.904.723,00							3.158.245.584,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.056.904.723,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		37 Orang/bulan	3.158.245.584,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						56.400.000,00					-		407.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						56.400.000,00					-		407.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204 Laporan		204 Laporan	204 Laporan	30.000.000,00						204 Laporan	205.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	15.000.000,00						3 Paket	35.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.032.350,00						4 Paket	100.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.367.650,00						4 Paket	35.000.000,00	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							35.000.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	15.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.367.650,00							35.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	1.367.650,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Paket	35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.032.350,00							100.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	10.032.350,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Paket	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							205.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204 Laporan		204 Laporan	204 Laporan	30.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		204 Laporan	205.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						614.593.600,00					-		405.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						614.593.600,00					-		405.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	182.500.000,00						12 Laporan	250.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	432.093.600,00						12 Laporan	150.000.000,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						182.500.000,00							250.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	182.500.000,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						432.093.600,00							150.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	432.093.600,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131.600.000,00					-		170.000.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik						131.600.000,00					-		170.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	131.600.000,00						1 Unit	135.000.000,00	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						131.600.000,00							135.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	131.600.000,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Unit	135.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**90.600.000,00**							**831.419.579,00**	
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko						***90.600.000,00***							***831.419.579,00***	
		1.Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100 %		100 %	100 %	90.600.000,00						100 %	831.419.579,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						90.600.000,00					-		831.419.579,00	
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						90.600.000,00					-		831.419.579,00	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan	1600 Pelaku Usaha		1500 Pelaku Usaha	1520 Pelaku Usaha	90.600.000,00						1540 Pelaku Usaha	400.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						90.600.000,00							400.000.000,00	
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1600 Pelaku Usaha		1500 Pelaku Usaha	1520 Pelaku Usaha	90.600.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		1540 Pelaku Usaha	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						**4.502.077.919,00**							**14.857.542.830,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**450.000.000,00**							**4.274.372.947,00**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**450.000.000,00**							**4.274.372.947,00**	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**400.000.000,00**							**1.742.443.160,00**	
	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga						***400.000.000,00***							***1.477.443.160,00***	
		1.Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	1%		1%	1%	400.000.000,00						1%	1.477.443.160,00	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						61.750.000,00					-		462.000.000,00	
	Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina						61.750.000,00					-		462.000.000,00	
		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit		6 Unit	7 Unit	61.750.000,00						8 Unit	90.000.000,00	
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan						61.750.000,00							90.000.000,00	
	Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit		6 Unit	7 Unit	61.750.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		8 Unit	90.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00					-		390.857.327,00	
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga						5.000.000,00					-		390.857.327,00	
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	5.000.000,00						-	290.857.327,00	
2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						5.000.000,00							290.857.327,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	290.857.327,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						169.250.000,00					-		484.585.833,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						169.250.000,00					-		484.585.833,00	
		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	88.600.000,00						-	349.585.833,00	
		Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	80.650.000,00						-	135.000.000,00	
2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						80.650.000,00							135.000.000,00	
	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	350 Orang	80.650.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	135.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota						88.600.000,00							349.585.833,00	
	Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	3 Kegiatan	88.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	349.585.833,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						164.000.000,00					-		340.000.000,00	
	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Yang Dibina						164.000.000,00					-		340.000.000,00	
		Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	-	64.000.000,00						-	75.000.000,00	
2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						64.000.000,00							75.000.000,00	
	Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	100 Orang	64.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	75.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03.0015	Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	
	Terlaksananya Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	650 Orang	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**50.000.000,00**							**656.813.290,00**	
	Meningkatnya kualitas kepramukaan						***50.000.000,00***							***506.813.290,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	20.10 %		18.50 %	18.50 %	50.000.000,00						20.10 %	506.813.290,00	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						50.000.000,00					-		656.813.290,00	
	Jumlah Organisasi Kepramukaan Yang Dibina						50.000.000,00					-		656.813.290,00	
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	420 Organisasi		393 Organisasi	400 Organisasi	50.000.000,00						410 Organisasi	103.513.352,00	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah						50.000.000,00							103.513.352,00	
	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	420 Organisasi		393 Organisasi	400 Organisasi	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		410 Organisasi	103.513.352,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.052.077.919,00**							**10.583.169.883,00**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**4.052.077.919,00**							**10.583.169.883,00**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.052.077.919,00**							**4.446.378.770,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***4.052.077.919,00***							***3.686.378.770,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	100 %		100 %	100 %	4.052.077.919,00						100 %	3.686.378.770,00	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.000.000,00					-		438.092.539,00	
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu						6.000.000,00					-		438.092.539,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	6.000.000,00						9 Laporan	209.228.720,00	
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.000.000,00							209.228.720,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		9 Laporan	209.228.720,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.205.549.119,00					-		2.285.286.231,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.205.549.119,00					-		2.285.286.231,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.205.549.119,00						40 Orang/bulan	2.188.286.231,00	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.205.549.119,00							2.188.286.231,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.205.549.119,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga		40 Orang/bulan	2.188.286.231,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Lalabata Rilau || 0			keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.000.000,00					-		340.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.000.000,00					-		340.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	29.989.200,00						2 Laporan	145.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.951.400,00						2 Paket	50.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.059.400,00						2 Paket	20.000.000,00	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.059.400,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.059.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.951.400,00							50.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.951.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						29.989.200,00							145.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	29.989.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	145.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						779.928.800,00					-		150.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						779.928.800,00					-		150.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	699.928.800,00						2 Laporan	50.000.000,00	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						80.000.000,00							100.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						699.928.800,00							50.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	699.928.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21.600.000,00					-		215.000.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik						21.600.000,00					-		215.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	21.600.000,00						1 Unit	20.000.000,00	
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						21.600.000,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	21.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Unit	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**4.267.052.092,00**							**6.552.041.101,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.267.052.092,00**							**6.552.041.101,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**4.267.052.092,00**							**4.957.010.744,00**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.703.950.744,00**							**3.924.383.161,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***3.703.950.744,00***							***3.900.383.161,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 %		100 %	100 %	3.703.950.744,00						100 %	3.900.383.161,00	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.449.391.292,00					PNS / ASN Dinas Perpustrakaan dan Kearsipan		3.139.933.161,00	
	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan perangkat daerah						3.449.391.292,00					PNS / ASN Dinas Perpustrakaan dan Kearsipan		3.139.933.161,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.449.391.292,00						32 Orang/bulan	3.122.933.161,00	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.449.391.292,00							3.122.933.161,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.449.391.292,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lemba || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		32 Orang/bulan	3.122.933.161,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						210.570.800,00					PNS / ASN dan P3K PW Dinas Perpustrakaan dan Kearsipan		282.000.000,00	
	Persentase keterpenuhan jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah						210.570.800,00					PNS / ASN dan P3K PW Dinas Perpustrakaan dan Kearsipan		282.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.010.000,00						12 Laporan	95.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	140.560.800,00						12 Laporan	187.000.000,00	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						70.010.000,00							95.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.010.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lemba || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						140.560.800,00							187.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	140.560.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lemba || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	187.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43.988.652,00					PNS / ASN dan P3K PW Dinas Perpustrakaan dan Kearsipan		71.700.000,00	
	Persentase barang milik daerah yang terpelihara baik						43.988.652,00					PNS / ASN dan P3K PW Dinas Perpustrakaan dan Kearsipan		71.700.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	5 Unit		5 Unit	5 Unit	24.132.492,00						5 Unit	27.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	19.856.160,00						1 Unit	35.000.000,00	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						19.856.160,00							35.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	19.856.160,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lemba || 0	Pendapatan Bagi Hasil Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Unit	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						24.132.492,00							27.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	24.132.492,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lemba || 0	Pendapatan Bagi Hasil Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5 Unit	27.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**563.101.348,00**							**990.627.583,00**	
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan						***563.101.348,00***							***905.627.583,00***	
		999.Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	80 Nilai		75 Nilai	76.5 Nilai	563.101.348,00						77.5 Nilai	905.627.583,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						563.101.348,00					Perpustakaan Desa / Kelurahan		346.750.000,00	
	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun						563.101.348,00					Perpustakaan Desa / Kelurahan		346.750.000,00	
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	25 Perpustakaan		15 Perpustakaan	18 Perpustakaan	563.101.348,00						20 Perpustakaan	35.000.000,00	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						563.101.348,00							35.000.000,00	
	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	25 Perpustakaan		15 Perpustakaan	18 Perpustakaan	563.101.348,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		20 Perpustakaan	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN						**4.694.855.123,00**							**11.888.556.299,00**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.694.855.123,00**							**11.888.556.299,00**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**4.681.605.123,00**							**6.425.932.034,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.637.355.123,00**							**5.236.332.787,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***4.636.905.123,00***							***5.207.332.787,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	100 %		100 %	100 %	4.636.905.123,00						100 %	5.207.332.787,00	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						827.000,00					Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan		19.200.000,00	
	Persentase Dokumen Perencanaan, Persentase Dokumen Penganggaran, Persentase Dokumen Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu						827.000,00					Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan		19.200.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	497.000,00						2 Dokumen	5.400.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000,00						2 Dokumen	6.800.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	180.000,00						27 Laporan	7.000.000,00	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						497.000,00							5.400.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	497.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Dokumen	5.400.000,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						150.000,00							6.800.000,00	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Dokumen	6.800.000,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						180.000,00							7.000.000,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	180.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		27 Laporan	7.000.000,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.994.946.723,00					Dinas Peternakan, Kesehatan		4.561.937.030,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												Hewan dan Perikanan			
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan						3.994.946.723,00					Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan		4.561.937.030,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan		42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	3.994.946.723,00						42 Orang/bulan	4.561.937.030,00	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.994.946.723,00							4.561.937.030,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan		42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	3.994.946.723,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		42 Orang/bulan	4.561.937.030,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						38.723.000,00					Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan		232.195.757,00	
	Persentase keterpenuhan administrasi umum						38.723.000,00					Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan		232.195.757,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan		173 Laporan	175 Laporan	30.000.000,00						177 Laporan	198.795.757,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	7.256.000,00						5 Paket	22.700.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.467.000,00						1 Paket	10.700.000,00	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.467.000,00							10.700.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.467.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Paket	10.700.000,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						7.256.000,00							22.700.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	7.256.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5 Paket	22.700.000,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							198.795.757,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan		173 Laporan	42 Laporan	30.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		177 Laporan	198.795.757,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.000,00					Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan		100.000.000,00	
	Persentase gedung, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik						150.000,00					Dinas Peternakan, Kesehatan		100.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												Hewan dan Perikanan			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	150.000,00						6 Unit	100.000.000,00	
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000,00							100.000.000,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	150.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		6 Unit	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						570.158.400,00					Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan		215.000.000,00	
	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						570.158.400,00					Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan		215.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	73.200.000,00						12 Laporan	105.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	496.958.400,00						12 Laporan	110.000.000,00	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						73.200.000,00							105.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	73.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Kaca || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Limpomajang || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Jennae || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Donri Donri ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	105.000.000,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Desa Lalabatariaja || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Citta || Desa Citta || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Ompo || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau |							
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						496.958.400,00							110.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	496.958.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	110.000.000,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						32.550.000,00					Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan		108.000.000,00	
	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik						32.550.000,00					Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan		108.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit		39 Unit	39 Unit	14.850.750,00						39 Unit	29.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17.399.250,00						1 Unit	24.700.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	150.000,00						35 Unit	25.300.000,00	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						17.399.250,00							24.700.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17.399.250,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Unit	24.700.000,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						14.850.750,00							29.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit		39 Unit	39 Unit	14.850.750,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata ||	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		39 Unit	29.000.000,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kelurahan Lalabata Rilau		korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	produktivitas dan daya saing daerah				
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000,00							25.300.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	150.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		35 Unit	25.300.000,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000,00							29.000.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	150.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Ompo || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Desa Congko || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Jennae || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Donri Donri || Desa Lalabatariaja || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Limpomajang || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Citta || Desa Citta || 1 || Provinsi	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		-	29.000.000,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Kaca							
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**300.000,00**							**571.424.061,00**	
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap						***150.000,00***							***571.424.061,00***	
		1.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3466.41 Ton		3202.43 Ton	3266.48 Ton	150.000,00						3331.81 Ton	571.424.061,00	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						150.000,00					Kelompok Nelayan		510.000.000,00	
	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan di dalam daerah kabupaten/ kota yang dikelola						150.000,00					Kelompok Nelayan		510.000.000,00	
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	2 Unit		2 Unit	2 Unit	150.000,00						2 Unit	510.000.000,00	
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						150.000,00							510.000.000,00	
	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	2 Unit		2 Unit	2 Unit	150.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		2 Unit	510.000.000,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						150.000,00					Kelompok Nelayan		61.424.061,00	
	Persetase tempat pelelangan ikan yang operasional						150.000,00					Kelompok Nelayan		61.424.061,00	
		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 Layanan		2 Layanan	3 Layanan	150.000,00						5 Layanan	61.424.061,00	
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						150.000,00							61.424.061,00	
	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	150.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Kaca || 0 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Limpomajang	Opsen PKB	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		5 Layanan	61.424.061,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**40.950.000,00**							**426.711.150,00**	
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya						***40.950.000,00***							***426.711.150,00***	
		1.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	503.9 Ton		460.9 Ton	470.1 Ton	40.950.000,00						484.10 Ton	426.711.150,00	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						150.000,00					Kelompok Pembudidaya		105.711.150,00	
	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Diberdayakan						150.000,00					Kelompok Pembudidaya		105.711.150,00	
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	15 Kelompok		7 Kelompok	9 Kelompok	150.000,00						9 Kelompok	105.711.150,00	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						150.000,00							105.711.150,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	15 Kelompok		7 Kelompok	9 Kelompok	150.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		9 Kelompok	105.711.150,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						40.800.000,00					Kelompok Pembudidaya		321.000.000,00	
	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						40.800.000,00					Kelompok Pembudidaya		321.000.000,00	
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit		3 Unit	3 Unit	40.800.000,00						3 Unit	321.000.000,00	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						40.800.000,00							321.000.000,00	
	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit		3 Unit	3 Unit	40.800.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		3 Unit	321.000.000,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**3.000.000,00**							**191.464.036,00**	
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat						***3.000.000,00***							***191.464.036,00***	
		1.Angka Konsumsi Ikan	70.73 Kg/KAP/TH		61.13 Kg/KAP/TH	62.96 Kg/KAP/TH	3.000.000,00						66.72 Kg/KAP/TH	191.464.036,00	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						3.000.000,00					Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		191.464.036,00	
	Jumlah Pelaku Usaha Skala Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						3.000.000,00					Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		191.464.036,00	
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	38 Unit Usaha		35 Unit Usaha	37 Unit Usaha	3.000.000,00						37 Unit Usaha	191.464.036,00	
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						3.000.000,00							191.464.036,00	
	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	38 Unit Usaha		35 Unit Usaha	37 Unit Usaha	3.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		37 Unit Usaha	191.464.036,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**13.250.000,00**							**5.462.624.265,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**9.356.000,00**							**800.407.204,00**	
	Meningkatnya Populasi Ternak (Peternakan)						***9.356.000,00***							***800.407.204,00***	
		1.Persentase peningkatan populasi ternak	4.91 %		3.74 %	4.14 %	9.356.000,00						4.43 %	800.407.204,00	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman						9.200.000,00					Peternak/ Kelompok Ternak		294.500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	Jumlah Luas Lahan HPT						9.200.000,00					Peternak/ Kelompok Ternak		294.500.000,00	
		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.200.000,00						12 Laporan	294.500.000,00	
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak						9.200.000,00							294.500.000,00	
	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.200.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		12 Laporan	294.500.000,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						156.000,00					Peternak/ Kelompok Ternak		505.907.204,00	
	Jumlah Kelahiran Ternak Sapi Hasil IB						156.000,00					Peternak/ Kelompok Ternak		505.907.204,00	
		Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	156.000,00						12 Laporan	505.907.204,00	
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						156.000,00							505.907.204,00	
	Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	156.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		12 Laporan	505.907.204,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**300.000,00**							**3.320.624.094,00**	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (DPKHP)						***300.000,00***							***3.320.624.094,00***	
		1.Persentase distribusi dan kualitas prasarana pertanian (Peternakan)	83 %		50 %	58 %	300.000,00						67 %	3.320.624.094,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						300.000,00					Kelompok Ternak		3.320.624.094,00	
	Cakupan Prasarana Peternakan yang Dibangun dan Berfungsi dengan Baik						300.000,00					Kelompok Ternak		3.320.624.094,00	
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.000,00						2 Unit	3.320.624.094,00	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						300.000,00							3.320.624.094,00	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	300.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		2 Unit	3.320.624.094,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**3.594.000,00**							**1.341.592.967,00**	
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner						***3.594.000,00***							***1.341.592.967,00***	
		1.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	6.5 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	3.594.000,00						5.5 Dokumen	1.341.592.967,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	6.7 %		6.7 %	6.7 %	3.594.000,00						6.7 %	1.341.592.967,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						3.594.000,00					Peternak, Kelompok Ternak, dan Masyarakat Sekitar		1.341.592.967,00	
	Jumlah Hewan, Ternak yang Mendapatkan Pelayanan Keswan dan Kesmavet						3.594.000,00					Peternak, Kelompok Ternak, dan Masyarakat Sekitar		1.341.592.967,00	
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	3.594.000,00						13 Laporan	1.341.592.967,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.594.000,00							1.341.592.967,00	
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	3.594.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		13 Laporan	1.341.592.967,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
	Bagian Pemerintahan						**38.000.000,00**							**1.210.732.183,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**38.000.000,00**							**1.210.732.183,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**38.000.000,00**							**1.210.732.183,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.948.964.228,00**							**22.945.470.660,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***19.975.000,00***							***168.876.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %		100 %	100 %	19.975.000,00						100 %	168.876.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.117.175.000,00						2 Laporan	1.109.280.153,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	88.972.200,00						5 Paket	488.801.250,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.505.000,00						2 Paket	78.480.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						705.000,00							10.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	705.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	10.000.000,00	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						4.770.000,00							12.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	4.770.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang		5 Paket	12.000.000,00	Bagian Pemerintahan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.000.000,00							121.876.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	121.876.000,00	Bagian Pemerintahan
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.729.510.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.847.640.000,00	
	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.729.510.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.847.640.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.582.310.800,00						2 Laporan	1.847.640.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.500.000,00							25.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	25.000.000,00	Bagian Pemerintahan
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**1.332.439.800,00**							**2.616.571.783,00**	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah						***12.025.000,00***							***1.041.856.183,00***	
		1.Efektivitas Kerja Sama Daerah	100%		100%	100%	12.025.000,00						100%	1.041.856.183,00	
		2.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%		100%	100%	12.025.000,00						100%	1.041.856.183,00	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						8.025.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		631.853.358,00	
	Jumlah Rumusan Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan yang disusun						8.025.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		631.853.358,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.025.000,00						4 Dokumen	162.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	259.853.358,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00						2 Dokumen	210.000.000,00	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						1.000.000,00							259.853.358,00	
	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		1 Dokumen	259.853.358,00	Bagian Pemerintahan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	produktivitas dan daya saing daerah				
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						1.000.000,00							210.000.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Dokumen	210.000.000,00	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						6.025.000,00							162.000.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	6.025.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		4 Dokumen	162.000.000,00	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						10.000.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		410.002.825,00	
	Jumlah Rumusan Kebijakan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang disusun						10.000.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		410.002.825,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	5.000.000,00						30 Dokumen	210.002.825,00	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	5.000.000,00						30 Laporan	200.000.000,00	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						5.000.000,00							210.002.825,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		30 Dokumen	210.002.825,00	Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						5.000.000,00							200.000.000,00	
	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	5.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		30 Laporan	200.000.000,00	Bagian Pemerintahan
	Bagian Hukum						**194.912.060,00**							**965.779.578,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**194.912.060,00**							**965.779.578,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**194.912.060,00**							**965.779.578,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.948.964.228,00**							**22.945.470.660,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***54.497.260,00***							***157.104.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %		100 %	100 %	54.497.260,00						100 %	157.104.000,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						41.912.060,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		121.391.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						41.912.060,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		121.391.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	700 Orang		700 Orang	700 Orang	39.912.060,00						700 Orang	56.000.000,00	
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						39.912.060,00							56.000.000,00	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	700 Orang		700 Orang	700 Orang	39.912.060,00	Kab. Soppeng	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		700 Orang	56.000.000,00	Bagian Hukum
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.117.175.000,00						2 Laporan	1.109.280.153,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	88.972.200,00						5 Paket	488.801.250,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						4.210.200,00							31.104.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	4.210.200,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		5 Paket	31.104.000,00	Bagian Hukum
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.375.000,00							70.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	10.375.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	70.000.000,00	Bagian Hukum
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**1.332.439.800,00**							**2.616.571.783,00**	
	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan						***140.414.800,00***							***808.675.578,00***	
		1.Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100%		100%	100%	140.414.800,00						100%	808.675.578,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						140.414.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		808.675.578,00	
	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terfasilitasi Sesuai Standar						140.414.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		808.675.578,00	
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus		2 Kasus	2 Kasus	124.600.000,00						2 Kasus	305.000.000,00	
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	15.600.000,00						7 Dokumen	248.675.578,00	
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	487 Dokumen		435 Dokumen	450 Dokumen	214.800,00						465 Dokumen	255.000.000,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						15.600.000,00							248.675.578,00	
	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	15.600.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		7 Dokumen	248.675.578,00	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						124.600.000,00							305.000.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus		2 Kasus	2 Kasus	124.600.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Opsen PKB	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Kasus	305.000.000,00	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						214.800,00							255.000.000,00	
	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	487 Dokumen		435 Dokumen	450 Dokumen	214.800,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		465 Dokumen	255.000.000,00	Bagian Hukum
	Bagian Organisasi						**42.000.000,00**							**600.289.800,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**42.000.000,00**							**600.289.800,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**42.000.000,00**							**600.289.800,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.948.964.228,00**							**22.945.470.660,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***29.000.000,00***							***600.289.800,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %		100 %	100 %	29.000.000,00						100 %	600.289.800,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.117.175.000,00						2 Laporan	1.109.280.153,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	88.972.200,00						5 Paket	488.801.250,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.000.000,00							17.482.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		5 Paket	17.482.000,00	Bagian Organisasi
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.000.000,00							84.910.720,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	84.910.720,00	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						25.000.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		497.897.080,00	
	Persentase keterpenuhan rumusan Kebijakan Penataan Organisasi						25.000.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		497.897.080,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00						1 Dokumen	31.270.280,00	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000,00						2 Dokumen	59.839.000,00	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00						1 Dokumen	32.990.400,00	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.500.000,00						4 Laporan	373.797.400,00	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						6.500.000,00							59.839.000,00	
	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	59.839.000,00	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						6.500.000,00							373.797.400,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Laporan	373.797.400,00	Bagian Organisasi

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						6.500.000,00							32.990.400,00	
	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	32.990.400,00	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						5.500.000,00							31.270.280,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	31.270.280,00	Bagian Organisasi
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam						**89.868.090,00**							**722.091.000,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**89.868.090,00**							**722.091.000,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**89.868.090,00**							**722.091.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.948.964.228,00**							**22.945.470.660,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***15.000.000,00***							***115.091.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %		100 %	100 %	15.000.000,00						100 %	115.091.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.117.175.000,00						2 Laporan	1.109.280.153,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	88.972.200,00						5 Paket	488.801.250,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						3.000.000,00							44.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	3.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		5 Paket	44.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.000.000,00							60.091.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik		2 Laporan	60.091.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.729.510.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.847.640.000,00	
	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.729.510.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.847.640.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.582.310.800,00						2 Laporan	1.847.640.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							11.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	11.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**105.718.090,00**							**1.821.640.038,00**	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan						***74.868.090,00***							***607.000.000,00***	
		1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100%		100%	100%	74.868.090,00						100%	607.000.000,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						15.000.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		292.000.000,00	
	Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang disusun						15.000.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		292.000.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	292.000.000,00	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						15.000.000,00							292.000.000,00	
	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	292.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						59.868.090,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		315.000.000,00	
	Persentase Kegiatan Strategi Daerah yang memiliki SOP/Juknis						59.868.090,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		315.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.868.090,00						1 Dokumen	315.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						59.868.090,00							315.000.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.868.090,00	Kab. Soppeng	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	315.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa						**42.000.000,00**							**817.222.351,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**42.000.000,00**							**817.222.351,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**42.000.000,00**							**817.222.351,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.948.964.228,00**							**22.945.470.660,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***22.000.000,00***							***172.809.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %		100 %	100 %	22.000.000,00						100 %	172.809.000,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						41.912.060,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		121.391.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						41.912.060,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		121.391.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang		17 Orang	17 Orang	2.000.000,00						17 Orang	65.391.000,00	
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						2.000.000,00							65.391.000,00	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang		17 Orang	3 Orang	2.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		17 Orang	65.391.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.117.175.000,00						2 Laporan	1.109.280.153,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	88.972.200,00						5 Paket	488.801.250,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.000.000,00							30.559.200,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	6.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan		5 Paket	30.559.200,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											ketahanan daerah terhadap bencana				
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						9.000.000,00							49.543.800,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	49.543.800,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.729.510.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.847.640.000,00	
	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.729.510.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.847.640.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.582.310.800,00						2 Laporan	1.847.640.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							27.315.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	27.315.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**105.718.090,00**							**1.821.640.038,00**	
	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa						***20.000.000,00***							***644.413.351,00***	
		1.Tingkat Kematangan UKPBJ	3 LEVEL		3 LEVEL	3 LEVEL	20.000.000,00						3 LEVEL	644.413.351,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						20.000.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		644.413.351,00	
	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa						20.000.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		644.413.351,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.750.000,00						2 Dokumen	152.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	300 Dokumen		300 Dokumen	300 Dokumen	5.600.000,00						300 Dokumen	61.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang		200 Orang	200 Orang	7.650.000,00						200 Orang	431.413.351,00	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						5.600.000,00							61.000.000,00	
	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	300 Dokumen		300 Dokumen	300 Dokumen	5.600.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		300 Dokumen	61.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						6.750.000,00							152.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.750.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	152.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						7.650.000,00							431.413.351,00	
	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang		200 Orang	200 Orang	7.650.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		200 Orang	431.413.351,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Bagian Kesejahteraan Rakyat						**1.206.000.000,00**							**908.399.022,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.206.000.000,00**							**908.399.022,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.206.000.000,00**							**908.399.022,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.948.964.228,00**							**22.945.470.660,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***32.000.000,00***							***142.359.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %		100 %	100 %	32.000.000,00						100 %	142.359.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.117.175.000,00						2 Laporan	1.109.280.153,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	88.972.200,00						5 Paket	488.801.250,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.505.000,00						2 Paket	78.480.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.600.000,00							15.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	3.600.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	15.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.600.000,00							25.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	6.600.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas,		5 Paket	25.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										judi, dan penyeludupan.	serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.000.000,00							58.859.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	58.859.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.729.510.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.847.640.000,00	
	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.729.510.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.847.640.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.582.310.800,00						2 Laporan	1.847.640.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						9.800.000,00							43.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	9.800.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	43.500.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**1.332.439.800,00**							**2.616.571.783,00**	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan kesejahteraan rakyat						***1.174.000.000,00***							***766.040.022,00***	
		1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%		100%	100%	1.174.000.000,00						100%	766.040.022,00	
		Indeks Pengelolaan Zakat Daerah	0,59		0,51	0,53							0,55		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						1.174.000.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng, Masyarakat		766.040.022,00	
	Jumlah Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang disusun						1.174.000.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng, Masyarakat		766.040.022,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	502.950.000,00						12 Dokumen	676.040.022,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	750.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	670.300.000,00						2 Dokumen	60.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB													
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						502.950.000,00							676.040.022,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	502.950.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Dokumen	676.040.022,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						670.300.000,00							60.000.000,00	
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	670.300.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Dokumen	60.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						750.000,00							30.000.000,00	
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		3 Dokumen	30.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Bagian Umum dan Protokol						**9.619.531.528,00**							**10.832.459.437,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.619.531.528,00**							**10.832.459.437,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**9.619.531.528,00**							**10.832.459.437,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.948.964.228,00**							**22.945.470.660,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***9.614.531.528,00***							***10.452.459.437,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %		100 %	100 %	9.614.531.528,00						100 %	10.452.459.437,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.380.000.000,00						2 Laporan	850.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.117.175.000,00						2 Laporan	1.109.280.153,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.700.000,00						2 Paket	23.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	88.972.200,00						5 Paket	488.801.250,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.505.000,00						2 Paket	78.480.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.850.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.850.000,00							150.000.000,00	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.850.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Paket	150.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.700.000,00							23.000.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	2.700.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	23.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.200.000,00							53.480.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	1.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	53.480.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						38.800.000,00							207.307.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	38.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		5 Paket	207.307.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.380.000.000,00							850.000.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.380.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan		2 Laporan	850.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											ketahanan daerah terhadap bencana				
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						919.800.000,00							248.172.437,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	919.800.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	248.172.437,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.500.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		196.500.000,00	
	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik						7.500.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		196.500.000,00	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit		20 Unit	18 Unit	4.500.000,00						14 Unit	146.500.000,00	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						3.000.000,00							50.000.000,00	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Unit	50.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.500.000,00							146.500.000,00	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit		20 Unit	1 Unit	4.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		14 Unit	146.500.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.729.510.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.847.640.000,00	
	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.729.510.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.847.640.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.147.200.000,00						1 Laporan	1.000.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.582.310.800,00						2 Laporan	1.847.640.000,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.147.200.000,00							1.000.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	1.147.200.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik		1 Laporan	1.000.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.488.000.000,00							1.700.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.488.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	1.700.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						886.350.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		1.230.000.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik						886.350.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		1.230.000.000,00	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	5.000.000,00						5 Unit	200.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit		65 Unit	65 Unit	733.000.000,00						65 Unit	700.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	142.900.000,00						9 Unit	200.000.000,00	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	300 Unit		125 Unit	300 Unit	2.400.000,00						300 Unit	30.000.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		100 Unit	120 Unit	3.050.000,00						100 Unit	100.000.000,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						142.900.000,00							200.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	3 Unit	142.900.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		9 Unit	200.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						733.000.000,00							700.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit		65 Unit	65 Unit	733.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		65 Unit	700.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.400.000,00							30.000.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	300 Unit		125 Unit	30 Unit	2.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		300 Unit	30.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.050.000,00							100.000.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		100 Unit	5 Unit	3.050.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		100 Unit	100.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.000.000,00							200.000.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		5 Unit	200.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.244.031.528,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		1.450.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terlaksana Tepat Waktu						1.244.031.528,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		1.450.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600.000.000,00						2 Orang/Bulan	800.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	635.531.528,00						2 Orang/Bulan	500.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang	2 Orang	5.000.000,00						2 Orang	50.000.000,00	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.500.000,00						2 Paket	100.000.000,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						635.531.528,00							500.000.000,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	635.531.528,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas,		2 Orang/Bulan	500.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Lalabata Rilau || 0		judi, dan penyeludupan.	serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						3.500.000,00							100.000.000,00	
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	3.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	100.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						5.000.000,00							50.000.000,00	
	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Orang	50.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						600.000.000,00							800.000.000,00	
	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Orang/Bulan	800.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						1.101.100.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		1.080.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Fasilitasi Kerumahtanggaan sekretariat Daerah yang Dilaksanakan						1.101.100.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		1.080.000.000,00	
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	649.965.000,00						3 Paket	600.000.000,00	
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.100.000,00						2 Paket	30.000.000,00	
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	450.035.000,00						3 Paket	450.000.000,00	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						649.965.000,00							600.000.000,00	
	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	649.965.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik		3 Paket	600.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kelurahan Botto || 0		korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						450.035.000,00							450.000.000,00	
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	450.035.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	450.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						1.100.000,00							30.000.000,00	
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	1.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	30.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						400.000.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.644.000.000,00	
	persentase Acara Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Difasilitasi						400.000.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.644.000.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	400.000.000,00						2 Laporan	2.644.000.000,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						400.000.000,00							2.644.000.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	400.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	2.644.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
	Bagian Perencanaan dan Keuangan						**11.126.810.440,00**							**10.658.940.423,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.126.810.440,00**							**10.658.940.423,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**11.126.810.440,00**							**10.658.940.423,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.948.964.228,00**							**22.945.470.660,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***11.126.810.440,00***							***10.658.940.423,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %		100 %	100 %	11.126.810.440,00						100 %	10.658.940.423,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.100.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		85.476.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu						10.100.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		85.476.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.450.000,00						2 Dokumen	10.182.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.050.000,00						2 Dokumen	18.877.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.750.000,00						2 Dokumen	15.127.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	1.850.000,00						27 Laporan	41.290.000,00	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.450.000,00							10.182.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.450.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	10.182.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.750.000,00							15.127.000,00	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.750.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	15.127.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.050.000,00							18.877.000,00	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.050.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	18.877.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.850.000,00							41.290.000,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	4 Laporan	1.850.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan		27 Laporan	41.290.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.906.257.640,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng, Masyarakat		10.093.005.177,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan						9.906.257.640,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng, Masyarakat		10.093.005.177,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	4.058.000,00						3 Dokumen	21.844.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	4.250.000,00						10 Dokumen	29.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan		104 Orang/bulan	104 Orang/bulan	9.897.949.640,00						104 Orang/bulan	10.042.161.177,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.897.949.640,00							10.042.161.177,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan		104 Orang/bulan	104 Orang/bulan	9.897.949.640,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		104 Orang/bulan	10.042.161.177,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						4.250.000,00							29.000.000,00	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	4.250.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		10 Dokumen	29.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						4.058.000,00							21.844.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	4.058.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Dokumen	21.844.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.117.175.000,00						2 Laporan	1.109.280.153,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	88.972.200,00						5 Paket	488.801.250,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						17.592.000,00							109.349.050,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	17.592.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		5 Paket	109.349.050,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						130.000.000,00							343.785.196,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	130.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	343.785.196,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.729.510.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.847.640.000,00	
	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.729.510.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.847.640.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.582.310.800,00						2 Laporan	1.847.640.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.062.860.800,00							27.325.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.062.860.800,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	27.325.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Bagian Administrasi Pembangunan						**28.000.000,00**							**667.768.687,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**28.000.000,00**							**667.768.687,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**28.000.000,00**							**667.768.687,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.948.964.228,00**							**22.945.470.660,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***17.150.000,00***							***97.542.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %		100 %	100 %	17.150.000,00						100 %	97.542.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						2.597.202.200,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.699.561.403,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.117.175.000,00						2 Laporan	1.109.280.153,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	88.972.200,00						5 Paket	488.801.250,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						3.000.000,00							12.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	3.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		5 Paket	12.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.000.000,00							72.042.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	72.042.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.729.510.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.847.640.000,00	
	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.729.510.800,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		2.847.640.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.582.310.800,00						2 Laporan	1.847.640.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						9.150.000,00							13.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	9.150.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	13.500.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**105.718.090,00**							**1.821.640.038,00**	
	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan						***10.850.000,00***							***570.226.687,00***	
		1.Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%		100%	100%	10.850.000,00						100%	570.226.687,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						10.850.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		570.226.687,00	
	Jumlah Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang disusun						10.850.000,00					Pemerintah Kabupaten Soppeng		570.226.687,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	850.000,00						2 Dokumen	180.000.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00						3 Laporan	390.226.687,00	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						850.000,00							180.000.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	850.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan,		2 Dokumen	180.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						10.000.000,00							390.226.687,00	
	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Laporan	390.226.687,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	SEKRETARIAT DPRD						**21.998.780.399,00**							**37.656.057.544,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**21.998.780.399,00**							**37.656.057.544,00**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**21.998.780.399,00**							**37.656.057.544,00**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.878.780.399,00**							**27.768.735.043,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***19.878.780.399,00***							***26.116.735.043,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat DPRD	100 %		100 %	100 %	19.878.780.399,00						100 %	26.116.735.043,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.952.066.599,00					-		3.368.150.043,00	
	Keterpenuhan Administrasi Keuangan						2.952.066.599,00					-		3.368.150.043,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan		33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.952.066.599,00						33 Orang/bulan	3.081.350.043,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.952.066.599,00							3.081.350.043,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan		33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.952.066.599,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		33 Orang/bulan	3.081.350.043,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.352.124.000,00					-		2.664.650.000,00	
	Keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						1.352.124.000,00					-		2.664.650.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	508.500.000,00						12 Laporan	682.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	843.624.000,00						12 Laporan	1.982.650.000,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						508.500.000,00							682.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	508.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan		12 Laporan	682.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						843.624.000,00							1.982.650.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	843.624.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	1.982.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						15.574.589.800,00					-		12.400.000.000,00	
	Anggota DPRD Yang Terlayani Administrasi Keuangan dan Kesejahteraannya						15.574.589.800,00					-		12.400.000.000,00	
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan		30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	15.314.489.800,00						30 Orang/Bulan	12.000.000.000,00	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	260.100.000,00						30 Paket	350.000.000,00	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						15.314.489.800,00							12.000.000.000,00	
	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan		30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	15.314.489.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		30 Orang/Bulan	12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						260.100.000,00							350.000.000,00	
	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	260.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		30 Paket	350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**2.120.000.000,00**							**9.887.322.501,00**	
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan						***840.000.000,00***							***2.858.563.416,00***	
		1.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %		100 %	100 %	840.000.000,00						100 %	2.858.563.416,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						840.000.000,00					-		2.837.813.416,00	
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang Difasilitasi						840.000.000,00					-		2.837.813.416,00	
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	840.000.000,00						3 Dokumen	2.612.549.130,00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						840.000.000,00							2.612.549.130,00	
	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	840.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang		3 Dokumen	2.612.549.130,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan						***1.280.000.000,00***							***6.968.509.085,00***	
		1.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100 %		100 %	100 %	1.280.000.000,00						100 %	6.968.509.085,00	
		2.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %		100 %	100 %	1.280.000.000,00						100 %	6.968.509.085,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						50.000.000,00					-		1.060.803.215,00	
	Kegiatan Pembentukan Perda Yang Difasiitasi						50.000.000,00					-		1.060.803.215,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	50.000.000,00						11 Dokumen	63.610.000,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						50.000.000,00							63.610.000,00	
	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		11 Dokumen	63.610.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						1.230.000.000,00					-		4.603.705.870,00	
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas-Tugas DPRD Yang Difasilitasi						1.230.000.000,00					-		4.603.705.870,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	332.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.080.000.000,00						12 Dokumen	4.171.705.870,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						1.080.000.000,00							4.171.705.870,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.080.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Dokumen	4.171.705.870,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						150.000.000,00							332.000.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	332.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						**3.680.705.649,00**							**13.545.831.928,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.680.705.649,00**							**13.545.831.928,00**	
5.01	**PERENCANAAN**						**3.676.705.649,00**							**8.422.114.006,00**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.653.705.649,00**							**4.726.291.385,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***3.649.505.649,00***							***4.648.791.385,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %		100 %	100 %	3.649.505.649,00						100 %	4.648.791.385,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.600.000,00					-		56.000.000,00	
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun dan disampaikan tepat waktu						3.600.000,00					-		56.000.000,00	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000,00						2 Dokumen	11.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000,00						2 Dokumen	10.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000,00						2 Dokumen	8.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000,00						2 Dokumen	3.000.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000,00						2 Dokumen	4.000.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	600.000,00						27 Laporan	18.500.000,00	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						600.000,00							10.500.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						600.000,00							4.000.000,00	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						600.000,00							3.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						600.000,00							11.500.000,00	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	11.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						600.000,00							8.500.000,00	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	8.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						600.000,00							18.500.000,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		27 Laporan	18.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.052.954.046,00					-		3.264.581.385,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan						3.052.954.046,00					-		3.264.581.385,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	600.000,00						36 Dokumen	9.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen		96 Dokumen	96 Dokumen	600.000,00						96 Dokumen	8.500.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		31 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.051.754.046,00						32 Orang/bulan	3.246.581.385,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.051.754.046,00							3.246.581.385,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		31 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.051.754.046,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan		32 Orang/bulan	3.246.581.385,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0			pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						600.000,00							8.500.000,00	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen		96 Dokumen	96 Dokumen	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		96 Dokumen	8.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						600.000,00							9.500.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		36 Dokumen	9.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						64.010.003,00					-		460.500.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						64.010.003,00					-		460.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	50.000.000,00						250 Laporan	295.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	2 Paket	1.000.000,00						3 Paket	33.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	4 Paket	10.010.003,00						5 Paket	63.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		2 Paket	3 Paket	3.000.000,00						3 Paket	25.000.000,00	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.000.000,00							33.000.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	2 Paket	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							25.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		2 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga		3 Paket	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Lalabata Rilau || 0			keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.010.003,00							63.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	3 Paket	10.010.003,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		5 Paket	63.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00							295.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		200 Laporan	30 Laporan	50.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		250 Laporan	295.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						509.451.600,00					-		598.710.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						509.451.600,00					-		598.710.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	155.950.000,00						12 Laporan	221.210.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	353.501.600,00						12 Laporan	377.500.000,00	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						155.950.000,00							221.210.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	155.950.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	221.210.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						353.501.600,00							377.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	353.501.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	377.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23.690.000,00					-		152.000.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik						23.690.000,00					-		152.000.000,00	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00						1 Unit	20.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		10 Unit	8 Unit	22.500.000,00						8 Unit	67.000.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		5 Unit	6 Unit	690.000,00						7 Unit	45.000.000,00	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						22.500.000,00							67.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		10 Unit	8 Unit	22.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		8 Unit	67.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						690.000,00							45.000.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		5 Unit	1 Unit	690.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						500.000,00							20.000.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Unit	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**13.000.000,00**							**1.465.747.000,00**	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah						***11.500.000,00***							***713.547.000,00***	
		1.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%		100%	100%	11.500.000,00						100%	713.547.000,00	
		2.Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%		100%	100%	11.500.000,00						100%	713.547.000,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						10.000.000,00					-		802.597.000,00	
	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun tepat waktu						10.000.000,00					-		802.597.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	500.000,00						2 Berita Acara	127.025.000,00	
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	3.500.000,00						1 Berita Acara	93.000.000,00	
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		2 Berita Acara	1 Berita Acara	1.000.000,00						1 Berita Acara	127.025.000,00	
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	6 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00						6 Dokumen	127.025.000,00	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						5.000.000,00							127.025.000,00	
	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	6 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		6 Dokumen	127.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						3.500.000,00							93.000.000,00	
	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	3.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Berita Acara	93.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						500.000,00							127.025.000,00	
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Berita Acara	127.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						1.000.000,00							127.025.000,00	
	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		2 Berita Acara	1 Berita Acara	1.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Berita Acara	127.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						2.000.000,00					-		235.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan SKPD						2.000.000,00					-		235.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						3 Dokumen	65.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	34 Orang		34 Orang	34 Orang	500.000,00						34 Orang	100.000.000,00	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						1.500.000,00							65.000.000,00	
	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						500.000,00							100.000.000,00	
	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	34 Orang		34 Orang	34 Orang	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		34 Orang	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						1.000.000,00					-		245.075.000,00	
	Persentase Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						1.000.000,00					-		245.075.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	500.000,00						4 Laporan	123.025.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	500.000,00						2 Laporan	61.025.000,00	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						500.000,00							61.025.000,00	
	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	61.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						500.000,00							123.025.000,00	
	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng ||	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan,		4 Laporan	123.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0			akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**10.000.000,00**							**2.230.075.621,00**	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan						***2.500.000,00***							***496.893.237,00***	
		2.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		100%	100%	2.500.000,00						100%	496.893.237,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						3.000.000,00					-		764.451.133,00	
	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan						3.000.000,00					-		764.451.133,00	
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00						2 Laporan	76.445.113,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000,00						2 Laporan	38.222.557,00	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00						1 Laporan	229.335.340,00	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						2.000.000,00							76.445.113,00	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	76.445.113,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						500.000,00							38.222.557,00	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	38.222.557,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan						500.000,00							229.335.340,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	229.335.340,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia						***3.500.000,00***							***459.934.235,00***	
		1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		100%	100%	3.500.000,00						100%	459.934.235,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						4.000.000,00					-		707.591.131,00	
	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia						4.000.000,00					-		707.591.131,00	
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00						2 Laporan	70.759.113,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000,00						2 Laporan	35.379.557,00	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00						1 Laporan	212.277.339,00	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						3.000.000,00							70.759.113,00	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	70.759.113,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						500.000,00							35.379.557,00	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan		2 Laporan	35.379.557,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											ketahanan daerah terhadap bencana				
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						500.000,00							212.277.339,00	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	212.277.339,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA						***2.500.000,00***							***492.686.681,00***	
		3.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%		100%	100%	2.500.000,00						100%	492.686.681,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						3.000.000,00					-		758.033.357,00	
	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA						3.000.000,00					-		758.033.357,00	
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00						2 Laporan	75.813.336,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000,00						2 Laporan	37.906.668,00	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00						1 Laporan	265.246.674,00	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						2.000.000,00							75.813.336,00	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	75.813.336,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						500.000,00							37.906.668,00	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga		2 Laporan	37.906.668,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Lalabata Rilau || 0			keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						500.000,00							265.246.674,00	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	265.246.674,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**4.000.000,00**							**5.123.717.922,00**	
5.05.03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**4.000.000,00**							**2.261.764.508,00**	
	Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi Daerah						***1.000.000,00***							***1.143.517.810,00***	
		1.Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi Daerah	100 %		60 %	70 %	1.000.000,00						80 %	574.917.794,00	
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						2.000.000,00					-		1.143.517.810,00	
	Jumlah Invensi dan Inovasi yang mendapatkan Apresiasi						2.000.000,00					-		1.143.517.810,00	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00						1 Laporan	574.917.794,00	
5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah						1.000.000,00							574.917.794,00	
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	574.917.794,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan						***1.000.000,00***							***1.118.246.698,00***	
		1.Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah dan pengembangan potensi unggulan daerah	100 %		100 %	100 %	1.000.000,00						100 %	1.118.246.698,00	
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						2.000.000,00					-		1.118.246.698,00	
	Jumlah Produk Unggulan Daerah (PUD) yang dikembangkan melalui penerapan IPTEK						2.000.000,00					-		1.118.246.698,00	
		Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	320.000.000,00	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian,	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00						2 Laporan	555.964.460,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		pengembangan, pengkajian, dan penerapan													
5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						1.000.000,00							555.964.460,00	
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	555.964.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						1.000.000,00							320.000.000,00	
	Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	320.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan						***1.000.000,00***							***1.143.517.810,00***	
		1.Persentase Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah yang Dimanfaatkan	100 %		100 %	100 %	1.000.000,00						100 %	568.600.016,00	
	Jumlah Invensi dan Inovasi yang mendapatkan Apresiasi						2.000.000,00					-		1.143.517.810,00	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1.000.000,00						3 Laporan	568.600.016,00	
5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						1.000.000,00							568.600.016,00	
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Laporan	568.600.016,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						**117.149.332.066,00**							**187.365.947.729,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**117.149.332.066,00**							**187.365.947.729,00**	
5.02	**KEUANGAN**						**117.149.332.066,00**							**187.365.947.729,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.135.730.699,00**							**23.423.055.286,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***12.101.730.699,00***							***23.399.592.286,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %		100 %	100 %	12.101.730.699,00						100 %	23.399.592.286,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00					Aparatur Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		19.595.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												Kinerja Perangkat Daerah			
	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan,Ppenganggaran dan Evaluasi tepat waktu						1.000.000,00					Aparatur Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.595.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00						2 Dokumen	7.795.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	500.000,00						15 Laporan	11.800.000,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						500.000,00							7.795.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	9 Dokumen	500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	7.795.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						500.000,00							11.800.000,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan		15 Laporan	27 Laporan	500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		15 Laporan	11.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.638.404.302,00					Aparatur Pengelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng		10.548.730.606,00	
	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.638.404.302,00					Aparatur Pengelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng		10.548.730.606,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	1.000.000,00						36 Dokumen	13.463.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen		96 Dokumen	96 Dokumen	3.000.000,00						96 Dokumen	13.463.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan		107 Orang/bulan	107 Orang/bulan	9.634.404.302,00						107 Orang/bulan	10.521.804.606,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.634.404.302,00							10.521.804.606,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan		107 Orang/bulan	101 Orang/bulan	9.634.404.302,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas,		107 Orang/bulan	10.521.804.606,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										judi, dan penyeludupan.	serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						3.000.000,00							13.463.000,00	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen		96 Dokumen	96 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		96 Dokumen	13.463.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.000.000,00							13.463.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		36 Dokumen	13.463.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.000.000,00					Aparatur Pengelola Administrasi Kepegawaian		65.000.000,00	
	Persentase Pemeuhan Administrasi Kepegawaian Daerah						1.000.000,00					Aparatur Pengelola Administrasi Kepegawaian		65.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00						12 Dokumen	65.000.000,00	
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.000.000,00							65.000.000,00	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Pengelola Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.430.000.000,00	
	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Pengelola Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.430.000.000,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	86.320.000,00						2 Laporan	700.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	1.500.000,00						3 Paket	10.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	69.180.000,00						3 Paket	350.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	225.076.000,00						3 Paket	300.000.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.515.000,00						2 Paket	30.000.000,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.515.000,00							30.000.000,00	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.515.000,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.500.000,00							10.000.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						225.076.000,00							300.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	225.076.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						53.500.000,00							350.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	53.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.000.000,00							40.000.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng ||	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan,		1 Laporan	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0		pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70.000.000,00							700.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.943.039.600,00					Aparatur Pengelola Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.236.000.000,00	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang						1.943.039.600,00					Aparatur Pengelola Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.236.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	774.000.000,00						36 Laporan	10.500.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.169.039.600,00						1 Laporan	736.000.000,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						774.000.000,00							10.500.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	774.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		36 Laporan	10.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.169.039.600,00							736.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	1.169.039.600,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	736.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						166.695.797,00					Aparatur Pengelola Pemeliharaan		123.729.680,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah						166.695.797,00					Aparatur Pengelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		123.729.680,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	145 Unit		145 Unit	145 Unit	143.145.797,00						145 Unit	70.729.680,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	39.000.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	3.050.000,00						5 Unit	4.000.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00						1 Unit	10.000.000,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00							39.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Unit	39.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						143.145.797,00							70.729.680,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	145 Unit		145 Unit	300 Unit	143.145.797,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		145 Unit	70.729.680,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.050.000,00							4.000.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	1 Unit	3.050.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan		5 Unit	4.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											ketahanan daerah terhadap bencana				
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000,00							10.000.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Unit	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**104.628.401.367,00**							**162.169.194.620,00**	
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan						***48.500.000,00***							***599.984.471,00***	
		1.Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%		100%	100%	48.500.000,00						100%	599.984.471,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						49.000.000,00					Aparatur Pengelola Pelaporan Keuangan Daerah		599.984.471,00	
	Persentase Keterpenuhan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi						49.000.000,00					Aparatur Pengelola Pelaporan Keuangan Daerah		599.984.471,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00						1 Dokumen	48.752.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	3.500.000,00						34 Dokumen	45.081.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000,00						2 Laporan	27.764.500,00	
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.500.000,00						1 Laporan	388.685.000,00	
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	612 Laporan		612 Laporan	612 Laporan	500.000,00						612 Laporan	44.965.000,00	
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00						2 Dokumen	44.736.971,00	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						500.000,00							27.764.500,00	
	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	27.764.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						3.500.000,00							45.081.000,00	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	3.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		34 Dokumen	45.081.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						500.000,00							44.965.000,00	
	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	612 Laporan		612 Laporan	612 Laporan	500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		612 Laporan	44.965.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						8.500.000,00							388.685.000,00	
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	8.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	388.685.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						1.000.000,00							44.736.971,00	
	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	44.736.971,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						35.000.000,00							48.752.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	48.752.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Meningkatnya tata kelola anggaran						***104.119.201.367,00***							***161.083.210.149,00***	
		1.Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30%		30%	30%	104.119.201.367,00						30%	161.083.210.149,00	
		2.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40%		40%	40%	104.119.201.367,00						40%	161.083.210.149,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						730.200.000,00					Aparatur Pengelola Rencana Keuangan Daerah dan Masyarakat Kab. Soppeng		1.219.160.049,00	
	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang sesuai Regulasi						730.200.000,00					Aparatur Pengelola Rencana Keuangan Daerah dan Masyarakat Kab. Soppeng		1.219.160.049,00	
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	39.000.000,00	
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	363.600.000,00						2 Dokumen	580.000.000,00	
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	363.600.000,00						2 Dokumen	600.160.049,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						363.600.000,00							580.000.000,00	
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	363.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	580.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						363.600.000,00							600.160.049,00	
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	363.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	600.160.049,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						3.000.000,00							39.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	39.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						103.752.601.367,00					Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng		159.864.050.100,00	
	Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah						103.752.601.367,00					Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng		159.864.050.100,00	
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.931.456.150,00						1 Laporan	2.260.008.817,00	
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.499.006,00						1 Laporan	83.422.402,00	
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	92.485.463.700,00						1 Laporan	141.520.618.881,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.070.728.373,00						1 Laporan	6.000.000.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.144.454.138,00						1 Laporan	10.000.000.000,00	
5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan PelaksanaanPenerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah						120.499.006,00							83.422.402,00	
	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.499.006,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	83.422.402,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						4.931.456.150,00							2.260.008.817,00	
	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.931.456.150,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	2.260.008.817,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						92.485.463.700,00							141.520.618.881,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	92.485.463.700,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	141.520.618.881,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						1.144.454.138,00							10.000.000.000,00	
	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.144.454.138,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	10.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						5.070.728.373,00							6.000.000.000,00	
	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.070.728.373,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	6.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan						***96.600.000,00***							***486.000.000,00***	
		1.Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	100%		100%	100%	96.600.000,00						100%	486.000.000,00	
		2.Persentase Penurunan SILPA	15.00 %		9.38 %	10.34 %	96.600.000,00						11.54 %	486.000.000,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						96.600.000,00					Aparatur Pengelola Perbendaharaan Daerah		486.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang Terproses dan Tervalidasi sesuai Regulasi						96.600.000,00					Aparatur Pengelola Perbendaharaan Daerah		486.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00						12 Laporan	36.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	87.600.000,00						100 Orang	400.000.000,00	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						6.000.000,00							50.000.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						3.000.000,00							36.000.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	36.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						87.600.000,00							400.000.000,00	
	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	87.600.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		100 Orang	400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**168.000.000,00**							**1.423.697.823,00**	
	Meningkatnya tata kelola aset daerah						***167.000.000,00***							***1.423.697.823,00***	
		1.Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	5%		5%	5%	167.000.000,00						5%	1.423.697.823,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						168.000.000,00					Aparatur Pengelola Barang Milik Daerah		1.423.697.823,00	
	Persentase Tertib Administrasi Aset Daerah						168.000.000,00					Aparatur Pengelola Barang Milik Daerah		1.423.697.823,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00						4 Dokumen	170.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.500.000,00						1 Laporan	1.002.397.823,00	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.200.000,00						4 Laporan	40.000.000,00	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00						1 Dokumen	300.000,00	
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00						2 Dokumen	211.000.000,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						1.000.000,00							211.000.000,00	
	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	211.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						300.000,00							300.000,00	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						15.200.000,00							40.000.000,00	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.200.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Laporan	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						150.500.000,00							1.002.397.823,00	
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	1.002.397.823,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						1.000.000,00							170.000.000,00	
	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas,		4 Dokumen	170.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										judi, dan penyeludupan.	serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**249.200.000,00**							**350.000.000,00**	
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan						***249.200.000,00***							***300.000.000,00***	
		1.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100%		100%	100%	63.400.000,00						100%	50.000.000,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						249.200.000,00					Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi		350.000.000,00	
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah						249.200.000,00					Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi		350.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.200.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit		6 Unit	6 Unit	14.200.000,00						6 Unit	50.000.000,00	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						14.200.000,00							50.000.000,00	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit		6 Unit	5 Unit	14.200.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		6 Unit	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						49.200.000,00							50.000.000,00	
	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	49.200.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital						***249.200.000,00***							***300.000.000,00***	
		1.Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100%		100%	100%	21.500.000,00						100%	30.000.000,00	
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah						249.200.000,00					Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi		350.000.000,00	
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	21.500.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						21.500.000,00							30.000.000,00	
	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	21.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab.	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang		1 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0		serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***249.200.000,00***							***300.000.000,00***	
		1.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	19.80 %		16.14 %	16.86 %	164.300.000,00						17.79 %	220.000.000,00	
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah						249.200.000,00					Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi		350.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	115.800.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	48.500.000,00						3 Laporan	70.000.000,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						48.500.000,00							70.000.000,00	
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	5 Laporan	48.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Laporan	70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						115.800.000,00							150.000.000,00	
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	20 Dokumen	115.800.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata						**4.000.000,00**							**0,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	
5.02	**KEUANGAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.135.730.699,00**							**23.423.055.286,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***4.000.000,00***							***0,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %		100 %	100 %	4.000.000,00						100 %	0,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		1.430.000.000,00	
	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan		1.430.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	86.320.000,00						2 Laporan	700.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	69.180.000,00						3 Paket	350.000.000,00	
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.960.000,00							0,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	1.960.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.040.000,00							0,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.040.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata
	UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri						**4.000.000,00**							**0,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	
5.02	**KEUANGAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.135.730.699,00**							**23.423.055.286,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***4.000.000,00***							***0,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %		100 %	100 %	4.000.000,00						100 %	0,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		1.430.000.000,00	
	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		1.430.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	86.320.000,00						2 Laporan	700.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	69.180.000,00						3 Paket	350.000.000,00	
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.960.000,00							0,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	1.960.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang		3 Paket	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.040.000,00							0,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.040.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri
	UPTD Wilayah Kecamatan Liliriaja						**4.000.000,00**							**0,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	
5.02	**KEUANGAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.135.730.699,00**							**23.423.055.286,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***4.000.000,00***							***0,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %		100 %	100 %	4.000.000,00						100 %	0,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		1.430.000.000,00	
	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		1.430.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	86.320.000,00						2 Laporan	700.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	69.180.000,00						3 Paket	350.000.000,00	
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.960.000,00							0,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	1.960.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Liliriaja
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.040.000,00							0,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.040.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang		2 Laporan	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Liliriaja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
	UPTD Wilayah Kecamatan Lilirilau						**4.000.000,00**							**0,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	
5.02	**KEUANGAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.135.730.699,00**							**23.423.055.286,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***4.000.000,00***							***0,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %		100 %	100 %	4.000.000,00						100 %	0,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		1.430.000.000,00	
	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		1.430.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	86.320.000,00						2 Laporan	700.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	69.180.000,00						3 Paket	350.000.000,00	
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.960.000,00							0,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	1.960.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Lilirilau
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.040.000,00							0,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.040.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Lilirilau
	UPTD Wilayah Kecamatan Marioriawa						**4.000.000,00**							**0,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	
5.02	**KEUANGAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.135.730.699,00**							**23.423.055.286,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***4.000.000,00***							***0,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %		100 %	100 %	4.000.000,00						100 %	0,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		1.430.000.000,00	
	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		1.430.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	86.320.000,00						2 Laporan	700.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	69.180.000,00						3 Paket	350.000.000,00	
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.960.000,00							0,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	1.960.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Marioriawa
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.040.000,00							0,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.040.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Marioriawa
	UPTD Wilayah Kecamatan Marioriawo						**4.000.000,00**							**0,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	
5.02	**KEUANGAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.135.730.699,00**							**23.423.055.286,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***4.000.000,00***							***0,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %		100 %	100 %	4.000.000,00						100 %	0,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		1.430.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												Kabupaten Soppeng			
	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		1.430.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	86.320.000,00						2 Laporan	700.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	69.180.000,00						3 Paket	350.000.000,00	
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.960.000,00							0,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	1.960.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Marioriwawo
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.040.000,00							0,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.040.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Marioriwawo
	UPTD Wilayah Kecamatan Ganra						**4.000.000,00**							**0,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	
5.02	**KEUANGAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.135.730.699,00**							**23.423.055.286,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***4.000.000,00***							***0,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %		100 %	100 %	4.000.000,00						100 %	0,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		1.430.000.000,00	
	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		1.430.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	86.320.000,00						2 Laporan	700.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	69.180.000,00						3 Paket	350.000.000,00	
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.960.000,00							0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	1.960.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Ganra
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.040.000,00							0,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.040.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Ganra
	UPTD Wilayah Kecamatan Citta						**4.000.000,00**							**0,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	
5.02	**KEUANGAN**						**4.000.000,00**							**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.135.730.699,00**							**23.423.055.286,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***4.000.000,00***							***0,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	100 %		100 %	100 %	4.000.000,00						100 %	0,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		1.430.000.000,00	
	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.591.000,00					Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng		1.430.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	86.320.000,00						2 Laporan	700.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	69.180.000,00						3 Paket	350.000.000,00	
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.960.000,00							0,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	1.960.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Citta
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.040.000,00							0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.040.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	0,00	UPTD Wilayah Kecamatan Citta
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**4.185.970.887,00**							**13.032.318.814,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.185.970.887,00**							**13.032.318.814,00**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**						**4.184.970.887,00**							**8.995.258.700,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.175.470.887,00**							**6.145.940.841,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***4.173.970.887,00***							***6.145.940.841,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %		100 %	100 %	4.173.970.887,00						100 %	6.145.940.841,00	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00					Kab. Soppeng		65.865.000,00	
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan						1.500.000,00					Kab. Soppeng		65.865.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00						2 Dokumen	21.250.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	15.500.000,00	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.000.000,00							21.250.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Dokumen	21.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						500.000,00							15.500.000,00	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	15.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.779.063.687,00					Kab. Soppeng		4.614.575.841,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan						3.779.063.687,00					Kab. Soppeng		4.614.575.841,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	0,00						36 Dokumen	21.100.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	98 Dokumen		98 Dokumen	98 Dokumen	1.500.000,00						98 Dokumen	13.650.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan		47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	3.777.563.687,00						47 Orang/bulan	4.579.825.841,00	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.777.563.687,00							4.579.825.841,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan		47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	3.777.563.687,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		47 Orang/bulan	4.579.825.841,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.500.000,00							13.650.000,00	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	98 Dokumen		98 Dokumen	98 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		98 Dokumen	13.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						51.500.000,00					Kab. Soppeng		665.950.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						51.500.000,00					Kab. Soppeng		665.950.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00						12 Laporan	412.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	1.500.000,00						3 Paket	73.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.000.000,00						3 Paket	67.850.000,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.500.000,00							73.000.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	73.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							67.850.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	67.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.000.000,00							412.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab.	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang		12 Laporan	412.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0		serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						321.407.200,00					Kab. Soppeng		222.950.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						321.407.200,00					Kab. Soppeng		222.950.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	105.100.000,00						12 Laporan	203.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	216.307.200,00						12 Laporan	19.950.000,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						105.100.000,00							203.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	105.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	203.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						216.307.200,00							19.950.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	216.307.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	19.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.000.000,00					Kab. Soppeng		479.050.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik						22.000.000,00					Kab. Soppeng		479.050.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.500.000,00						4 Unit	19.750.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	19.500.000,00						1 Unit	39.550.000,00	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						19.500.000,00							39.550.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	19.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga		1 Unit	39.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Lalabata Rilau || 0		judi, dan penyeludupan.	keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.500.000,00							19.750.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Unit	19.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**9.500.000,00**							**2.849.317.859,00**	
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian						***2.500.000,00***							***713.908.909,00***	
		1.Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	100%		75%	80%	2.500.000,00						85%	713.908.909,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						4.000.000,00					Kab. Soppeng		713.908.909,00	
	Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaiannya						4.000.000,00					Kab. Soppeng		713.908.909,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	1.500.000,00						16 Dokumen	119.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1000 Dokumen		1000 Dokumen	1000 Dokumen	1.500.000,00						1000 Dokumen	360.584.000,00	
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	1.000.000,00						3 Lembaga	121.870.909,00	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						1.500.000,00							360.584.000,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1000 Dokumen		1000 Dokumen	1000 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1000 Dokumen	360.584.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						1.000.000,00							121.870.909,00	
	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Lembaga	121.870.909,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						1.500.000,00							119.500.000,00	
	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas,		16 Dokumen	119.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Lalabata Rilau || 0		judi, dan penyeludupan.	serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN						***2.500.000,00***							***612.824.462,00***	
		1.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100%		100%	100%	2.500.000,00						100%	612.824.462,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						2.500.000,00					Kab. Soppeng		612.824.462,00	
	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya						2.500.000,00					Kab. Soppeng		612.824.462,00	
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang		500 Orang	500 Orang	2.500.000,00						500 Orang	232.750.000,00	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						2.500.000,00							232.750.000,00	
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang		500 Orang	500 Orang	2.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		500 Orang	232.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN						***500.000,00***							***1.114.234.488,00***	
		1.Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	10%		3.2 %	4.5 %	500.000,00						6%	758.133.355,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						500.000,00					Kab. Soppeng		1.114.234.488,00	
	Jumlah ASN yang Meningkat Kompetensinya						500.000,00					Kab. Soppeng		1.114.234.488,00	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	489.212.740,00	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	489.212.740,00	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						500.000,00							489.212.740,00	
	Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	489.212.740,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN						***3.000.000,00***							***1.522.584.488,00***	
		1.Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	12%		4%	6%	2.500.000,00						8%	764.451.133,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						2.500.000,00					Kab. Soppeng		408.350.000,00	
	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Kapasitasnya						2.500.000,00					Kab. Soppeng		408.350.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00						2 Dokumen	213.320.000,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						2.500.000,00							213.320.000,00	
	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan	Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas,		2 Dokumen	213.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Lalabata Rilau || 0		judi, dan penyeludupan.	serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**1.000.000,00**							**4.037.060.114,00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**1.000.000,00**							**4.037.060.114,00**	
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional						***500.000,00***							***1.664.777.812,00***	
		1.Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	100%		60%	70%	500.000,00						80%	1.200.377.812,00	
	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi						***500.000,00***							***1.664.777.812,00***	
		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	100%		30%	50%	500.000,00						70%	1.200.377.812,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						500.000,00					Kab. Soppeng		1.664.777.812,00	
	Jumlah ASN yang mendaptkan pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						500.000,00					Kab. Soppeng		1.664.777.812,00	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00						1 Laporan	1.200.377.812,00	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						500.000,00							1.200.377.812,00	
	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Laporan	1.200.377.812,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis						***500.000,00***							***852.900.024,00***	
		1.Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	7%		5%	5.5 %	500.000,00						6%	852.900.024,00	
	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi						***500.000,00***							***852.900.024,00***	
		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	23%		15%	17%							19%		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						500.000,00					Kab. Soppeng		852.900.024,00	
	Jumlah ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis						500.000,00					Kab. Soppeng		852.900.024,00	
		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	145.500.000,00	
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi						500.000,00							145.500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	145.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	INSPEKTORAT DAERAH						**8.536.201.800,00**							**11.640.468.026,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.536.201.800,00**							**11.640.468.026,00**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**8.536.201.800,00**							**11.640.468.026,00**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.414.006.800,00**							**8.083.470.997,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***7.414.006.800,00***							***8.069.620.997,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Inspektorat Daerah	100 %		100 %	100 %	7.414.006.800,00						100 %	8.069.620.997,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.777.085.400,00					-		7.301.568.173,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.777.085.400,00					-		7.301.568.173,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan		64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	6.777.085.400,00						64 Orang/bulan	7.292.308.173,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.777.085.400,00							7.292.308.173,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan		64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	6.777.085.400,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		64 Orang/bulan	7.292.308.173,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						236.895.000,00					-		282.015.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						236.895.000,00					-		282.015.000,00	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64 Orang		64 Orang	64 Orang	236.895.000,00						64 Orang	221.875.000,00	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						236.895.000,00							221.875.000,00	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64 Orang		64 Orang	64 Orang	236.895.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		64 Orang	221.875.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						69.941.000,00					-		244.709.424,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						69.941.000,00					-		244.709.424,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	10.000.000,00						50 Laporan	7.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	39.941.000,00						2 Laporan	179.603.099,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		2 Paket	2 Paket	5.000.000,00						2 Paket	12.750.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.000.000,00						5 Paket	32.621.725,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	2.000.000,00						5 Paket	7.554.600,00	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							12.750.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	12.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							7.554.600,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	2 Paket	2.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		5 Paket	7.554.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						13.000.000,00							32.621.725,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	13.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		5 Paket	32.621.725,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00							7.500.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	10.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		50 Laporan	7.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						39.941.000,00							179.603.099,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	39.941.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan,		2 Laporan	179.603.099,00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						302.826.400,00					-		112.168.400,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						302.826.400,00					-		112.168.400,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	50.860.000,00						36 Laporan	47.600.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	251.966.400,00						4 Laporan	64.568.400,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.860.000,00							47.600.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	50.860.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		36 Laporan	47.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						251.966.400,00							64.568.400,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	251.966.400,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Laporan	64.568.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27.259.000,00					-		55.500.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik						27.259.000,00					-		55.500.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		26 Unit	24 Unit	13.759.000,00						22 Unit	40.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13.500.000,00						1 Unit	4.500.000,00	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						13.500.000,00							4.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13.500.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan		1 Unit	4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						13.759.000,00							40.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		26 Unit	26 Unit	13.759.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		22 Unit	40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**954.640.000,00**							**2.767.330.336,00**	
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan						***954.640.000,00***							***2.767.330.336,00***	
		1.Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	100%		80%	85%	954.640.000,00						90%	2.767.330.336,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						806.900.000,00					-		2.188.503.557,00	
	Terlaksananya Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa						806.900.000,00					-		2.188.503.557,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	37.280.000,00						4 Dokumen	245.850.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	45 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	294.790.000,00						44 Laporan	807.223.793,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	45 Laporan		43 Laporan	44 Laporan	276.750.000,00						44 Laporan	452.999.302,00	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	46.370.000,00						4 Laporan	71.845.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	36 Laporan		34 Laporan	35 Laporan	151.710.000,00						35 Laporan	513.220.462,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						276.750.000,00							452.999.302,00	
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	45 Laporan		43 Laporan	44 Laporan	276.750.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		44 Laporan	452.999.302,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						151.710.000,00							513.220.462,00	
	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	36 Laporan		34 Laporan	35 Laporan	151.710.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		35 Laporan	513.220.462,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						46.370.000,00							71.845.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	46.370.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Laporan	71.845.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						294.790.000,00							807.223.793,00	
	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	45 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	294.790.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		44 Laporan	807.223.793,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						37.280.000,00							245.850.000,00	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	37.280.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Dokumen	245.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						147.740.000,00					-		578.826.779,00	
	Terselesaikannya Kasus-Kasus/Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Tertentu						147.740.000,00					-		578.826.779,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	147.740.000,00						30 Laporan	578.826.779,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						147.740.000,00							578.826.779,00	
	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	147.740.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		30 Laporan	578.826.779,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**167.555.000,00**							**789.666.693,00**	
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi						***167.555.000,00***							***698.446.693,00***	
		1.Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4.00 Nilai		3.20 Nilai	3.40 Nilai	167.555.000,00						3.60 Nilai	698.446.693,00	
		2.Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP	3.8 Nilai		3 Nilai	3.20 Nilai	167.555.000,00						3.4 Nilai	698.446.693,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						167.555.000,00					-		789.666.693,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi terhadap SKPD dan Pemerintahan Desa						167.555.000,00					-		789.666.693,00	
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Kegiatan		8 Kegiatan	9 Kegiatan	167.555.000,00						10 Kegiatan	284.660.013,00	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						167.555.000,00							284.660.013,00	
	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Kegiatan		8 Kegiatan	9 Kegiatan	167.555.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		10 Kegiatan	284.660.013,00	INSPEKTORAT DAERAH
	KECAMATAN LILIRILAU						**3.440.103.449,00**							**4.770.263.885,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.440.103.449,00**							**4.770.263.885,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**3.440.103.449,00**							**4.770.263.885,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.527.903.449,00**							**5.001.458.263,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***3.440.103.449,00***							***4.350.468.613,00***	
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau	100 %		100 %	100 %	3.440.103.449,00						100 %	4.350.468.613,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.166.996.849,00					-		3.513.659.967,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan perangkat daerah						3.166.996.849,00					-		3.513.659.967,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.166.996.849,00						37 Orang/bulan	3.488.271.017,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.166.996.849,00							3.488.271.017,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.166.996.849,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		37 Orang/bulan	3.488.271.017,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.000.000,00					-		412.298.296,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah						44.000.000,00					-		412.298.296,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		600 Laporan	600 Laporan	26.000.000,00						600 Laporan	290.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	13.680.000,00						Paket	42.298.296,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.320.000,00						1 Paket	19.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.920.000,00							11.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.920.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas,		1 Paket	11.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.080.000,00							18.298.296,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.080.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		Paket	18.298.296,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.000.000,00							180.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		600 Laporan	650 Laporan	20.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		600 Laporan	180.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						287.406.600,00					-		187.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						287.406.600,00					-		187.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	91.305.000,00						12 Laporan	87.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	196.101.600,00						12 Laporan	100.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						39.505.000,00							44.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	39.505.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	44.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						176.101.600,00							80.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	176.101.600,00	Kab. Soppeng	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.500.000,00					-		134.500.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik						29.500.000,00					-		134.500.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	29.500.000,00						9 Unit	27.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						29.500.000,00							15.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	29.500.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		9 Unit	15.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
	Kelurahan Ujung						**374.050.000,00**							**643.772.500,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**374.050.000,00**							**643.772.500,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**374.050.000,00**							**643.772.500,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.527.903.449,00**							**5.001.458.263,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***21.800.000,00***							***136.897.500,00***	
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau	100 %		100 %	100 %	21.800.000,00						100 %	136.897.500,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.166.996.849,00					-		3.513.659.967,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan perangkat daerah						3.166.996.849,00					-		3.513.659.967,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115 Dokumen		115 Dokumen	115 Dokumen	0,00						115 Dokumen	7.590.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.000.000,00					-		412.298.296,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah						44.000.000,00					-		412.298.296,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		600 Laporan	600 Laporan	26.000.000,00						600 Laporan	290.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	13.680.000,00						Paket	42.298.296,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.320.000,00						1 Paket	19.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						600.000,00							2.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	600.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Paket	2.000.000,00	Kelurahan Ujung
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.900.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang		Paket	6.000.000,00	Kelurahan Ujung

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0			efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							27.500.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		600 Laporan	600 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		600 Laporan	27.500.000,00	Kelurahan Ujung
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						287.406.600,00					-		187.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						287.406.600,00					-		187.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	91.305.000,00						12 Laporan	87.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	196.101.600,00						12 Laporan	100.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.800.000,00							10.625.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	10.625.000,00	Kelurahan Ujung
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Ujung
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.500.000,00					-		134.500.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik						29.500.000,00					-		134.500.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	29.500.000,00						9 Unit	27.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.574.000.000,00**							**2.053.277.836,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan						***352.250.000,00***							***500.000.000,00***	
		Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau	100 %		100 %	100 %	352.250.000,00						100 %	500.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.574.000.000,00					-		2.000.000.000,00	
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa						1.574.000.000,00					-		2.000.000.000,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	774.000.000,00						7 Pokmas / Ormas	980.000.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	800.000.000,00						7 Unit	1.020.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							255.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	255.000.000,00	Kelurahan Ujung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						152.250.000,00							245.000.000,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	152.250.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Ujung || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Pokmas / Ormas	245.000.000,00	Kelurahan Ujung
	Kelurahan Cabbeng						**463.750.000,00**							**643.772.500,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**463.750.000,00**							**643.772.500,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**463.750.000,00**							**643.772.500,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.527.903.449,00**							**5.001.458.263,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***21.800.000,00***							***136.897.500,00***	
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau	100 %		100 %	100 %	21.800.000,00						100 %	136.897.500,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.166.996.849,00					-		3.513.659.967,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan perangkat daerah						3.166.996.849,00					-		3.513.659.967,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115 Dokumen		115 Dokumen	115 Dokumen	0						115 Dokumen	7.590.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.000.000,00					-		412.298.296,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah						44.000.000,00					-		412.298.296,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		600 Laporan	600 Laporan	26.000.000,00						600 Laporan	290.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	13.680.000,00						Paket	42.298.296,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.320.000,00						1 Paket	19.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						600.000,00							2.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Cabenge || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Paket	2.000.000,00	Kelurahan Cabbeng
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.900.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Cabenge || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		Paket	6.000.000,00	Kelurahan Cabbeng
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							27.500.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		600 Laporan	600 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Cabenge || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		600 Laporan	27.500.000,00	Kelurahan Cabbeng
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						287.406.600,00					-		187.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						287.406.600,00					-		187.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	91.305.000,00						12 Laporan	87.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	196.101.600,00						12 Laporan	100.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.800.000,00							10.625.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Cabenge || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	10.625.000,00	Kelurahan Cabbeng
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Cabenge || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Cabbeng
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.500.000,00					-		134.500.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik						29.500.000,00					-		134.500.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	29.500.000,00						9 Unit	27.000.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.574.000.000,00**							**2.053.277.836,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan						***441.950.000,00***							***500.000.000,00***	
		999.Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau	100 %		100 %	100 %	441.950.000,00						100 %	500.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.574.000.000,00					-		2.000.000.000,00	
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa						1.574.000.000,00					-		2.000.000.000,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	774.000.000,00						7 Pokmas / Ormas	980.000.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	800.000.000,00						7 Unit	1.020.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							255.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Cabenge || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	255.000.000,00	Kelurahan Cabbeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						241.950.000,00							245.000.000,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	241.950.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Cabenge || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Pokmas / Ormas	245.000.000,00	Kelurahan Cabbeng
	Kelurahan Pajalesang						**429.550.000,00**							**643.772.500,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**429.550.000,00**							**643.772.500,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**429.550.000,00**							**643.772.500,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.527.903.449,00**							**5.001.458.263,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***21.800.000,00***							***136.897.500,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau	100 %		100 %	100 %	21.800.000,00						100 %	136.897.500,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.000.000,00					-		412.298.296,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah						44.000.000,00					-		412.298.296,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		600 Laporan	600 Laporan	26.000.000,00						600 Laporan	290.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	13.680.000,00						Paket	42.298.296,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.320.000,00						1 Paket	19.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						600.000,00							2.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Pajalesang || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Paket	2.000.000,00	Kelurahan Pajalesang
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.900.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Pajalesang || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		Paket	6.000.000,00	Kelurahan Pajalesang
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							27.500.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		600 Laporan	600 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Pajalesang || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		600 Laporan	27.500.000,00	Kelurahan Pajalesang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						287.406.600,00					-		187.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						287.406.600,00					-		187.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	91.305.000,00						12 Laporan	87.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	196.101.600,00						12 Laporan	100.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.800.000,00							10.625.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan,		12 Laporan	10.625.000,00	Kelurahan Pajalesang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Pajalesang || 0			akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Pajalesang || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Pajalesang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.500.000,00					-		134.500.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik						29.500.000,00					-		134.500.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	29.500.000,00						9 Unit	27.000.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.574.000.000,00**							**2.053.277.836,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan						***407.750.000,00***							***500.000.000,00***	
		999.Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau	100 %		100 %	100 %	407.750.000,00						100 %	500.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.574.000.000,00					-		2.000.000.000,00	
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa						1.574.000.000,00					-		2.000.000.000,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	774.000.000,00						7 Pokmas / Ormas	980.000.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	800.000.000,00						7 Unit	1.020.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							255.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Pajalesang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	255.000.000,00	Kelurahan Pajalesang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						207.750.000,00							245.000.000,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	207.750.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Pajalesang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup		7 Pokmas / Ormas	245.000.000,00	Kelurahan Pajalesang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
	Kelurahan Macanre						**394.450.000,00**							**643.772.500,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**394.450.000,00**							**643.772.500,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**394.450.000,00**							**643.772.500,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.527.903.449,00**							**5.001.458.263,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***22.400.000,00***							***136.897.500,00***	
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau	100 %		100 %	100 %	22.400.000,00						100 %	136.897.500,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.000.000,00					-		412.298.296,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah						44.000.000,00					-		412.298.296,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		600 Laporan	600 Laporan	26.000.000,00						600 Laporan	290.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	13.680.000,00						Paket	42.298.296,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.320.000,00						1 Paket	19.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						600.000,00							2.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Macanre || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Paket	2.000.000,00	Kelurahan Macanre
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.900.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Macanre || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		Paket	6.000.000,00	Kelurahan Macanre
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							27.500.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan		600 Laporan	600 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Macanre || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		600 Laporan	27.500.000,00	Kelurahan Macanre
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						287.406.600,00					-		187.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						287.406.600,00					-		187.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	91.305.000,00						12 Laporan	87.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	196.101.600,00						12 Laporan	100.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.400.000,00							10.625.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Macanre || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	10.625.000,00	Kelurahan Macanre
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Macanre || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Macanre
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.574.000.000,00**							**2.053.277.836,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan						***372.050.000,00***							***500.000.000,00***	
		999.Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau	100 %		100 %	100 %	372.050.000,00						100 %	500.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.574.000.000,00					-		2.000.000.000,00	
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa						1.574.000.000,00					-		2.000.000.000,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	774.000.000,00						7 Pokmas / Ormas	980.000.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	800.000.000,00						7 Unit	1.020.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							255.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau || Kelurahan Macanre || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	255.000.000,00	Kelurahan Macanre
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						172.050.000,00							245.000.000,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	172.050.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lilirilau ||	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas,		7 Pokmas / Ormas	245.000.000,00	Kelurahan Macanre

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kelurahan Macanre || 0			serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
	KECAMATAN CITTA						**1.572.132.488,00**							**0,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.572.132.488,00**							**0,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**1.572.132.488,00**							**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.570.757.488,00**							**0,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***1.570.757.488,00***							***0,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Citta	100 %		100 %	100 %	1.570.757.488,00						100 %	0,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.413.958.488,00					-		0,00	
	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah						1.413.958.488,00					-		0,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.413.958.488,00						25 Orang/bulan	0,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.413.958.488,00							0,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.413.958.488,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Citta || Desa Citta || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		25 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						28.000.000,00					-		0,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						28.000.000,00					-		0,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	0,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	6.302.000,00						5 Paket	0,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	1.698.000,00						3 Paket	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.698.000,00							0,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	1.698.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Citta || Desa Citta || 1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		3 Paket	0,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.302.000,00							0,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	6.302.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Citta || Desa Citta || 1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5 Paket	0,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.000.000,00							0,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	0,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108.449.000,00					-		0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						108.449.000,00					-		0,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	62.900.000,00						12 Laporan	0,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	45.549.000,00						12 Laporan	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						62.900.000,00							0,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	62.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Citta || Desa Citta || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	0,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						45.549.000,00							0,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	45.549.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Citta || Desa Citta || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	0,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.350.000,00					-		0,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara baik						20.350.000,00					-		0,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	3.750.000,00						5 Unit	0,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	16.600.000,00						1 Unit	0,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						16.600.000,00							0,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	16.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Citta || Desa Citta || 1	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Unit	0,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.750.000,00							0,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	3.750.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Citta || Desa Citta || 1	Pendapatan Bagi Hasil Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5 Unit	0,00	KECAMATAN CITTA
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**1.375.000,00**							**0,00**	
	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pengawasan di desa						***1.375.000,00***							***0,00***	
		1.Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Citta	100 %		100 %	100 %	1.375.000,00						100 %	0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.375.000,00					-		0,00	
	Persentase fasisilasi rekomendasi hasil pembinaan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti						1.375.000,00					-		0,00	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.375.000,00						4 Dokumen	0,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.375.000,00							0,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.375.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Citta || Desa Citta || 1	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN CITTA
	KECAMATAN GANRA						**1.716.076.821,00**							**2.834.440.791,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.716.076.821,00**							**2.834.440.791,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**1.716.076.821,00**							**2.834.440.791,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.714.876.821,00**							**2.505.916.337,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***1.714.876.821,00***							***2.278.916.337,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Ganra	100 %		100 %	100 %	1.714.876.821,00						100 %	2.278.916.337,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.569.823.221,00					-		1.624.416.337,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.569.823.221,00					-		1.624.416.337,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		17 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.569.823.221,00						30 Orang/bulan	1.605.416.337,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.569.823.221,00							1.605.416.337,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		17 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.569.823.221,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		30 Orang/bulan	1.605.416.337,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						26.800.000,00					-		166.500.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						26.800.000,00					-		166.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	105.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.400.000,00						4 Paket	5.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.400.000,00						2 Paket	12.500.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.400.000,00							12.500.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	2.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Ganra || Desa Ganra || 1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	12.500.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						4.400.000,00							5.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Ganra || Desa Ganra || 1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.000.000,00							105.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Ganra || Desa Ganra || 1	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	105.000.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.253.600,00					-		132.000.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						99.253.600,00					-		132.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	39.000.000,00						12 Laporan	80.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.253.600,00						12 Laporan	52.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						39.000.000,00							80.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	39.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Ganra || Desa Ganra || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						60.253.600,00							52.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.253.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Ganra || Desa Ganra || 1	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	52.000.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.000.000,00					-		156.000.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik						19.000.000,00					-		156.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	2 Unit		2 Unit	2 Unit	3.273.700,00						2 Unit	7.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.726.300,00						1 Unit	50.000.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						15.726.300,00							50.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.726.300,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Ganra || Desa Ganra || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.273.700,00							7.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	3.273.700,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Ganra || Desa Ganra || 1	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Unit	7.000.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**300.000,00**							**88.448.892,00**	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						***150.000,00***							***66.336.669,00***	
		999.Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra	100 %		100 %	100 %	150.000,00						100 %	66.336.669,00	
		999.Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra	100 %		100 %	100 %	150.000,00						100 %	66.336.669,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						300.000,00					-		44.224.446,00	
	Persentase pelayanan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Ganra						300.000,00					-		44.224.446,00	
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	22.112.223,00	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000,00						12 Laporan	22.112.223,00	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						150.000,00							22.112.223,00	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen	100 Dokumen	150.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Ganra || Desa Ganra || 1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan		12 Dokumen	22.112.223,00	KECAMATAN GANRA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											ketahanan daerah terhadap bencana				
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						150.000,00							22.112.223,00	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	100 Laporan	150.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Ganra || Desa Ganra || 1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	22.112.223,00	KECAMATAN GANRA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**300.000,00**							**50.542.224,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan						***300.000,00***							***50.542.224,00***	
		999.Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Ganra	100 %		100 %	100 %	300.000,00						100 %	50.542.224,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						300.000,00					-		50.542.224,00	
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa						300.000,00					-		50.542.224,00	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000,00						4 Laporan	50.542.224,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						300.000,00							50.542.224,00	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Ganra || Desa Ganra || 1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Laporan	50.542.224,00	KECAMATAN GANRA
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**300.000,00**							**107.402.225,00**	
	Terciptanya lingkungan yang tentram dan tertib						***300.000,00***							***107.402.225,00***	
		1.Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra	100 %		100 %	100 %	300.000,00						100 %	107.402.225,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						300.000,00					-		107.402.225,00	
	Persentase koordinasi yang terlaksana dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						300.000,00					-		107.402.225,00	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000,00						4 Laporan	107.402.225,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						300.000,00							107.402.225,00	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang		4 Laporan	107.402.225,00	KECAMATAN GANRA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						Soppeng || Kecamatan Ganra || Desa Ganra || 1			efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**300.000,00**							**82.131.113,00**	
	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pengawasan di desa						***300.000,00***							***82.131.113,00***	
		1.Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Ganra	100 %		100 %	100 %	300.000,00						100 %	82.131.113,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						300.000,00					-		82.131.113,00	
	Persentase Fasilitasi Rekomendasi Hasil Pembinaan Pemerintahan Desa yang di tindak lanjuti						300.000,00					-		82.131.113,00	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	300.000,00						48 Dokumen	82.131.113,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						300.000,00							82.131.113,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48 Dokumen		48 Dokumen	60 Dokumen	300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Ganra || Desa Ganra || 1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		48 Dokumen	82.131.113,00	KECAMATAN GANRA
	KECAMATAN DONRI-DONRI						**1.564.852.531,00**							**2.453.252.754,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.564.852.531,00**							**2.453.252.754,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**1.564.852.531,00**							**2.453.252.754,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.562.252.531,00**							**2.086.821.632,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***1.562.252.531,00***							***1.995.021.632,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Donri-Donri	100 %		100 %	100 %	1.562.252.531,00						100 %	1.995.021.632,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.429.598.931,00					-		1.621.666.632,00	
	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan						1.429.598.931,00					-		1.621.666.632,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.429.598.931,00						20 Orang/bulan	1.617.466.632,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.429.598.931,00							1.617.466.632,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.429.598.931,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		20 Orang/bulan	1.617.466.632,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						29.400.000,00					-		68.300.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						29.400.000,00					-		68.300.000,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00						4 Laporan	1.500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan		120 Laporan	135 Laporan	20.000.000,00						140 Laporan	40.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	6.800.000,00						5 Paket	15.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	600.000,00						3 Paket	3.500.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						600.000,00							3.500.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	600.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		3 Paket	3.500.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.800.000,00							15.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	6.800.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.000.000,00							1.500.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		4 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.000.000,00							40.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan		120 Laporan	140 Laporan	20.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		140 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						84.253.600,00					-		90.500.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						84.253.600,00					-		90.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.400.000,00						12 Laporan	25.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	59.853.600,00						12 Laporan	65.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.400.000,00							25.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.400.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	25.500.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						59.853.600,00							65.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	59.853.600,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	65.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.000.000,00					-		36.655.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik						19.000.000,00					-		36.655.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		2 Unit	2 Unit	3.425.000,00						3 Unit	6.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.575.000,00						1 Unit	20.000.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						15.575.000,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.575.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.425.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		2 Unit	2 Unit	3.425.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		3 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**600.000,00**							**88.448.892,00**	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						***300.000,00***							***88.448.892,00***	
		1.Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri	100 %		100 %	100 %	300.000,00						100 %	88.448.892,00	
		1.Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Donri-Donri	100 %		100 %	100 %	300.000,00						100 %	88.448.892,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						600.000,00					-		44.224.446,00	
	Persentase pelayanan yang telah dilaksanakan						600.000,00					-		44.224.446,00	
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	150 Dokumen		120 Dokumen	125 Dokumen	300.000,00						130 Dokumen	17.689.778,00	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000,00						4 Laporan	26.534.668,00	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						300.000,00							17.689.778,00	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	150 Dokumen		120 Dokumen	100 Dokumen	300.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		130 Dokumen	17.689.778,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						300.000,00							26.534.668,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Laporan	26.534.668,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**600.000,00**							**69.495.558,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan Kelurahan						***600.000,00***							***34.747.779,00***	
		1.Persentase fasilitasi tata kelola desa	100 %		100 %	100 %	600.000,00						100 %	34.747.779,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						600.000,00					-		69.495.558,00	
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa						600.000,00					-		69.495.558,00	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	600.000,00						2 Laporan	34.747.779,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						600.000,00							34.747.779,00	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	600.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Laporan	34.747.779,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**600.000,00**							**107.402.225,00**	
	Terciptanya Lingkungan yang Tentram dan Tertib						***600.000,00***							***107.402.225,00***	
		1.Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri	100 %		100 %	100 %	600.000,00						100 %	107.402.225,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						600.000,00					-		107.402.225,00	
	Persentase koordinasi yang terlaksana dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						600.000,00					-		107.402.225,00	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	600.000,00						4 Laporan	107.402.225,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						600.000,00							107.402.225,00	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	600.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga		4 Laporan	107.402.225,00	KECAMATAN DONRI-DONRI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**800.000,00**							**101.084.447,00**	
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pengawasan di Desa						***800.000,00***							***101.084.447,00***	
		1.Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Donri-Donri	100 %		100 %	100 %	800.000,00						100 %	101.084.447,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						800.000,00					-		101.084.447,00	
	Persentase Fasilitasi Rekomendasi Hasil Pembinaan Pemerintahan Desa yang ditindak lanjuti						800.000,00					-		101.084.447,00	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	198 Dokumen		198 Dokumen	198 Dokumen	800.000,00						198 Dokumen	101.084.447,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						800.000,00							101.084.447,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	198 Dokumen		198 Dokumen	198 Dokumen	800.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		198 Dokumen	101.084.447,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
	KECAMATAN MARIORIAWA						**3.970.599.931,00**							**5.809.449.057,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.970.599.931,00**							**5.809.449.057,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**3.970.599.931,00**							**5.809.449.057,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.075.796.846,00**							**5.978.968.037,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***3.970.599.931,00***							***5.179.908.337,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa	100 %		100 %	100 %	3.970.599.931,00						100 %	5.179.908.337,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.681.995.646,00					Kecamatan Marioriawa		3.750.205.704,00	
	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.681.995.646,00					Kecamatan Marioriawa		3.750.205.704,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan		52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	3.681.995.646,00						52 Orang/bulan	3.740.005.704,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.681.995.646,00							3.740.005.704,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan		52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	3.681.995.646,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		52 Orang/bulan	3.740.005.704,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						48.000.000,00					Kecamatan Marioriawa		678.199.039,00	
	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						48.000.000,00					Kecamatan Marioriawa		678.199.039,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan		1500 Laporan	1500 Laporan	27.500.000,00						1500 Laporan	227.225.481,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	20.500.000,00						5 Paket	241.109.308,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						8.000.000,00							151.109.608,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	8.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5 Paket	151.109.608,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.000.000,00							145.865.481,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan		1500 Laporan	95 Laporan	20.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1500 Laporan	145.865.481,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						317.001.200,00					Kecamatan Marioriawa		377.431.098,00	
	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						317.001.200,00					Kecamatan Marioriawa		377.431.098,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	124.650.000,00						12 Laporan	142.891.098,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	192.351.200,00						12 Laporan	234.540.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						69.448.085,00							67.891.098,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	69.448.085,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	67.891.098,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						167.351.200,00							204.540.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	167.351.200,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	204.540.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						28.800.000,00					Kecamatan Marioriawa		266.882.196,00	
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara dengan Baik						28.800.000,00					Kecamatan Marioriawa		266.882.196,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	7.395.000,00						2 Unit	47.768.500,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	21.405.000,00						1 Unit	56.913.696,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						21.405.000,00							56.913.696,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	21.405.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Unit	56.913.696,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.400.000,00							17.768.500,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.400.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Unit	17.768.500,00	KECAMATAN MARIORIAWA
	Kelurahan Batu-Batu						**343.834.805,00**							**587.308.981,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**343.834.805,00**							**587.308.981,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**343.834.805,00**							**587.308.981,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.075.796.846,00**							**5.978.968.037,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***23.774.805,00***							***84.550.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa	100 %		100 %	100 %	23.774.805,00						100 %	84.550.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.681.995.646,00					Kelurahan Batu Batu		3.750.205.704,00	
	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.681.995.646,00					Kelurahan Batu Batu		3.750.205.704,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						48.000.000,00					Kelurahan Batu Batu		678.199.039,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						48.000.000,00					Kelurahan Batu Batu		678.199.039,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan		1500 Laporan	1500 Laporan	27.500.000,00						1500 Laporan	227.225.481,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	20.500.000,00						5 Paket	241.109.308,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							22.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	2.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Batu Batu || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5 Paket	22.000.000,00	Kelurahan Batu-Batu
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							20.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan		1500 Laporan	8 Laporan	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1500 Laporan	20.000.000,00	Kelurahan Batu-Batu
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						317.001.200,00					Kelurahan Batu Batu		377.431.098,00	
	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						317.001.200,00					Kelurahan Batu Batu		377.431.098,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	124.650.000,00						12 Laporan	142.891.098,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	192.351.200,00						12 Laporan	234.540.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.775.805,00							15.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.775.805,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Batu Batu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	15.000.000,00	Kelurahan Batu-Batu
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa ||	Opsen PKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		12 Laporan	6.000.000,00	Kelurahan Batu-Batu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kelurahan Batu Batu || 0		olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	produktivitas dan daya saing daerah				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						28.800.000,00					Kelurahan Batu Batu		266.882.196,00	
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara dengan Baik						28.800.000,00					Kelurahan Batu Batu		266.882.196,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	7.395.000,00						2 Unit	47.768.500,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						999.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	999.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Batu Batu || 0	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Unit	6.000.000,00	Kelurahan Batu-Batu
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.697.380.000,00**							**2.226.876.789,00**	
	Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan						***320.060.000,00***							***476.258.981,00***	
		1.Persentase fasilitasi tata kelola desa	100 %		100 %	100 %	320.060.000,00						100 %	476.258.981,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.697.380.000,00					Kelurahan Batu Batu		2.181.136.077,00	
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan						1.697.380.000,00					Kelurahan Batu Batu		2.181.136.077,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	697.380.000,00						7 Pokmas / Ormas	1.016.136.536,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00						10 Unit	1.164.999.541,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							254.999.847,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Batu Batu || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		10 Unit	254.999.847,00	Kelurahan Batu-Batu
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						120.060.000,00							221.259.134,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	120.060.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa ||	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		7 Pokmas / Ormas	221.259.134,00	Kelurahan Batu-Batu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kelurahan Batu Batu || 0		peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	produktivitas dan daya saing daerah				
	Kelurahan Kaca						**349.437.730,00**							**386.459.700,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**349.437.730,00**							**386.459.700,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**349.437.730,00**							**386.459.700,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.075.796.846,00**							**5.978.968.037,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***18.337.730,00***							***39.359.700,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa	100 %		100 %	100 %	18.337.730,00						100 %	39.359.700,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						48.000.000,00					-		678.199.039,00	
	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						48.000.000,00					-		678.199.039,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan		1500 Laporan	1500 Laporan	27.500.000,00						1500 Laporan	227.225.481,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	20.500.000,00						5 Paket	241.109.308,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							1.999.700,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	2.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Kaca || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5 Paket	1.999.700,00	Kelurahan Kaca
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							1.360.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan		1500 Laporan	8 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Kaca || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1500 Laporan	1.360.000,00	Kelurahan Kaca
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						317.001.200,00					-		377.431.098,00	
	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						317.001.200,00					-		377.431.098,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	124.650.000,00						12 Laporan	142.891.098,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	192.351.200,00						12 Laporan	234.540.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.338.730,00							15.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.338.730,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Kaca || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	15.000.000,00	Kelurahan Kaca
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Kaca || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	6.000.000,00	Kelurahan Kaca

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						28.800.000,00					-		266.882.196,00	
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara dengan Baik						28.800.000,00					-		266.882.196,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	7.395.000,00						2 Unit	47.768.500,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						999.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	999.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Kaca || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Unit	6.000.000,00	Kelurahan Kaca
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.697.380.000,00**							**2.226.876.789,00**	
	Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan						***331.100.000,00***							***331.100.000,00***	
		1.Persentase fasilitasi tata kelola desa	100 %		100 %	100 %	331.100.000,00						100 %	331.100.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.697.380.000,00					-		2.181.136.077,00	
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan						1.697.380.000,00					-		2.181.136.077,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	697.380.000,00						7 Pokmas / Ormas	1.016.136.536,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00						10 Unit	1.164.999.541,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							200.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Kaca || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		10 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Kaca
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						131.100.000,00							131.100.000,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	131.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Kaca || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		7 Pokmas / Ormas	131.100.000,00	Kelurahan Kaca
	Kelurahan Attangsalo						**331.366.805,00**							**532.309.134,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**331.366.805,00**							**532.309.134,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**331.366.805,00**							**532.309.134,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.075.796.846,00**							**5.978.968.037,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***19.826.805,00***							***84.550.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa	100 %		100 %	100 %	19.826.805,00						100 %	84.550.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						48.000.000,00					-		678.199.039,00	
	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						48.000.000,00					-		678.199.039,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan		1500 Laporan	1500 Laporan	27.500.000,00						1500 Laporan	227.225.481,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	20.500.000,00						5 Paket	241.109.308,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							22.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	2.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Attang Salo || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5 Paket	22.000.000,00	Kelurahan Attangsalo
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							20.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan		1500 Laporan	100 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Attang Salo || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1500 Laporan	20.000.000,00	Kelurahan Attangsalo
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						317.001.200,00					-		377.431.098,00	
	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						317.001.200,00					-		377.431.098,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	124.650.000,00						12 Laporan	142.891.098,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	192.351.200,00						12 Laporan	234.540.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.827.805,00							15.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.827.805,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Attang Salo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	15.000.000,00	Kelurahan Attangsalo
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Attang Salo || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	6.000.000,00	Kelurahan Attangsalo
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						28.800.000,00					-		266.882.196,00	
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara dengan Baik						28.800.000,00					-		266.882.196,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	7.395.000,00						2 Unit	47.768.500,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						999.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	999.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Attang Salo || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Unit	6.000.000,00	Kelurahan Attangsalo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.697.380.000,00**							**2.226.876.789,00**	
	Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan						***311.540.000,00***							***421.259.134,00***	
		1.Persentase fasilitasi tata kelola desa	100 %		100 %	100 %	311.540.000,00						100 %	421.259.134,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.697.380.000,00					-		2.181.136.077,00	
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan						1.697.380.000,00					-		2.181.136.077,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	697.380.000,00						7 Pokmas / Ormas	1.016.136.536,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00						10 Unit	1.164.999.541,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							200.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Attang Salo || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		10 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Attangsalo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						111.540.000,00							221.259.134,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	111.540.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Attang Salo || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		7 Pokmas / Ormas	221.259.134,00	Kelurahan Attangsalo
	Kelurahan Manorangsalo						**420.945.020,00**							**587.308.981,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**420.945.020,00**							**587.308.981,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**420.945.020,00**							**587.308.981,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.075.796.846,00**							**5.978.968.037,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***18.085.020,00***							***84.550.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa	100 %		100 %	100 %	18.085.020,00						100 %	84.550.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						48.000.000,00					-		678.199.039,00	
	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						48.000.000,00					-		678.199.039,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan		1500 Laporan	1500 Laporan	27.500.000,00						1500 Laporan	227.225.481,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	20.500.000,00						5 Paket	241.109.308,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							22.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	2.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Manorang Salo || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5 Paket	22.000.000,00	Kelurahan Manorangsalo
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							20.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan		1500 Laporan	8 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung		1500 Laporan	20.000.000,00	Kelurahan Manorangsalo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Manorang Salo || 0			produktivitas dan daya saing daerah				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						317.001.200,00					-		377.431.098,00	
	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						317.001.200,00					-		377.431.098,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	124.650.000,00						12 Laporan	142.891.098,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	192.351.200,00						12 Laporan	234.540.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.086.020,00							15.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.086.020,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Manorang Salo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	15.000.000,00	Kelurahan Manorangsalo
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Manorang Salo || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	6.000.000,00	Kelurahan Manorangsalo
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						28.800.000,00					-		266.882.196,00	
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara dengan Baik						28.800.000,00					-		266.882.196,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	7.395.000,00						2 Unit	47.768.500,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						999.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	999.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Manorang Salo || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Unit	6.000.000,00	Kelurahan Manorangsalo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.697.380.000,00**							**2.226.876.789,00**	
	Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan						***402.860.000,00***							***476.258.981,00***	
		1.Persentase fasilitasi tata kelola desa	100 %		100 %	100 %	402.860.000,00						100 %	476.258.981,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.697.380.000,00					-		2.181.136.077,00	
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan						1.697.380.000,00					-		2.181.136.077,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	697.380.000,00						7 Pokmas / Ormas	1.016.136.536,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00						10 Unit	1.164.999.541,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							254.999.847,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Manorang Salo || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		10 Unit	254.999.847,00	Kelurahan Manorangsalo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						202.860.000,00							221.259.134,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	202.860.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Manorang Salo || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		7 Pokmas / Ormas	221.259.134,00	Kelurahan Manorangsalo
	Kelurahan Limpomajang						**356.992.555,00**							**587.308.981,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**356.992.555,00**							**587.308.981,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**356.992.555,00**							**587.308.981,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.075.796.846,00**							**5.978.968.037,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***25.172.555,00***							***84.550.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa	100 %		100 %	100 %	25.172.555,00						100 %	84.550.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						48.000.000,00					-		678.199.039,00	
	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						48.000.000,00					-		678.199.039,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan		1500 Laporan	1500 Laporan	27.500.000,00						1500 Laporan	227.225.481,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	20.500.000,00						5 Paket	241.109.308,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							22.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	2.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriawa || Kelurahan Limpomajang || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		5 Paket	22.000.000,00	Kelurahan Limpomajang
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							20.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan		1500 Laporan	8 Laporan	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1500 Laporan	20.000.000,00	Kelurahan Limpomajang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						317.001.200,00					-		377.431.098,00	
	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						317.001.200,00					-		377.431.098,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	124.650.000,00						12 Laporan	142.891.098,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	192.351.200,00						12 Laporan	234.540.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.173.555,00							15.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.173.555,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan		12 Laporan	15.000.000,00	Kelurahan Limpomajang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kecamatan Mariorіawa || Kelurahan Limpomajang || 0			masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Mariorіawa || Kelurahan Limpomajang || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	6.000.000,00	Kelurahan Limpomajang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						28.800.000,00					-		266.882.196,00	
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara dengan Baik						28.800.000,00					-		266.882.196,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	7.395.000,00						2 Unit	47.768.500,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						999.000,00							6.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	999.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Mariorіawa || Kelurahan Limpomajang || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Unit	6.000.000,00	Kelurahan Limpomajang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.697.380.000,00**							**2.226.876.789,00**	
	Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan						***331.820.000,00***							***476.258.981,00***	
		1.Persentase fasilitasi tata kelola desa	100 %		100 %	100 %	331.820.000,00						100 %	476.258.981,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.697.380.000,00					-		2.181.136.077,00	
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan						1.697.380.000,00					-		2.181.136.077,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	697.380.000,00						7 Pokmas / Ormas	1.016.136.536,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00						10 Unit	1.164.999.541,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							254.999.847,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		10 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Mariorіawa || Kelurahan Limpomajang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		10 Unit	254.999.847,00	Kelurahan Limpomajang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						131.820.000,00							221.259.134,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	131.820.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Mariorіawa || Kelurahan	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		7 Pokmas / Ormas	221.259.134,00	Kelurahan Limpomajang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Limpomajang || 0							
	KECAMATAN LILIRIAJA						**3.026.517.869,00**							**3.676.280.008,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.026.517.869,00**							**3.676.280.008,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**3.026.517.869,00**							**3.676.280.008,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.075.620.169,00**							**3.490.150.000,00**	
	Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan						***3.021.515.869,00***							***3.236.980.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja	100 %		100 %	100 %	3.021.515.869,00						100 %	3.236.980.000,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.503.000,00					-		15.000.000,00	
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun tepat waktu						1.503.000,00					-		15.000.000,00	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	501.000,00						2 Dokumen	5.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	501.000,00						2 Dokumen	5.000.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	501.000,00						27 Laporan	5.000.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						501.000,00							5.000.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	501.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						501.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	501.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						501.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	501.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		27 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.691.440.569,00					-		2.858.500.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.691.440.569,00					-		2.858.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	250.000,00						32 Dokumen	3.500.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		38 Orang/bulan	40 Orang/bulan	2.690.690.569,00						40 Orang/bulan	2.850.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.690.690.569,00							2.850.000.000,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		38 Orang/bulan	40 Orang/bulan	2.690.690.569,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		40 Orang/bulan	2.850.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						250.000,00							3.500.000,00	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32 Dokumen		32 Dokumen	24 Dokumen	250.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		32 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						500.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	18 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.747.000,00					-		232.500.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.747.000,00					-		232.500.000,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.300.000,00						12 Laporan	7.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.500.000,00						12 Laporan	95.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.700.000,00						2 Paket	20.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.997.000,00						4 Paket	80.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.250.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.700.000,00							14.000.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	2.700.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		2 Paket	14.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						750.000,00							21.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	750.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Paket	21.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						4.997.000,00							50.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	4.997.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		4 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.300.000,00							3.000.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja ||	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah		12 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kelurahan Appanang || 0			dan aktivitas ekonomi				
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.000.000,00							65.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		12 Laporan	65.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						310.629.600,00					-		260.600.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						310.629.600,00					-		260.600.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	72.620.000,00						12 Laporan	65.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	238.009.600,00						Laporan	195.600.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						47.017.700,00							50.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	47.017.700,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		12 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						225.009.600,00							180.600.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	225.009.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		Laporan	180.600.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27.300.000,00					-		45.550.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik						27.300.000,00					-		45.550.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	500.000,00						11 Unit	5.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.800.000,00						1 Unit	30.000.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						26.800.000,00							30.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						500.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	3 Unit	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng ||	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung		11 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0			konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi				
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.500.000,00**							**88.448.892,00**	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						***500.000,00***							***66.336.669,00***	
		1.Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja	100 %		100 %	100 %	500.000,00						100 %	66.336.669,00	
		2.Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Liliriaja	100 %		100 %	100 %	500.000,00						100 %	66.336.669,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						500.000,00					-		44.224.446,00	
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						500.000,00					-		44.224.446,00	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00						1 Laporan	44.224.446,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						500.000,00							44.224.446,00	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	Opsen PKB	-	-		1 Laporan	44.224.446,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.000.000,00					-		44.224.446,00	
	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan						1.000.000,00					-		44.224.446,00	
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00						12 Dokumen	22.112.223,00	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	Laporan	500.000,00						12 Laporan	22.112.223,00	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						500.000,00							22.112.223,00	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		12 Dokumen	22.112.223,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						500.000,00							22.112.223,00	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	-		12 Laporan	22.112.223,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.164.640.000,00**							**1.529.425.479,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan Kelurahan						***1.000.000,00***							***35.000.000,00***	
		1.Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja	100 %		100 %	100 %	1.000.000,00						100 %	35.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.000.000,00					-		35.000.000,00	
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa						1.000.000,00					-		35.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
										NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	1.000.000,00						100 Laporan	35.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							35.000.000,00	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Laporan		100 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	-		100 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**500.000,00**							**107.402.225,00**	
	Terciptanya lingkungan yang tentram dan tertib						***500.000,00***							***107.402.225,00***	
		1.Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja	100 %		100 %	100 %	500.000,00						100 %	107.402.225,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						500.000,00					-		107.402.225,00	
	Persentase koordinasi yang terlaksana dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						500.000,00					-		107.402.225,00	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	500.000,00						Laporan	107.402.225,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						500.000,00							107.402.225,00	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		Laporan	107.402.225,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**500.000,00**							**88.448.891,00**	
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pengawasan di Desa						***500.000,00***							***88.448.891,00***	
		1.Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Liliriaja	100 %		100 %	100 %	500.000,00						100 %	88.448.891,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						500.000,00					-		88.448.891,00	
	Persentase fasilitasi rekomendasi hasil pembinaan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti						500.000,00					-		88.448.891,00	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	500.000,00						Dokumen	88.448.891,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						500.000,00							88.448.891,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		Dokumen	88.448.891,00	KECAMATAN LILIRIAJA
	Kelurahan Appanang						**434.374.100,00**							**563.215.479,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**434.374.100,00**							**563.215.479,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**434.374.100,00**							**563.215.479,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.075.620.169,00**							**3.490.150.000,00**	
	Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan						***17.534.100,00***							***29.390.000,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja	100 %		100 %	100 %	17.534.100,00						100 %	29.390.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.747.000,00					-		232.500.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.747.000,00					-		232.500.000,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.300.000,00						12 Laporan	7.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.500.000,00						12 Laporan	95.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.700.000,00						2 Paket	20.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.997.000,00						4 Paket	80.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.250.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						500.000,00							3.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Paket	3.000.000,00	Kelurahan Appanang
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.000.000,00							10.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		4 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Appanang
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							10.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		12 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Appanang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						310.629.600,00					-		260.600.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						310.629.600,00					-		260.600.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	72.620.000,00						12 Laporan	65.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	238.009.600,00						Laporan	195.600.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.534.100,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.534.100,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		12 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Appanang
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah		Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Appanang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Liliraja || Kelurahan Appanang || 0			dan aktivitas ekonomi				
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.164.640.000,00**							**1.529.425.479,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan Kelurahan						***416.840.000,00***							***518.825.479,00***	
		1.Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja	100 %		100 %	100 %	416.840.000,00						100 %	518.825.479,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.163.640.000,00					-		1.494.425.479,00	
	Persentase Kegiatan pemberdayaan Desa yang terlaksana						1.163.640.000,00					-		1.494.425.479,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	563.640.000,00						6 Pokmas / Ormas	594.425.479,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	6 Unit	600.000.000,00						6 Unit	900.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							300.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		6 Unit	300.000.000,00	Kelurahan Appanang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						216.840.000,00							218.825.479,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	216.840.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Appanang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		6 Pokmas / Ormas	218.825.479,00	Kelurahan Appanang
	Kelurahan Galung						**354.034.100,00**							**509.690.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**354.034.100,00**							**509.690.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**354.034.100,00**							**509.690.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.075.620.169,00**							**3.490.150.000,00**	
	Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan						***17.534.100,00***							***29.390.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja	100 %		100 %	100 %	17.534.100,00						100 %	29.390.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.747.000,00					-		232.500.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.747.000,00					-		232.500.000,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.300.000,00						12 Laporan	7.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.500.000,00						12 Laporan	95.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.700.000,00						2 Paket	20.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.997.000,00						4 Paket	80.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.250.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						500.000,00							3.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja ||	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Paket	3.000.000,00	Kelurahan Galung

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kelurahan Galung || 0							
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.000.000,00							10.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Galung || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		4 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Galung
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							10.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Galung || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		12 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Galung
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						310.629.600,00					-		260.600.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						310.629.600,00					-		260.600.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	72.620.000,00						12 Laporan	65.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	238.009.600,00						Laporan	195.600.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.534.100,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.534.100,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Galung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		12 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Galung
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Galung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Galung
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.164.640.000,00**							**1.529.425.479,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan Kelurahan						***336.500.000,00***							***465.300.000,00***	
		1.Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja	100 %		100 %	100 %	336.500.000,00						100 %	465.300.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.163.640.000,00					-		1.494.425.479,00	
	Persentase Kegiatan pemberdayaan Desa yang terlaksana						1.163.640.000,00					-		1.494.425.479,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	563.640.000,00						6 Pokmas / Ormas	594.425.479,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	6 Unit	600.000.000,00						6 Unit	900.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							300.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja ||	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah		6 Unit	300.000.000,00	Kelurahan Galung

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kelurahan Galung || 0			dan aktivitas ekonomi				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						136.500.000,00							165.300.000,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	136.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Galung || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		6 Pokmas / Ormas	165.300.000,00	Kelurahan Galung
	Kelurahan JennaE						**427.834.100,00**							**554.690.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**427.834.100,00**							**554.690.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**427.834.100,00**							**554.690.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.075.620.169,00**							**3.490.150.000,00**	
	Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan						***15.534.100,00***							***29.390.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja	100 %		100 %	100 %	15.534.100,00						100 %	29.390.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.747.000,00					-		232.500.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.747.000,00					-		232.500.000,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.300.000,00						12 Laporan	7.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.500.000,00						12 Laporan	95.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.700.000,00						2 Paket	20.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.997.000,00						4 Paket	80.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.250.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						500.000,00							3.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Jennae || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		1 Paket	3.000.000,00	Kelurahan JennaE
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.000.000,00							10.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Jennae || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		4 Paket	10.000.000,00	Kelurahan JennaE
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.000.000,00							1.500.000,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Jennae || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		12 Laporan	1.500.000,00	Kelurahan JennaE
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							10.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja ||	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		12 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan JennaE

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kelurahan Jennae || 0							
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						310.629.600,00					-		260.600.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah						310.629.600,00					-		260.600.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	72.620.000,00						12 Laporan	65.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	238.009.600,00						Laporan	195.600.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.534.100,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.534.100,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Jennae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		12 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan JennaE
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.000.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Jennae || 0	Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		Laporan	5.000.000,00	Kelurahan JennaE
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.164.640.000,00**							**1.529.425.479,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan Kelurahan						***410.300.000,00***							***510.300.000,00***	
		1.Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja	100 %		100 %	100 %	410.300.000,00						100 %	510.300.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.163.640.000,00					-		1.494.425.479,00	
	Persentase Kegiatan pemberdayaan Desa yang terlaksana						1.163.640.000,00					-		1.494.425.479,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	563.640.000,00						6 Pokmas / Ormas	594.425.479,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	6 Unit	600.000.000,00						6 Unit	900.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							300.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Jennae || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		6 Unit	300.000.000,00	Kelurahan JennaE
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						210.300.000,00							210.300.000,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	210.300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Liliraja || Kelurahan Jennae || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi		6 Pokmas / Ormas	210.300.000,00	Kelurahan JennaE
	KECAMATAN LALABATA						**6.528.936.880,00**							**7.687.303.325,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.528.936.880,00**							**7.687.303.325,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**6.528.936.880,00**							**7.687.303.325,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.670.637.516,00**							**7.788.774.431,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***6.528.936.880,00***							***7.398.274.431,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100 %		100 %	100 %	6.528.936.880,00						100 %	7.398.274.431,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.024.503.616,00					-		6.529.439.112,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.024.503.616,00					-		6.529.439.112,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.111.700,00						10 Dokumen	15.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan		75 Orang/bulan	77 Orang/bulan	6.023.391.916,00						79 Orang/bulan	6.514.439.112,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.023.391.916,00							6.514.439.112,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan		75 Orang/bulan	77 Orang/bulan	6.023.391.916,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		79 Orang/bulan	6.514.439.112,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.111.700,00							15.000.000,00	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.111.700,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		10 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi Umum perangkat daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.500.000,00						12 Laporan	160.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	19.584.900,00						4 Paket	307.935.319,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.803.400,00						2 Paket	50.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.888.300,00							167.935.319,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.888.300,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Paket	167.935.319,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.000.000,00							90.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng ||	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan,		12 Laporan	90.000.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0			akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.600.000,00						12 Laporan	155.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	442.845.600,00						12 Laporan	506.400.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						53.861.364,00							70.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	53.861.364,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	70.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						407.845.600,00							471.400.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	407.845.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	Opsen PKB Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	471.400.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.800.000,00					-		73.000.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik						26.800.000,00					-		73.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	12.169.500,00						7 Unit	16.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	14.630.500,00						1 Unit	57.000.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						14.630.500,00							57.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	14.630.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan		1 Unit	57.000.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.207.500,00							5.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	2 Unit	1.207.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	5.500.000,00	KECAMATAN LALABATA
	Kelurahan Lalabata Rilau						**517.022.000,00**							**561.768.464,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**517.022.000,00**							**561.768.464,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**517.022.000,00**							**561.768.464,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.670.637.516,00**							**7.788.774.431,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***18.602.000,00***							***48.642.858,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100 %		100 %	100 %	18.602.000,00						100 %	48.642.858,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi Umum perangkat daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.500.000,00						12 Laporan	160.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	19.584.900,00						4 Paket	307.935.319,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.803.400,00						2 Paket	50.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						686.200,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	686.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	5.000.000,00	Kelurahan Lalabata Rilau
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.813.800,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	1.813.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Paket	20.000.000,00	Kelurahan Lalabata Rilau
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							10.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Lalabata Rilau
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.600.000,00						12 Laporan	155.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	442.845.600,00						12 Laporan	506.400.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.036.000,00							12.142.858,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.036.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	12.142.858,00	Kelurahan Lalabata Rilau
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Opsen PKB	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		12 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Lalabata Rilau
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.800.000,00					-		73.000.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik						26.800.000,00					-		73.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	12.169.500,00						7 Unit	16.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.566.000,00							1.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	1 Unit	1.566.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	1.500.000,00	Kelurahan Lalabata Rilau

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.828.700.000,00**							**2.911.639.218,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan						***498.420.000,00***							***508.125.606,00***	
		1.Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100 %		100 %	100 %	498.420.000,00						100 %	508.125.606,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.828.700.000,00					-		2.896.639.218,00	
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan						2.828.700.000,00					-		2.896.639.218,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.428.700.000,00						7 Pokmas / Ormas	1.496.639.218,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.400.000.000,00						7 Unit	1.400.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							200.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Lalabata Rilau
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						298.420.000,00							308.125.606,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	298.420.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Pokmas / Ormas	308.125.606,00	Kelurahan Lalabata Rilau
	Kelurahan Ompo						**359.164.900,00**							**399.528.460,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**359.164.900,00**							**399.528.460,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**359.164.900,00**							**399.528.460,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.670.637.516,00**							**7.788.774.431,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***22.984.900,00***							***48.642.858,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100 %		100 %	100 %	22.984.900,00						100 %	48.642.858,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi Umum perangkat daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.500.000,00						12 Laporan	160.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	19.584.900,00						4 Paket	307.935.319,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.803.400,00						2 Paket	50.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						686.200,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	686.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata ||	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik		2 Paket	5.000.000,00	Kelurahan Ompo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kelurahan Ompo || 0			yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.813.800,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	1.813.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Ompo || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Paket	20.000.000,00	Kelurahan Ompo
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							10.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Ompo || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Ompo
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.600.000,00						12 Laporan	155.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	442.845.600,00						12 Laporan	506.400.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.418.900,00							12.142.858,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.418.900,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Ompo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	12.142.858,00	Kelurahan Ompo
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Ompo || 0	Opsen PKB	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		12 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Ompo
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.800.000,00					-		73.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik						26.800.000,00					-		73.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	12.169.500,00						7 Unit	16.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.566.000,00							1.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	1 Unit	1.566.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Ompo || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	1.500.000,00	Kelurahan Ompo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.828.700.000,00**							**2.911.639.218,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan						***336.180.000,00***							***345.885.602,00***	
		1.Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100 %		100 %	100 %	336.180.000,00						100 %	345.885.602,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.828.700.000,00					-		2.896.639.218,00	
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan						2.828.700.000,00					-		2.896.639.218,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.428.700.000,00						7 Pokmas / Ormas	1.496.639.218,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.400.000.000,00						7 Unit	1.400.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							200.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Ompo || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Ompo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						136.180.000,00							145.885.602,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	136.180.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Ompo || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Pokmas / Ormas	145.885.602,00	Kelurahan Ompo
	Kelurahan Botto						**420.528.600,00**							**464.988.460,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**420.528.600,00**							**464.988.460,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**420.528.600,00**							**464.988.460,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.670.637.516,00**							**7.788.774.431,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***18.888.600,00***							***48.642.858,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100 %		100 %	100 %	18.888.600,00						100 %	48.642.858,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi Umum perangkat daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.500.000,00						12 Laporan	160.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	19.584.900,00						4 Paket	307.935.319,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.803.400,00						2 Paket	50.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						686.200,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	686.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	5.000.000,00	Kelurahan Botto
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.813.800,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	1.813.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Paket	20.000.000,00	Kelurahan Botto
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							10.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Botto
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.600.000,00						12 Laporan	155.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	442.845.600,00						12 Laporan	506.400.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.322.600,00							12.142.858,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.322.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab.	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang		12 Laporan	12.142.858,00	Kelurahan Botto

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0			efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	Opsen PKB	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		12 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Botto
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.800.000,00					-		73.000.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik						26.800.000,00					-		73.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	12.169.500,00						7 Unit	16.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.566.000,00							1.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	1 Unit	1.566.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	1.500.000,00	Kelurahan Botto
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.828.700.000,00**							**2.911.639.218,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan						***401.640.000,00***							***411.345.602,00***	
		1.Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100 %		100 %	100 %	401.640.000,00						100 %	411.345.602,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.828.700.000,00					-		2.896.639.218,00	
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan						2.828.700.000,00					-		2.896.639.218,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.428.700.000,00						7 Pokmas / Ormas	1.496.639.218,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.400.000.000,00						7 Unit	1.400.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							200.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan		7 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Botto

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											ketahanan daerah terhadap bencana				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						201.640.000,00							211.345.602,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	201.640.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Pokmas / Ormas	211.345.602,00	Kelurahan Botto
	Kelurahan Lemba						**391.327.000,00**							**429.708.460,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**391.327.000,00**							**429.708.460,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**391.327.000,00**							**429.708.460,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.670.637.516,00**							**7.788.774.431,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***24.967.000,00***							***48.642.858,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100 %		100 %	100 %	24.967.000,00						100 %	48.642.858,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi Umum perangkat daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.500.000,00						12 Laporan	160.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	19.584.900,00						4 Paket	307.935.319,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.803.400,00						2 Paket	50.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						686.200,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	686.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lemba || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	5.000.000,00	Kelurahan Lemba
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.813.800,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	1.813.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lemba || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Paket	20.000.000,00	Kelurahan Lemba
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							10.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata ||	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik		12 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Lemba

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Kelurahan Lemba || 0			yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.600.000,00						12 Laporan	155.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	442.845.600,00						12 Laporan	506.400.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.401.000,00							12.142.858,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.401.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lemba || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	12.142.858,00	Kelurahan Lemba
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lemba || 0	Opsen PKB	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		12 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Lemba
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.800.000,00					-		73.000.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik						26.800.000,00					-		73.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	12.169.500,00						7 Unit	16.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.566.000,00							1.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	1 Unit	1.566.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lemba || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	1.500.000,00	Kelurahan Lemba
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.828.700.000,00**							**2.911.639.218,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan						***366.360.000,00***							***376.065.602,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100 %		100 %	100 %	366.360.000,00						100 %	376.065.602,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.828.700.000,00					-		2.896.639.218,00	
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan						2.828.700.000,00					-		2.896.639.218,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.428.700.000,00						7 Pokmas / Ormas	1.496.639.218,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.400.000.000,00						7 Unit	1.400.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							200.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lemba || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Lemba
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						166.360.000,00							176.065.602,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	166.360.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lemba || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Pokmas / Ormas	176.065.602,00	Kelurahan Lemba
	Kelurahan Bila						**475.250.736,00**							**519.768.460,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**475.250.736,00**							**519.768.460,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**475.250.736,00**							**519.768.460,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.670.637.516,00**							**7.788.774.431,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***18.830.736,00***							***48.642.858,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100 %		100 %	100 %	18.830.736,00						100 %	48.642.858,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi Umum perangkat daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.500.000,00						12 Laporan	160.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	19.584.900,00						4 Paket	307.935.319,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.803.400,00						2 Paket	50.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						686.200,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	686.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Bila || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan		2 Paket	5.000.000,00	Kelurahan Bila

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											ketahanan daerah terhadap bencana				
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.813.800,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	1.813.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Bila || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Paket	20.000.000,00	Kelurahan Bila
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							10.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Bila || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Bila
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.600.000,00						12 Laporan	155.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	442.845.600,00						12 Laporan	506.400.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.264.736,00							12.142.858,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.264.736,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Bila || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	12.142.858,00	Kelurahan Bila
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Bila || 0	Opsen PKB	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		12 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Bila
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.800.000,00					-		73.000.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik						26.800.000,00					-		73.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	7 Unit		7 Unit	7 Unit	12.169.500,00						7 Unit	16.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.566.000,00							1.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	1 Unit	1.566.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Bila || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	1.500.000,00	Kelurahan Bila
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.828.700.000,00**							**2.911.639.218,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan						***456.420.000,00***							***466.125.602,00***	
		1.Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100 %		100 %	100 %	456.420.000,00						100 %	466.125.602,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.828.700.000,00					-		2.896.639.218,00	
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan						2.828.700.000,00					-		2.896.639.218,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.428.700.000,00						7 Pokmas / Ormas	1.496.639.218,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.400.000.000,00						7 Unit	1.400.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							200.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Bila || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Bila
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						256.420.000,00							266.125.602,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	256.420.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Bila || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Pokmas / Ormas	266.125.602,00	Kelurahan Bila
	Kelurahan Lapajung						**444.567.300,00**							**485.388.460,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**444.567.300,00**							**485.388.460,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**444.567.300,00**							**485.388.460,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.670.637.516,00**							**7.788.774.431,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***22.527.300,00***							***48.642.858,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100 %		100 %	100 %	22.527.300,00						100 %	48.642.858,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi Umum perangkat daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.500.000,00						12 Laporan	160.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	19.584.900,00						4 Paket	307.935.319,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.803.400,00						2 Paket	50.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						686.200,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	686.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lapajung || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	5.000.000,00	Kelurahan Lapajung
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.813.800,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	1.813.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lapajung || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Paket	20.000.000,00	Kelurahan Lapajung
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							10.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lapajung || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Lapajung
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.600.000,00						12 Laporan	155.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	442.845.600,00						12 Laporan	506.400.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.961.300,00							12.142.858,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.961.300,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lapajung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga		12 Laporan	12.142.858,00	Kelurahan Lapajung

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lapajung || 0	Opsen PKB	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		12 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Lapajung
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.800.000,00					-		73.000.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik						26.800.000,00					-		73.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	12.169.500,00						7 Unit	16.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.566.000,00							1.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	1 Unit	1.566.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lapajung || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	1.500.000,00	Kelurahan Lapajung
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.828.700.000,00**							**2.911.639.218,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan						***422.040.000,00***							***431.745.602,00***	
		1.Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100 %		100 %	100 %	422.040.000,00						100 %	431.745.602,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.828.700.000,00					-		2.896.639.218,00	
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan						2.828.700.000,00					-		2.896.639.218,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.428.700.000,00						7 Pokmas / Ormas	1.496.639.218,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.400.000.000,00						7 Unit	1.400.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							200.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lapajung || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Lapajung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						222.040.000,00							231.745.602,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	222.040.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lapajung || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Pokmas / Ormas	231.745.602,00	Kelurahan Lapajung
	Kelurahan Salokaraja						**362.540.100,00**							**410.988.454,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**362.540.100,00**							**410.988.454,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**362.540.100,00**							**410.988.454,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.670.637.516,00**							**7.788.774.431,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***14.900.100,00***							***48.642.852,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100 %		100 %	100 %	14.900.100,00						100 %	48.642.852,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
	Persentase Keterpenuhan administrasi Umum perangkat daerah						54.888.300,00					-		517.935.319,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.500.000,00						12 Laporan	160.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	19.584.900,00						4 Paket	307.935.319,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.803.400,00						2 Paket	50.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						686.200,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	686.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Salokaraja || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	5.000.000,00	Kelurahan Salokaraja
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.813.800,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	1.813.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Salokaraja || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Paket	20.000.000,00	Kelurahan Salokaraja
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							10.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Salokaraja || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup		12 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Salokaraja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						564.445.600,00					-		661.400.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.600.000,00						12 Laporan	155.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	442.845.600,00						12 Laporan	506.400.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.334.100,00							12.142.852,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.334.100,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Salokaraja || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	12.142.852,00	Kelurahan Salokaraja
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Salokaraja || 0	Opsen PKB	-	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi unggulan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat		12 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Salokaraja
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.800.000,00					-		73.000.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik						26.800.000,00					-		73.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	12.169.500,00						7 Unit	16.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.566.000,00							1.500.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	1 Unit	1.566.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Salokaraja || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	1.500.000,00	Kelurahan Salokaraja
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.828.700.000,00**							**2.911.639.218,00**	
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan						***347.640.000,00***							***357.345.602,00***	
		1.Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100 %		100 %	100 %	347.640.000,00						100 %	357.345.602,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.828.700.000,00					-		2.896.639.218,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan						2.828.700.000,00					-		2.896.639.218,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.428.700.000,00						7 Pokmas / Ormas	1.496.639.218,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.400.000.000,00						7 Unit	1.400.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							200.000.000,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit		7 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Salokaraja || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Salokaraja
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						147.640.000,00							157.345.602,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	147.640.000,00	Kab. Soppeng	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		7 Pokmas / Ormas	157.345.602,00	Kelurahan Salokaraja
	KECAMATAN MARIORIWAWO						**3.330.890.158,00**							**4.146.073.833,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.330.890.158,00**							**4.146.073.833,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**3.330.890.158,00**							**4.146.073.833,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.369.771.458,00**							**3.967.756.047,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***3.328.795.158,00***							***3.734.456.047,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo	100 %		100 %	100 %	3.328.795.158,00						100 %	3.734.456.047,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.080.815.658,00					-		3.295.620.792,94	
	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan						3.080.815.658,00					-		3.295.620.792,94	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan		42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	3.080.815.658,00						42 Orang/bulan	3.270.120.792,94	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.080.815.658,00							3.270.120.792,94	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan		42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	3.080.815.658,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		42 Orang/bulan	3.270.120.792,94	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						45.280.000,00					-		337.500.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						45.280.000,00					-		337.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.000.000,00						2 Laporan	78.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.000.000,00						3 Paket	26.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.286.800,00						4 Paket	170.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.993.200,00						1 Paket	30.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						744.000,00							21.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	744.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Paket	21.000.000,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.536.000,00							100.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.536.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		4 Paket	100.000.000,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.000.000,00							68.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Laporan	68.000.000,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						213.925.800,00					-		97.635.254,06	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						213.925.800,00					-		97.635.254,06	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.300.000,00						12 Laporan	62.635.254,06	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.625.800,00						2 Laporan	35.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						43.823.700,00							44.635.254,06	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	43.823.700,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	44.635.254,06	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						150.625.800,00							30.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	150.625.800,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.750.000,00					-		80.500.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik						29.750.000,00					-		80.500.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	10.386.600,00						7 Unit	25.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	19.363.400,00						1 Unit	13.000.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan						19.363.400,00							13.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	19.363.400,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Unit	13.000.000,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						6.886.600,00							22.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	4 Unit	6.886.600,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		7 Unit	22.000.000,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**360.000,00**							**88.448.892,00**	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						***180.000,00***							***88.448.892,00***	
		1.Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo	100 %		100 %	100 %	180.000,00						100 %	88.448.892,00	
		2.Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriwawo	100 %		100 %	100 %	180.000,00						100 %	88.448.892,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						360.000,00					-		44.224.446,00	
	persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan						360.000,00					-		44.224.446,00	
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	180.000,00						50 Dokumen	21.000.446,00	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	180.000,00						50 Laporan	23.224.000,00	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						180.000,00							21.000.446,00	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen		50 Dokumen	1 Dokumen	180.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		50 Dokumen	21.000.446,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						180.000,00							23.224.000,00	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	50 Laporan		50 Laporan	1 Laporan	180.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		50 Laporan	23.224.000,00	KECAMATAN MARIORIWAWO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**758.315.000,00**							**1.244.602.257,00**	
	Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan						***1.375.000,00***							***40.000.000,00***	
		1.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.375.000,00						100 Persentase	40.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.375.000,00					-		40.000.000,00	
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa						1.375.000,00					-		40.000.000,00	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.375.000,00						6 Laporan	40.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.375.000,00							40.000.000,00	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	1.375.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		6 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**180.000,00**							**107.402.225,00**	
	Terciptanya Lingkungan yang Tentram dan Tertib						***180.000,00***							***107.402.225,00***	
		1.Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo	100 %		100 %	100 %	180.000,00						100 %	107.402.225,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						180.000,00					-		107.402.225,00	
	Persentase Koordinasi yang Dilaksanakan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						180.000,00					-		107.402.225,00	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	180.000,00						12 Laporan	107.402.225,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						180.000,00							107.402.225,00	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	180.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	107.402.225,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**180.000,00**							**94.766.669,00**	
	Meningkatnya kualitas Pemerintahan dan Pengawasan di Desa						***180.000,00***							***94.766.669,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriwawo	100 %		100 %	100 %	180.000,00						100 %	94.766.669,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						180.000,00					-		94.766.669,00	
	Persentase Fasilitasi Rekomendasi Hasil Pembinaan Pemerintahan Desa yang ditindak lanjuti						180.000,00					-		94.766.669,00	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	180.000,00						10 Dokumen	94.766.669,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						180.000,00							94.766.669,00	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	1 Dokumen	180.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		10 Dokumen	94.766.669,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
	Kelurahan TettikenraraE						**434.178.300,00**							**717.951.129,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**434.178.300,00**							**717.951.129,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**434.178.300,00**							**717.951.129,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.369.771.458,00**							**3.967.756.047,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***19.738.300,00***							***63.650.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo	100 %		100 %	100 %	19.738.300,00						100 %	63.650.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.080.815.658,00					-		3.295.620.792,94	
	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan						3.080.815.658,00					-		3.295.620.792,94	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						45.280.000,00					-		337.500.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						45.280.000,00					-		337.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.000.000,00						2 Laporan	78.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.000.000,00						3 Paket	26.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.286.800,00						4 Paket	170.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.993.200,00						1 Paket	30.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							3.500.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		3 Paket	3.500.000,00	Kelurahan TettikenraraE
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						624.600,00							4.500.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	624.600,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		1 Paket	4.500.000,00	Kelurahan TettikenraraE

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.875.400,00							35.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.875.400,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		4 Paket	35.000.000,00	Kelurahan TettikenraraE
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							5.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan TettikenraraE
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						213.925.800,00					-		97.635.254,06	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						213.925.800,00					-		97.635.254,06	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.300.000,00						12 Laporan	62.635.254,06	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.625.800,00						2 Laporan	35.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.738.300,00							9.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.738.300,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	9.000.000,00	Kelurahan TettikenraraE
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.750.000,00					-		80.500.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik						29.750.000,00					-		80.500.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	10.386.600,00						7 Unit	25.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.000.000,00							1.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Tettikenraae || 0	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		7 Unit	1.000.000,00	Kelurahan TettikenraraE
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**758.315.000,00**							**1.244.602.257,00**	
	Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan						***414.440.000,00***							***642.301.129,00***	
		1.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	414.440.000,00						100 Persentase	642.301.129,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						756.940.000,00					-		1.204.602.257,00	
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan						756.940.000,00					-		1.204.602.257,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	356.940.000,00						6 Pokmas / Ormas	400.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	6 Unit	400.000.000,00						6 Unit	804.602.257,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							402.301.129,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	6 Unit	200.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		6 Unit	402.301.129,00	Kelurahan TettikenraraE
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						214.440.000,00							240.000.000,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	214.440.000,00	Kab. Soppeng	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		6 Pokmas / Ormas	240.000.000,00	Kelurahan TettikenraraE
	Kelurahan Labessi						**363.738.000,00**							**638.951.128,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**363.738.000,00**							**638.951.128,00**	
7.01	**KECAMATAN**						**363.738.000,00**							**638.951.128,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.369.771.458,00**							**3.967.756.047,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***21.238.000,00***							***65.650.000,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo	100 %		100 %	100 %	21.238.000,00						100 %	65.650.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.080.815.658,00					-		3.295.620.792,94	
	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan						3.080.815.658,00					-		3.295.620.792,94	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						45.280.000,00					-		337.500.000,00	
	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum						45.280.000,00					-		337.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.000.000,00						2 Laporan	78.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.000.000,00						3 Paket	26.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.286.800,00						4 Paket	170.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.993.200,00						1 Paket	30.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							3.500.000,00	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Opsen PKB	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		3 Paket	3.500.000,00	Kelurahan Labessi
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						624.600,00							4.500.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	624.600,00	Kab. Soppeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna		1 Paket	4.500.000,00	Kelurahan Labessi

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											mendukung produktivitas dan daya saing daerah				
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.875.400,00							35.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	6 Paket	1.875.400,00	Kab. Soppeng	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		4 Paket	35.000.000,00	Kelurahan Labessi
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.500.000,00							5.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	Kab. Soppeng	Opsen PKB Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		2 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Labessi
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						213.925.800,00					-		97.635.254,06	
	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						213.925.800,00					-		97.635.254,06	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.300.000,00						12 Laporan	62.635.254,06	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.625.800,00						2 Laporan	35.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.738.000,00							9.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.738.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Laporan	9.000.000,00	Kelurahan Labessi
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.750.000,00					-		80.500.000,00	
	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik						29.750.000,00					-		80.500.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	10.386.600,00						7 Unit	25.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.500.000,00							2.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	1 Unit	2.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Marioriwawo || Kelurahan Labessi || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		7 Unit	2.000.000,00	Kelurahan Labessi
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**758.315.000,00**							**1.244.602.257,00**	
	Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan						***342.500.000,00***							***562.301.128,00***	
		1.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	342.500.000,00						100 Persentase	562.301.128,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						756.940.000,00					-		1.204.602.257,00	
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan						756.940.000,00					-		1.204.602.257,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	356.940.000,00						6 Pokmas / Ormas	400.000.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	6 Unit	400.000.000,00						6 Unit	804.602.257,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							402.301.128,00	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		6 Unit	3 Unit	200.000.000,00	Kab. Soppeng	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		6 Unit	402.301.128,00	Kelurahan Labessi
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						142.500.000,00							160.000.000,00	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		6 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	142.500.000,00	Kab. Soppeng	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		6 Pokmas / Ormas	160.000.000,00	Kelurahan Labessi
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**4.585.094.342,00**							**11.818.689.742,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**4.585.094.342,00**							**11.818.689.742,00**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**4.585.094.342,00**							**11.818.689.742,00**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.783.802.358,00**							**4.698.553.986,00**	
	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan						***2.783.802.358,00***							***4.455.553.986,00***	
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %		100 %	100 %	2.783.802.358,00						100 %	4.455.553.986,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.426.836.358,00					MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		3.378.553.986,00	
	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.426.836.358,00					MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		3.378.553.986,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.426.836.358,00						25 Orang/bulan	3.347.553.986,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.426.836.358,00							3.347.553.986,00	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.426.836.358,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		25 Orang/bulan	3.347.553.986,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

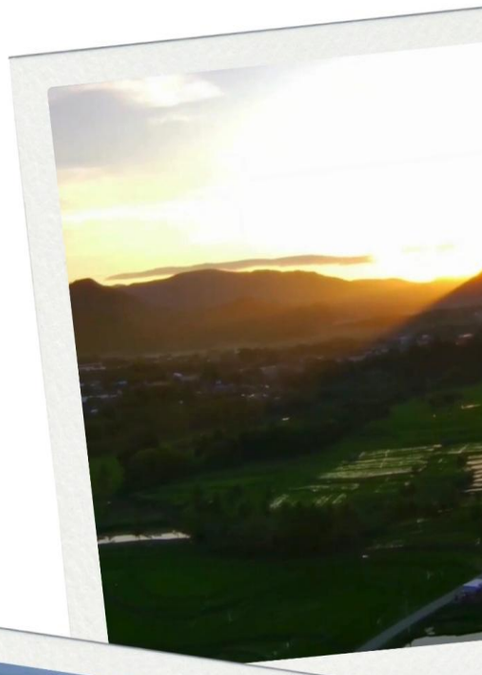
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						32.119.500,00					MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		353.000.000,00	
	Dokumen administrasi umum perangkat daerah						32.119.500,00					MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		353.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan		400 Laporan	400 Laporan	19.890.000,00						400 Laporan	260.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.320.500,00						2 Paket	50.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	4.909.000,00						3 Paket	20.000.000,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.909.000,00							20.000.000,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	4.909.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		3 Paket	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						7.320.500,00							50.000.000,00	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.320.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Lalabata Rilau || 0	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		2 Paket	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						19.890.000,00							260.000.000,00	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan		400 Laporan	400 Laporan	19.890.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		400 Laporan	260.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						303.866.500,00					MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		350.000.000,00	
	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah						303.866.500,00					MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		350.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	68.894.500,00						36 Laporan	100.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	234.972.000,00						12 Laporan	250.000.000,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						68.894.500,00							100.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	68.894.500,00	Kab. Soppeng	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		36 Laporan	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						234.972.000,00							250.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	234.972.000,00	Kab. Soppeng	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		12 Laporan	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.980.000,00					MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		131.000.000,00	
	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik						20.980.000,00					MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		131.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	20.980.000,00						4 Unit	35.000.000,00	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.980.000,00							35.000.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	20.980.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Soppeng || Kecamatan Lalabata || Kelurahan Botto || 0	Opsen PKB Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		4 Unit	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**462.608.000,00**							**1.162.471.144,00**	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan						***462.608.000,00***							***1.147.471.144,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0.86 %		0.86 %	0.86 %	462.608.000,00						0.86 %	1.147.471.144,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						462.608.000,00					Terpeliharanya kerukunan sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		1.162.471.144,00	
	Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						462.608.000,00					Terpeliharanya kerukunan sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		1.162.471.144,00	
		Jumlah Paskibraka	900 Orang		900 Orang	900 Orang	22.000.000,00						900 Orang	5.000.000,00	
		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	440.608.000,00						1 Dokumen	980.000.000,00	
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka						440.608.000,00							980.000.000,00	
	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	440.608.000,00	Kab. Soppeng	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		1 Dokumen	980.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						22.000.000,00							5.000.000,00	
	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	900 Orang		900 Orang	900 Orang	22.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		900 Orang	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**581.685.984,00**							**1.111.928.920,00**	
	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik						***581.685.984,00***							***1.111.928.920,00***	
		1.Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	581.685.984,00						100 Persentase	1.111.928.920,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						581.685.984,00					Meningkatnya kesadaran demokrasi dan partisipasi politik masyarakat		1.111.928.920,00	
	Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						581.685.984,00					Meningkatnya kesadaran demokrasi dan partisipasi politik masyarakat		1.111.928.920,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	350 Orang		350 Orang	350 Orang	581.685.984,00						350 Orang	1.044.928.920,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						581.685.984,00							1.044.928.920,00	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	350 Orang		350 Orang	350 Orang	581.685.984,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		350 Orang	1.044.928.920,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**200.000.000,00**							**1.737.388.938,00**	
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan						***200.000.000,00***							***1.737.388.938,00***	
		1.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	200.000.000,00						100 %	1.737.388.938,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						200.000.000,00					Terpeliharanya kerukunan sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		1.737.388.938,00	
	Rumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan						200.000.000,00					Terpeliharanya kerukunan sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		1.737.388.938,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang		150 Orang	150 Orang	200.000.000,00						150 Orang	1.657.388.938,00	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						200.000.000,00							1.657.388.938,00	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang		150 Orang	150 Orang	200.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		150 Orang	1.657.388.938,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**7.000.000,00**							**676.002.241,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
										NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat						***7.000.000,00***							***676.002.241,00***	
		1.Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	7.000.000,00						100 %	676.002.241,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						7.000.000,00					Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama		676.002.241,00	
	Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya						7.000.000,00					Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama		676.002.241,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560 Orang		560 Orang	560 Orang	7.000.000,00						560 Orang	601.002.241,00	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						7.000.000,00							601.002.241,00	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560 Orang		560 Orang	560 Orang	7.000.000,00	Kab. Soppeng	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		560 Orang	601.002.241,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**549.998.000,00**							**2.432.344.513,00**	
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan						***549.998.000,00***							***2.382.344.513,00***	
		1.Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100 %		100 %	100 %	549.998.000,00						100 %	2.382.344.513,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						549.998.000,00					Terpeliharanya kerukunan sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		2.432.344.513,00	
	Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						549.998.000,00					Terpeliharanya kerukunan sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		2.432.344.513,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	549.998.000,00						12 Dokumen	900.000.000,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						549.998.000,00							900.000.000,00	
	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	549.998.000,00	Kab. Soppeng	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat guna mendukung produktivitas dan daya saing daerah		12 Dokumen	900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H							**950.676.866.018,00**							**1.402.630.830.361,34**	





BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

"Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan"

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita (Visi dan Misi) dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator kinerja pembangunan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah juga menetapkan target untuk pencapaian SPM di Kabupaten Soppeng dan target SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

6.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Target indikator makro tahun 2027 merupakan target yang ditetapkan berdasarkan penyesuaian dalam RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045 maupun target yang ada dalam RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029 serta sinkronisasi yang dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator Makro tersebut dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 6.1. Indikator Makro Kabupaten Soppeng Tahun 2027

No	Indikator	Realisasi 2025	Asumsi Capaian 2026	Target 2027	
				RPJMD	RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,77	4,94	5,3	5,07
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,65	6,19	6	5,29-6,19
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,01	3,1	3	2,67-2,95
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,69	73	73,8	74,75-75,36
5	Rasio Gini	0,331	0,368	0,368	0,327-0,329
6	PDRB Perkapita (Rp)	72.360.000	73.570.175	77.570.175	76.370.000
7	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	2,31	2,53	2,57	2,28

No	Indikator	Realisasi 2025	Asumsi Capaian 2026	Target 2027	
				RPJMD	RKPD
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Belum Rilis	30,18	35,8	32,83
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,23	76,76	80	77,53

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) diambil dari indikator tujuan dan sasaran strategi RPJMD. Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Tahun 2027 disajikan dalam Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.2. Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Soppeng Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	
				RPJMD	RKPD
1	PDRB/kapita (T1.1)	Rp	72.363.000	77.196.093	76.370.000
2	Rasio Gini (T1.2)	Nilai	0,331	0,368	0,327-0,329
3	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	%	4,77	5,3	5,07
4	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	%	4,01	3	2,67-2,95
5	Angka kemiskinan (S1.3)	%	6,65	6	5,29-6,19
6	Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	%	11,04	11,5	11,5
7	Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)	%	11,43	8	12,5
8	Indeks Infrastruktur Daerah (T.3.1)	Indeks	72,53 (2024)	80,1	80,1
9	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1)	Indeks	2,91	3,42	3,42
10	Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	%	25,63	31,31	31,31
11	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2)	%	2,68	6,41	6,41
12	Indeks Desa (T4)	Nilai	-	79,62 (maju)	79,62 (maju)
13	Persentase Desa Mandiri (S.4.1)	%	40,82	25,00	44,90
14	Nilai daya dukung lingkungan (T5)	Nilai	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui
15	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)	Nilai	77,23	79,3	77,53
16	Indeks risiko bencana (S.5.2)	Nilai	157,58	127,21	127,21
17	Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	%	Belum Rilis	35,80	32,83
18	IPM (T6)	Nilai	73,69	73,8	74,75-75,36
19	Indeks kesehatan (S.6.1)	Nilai	83,4	84,2	84,2
20	Indeks Pendidikan (S.6.2)	Nilai	65,86	67,3	67,3
21	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)	Rp	10.929.000	11.980.000	11.980.000
22	Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)	Nilai	0	0	0
23	Indeks reformasi birokrasi (T7)	Nilai	70,03 (BB)	81 (BB)	81 (BB)
24	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)	Nilai	79,714	76,50	76,50
25	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)	Nilai	3,58 (B)	4,15 (A-)	4,15 (A-)
26	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)	Nilai	71,48	86,79	86,79
27	Nilai SAKIP (S.7.4)	Nilai	65,35 (B)	68,75 (B)	68,75 (B)

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

6.3. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan merupakan indikator kinerja daerah yang terdiri dari indikator makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 dan Permendagri 18 tahun 2020, SPM maupun SDG's/TPB. Indikator utama pembangunan yang di dalamnya adalah indikator kinerja daerah dibagi ke dalam aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator kinerja daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2027 tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 6.3 berikut ini.

Tabel 6.3. Capaian dan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	78,14	77,19	80,53	80,53	IUP
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	10,13	12,23	11,97	11,97	IUP
3	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	452,1	379,12	384,42	455,5	IUP
4	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/kapita	549,36	125.838.210	135.228.631	591,95	IUP
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	36,88 (2024)	35	38	38	IUP
6	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	0,393	0,38	0,38	0,399	IUP
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	77,23	76,76	79,3	77,53	IUP
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	5,59 (2024)	5,42	6,41	6,41	IUP
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	13,89 (2024)	18	20	20	IUP
10	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	20,31 (2023)	42	47	47	IUP
11	Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia		0,32	1,58	1,73	1,73	IUP
12	Indeks Pertanaman (IP) Padi	Nilai	208,45	160,43	162,53	210,55	IUP
13	Proporsi sawah irigasi		79,37	80,64	80,72	80,72	IUP
14	Skor Pola Pagan Harapan	Nilai	89,62	83,5	84,3	91,4	IUP
15	Konsumsi ikan	kg/kapita	99,97	61,13	62,96	99,99	IUP
16	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	Belum Rilils	30,21	35,8	3283	IUP
17	Indeks Risiko Bencana	poin	157,58	129,32	127,21	127,21	IUP
18	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,29	0,44	0,46	0,46	
19	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,09	0,2	0,22	0,15	
20	Rasio penduduk yang bekerja	%	96	93,87	93,97	97,47	
21	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km	161,18	184,23	185,23	185,23	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,77	4,7	5,3	5,07	Makro
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,65	6,3	6	5,29-6,19	Makro/IUP
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	72,36	81,14	77,196	76,37	Makro
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,01	3,1	3	2,67-2,95	Makro/IUP
5	Indeks Gini	angka	0,331	0,372	0,368	0,327-0,329	Makro/IUP
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	73,69	71,99	73,8	74,75-75,36	Makro
7	Usia Harapan Hidup	tahun	74,21	74,3	74,7	74,7	IUP
8	Prevalensi Stunting	%	26,6	23,14	22,63	22,63	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
9	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100	IUP
10	Cakupan Penemuan dan Pengobatan kasus tuberkolosis (treatment coverage)	%	42,51	40,4	40,8	44	IUP
11	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	84,8	83	84	84	IUP
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	78,8	98,14	98,18	98,18	IUP
13	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,59	8,59	8,67	8,67	IUP
14	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,4	13,45	13,67	13,67	IUP
15	Angka Literasi	Nilai	76,23	82,84	83,84	83,84	IUP
16	Angka Numerasi	Nilai	79,22 (2024)	81,22	82,22	82,22	IUP
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	13,51 (2024)	76,32	77,34	77,34	IUP
18	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	%	-	58,2	58,6	58,6	IUP
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	58,62 (2024)	59	59,12	59,12	
20	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	39,18	30,43	34,92	41,05	IUP
21	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	0,24	0,65	0,65	0,65	IUP
22	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi	%	100	100	100	100	IUP
23	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	64,55 (2024)	64,7	68,2	68,2	IUP
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	61,15 (2023)	63,67	65,35	65,35	IUP
25	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,281	0,38	0,36	0,26	IUP
26	Laju Inflasi	%	3,16	1,49	1,46	1,46	Makro
27	Angka Melek huruf	%	100	100	100	100	
28	persentase balita gizi buruk	%	0,096	0,008	0,007	0,007	
29	Prevalensi balita gizi kurang	%	5,51	13,4	13,2	5,2	
30	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	
31	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	60,61	72,65	73,54	73,54	IUP
32	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,01	3,1	3	2,67-2,95	
33	Rasio penduduk yang bekerja	%	96	62,89	63,41	97	
34	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,53	89,34	89,69	89,69	
35	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	17,65	15,89	16,01	17,9	
36	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
37	Indeks Pola Pangan Harapan (PPH)	%	89,62	83,5	84,3	91,4	IUP
38	Penguatan cadangan pangan	%	22,22	19,52	20,34	24,54	
39	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	%	31,85	26,02	26,34	33,14	
40	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	17,53 (2024)	17,23	18,34	18,34	
41	Produksi sektor pertanian (ton)	Ton	514.186	712	745,12	745.120	
42	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	34,8	34,12	34,23	36,55	
43	Produksi sektor perkebunan (Ton)	Ton	12.896	25,79	26,43	26.430	
44	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	
45	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,90 (2023)	0,28	0,32	0,32	
46	kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	4,11	4,34	4,65	4,65	
47	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,86	15,45	15,76	15,76	
48	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	11,04	11,43	11,65	11,65	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
49	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	%	-	3,87	4,28	4,28	
50	Pertumbuhan industri	%	1,6	0,53	0,63	1,83	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Angka Ketergantungan	%	47,43	45,65	45,21	45,21	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	11,04	11,25	11,5	11,65	IUP
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,56	1,64	1,66	1,66	IUP
4	Jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara (orang) / Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	Jiwa	173527	263000	265000	265000	IUP
5	Jumlah industri ekonomi kreatif di kab/kota	Unit	80	70	80	100	IUP
6	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota	%	100	100	100	100	IUP
7	Persentase koperasi sehat di kab/kota	%	66,13	13,71	13,82	68,5	IUP
8	Return on Aset (ROA) BUMD (%)		4,91	-4,47	-4,34	5,15	IUP
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	44,92	55,34	56,34	56,34	IUP
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,61	73,12	73,33	73,33	IUP
11	Indeks Inovasi Daerah	skor	51,09	53,54	55,87	55,87	IUP
12	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD		0,01	0,025	0,03	0,03	IUP
13	Indeks Ekonomi Hijau	Nilai	64,71 (2023)	51,94	52,56	52,56	IUP
14	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	IUP
15	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%	4,4	10,69	10,69	10,69	IUP
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	36,5	41,67	42,45	42,45	IUP
17	Net Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-492,33 (2023)	-455	-440	-440	IUP
18	Proporsi kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi		2,31	2,53	2,57	2,57	IUP
19	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin	72,53 (2024)	79,32	81,42	81,42	IUP
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	64,89	76,16	79,12	79,12	IUP
21	Persentase Desa Mandiri	%	40,82	10,5	11,5	44,9	IUP
22	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,26	0,24	0,25	0,28	IUP
23	Tingkat Inflasi	%	3,16	1,49	1,46	1,46	Makro/IUP
24	Pertumbuhan Investasi Daerah	%	41	77,68	78,23	78,23	IUP
25	Nilai tukar petani (Sektor Pangan)	Nilai	106	105,23	105,67	108,53	IUP
26	Jumlah produksi perikanan	Ton	2.989,89	3.168,23	3.183,56	3.183,56	IUP
27	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	4,43	4,11	4,14	4,5	
28	Presentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	18,37	14,89	15,05	20,05	
29	Rasio Ketergantungan	%	17,65	45,01	44,87	44,87	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	97,66	97,8	97,85	97,85	IUP
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	2,98	2,8	2,9	3	IUP
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,58	4,10 (A-)	4,15 (A-)	4,15 (A-)	IUP
4	Indeks Survey Penilaian Integritas	Nilai	80,48	75	76	82	IUP
5	Indeks Pencegahan Korupsi	Nilai	71,48	82	86,79	86,79	IUP
6	Indeks Maturitas	Nilai	3,02	3,06	3,08	3,08	IUP
7	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	IUP
8	Persentase tindak kriminal yang ditangani	%	84	84	84	88	IUP
9	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	%	20	25	25	25	IUP
10	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,41	3,3	3,7	3,7	IUP
11	Jumlah kerjasama Provinsi/Kabupatemn/Kot	Kerjasama	39 (2024)	157	167	167	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
	a Kembar/Bersaudara (Sister Province/Sister City)						
Layanan Urusan Wajib							
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Pendidikan						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	65,74	70,62	71,36	71,36	
1.2	Angka Partisipasi kasar						
	Angka Partisipasi kasar SD/ MI Paket A	%	98,34	99,38	99,47	99,47	
	Angka Partisipasi kasar (APM) SMP/ MTs Paket B	%	99,43	99,56	99,78	99,78	
1.4	Angka Partisipasi Murni						
01.04.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Paket A	%	91,83	92,6	92,88	92,88	
01.04.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Paket B	%	83,16	82,62	82,86	82,86	
1.5	Angka Partisipasi Sekolah:						
01.05.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI Paket A	%	96,63	99,22	99,4	99,4	
01.05.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs Paket B	%	100,32	97,38	97,44	97,44	
1.6	Angka Putus Sekolah:						
01.06.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI	%	0,17	0,041	0,03	0,03	
01.06.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	0,67	0,9	0,8	0,8	
1.7	Angka Kelulusan:						
01.07.1	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	99,71	100	100	100	
01.07.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	99,07	99,91	99,94	99,94	
1.8	Angka Melanjutkan (AM):						
01.08.1	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI ke SMP/ MTs	%	99,6	100	100	100	
01.08.2	Angka Melanjutkan (AM) SMP/ MTs ke SMA/ SMK / MA	%	96,32	100	100	100	
1.9	Fasilitas Pendidikan:						
01.09.1	Sekolah Pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik	%	71,86	80,2	80,66	80,66	
01.09.2	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs DAN SMA/ SMK/ MA kondisi bangunan baik	%	79,81	82,46	82,86	82,86	
01.10	Rasio ketersedian sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	115,47	100	100	100	
01.12	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	%	0,12	0,12	0,12	0,12	
01.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta Aksara)	%	100	97,45	97,78	100	
01.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	93,91	97,05	97,44	97,44	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	69,69	100	100	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	91,83	100	100	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	83,16	100	100	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	1,36	100	100	100	
2	Kesehatan						DINAS KESEHATAN
02.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	18,1	1,03	0,92	0,92	
02.2	Angka kelangsungan hidup bayi	%	98,19	98,79	98,82	98,82	
02.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	0,9	0,05	0,04	0,04	
02.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	14,03	0,26	0,24	0,24	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
02.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	181	157,5	155,5	155,5	
02.6	Rasio posyandu per satuan balita	Per Satuan Balita	32,3	27 28	29	34	
02.7	Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,26	0,31	0,32	0,32	
02.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,0041	0,01	0,02	0,02	
02.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,43	0,51	0,53	0,53	
02.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	5,83	6,17	6,62	6,62	
02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	
02.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	
02.13	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child* Immunization (UCI)	%	0	87	88	88	
02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	
02.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	1,55	1,02	0,78	0,78	
02.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	61,76	69,2	71,2	71,2	
02.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	0	0	0	0	
02.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	20,71	100	100	100	
02.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	31,78	100	100	100	
02.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	219,62	0	0	0	
02.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	23,16	0	0	0	
02.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	34,48	40,4	40,6	40,6	IUP
02.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	84,8	40,4	40,6	88,2	IUP
02.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	
02.25	Penderita diare yang ditangani	%	107,4	100	100	100	
02.26	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	7,44	0	0	0	
02.27	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	0	
02.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0	0	0	
02.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	0	0	
02.30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	%	0,0078	0	0	0	
02.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	9,31	100	100	100	
02.34	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100	100	
02.35	Cakupan puskesmas	%	212,5	213	213,25	213,25	
02.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	164,29	63,16	63,36	100	
02.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	69,59	100	100	100	
02.38	Cakupan pelayanan nifas	%	78,51	100	100	100	
02.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	98,23	100	100	100	
02.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	99,4	100	100	100	
02.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
02.42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	92,51	100	100	100	
02.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	13,73	100	100	100	
02.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	
02.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	0	100	100	100	
	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Poin	0,12	0,16	0,17	0,17	
	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten atau kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	38,5	38,6	38,6	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	45,6	45,7	45,7	
	Persentase penderita SDM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	45	56	56	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	76,3	76,4	76,4	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	0,25	0,25	0,25	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
03.1	Pekerjaan Umum:						
03.01.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,56	0,59	0,61	0,61	
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Poin	0,004	0,006	0,007	0,007	
3.1.3.	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	9,76 (2023)	2,89	2,69	2,69	
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	56,24	55,21	55,31	58,12	
03.01.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%	46,80 (2023)	47,36	48,08	48,08	
03.01.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	93,08	77,4	77,6	95,15	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
03.01.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	54,21	54,29	54,36	54,36	
03.01.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	2,28	0,7	0,6	0,6	
03.01.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	88,11	84,91	85,17	90,04	
03.01.13	Rasio Jaringan Irigasi	Poin	30,13 (2024)	31,34	32,56	32,56	
03.01.14	Persentase penduduk berakses air minum	%	99,35	99,4	99,51	99,51	
03.01.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. perkotaan dan perdesaan	%	21,59	44,83	44,91	44,91	
03.01.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	15,38	16,89	17,78	17,78	
03.01.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,165 (2023)	0,017	0,017	0,017	
03.01.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,0024	0,00202	0,00202	0,0029	
03.2	Penataan Ruang:						
03.02.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	5,17	5,06	5,08	5,08	
03.02.6	Ketaatan terhadap RTRW	%	60,53 (2024)	61,23	61,45	61,45	
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	10,25	0,07	0,08	0,08	
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	Tidak Ada Pantai				
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	88,12	0,88	0,9	0,9	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	99,35	44,83	45,03	45,03	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	77,3	77,4	77,4	
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Poin	100	0,94	0,95	0,95	
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	%	56,24	57	59	59	
	Rasio tenaga perator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		0,396	0,66	0,76	0,76	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	1	1	1	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
04.1	Rasio rumah layak huni	Nilai	0,23	0,26	0,28	0,28	
04.2	Rasio permukiman layak huni	Nilai	0,98	0,31	0,33	1,15	
04.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	93,62	92,56	92,78	94,98	
04.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	65,54	65,56	65,76	65,76	
04.5	Persentase pemukiman yang tertata	%	98,17	0,76	0,77	0,77	
04.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,049	0,04	0,03	0,03	
04.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		1,98	3,94	3,89	3,89	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
04.9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	46,25	100	100	100	
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	%	93,33	0	0	100	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0,0486	0	0	0	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6,38	6,82	6,25	6,25	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0,29	0,31	0,32	0,32	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
	Cakupan petugas :						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
05.1	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	128	100	100	100	
05.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	%	100	100	100	100	
	Cakupan pelayanan :						
05.3	bencana kebakaran kabupaten/kota	%	94,2	94,6	94,8	94,8	
05.4	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	87,05	84,21	84,3	91	
05.5	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	21,43	100	100	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	100	100	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa	100	100	100	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa	100	100	100	100	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	9,3	9,13	8,86	8,86	
6	Sosial						DINAS SOSIAL
06.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	
06.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	100	100	
06.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	
06.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0	100	100	100	
06.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	
06.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang	%	0	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
	menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial						
06.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	
06.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	
06.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	100	100	
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100	100	100	100	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	Tenaga Kerja						DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
01.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per Tahun	0	0	0	0	
01.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	12,22	26,48	26,98	26,98	
01.4	Keselamatan dan perlindungan	%	1,72	5,54	6,69	6,69	
01.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	39,18	57,56	58,93	58,93	
01.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	50	100	100	100	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifiat Kompetensi	%	0,09	0,15	0,25	0,25	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	0,55	0,39	0,4	0,4	
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	12,22	25,91	26	26	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	132.400	123.337.450	123.337.500	123.337.500	
	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	1	1	1	1	
	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	KK	85	85	85	85	
	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Kawasan	1	1	1	1	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
							KELUARGA BERENCANA
02.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	10,2	9,12	9,34	9,34	
02.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	25	25	25	
02.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	89,8	91,41	91,51	91,51	
02.4	Rasio KDRT	Nilai	0,011 (2024)	0,08	0,07	0,07	
02.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	97,24 (2024)	97,58	97,72	97,72	
02.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100 (2024)	100	100	100	
02.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100 (2024)	100	100	100	
02.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100 (2024)	100	100	100	
02.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100 (2024)	100	100	100	
02.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100 (2024)	100	100	100	
02.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	2,22 (2024)	100	100	100	
02.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100 (2024)	100	100	100	
02.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Poin	0,95 (2024)	0,954	0,955	0,97	
02.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Poin	1,06 (2024)	1,08	1,08	1,08	
02.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Poin	1,43 (2024)	1,46	1,47	1,47	
02.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Poin	1,66 (2023)	1,69	1,72	1,72	
02.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Poin	0,98 (2024)	0,983	0,984	0,994	
02.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	%	17,62	19,48	19,68	19,68	
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,36 (2024)	8,66	8,86	8,86	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	0,06 (2024)	100	100	100	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	9,64 (2024)	9,24	9,04	9,04	
3	Pangan						DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
03.1	Ketersediaan pangan utama	%	411,88	340,55	340,75	418,75	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
03.2	Ketersediaan energi perkapita	Kkal	11.358	11.287	11.995	11.995	
	Ketersediaan protein perkapita	Gram	273,21	282,101	283,59	283,59	
03.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	100	100	
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	149,64	65,04	65,34	65,34	
4	Pertanahan						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
04.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	36,78	100	100	100	
04.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100	100	
04.3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		100	100	100	100	
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		100	100	100	100	
	Tersedianya tanah untuk masyarakat		100	100	100	100	
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	
5	Lingkungan Hidup						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
05.26	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
05.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
05.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	ada	ada	ada	
05.29	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Poin	75,9	54,78	55,12	77,92	
05.30	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Poin	85,64	95,46	95,66	95,66	
05.31	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	Poin	65,14	44,78	44,87	67,87	
05.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	1,34	8	8,5	8,5	
05.33	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota		Ada	Ada	Ada	Ada	
05.34	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.35	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.36	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.37	Penetapan hak MHA	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.38	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan		0	0	0	0	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
05.39	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana		0	0	0	0	
05.40	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	1	0	0	2	
05.41	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak ada	Ada	ada	ada	ada	
05.42	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	
05.43	Timbulan sampah yang ditangani	%	80,29	82	83	83	
05.44	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	13,48	16	17	17	
05.45	Persentase cakupan area pelayanan	%	31,03	31	32	32	
05.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	80,29	80,7	80,8	80,8	
05.47	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	73	74,45	74,84	74,84	
05.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0	0	0	0	
05.49	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	0	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	10	100	100	100	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	0	100	100	100	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
06.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,99	0,99	0,99	0,99	
06.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Poin	1,00	0,99	0,99	0,99	
06.3	Rasio pasangan berakte nikah	Poin	0,79	0,8	0,82	0,88	
06.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
06.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
06.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,74	98,81	98,82	99,3	
06.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	99,61	99,4	99,45	99,75	
	Perekaman KTP Elektronik	%	100	100	100	100	
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	100	100	100	100	
	Kepemilikan akta kelahiran	%	100	100	100	100	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100	100	100	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
07.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	96,4	96,6	100	
07.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	1	1	
07.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	10	6	7	10	
07.4	Persentase LPM aktif	%	100	100	100	100	
07.5	Persentase LPM Berprestasi	%	100	6	7	100	
07.6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	
07.7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
07.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	34,6	35	35,2	36,42	
07.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	80	82	83	83	
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	18,37	23,42	24,3	24,3	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
08.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,09	0,2	0,22	0,15	
08.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,07 (2024)	2,1	2,1	2,25	
08.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100 (2024)	100	100	100	
08.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	38,24 (2024)	38,28	39	39,9	
08.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	0	0	0	0	
08.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	9 (2024)	11	12	12	
08.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal. non formal. dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerja Sama	3 (2024)	5	6	6	
08.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Per Keluarga	0,67 (2024)	2	2	2	
08.9	Rasio Akseptor KB	%	64,25 (2024)	65,25	65,5	65,5	
08.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	64,25 (2024)	64,75	65	65	
08.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	20,65 (2023)	19,06	19,04	19,04	
08.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	32,46 (2024)	31,85	31,65	33,35	
08.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,64 (2024)	9,86	9,63	9,63	
08.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22,33 (2024)	20,5	21	23,15	
08.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	31,66 (2024)	32,05	32,45	32,45	
08.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	100 (2024)	82,5	84	100	
08.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	%	78,45 (2024)	78,65	78,75	78,75	
08.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	72,04 (2024)	72,08	72,1	72,1	
08.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100 (2024)	100	100	100	
08.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan	%	6,63 (2024)	62,8	63	7,58	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
	Konseling Remaja/Mahasiswa						
08.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100 (2024)	100	100	100	
08.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	140,52 (2024)	100	100	100	
08.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100 (2024)	100	100	100	
08.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	75,12 (2024)	76,3	76,7	76,7	
08.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100 (2024)	100	100	100	
08.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100 (2024)	100	100	100	
08.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	jiwa	0	0	0	0	
08.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100 (2024)	100	100	100	
08.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	60,96 (2024)	65	68	68	
08.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21 (2023)	21,5	22	22	
08.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,58 (2024)	1	1,01	1,01	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%		63,45	63,87	63,87	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%		9,86	9,63	9,63	
9	Perhubungan						DINAS PERHUBUNGAN
09.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang		850	900	900	
09.2	Rasio ijin trayek	Poin		0	0	0	
09.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit		1115	1120	1120	
09.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit		2	2	2	
09.5	Persentase layanan angkutan darat	%		46,64	46,84	46,84	
09.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%		52,35	52,45	52,45	
09.7	Pemasangan Rambu-rambu			100	100	100	
	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Poin	1120	86	87	1200	
	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V / C	0,0951	0,09	0,09	0,09	
10	Komunikasi dan Informatika						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		550	565	570	570	
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		73,41	66,87	66,97	76,97	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	81,28	82	83	83	
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%		91,87	91,97	91,97	
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	63,14	66,87	66,97	66,97	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%		92,18	92,48	92,48	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%		100	100	100	
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		80,82	81,37	81,37	
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
11.1	Persentase koperasi aktif	%	26,05	92,66	92,8	92,8	
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	99,41	99,4	99,41	99,65	
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	%	100	99,4	99,41	100	
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,41	99,4	99,41	99,65	
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%		39,31	39,54	39,54	
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%		7,76	7,96	7,96	
12	Penanaman Modal						DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	125	72	74	140	
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	102.472.369.085	95.338.387.035	105.158.434.885	105.158.434.885	
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	41	77,33	77,44	77,44	
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%		77,22	77,33	77,33	
13	Kepemudaan dan Olah Raga						DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%		24	25	25	
13.2	Persentase Wirausaha Muda	%	17,54	54	55	55	
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	%	82,14	57	58	58	
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	58,33	58,63	59,58	60,58	
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	16,81	16,63	16,83	16,95	
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	68	115	120	120	
13.7	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	68	115	120	120	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin		1,25	1,3	1,3	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%		32,76	32,9	32,9	
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Prestasi		115	120	120	
14	Statistik						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
14.3	Buku "PDRB"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%		100	100	100	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%		100	100	100	
15	Persandian						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	91,18	91,45	91,65	91,65	
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%		280	285	285	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%		100	100	100	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%		100	100	100	
16	Kebudayaan						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	8 (2023)	11	12	12	
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	39,02 (2023)	41	43	43	IUP
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	4 (2023)	4	4	4	
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	16 (2023)	16	16	16	
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%		21,88	21,88	21,88	
17	Perpustakaan						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,67	0,88	1,08	1,08	
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	31,78	31,78	31,92	32,52	
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,04	0,51	0,52	0,52	
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	8.001	113.102	113.376	11.337	
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul buku	12.016	111.200	111.300	13.000	
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	4	100	100	100	
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai		52,92	53,45	53,45	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%		59	59,12	59,12	
18	Kearsipan						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100	100	100	100	
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	3	4	5	5	
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%		100	100	100	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan	%		100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
	pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat						
Layanan Urusan Pilihan							
1	Pariwisata						DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
01.1	Kunjungan wisata	%	66,11	159	169	169	
01.2	Lama kunjungan Wisata (hari)	Hari	2	2	2	2	
01.3	PAD sektor pariwisata	%	1,08	1,84	1,86	1,86	
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%		65	67	67	
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten /Kota	%		47	48	48	
	Tingkat Hunian Akomodasi	%		12	14	14	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%		1,58	1,61	1,61	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%		0,2	0,2	0,2	
2	Pertanian						DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
02.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	31,85	26,02	26,34	33,14	
02.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	17,53 (2024)	17,74	17,84	17,84	
02.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	34,8	38,05	38,06	38,06	
02.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	
02.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		5,49 (2024)	5,7	5,8	5,8	
02.6	Cakupan bina kelompok petani	%	100	100	100	100	
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton / Ha	5,29	5,77	6,14	6,14	
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	0	0	0	0	
5	Perdagangan						DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
05.1	Ekspor Bersih Perdagangan (US$)		226,66	-410165,36	-396481,71	-396481,71	
05.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100	100	100	100	
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%		44	49	49	
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%		45,98	46,42	46,42	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%		38,41	48,96	48,96	
6	Perindustrian						DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
06.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	66,3	66,9	67,3	67,3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%		13,91	14,41	14,41	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%		100	100	100	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%		100	100	100	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%		0	0	0	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%		0	0	0	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			92	93	93	
	1. Keterkinian informasi industri :						
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	%		50	50	50	
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	%		25	25	25	
	- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	%		0	0	0	
	2. Kelengkapan informasi industri meliputi :						
	- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	%		10	10	10	
	- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	%		10	10	10	
8	Kelautan dan Perikanan						DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
08.1	Produksi perikanan	ton	2.989,89	3.168,23	3.183,56	3.183,56	IUP
08.2	Konsumsi ikan	kg/kapita	99,97	61,13	62,96	100	IUP
08.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	6,8	0	0	14	
08.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	80,83	87,2	87,4	87,4	
08.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	N.a	125	125	125	
08.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	N.a	0,14	0,14	0,14	
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	Ton		3439	3537,6	3537,6	
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton		2978,1	3067,5	3067,5	
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		460,9	470,1	470,1	
Penunjang Urusan							
1	Perencanaan Pembangunan						BAPPELITBANGDA
01.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
01.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
	telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA						
01.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
01.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
01.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%		100	100	100	
01.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%		100	100	100	
01.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	
2	Keuangan						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
02.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP/TMT/TW	WTP	WTP	WTP	WTP	
02.2	Persentase SILPA	%	7,55	0,89	0,75	0,75	
02.3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	7,55	0,89	0,75	0,75	
02.4	Persentase program yang tidak terlaksana	%	0,027	0	0	0	
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	%	0,025	0	0	0	
02.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	33,79	20	20	20	
02.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	26,93	10	10	10	
02.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	88,38	87,04	87,06	89,16	
02.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,43	0,29	0,3	0,52	
02.9	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Poin		11,48	11,49	11,49	
	Rasio PAD	Poin		14,99	15	15	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Poin		74,76	74,77	74,77	
	Opini Laporan Keuangan	WTP/WDP/		WTP	WTP	WTP	
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%		5,31	5,41	5,41	
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%		15,2	15,3	15,3	
	Assets Management						
	Apakah ada daftar aset tetap?	Ya/ Tidak		Ya	Ya	Ya	
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap	Ya/ Tidak		Tidak	Tidak	Tidak	
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan	Ya/ Tidak		Tidak	Tidak	Tidak	
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ya/ Tidak		Ya	Ya	Ya	
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%		1,44	1,55	1,55	
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA
03.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	20	22	23	23	
03.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	2,63	15	20	20	
03.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	45,05	10,63	10,69	50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian tahun 2025	Asumsi Target 2026	Target Tahun 2027		KET.
					RPJMD	RKPD	
03.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	26	33	33	33	
03.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan Administrasi	1102	449	449	1130	
03.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan Fungsional	4036	3983	3984	4065	
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%		12,25	13,25	13,25	
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%		0,26	0,27	0,27	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%		0,82	0,83	0,83	
4	Penelitian dan pengembangan						BAPPPELITBANGDA
04.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	
04.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%		100	100	100	
	Penerapan SIDa:						
04.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	41,18	41,38	41,48	44	
04.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100	100	100	100	
5	Pengawasan						INSPEKTORAT DAERAH
05.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	37,5	48,85	48,95	48,95	
05.2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,12	0,13	0,12	0,1	
05.3	Jumlah temuan BPK	Temuan	9	20	18	7	
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	
6	Sekretariat Dewan						SEKRETARIAT DPRD
06.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
06.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
06.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7	**PENGADAAN**						SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	
	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	1,36	2,32	2,5	2,5	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	99,97	95,48	95,6	99,99	

6.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Capaian Indikator SPM Kabupaten Soppeng dan target Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.4. Capaian dan Target Indikator Kinerja SPM Kabupaten Soppeng Tahun 2027

Urusan	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027
PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;	84,02%	100%
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	96,73%	100%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan Dasar)	67,60%	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	1,36%	100%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan Kesetaraan)	81,18%	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya
KESEHATAN	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
	Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus Militus usia 15 tahun ke atas yang	100%	100%

Urusan	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027
	mendapatkan pelayanan kesehatan		
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
PEKERJAAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAM	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	93%	100%
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	100%
KETENTRAMAN KETERTIBAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100%	100%
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%
SOSIAL	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitsa terlantar yang memperoleh rehabilitsai sosial di luar panti	100%	100%
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%
	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan	100%	100%

Urusan	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027
	jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota		

6.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk mencapai dunia yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan pada tahun 2030. Agenda ini terdiri dari 17 tujuan yang saling terkait, seperti mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, serta memastikan perdamaian dan kemakmuran bagi semua orang. Tujuan utama SDGs meliputi pengentasan kemiskinan dan kelaparan, memastikan kesehatan yang baik dan kesejahteraan, meningkatkan pendidikan berkualitas, pencapaian kesetaraan gender, penyediaan air bersih dan sanitasi, memastikan energi bersih dan terjangkau, mendorong pertumbuhan ekonomi, pekerjaan layak, dan inovasi, mengurangi ketimpangan, menciptakan kota dan komunitas yang berkelanjutan, melakukan aksi nyata untuk mengatasi perubahan iklim, melestarikan ekosistem laut dan darat, mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat dan memperkuat kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk capaian SDGs Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Soppeng Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.5. Target Indikator Kinerja SDGs / TPB Kabupaten Soppeng Tahun 2027

NO	Indikator TPB	Satuan	Asumsi Capaian 2026	Target 2027
Tujuan : Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan				
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Poin	5,83	4,7
Tujuan : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan				
2	Jumlah Kecamatan yang Terbangun Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem terpusat Skala Kota, Kawasan, dan Komunal	Kecamatan	6	8
3	Jumlah Kecamatan yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kecamatan	6	8
4	Indikator Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku	%	9	10
Tujuan : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun				
5	Indikator Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan	Rumah Tangga	2000	2000
6	Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI/ Sederajat	%	100	100
7	Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Sederajat	%	0,83	0,88
Tujuan : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan				
8	Indikator Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita	%	17,5 (SKI/SSGI)	16,3 (SKI/SSGI)
9	Indikator Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil	Poin	0,005	0,004
Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia				
10	Indikator Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terpilih	%	100%	100%
11	Proporsi Kematian Akibat Keracunan	Poin	0,2	0,17
Tujuan : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua				
12	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	Poin	99,38	99,47

NO	Indikator TPB	Satuan	Asumsi Capaian 2026	Target 2027
Tujuan : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan				
13	Indikator Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Emosional) oleh Pasangan atau Mantan Pasangan dalam Dua Belas Bulan Terakhir		17	17
14	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Emosional) oleh Orang Lain selain Pasangan dalam Dua Belas Bulan Terakhir		17	17
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh , serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua				
15	Indikator Laju Pertumbuhan PDB perkapita	%	4,94	5,3
16	Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	%	0,01	0,01
17	Indikator Jumlah Wisatawan Mancanegara	Wisatawan	11	100
18	Indikator Jumlah Wisatawan Nusantara	Wisatawan	300.000	300.000
19	Indikator Devisa Sektor Pariwisata	Rupiah	200.000.000	300.000.000
Tujuan : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati				
20	Proporsi Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi terhadap Luas Lahan Keseluruhan		29.000	29.500
Tujuan : Menguatkan Masyarakat yang dan damai untuk pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan				
21	Indikator Proporsi Perempuan dan Laki-Laki muda Umur 18-24 Tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 Tahun		24	20
22	Indikator Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)	%	7%	10%
23	Indikator Proporsi Anak Umur di Bawah Lima Tahun yang Kelahirannya dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil Menurut Umur		14.500	15.000
Tujuan : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan				
24	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi terhadap PDB Menurut Sumbernya	Poin	2,5	3
25	Indikator Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	Poin	0,12	0,15
26	Indikator Jumlah Metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam Sistem informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	Poin	17	18



BAB VII
PENUTUP

"Kesimpulan dan Saran terhadap keberhasilan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi misi serta program-program prioritas yang telah direncanakan"

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 disusun agar terjadi keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, konsistensi antar dokumen perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada capaian kinerja. Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029. RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 dilaksanakan dengan tema ***"Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa"***. Perwujudan prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan Tahun 2027 selain diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045, RPJMD/RPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan program prioritas nasional dalam RKP. Selain itu juga mengacu pada evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta memperhatikan visi, misi, dan program kerja kepala daerah terpilih. Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2027.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2027 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain baik perencanaan tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Perangkat Daerah (PD). Oleh karena itu, dalam penyusunannya telah diselaraskan dengan dokumen yang ada pada tingkatan tersebut. Seluruh proses penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng juga telah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai amanah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi

yang berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata CaraPerubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan Perangkat Daerah pada posisi strategis, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan kolektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian Perangkat Daerah dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting. Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sebagai berikut :

1. Masing-masing Perangkat Daerah agar menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2027 untuk menjaga keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan;
2. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2027 dilakukan dengan pemantauan, evaluasi dan penerapan manajemen risiko yang berlangsung secara sistematis sejak tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Manajemen risiko pada penyusunan RKPD agar mampu mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.
3. Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2027 dengan sebaik baiknya;
4. Pada akhir tahun anggaran 2027, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2 Kesimpulan

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan verifikasi Renja seluruh Perangkat Daerah;
2. RKPD menjadi pedoman utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027;
3. RKPD selain sebagai pedoman dalam penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah juga sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan;

4. Pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 diupayakan dapat sinergis dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.

Dokumen RKPD Kabupaten Soppeng 2027 ini diharapkan menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Kabupaten Soppeng untuk mendukung Visi Kabupaten Soppeng yaitu ***"Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan"***.

BUPATI SOPPENG,

SUWARDI HASENG









BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jl. Salotungo Watansoppeng, Kabupaten Soppeng (90811) 0484-21342

https://facebook.com/kabupaten.soppeng/ https://soppengkab.go.id

bappelitbangda@soppengkab.go.id